

PROSPEKTUS

JADWAL					
Tanggal Efektif	:	6 Desember 2024	Tanggal Pengembalian Uang Pemasangan	:	13 Desember 2024
Masa Penawaran Umum	:	9 – 10 Desember 2024	Tanggal Distribusi Obligasi dan Sukuk Ijarah secara Elektronik	:	13 Desember 2024
Tanggal Penjatahan	:	11 Desember 2024	Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	:	16 Desember 2024

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OKJ") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT PETROSEA TBK ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.



PT PETROSEA TBK

Kegiatan Usaha:

Bergerak dalam bidang jasa konstruksi, jasa pertambangan, jasa pengangkutan dan pergudangan/logistik, serta aktivitas konsultan manajemen Berkedudukan di Tangerang Selatan, Indonesia

Kantor Pusat:

Indy Bintaro Office Park, Building B
Jl. Boulevard Bintaro Jaya Blok B7/A6
Sektor VII, CBD Bintaro Jaya
Tangerang Selatan 15224
Telp.: 021-29770999
Fax: 29770998
Email: corporate.secretary@petrosea.com
Website: www.petrosea.com

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I PETROSEA DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR Rp2.000.000.000.000,- (DUA TRILIUN RUPIAH) ("OBLIGASI BERKELANJUTAN")

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:

OBLIGASI BERKELANJUTAN I PETROSEA TAHAP I TAHUN 2024 DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH) ("OBLIGASI")

Obligasi ini terdiri dari 4 (empat) Seri, yaitu Obligasi Seri A, Seri B, Seri C dan Seri D yang masing-masing ditawarkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Obligasi ini diterbitkan tanpa warant kecuali, Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"). Obligasi ini memberikan pilihan bagi Masyarakat untuk memilih Seri Obligasi yang dikehendaki sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Obligasi yang ditawarkan adalah sebesar Rp47.000.000.000,- (empat puluh tujuh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,50% (enam koma lima puluh persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri A adalah 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo.
- Seri B : Jumlah Obligasi yang ditawarkan adalah sebesar Rp171.640.000.000,- (seratus tujuh puluh satu miliar enam ratus empat puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,00% (delapan persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri B adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo.
- Seri C : Jumlah Obligasi yang ditawarkan adalah sebesar Rp465.400.000.000,- (empat ratus enam puluh lima miliar empat ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,75% (delapan koma tujuh puluh lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri C adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo.
- Seri D : Jumlah Obligasi yang ditawarkan adalah sebesar Rp315.960.000.000,- (tiga ratus lima belas miliar Sembilan ratus enam puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,50% (sembilan koma lima puluh persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri D adalah 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama masing-masing seri akan dilakukan pada tanggal 13 Maret 2025 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi adalah pada tanggal 20 Desember 2025 untuk Seri A, tanggal 13 Desember 2027 untuk Seri B, tanggal 13 Desember 2029 untuk Seri C dan tanggal 13 Desember 2031 untuk Seri D.

DAN

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I PETROSEA DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH) ("SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN")

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:

SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I PETROSEA TAHAP I TAHUN 2024 DENGAN SISA IMBALAN IJARAH SEBESAR Rp500.000.000.000,- (LIMA RATUS MILIAR RUPIAH) ("SUKUK IJARAH")

Sukuk Ijarah ini terdiri dari 4 (empat) Seri, yaitu Sukuk Ijarah Seri A, Seri B, Seri C dan Seri D yang masing-masing ditawarkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah. Sukuk Ijarah ini diterbitkan tanpa warant, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterbitkan atas nama KSEI, Sukuk Ijarah ini memberikan pilihan bagi Masyarakat untuk memilih seri Sukuk Ijarah yang dikehendaki sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri A sebesar Rp33.000.000.000,- (tiga puluh tiga miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp2.145.000.000,- (dua miliar seratus empat puluh lima juta Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri A atau sebesar Rp65.000.000,- (enam puluh lima juta Rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri A, yang berjangka waktu 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri B sebesar Rp128.360.000.000,- (seratus dua puluh delapan miliar tiga ratus enam puluh juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp10.268.800.000,- (sepuluh miliar dua ratus enam puluh delapan juta delapan ratus ribu Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri B atau sebesar Rp80.000.000,- (delapan puluh juta Rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri B, yang berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri C : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri C sebesar Rp254.600.000.000,- (dua ratus lima puluh empat miliar enam ratus juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp22.277.500.000,- (dua puluh dua miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri C atau sebesar Rp87.500.000,- (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri C, yang berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri D : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri D sebesar Rp84.040.000.000,- (delapan puluh empat miliar empat puluh juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp7.983.800.000,- (tujuh miliar Sembilan ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus ribu Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri D atau sebesar Rp95.000.000,- (sembilan puluh lima juta Rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri D, yang berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi.

Cicilan Imbalan Ijarah dibayarkan setiap triwulan sejak Tanggal Emisi, dimana Cicilan Imbalan Ijarah pertama akan dibayarkan pada tanggal 13 Maret 2025, sedangkan Cicilan Imbalan Ijarah terakhir sekaligus Pembayaran Sisa Imbalan Ijarah akan dibayarkan pada tanggal 20 Desember 2025 untuk Sukuk Ijarah Seri A, tanggal 13 Desember 2027 untuk Sukuk Ijarah Seri B, tanggal 13 Desember 2029 untuk Sukuk Ijarah Seri C dan tanggal 13 Desember 2031 untuk Sukuk Ijarah Seri D. Pembayaran Sisa Imbalan Ijarah masing-masing seri Sukuk Ijarah akan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

OBLIGASI BERKELANJUTAN I TAHAP II DAN/ATAU TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) DAN SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I TAHAP II DAN/ATAU TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH INI TIDAK DIJAMIN DENGAN SUATU JAMINAN KHUSUS SERTA TIDAK DIJAMIN OLEH PIHAK MANAPUN, NAMUN DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN, BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH ADALAH *PARI PASSU* TANPA HAK PREFERENSI DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG TELAH ADA SEKARANG MAUPUN DI KEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (*BUYBACK*) OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK IJARAH 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK IJARAH SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI DAN/ATAU PEMBAYARAN SISA IMBALAN IJARAH. PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI DAN/ATAU PEMBAYARAN SISA IMBALAN IJARAH UNTUK DISIMPAN DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI DAN/ATAU PERWALIAMANATAN SUKUK IJARAH DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI DAPAT DILIHAT PADA BAB I PERIHAL PENAWARAN UMUM DI DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TIDAK MELAKUKAN PEMOTONGAN ZAKAT ATAS CICILAN IMBALAN IJARAH YANG DIPEROLEH PEMEGANG SUKUK IJARAH INI.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI"), DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH DARI: PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA ("PEFINDO")

IA+ (SINGLE A PLUS) & IA+ (SINGLE A PLUS SYARIAH)

KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN TERSEBUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS INI.

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO MENURUNNYA PERMINTAAN BATU BARA DAN MINERAL. DALAM HAL TERDAPAT PENURUNAN PERMINTAAN PADA PASAR GLOBAL DAPAT SECARA TIDAK LANGSUNG BERPANGKAP PADA POTENSI PERTUMBUHAN PERSEROAN. FLUKTUASI PERMINTAAN DAPAT MENGURANGI PERMINTAAN AKAN JASA PERTAMBANGAN KE PERSEROAN DAN MEMPENGARUHI PROSPEK PERMINTAAN PROYEK-PROYEK REKAYASA DAN KONSTRUKSI YANG TERKAIT DENGAN INDUSTRI INI. KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG RISIKO USAHA PERSEROAN TERSEBUT DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

RISIKO UTAMA YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI dan sukuk Ijarah ADALAH Risiko TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI DAN SUKUK Ijarah YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

Obligasi dan Sukuk Ijarah yang ditawarkan ini seluruhnya akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah ini dijamin secara kesanggupan penuh (*Full Commitment*)

PENJAMIN PELAKSANA EMISI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH



PT BCA SEKURITAS



PT HENAN PUTIHRAI SEKURITAS



PT BNI SEKURITAS



PT SUCOR SEKURITAS



PT TRIMEGAH SEKURITAS
INDONESIA TBK

WALI AMANAT

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 9 Desember 2024

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Petrosea Tahap I Tahun 2024 dan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Petrosea Tahap I Tahun 2024 kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) di Jakarta dengan surat No. CORPLEGAL/L/2024/VIII-040 tanggal 18 September 2024 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, sebagaimana diubah sebagian dengan Undang-Undang No. 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (“UUP2SK”) beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya (selanjutnya disebut “UUPM”).

Perseroan merencanakan untuk mencatatkan Obligasi dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Petrosea Tahap I Tahun 2024 pada PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang No. S-11282/BEI.PP1/10-2024 tanggal 29 Oktober 2024. Apabila Perseroan tidak mematuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan BEI, maka Penawaran Umum Berkelanjutan ini batal demi hukum dan pembayaran pesanan Obligasi dan Sukuk Ijarah wajib dikembalikan kepada para pemesan Obligasi dan Sukuk Ijarah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah, yang sebagian dicantumkan pada Bab I dalam Prospektus ini tentang Penawaran Umum dan Peraturan No. IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan dan/atau penjelasan atau membuat pernyataan apapun mengenai hal-hal yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah, serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana sesuai dengan definisi “Afiliasi” dalam UUP2SK. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan Afiliasi dapat dilihat pada Bab X tentang Penjaminan Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah dan Bab XI tentang Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.

Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek, Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua data, informasi atau fakta material, serta kejujuran pendapat yang disajikan dalam Prospektus ini sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia, serta kode etik, norma dan standar profesinya masing-masing.

PENAWARAN UMUM OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH REPUBLIK INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR REPUBLIK INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA KEGIATAN USAHA YANG MENDASARI PENERBITAN SUKUK IJARAH TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL SERTA MENJAMIN BAHWA SELAMA PERIODE SUKUK IJARAH KEGIATAN USAHA YANG MENDASARI PENERBITAN SUKUK IJARAH TIDAK AKAN BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 2 PERATURAN OJK NOMOR 15/POJK 04/2015 TENTANG PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK ADA LAGI INFORMASI MATERIAL LAINNYA YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

PERSEROAN WAJIB MENYAMPAIKAN PERINGKAT TAHUNAN ATAS SETIAP KLASIFIKASI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH KEPADA OJK PALING LAMBAT 10 (SEPULUH) HARI KERJA SETELAH BERAKHIRNYA MASA BERLAKU PERINGKAT TERAKHIR SAMPAI DENGAN PERSEROAN TELAH MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBAN YANG TERKAIT DENGAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH YANG DITERBITKAN, SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN OJK NO. 49/POJK.04/2020 TENTANG PEMERINGKATAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DEFINISI DAN SINGKATAN.....	iii
SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN.....	xviii
DEFINISI TERKAIT KEGIATAN USAHA PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK.....	xix
RINGKASAN.....	xx
I. PENAWARAN UMUM.....	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM ...	37
III. PERNYATAAN UTANG.....	39
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	53
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN.....	58
VI. FAKTOR RISIKO	71
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	76
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	77
A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN.....	77
1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN.....	77
2. PERIZINAN.....	85
3. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN	89
4. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN.....	91
5. TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE/GCG)	100
6. STRUKTUR ORGANISASI	115
7. SUMBER DAYA MANUSIA	115
8. STRUKTUR HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGAWASAN DAN PENGURUSAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM	121
9. TABEL HUBUNGAN KEPENGURUSAN, PENGAWASAN, KEPEMILIKAN ANTARA PERSEROAN DAN PEMEGANG SAHAM UTAMA PERSEROAN	123
10. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM UTAMA YANG BERBENTUK BADAN HUKUM DENGAN KEPEMILIKAN 20% (DUA PULUH PERSEN) ATAU LEBIH.....	123
11. KETERANGAN TENTANG PERUSAHAAN ANAK.....	125
12. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA.....	136
13. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK TERAFILIASI	152
14. ASET TETAP	154
15. SIFAT DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI.....	156
16. ASURANSI	157
17. PERKARA YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK, SERTA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK	159
18. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)	159

B.	KEGIATAN USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK DAN KECENDERUNGAN SERTA PROSPEK USAHA	160
1.	UMUM	160
2.	KEGIATAN USAHA	161
3.	KEUNGGULAN KOMPETITIF	164
4.	STARTEGI USAHA	165
5.	PEMASARAN	165
6.	PROSPEK USAHA.....	167
7.	RISET DAN PENGEMBANGAN	170
8.	CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (“CSR”)	171
IX.	PERPAJAKAN	176
X.	PENJAMINAN EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH	177
XI.	LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL.....	178
XII.	KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT.....	181
XIII.	TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH	189
XIV.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH	195
XV.	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	197
XVI.	LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN.....	229

DEFINISI DAN SINGKATAN

Singkatan dan kata-kata yang digunakan dalam Prospektus ini memiliki makna dan arti seperti dijelaskan berikut ini:

Afiliasi	<p>Berarti:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan: <ol style="list-style-type: none"> 1. suami atau istri; 2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak; 3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu; 4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau 5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan; b. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan: <ol style="list-style-type: none"> 1. orang tua dan anak; 2. kakek dan nenek serta cucu; atau 3. saudara dari orang yang bersangkutan; c. hubungan antara Pihak dengan karyawan, direktur atau komisaris dari Pihak tersebut; d. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi, pengurus, Dewan Komisaris, atau pengawas yang sama; e. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau Pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud; f. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau g. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.
Agen Pembayaran	<p>Berarti KSEI yang membuat Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi dan Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Ijarah dengan Perseroan, berkewajiban membantu kepentingan Perseroan dalam melaksanakan pembayaran jumlah Bunga Obligasi dan/atau Cicilan Imbalan Ijarah, pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Sisa Imbalan Ijarah dan Denda dan/atau Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan (jika ada) kepada Pemegang Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening untuk dan atas nama Perseroan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi dan Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Ijarah.</p>
Akad Ijarah	<p>Berarti perjanjian atau kontrak tertulis antara Perseroan dan Wali Amanat sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Petrosea Tahap I Tahun 2024 yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak yang tidak bertentangan dengan Prinsip</p>

Syariah di Pasar Modal dan dengan memperhatikan ketentuan dalam POJK No. 53/2015, sebagaimana dituangkan dalam Akad Ijarah tertanggal 17 September 2024 dan Addendum I Akad Ijarah tanggal 28 November 2024, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuannya yang sah dibuat oleh para pihak yang bersangkutan dikemudian hari.

Akad Wakalah	Berarti perjanjian atau kontrak tertulis antara Perseroan dan Wali Amanat yang sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Petrosea Tahap I Tahun 2024 tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan dengan memperhatikan ketentuan dalam POJK No. 53/2015, sebagaimana dituangkan dalam Akad Wakalah tertanggal 17 September 2024 dan Addendum I Akad Wakalah tanggal 28 November 2024, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuannya yang sah dibuat oleh para pihak yang bersangkutan dikemudian hari.
Anggaran Dasar	Berarti Anggaran Dasar Perseroan.
BAE	Berarti Biro Administrasi Efek.
Bank Kustodian	Berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan OJK untuk menjalankan usaha sebagai Kustodian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
BNRI	Berarti Berita Negara Republik Indonesia.
BTN	Berarti PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan undang-undang Negara Republik Indonesia.
Bunga Obligasi	Berarti tingkat Bunga Obligasi yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi kecuali Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan yaitu sebesar 6,50% (enam koma lima puluh persen) per tahun untuk seri A, 8,00% (delapan persen) per tahun untuk seri B, 8,75% (delapan koma tujuh puluh lima persen) per tahun untuk seri C dan 9,50% (sembilan koma lima puluh persen) per tahun untuk seri D. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
Bursa Efek, BEI, atau Bursa Efek Indonesia	Berarti PT Bursa Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Selatan, yang merupakan pihak penyelenggara pasar di Pasar Modal untuk transaksi bursa atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya tempat Obligasi dan Sukuk Ijarah Perseroan dicatatkan.
Cicilan Imbalan Ijarah	Berarti bagian dari Imbalan Sukuk Ijarah yang wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah sebagai imbalan atas manfaat yang diterima oleh Perseroan dari pengguna akhir atas pemanfaatan Objek Ijarah, yang pembayarannya akan dilakukan pada setiap Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah. Tingkat Cicilan Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri A sebesar Rp2.145.000.000,- (dua miliar seratus empat puluh

lima juta Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri A atau sebesar Rp65.000.000,- (enam puluh lima juta Rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri A; Tingkat Cicilan Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri B sebesar Rp10.268.800.000,- (sepuluh miliar dua ratus enam puluh delapan juta delapan ratus ribu Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri B atau sebesar Rp80.000.000,- (delapan puluh juta Rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri B; Tingkat Cicilan Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri C sebesar Rp22.277.500.000,- (dua puluh dua miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri C atau sebesar Rp87.500.000,- (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri C; dan Tingkat Cicilan Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri D sebesar Rp7.983.800.000,- (tujuh miliar Sembilan ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus ribu Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri D atau sebesar Rp95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta Rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri D.

Daftar Pemegang Rekening Obligasi	Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Obligasi oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI berdasarkan data-data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
Daftar Pemegang Rekening Sukuk Ijarah	Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Sukuk Ijarah oleh Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening di KSEI berdasarkan data-data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
Denda	Berarti sejumlah dana yang wajib dibayar akibat adanya keterlambatan kewajiban pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi yaitu sebesar 1% (satu persen) di atas tingkat Bunga Obligasi masing-masing seri Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas dari suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
Dokumen Emisi	Berarti Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan, Pengakuan Utang Obligasi dan Pengikatan Kewajiban Sukuk Ijarah, Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah, Perjanjian Pendaftaran Obligasi dan Perjanjian Pendaftaran Sukuk Ijarah, Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi dan Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Ijarah, Persetujuan Prinsip Pencatatan Obligasi dan Sukuk Ijarah, Prospektus, Prospektus Ringkas, serta dokumen–dokumen lainnya yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum ini.
DPS	Berarti Daftar Pemegang Saham.
Efek	Berarti surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemilikinya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap Derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/ atau diperdagangkan di Pasar Modal, sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK.

Efek Syariah	Berarti Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya yang: a. akad, cara pengelolaan, kegiatan usaha; b. aset yang menjadi landasan akad, cara pengelolaan, kegiatan usaha; dan/atau c. aset yang terkait dengan Efek dimaksud dan penerbitnya; tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.
Efektif	Berarti efektifnya Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan UUP2SK, yaitu: a. pada hari kerja ke-20 sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap atau pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan efektif oleh OJK; atau b. dalam hal OJK meminta perubahan dan/atau tambahan informasi dari Perseroan dalam jangka waktu 20 hari kerja tersebut di atas, maka penghitungan waktu untuk efektifnya Pernyataan Pendaftaran dihitung sejak tanggal diterimanya perubahan dan/ atau tambahan informasi dimaksud.
Emisi	Berarti kegiatan Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah oleh Perseroan untuk ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum.
Entitas Anak atau Perusahaan Anak	Berarti perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan dan dikonsolidasikan ke dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang dalam hal ini adalah PIP, KBS, PII, RKN, KBL, KPI, PSA, KMS, MIP dan CEP.
Force Majeure	Berarti kejadian-kejadian yang berkaitan dengan keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan para pihak, seperti banjir, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran, perang atau huru hara serta wabah penyakit atau epidemi di Indonesia yang mempunyai akibat negatif secara material terhadap kemampuan masing-masing pihak untuk memenuhi kewajibannya sampai dengan sebelum efektifnya pernyataan pendaftaran berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
FKP	Berarti Formulir Konfirmasi Penjataan yaitu formulir hasil penjataan atas nama pemesan yang diterbitkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah kepada pemesan melalui Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah.
FPPO	Berarti Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi yaitu formulir yang harus diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Penjamin Emisi Obligasi.
FPPSI	Berarti Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah yaitu formulir yang harus diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Penjamin Emisi Sukuk Ijarah.
Harga Penawaran	Berarti sebesar 100% (seratus persen) dari nilai Pokok Obligasi, dan/atau nilai Sisa Imbalan Ijarah.
Hari Bursa	Berarti hari-hari dimana BEI melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia dan ketentuan-ketentuan BEI tersebut.

Hari Kalender	Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender <i>Gregorian</i> tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
Hari Kerja	Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.
IAPI	Berarti Institut Akuntan Publik Indonesia.
Jumlah Kewajiban	Berarti semua jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah sehubungan dengan Sukuk Ijarah, yakni berupa Sisa Imbalan Ijarah dan Cicilan Imbalan Ijarah serta Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan (jika ada) yang harus dibayar oleh Perseroan dari waktu ke waktu selama berlakunya Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
Jumlah Terutang	Berarti semua jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan emisi ini termasuk yakni berupa jumlah Pokok Obligasi, Bunga Obligasi, dan Denda (jika ada) yang terutang dari waktu ke waktu.
Kompensasi Kerugian (Ta'widh) Akibat Keterlambatan	<p>Berarti sejumlah dana yang wajib dibayar oleh Perseroan berdasarkan Fatwa Nomor 43/DSN/MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (<i>Ta'widh</i>) dan Fatwa DSN-MUI Nomor 129/DSN-MUI/VII/2019 tentang Biaya Riil Sebagai <i>Ta'widh</i> Akibat Wanprestasi (<i>At-Takalif Al Fi'liyyah An-Nasyi'ah 'An An-Nukul</i>) sebagai akibat adanya keterlambatan kewajiban pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah yang sudah menjadi hak Pemegang Sukuk Ijarah dan/atau Sisa Imbalan Ijarah dimana dalam hal ini tidak ada unsur kesalahan dari Pemegang Sukuk Ijarah serta Pemegang Sukuk Ijarah dirugikan sebagai akibat dari kelalaian atau keterlambatan tersebut. Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Sukuk Ijarah ditetapkan sebesar biaya riil yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan dan bukan potensi kerugian yang diperkirakan akan terjadi (<i>potential loss</i>) karena adanya peluang yang hilang <i>opportunity loss/al-furshah al-dha-i'ah</i>).</p> <p>Besarnya Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan untuk Cicilan Imbalan Ijarah atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> Sukuk Ijarah Seri A sebesar-besarnya Rp446.875 per hari Sukuk Ijarah Seri B sebesar-besarnya Rp2.567.200 per hari Sukuk Ijarah Seri C sebesar-besarnya Rp6.030.490 per hari Sukuk Ijarah Seri D sebesar-besarnya Rp2.328.608 per hari <p>Besarnya Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan untuk Sisa Imbalan Ijarah atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> Sukuk Ijarah Seri A sebesar-besarnya Rp6.875.000 per hari Sukuk Ijarah Seri B sebesar-besarnya Rp32.090.000 per hari Sukuk Ijarah Seri C sebesar-besarnya Rp68.954.167 per hari Sukuk Ijarah Seri D sebesar-besarnya Rp24.511.667 per hari <p>Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan tersebut dihitung harian berdasarkan jumlah hari yang terlewat yaitu 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari, yang dihitung secara proporsional berdasarkan jumlah hari yang lewat sampai dengan tanggal pembayaran efektif.</p>

Konfirmasi Tertulis	Berarti laporan konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dengan Pemegang Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah dan konfirmasi tersebut menjadi dasar bagi Pemegang Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah untuk pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Cicilan Imbalan Ijarah, pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Sisa Imbalan Ijarah dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah.
Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO/RUPSI atau KTUR	Berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening, khusus untuk keperluan menghadiri RUPO dan/atau RUPSI atau mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPO dan/atau RUPSI.
KSEI	Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan yang menjalankan kegiatan sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam UUPM, yang dalam Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah ini bertugas untuk menyimpan dan mengadministrasikan penyimpanan Obligasi dan Sukuk Ijarah berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi dan Perjanjian Pendaftaran Sukuk Ijarah di KSEI dan bertugas sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.
Kustodian	Berarti pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek, harta yang berkaitan dengan portofolio investasi kolektif, serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, serta mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pasar Modal, yang meliputi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Efek, atau Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK.
Manajer Penjatahan	Berarti PT BNI Sekuritas yang bertanggung jawab atas penjatahan Obligasi dan Sukuk Ijarah yang ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7. tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.
Masa Penawaran	Berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan Obligasi dan Sukuk Ijarah sebagaimana diatur dalam Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah yaitu tanggal 9 – 10 Desember 2024.
Masyarakat	Berarti perorangan, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing dan/atau badan hukum, baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun bertempat tinggal/berkedudukan di luar negeri.
Menkumham	Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (sebelumnya dikenal dengan nama Menteri Kehakiman Republik Indonesia dan/atau nama lainnya).
Objek Ijarah	Berarti hak manfaat atas jasa pertambangan yang diselenggarakan oleh Perseroan, dengan rincian sebagaimana dalam Lampiran Akad Ijarah yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Akad Ijarah, hak manfaat atas Objek Ijarah yang diserahkan tersebut tidak bertentangan dan sesuai dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal, peraturan perundang-undangan dan dengan memenuhi ketentuan dalam POJK No. 53/2015.

Obligasi Berkelanjutan Berarti Obligasi Berkelanjutan I Petrosea, yang akan ditawarkan oleh Penjamin Emisi Obligasi kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Berkelanjutan dengan jumlah dana yang dihimpun sebesar Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah).

Obligasi Berarti Obligasi Berkelanjutan I Petrosea Tahap I Tahun 2024 dalam jumlah pokok sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) yang dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*). Obligasi ini terdiri dari 4 (empat) Seri dengan ketentuan sebagai berikut:

Seri A : Jumlah Obligasi yang ditawarkan adalah sebesar Rp47.000.000.000,- (empat puluh tujuh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,50% (enam koma lima puluh persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri A adalah 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo.

Seri B : Jumlah Obligasi yang ditawarkan adalah sebesar Rp171.640.000.000,- (seratus tujuh puluh satu miliar enam ratus empat puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,00% (delapan persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri B adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo.

Seri C : Jumlah Obligasi yang ditawarkan adalah sebesar Rp465.400.000.000,- (empat ratus enam puluh lima miliar empat ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,75% (delapan koma tujuh puluh lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri C adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo.

Seri D : Jumlah Obligasi yang ditawarkan adalah sebesar Rp315.960.000.000,- (tiga ratus lima belas miliar Sembilan ratus enam puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,50% (sembilan koma lima puluh persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri D adalah 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.

Pembayaran Bunga Obligasi pertama masing-masing seri akan dilakukan pada tanggal 13 Maret 2025 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi adalah pada tanggal 20 Desember 2025 untuk Seri A, tanggal 13 Desember 2027 untuk Seri B, tanggal 13 Desember 2029 untuk Seri C dan tanggal 13 Desember 2031 untuk Seri D.

OJK Berarti Otoritas Jasa Keuangan, lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diubah sebagian dengan UUP2SK.

Pasar Modal	Berarti bagian dari Sistem Keuangan yang berkaitan dengan kegiatan: <ol style="list-style-type: none">penawaran umum dan transaksi Efek;pengelola investasi;Emiten dan Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya; danLembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.
Pemegang Obligasi	Berarti Masyarakat yang menanamkan dananya ke dalam Obligasi dan memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi, yang terdiri dari : <ol style="list-style-type: none">Pemegang Rekening yang melakukan investasi langsung atas Obligasi; dan/atauMasyarakat di luar Pemegang Rekening yang melakukan investasi atas Obligasi melalui Pemegang Rekening.
Pemegang Rekening	Berarti Pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan KSEI.
Pemegang Sukuk Ijarah	Berarti Masyarakat yang menanamkan dananya ke dalam Sukuk Ijarah dan memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Sukuk Ijarah, yang terdiri dari: <ol style="list-style-type: none">pemegang Rekening yang melakukan investasi langsung atas Sukuk Ijarah; dan/atauMasyarakat di luar Pemegang Rekening yang melakukan investasi atas Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening.
Pemerintah	Berarti pemerintah Negara Republik Indonesia.
Pemeringkat	Berarti PT Pemeringkat Efek Indonesia (“Pefindo”), berkedudukan di Jakarta Selatan.
Penawaran Awal	Berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas Obligasi dan Sukuk Ijarah yang akan ditawarkan dan perkiraan tingkat Bunga Obligasi serta Cicilan Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah yang ditawarkan sesuai Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 dan dengan memperhatikan Peraturan No.IX.A.2.
Penawaran Umum	Berarti kegiatan penawaran Obligasi dan Sukuk Ijarah yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual Obligasi dan Sukuk Ijarah kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM, peraturan pelaksanaannya dan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan, serta menurut ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah.
Penawaran Umum Berkelanjutan	Berarti kegiatan penawaran umum atas Obligasi dan Sukuk Ijarah yang diterbitkan dan ditawarkan secara bertahap oleh Perseroan, sesuai dengan POJK No. 36/2014.
Pengakuan Kewajiban	Berarti pengakuan kewajiban Perseroan sehubungan dengan Sukuk Ijarah, sebagaimana tercantum dalam Akta Pengakuan Kewajiban Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Petrosea Tahap I Tahun 2024 No. 98 tertanggal 28 November 2024, dibuat di hadapan Aulia Taufani S.H., Notaris di Jakarta.

Pengakuan Utang	Berarti pengakuan utang Perseroan sehubungan dengan Obligasi, sebagaimana tercantum dalam Akta Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan I Petrosea Tahap I Tahun 2024 No. 94 tanggal 28 November 2024, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani S.H., Notaris di Jakarta.
Penitipan Kolektif	Berarti jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah	Berarti pihak-pihak yang membuat perjanjian dengan Perseroan untuk melaksanakan Penawaran Umum bagi kepentingan Perseroan dan menjamin sesuai dengan bagian masing-masing dengan kesanggupan penuh (<i>full commitment</i>) untuk membeli dan membayar sisa Obligasi dan Sukuk Ijarah yang tidak diambil oleh Masyarakat sesuai dengan ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah. Yang ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah, yang dalam hal ini adalah PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT Henan Putihrai Sekuritas, PT Sucor Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah	Berarti pihak yang akan bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan penatalaksanaan Emisi sesuai dengan ketentuan UUPM, yang dalam hal ini adalah PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT Henan Putihrai Sekuritas, PT Sucor Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk yang berkedudukan di Jakarta, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah.
Peraturan BEI I-A	Berarti Peraturan I-A dari Lampiran Surat Keputusan BEI No. Kep-00183/BEI/12-2018 yang telah diubah melalui Surat Keputusan BEI No. Kep-00101/BEI/12-2021 tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Dicatatkan oleh Perusahaan Terdaftar.
Peraturan No.IX.A.2	Berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
Peraturan No.IX.A.7	Berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep 691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi	Berarti Perjanjian antara Perseroan dan KSEI perihal pelaksanaan pembayaran Bunga Obligasi serta pelunasan Pokok Obligasi, sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Berkelanjutan I Petrosea Tahap I Tahun 2024 No. 91 tertanggal 26 September 2024, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani S.H., Notaris di Jakarta.
Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Ijarah	Berarti Perjanjian antara Perseroan dan KSEI perihal pelaksanaan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah serta pembayaran Sisa Imbalan Ijarah, sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Petrosea Tahap I Tahun 2024 No. 92 tertanggal 26 September 2024, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani S.H., Notaris di Jakarta.
Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI	Berarti suatu perjanjian yang dibuat antara Perseroan dengan KSEI, sebagaimana dimuat dalam perjanjian yang dibuat di bawah tangan No. SP-087/OBL/KSEI/0824 tanggal 26 September 2024, yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan KSEI.

Perjanjian Pendaftaran Sukuk Ijarah di KSEI	Berarti suatu perjanjian yang dibuat antara Perseroan dengan KSEI, sebagaimana dimuat dalam perjanjian yang dibuat di bawah tangan No. SP-022/SKK/KSEI/0824 tanggal 26 September 2024, yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan KSEI.
Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi	Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi, sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I Petrosea Tahap I Tahun 2024 No. 50 tanggal 17 September 2024, Akta Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I Petrosea Tahap I Tahun 2024 No. 19 tanggal 14 Oktober 2024, Akta Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I Perseroan Tahap I Tahun 2024 No. 3 tanggal 1 November 2024 dan Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I Petrosea Tahap I Tahun 2024 No. 93 tanggal 28 November 2024, yang seluruhnya dibuat di hadapan Aulia Taufani S.H., Notaris di Jakarta.
Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah	Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah dan Penjamin Emisi Sukuk Ijarah, sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Petrosea Tahap I Tahun 2024 No. 53 tanggal 17 September 2024, Akta Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Petrosea Tahap I Tahun 2024 No. 22 tanggal 14 Oktober 2024, Akta Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Petrosea Tahap I Tahun 2024 No. 6 tanggal 1 November 2024 dan Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Petrosea Tahap I Tahun 2024 No. 97 tanggal 28 November 2024, yang seluruhnya dibuat di hadapan Aulia Taufani S.H., Notaris di Jakarta.
Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi	Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dengan Wali Amanat, sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Petrosea Tahap I Tahun 2024 No. 49 tanggal 17 September 2024, Akta Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Petrosea Tahap I Tahun 2024 No. 18 tanggal 14 Oktober 2024, Akta Addendum II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Petrosea Tahap I Tahun 2024 No. 2 tanggal 1 November 2024 dan Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Petrosea Tahap I Tahun 2024 No. 92 tanggal 28 November 2024, yang seluruhnya dibuat di hadapan Aulia Taufani S.H., Notaris di Jakarta.
Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah	Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dengan Wali Amanat, sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Petrosea Tahap I Tahun 2024 No. 52 tanggal 17 September 2024, Akta Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Petrosea Tahap I Tahun 2024 No. 21 tanggal 14 Oktober 2024, Akta Addendum II Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Petrosea Tahap I Tahun 2024 No. 5 tanggal 1 November 2024 dan Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Petrosea Tahap I Tahun 2024 No. 96 tanggal 28 November 2024, yang seluruhnya dibuat di hadapan Aulia Taufani S.H., Notaris di Jakarta.
Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi	Berarti pernyataan yang dibuat oleh Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Petrosea Tahap I Tahun 2024 No. 48 tanggal 17 September 2024, Akta Addendum I Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Petrosea Tahap I Tahun 2024 No. 17 tanggal

14 Oktober 2024, Akta Addendum II Pernyataan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Petrosea Tahap I Tahun 2024 No. 1 tanggal 1 November 2024 dan Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Petrosea Tahap I Tahun 2024 No. 91 tanggal 28 November 2024, yang seluruhnya dibuat di hadapan Aulia Taufani S.H., Notaris di Jakarta.

Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah	Berarti pernyataan yang dibuat oleh Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Petrosea Tahap I Tahun 2024 No. 51 tanggal 17 September 2024, Akta Addendum I Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Petrosea Tahap I Tahun 2024 No. 20 tanggal 14 Oktober 2024, Akta Addendum II Pernyataan Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Petrosea Tahap I Tahun 2024 No. 4 tanggal 1 November 2024 dan Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Petrosea Tahap I Tahun 2024 No. 95 tanggal 28 November 2024, yang seluruhnya dibuat di hadapan Aulia Taufani S.H., Notaris di Jakarta.
Pernyataan Pendaftaran	Berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum atau Perusahaan Publik.
Perseroan	Berarti badan hukum yang akan melakukan Emisi yang dalam hal ini adalah PT Petrosea Tbk, berkedudukan di Tangerang Selatan, Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan undang-undang Negara Republik Indonesia.
POJK No. 33/2014	Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No. 34/2014	Berarti Peraturan OJK No.34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No. 35/2014	Berarti Peraturan OJK No.35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No. 36/2014	Berarti Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
POJK No. 30/2015	Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
POJK No. 55/2015	Berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
POJK No. 56/2015	Berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
POJK No. 7/2017	Berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
POJK No. 9/2017	Berarti Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017 tentang Bentuk Dan Isi Prospektus Dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang.
POJK No. 3/2018	Berarti Peraturan OJK No. 3/POJK.04/2018 tanggal 26 Maret 2018 tentang Perubahan atas POJK No. 18/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk.

POJK No. 19/2020	Berarti Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2020 tentang Bank Umum Yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat.
POJK No. 20/2020	Berarti Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
POJK No. 49/2020	Berarti Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2020 tentang Pemingkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
Pokok Obligasi	<p>Berarti jumlah pokok pinjaman Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Obligasi yang terutang yang pada Tanggal Emisi berjumlah pokok sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah).</p> <p>Jumlah mana dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Pokok Obligasi yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan memperhatikan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.</p>
Prospektus	Berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar pihak lain membeli Efek, yang wajib disusun sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan di sektor Pasar Modal termasuk POJK No. 9/2017.
Prospektus Awal	Berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK, sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai Harga Penawaran, Penjaminan Emisi Efek, tingkat bunga Obligasi dan Cicilan Imbalan Ijarah, atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan.
Prospektus Ringkas	Berarti ringkasan dari isi Prospektus Awal atau Prospektus.
Rekening Cadangan Pembayaran Hutang (<i>Debt Service Reserve Account</i>) atau disingkat DSRA	Berarti rekening atas nama Perseroan yang digunakan untuk menampung cadangan pembayaran Bunga Obligasi sesuai ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
Rekening Efek	Berarti rekening yang memuat catatan posisi Obligasi dan Sukuk Ijarah dan/atau dana milik Pemegang Obligasi dan Sukuk Ijarah yang diadministrasikan oleh KSEI, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani oleh dan antara Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Ijarah dan Pemegang Rekening.
Rp	Berarti Rupiah, yaitu mata uang yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
RUPO	Berarti Rapat Umum Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.
RUPS	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar perusahaan yang terkait.
RUPSI	Berarti Rapat Umum Pemegang Sukuk Ijarah sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.

Satuan Pemindahbukuan	Berarti satuan jumlah Obligasi dan Sukuk Ijarah yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya, yaitu senilai Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya.
Satuan Perdagangan	Berarti satuan jumlah Obligasi dan Sukuk Ijarah yang diperdagangkan, yaitu senilai Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.
Sertifikat Jumbo Obligasi	Berarti bukti penerbitan Obligasi yang disimpan dalam Penitipan Kolektif KSEI yang diterbitkan oleh Perseroan tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi.
Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah	Berarti bukti penerbitan Sukuk Ijarah yang disimpan dalam Penitipan Kolektif KSEI, yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening.
Sukuk Ijarah	<p>Berarti Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Petrosea Tahap I Tahun 2024 dalam jumlah Sisa Imbalan Ijarah sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) yang dijamin secara kesanggupan penuh (<i>full commitment</i>). Sukuk Ijarah ini terdiri dari 4 (empat) Seri dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>Seri A : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri A sebesar Rp33.000.000.000,- (tiga puluh tiga miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp2.145.000.000,- (dua miliar seratus empat puluh lima juta Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri A atau sebesar Rp65.000.000,- (enam puluh lima juta Rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri A, yang berjangka waktu 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.</p> <p>Seri B : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri B sebesar Rp128.360.000.000,- (seratusduapuluhdelapanmiliartigaratusenampuluhjutaRupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp10.268.800.000,- (sepuluh miliar dua ratus enam puluh delapan juta delapan ratus ribu Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri B atau sebesar Rp80.000.000,- (delapan puluh juta Rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri B, yang berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.</p> <p>Seri C : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri C sebesar Rp254.600.000.000,- (dua ratus lima puluh empat miliar enam ratus juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp22.277.500.000,- (dua puluh dua miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri C atau sebesar Rp87.500.000,- (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri C, yang berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.</p> <p>Seri D : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri D sebesar Rp84.040.000.000,- (delapan puluh empat miliar empat puluh juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp7.983.800.000,- (tujuh miliar Sembilan ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus ribu Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri D atau sebesar Rp95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta Rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri D, yang berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi.</p>

Sukuk Ijarah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah. Cicilan Imbalan Ijarah dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.

Cicilan Imbalan Ijarah dibayarkan setiap triwulan, dimana Cicilan Imbalan Ijarah pertama akan dibayarkan pada tanggal 13 Maret 2025, sedangkan Cicilan Imbalan Ijarah terakhir sekaligus Tanggal Pembayaran Sisa Imbalan Ijarah akan dibayarkan pada tanggal 20 Desember 2025 untuk Sukuk Ijarah Seri A, tanggal 13 Desember 2027 untuk Sukuk Ijarah Seri B, tanggal 13 Desember 2029 untuk Sukuk Ijarah Seri C dan tanggal 13 Desember 2031 untuk Sukuk Ijarah Seri D. Pembayaran Sisa Imbalan Ijarah masing-masing seri Sukuk Ijarah akan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

Tanggal Distribusi	Berarti tanggal penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi dan Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah hasil Penawaran Umum kepada KSEI yang merupakan tanggal distribusi secara elektronik paling lambat 2 (dua) Hari Kerja terhitung setelah Tanggal Penjatahan.
Tanggal Emisi	Berarti tanggal distribusi Obligasi dan Sukuk Ijarah ke dalam Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah di KSEI berdasarkan penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi dan Sukuk Ijarah oleh Perseroan kepada KSEI, yang juga merupakan tanggal pembayaran hasil Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah dari Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah kepada Perseroan.
Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi	Berarti tanggal di mana jumlah Pokok Obligasi dari masing-masing seri Obligasi, menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Rekening melalui Agen Pembayaran.
Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi	Berarti tanggal-tanggal saat Bunga Obligasi dari masing-masing seri Obligasi, menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening melalui Agen Pembayaran, dimana Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulanan, terhitung sejak Tanggal Emisi sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi masing-masing Seri Obligasi sebagaimana tercantum dalam Bab I Penawaran Umum, Subbab Ketentuan Umum Pembayaran Bunga Obligasi.
Tanggal Pembayaran Sisa Imbalan Ijarah	Berarti tanggal jatuh tempo dan dapat ditagihnya seluruh Sisa Imbalan Ijarah masing-masing seri Sukuk Ijarah yang wajib dibayar oleh Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Sukuk Ijarah sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Rekening, melalui Agen Pembayaran.
Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah	Berarti tanggal-tanggal saat Cicilan Imbalan Ijarah menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Sukuk Ijarah yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening melalui Agen Pembayaran yaitu setiap triwulanan terhitung sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah masing-masing Seri Sukuk Ijarah sebagaimana tercantum dalam dalam Bab I Penawaran Umum, Subbab Ketentuan Umum Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah.
Tanggal Penjatahan	Berarti tanggal dilakukannya penjatahan Obligasi dan Sukuk Ijarah yang wajib diselesaikan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

USD	Berarti mata uang Dolar Amerika Serikat.
UUPM	Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, yang diterbitkan dalam Lembaran Negara No.64 Tahun 1995 Tambahan No.3608 sebagaimana diubah sebagian dengan UUP2SK.
UUPT	Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No.40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang diterbitkan dalam Lembaran Negara No.106 Tahun 2007 Tambahan No.4756, sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
UUP2SK	Berarti Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yang diterbitkan dalam Lembaran Negara No. 4 Tahun 2023 Tambahan No. 6845.
Wali Amanat	Berarti Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Tabungan Negara Tbk disingkat PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Pusat.

SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN

CEP	: Berarti PT Cristian Eka Pratama
CRO	: Berarti PT Caraka Reksa Optima
CUAN	: Berarti PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk
KBL	: Berarti PT Karya Bhumi Lestari
KBS	: Berarti PT Kinarya Bangun Sesama
KJP	: Berarti PT Kreasi Jasa Persada
KMS	: Berarti PT Kemilau Mulia Sakti
KPI	: Berarti PT Kuala Pelabuhan Indonesia
MIP	: Berarti PT Mahaka Industri Perdana
PII	: Berarti PT POSB Infrastructure Indonesia
PIP	: Berarti PTP Investments Pte Ltd
PSA	: Berarti Petros Solution Pty Ltd
RKN	: Berarti PT Rekakarsa Karya Nusantara

DEFINISI TERKAIT KEGIATAN USAHA PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

- BCM** : Berarti *Bank Cubic Meter*.
- LNTP** : Berarti *Limited Notice to Proceed*.
- OB** : Berarti *Over Burden*.
- MT** : Berarti *Metric Ton*.
- STA** : Berarti *Stationing*.
- FPJO** : Berarti Fluor-Petrosea Joint Organization.

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum di dalam Prospektus ini. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan, berkedudukan di Tangerang Selatan, adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia. Perseroan pertama kali didirikan dengan nama “PT Petrosea International Indonesia”, berdasarkan Akta Pendirian No. 75 tanggal 21 Februari 1972, dibuat di hadapan Djojo Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia (kini Menkumham) dalam Surat Keputusan No. Y.A.5/51/17 tanggal 30 November 1972, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 3236 tanggal 7 Desember 1972 dan diumumkan dalam BNRI No. 12 tanggal 9 Februari 1973, TBNRI No. 96 (“**Akta Pendirian Perseroan**”).

Akta Pendirian Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dengan perubahan terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 4 tanggal 4 Desember 2023, yang dibuat di hadapan Shanti Indah Lestari, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang Selatan, yang telah memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0079682.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 19 Desember 2023 dan telah didaftarkan dalam daftar perseroan pada Menkumham No. AHU-0257132.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 19 Desember 2023 serta diumumkan dalam BNRI No. 4 tanggal 19 Desember 2023 dan dalam TBNRI No. 1180 (“**Akta Perseroan No. 4/2023**”).

Akta Pendirian Perseroan, beserta seluruh perubahannya termasuk Akta Perseroan No. 4/2023 selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai “**Anggaran Dasar Perseroan**”.

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah menjalankan usaha dalam bidang konstruksi, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, perdagangan, pengangkutan dan pergudangan, informasi dan komunikasi, aktivitas profesional, ilmiah dan teknis, aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, serta pendidikan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan melaksanakan kegiatan usaha di bidang Konstruksi Gedung Industri (KBLI 41013); Konstruksi Gedung Kesehatan (KBLI 41015); Konstruksi Gedung Lainnya (KBLI 41019); Jasa Pekerjaan Konstruksi Prafabrikasi Bangunan Gedung (KBLI 41020); Konstruksi Bangunan Sipil Jalan (KBLI 42101); Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass (KBLI 42102); Konstruksi Terowongan (KBLI 42104); Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil (KBLI 42930); Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase (KBLI 42201); Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih (KBLI 42202); Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal (KBLI 42204); Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi Untuk Prasarana Transportasi (KBLI 42205); Konstruksi Sentral Telekomunikasi (KBLI 42206); Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan Gas (KBLI 42203); Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, dan Limbah lainnya (KBLI 42209); Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan (KBLI 42912); Konstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas Bumi (KBLI 42915); Konstruksi Bangunan Sipil Pertambangan (KBLI 42916); Konstruksi Bangunan Sipil Panas Bumi (KBLI 42917); Pengerukan (KBLI 42914); Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Yang Tidak Ditentukan Lain (KBLI 42919); Konstruksi Reservoir Pembangkit Listrik Tenaga Air (KBLI 42921); Penyiapan Lahan (KBLI 43120); Instalasi Listrik (KBLI 43211); Instalasi Telekomunikasi (KBLI 43212); Jasa Instalasi Konstruksi Navigasi Laut, Sungai, dan Udara (KBLI 43214); Instalasi Saluran Air (Plumbing) (KBLI 43221); Instalasi Pemanas dan Geotermal (KBLI 43222); Instalasi Minyak dan Gas (KBLI 43223); Instalasi Pendingin dan

Ventilasi Udara (KBLI 43224); Instalasi Konstruksi Lainnya Yang Tidak Ditentukan Lain (KBLI 43299); Pengerjaan Pemasangan Kaca dan Alumunium (KBLI 43301); Pengerjaan Lantai, Dinding, Peralatan Saniter dan Plafon (KBLI 43302); Pengecatan (KBLI 43303); Pemasangan Pondasi dan Tiang Pancang (KBLI 43901); Pemasangan Perancah (Steiger) (KBLI 43902); Pemasangan Rangka dan Atap/Roof Covering (KBLI 43903); Pemasangan Kerangka Baja (KBLI 43904); Penyewaan Alat Konstruksi dengan Operator (KBLI 43905); Konstruksi Khusus Lainnya Yang Tidak Ditentukan Lain (KBLI 43909); Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya (KBLI 09900); Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Pertambangan dan Energi Serta Peralatannya (KBLI 77395); Industri Pencetakan 3D Printing (KBLI 18113); Reparasi Mesin Untuk Keperluan Umum (KBLI 33121); Reparasi Mesin Untuk Keperluan Khusus (KBLI 33122); Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer (KBLI 46511); Perdagangan Besar Piranti Lunak (KBLI 46512); Perdagangan Besar Mesin Kantor dan Industri Pengolahan, Suku Cadang, dan Perlengkapannya (KBLI 46591); Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya (KBLI 46599); Angkutan Bermotor Untuk Barang Khusus (KBLI 49432); Aktivitas Bounded Warehousing atau wilayah Kawasan Berikat (KBLI 52103); Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya (KBLI 52109); Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut (KBLI 52221); Aktivitas Penunjang Angkutan Perairan Lainnya (KBLI 52229); Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang) (KBLI 52240); Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) (KBLI 52291); Angkutan Multimoda (KBLI 52295); Penerbitan Piranti Lunak (Software) (KBLI 58200); Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya (KBLI 62019); Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya (KBLI 62029); Aktivitas Konsultasi dan Perancangan Internet of Things (IoT) (KBLI 62024); Aktivitas Konsultasi Manajemen Industri (KBLI 70204); Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (KBLI 70209); Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis Yang Berhubungan Dengan Itu (KBLI 71102); Aktivitas Sertifikasi Profesi Pihak 1 (KBLI 74311); Aktivitas Sertifikasi Profesi Pihak 2 (KBLI 74312); Aktivitas Penyeleksian dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri (KBLI 78101); Penyediaan Sumber Daya Manusia dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia (KBLI 78300); Pelatihan Kerja Teknik Swasta (KBLI 78421); dan Pendidikan Teknik Swasta (KBLI 85497).

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, kegiatan usaha yang telah benar-benar dijalankan Perseroan adalah Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya (KBLI 09900), Reparasi Mesin Untuk Keperluan Khusus (KBLI 33122), Konstruksi Gedung Lainnya (KBLI 41019), Konstruksi Bangunan Sipil Jalan (KBLI 42101), Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang Fly Over, dan Underpass (KBLI 42102), Konstruksi Bangunan Pelabuhan (KBLI 42912), Konstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas Bumi (KBLI 42915), Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Pengolahan Produk Kimia, Petrokimia, Farmasi, dan Industri Lainnya (KBLI 42923), Instalasi Konstruksi Lainnya Yang Tidak Termasuk Dalam Lainnya (KBLI 43299), Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut (KBLI 52221), Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (KBLI 70209), Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Mesin Pertambangan dan Energi serta Peralatannya (KBLI 77395), Penyediaan Sumber Daya Manusia dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia (KBLI 78300), dan Pelatihan Kerja Teknik Swasta (KBLI 78421).

PROSPEK USAHA

Pada tahun 2024, Perseroan telah menjadi bagian dari grup CUAN yang juga terafiliasi dengan grup Barito Pacific, Perseroan akan memanfaatkan sinergi strategis dengan grup konglomerasi ini, terutama dalam sektor energi, petrokimia, dan infrastruktur termasuk energi terbarukan (*renewable energy*). Hal ini memungkinkan Perseroan untuk beradaptasi secara efektif dengan transisi energi global dan memperluas operasi ke sektor lain yang sedang berkembang.

Kolaborasi dengan grup CUAN yang memiliki cadangan tambang besar untuk memperkuat posisi pasar Perseroan di industri pertambangan, sehingga meminimalkan ketergantungan pada proyek jasa pertambangan dari eksternal. Sinergi ini memastikan aliran pendapatan yang stabil dan berkelanjutan, mendukung kemampuan Perseroan untuk menangani proyek besar dan kompleks.

Strategi diversifikasi dan sinergi dengan grup Barito Pacific yang bergerak di sektor energi, petrokimia dan infrastruktur, yang diterapkan oleh Perseroan akan memiliki dampak yang signifikan terhadap keberlanjutan dan pertumbuhan Perseroan. Pertama, diversifikasi membantu Perseroan mengurangi ketergantungan pada satu proyek jasa pertambangan dari komoditas tertentu, seperti batu bara, dengan memperluas operasi ke sektor jasa pertambangan di komoditas lain seperti nikel, emas, dan mineral lainnya selain dari proyek-proyek rekayasa dan konstruksi dari berbagai sektor industri. Hal ini membuat Perseroan lebih tahan terhadap fluktuasi harga komoditas tertentu dan memberikan pendapatan yang stabil.

Kedua, diversifikasi membuka peluang baru bagi Perseroan untuk masuk ke pasar dan industri yang sedang berkembang, seperti energi terbarukan dan infrastruktur. Dengan memanfaatkan sinergi dengan grup CUAN dan Barito Pacific, Perseroan dapat mengakses sumber daya, meningkatkan efisiensi operasional, dan memperkuat posisi kompetitifnya di industri.

KETERANGAN MENGENAI OBLIGASI YANG DITAWARKAN

Nama Obligasi	: Obligasi Berkelanjutan I Petrosea Tahap I Tahun 2024
Jumlah Pokok Obligasi	: Sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) dengan rincian sebagai berikut: - Seri A : Rp47.000.000.000,- (empat puluh tujuh miliar Rupiah) - Seri B : Rp171.640.000.000,- (seratus tujuh puluh satu miliar enam ratus empat puluh juta Rupiah) - Seri C : Rp465.400.000.000,- (empat ratus enam puluh lima miliar empat ratus juta Rupiah) - Seri D : Rp315.960.000.000,- (tiga ratus lima belas miliar Sembilan ratus enam puluh juta Rupiah)
Harga Penawaran	: 100% dari Jumlah Pokok Obligasi
Jangka Waktu	: Seri A : 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) Hari Kalender Seri B : 3 (tiga) tahun Seri C : 5 (lima) tahun Seri D : 7 (tujuh) tahun
Tingkat Bunga Obligasi	: Seri A : 6,50% (enam koma lima puluh persen) per tahun Seri B : 8,00% (delapan persen) per tahun Seri C : 8,75% (delapan koma tujuh puluh lima persen) per tahun Seri D : 9,50% (sembilan koma lima puluh persen) per tahun
Periode Pembayaran Bunga	: Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
Satuan Pemindahbukuan	: Rp1,- (satu Rupiah) dan/atau kelipatannya
Satuan Perdagangan Obligasi	: Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya
Jaminan	: Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu jaminan khusus serta tidak dijamin oleh pihak manapun, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 kitab undang-undang hukum perdata Indonesia. Hak Pemegang Obligasi adalah <i>pari passu</i> tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.
Hasil Pemeringkatan Efek	: ^{id} A+ (<i>Single A Plus</i>) dari Pefindo.

Pembelian Kembali (*buy back*) Obligasi : 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan, Perseroan dapat melakukan pembelian kembali untuk sebagian atau seluruh Obligasi sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. Perseroan mempunyai hak untuk memberlakukan pembelian kembali tersebut untuk dipergunakan sebagai pelunasan Obligasi atau untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyisihan Dana (*sinking fund*) : Dalam hal terjadinya penurunan hasil pemeringkatan Obligasi menjadi id A atau peringkat di bawah itu, maka Perseroan wajib membuka Rekening DSRA dan mencadangkan *sinking fund* sekurang-kurangnya sebesar 6 (enam) bulan Bunga Obligasi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kerja setelah diterbitkannya sertifikat hasil pemeringkatan Obligasi, dimana hasil pemeringkatan Obligasi yang menunjukkan terjadinya penurunan hasil pemeringkatan tersebut wajib disampaikan termasuk namun tidak terbatas kepada regulator, publik dan Wali Amanat sesuai ketentuan yang berlaku dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 3.4 huruf d Perjanjian Perwaliamanatan. Kewajiban mencadangkan *sinking fund* ini tidak berlaku jika hasil pemeringkatan Obligasi menjadi di atas id A, dan karenanya dana yang berada di Rekening DSRA dapat dicairkan oleh Perseroan. Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban untuk mencadangkan *sinking fund* tersebut, tunduk pada POJK No. 20/2020 beserta perubahannya dari waktu ke waktu.

Wali Amanat : BTN

Agen Pembayaran : KSEI

KETERANGAN MENGENAI SUKUK IJARAH YANG DITAWARKAN

Nama Sukuk Ijarah : Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Petrosea Tahap I Tahun 2024

Jumlah Sisa Imbalan Ijarah : Sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Seri A : Rp33.000.000.000,- (tiga puluh tiga miliar Rupiah)
- Seri B : Rp128.360.000.000,- (seratus dua puluh delapan miliar tiga ratus enam puluh juta Rupiah)
- Seri C : Rp254.600.000.000,- (dua ratus lima puluh empat miliar enam ratus juta Rupiah)
- Seri D : Rp84.040.000.000,- (delapan puluh empat miliar empat puluh juta Rupiah)

Harga Penawaran : 100% dari Jumlah Sisa Imbalan Ijarah

Jangka Waktu : Seri A : 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) Hari Kalender
 Seri B : 3 (tiga) tahun
 Seri C : 5 (lima) tahun
 Seri D : 7 (tujuh) tahun

Cicilan Imbalan Ijarah : Seri A : sebesar Rp2.145.000.000,- (dua miliar seratus empat puluh lima juta Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri A atau sebesar Rp65.000.000,- (enam puluh lima juta Rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri A.

Seri B : sebesar Rp10.268.800.000,- (sepuluh miliar dua ratus enam puluh delapan juta delapan ratus ribu Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri B atau sebesar Rp80.000.000,- (delapan puluh juta Rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri B.

Seri C : sebesar Rp22.277.500.000,- (dua puluh dua miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri C atau sebesar Rp87.500.000,- (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri C.

Seri D : sebesar Rp7.983.800.000,- (tujuh miliar Sembilan ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus ribu Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri D atau sebesar Rp95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta Rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri D.

- Periode Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah** : Setiap 3 (tiga) bulan terhitung sejak Tanggal Emisi.
- Satuan Pemindahbukuan** : Rp1,- (satu Rupiah) dan/atau kelipatannya
- Satuan Perdagangan** : Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya
- Jaminan** : Sukuk Ijarah ini tidak dijamin dengan suatu jaminan khusus serta tidak dijamin oleh pihak manapun, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Hak Pemegang Sukuk Ijarah adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.
- Hasil Pemeringkatan Efek** : $A_{id}^{+}_{(sy)}$ (*Single A Plus Syariah*) dari Pefindo.
- Pembelian Kembali (*buy back*) Sukuk Ijarah** : 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan, Perseroan dapat melakukan pembelian kembali untuk sebagian atau seluruh Sukuk Ijarah sebelum Tanggal Pelunasan Sisa Imbalan Ijarah. Perseroan mempunyai hak untuk memberlakukan pembelian kembali tersebut untuk dipergunakan sebagai pelunasan Sisa Imbalan Ijarah atau untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Penyisihan Dana (*sinking fund*)** : Dalam hal terjadinya penurunan hasil pemeringkatan Sukuk Ijarah menjadi $A_{id}^{+}_{(sy)}$ atau peringkat di bawah itu, maka Perseroan wajib membuka Rekening DSRA dan mencadangkan *sinking fund* sekurang-kurangnya sebesar 6 (enam) bulan Cicilan Imbalan Ijarah, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kerja setelah diterbitkannya sertifikat hasil pemeringkatan Sukuk Ijarah,

dimana hasil pemeringkatan Sukuk Ijarah yang menunjukkan terjadinya penurunan hasil pemeringkatan tersebut wajib disampaikan termasuk namun tidak terbatas kepada regulator, publik dan Wali Amanat sesuai ketentuan yang berlaku dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 3.4 huruf d Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah. Kewajiban mencadangkan *sinking fund* ini tidak berlaku jika hasil pemeringkatan Sukuk Ijarah menjadi di atas $A_{id}^{(sy)}$, dan karenanya dana yang berada di Rekening DSRA dapat dicairkan oleh Perseroan. Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban untuk mencadangkan *sinking fund* tersebut, tunduk pada POJK No. 20/2020 beserta perubahannya dari waktu ke waktu.

Wali Amanat : BTN

Agen Pembayaran : KSEI

RENCANA PENGGUNAAN DANA DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Petrosea Tahap I Tahun 2024 ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan dipergunakan oleh Perseroan seluruhnya untuk modal kerja Perseroan, melalui proyek-proyek yang dikerjakan Perseroan pada proyek-proyek pertambangan dan proyek-proyek rekayasa & konstruksi yang merupakan kegiatan usaha utama Perseroan, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Sekitar 40% (empat puluh persen) akan dipergunakan untuk pembelian material dan jasa terkait pembelian material yang bersifat beli putus sesuai kebutuhan Perseroan dan ketersediaan material dari pihak yang tidak terafiliasi dengan Perseroan;
- b. Sekitar 27% (dua puluh tujuh persen) akan dipergunakan untuk biaya operasi alat berat dan peralatan;
- c. Sekitar 25% (dua puluh lima persen) akan dipergunakan untuk biaya-biaya tenaga kerja; dan
- d. Sisanya akan dipergunakan untuk beban usaha lainnya.

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Petrosea Tahap I Tahun 2024 ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan dipergunakan oleh Perseroan seluruhnya untuk modal kerja Perseroan, melalui proyek-proyek yang dikerjakan Perseroan pada proyek-proyek pertambangan dan proyek-proyek rekayasa & konstruksi yang merupakan kegiatan usaha utama Perseroan, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Sekitar 40% (empat puluh persen) akan dipergunakan untuk pembelian material dan jasa terkait pembelian material yang bersifat beli putus sesuai kebutuhan Perseroan dan ketersediaan material dari pihak yang tidak terafiliasi dengan Perseroan;
- b. Sekitar 27% (dua puluh tujuh persen) akan dipergunakan untuk biaya operasi alat berat dan peralatan;
- c. Sekitar 25% (dua puluh lima persen) akan dipergunakan untuk biaya-biaya tenaga kerja; dan
- d. Sisanya akan dipergunakan untuk beban usaha lainnya.

Keterangan lebih lanjut mengenai Rencana Penggunaan Dana Dari Hasil Penawaran Umum dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini.

STRUKTUR PERMODALAN PADA SAAT PROSPEKTUS INI DITERBITKAN

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 35 tanggal 20 April 2016, yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0043538 tanggal 26 April 2016, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0052171.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 26 April 2016 ("**Akta Perseroan No. 35/2016**"), struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp 201.721.000.000
 Modal Ditempatkan : Rp 50.430.250.000
 Modal Disetor : Rp 50.430.250.000

Modal dasar Perseroan terbagi atas 4.034.420.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp50 per lembar saham.

Berdasarkan DPS per tanggal 10 Oktober 2024 yang dikeluarkan PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek (“BAE”) berdasarkan Surat Keterangan No.: DE/X/24-4411 tertanggal 11 Oktober 2024, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- per lembar saham		%
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	4.034.420.000	201.721.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
1. PT Kreasi Jasa Persada	418.762.400	20.938.120.000	41,52
2. PT Caraka Reksa Optima	344.650.357	17.232.517.850	34,17
3. Kepemilikan Masyarakat di bawah 5%	245.192.243	12.259.612.150	24,31
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	1.008.605.000	50.430.250.000	100,00
Jumlah Saham Portepel	3.025.815.000	151.290.750.000	-

IKHTISAR KEUANGAN PENTING

Dibawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting yang bersumber dari Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Liana Ramon Xenia & Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI dengan opini tanpa modifikasi dengan penambahan paragraf hal-hal lain mengenai penerbitan kembali Laporan Keuangan Konsolidasian Interim untuk menyesuaikan pengungkapan dengan peraturan pasar modal yang berlaku sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi dan Sukuk Ijarah untuk disertakan dalam Dokumen Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi dan Sukuk Ijarah dan tidak dimaksudkan dan tidak boleh digunakan untuk tujuan lain dan laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 yang tidak diaudit/ tidak direviu, dalam laporannya nomor 00126/2.1460/AU.1/02/1428-3/1/XI/2024 tanggal 1 November 2024 yang ditandatangani oleh Kasman.

IKHTISAR LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2024	2023	2023	2022
Aset Lancar	299.177	315.717	257.653	338.767
Aset Tidak Lancar	436.418	412.228	596.420	596.420
Jumlah Aset	735.595	727.945	596.420	596.420
Liabilitas Jangka Pendek	251.772	271.993	221.917	221.917
Liabilitas Jangka Panjang	242.243	220.322	76.512	76.512
Jumlah Liabilitas	494.015	492.315	298.429	298.429
Ekuitas	241.580	235.630	297.991	297.991
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	735.595	727.945	596.420	596.420

IKHTISAR LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2024	2023*	2023	2022
Pendapatan	318.024	274.025	577.617	476.317
Beban usaha langsung	(277.352)	(232.417)	(495.510)	(380.823)
Laba kotor	40.672	41.608	82.107	95.494
Laba bersih periode/tahun berjalan	1.523	11.711	12.438	41.166
Jumlah penghasilan komprehensif periode/tahun berjalan	747	13.959	13.814	37.959
Laba per saham dasar (dalam USD penuh)	0,0013	0,0117	0,0123	0,0413

*) tidak diaudit / tidak direviu

RINGKASAN LAPORAN ARUS KAS

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2024	2023*	2023	2022
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	30.437	36.031	107.766	89.408
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(21.513)	(112.814)	(156.979)	(90.527)
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	8.918	87.850	59.088	(25.070)
Kenaikan (penurunan) bersih kas dan setara kas	17.842	11.067	9.875	(26.189)
Kas dan setara kas awal periode/tahun	72.987	61.760	61.760	89.325
Kas dan setara kas akhir periode/tahun	92.271	73.279	72.987	61.760

*) tidak diaudit / tidak direviu

RASIO-RASIO KEUANGAN PENTING

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2024	2023*	2023	2022
Rasio pertumbuhan (%)				
Pendapatan	16,06 ¹⁾	32,76 ²⁾	21,27	14,57
Laba Bersih Periode/Tahun Berjalan	(87,00) ¹⁾	7,53 ²⁾	(69,79)	21,24
Jumlah Aset	1,05	22,93	22,05	11,95
Jumlah Liabilitas	0,35	66,65	64,97	9,51
Ekuitas	2,53	(20,86)	(20,93)	14,51
Rasio Usaha (%)				
Laba Kotor / Pendapatan	12,79	15,18	14,21	20,05
Laba Sebelum Pajak Periode/Tahun Berjalan / Pendapatan	0,99	4,85	2,78	10,53
Laba Periode/Tahun Berjalan / Pendapatan (Margin Laba / <i>Net Profit Margin</i>)	0,48	4,27	2,15	8,64
Laba Tahun Berjalan / Ekuitas (Imbal Hasil Ekuitas / ROE) ³⁾	0,63	4,97	5,28	13,81
Laba Tahun Berjalan / Jumlah Aset (Imbal Hasil Aset / ROA) ³⁾	0,21	1,60	1,71	6,90
Rasio Keuangan (%)				
Aset Lancar / Liabilitas Jangka Pendek (<i>Current Ratio</i>)	118,83	123,67	116,08	116,10
Jumlah Aset / Jumlah Liabilitas	148,90	147,42	147,86	199,85
Jumlah Liabilitas / Ekuitas	204,49	210,89	208,94	100,15
Jumlah Liabilitas / Jumlah Aset	67,16	67,83	67,63	50,04
<i>Interest Bearing Debt to Equity</i>	103,22	118,68	106,41	38,84
<i>Debt Service Coverage Ratio</i> (DSCR) ⁴⁾	75,85	73,78	123,48	175,87
Kas Atau Setara Kas / Liabilitas Jangka Pendek (<i>Cash Ratio</i>)	36,65	31,00	26,83	27,83
Margin EBITDA	14,80	19,70	18,59	26,33
Rasio Pinjaman Bersih Terhadap EBITDA ⁴⁾	333,76	382,67	165,57	43,04
<i>Interest Service Coverage Ratio</i> (ISCR)	352,62	753,42	542,08	1.689,68

*) tidak diaudit / tidak direviu

¹⁾ Rasio pertumbuhan pada 30 Juni 2024, masing-masing dihitung dengan selisih angka pada tanggal 30 Juni 2024 dikurangi dengan angka pada periode sebelumnya, 30 Juni 2023, dibagi dengan angka pada periode sebelumnya 30 Juni 2023.

²⁾ Rasio pertumbuhan pada 30 Juni 2023, masing-masing dihitung dengan selisih angka pada tanggal 30 Juni 2023 dikurangi dengan angka pada periode sebelumnya, 30 Juni 2022, dibagi dengan angka pada periode sebelumnya 30 Juni 2022.

³⁾ Perhitungan rasio ROE dan ROA untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 dihitung dengan menggunakan Laba Periode Berjalan 6 (enam) bulan dari masing-masing periode. Perhitungan rasio ROE dan ROA untuk tahun 2023 dan 2022 dihitung menggunakan Laba Tahun Berjalan 12 (dua belas) bulan dari masing-masing tahun.

⁴⁾ Perhitungan rasio DSCR dan Rasio Pinjaman Bersih Terhadap EBITDA untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 dihitung dengan menggunakan EBITDA 6 (enam) bulan dari masing-masing periode. Perhitungan rasio DSCR dan Rasio Pinjaman Bersih Terhadap EBITDA untuk tahun 2023 dan 2022 dihitung dengan menggunakan EBITDA 12 (dua belas) bulan dari masing-masing tahun.

Catatan:

EBITDA merupakan *Adjusted* EBITDA dihitung menggunakan laba kotor yang dikurangi dengan beban penjualan dan administrasi, ditambah dengan penyusutan dan amortisasi. Margin EBITDA dihitung dengan *Adjusted* EBITDA dibagi dengan pendapatan.

Debt Service Coverage Ratio (DSCR) dihitung menggunakan *Adjusted* EBITDA dibagi dengan utang bank, jumlah pinjaman jangka panjang – pihak ketiga yang jatuh tempo dalam satu tahun dan liabilitas sewa yang jatuh tempo dalam satu tahun.

Interest Coverage Ratio (ISCR) dihitung menggunakan *Adjusted EBITDA* dibagi dengan beban bunga dan keuangan.

Pinjaman bersih dihitung dengan menjumlahkan jumlah pinjaman dikurang kas dan setara kas. Jumlah pinjaman dihitung dengan menjumlahkan utang bank, pinjaman jangka panjang – pihak ketiga yang jatuh tempo dalam satu tahun dan liabilitas sewa yang jatuh tempo dalam satu tahun, pinjaman jangka panjang – pihak ketiga setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun, liabilitas sewa setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun.

PEMBATASAN RASIO KEUANGAN

Perseroan telah memenuhi seluruh rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Sukuk Ijarah Perseroan. Berikut dibawah ini pembatasan dan pemenuhannya adalah sebagai berikut :

Keterangan	Persyaratan	30 Juni 2024
<i>Current Ratio</i>	Minimal 1 kali	118,83%
<i>EBITDA to Interest plus Installment</i>	Minimal 1,15 kali	211,05%
<i>Interest Bearing Debt to Equity</i>	Maksimal 3 kali	103,22%

KETERANGAN MENGENAI PERUSAHAAN ANAK YANG SIGNIFIKAN

Tabel berikut merupakan keterangan mengenai Perusahaan Anak yang memiliki kontribusi signifikan bagi Perseroan pada tanggal 30 Juni 2024:

No.	Nama Perusahaan Anak	Domisili	Tahun Penyertaan	Kegiatan Usaha	Kepemilikan Saham (%)	Status Operasional	Jumlah Aset Perusahaan Anak sebelum eliminasi terhadap Jumlah Aset Konsolidasian (%)	Jumlah Liabilitas Perusahaan Anak sebelum eliminasi terhadap Jumlah Liabilitas Konsolidasian (%)	Laba (Rugi) Sebelum Pajak Perusahaan Anak sebelum eliminasi terhadap Laba (Rugi) sebelum pajak Konsolidasian (%)
Kepemilikan langsung									
1.	PT PTP Investments Pte. Ltd.	Singapura	2005	Investasi	100,00	Tidak aktif	0,00	0,00	4,75
2.	PT Kinarya Bangun Sesama	Tangerang Selatan	2010	Pertanian, Industri Pengolahan dan Pertambangan	99,99	Aktif	0,14	0,00	0,16
3.	PT POSB Infrastructure Indonesia	Tangerang Selatan	2015	Pengelolaan Pelabuhan Khusus	99,80	Aktif	0,26	0,22	2,65
4.	PT Rekakarsa Karya Nusantara	Balikpapan	2017	Jasa Rekamaya	Melalui Perseroan 0,10 Melalui PII (POSB Infrastructure Indonesia)	Aktif	0,06	0,00	5,42
5.	PT Karya Bhumi Lestari	Tangerang Selatan	2017	Jasa Penunjang Perusahaan Pertambangan	Melalui Perseroan 99,99 0,01 Melalui PII (POSB Infrastructure Indonesia)	Aktif	9,02	7,16	81,06
6.	PT Kuala Pelabuhan Indonesia	Jakarta Selatan	2018	Operasi Pelabuhan, Transportasi, Contracting (Jalan) dan Jasa Rendering	95,00	Aktif	1,71	2,11	54,75

No.	Nama Perusahaan Anak	Domisili	Tahun Penyertaan	Kegiatan Usaha	Kepemilikan Saham (%)	Status Operasional	Jumlah Aset Perusahaan Anak sebelum eliminasi terhadap Jumlah Aset Konsolidasian (%)	Jumlah Liabilitas Perusahaan Anak sebelum eliminasi terhadap Jumlah Liabilitas Konsolidasian (%)	Laba (Rugi) Sebelum Pajak Perusahaan Anak sebelum eliminasi terhadap Laba (Rugi) sebelum pajak Konsolidasian (%)
7.	Petros Solution Pty. Ltd.	Australia	2021	Solution Provider Dalam Bidang Geologi, Pertambangan, Rekayasa dan Konstruksi	100,00	Aktif	0,53	0,15	(23,18)
8.	PT Kemilau Mulia Sakti	Tangerang Selatan	2023	Perusahaan Holding	99,99 Melalui Perseroan 0,01 Melalui KBL (Karya Bhumi Lestari)	Aktif	1,59	0,02	(147,90)
Kepemilikan tidak langsung									
1.	PT Mahaka Industri Perdana	Tangerang Selatan	2023	Pertambangan, Perindustrian, Agrobisnis, Perdagangan Umum	51,25 Melalui PII (POSB Infrastructure Indonesia)	Aktif	0,19	0,05	6,54
2.	PT Cristian Eka Pratama	Tangerang Selatan	2023	Tambang Batu Bara	99,98 Melalui KMS (Kemilau Mulia Sakti) 0,02 Melalui KBL (Karya Bhumi Lestari)	Aktif	6,12	7,28	(146,97)

FAKTOR RISIKO

Risiko-risiko yang akan diungkapkan dalam uraian berikut merupakan risiko-risiko material bagi Perseroan. Faktor risiko usaha dan risiko umum telah disusun berdasarkan bobot risiko yang dihadapi Perseroan.

A. Risiko Utama

Menurunnya permintaan Batu bara dan Mineral

B. Risiko Terkait Kegiatan Usaha Perseroan

1. Efektivitas Operasi
2. Ketersediaan dan Kinerja Alat Berat
3. Harga Batu bara, Bahan Bakar dan Mineral
4. Kondisi Cuaca
5. Peraturan Pemerintah
6. Gangguan operasional
7. Keselamatan, Kesehatan & Lingkungan (SHE / Safety, Health & Environment)

C. Risiko Umum

1. Ekonomi Makro
2. Pertumbuhan Ekonomi Global
3. Energi Terbarukan / Substitusi Produk

D. Risiko Bagi Investor Yang Berkaitan Dengan Obligasi dan Sukuk Ijarah

Pembeli Obligasi dan Sukuk Ijarah dalam Penawaran Umum ini menghadapi risiko atas investasi yang dilakukan, yaitu:

1. Risiko tidak likuidnya Obligasi dan Sukuk Ijarah yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yang antara lain disebabkan karena tujuan pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah sebagai investasi jangka panjang.
2. Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran bunga Obligasi, Cicilan Imbalan Ijarah, Pokok Obligasi dan/atau Sisa Imbalan Ijarah pada waktu yang telah ditetapkan atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan.

I. PENAWARAN UMUM

**PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I PETROSEA
DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR Rp2.000.000.000.000,-
(DUA TRILIUN RUPIAH)
("OBLIGASI BERKELANJUTAN")**

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:

**OBLIGASI BERKELANJUTAN I PETROSEA TAHAP I TAHUN 2024
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp1.000.000.000.000,-
(SATU TRILIUN RUPIAH)
("OBLIGASI")**

Obligasi ini terdiri dari 4 (empat) Seri, yaitu Obligasi Seri A, Seri B, Seri C dan Seri D yang masing-masing ditawarkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat kecuali, Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"). Obligasi ini memberikan pilihan bagi Masyarakat untuk memilih Seri Obligasi yang dikehendaki sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Obligasi yang ditawarkan adalah sebesar Rp47.000.000.000,- (empat puluh tujuh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,50% (enam koma lima puluh persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri A adalah 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo.
- Seri B : Jumlah Obligasi yang ditawarkan adalah sebesar Rp171.640.000.000,- (seratus tujuh puluh satu miliar enam ratus empat puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,00% (delapan persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri B adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo.
- Seri C : Jumlah Obligasi yang ditawarkan adalah sebesar Rp465.400.000.000,- (empat ratus enam puluh lima miliar empat ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,75% (delapan koma tujuh puluh lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri C adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo.
- Seri D : Jumlah Obligasi yang ditawarkan adalah sebesar Rp315.960.000.000,- (tiga ratus lima belas miliar Sembilan ratus enam puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,50% (sembilan koma lima puluh persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri D adalah 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama masing-masing seri akan dilakukan pada tanggal 13 Maret 2025 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi adalah pada tanggal 20 Desember 2025 untuk Seri A, tanggal 13 Desember 2027 untuk Seri B, tanggal 13 Desember 2029 untuk Seri C dan tanggal 13 Desember 2031 untuk Seri D.

DAN
**PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I PETROSEA
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp1.000.000.000.000,-
(SATU TRILIUN RUPIAH)
("SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN")**

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:

**SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I PETROSEA TAHAP I TAHUN 2024
DENGAN SISA IMBALAN IJARAH SEBESAR Rp500.000.000.000,-
(LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)
("SUKUK IJARAH")**

Sukuk Ijarah ini terdiri dari 4 (empat) Seri, yaitu Sukuk Ijarah Seri A, Seri B, Seri C dan Seri D yang masing-masing ditawarkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah. Sukuk Ijarah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterbitkan atas nama KSEI, Sukuk Ijarah ini memberikan pilihan bagi Masyarakat untuk memilih seri Sukuk Ijarah yang dikehendaki sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri A sebesar Rp33.000.000.000,- (tiga puluh tiga miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp2.145.000.000,- (dua miliar seratus empat puluh lima juta Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri A atau sebesar Rp65.000.000,- (enam puluh lima juta Rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri A, yang berjangka waktu 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri B sebesar Rp128.360.000.000,- (seratus dua puluh delapan miliar tiga ratus enam puluh juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp10.268.800.000,- (sepuluh miliar dua ratus enam puluh delapan juta delapan ratus ribu Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri B atau sebesar Rp80.000.000,- (delapan puluh juta Rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri B, yang berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri C : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri C sebesar Rp254.600.000.000,- (dua ratus lima puluh empat miliar enam ratus juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp22.277.500.000,- (dua puluh dua miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri C atau sebesar Rp87.500.000,- (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri C, yang berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri D : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri D sebesar Rp84.040.000.000,- (delapan puluh empat miliar empat puluh juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp7.983.800.000,- (tujuh miliar Sembilan ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus ribu Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri D atau sebesar Rp95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta Rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri D, yang berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi.

Cicilan Imbalan Ijarah dibayarkan setiap triwulan sejak Tanggal Emisi, dimana Cicilan Imbalan Ijarah pertama akan dibayarkan pada tanggal 13 Maret 2025, sedangkan Cicilan Imbalan Ijarah terakhir sekaligus Tanggal Pembayaran Sisa Imbalan Ijarah akan dibayarkan pada tanggal 20 Desember 2025 untuk Sukuk Ijarah Seri A, tanggal 13 Desember 2027 untuk Sukuk Ijarah Seri B, tanggal 13 Desember 2029 untuk Sukuk Ijarah Seri C dan tanggal 13 Desember 2031 untuk Sukuk Ijarah Seri D. Pembayaran Sisa Imbalan Ijarah masing-masing seri Sukuk Ijarah akan dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo.



PT PETROSEA TBK

Kegiatan Usaha:

Bergerak dalam bidang jasa konstruksi, jasa pertambangan, jasa pengangkutan dan pergudangan/
logistik, serta aktivitas konsultan manajemen
Berkedudukan di Tangerang Selatan, Indonesia

Kantor Pusat:

Indy Bintaro Office Park, Building B
Jl. Boulevard Bintaro Jaya Blok B7/A6
Sektor VII, CBD Bintaro Jaya
Tangerang Selatan 15224
Telp.: 021-29770999
Fax: 29770988

Email: corporate.secretary@petrosea.com

Website: www.petrosea.com

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH DARI: PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (“PEFINDO”)

***id*A+ (SINGLE A PLUS) & *id*A+(sy) (SINGLE A PLUS SYARIAH)**

KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN TERSEBUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS INI.

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO MENURUNNYA PERMINTAAN BATU BARA DAN MINERAL, DALAM HAL TERDAPAT PENURUNAN PERMINTAAN PADA PASAR GLOBAL DAPAT SECARA TIDAK LANGSUNG BERDAMPAK PADA POTENSI PERTUMBUHAN PERSEROAN. FLUKTUASI PERMINTAAN DAPAT MENGURANGI PERMINTAAN AKAN JASA PERTAMBANGAN KE PERSEROAN DAN MEMPENGARUHI PROSPEK PERMINTAAN PROYEK-PROYEK REKAYASA DAN KONSTRUKSI YANG TERKAIT DENGAN INDUSTRI INI. KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG RISIKO USAHA PERSEROAN TERSEBUT DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

RISIKO UTAMA YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH ADALAH RISIKO TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PERSYARATAN PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

Perseroan telah memenuhi kriteria untuk melaksanakan Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur dalam POJK No. 36/2014, yaitu:

- i. Penawaran Umum Berkelanjutan dilaksanakan dalam periode 2 (dua) tahun dengan ketentuan pemberitahuan pelaksanaan Penawaran Umum berkelanjutan terakhir disampaikan kepada OJK paling lambat pada ulang tahun kedua sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran;
- ii. Telah menjadi emiten perusahaan publik paling sedikit 2 (dua) tahun sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan;
- iii. Tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan sesuai dengan surat keterangan dari Kantor Akuntan Publik Liana Ramon Xenia & Rekan No. SR24-0004/OT/PTRO/KAL tertanggal 17 September 2024 dan Surat Pernyataan Tidak Pernah Mengalami Gagal Bayar No. FA/GEN/2024/09-0060 tertanggal 17 September 2024 yang telah ditandatangani Perseroan;
- iv. Efek yang akan diterbitkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan adalah efek bersifat utang dan memiliki hasil pemingkatan yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh perusahaan pemingkat efek, di mana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan pemingkatan $_{id}A+$ (*Single A Plus*) dan $_{id}A+_{(sy)}$ (*Single A Plus Syariah*) dari Pefindo.

A. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI YANG AKAN DITERBITKAN

NAMA OBLIGASI

Obligasi Berkelanjutan I Petrosea Tahap I Tahun 2024.

JENIS OBLIGASI

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.

JUMLAH POKOK OBLIGASI

Sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) yang terdiri dari 4 (empat) Seri dengan ketentuan sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Obligasi yang ditawarkan adalah sebesar Rp47.000.000.000,- (empat puluh tujuh miliar Rupiah).
- Seri B : Jumlah Obligasi yang ditawarkan adalah sebesar Rp171.640.000.000,- (seratus tujuh puluh satu miliar enam ratus empat puluh juta Rupiah).
- Seri C : Jumlah Obligasi yang ditawarkan adalah sebesar Rp465.400.000.000,- (empat ratus enam puluh lima miliar empat ratus juta Rupiah).
- Seri D : Jumlah Obligasi yang ditawarkan adalah sebesar Rp315.960.000.000,- (tiga ratus lima belas miliar Sembilan ratus enam puluh juta Rupiah).

Pembayaran Obligasi akan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi pada saat jatuh tempo.

JANGKA WAKTU DAN JATUH TEMPO

Obligasi ini diterbitkan dengan jangka waktu 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) Hari Kalender, 3 (tiga) tahun, 5 (lima) tahun dan 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama masing-masing seri akan dilakukan pada tanggal 13 Maret 2025 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi adalah pada tanggal 20 Desember 2025 untuk Seri A, tanggal 13 Desember 2027 untuk Seri B, tanggal 13 Desember 2029 untuk Seri C dan tanggal 13 Desember 2031 untuk Seri D.

HARGA PENAWARAN

100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.

JUMLAH MINIMUM PEMESANAN

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

BUNGA OBLIGASI

Bunga Obligasi sebesar 6,50% (enam koma lima puluh persen) per tahun untuk seri A, 8,00% (delapan persen) per tahun untuk seri B, 8,75% (delapan koma tujuh puluh lima persen) per tahun untuk seri C dan 9,50% (sembilan koma lima puluh persen) per tahun untuk seri D. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

KETENTUAN UMUM PEMBAYARAN BUNGA OBLIGASI

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulanan (3 bulanan) sejak Tanggal Emisi pada Tanggal Pembayaran Bunga. Bunga Obligasi tersebut akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi adalah sebagai berikut:

Bunga Ke-	Tanggal Pembayaran Bunga			
	Seri A	Seri B	Seri C	Seri D
1.	13 Maret 2025	13 Maret 2025	13 Maret 2025	13 Maret 2025
2.	13 Juni 2025	13 Juni 2025	13 Juni 2025	13 Juni 2025
3.	13 September 2025	13 September 2025	13 September 2025	13 September 2025
4.	20 Desember 2025	13 Desember 2025	13 Desember 2025	13 Desember 2025
5.		13 Maret 2026	13 Maret 2026	13 Maret 2026
6.		13 Juni 2026	13 Juni 2026	13 Juni 2026
7.		13 September 2026	13 September 2026	13 September 2026
8.		13 Desember 2026	13 Desember 2026	13 Desember 2026
9.		13 Maret 2027	13 Maret 2027	13 Maret 2027
10.		13 Juni 2027	13 Juni 2027	13 Juni 2027
11.		13 September 2027	13 September 2027	13 September 2027
12.		13 Desember 2027	13 Desember 2027	13 Desember 2027
13.			13 Maret 2028	13 Maret 2028
14.			13 Juni 2028	13 Juni 2028
15.			13 September 2028	13 September 2028
16.			13 Desember 2028	13 Desember 2028
17.			13 Maret 2029	13 Maret 2029
18.			13 Juni 2029	13 Juni 2029
19.			13 September 2029	13 September 2029
20.			13 Desember 2029	13 Desember 2029
21.				13 Maret 2030
22.				13 Juni 2030
23.				13 September 2030
24.				13 Desember 2030
25.				13 Maret 2031
26.				13 Juni 2031
27.				13 September 2031
28.				13 Desember 2031

JAMINAN

Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu jaminan khusus serta tidak dijamin oleh pihak manapun, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 kitab undang-undang hukum perdata Indonesia. Hak Pemegang Obligasi adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

PENYISIHAN DANA (*SINKING FUND*)

Dalam hal terjadinya penurunan hasil pemeringkatan Obligasi menjadi id A atau peringkat di bawah itu, maka Perseroan wajib membuka Rekening DSRA dan mencadangkan *sinking fund* sekurang-kurangnya sebesar 6 (enam) bulan Bunga Obligasi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kerja setelah diterbitkannya sertifikat hasil pemeringkatan Obligasi, dimana hasil pemeringkatan Obligasi yang menunjukkan terjadinya penurunan hasil pemeringkatan tersebut wajib disampaikan termasuk namun tidak terbatas kepada regulator, publik dan Wali Amanat sesuai ketentuan yang berlaku dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 3.4 huruf d Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi. Kewajiban mencadangkan *sinking fund* ini tidak berlaku jika hasil pemeringkatan Obligasi menjadi di atas id A, dan karenanya dana yang berada di Rekening DSRA dapat dicairkan oleh Perseroan. Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban untuk mencadangkan *sinking fund* tersebut, tunduk pada POJK No. 20/2020 beserta perubahannya dari waktu ke waktu.

SATUAN PERDAGANGAN OBLIGASI

Satuan Perdagangan Obligasi di Bursa Efek adalah sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI

Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali (*buy back*) Obligasi, maka berlaku ketentuan Pasal 17 POJK No. 20/2020 sebagai berikut:

1. pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan sebagian atau seluruhnya atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar.
2. pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau diluar Bursa Efek.
3. pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 tahun setelah Tanggal Penjatahan.
4. pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
5. pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPO.
6. pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari pihak yang tidak ter-Afiliasi kecuali dari pihak ter-Afiliasi yang timbul karena kepemilikan atau penyertaan modal oleh Pemerintah.
7. rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut di surat kabar.
8. pembelian kembali Obligasi, dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi. Pengumuman tersebut wajib dilakukan, paling sedikit melalui:
 - situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris;
 - situs web bursa atau 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai.

9. rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam angka 8 di atas dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam angka 8 di atas, paling sedikit memuat informasi tentang:
 - 1) periode penawaran pembelian kembali;
 - 2) jumlah dana maksimal yang digunakan untuk pembelian kembali;
 - 3) kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;
 - 4) harga atau kisaran harga yang Ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi;
 - 5) tata cara penyelesaian transaksi;
 - 6) persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual;
 - 7) tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi;
 - 8) tata cara pembelian kembali Obligasi; dan
 - 9) hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi.
10. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Obligasi yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi, melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali.
11. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi.
12. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam angka 8 di atas, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) jumlah pembelian kembali Obligasi tidak lebih dari 5% dari jumlah Obligasi untuk masing-masing jenis Obligasi yang beredar (*outstanding*) dalam periode 1 tahun setelah Tanggal Penjatahan;
 - 2) Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan
 - 3) Obligasi yang dibeli kembali tersebut hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali.

dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi.
13. Perseroan wajib melaporkan informasi terkait pelaksanaan pembelian kembali kepada OJK dan Wali Amanat, serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi mengacu kepada Peraturan OJK Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik tanggal 16 Desember 2015 yang diundangkan pada tanggal 22 Desember 2015 atau peraturan penggantinya, informasi yang meliputi antara lain:
 - 1) jumlah Obligasi yang telah dibeli oleh Perseroan;
 - 2) rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
 - 3) harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
 - 4) jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi.
14. Pembelian kembali wajib dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali tersebut jika terdapat jaminan atas seluruh Obligasi; dan
15. Pembelian kembali Obligasi oleh Perseroan mengakibatkan:
 - 1) hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
 - 2) pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.

PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERSEROAN

1. Selama berlakunya jangka waktu Obligasi dan sebelum dilunasinya semua Pokok Obligasi, Bunga Obligasi dan biaya-biaya denda (jika ada) serta biaya-biaya lain yang harus ditanggung oleh Perseroan berkenaan dengan Obligasi, Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat, Perseroan tidak akan melakukan hal-hal atau tindakan-tindakan sebagai berikut:

- a. Melakukan dan/atau mengizinkan Entitas Anak melakukan penjualan, pengalihan atau dengan cara apapun melepaskan dalam satu atau beberapa transaksi dalam satu atau beberapa transaksi yang berhubungan, seluruh atau sebagian besar Aset, kecuali:
 - (i) dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari dan/atau dalam rangka menunjang efektifitas kegiatan usaha dari Perseroan dan/atau Entitas Anak;
 - (ii) penjualan, pengalihan atau pelepasan atas Aset, yang dilakukan oleh Perseroan atau Entitas Anak dalam kaitannya dengan kegiatan usaha sehari-hari Perseroan dan Entitas Anak, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama dengan satu atau lebih penjualan, pengalihan atau pelepasan;
 - (iii) dalam rangka pelaksanaan hak dan kewajiban yang tertuang dalam suatu perjanjian dan/atau perikatan yang telah ada atau dibuat sebelum tanggal Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi; dan
 - (iv) dalam rangka pelaksanaan keputusan pengadilan atau yang disetujui pada RUPS atau peraturan perundang-undangan atau berdasarkan perintah dari Pemerintah atau otoritas pemerintahan yang berwenang;Adapun yang dimaksud dengan sebagian besar Aset adalah lebih dari 50% dari total Aset per laporan keuangan terkonsolidasi Perseroan yang terakhir;
"Aset" berarti seluruh aset konsolidasi Perseroan berdasarkan harga perolehan Aset sesuai dengan laporan keuangan konsolidasi Perseroan.
- b. Melaksanakan perubahan bidang usaha utama Perseroan secara material, kecuali dalam rangka penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pelaksanaan keputusan pengadilan atau berdasarkan perintah dari Pemerintah atau otoritas pemerintahan yang berwenang atau sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar Perseroan yang disetujui oleh RUPS sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Mengurangi modal dasar dan modal disetor Perseroan, kecuali dalam rangka pelaksanaan keputusan pengadilan atau peraturan perundang-undangan atau yang disetujui pada RUPS atau berdasarkan perintah dari Pemerintah atau otoritas pemerintahan yang berwenang;
- d. Mengadakan penggabungan, pengambilalihan perusahaan lain atau konsolidasi/peleburan atau mengizinkan Entitas Anak untuk mengadakan segala bentuk penggabungan, pengambilalihan perusahaan lain atau konsolidasi/peleburan, kecuali:
 - i. penggabungan, pengambilalihan perusahaan lain atau konsolidasi/peleburan yang dilakukan dalam kaitannya dengan kegiatan usaha Perseroan atau Entitas Anak;
 - ii. penggabungan, pengambilalihan perusahaan lain atau konsolidasi/peleburan tersebut tidak menimbulkan akibat negatif terhadap semua kewajibannya kepada Pemegang Obligasi; atau
 - iii. penggabungan antara Perseroan dan Entitas Anak dengan ketentuan bahwa dalam hal penggabungan tersebut, Perseroan tetap menjadi perusahaan hasil penggabungan (*surviving company*); atau
 - iv. dalam rangka pelaksanaan keputusan pengadilan atau peraturan perundang-undangan atau yang disetujui pada RUPS atau berdasarkan perintah dari Pemerintah atau otoritas pemerintahan yang berwenang.
- e. memberikan pinjaman atau kredit kepada pihak ketiga, kecuali:
 - i. pinjaman kepada karyawan Perseroan, koperasi dan yayasan karyawan Perseroan dengan ketentuan jumlah tersebut tidak melebihi jumlah yang setara dengan USD750.000;
 - ii. pinjaman untuk kepentingan Entitas Anak yang laporan keuangannya dikonsolidasikan kepada Perseroan sehubungan dengan:
 - (a) kegiatan usaha Perseroan sehari-hari dengan ketentuan wajar (*arm's length*); atau
 - (b) investasi atau belanja modal Entitas Anak yang laporan keuangannya dikonsolidasikan kepada Perseroan; atau
 - (c) proyek-proyek yang dilaksanakan oleh Perseroan dan/atau Entitas Anak yang laporan keuangannya dikonsolidasikan kepada Perseroan;
 - iii. Pembinaan Usaha Kecil Dan Koperasi (PUKK) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - iv. pinjaman antara Entitas Anak;
 - v. uang muka atau pinjaman yang merupakan utang dagang biasa dan diberikan sehubungan dengan kegiatan usaha sehari-hari dengan ketentuan wajar (*arm's length*).

- f. memberikan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) atau jaminan kebendaan lain termasuk *undertaking* (pernyataan kesediaan) kepada pihak lain, kecuali kepada Entitas Anak yang laporan keuangannya dikonsolidasikan kepada Perseroan, sehubungan dengan:
 - i. kegiatan usaha Perseroan sehari-hari dengan ketentuan wajar (*arm's length*);
 - ii. investasi atau belanja modal Entitas Anak yang laporan keuangannya dikonsolidasikan kepada Perseroan tersebut; atau
 - iii. proyek-proyek yang dilaksanakan oleh Perseroan dan/atau Entitas Anak yang laporan keuangannya dikonsolidasikan kepada Perseroan;
 - g. mengeluarkan surat utang baru atau instrumen utang lain yang sejenis dan/atau utang bank, kecuali perolehan pinjaman (termasuk namun tidak terbatas, apabila Perseroan akan melakukan penerbitan surat utang baik dalam mata uang Rupiah maupun mata uang asing dengan atau tanpa jaminan kebendaan) yang tidak melanggar rasio keuangan sebagaimana diatur dalam angka 3 huruf b di bawah ini.
2. Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas ini akan diberikan oleh Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;
 - b. Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya dalam waktu 15 Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 15 (lima belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/dokumen pendukung lainnya dari Wali Amanat, maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya; dan
 - c. Jika Wali Amanat meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam jangka waktu 15 Hari Kerja setelah data/dokumen pendukung yang diminta secara tertulis oleh Wali Amanat diterima oleh Wali Amanat. Jika dalam waktu 15 Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan atau penolakan dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuan.
3. Selama berlakunya jangka waktu Obligasi dan sebelum dilunasinya semua Pokok Obligasi, Bunga Obligasi dan Denda (jika ada) serta biaya-biaya lain yang harus ditanggung oleh Perseroan berkenaan dengan Obligasi Perseroan berkewajiban untuk:
- a. memenuhi semua syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian lainnya sehubungan dengan Perjanjian Perwaliamanatan dimana Perseroan merupakan pihak dalam perjanjian tersebut.
 - a. menjaga dan memelihara rasio keuangan berdasarkan laporan keuangan konsolidasi tahunan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik yang terdaftar di OJK dan diserahkan kepada Wali Amanat, dengan ketentuan kondisi rasio keuangan sebagai berikut:
 - *Current Ratio*, yaitu perbandingan antara total aktiva lancar terhadap total kewajiban/utang lancar minimal 1 kali;
 - *EBITDA to Interest plus Instalment*, yaitu laba sebelum dikurangi bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi terhadap beban bunga ditambah dengan angsuran pinjaman minimal 1,15 kali;
 - *Interest Bearing Debt to Equity*, yaitu seluruh kewajiban/utang yang berbunga terhadap modal maksimal 3 kali.
 - c. Menyetorkan dana untuk pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi yang jatuh tempo yang harus tersedia ke rekening yang ditunjuk oleh KSEI yang khusus dibuka untuk keperluan tersebut (*in good funds*) selambat-lambatnya 1 Hari Bursa sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi di rekening KSEI yang ditunjuk berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran. Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi kepada Agen Pembayaran berdasarkan keterangan Agen Pembayaran mengenai jumlah yang wajib dibayar oleh Perseroan, serta menyerahkan fotokopi bukti transfer kepada Wali Amanat pada hari yang sama.
 - d. Apabila Perseroan lalai menyetorkan jumlah dana tersebut pada waktu sebagaimana diatur dalam angka 3 huruf c di atas, maka atas kelalaian tersebut Perseroan dikenakan Denda. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayarkan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya, satu dan lain dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran.

- e. Menjalankan usaha dengan sebaik-baiknya dan secara efisien serta sesuai dengan praktik keuangan dan perdagangan sebagaimana mestinya dan peraturan yang berlaku.
- f. Jika Wali Amanat membutuhkan informasi yang wajar mengenai operasional dan keadaan keuangan Perseroan dan hal lain-lain sepanjang terkait dengan tugas Wali Amanat dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka Perseroan wajib menyampaikan informasi yang dibutuhkan tersebut secara tertulis selambat-lambatnya 14 Hari Kerja setelah diterimanya permohonan secara tertulis dari Wali Amanat.
- g. Segera memberitahukan kepada Wali Amanat secara tertulis dalam waktu 14 Hari Kalender sejak diketahuinya hal-hal sebagai berikut:
 - i. Setiap kejadian atau keadaan yang dapat mempunyai pengaruh buruk secara material atas jalannya usaha atau operasi atau keadaan keuangan Perseroan dan Entitas Anak yang mengganggu secara material pemenuhan kewajiban Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi;
 - ii. Sepanjang informasi tidak tersedia di situs web Perseroan atau BEI, setiap perubahan anggaran dasar yang telah disetujui Menkumham, susunan Direksi dan Dewan Komisaris yang telah diberitahukan dan diterima baik oleh Menkumham, dan/atau pembagian dividen, pemegang saham Pengendali dan diikuti dengan penyerahan akta-akta/dokumen sehubungan dengan keputusan RUPS Perseroan, setelah akta-akta/dokumen tersebut diterima oleh Perseroan;
 - iii. Perkara pidana, perdata, kepailitan, administrasi dan perburuhan yang dihadapi Perseroan yang keseluruhannya telah memiliki kekuatan hukum tetap dimana mengakibatkan ketidakmampuan Perseroan dalam menjalankan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.
 - iv. Sepanjang informasi tidak tersedia di situs web Perseroan atau BEI, membuat pinjaman baru (dengan bunga), baik yang dilakukan oleh Perseroan maupun Entitas Anak, kecuali untuk kegiatan operasional perusahaan dengan memperhatikan ketentuan mengenai rasio keuangan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf b di atas.
- h. Menyampaikan kepada Wali Amanat:
 - i. Salinan dari laporan-laporan termasuk laporan-laporan yang berkaitan dengan aspek keterbukaan informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dibidang Pasar Modal yang disampaikan kepada OJK, BEI dan/atau KSEI, salinan dari pemberitahuan atau surat edaran kepada Pemegang Saham dalam waktu selambat-lambatnya 2 Hari Kerja setelah laporan-laporan tersebut diserahkan kepada pihak-pihak yang disebut di atas;
 - ii. Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Bapepam LK atau OJK disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke OJK;
 - iii. Laporan keuangan tengah tahunan disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke OJK;
 - iv. Laporan keuangan triwulanan disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke OJK;
- i. Segera memberikan pemberitahuan tertulis kepada Wali Amanat tentang terjadinya kelalaian sebagaimana tersebut dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi atau adanya pemberitahuan mengenai kelalaian yang diberikan oleh kreditur Perseroan. Pemberitahuan tertulis tersebut wajib disampaikan kepada Wali Amanat selambat-lambatnya 7 Hari Kerja sejak diketahuinya oleh Perseroan perihal timbulnya kelalaian tersebut atau diterimanya oleh Perseroan pemberitahuan tertulis dari kreditur tersebut;
- j. Memelihara sistem akuntansi dan pengawasan biaya sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan memelihara buku-buku dan catatan-catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan Perseroan dan hasil operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- k. Memperoleh, mematuhi segala ketentuan dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjaga tetap berlakunya segala kuasa, izin dan persetujuan (baik dari Pemerintah ataupun lainnya) dan melakukan hal-hal yang diwajibkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia;
- l. Memelihara asuransi-asuransi yang sudah berjalan dan berhubungan dengan kegiatan usaha dan harta kekayaan Perseroan pada perusahaan asuransi yang bereputasi baik terhadap segala risiko yang biasa dihadapi oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang sama dengan Perseroan;

- m. Membayar kewajiban pajak atau bea lainnya yang menjadi beban Perseroan dalam menjalankan usahanya sebagaimana mestinya;
- n. Dalam hal terjadinya penurunan hasil pemeringkatan Obligasi menjadi id A atau peringkat di bawah itu, maka Perseroan wajib membuka Rekening DSRA dan mencadangkan *sinking fund* sekurang-kurangnya sebesar 6 (enam) bulan Bunga Obligasi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kerja setelah diterbitkannya sertifikat hasil pemeringkatan Obligasi, dimana hasil pemeringkatan Obligasi yang menunjukkan terjadinya penurunan hasil pemeringkatan tersebut wajib disampaikan termasuk namun tidak terbatas kepada regulator, publik dan Wali Amanat sesuai ketentuan yang berlaku dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 3.4 huruf d Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi. Kewajiban mencadangkan *sinking fund* ini tidak berlaku jika hasil pemeringkatan Obligasi menjadi di atas id A, dan karenanya dana yang berada di Rekening DSRA dapat dicairkan oleh Perseroan. Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban untuk mencadangkan *sinking fund* tersebut, tunduk pada POJK No. 20/2020 beserta perubahannya dari waktu ke waktu.
- o. menerbitkan dan menyerahkan Sertifikat Jumbo Obligasi kepada KSEI, untuk kepentingan Pemegang Obligasi sebagai bukti pencatatan dalam Daftar Rekening.
- p. Melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan POJK No. 49/2020 berikut perubahannya, dan/atau pengaturan lainnya yang wajib dipatuhi oleh Perseroan, yaitu antara lain:
 - 1) Pemeringkatan Tahunan:
 - i. Perseroan wajib menyampaikan pemeringkatan tahunan atas Obligasi kepada OJK dan Wali Amanat paling lambat 10 Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi yang diterbitkan.
 - ii. Dalam hal peringkat Obligasi yang diperoleh berbeda dari peringkat sebelumnya, Perseroan wajib mengumumkan kepada Masyarakat paling sedikit dalam situs web Perseroan dan situs web BEI paling lama 10 Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir, mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - a). peringkat tahunan yang diperoleh; dan
 - b). penjelasan singkat mengenai penyebab perubahan peringkat.
 - 2) Pemeringkatan karena terdapat Fakta Material/Kejadian Penting:
 - i. Dalam hal Pemeringkat menerbitkan peringkat baru maka Perseroan wajib menyampaikan kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada Masyarakat paling sedikit dalam situs web Perseroan dan situs web Bursa Efek paling lama akhir hari kerja ke-2 setelah diterimanya peringkat yang berbeda dengan sebelumnya tersebut, mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - a). peringkat baru; dan
 - b). penjelasan singkat mengenai faktor-faktor penyebab terbitnya peringkat baru.
 - ii. Masa berlaku peringkat baru adalah sampai dengan akhir periode peringkat tahunan.
 - 3) Pemeringkatan Obligasi dalam Penawaran Umum Berkelanjutan:
 - i. Perseroan yang menerbitkan Obligasi melalui Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur pada POJK No. 36/2014 wajib memperoleh peringkat yang mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan yang direncanakan.
 - ii. Peringkat tahunan dan peringkat baru wajib mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan sepanjang:
 - a). periode Penawaran Umum Berkelanjutan masih berlaku; dan
 - b). Perseroan tidak dalam keadaan kondisi dilarang untuk melaksanakan penawaran Obligasi tahap berikutnya dalam periode Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur dalam POJK No. 36/2014.
 - 4) Pemeringkatan ulang:
 - i. Dalam hal Perseroan menerima hasil pemeringkatan ulang dari Pemeringkat terkait dengan peringkat Obligasi selain karena hal-hal sebagaimana dimaksud dalam angka 1) butir i dan angka 2) butir i di atas, maka Perseroan wajib menyampaikan hasil pemeringkatan ulang dimaksud kepada OJK dan Wali Amanat paling lama akhir Hari Kerja ke-2 setelah diterimanya peringkat dimaksud.
 - ii. Dalam hal peringkat yang diterima sebagaimana dimaksud dalam angka 4) butir i berbeda dari peringkat sebelumnya, maka Perseroan wajib mengumumkan kepada Masyarakat paling sedikit dalam situs web Perseroan dan situs web Bursa Efek paling lama akhir Hari Kerja ke-2 setelah diterimanya peringkat dimaksud.

KELALAIAN PERSEROAN

1. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai atau *default* apabila Perseroan tidak melaksanakan atau tidak menaati ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan, terjadi salah satu atau lebih dari keadaan atau kejadian atau hal-hal tersebut di bawah ini:
 - (1) Perseroan tidak membayar jumlah Pokok Obligasi atau nilai Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi kepada Pemegang Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi; atau
 - (2) Perseroan tidak melaksanakan atau tidak menaati kewajiban lain yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi; atau
 - (3) Perseroan dan/atau Entitas Anak (jika ada) dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian utang atau kredit oleh salah satu atau lebih krediturnya (*cross default*) yang berupa pinjaman (*debt*), baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari yang berakibat jumlah yang terutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali dengan ketentuan jumlah utang yang dinyatakan lalai tersebut melebihi USD5.000.000; atau
 - (4) Fakta mengenai keadaan, atau status Perseroan serta pengelolaannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan; atau
 - (5) Adanya penundaan kewajiban pembayaran utang (*moratorium*) berdasarkan keputusan pengadilan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam hal terjadi salah satu keadaan atau kejadian sebagaimana dimaksud dalam:
 - a. angka 1 butir (1) Kelalaian Perseroan di atas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus paling lama 10 Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa dihilangkannya keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;
 - b. angka 1 butir (2) sampai dengan angka 1 butir (5) Kelalaian Perseroan di atas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat yang tercantum dalam teguran tertulis dari Wali Amanat paling lama 90 Hari Kalender sejak surat teguran dari Wali Amanat mengenai kelalaian tersebut, tanpa adanya upaya perbaikan yang mulai dilakukan oleh Perseroan atau tanpa dihilangkannya keadaan tersebut; maka Wali Amanat wajib memberitahukan keadaan atau kejadian tersebut kepada Pemegang Obligasi melalui 1 surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, atas biaya Perseroan. Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO menurut ketentuan dan tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi. Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaian tersebut. Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan dan alasan-alasan Perseroan serta RUPO memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Obligasi sesuai dengan keputusan RUPO menjadi jatuh tempo sehingga dapat dituntut pembayarannya dengan segera dan sekaligus. Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan.
3. Apabila:
 - a. pihak yang berwenang (seperti pengadilan) secara hukum menyita atau mengambil alih dengan cara apapun termasuk melakukan nasionalisasi, semua atau sebagian besar harta benda Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban kewajiban dalam Dokumen Emisi; atau
 - b. Perseroan dibubarkan karena sebab apapun; atau
 - c. Perseroan dinyatakan dalam keadaan pailit; atau
 - d. adanya suatu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Perseroan dan/atau Entitas Anak(jika ada) yang dijamin langsung oleh Perseroan yang telah memperoleh keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga yang berwenang; atau
 - e. Perseroan menyatakan secara tertulis dengan menyampaikan surat kepada Wali Amanat ketidakmampuan untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan (*standstill*).

maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi. Dalam hal ini Obligasi menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.

4. Perseroan berkewajiban untuk membayar ganti rugi kepada Wali Amanat dan/atau membebaskan Wali Amanat dari setiap dan semua gugatan, kerugian, biaya, yang diderita oleh Wali Amanat termasuk biaya Konsultan Hukum yang disetujui oleh Perseroan sehubungan dengan pemenuhan kewajiban-kewajiban Perseroan berdasarkan Dokumen Emisi kecuali yang diakibatkan oleh kelalaian Wali Amanat.

RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI (RUPO)

Untuk penyelenggaraan RUPO, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan, berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 1). RUPO diadakan untuk tujuan antara lain:
 - a. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi mengenai perubahan jangka waktu Obligasi, Pokok Obligasi, suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi, dan/atau ketentuan lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, dengan memperhatikan POJK No. 20/2020.
 - b. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahan kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
 - c. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;
 - d. mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan dan POJK No. 20/2020;
 - e. mengambil tindakan lain yang diusulkan oleh Wali Amanat yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
 - f. mengambil keputusan tentang terjadinya peristiwa Force majeure dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara Perseroan dan Wali Amanat.
- 2). RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan:
 - a. Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Obligasi oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat;
 - b. Perseroan;
 - c. Wali Amanat; atau
 - d. OJK.
- 3). Permintaan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a, huruf b dan huruf d wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lama 30 Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO.
- 4). Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lama 14 Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.

- 5). Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO:
 - a. Pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lama 14 Hari Kalender sebelum pemanggilan.
 - b. Pemanggilan RUPO dilakukan paling lama 14 Hari Kalender sebelum RUPO, melalui paling sedikit 1 surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
 - c. Pemanggilan RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lama 7 Hari Kalender sebelum RUPO kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPO sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.
 - d. Pemanggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi antara lain:
 - tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO;
 - agenda RUPO;
 - pihak yang mengajukan usulan RUPO;
 - Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO; dan
 - kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO.
 - e. RUPO kedua dan ketiga diselenggarakan paling singkat 14 Hari Kalender dan paling lama 21 Hari Kalender dari RUPO sebelumnya.

- 6). Tata cara RUPO :
 - a. Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya.
 - b. Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO yang diterbitkan oleh KSEI.
 - c. Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat.
 - d. Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 4 Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat. Transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO.
 - e. Setiap Obligasi sebesar Rp1,- berhak mengeluarkan 1 suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.
 - f. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.
 - g. Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.
 - h. Sebelum pelaksanaan RUPO:
 - Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Obligasi dari Afiliasinya kepada Wali Amanat;
 - Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya;
 - Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Obligasi memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan.
 - i. RUPO dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat.
 - j. RUPO dipimpin oleh Wali Amanat.
 - k. Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.
 - l. Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, maka RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakan RUPO tersebut. Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan materi RUPO serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.

- 7). Dengan memperhatikan ketentuan dalam angka 6 huruf g diatas, kuorum dan pengambilan keputusan:
- a. Dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana dimaksud dalam angka 1. diatur sebagai berikut:
 - 1) Apabila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - (i) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
 - (iii) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - (v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - 2) Apabila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (i) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
 - (iii) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - (v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - 3) Apabila RUPO dimintakan oleh OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - (i) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (ii) dalam hal korum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
 - (iii) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - (v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.

- b. RUPU yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPU.
 - 2) dalam hal korum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 1) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPU yang kedua.
 - 3) RUPU kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPU.
 - 4) dalam hal korum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 3) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPU yang ketiga.
 - 5) RUPU ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.
 - 6) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 5 tidak tercapai, maka dapat diadakan RUPU yang keempat;
 - 7) RUPU keempat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang dari Obligasi atau diwakili yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Wali Amanat; dan
 - 8) Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan rapat umum pemegang Obligasi keempat wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 5 di atas.
- 8). Biaya-biaya penyelenggaraan RUPU menjadi tanggung jawab Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lama 7 Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat.
- 9). Penyelenggaraan RUPU wajib dibuatkan berita acara secara notariil.
- 10). Keputusan RUPU mengikat bagi semua Pemegang Obligasi, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Obligasi wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPU. Keputusan RUPU mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Obligasi, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Obligasi.
- 11). Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPU dalam 1 surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPU tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan.
- 12). Apabila RUPU yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Pokok Obligasi, perubahan tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi, dan perubahan jangka waktu Obligasi dan Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 Hari Kalender sejak keputusan RUPU atau tanggal lain yang diputuskan RUPU (jika RUPU memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPU.
- 13). Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPU dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.

- 14). Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan di Pasar Modal tersebut yang berlaku.

HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI

1. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
2. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
3. Apabila Perseroan belum menyetorkan dana lewat tanggal jatuh tempo Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, maka Perseroan harus membayar Denda sebesar 1% per tahun di atas bunga Obligasi masing-masing seri Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar. Jumlah Denda tersebut dihitung berdasarkan hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi hingga Jumlah Terutang tersebut dibayar sepenuhnya. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayar kepada Pemegang Obligasi secara proporsional sesuai dengan besarnya Obligasi yang dimilikinya.
4. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atas penyertaan modal Pemerintah, dapat mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
5. Setiap Obligasi sebesar Rp1,- berhak mengeluarkan 1 suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.

CARA PELUNASAN POKOK OBLIGASI DAN PEMBAYARAN BUNGA OBLIGASI

Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran Bunga Obligasi dan Pokok Obligasi sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

WALI AMANAT

BTN telah ditunjuk sebagai Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Petrosea Tahap I Tahun 2024 No. 49 tanggal 17 September 2024, Akta Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Petrosea Tahap I Tahun 2024 No. 18 tanggal 14 Oktober 2024 dan Akta Addendum II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Petrosea Tahap I Tahun 2024 No. 2 tanggal 1 November 2024, yang seluruhnya dibuat di hadapan Aulia Taufani S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, antara Perseroan dengan BTN selaku Wali Amanat.

Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dan hubungan kredit dengan BTN yang bertindak sebagai Wali Amanat. Keterangan mengenai Wali Amanat dapat dilihat pada Bab XI Prospektus ini.

HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI

Untuk memenuhi ketentuan POJK No. 7/2017 dan POJK No. 49/2020, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh Pefindo. Berdasarkan hasil pemeringkatan atas efek utang jangka panjang sesuai dengan surat No. RC-1133/PEF-DIR/IX/2024 tanggal 12 September 2024 dari Pefindo, Obligasi Berkelanjutan I Petrosea Tahap I Tahun 2024 telah mendapat peringkat:

^{id}A+
(Single A Plus)

Peringkat ini berlaku untuk periode 11 September 2024 sampai dengan 1 September 2025.

Perseroan dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Pefindo, sesuai dengan yang didefinisikan dalam UUP2SK. Sesuai ketentuan yang diatur dalam POJK No. 49/2020, Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Obligasi yang diterbitkan setiap 1 (satu) tahun sekali. Perseroan wajib menyampaikan Peringkat Tahunan atas setiap Klasifikasi Efek Bersifat Utang kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi yang diterbitkan.

HAK SENIORITAS ATAS UTANG

Hak Pemegang Obligasi adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

B. KETERANGAN TENTANG SUKUK IJARAH YANG AKAN DITERBITKAN

NAMA SUKUK IJARAH

Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Petrosea Tahap I Tahun 2024.

JENIS SUKUK IJARAH

Sukuk Ijarah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti kewajiban untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah. Sukuk Ijarah ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah dan didaftarkan pada tanggal diterbitkannya Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Sukuk Ijarah bagi Pemegang Sukuk Ijarah adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.

JUMLAH SISA IMBALAN IJARAH

Sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) yang terdiri dari 4 (empat) Seri dengan ketentuan sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah sebesar Rp33.000.000.000,- (tiga puluh tiga miliar Rupiah).
- Seri B : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah sebesar Rp128.360.000.000,- (seratus dua puluh delapan miliar tiga ratus enam puluh juta Rupiah).
- Seri C : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah sebesar Rp254.600.000.000,- (dua ratus lima puluh empat miliar enam ratus juta Rupiah).
- Seri D : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah sebesar Rp84.040.000.000,- (delapan puluh empat miliar empat puluh juta Rupiah).

Pembayaran Sukuk Ijarah akan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah pada saat jatuh tempo.

JANGKA WAKTU DAN JATUH TEMPO

Sukuk Ijarah ini diterbitkan dengan jangka waktu 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) Hari Kalender, 3 (tiga) tahun, 5 (lima) tahun dan 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi. Cicilan Imbalan Ijarah dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah. Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah pertama masing-masing seri akan dilakukan pada tanggal 13 Maret 2025 sedangkan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah terakhir sekaligus jatuh tempo Sisa Imbalan Ijarah adalah pada tanggal 20 Desember 2025 untuk Seri A, tanggal 13 Desember 2027 untuk Seri B, tanggal 13 Desember 2029 untuk Seri C dan tanggal 13 Desember 2031 untuk Seri D.

HARGA PENAWARAN

100% (seratus persen) dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah.

SATUAN PEMINDAHBUKUAN

Sukuk Ijarah ini diterbitkan dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, dengan satuan jumlah Sukuk Ijarah yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya adalah senilai Rp1,- (satu Rupiah) dan kelipatannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.

JUMLAH MINIMUM PEMESANAN

Pemesanan pembelian Sukuk Ijarah harus dilakukan dalam jumlah sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

CICILAN IMBALAN IJARAH

Cicilan Imbalan Ijarah dibayarkan setiap triwulan sejak Tanggal Emisi, dimana Cicilan Imbalan Ijarah pertama akan dibayarkan pada tanggal 13 Maret 2025, sedangkan Cicilan Imbalan Ijarah terakhir sekaligus Tanggal Pembayaran Sisa Imbalan Ijarah akan dibayarkan pada tanggal 20 Desember 2025 untuk Sukuk Ijarah Seri A, tanggal 13 Desember 2027 untuk Sukuk Ijarah Seri B, tanggal 13 Desember 2029 untuk Sukuk Ijarah Seri C dan tanggal 13 Desember 2031 untuk Sukuk Ijarah Seri D. Pembayaran Sisa Imbalan Ijarah masing-masing seri Sukuk Ijarah akan dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo.

KETENTUAN UMUM PEMBAYARAN CICILAN IMBALAN IJARAH

Cicilan Imbalan Ijarah dibayarkan setiap triwulanan (3 bulanan) sejak Tanggal Emisi pada Tanggal Pembayaran. Cicilan Imbalan Ijarah tersebut akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening di KSEI pada Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah yang bersangkutan. Cicilan Imbalan Ijarah harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Ijarah, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.

Perkiraan jadwal pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah adalah sebagai berikut:

Cicilan Imbalan Ijarah Ke-	Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah			
	Seri A	Seri B	Seri C	Seri D
1.	13 Maret 2025	13 Maret 2025	13 Maret 2025	13 Maret 2025
2.	13 Juni 2025	13 Juni 2025	13 Juni 2025	13 Juni 2025
3.	13 September 2025	13 September 2025	13 September 2025	13 September 2025
4.	20 Desember 2025	13 Desember 2025	13 Desember 2025	13 Desember 2025
5.		13 Maret 2026	13 Maret 2026	13 Maret 2026
6.		13 Juni 2026	13 Juni 2026	13 Juni 2026
7.		13 September 2026	13 September 2026	13 September 2026
8.		13 Desember 2026	13 Desember 2026	13 Desember 2026
9.		13 Maret 2027	13 Maret 2027	13 Maret 2027
10.		13 Juni 2027	13 Juni 2027	13 Juni 2027

Cicilan Imbalan Ijarah Ke-	Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah			
	Seri A	Seri B	Seri C	Seri D
11.		13 September 2027	13 September 2027	13 September 2027
12.		13 Desember 2027	13 Desember 2027	13 Desember 2027
13.			13 Maret 2028	13 Maret 2028
14.			13 Juni 2028	13 Juni 2028
15.			13 September 2028	13 September 2028
16.			13 Desember 2028	13 Desember 2028
17.			13 Maret 2029	13 Maret 2029
18.			13 Juni 2029	13 Juni 2029
19.			13 September 2029	13 September 2029
20.			13 Desember 2029	13 Desember 2029
21.				13 Maret 2030
22.				13 Juni 2030
23.				13 September 2030
24.				13 Desember 2030
25.				13 Maret 2031
26.				13 Juni 2031
27.				13 September 2031
28.				13 Desember 2031

Pemegang Sukuk Ijarah yang berhak mendapatkan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah adalah Pemegang Sukuk Ijarah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening, pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan peraturan KSEI tentang Jasa Kustodian Sentral lampiran Keputusan Direksi KSEI No.KEP-0013/DIR/KSEI/0612.

Sumber pendapatan yang menjadi dasar penghitungan pembayaran imbalan sewa dan dana yang digunakan untuk pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah berasal dari kegiatan usaha Perseroan berupa manfaat atas Jasa Pertambangan yang diselenggarakan oleh Perseroan dengan rincian sebagaimana dalam Lampiran Akad Ijarah yang merupakan kesatuan dari bagian yang tidak terpisahkan dari Akad Ijarah dalam hal ini menjadi Objek Ijarah, serta telah sesuai dengan karakteristik Akad Syariah.

Adapun manfaat atas jasa pertambangan yang diselenggarakan oleh Perseroan dalam bentuk kontrak kerja sama dengan klien bertujuan agar kegiatan pertambangan tersebut dapat dilaksanakan dengan cepat, efisien dan efektif serta baik dan benar, sehingga dapat menghasilkan produk penambangan yang optimal, baik dari aspek kuantitas maupun kualitasnya.

TIM AHLI SYARIAH

Berdasarkan surat Dewan Syariah Nasional MUI nomor U-0551/DSN-MUI/VIII/2024 tanggal 13 Agustus 2024, Tim Ahli Syariah yang bertugas memberikan pendampingan dalam penerbitan Sukuk Ijarah adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Izin
1.	Mohammad Bagus Teguh Perwira	Ketua	KEP-02/PM.223/PJ-ASPM/2021
2.	Tri Meryta	Anggota	KEP-19/PM.223/ASPM-P/2019

Ruang lingkup tugas Tim Ahli Syariah dalam rangka Penawaran Umum ini adalah:

1. Memberikan nasihat dan saran serta mengawasi pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal atas Penerbitan Sukuk Perseroan sesuai dengan prinsip hukum Islam dalam Kegiatan Syariah di Pasar Modal berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia;
2. Membuat dan menerbitkan Pernyataan kesesuaian syariah sehubungan dengan rangka Penerbitan Sukuk Perseroan;
3. Menghadiri pertemuan dan/atau telekonferensi sehubungan dengan Penerbitan Sukuk Perseroan; dan
4. Berkomunikasi dengan konsultan atau pihak profesi penunjang pasar modal lainnya yang terlibat dalam rangka Penerbitan Sukuk Perseroan apabila diperlukan.

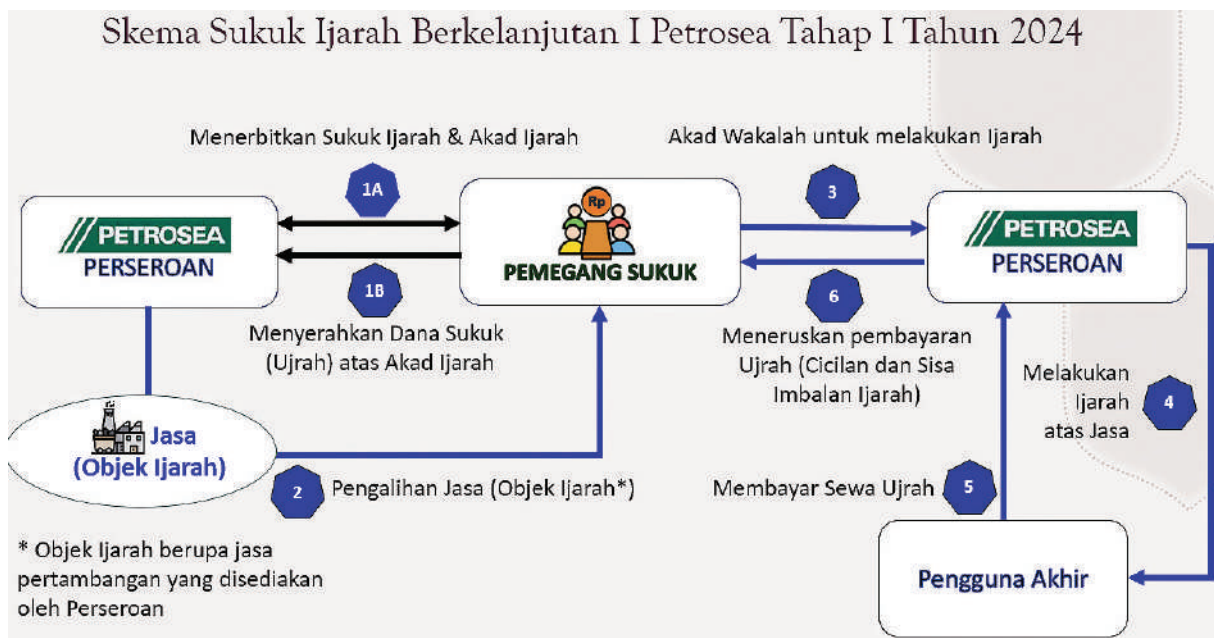
OBJEK IJARAH

Aset yang menjadi dasar (*underlying asset*) dalam penerbitan Sukuk Ijarah (Objek Ijarah) ini berasal dari manfaat atas jasa pertambangan yang diselenggarakan oleh Perseroan, dengan rincian sebagaimana dalam Lampiran Akad Ijarah yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Akad Ijarah.

Aset yang menjadi dasar (*underlying asset*) Sukuk Ijarah (Objek Ijarah), tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan Perseroan menjamin selama periode Sukuk Ijarah, aset yang menjadi dasar Sukuk Ijarah tidak akan bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal, peraturan perundang-undangan dan dengan memenuhi ketentuan dalam POJK No. 53/2015.

Dalam hal terjadinya penurunan nilai Objek Ijarah sehingga nilainya kurang dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah, maka Perseroan akan menyiapkan Objek Ijarah pengganti yang merupakan penggantian dan/ atau penambahan atas aset yang menjadi dasar Sukuk Ijarah yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal untuk menutupi kekurangan nilai Objek Ijarah.

SKEMA SUKUK IJARAH



Penjelasan mengenai skema Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Petrosea Tahap I Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. A. Perseroan menerbitkan Sukuk Ijarah dengan nilai tertentu yang didasarkan pada Objek Ijarah berupa jasa pertambangan berdasarkan Akad Ijarah;
B. Pemegang Sukuk Ijarah menyerahkan sejumlah Dana Sukuk (*ujrah*) kepada Perseroan sesuai Akad Ijarah;
2. Atas Akad Ijarah, Perseroan menyerahkan Objek Ijarah berupa jasa pertambangan kepada Pemegang Sukuk.
3. Pemegang Sukuk yang diwakili oleh Wali Amanat memberikan kuasa (Akad Wakalah) kepada Perseroan untuk melakukan ijarah atas Objek Ijarah berupa jasa pertambangan kepada Pengguna Akhir.
4. Perseroan selaku penerima kuasa dari Pemegang Sukuk melakukan ijarah atas Objek Ijarah berupa jasa pertambangan kepada Pengguna Akhir.
5. Atas Objek Ijarah tersebut, Pengguna Akhir melakukan pembayaran *ujrah* (*fee*) kepada Perseroan.
6. Perseroan meneruskan pembayaran Imbalan/*ujrah* (*fee*) kepada Pemegang Sukuk berupa Cicilan Imbalan Ijarah secara periodik sesuai dengan waktu yang diperjanjikan serta Sisa Imbalan Ijarah pada saat jatuh tempo Sukuk Ijarah.

PERNYATAAN KESESUAIAN SYARIAH ATAS SUKUK IJARAH DALAM PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN DARI TIM AHLI SYARIAH

Sesuai dengan Pernyataan Kesesuaian Syariah dari Tim Ahli Syariah yang termuat dalam surat tertanggal 16 September 2024, perihal Pernyataan Kesesuaian Syariah, Tim Ahli Syariah menyatakan bahwa Perjanjian-perjanjian dan Akad-akad yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Petrosea Tahap I Tahun 2024 tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah yang terdapat dalam Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

SUMBER DANA SUKUK IJARAH

Sumber dana yang menjadi dasar penghitungan pembayaran Sisa Imbalan Ijarah dan yang digunakan untuk pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah berasal dari kegiatan usaha Perseroan berupa layanan jasa pertambangan dan telah sesuai dengan karakteristik Akad Syariah.

RINGKASAN AKAD SUKUK IJARAH

AKAD IJARAH

Para pihak adalah BTN ("**Bank Tabungan Negara**") yang merupakan wakil Pemegang Sukuk Ijarah ("**musta'jir**") dengan Perseroan ("**mu'jir/ajir**"). *Mu'jir* berniat menerbitkan Sukuk Ijarah dengan jumlah Sisa Imbalan Ijarah sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Sukuk Ijarah Seri A dengan jangka waktu 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi
- b. Sukuk Ijarah Seri B dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi;
- c. Sukuk Ijarah Seri C dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.
- d. Sukuk Ijarah Seri D dengan jangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi.

Mu'jir/ajir setuju untuk mengalihkan hak manfaat (Ijarah) atas Objek Ijarah berupa manfaat atas jasa pertambangan yang diselenggarakan Perseroan untuk masing-masing Seri Sukuk Ijarah kepada BTN untuk menggunakan dan/atau mengalihkan kembali Objek Ijarah, dan BTN sebagai *musta'jir* setuju untuk menerima Objek Ijarah tersebut dari Perseroan. Untuk menghindari keraguan, pengalihan Objek Ijarah dari Perseroan kepada BTN tidak diikuti dengan pembebanan atas dan pengalihan kepemilikan Objek Ijarah dari Perseroan kepada BTN.

Objek Ijarah yang dialihkan tidak akan digunakan untuk kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Jangka waktu pengalihan Objek Ijarah sesuai dengan Seri Sukuk Ijarah yang diterbitkan. Akad Ijarah dibuat untuk jangka waktu Seri Sukuk Ijarah dan Akad Ijarah akan berakhir pada Tanggal Pembayaran Sisa Imbalan Ijarah dengan telah dilunasinya seluruh Imbalan Ijarah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.

Pada saat berakhirnya masa pengalihan hak manfaat Objek Ijarah, BTN setuju untuk seketika mengalihkan kembali Objek Ijarah yang telah diterimanya berdasarkan Akad Ijarah ini kepada Perseroan tanpa adanya kondisi atau syarat apapun.

Dalam hal terjadi *force majeure* atau tidak dapat digunakan/dimanfaatkan Objek Ijarah atau terjadi penurunan nilai Objek Ijarah, maka *mu'jir* akan mengganti dengan Objek Ijarah pengganti yang dimiliki atau dikuasai *mu'jir* dengan jumlah yang sesuai dengan nilai pengalihan Objek Ijarah yang merupakan nilai Sisa Imbalan Ijarah.

AKAD WAKALAH

Para pihak adalah BTN yang merupakan wakil Pemegang Sukuk Ijarah dengan Perseroan.

BTN sebagai pihak yang telah menerima pengalihan hak manfaat atas Objek Ijarah dari Perseroan berdasarkan Akad Ijarah setuju bertindak sebagai *muwakkil* untuk memberikan kuasa khusus (*wakalah*) tanpa syarat yang tidak dapat ditarik kembali kepada Perseroan, dan Perseroan selaku *wakil* setuju untuk menerima kuasa khusus (*wakalah*) tanpa syarat yang tidak dapat ditarik kembali tersebut dari BTN untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. menggunakan Objek Ijarah termasuk namun tidak terbatas pada mengalihkan kembali Objek Ijarah untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah sebagai penerima Objek Ijarah berdasarkan Akad Ijarah dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah;
- b. membuat dan melangsungkan serta memperpanjang perjanjian dengan pihak ketiga sebagai pengguna Objek Ijarah untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah sebagai penerima Objek Ijarah berdasarkan Akad Ijarah dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, dan apabila diperlukan, membuat perubahan atas perjanjian yang sudah ditandatangani oleh Perseroan dan pihak ketiga tersebut sepanjang perubahan tersebut sesuai dengan praktik industri yang berlaku umum dan wajar;
- c. mewakili segala kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah dalam rangka pelaksanaan perjanjian dengan pihak ketiga sebagai pengguna Objek Ijarah, termasuk tetapi tidak terbatas untuk melakukan penagihan dan, tanpa mengesampingkan ketentuan dalam Akad Wakalah, menerima seluruh hasil penggunaan Objek Ijarah dari pihak ketiga; dan
- d. mewakili kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah dalam mencari pengganti pihak ketiga untuk menggunakan Objek Ijarah yang tidak bertentangan dengan ketentuan Prinsip Syariah di Pasar Modal sesuai dengan ketentuan POJK.

Akad Wakalah mulai berlaku sejak Tanggal Emisi dan akan berakhir dengan berakhirnya Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.

Dalam hal telah diterimanya hasil penggunaan Objek Ijarah oleh Perseroan sebelum jadwal pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah secara periodik dan Sisa Imbalan Ijarah, Pemegang Sukuk Ijarah memberikan izin kepada Perseroan untuk menggunakan dana tersebut, dan wajib membayarkannya kepada Pemegang Sukuk Ijarah sesuai dengan jadwal pembayaran sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.

Perseroan akan membayar Imbalan Ijarah berupa Cicilan Imbalan Ijarah, Sisa Imbalan Ijarah dan Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan (jika ada) kepada Pemegang Sukuk Ijarah sesuai dengan nilai dan tata cara pembayaran sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.

PERUBAHAN AKAD SYARIAH, ISI AKAD SYARIAH DAN/ATAU OBJEK IJARAH

Syarat dan ketentuan dalam hal Perseroan akan mengubah jenis Akad Syariah, isi Akad Syariah, dan/atau aset yang menjadi dasar Sukuk Ijarah (Objek Ijarah) adalah:

- a. Perubahan tersebut hanya dapat dilakukan setelah terlebih dahulu disetujui oleh RUPSI;
- b. Mekanisme pemenuhan hak Pemegang Sukuk Ijarah terhadap perubahan dimaksud adalah:
 - a) Pembelian kembali Sukuk Ijarah;
 - b) Pembatalan terhadap perubahan dimaksud;
- c. Perubahan hanya dapat dilakukan jika ada Pernyataan Kesesuaian Syariah dari Tim Ahli Syariah sebelum dilaksanakannya RUPSI.

JAMINAN

Sukuk Ijarah ini tidak dijamin dengan suatu jaminan khusus serta tidak dijamin oleh pihak manapun, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia. Hak Pemegang Sukuk Ijarah adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

PENYISIHAN DANA (*SINKING FUND*)

Dalam hal terjadinya penurunan hasil pemeringkatan Sukuk Ijarah menjadi $A_{(sy)}$ atau peringkat di bawah itu, maka Perseroan wajib membuka Rekening DSRA dan mencadangkan *sinking fund* sekurang-kurangnya sebesar 6 (enam) bulan Cicilan Imbalan Ijarah, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kerja setelah diterbitkannya sertifikat hasil pemeringkatan Sukuk Ijarah, dimana hasil pemeringkatan Sukuk Ijarah yang menunjukkan terjadinya penurunan hasil pemeringkatan tersebut wajib disampaikan termasuk namun tidak terbatas kepada regulator, publik dan Wali Amanat sesuai ketentuan yang berlaku dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 3.4 huruf d Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah. Kewajiban mencadangkan *sinking fund* ini tidak berlaku jika hasil pemeringkatan Sukuk Ijarah menjadi di atas $A_{(sy)}$, dan karenanya dana yang berada di Rekening DSRA dapat dicairkan oleh Perseroan. Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban untuk mencadangkan *sinking fund* tersebut, tunduk pada POJK No. 20/2020 beserta perubahannya dari waktu ke waktu.

SATUAN PERDAGANGAN SUKUK IJARAH

Satuan Perdagangan Sukuk Ijarah di Bursa Efek adalah sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/ atau kelipatannya.

PEMBELIAN KEMBALI SUKUK IJARAH

Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali (*buy back*) Sukuk Ijarah, maka berlaku ketentuan Pasal 17 POJK No. 20/2020, sebagai berikut:

1. pembelian kembali Sukuk Ijarah ditujukan sebagai pelunasan sebagian atau seluruhnya atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar;
2. pelaksanaan pembelian kembali Sukuk Ijarah dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek;
3. pembelian kembali Sukuk Ijarah baru dapat dilakukan 1 tahun setelah Tanggal Penjatahan.
4. pembelian kembali Sukuk Ijarah tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah;
5. pembelian kembali Sukuk Ijarah tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPSI;
6. pembelian kembali Sukuk Ijarah hanya dapat dilakukan oleh Perseroan kepada pihak yang tidak ter-Afiliasi kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal oleh Pemerintah.
7. rencana pembelian kembali Sukuk Ijarah wajib dilaporkan kepada OJK dan Wali Amanat oleh Perseroan paling lambat 2 Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Sukuk Ijarah tersebut.
8. pembelian kembali Sukuk Ijarah, dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Sukuk Ijarah. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui:
 - situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris, dan
 - situs web Bursa efek atau 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai.
9. rencana pembelian kembali Sukuk Ijarah sebagaimana dimaksud dalam butir 7 dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 8 di atas, paling sedikit memuat informasi tentang:
 - i. periode penawaran pembelian kembali;
 - ii. jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali;
 - iii. kisaran jumlah Sukuk Ijarah yang akan dibeli kembali;
 - iv. harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Sukuk Ijarah;
 - v. tata cara penyelesaian transaksi;
 - vi. persyaratan bagi Pemegang Sukuk Ijarah yang mengajukan penawaran jual;
 - vii. tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Sukuk Ijarah;
 - viii. tata cara pembelian kembali Sukuk Ijarah; dan
 - ix. hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Sukuk Ijarah.

10. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Sukuk Ijarah yang melakukan penjualan Sukuk Ijarah apabila jumlah Sukuk Ijarah yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Sukuk Ijarah, melebihi jumlah Sukuk Ijarah yang dapat dibeli kembali;
11. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Sukuk Ijarah;
12. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Sukuk Ijarah tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 8 dengan ketentuan:
 - a. jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% dari jumlah Sukuk Ijarah untuk masing-masing jenis Sukuk Ijarah yang beredar (*outstanding*) dalam periode 1 tahun setelah Tanggal Penjatahan;
 - b. Sukuk Ijarah yang dibeli kembali tersebut bukan Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan
 - c. Sukuk Ijarah yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali.
dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 setelah terjadinya pembelian kembali Sukuk Ijarah;
13. Perseroan wajib melaporkan informasi terkait pelaksanaan pembelian kembali Sukuk Ijarah kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Sukuk Ijarah mengacu kepada Peraturan OJK Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik tanggal 16 Desember 2015 yang diundangkan pada tanggal 22 Desember 2015 atau peraturan penggantinya, informasi yang meliputi antara lain:
 - a. jumlah Sukuk Ijarah yang telah dibeli oleh Perseroan;
 - b. rincian jumlah Sukuk Ijarah yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
 - c. harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
 - d. jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Sukuk Ijarah.
14. Pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Sukuk Ijarah tersebut jika terdapat jaminan atas seluruh Sukuk Ijarah.
15. Pembelian kembali Sukuk Ijarah oleh Perseroan mengakibatkan:
 - a. Hapusnya segala hak yang melekat pada Sukuk Ijarah yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPSI, hak suara, dan hak memperoleh Cicilan Imbalan Ijarah serta manfaat lain dari Sukuk Ijarah yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
 - b. Pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Sukuk Ijarah yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPSI, hak suara, dan hak memperoleh Cicilan Imbalan Ijarah serta manfaat lain dari Sukuk Ijarah yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.

PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERSEROAN

1. Selama berlakunya jangka waktu Sukuk Ijarah dan sebelum dibayar kembali semua Sisa Imbalan Sukuk Ijarah, Cicilan Imbalan Ijarah dan biaya-biaya kompensasi (jika ada) serta biaya-biaya lain yang harus ditanggung oleh Perseroan berkenaan dengan Sukuk Ijarah, Perseroan berjanji dan mengikatkan diri bahwa tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat, Perseroan tidak akan melakukan hal-hal atau tindakan-tindakan sebagai berikut:
 - a. Melakukan dan/atau mengizinkan Entitas Anak melakukan penjualan, pengalihan atau dengan cara apapun melepaskan dalam satu atau beberapa transaksi dalam satu atau beberapa transaksi yang berhubungan, seluruh atau sebagian besar Aset, kecuali:
 - (i) dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari dan/atau dalam rangka menunjang efektifitas kegiatan usaha dari Perseroan dan/atau Entitas Anak;
 - (ii) penjualan, pengalihan atau pelepasan atas Aset yang dilakukan oleh Perseroan atau Entitas Anak dalam kaitannya dengan kegiatan usaha sehari-hari Perseroan atau Entitas Anak, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama dengan satu atau lebih penjualan, pengalihan atau pelepasan;
 - (iii) dalam rangka pelaksanaan hak dan kewajiban yang tertuang dalam suatu perjanjian dan/atau perikatan yang telah ada atau dibuat sebelum tanggal Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah; dan

- (iv) dalam rangka pelaksanaan keputusan pengadilan atau yang disetujui pada RUPS atau peraturan perundang-undangan atau berdasarkan perintah dari Pemerintah atau otoritas pemerintahan yang berwenang;
- Adapun yang dimaksud dengan sebagian besar Aset adalah lebih dari 50% dari total Aset per laporan keuangan terkonsolidasi Perseroan yang terakhir;
- “Aset” berarti seluruh aset konsolidasi Perseroan berdasarkan harga perolehan Aset sesuai dengan laporan keuangan konsolidasi Perseroan.
- b. Melaksanakan perubahan bidang usaha utama Perseroan secara material, kecuali dalam rangka penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pelaksanaan keputusan pengadilan atau berdasarkan perintah dari Pemerintah atau otoritas pemerintahan yang berwenang atau sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar Perseroan yang disetujui oleh RUPS sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Mengurangi modal dasar dan modal disetor Perseroan, kecuali dalam rangka pelaksanaan keputusan pengadilan atau peraturan perundang-undangan atau yang disetujui pada RUPS atau berdasarkan perintah dari Pemerintah atau otoritas pemerintahan yang berwenang;
- d. Mengadakan penggabungan, pengambilalihan perusahaan lain atau konsolidasi/peleburan (atau mengizinkan Entitas Anak untuk mengadakan segala bentuk penggabungan, pengambilalihan perusahaan lain atau konsolidasi/peleburan, kecuali:
- i. penggabungan, pengambilalihan perusahaan lain atau konsolidasi/peleburan yang dilakukan dalam kaitannya dengan kegiatan usaha Perseroan atau Entitas Anak;
 - ii. penggabungan, pengambilalihan perusahaan lain atau konsolidasi/peleburan tersebut tidak menimbulkan akibat negatif terhadap semua kewajibannya kepada Pemegang Sukuk Ijarah; atau
 - iii. penggabungan antara Perseroan dan Entitas Anak dengan ketentuan bahwa dalam hal penggabungan tersebut, Perseroan tetap menjadi perusahaan hasil penggabungan (*surviving company*); atau
 - iv. dalam rangka pelaksanaan keputusan pengadilan atau peraturan perundang-undangan atau yang disetujui pada RUPS atau berdasarkan perintah dari Pemerintah atau otoritas pemerintahan yang berwenang.
- e. memberikan pinjaman atau kredit kepada pihak ketiga kecuali:
- i. pinjaman kepada karyawan Perseroan, koperasi dan yayasan karyawan Perseroan dengan ketentuan jumlah tersebut tidak melebihi jumlah yang setara dengan USD750.000;
 - ii. pinjaman untuk kepentingan Entitas Anak yang laporan keuangannya dikonsolidasikan kepada Perseroan sehubungan dengan:
 - (a) kegiatan usaha Perseroan sehari-hari dengan ketentuan wajar (*arm's length*); atau
 - (b) investasi atau belanja modal Entitas Anak yang laporan keuangannya dikonsolidasikan kepada Perseroan; atau
 - (c) proyek-proyek yang dilaksanakan oleh Perseroan dan/atau Entitas Anak yang laporan keuangannya dikonsolidasikan kepada Perseroan;
 - iii. Pembinaan Usaha Kecil Dan Koperasi (PUKK) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - iv. pinjaman antara Entitas Anak;
 - v. uang muka atau pinjaman yang merupakan utang dagang biasa dan diberikan sehubungan dengan kegiatan usaha sehari-hari dengan ketentuan wajar (*arm's length*).
- f. memberikan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) atau jaminan kebendaan lain termasuk *undertaking* (pernyataan kesediaan) kepada pihak lain, kecuali kepada Entitas Anak yang laporan keuangannya dikonsolidasikan kepada Perseroan, sehubungan dengan:
- i. kegiatan usaha Perseroan sehari-hari dengan ketentuan wajar (*arm's length*);
 - ii. investasi atau belanja modal Entitas Anak yang laporan keuangannya dikonsolidasikan kepada Perseroan tersebut; atau
 - iii. proyek-proyek yang dilaksanakan oleh Perseroan dan/atau Entitas Anak yang laporan keuangannya dikonsolidasikan kepada Perseroan;
- g. mengeluarkan surat utang baru atau instrumen utang lain yang sejenis dan/atau utang bank, kecuali perolehan pinjaman (termasuk namun tidak terbatas, apabila Perseroan akan melakukan penerbitan surat utang baik dalam mata uang Rupiah maupun mata uang asing dengan atau tanpa jaminan kebendaan) yang tidak melanggar rasio keuangan sebagaimana diatur dalam angka 3 huruf b di bawah ini.

2. Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas ini akan diberikan oleh Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;
 - b. Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya dalam waktu 15 Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 15 Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/dokumen pendukung lainnya dari Wali Amanat, maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya; dan
 - c. Jika Wali Amanat meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam jangka waktu 15 Hari Kerja setelah data/dokumen pendukung yang diminta secara tertulis oleh Wali Amanat diterima oleh Wali Amanat. Jika dalam waktu 15 (lima belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan atau penolakan dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuan.

3. Selama berlakunya jangka waktu Sukuk Ijarah dan sebelum dilunasinya semua Sisa Imbalan Ijarah, Cicilan Imbalan Ijarah dan Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan (jika ada) serta biaya-biaya lain yang harus ditanggung oleh Perseroan berkenaan dengan Sukuk Ijarah Perseroan berkewajiban untuk:
 - a. memenuhi semua syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan perjanjian lainnya sehubungan dengan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dimana Perseroan merupakan pihak dalam perjanjian tersebut.
 - b. menjaga dan memelihara rasio keuangan berdasarkan laporan keuangan konsolidasi tahunan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK dan diserahkan kepada Wali Amanat, dengan ketentuan kondisi rasio keuangan sebagai berikut:
 - *Current Ratio*, yaitu perbandingan antara total aktiva lancar terhadap total kewajiban/utang lancar minimal 1 kali;
 - *EBITDA to Interest plus Instalment*, yaitu laba sebelum dikurangi bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi terhadap beban bunga ditambah dengan angsuran pinjaman minimal 1,15 kali;
 - *Interest Bearing Debt to Equity*, yaitu seluruh kewajiban/utang yang berbunga terhadap modal maksimal 3 kali.
 - c. Memenuhi semua ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan prinsip-prinsip syariah di Pasar Modal yang berkaitan dengan Sukuk Ijarah.
 - d. Menyetorkan dana untuk pelunasan Sisa Imbalan Ijarah dan/atau pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah yang jatuh tempo yang harus tersedia ke rekening yang ditunjuk oleh KSEI yang khusus dibuka untuk keperluan tersebut (*in good funds*) selambat-lambatnya 1 Hari Bursa sebelum Tanggal Pelunasan Sisa Imbalan Ijarah dan/atau Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah di rekening KSEI yang ditunjuk berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran. Tanggal Pembayaran Sisa Imbalan Ijarah kepada Agen Pembayaran berdasarkan keterangan Agen Pembayaran mengenai jumlah yang wajib dibayar oleh Perseroan, serta menyerahkan fotokopi bukti transfer kepada Wali Amanat pada hari yang sama.
 - e. Apabila Perseroan lalai menyetorkan jumlah dana tersebut pada waktu sebagaimana diatur dalam angka 3 huruf d di atas, maka atas kelalaian tersebut Perseroan dikenakan kewajiban untuk pembayaran Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan. Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Sukuk Ijarah akan dibayarkan kepada Pemegang Sukuk Ijarah secara proporsional berdasarkan besarnya Sukuk Ijarah yang dimilikinya, satu dan lain dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran.
 - f. Menjalankan usaha dengan sebaik-baiknya dan secara efisien serta sesuai dengan praktik keuangan dan perdagangan sebagaimana mestinya dan peraturan yang berlaku.
 - g. Jika Wali Amanat membutuhkan informasi yang wajar mengenai operasional dan keadaan keuangan Perseroan dan hal lain-lain sepanjang terkait dengan tugas Wali Amanat dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka Perseroan wajib menyampaikan informasi yang dibutuhkan tersebut secara tertulis selambat-lambatnya 14 Hari Kerja setelah diterimanya permohonan secara tertulis dari Wali Amanat.

- h. Segera memberitahukan kepada Wali Amanat secara tertulis dalam waktu 14 Hari Kalender sejak diketahuinya hal-hal sebagai berikut:
 - i. Setiap kejadian atau keadaan yang dapat mempunyai pengaruh buruk secara material atas jalannya usaha atau operasi atau keadaan keuangan Perseroan dan Entitas Anak yang mengganggu secara material pemenuhan kewajiban Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah;
 - ii. Sepanjang informasi tidak tersedia di situs web Perseroan atau BEI, setiap perubahan anggaran dasar yang telah disetujui Menkumham, susunan Direksi dan Dewan Komisaris yang telah diberitahukan dan diterima baik oleh Menkumham, dan/atau pembagian dividen, perubahan pemegang saham Pengendali dan diikuti dengan penyerahan akta-akta/dokumen sehubungan dengan keputusan RUPS Perseroan, setelah akta-akta/dokumen tersebut diterima oleh Perseroan;
 - iii. Perkara pidana, perdata, kepailitan, administrasi dan perburuhan yang dihadapi Perseroan yang keseluruhannya telah memiliki kekuatan hukum tetap dimana mengakibatkan ketidakmampuan Perseroan dalam menjalankan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah;
 - iv. Sepanjang informasi tidak tersedia di situs web Perseroan atau BEI, membuat pinjaman baru (dengan bunga), baik yang dilakukan oleh Perseroan maupun Entitas Anak, kecuali untuk kegiatan operasional perusahaan dengan memperhatikan ketentuan mengenai rasio keuangan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf b di atas.
- i. Menyampaikan kepada Wali Amanat:
 - i. Salinan dari laporan-laporan termasuk laporan-laporan yang berkaitan dengan aspek keterbukaan informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dibidang Pasar Modal yang disampaikan kepada OJK, BEI dan/atau KSEI, salinan dari pemberitahuan atau surat edaran kepada Pemegang Saham dalam waktu selambat-lambatnya 2 Hari Kerja setelah laporan-laporan tersebut diserahkan kepada pihak-pihak yang disebut di atas;
 - ii. Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Bapepam LK atau OJK disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke OJK;
 - iii. Laporan keuangan tengah tahunan disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke OJK;
 - iv. Laporan keuangan triwulanan disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke OJK;
- j. Segera memberikan pemberitahuan tertulis kepada Wali Amanat tentang terjadinya kelalaian sebagaimana tersebut dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah atau adanya pemberitahuan mengenai kelalaian yang diberikan oleh kreditur Perseroan. Pemberitahuan tertulis tersebut wajib disampaikan kepada Wali Amanat selambat-lambatnya 7 Hari Kerja sejak diketahuinya oleh Perseroan perihal timbulnya kelalaian tersebut atau diterimanya oleh Perseroan pemberitahuan tertulis dari kreditur tersebut;
- k. Memelihara sistem akuntansi dan pengawasan biaya sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan memelihara buku-buku dan catatan-catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan Perseroan dan hasil operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- l. Memperoleh, mematuhi segala ketentuan dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjaga tetap berlakunya segala kuasa, izin dan persetujuan (baik dari Pemerintah ataupun lainnya) dan melakukan hal-hal yang diwajibkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia;
- m. Memelihara asuransi-asuransi yang sudah berjalan dan berhubungan dengan kegiatan usaha dan harta kekayaan Perseroan pada perusahaan asuransi yang bereputasi baik terhadap segala risiko yang biasa dihadapi oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang sama dengan Perseroan;
- n. Membayar kewajiban pajak atau bea lainnya yang menjadi beban Perseroan dalam menjalankan usahanya sebagaimana mestinya;
- o. Dalam hal terjadinya penurunan hasil pemeringkatan Sukuk Ijarah menjadi $idA_{(sy)}$ atau peringkat di bawah itu, maka Perseroan wajib membuka Rekening DSRA dan mencadangkan *sinking*

fund sekurang-kurangnya sebesar 6 (enam) bulan Cicilan Imbalan Ijarah, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kerja setelah diterbitkannya sertifikat hasil pemeringkatan Sukuk Ijarah, dimana hasil pemeringkatan Sukuk Ijarah yang menunjukkan terjadinya penurunan hasil pemeringkatan tersebut wajib disampaikan termasuk namun tidak terbatas kepada regulator, publik dan Wali Amanat sesuai ketentuan yang berlaku dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 3.4 huruf d Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah. Kewajiban mencadangkan *sinking fund* ini tidak berlaku jika hasil pemeringkatan Sukuk Ijarah menjadi di atas ${}_t A_{(sy)}$, dan karenanya dana yang berada di Rekening DSRA dapat dicairkan oleh Perseroan. Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban untuk mencadangkan *sinking fund* tersebut, tunduk pada POJK No. 20/2020 beserta perubahannya dari waktu ke waktu.

- p. menerbitkan dan menyerahkan Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah kepada KSEI untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah sebagai bukti pencatatan dalam Daftar Rekening.
- q. Melakukan pemeringkatan atas Sukuk Ijarah sesuai dengan POJK No. 49/2020 berikut perubahannya, dan/atau pengaturan lainnya yang wajib dipatuhi oleh Perseroan, yaitu antara lain:
 - 1) Pemeringkatan Tahunan:
 - i. Perseroan wajib menyampaikan pemeringkatan tahunan atas Sukuk Ijarah kepada OJK dan Wali Amanat paling lambat 10 Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Sukuk Ijarah yang diterbitkan.
 - ii. Dalam hal peringkat Sukuk Ijarah yang diperoleh berbeda dari peringkat sebelumnya, Perseroan wajib mengumumkan kepada Masyarakat paling sedikit dalam situs web Perseroan dan situs web Bursa Efek paling lama 10 Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir, mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - a) peringkat tahunan yang diperoleh; dan
 - b) penjelasan singkat mengenai penyebab perubahan peringkat.
 - 2) Pemeringkatan karena terdapat Fakta Material/Kejadian Penting:
 - i. Dalam hal Pemeringkat menerbitkan peringkat baru maka Perseroan wajib menyampaikan kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada Masyarakat paling sedikit dalam situs web Perseroan dan situs web Bursa Efek paling lama akhir Hari Kerja ke-2 setelah diterimanya peringkat yang berbeda dengan sebelumnya tersebut, mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - a) peringkat baru; dan
 - b) penjelasan singkat mengenai faktor-faktor penyebab terbitnya peringkat baru.
 - ii. Masa berlaku peringkat baru adalah sampai dengan akhir periode peringkat tahunan.
 - 3) Pemeringkatan Sukuk Ijarah Dalam Penawaran Umum Berkelanjutan:
 - i. Perseroan yang menerbitkan Sukuk Ijarah melalui Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur pada POJK No. 36/2014 wajib memperoleh peringkat yang mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan yang direncanakan.
 - ii. Peringkat tahunan dan peringkat baru wajib mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan sepanjang:
 - a) periode Penawaran Umum Berkelanjutan masih berlaku; dan
 - b) Perseroan tidak dalam keadaan kondisi dilarang untuk melaksanakan penawaran Sukuk Ijarah tahap berikutnya dalam periode Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur dalam POJK No. 36/2014.
 - 4) Pemeringkatan Ulang:
 - i. Dalam hal Perseroan menerima hasil pemeringkatan ulang dari Pemeringkat terkait dengan peringkat Sukuk Ijarah selain karena hal-hal sebagaimana dimaksud dalam angka 1) butir i dan angka 2) butir i, maka Perseroan wajib menyampaikan hasil pemeringkatan ulang dimaksud kepada OJK dan Wali Amanat paling lama akhir Hari Kerja ke-2 setelah diterimanya peringkat dimaksud.
 - ii. Dalam hal peringkat yang diterima sebagaimana dimaksud dalam angka 4) butir i berbeda dari peringkat sebelumnya, maka Perseroan wajib mengumumkan kepada Masyarakat paling sedikit dalam situs web Perseroan dan situs web Bursa Efek paling lama akhir Hari Kerja ke-2 setelah diterimanya peringkat dimaksud.

KELALAIAN PERSEROAN

1. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai atau *default* apabila Perseroan tidak melaksanakan atau tidak menaati ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal tersebut di bawah ini:
 - a. Perseroan tidak membayar Sisa Imbalan Ijarah pada Tanggal Pembayaran Sisa Imbalan Ijarah dan/atau Cicilan Imbalan Ijarah pada Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah kepada Pemegang Sukuk Ijarah berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah; atau
 - b. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati kewajiban lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah; atau
 - c. Perseroan dan/atau Entitas Anak (jika ada) dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian utang atau kredit oleh salah satu atau lebih krediturnya (*cross default*) yang berupa pinjaman (*debt*), baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari yang berakibat jumlah yang terutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali dengan ketentuan jumlah utang yang dinyatakan lalai tersebut melebihi USD5.000.000; atau
 - d. Fakta mengenai keadaan, atau status Perseroan serta pengelolaannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan; atau
 - e. Adanya penundaan kewajiban pembayaran utang (*moratorium*) berdasarkan keputusan pengadilan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Dalam hal terjadi salah satu keadaan atau kejadian sebagaimana dimaksud dalam:
 - a. angka 1 huruf a Kelalaian Perseroan di atas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus paling lama 10 Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa dihilangkannya keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau
 - b. angka 1 huruf b sampai dengan angka 1 huruf e Kelalaian Perseroan di atas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat yang tercantum dalam teguran tertulis dari Wali Amanat paling lama 90 Hari Kalender sejak surat teguran dari Wali Amanat mengenai kelalaian tersebut, tanpa adanya upaya perbaikan yang mulai dilakukan oleh Perseroan atau tanpa dihilangkannya keadaan tersebut;maka Wali Amanat wajib memberitahukan keadaan atau kejadian tersebut kepada Pemegang Sukuk Ijarah melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, atas biaya Perseroan. Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPSI menurut ketentuan dan tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah. Dalam RUPSI tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaian tersebut.

Apabila RUPSI tidak dapat menerima penjelasan dan alasan-alasan Perseroan serta RUPSI memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Sukuk Ijarah sesuai dengan keputusan RUPSI menjadi jatuh tempo sehingga dapat dituntut pembayarannya dengan segera dan sekaligus. Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPSI itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan.

3. Apabila :
 - a. pihak yang berwenang (seperti pengadilan) secara hukum menyita atau mengambil alih dengan cara apapun termasuk melakukan nasionalisasi, semua atau sebagian besar harta benda Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban dalam Dokumen Emisi; atau
 - b. Perseroan dibubarkan karena sebab apapun; atau
 - c. Perseroan dinyatakan dalam keadaan pailit; atau
 - d. adanya suatu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Perseroan dan/atau Perusahaan Anak (jika ada) yang dijamin langsung oleh Perseroan yang telah memperoleh keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga yang berwenang; atau

- e. Perseroan menyatakan secara tertulis dengan menyampaikan surat kepada Wali Amanat ketidakmampuan untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan (*standstill*).
maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPSI bertindak mewakili kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan Pemegang Sukuk Ijarah dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Sukuk Ijarah. Dalam hal ini Sukuk Ijarah menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.
4. Perseroan berkewajiban untuk membayar ganti rugi kepada Wali Amanat dan/atau membebaskan Wali Amanat dari setiap dan semua gugatan, kerugian, biaya, yang diderita oleh Wali Amanat termasuk biaya Konsultan Hukum yang disetujui oleh Perseroan sehubungan dengan pemenuhan kewajiban-kewajiban Perseroan berdasarkan Dokumen Emisi kecuali terhadap gugatan, kerugian, biaya yang diderita oleh Wali Amanat yang diakibatkan oleh kelalaian Wali Amanat.

RAPAT UMUM PEMEGANG SUKUK IJARAH (RUPSI)

Untuk penyelenggaraan RUPSI, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan, berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. RUPSI diadakan untuk tujuan antara lain:
 - a. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Sukuk Ijarah mengenai perubahan jangka waktu Sukuk Ijarah, jumlah Sisa Imbalan Ijarah, Cicilan Imbalan Ijarah, perubahan tata cara atau periode pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, dan/ atau ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dengan memperhatikan Peraturan OJK Nomor 20/POJK.04/2020.
 - b. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
 - c. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah;
 - d. mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Sukuk Ijarah termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan Peraturan OJK Nomor 20/POJK.04/2020;
 - e. mengambil tindakan lain yang diusulkan oleh Wali Amanat yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
 - f. mengambil keputusan tentang terjadinya peristiwa *Force majeure* dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara Para Pihak.
 - g. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan untuk melakukan perubahan isi Akad Ijarah dan/atau Akad Wakalah dan/atau Objek Ijarah, setelah adanya Pernyataan Kesesuaian Syariah dari Tim Ahli Syariah.
2. RUPSI dapat diselenggarakan atas permintaan:
 - a. Pemegang Sukuk Ijarah baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% dari jumlah Sukuk Ijarah yang belum dilunasi tidak termasuk Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya (kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah), mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPSI dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Ijarah yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Sukuk Ijarah yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Sukuk Ijarah oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat;
 - b. Perseroan;
 - c. Wali Amanat; atau
 - d. OJK.

3. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a, huruf b dan huruf d wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lama 30 Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPSI.
4. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Sukuk Ijarah atau Perseroan untuk mengadakan RUPSI, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lama 14 Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.
5. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPSI:
 - a. Pengumuman RUPSI wajib dilakukan melalui 1 surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lama 14 Hari Kalender sebelum pemanggilan.
 - b. Pemanggilan RUPSI dilakukan paling lama 14 Hari Kalender sebelum RUPSI, melalui paling sedikit 1 surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
 - c. Pemanggilan RUPSI kedua atau ketiga dilakukan paling lama 7 Hari Kalender sebelum RUPSI kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPSI sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.
 - d. Pemanggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPSI dan mengungkapkan informasi antara lain:
 - tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPSI;
 - agenda RUPSI;
 - pihak yang mengajukan usulan RUPSI;
 - Pemegang Sukuk Ijarah yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPSI; dan
 - kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPSI.
 - e. RUPSI kedua dan ketiga diselenggarakan paling singkat 14 Hari Kalender dan paling lambat 21 Hari Kalender dari RUPSI sebelumnya.
6. Tata cara RUPSI:
 - a. Pemegang Sukuk Ijarah, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPSI dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Sukuk Ijarah yang dimilikinya.
 - b. Pemegang Sukuk Ijarah yang berhak hadir dalam RUPSI adalah Pemegang Sukuk Ijarah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSI yang diterbitkan oleh KSEI.
 - c. Pemegang Sukuk Ijarah yang menghadiri RUPSI wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat.
 - d. Seluruh Sukuk Ijarah yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Sukuk Ijarah tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 4 Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSI sampai dengan tanggal berakhirnya RUPSI yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat. Transaksi Sukuk Ijarah yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPSI.
 - e. Setiap Sukuk Ijarah sebesar Rp1,- berhak mengeluarkan 1 suara dalam RUPSI, dengan demikian setiap Pemegang Sukuk Ijarah dalam RUPSI mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Sukuk Ijarah yang dimilikinya.
 - f. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan Nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.
 - g. Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.
 - h. Sebelum pelaksanaan RUPSI:
 - Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Sukuk Ijarah dari Afiliasinya kepada Wali Amanat;
 - Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya;
 - Pemegang Sukuk Ijarah atau kuasa Pemegang Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Sukuk Ijarah memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan.

- i. RUPSI dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat.
 - j. RUPSI dipimpin oleh Wali Amanat.
 - k. Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPSI termasuk materi RUPSI dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPSI.
 - l. Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Sukuk Ijarah, maka RUPSI dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Sukuk Ijarah yang meminta diadakan RUPSI tersebut. Perseroan atau Pemegang Sukuk Ijarah yang meminta diadakannya RUPSI tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPSI dan materi RUPSI serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPSI.
7. Dengan memperhatikan ketentuan dalam angka 6 huruf g di atas, kuorum dan pengambilan keputusan:
- a. Dalam hal RUPSI bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah sebagaimana dimaksud dalam angka 1 diatur sebagai berikut:
 - 1). Apabila RUPSI dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (i) dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit 3/4 bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.
 - (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI yang kedua.
 - (iii) RUPSI kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit 3/4 bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.
 - (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI yang ketiga.
 - (v) RUPSI ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit 3/4 bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.
 - 2). Apabila RUPSI dimintakan oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (i) dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit 2/3 bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.
 - (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI yang kedua.
 - (iii) RUPSI kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit 2/3 bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.
 - (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI yang ketiga.
 - (v) RUPSI ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit 2/3 bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.
 - 3). Apabila RUPSI dimintakan oleh OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - (i) dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit 1/2 bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.
 - (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI yang kedua.

- (iii) RUPSI kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit 1/2 bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.
 - (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI yang ketiga.
 - (v) RUPSI ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit 1/2 bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.
- b. RUPSI yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1). dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit 3/4 bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.
 - 2). dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 1) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI yang kedua.
 - 3). RUPSI kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit 3/4 bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.
 - 4). dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 3) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI yang ketiga.
 - 5). RUPSI ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit 3/4 dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.
 - 6). dalam hal korum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 5) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI yang keempat.
 - 7). RUPSI keempat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK.
 - 8). Pengumuman, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPSI keempat wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 5. di atas.
8. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPSI menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lama 7 Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat, yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
9. Penyelenggaraan RUPSI wajib dibuatkan berita acara secara notariil.
10. Keputusan RUPSI mengikat bagi semua Pemegang Sukuk Ijarah, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Sukuk Ijarah wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPSI. Keputusan RUPSI mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Sukuk Ijarah, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Sukuk Ijarah.
11. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPSI dalam 1 surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPSI tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan.
12. Apabila RUPSI yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Sisa Imbalan Ijarah, perubahan tata cara pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, dan perubahan jangka waktu Sukuk Ijarah dan Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 Hari Kalender sejak keputusan

RUPSI atau tanggal lain yang diputuskan RUPSI (jika RUPSI memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Sisa Imbalan Ijarah kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPSI.

13. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPSI dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.
14. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPSI ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan di Pasar Modal tersebut yang berlaku.

HAK-HAK PEMEGANG SUKUK IJARAH

1. Menerima pembayaran Sisa Imbalan Ijarah dan/atau pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Sisa Imbalan Ijarah dan/atau Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah. Sisa Imbalan Ijarah harus dibayar dengan harga yang sama dengan jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Ijarah pada Tanggal Pembayaran Sisa Imbalan Ijarah;
2. Yang berhak atas Cicilan Imbalan Ijarah adalah Pemegang Sukuk Ijarah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku;
3. Apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah atau Pembayaran Sisa Imbalan Ijarah setelah lewat Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah atau Tanggal Pembayaran Sisa Imbalan Ijarah, maka Perseroan harus membayar Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan atas kelalaian membayar jumlah Cicilan Imbalan Ijarah dan/atau Sisa Imbalan Ijarah. Kompensasi kerugian akibat keterlambatan yang dibayar oleh Perseroan secara wajar dan realistis yang merupakan hak Pemegang Sukuk Ijarah oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Sukuk Ijarah secara proporsional berdasarkan besarnya Sukuk Ijarah yang dimilikinya;
4. Pemegang Sukuk Ijarah baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% dari jumlah Sukuk Ijarah yang belum dilunasi, termasuk di dalamnya Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPSI dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Ijarah yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Sukuk Ijarah yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat;
5. Setiap Sukuk Ijarah sebesar Rp1,- berhak mengeluarkan 1 suara dalam RUPSI, dengan demikian setiap Pemegang Sukuk Ijarah dalam RUPSI mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Sukuk Ijarah yang dimilikinya.

CARA PELUNASAN SISA IMBALAN IJARAH DAN PEMBAYARAN CICILAN IMBALAN IJARAH

Pembayaran Sisa Imbalan Ijarah dan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan Sisa Imbalan Ijarah sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

WALI AMANAT

BTN telah ditunjuk sebagai Wali Amanat dalam penerbitan Sukuk Ijarah ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Petrosea Tahap I Tahun 2024 No. 52 tanggal 17 September 2024, Akta Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Petrosea Tahap I Tahun 2024 No. 21 tanggal 14 Oktober 2024 dan Akta Addendum II Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Petrosea Tahap I Tahun 2024 No. 5 tanggal 1 November 2024, yang seluruhnya dibuat di hadapan Aulia Taufani S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, antara Perseroan dengan BTN selaku Wali Amanat.

Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dan hubungan kredit dengan BTN yang bertindak sebagai Wali Amanat. Keterangan mengenai Wali Amanat dapat dilihat pada Bab XI Prospektus ini.

HASIL PEMERINGKATAN SUKUK IJARAH

Berdasarkan Peraturan OJK No.7/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk dan Peraturan OJK No.49/2020 tentang Peningkatan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk, Perseroan telah melakukan peningkatan yang dilaksanakan oleh Pefindo. Berdasarkan hasil peningkatan atas efek utang jangka panjang sesuai dengan surat No. RC-1134/PEF-DIR/IX/2024 tanggal 12 September 2024 dari Pefindo, Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Petrosea Tahap I Tahun 2024 telah mendapat peringkat:

^{id}A⁺_(sy)
(Single A Plus Syariah)

Peringkat ini berlaku untuk periode 11 September 2024 sampai dengan 1 September 2025.

Perseroan dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Pefindo yang bertindak sebagai Lembaga Peningkat, sesuai dengan yang didefinisikan dalam UUP2SK. Sesuai ketentuan yang diatur dalam POJK No. 49/2020, Perseroan akan melakukan peningkatan atas Sukuk Ijarah yang diterbitkan setiap 1 (satu) tahun sekali selama jangka waktu Sukuk Ijarah. Perseroan wajib menyampaikan Peringkat Tahunan atas setiap Klasifikasi Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Sukuk Ijarah yang diterbitkan.

HAK SENIORITAS DARI SUKUK IJARAH

Hak Pemegang Sukuk Ijarah adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Petrosea Tahap I Tahun 2024 ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan dipergunakan oleh Perseroan seluruhnya untuk modal kerja Perseroan, melalui proyek-proyek yang dikerjakan Perseroan pada proyek-proyek pertambangan dan proyek-proyek rekayasa & konstruksi yang merupakan kegiatan usaha utama Perseroan, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Sekitar 40% (empat puluh persen) akan dipergunakan untuk pembelian material dan jasa terkait pembelian material yang bersifat beli putus sesuai kebutuhan Perseroan dan ketersediaan material dari pihak yang tidak terafiliasi dengan Perseroan;
- b. Sekitar 27% (dua puluh tujuh persen) akan dipergunakan untuk biaya operasi alat berat dan peralatan;
- c. Sekitar 25% (dua puluh lima persen) akan dipergunakan untuk biaya-biaya tenaga kerja; dan
- d. Sisanya akan dipergunakan untuk beban usaha lainnya.

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Petrosea Tahap I Tahun 2024 ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan dipergunakan oleh Perseroan seluruhnya untuk modal kerja Perseroan, melalui proyek-proyek yang dikerjakan Perseroan pada proyek-proyek pertambangan dan proyek-proyek rekayasa & konstruksi yang merupakan kegiatan usaha utama Perseroan, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Sekitar 40% (empat puluh persen) akan dipergunakan untuk pembelian material dan jasa terkait pembelian material yang bersifat beli putus sesuai kebutuhan Perseroan dan ketersediaan material dari pihak yang tidak terafiliasi dengan Perseroan;
- b. Sekitar 27% (dua puluh tujuh persen) akan dipergunakan untuk biaya operasi alat berat dan peralatan;
- c. Sekitar 25% (dua puluh lima persen) akan dipergunakan untuk biaya-biaya tenaga kerja; dan
- d. Sisanya akan dipergunakan untuk beban usaha lainnya.

Jika dana hasil Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah ini tidak mencukupi untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut di atas, maka kekurangannya akan dibiayai oleh arus kas Perseroan dan/atau pinjaman modal kerja dari bank.

Apabila terdapat dana hasil Penawaran Umum Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah yang belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah tersebut harus dilakukan Perseroan dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas serta keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan sebagaimana diatur dalam POJK No. 30/2015.

Perseroan wajib melaporkan realisasi penggunaan dana kepada OJK dan Wali Amanat dengan tembusan kepada OJK secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 (tiga puluh) Juni dan 31 (tiga puluh satu) Desember sampai seluruh dana hasil Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah direalisasikan serta laporan tersebut disampaikan paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah tanggal laporan, dimana untuk pertama kali laporan realisasi penggunaan dana tersebut wajib dibuat pada tanggal laporan terdekat sebagaimana dimaksud di atas setelah Tanggal Emisi sesuai dengan POJK No. 30/2015.

Dalam hal Perseroan telah menggunakan dana hasil Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah sebelum tanggal laporan, Perseroan dapat menyampaikan realisasi penggunaan dana terakhir lebih awal dari batas waktu penyampaian laporan. Perseroan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah dalam setiap RUPO dan/atau RUPSI tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan.

Dalam hal implementasi atas dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi dan Sukuk Ijarah tersebut di atas merupakan suatu (a) transaksi afiliasi atau benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020; dan/atau (b) transaksi material sebagaimana dimaksud dalam

POJK No. 17/2020, maka Perseroan akan memenuhi ketentuan POJK No. 42/2020 dan/atau POJK No. 17/2020 (sebagaimana berlaku).

Rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah ini tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal, sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 18/2015.

Apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini sebagaimana dimaksud di atas, maka Perseroan wajib menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana dimaksud kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum penyelenggaraan RUPO dan/atau RUPSI dan memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari RUPO dan/atau RUPSI sesuai dengan POJK No. 30/2015 dan POJK No. 20/2020. Hasil RUPO dan/atau RUPSI wajib disampaikan oleh Perseroan kepada OJK paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah penyelenggaraan RUPO dan/atau RUPSI.

Sesuai POJK No.9/2017, total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah kurang lebih setara dengan 0,95886% (nol koma sembilan lima delapan delapan enam persen) dari nilai emisi Obligasi yang terdiri dari:

• Biaya jasa penyelenggaraan (<i>management fee</i>)	0,34654%
• Biaya jasa penjaminan (<i>underwriting fee</i>)	0,07426%
• Biaya jasa penjualan (<i>selling fee</i>)	0,07426%
• Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal terdiri dari :	
- Biaya jasa Akuntan Publik	0,21950%
- Biaya jasa Konsultan Hukum	0,05330%
- Biaya jasa Notaris	0,00670%
• Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal terdiri dari :	
- Biaya jasa Wali Amanat	0,00930%
- Biaya jasa Perusahaan Pemeringkat Efek	0,06500%
• Biaya lain-lain (OJK, BEI, KSEI, Percetakan, dan Audit Penjatahan)	0,11000%

Sesuai POJK No.9/2017, total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah kurang lebih setara dengan 0,92539% (nol koma sembilan dua lima tiga sembilan persen) dari nilai emisi Sukuk Ijarah yang terdiri dari:

• Biaya jasa penyelenggaraan (<i>management fee</i>)	0,33991%
• Biaya jasa penjaminan (<i>underwriting fee</i>)	0,07284%
• Biaya jasa penjualan (<i>selling fee</i>)	0,07284%
• Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal terdiri dari :	
- Biaya jasa Akuntan Publik	0,21960%
- Biaya jasa Konsultan Hukum	0,05340%
- Biaya jasa Notaris	0,00660%
- Biaya jasa Tim Ahli Syariah	0,01600%
• Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal terdiri dari :	
- Biaya jasa Wali Amanat	0,00940%
- Biaya jasa Perusahaan Pemeringkat Efek	0,07000%
• Biaya lain-lain (OJK, BEI, KSEI, Percetakan, dan Audit Penjatahan)	0,06480%

III. PERNYATAAN UTANG

Di bawah ini disajikan posisi liabilitas yang bersumber dari Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Liana Ramon Xenia & Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI dengan opini tanpa modifikasian dengan penambahan paragraf hal-hal lain mengenai penerbitan kembali Laporan Keuangan Konsolidasian Interim untuk menyesuaikan pengungkapan dengan peraturan pasar modal yang berlaku sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi dan Sukuk Ijarah untuk disertakan dalam Dokumen Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi dan Sukuk Ijarah dan tidak dimaksudkan dan tidak boleh digunakan untuk tujuan lain dan laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 yang tidak diaudit/ tidak direviu, dalam laporannya nomor 00126/2.1460/AU.1/02/1428-3/1/XI/2024 tanggal 1 November 2024 yang ditandatangani oleh Kasman.

Pada tanggal 30 Juni 2024, Perseroan dan Perusahaan Anak mempunyai jumlah liabilitas sebesar USD494.015 ribu. Rincian jumlah liabilitas Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 30 Juni 2024 disajikan pada tabel di bawah ini:

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

Keterangan	30 Juni 2024
LIABILITAS JANGKA PENDEK	
Utang bank	44.353
Utang usaha – pihak ketiga	142.429
Utang lain-lain – pihak ketiga	1.040
Utang dividen	957
Utang pajak	2.255
Beban masih harus dibayar	12.224
Liabilitas kontrak	30.812
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:	
Pinjaman jangka panjang – pihak ketiga	9.758
Liabilitas sewa	7.944
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	251.772
LIABILITAS JANGKA PANJANG	
Liabilitas jangka panjang – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:	
Pinjaman jangka panjang – pihak ketiga	175.718
Liabilitas sewa	11.593
Liabilitas imbalan pasca kerja	25.164
Liabilitas pajak tangguhan – bersih	29.647
Liabilitas jangka panjang lainnya	121
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	242.243
JUMLAH LIABILITAS	494.015

1. Utang Bank Jangka Pendek

Saldo utang bank jangka pendek Perseroan pada tanggal 30 Juni 2024 adalah sebesar USD44.353 ribu, adapun rincian utang bank jangka pendek tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

Kreditur	Fasilitas maksimum	Tanggal perjanjian	Tanggal jatuh tempo	Tingkat bunga per tahun	30 Juni 2024
PT Bank Central Asia Tbk	70.000.000	29 Mei 2024	9 dan 19 September 2024	Term SOFR 3M + 2%	44.353
Jumlah					44.353

PT Bank Central Asia Tbk (“BCA”)

Pada tanggal 29 Mei 2024, Perseroan dan BCA menandatangani perjanjian untuk memberikan fasilitas *time loan revolving* sebesar USD70 juta, dengan jatuh tempo 2 tahun dan tingkat suku bunga *term* SOFR tiga bulan ditambah margin sebesar 2% per tahun untuk USD dan JIBOR tiga bulan ditambah margin sebesar 1,75% per tahun untuk Rupiah. Tujuan penggunaan fasilitas ini untuk membiayai modal kerja Perseroan dan Perusahaan Anak. Fasilitas ini hanya dapat digunakan oleh Perseroan, KBL dan CEP.

Pada tanggal 30 Juni 2024, fasilitas ini telah digunakan sebesar USD44.186 ribu oleh Perseroan, utang bank ini akan jatuh tempo pada 9 dan 19 September 2024. Pada tanggal 9 dan 19 September 2024, Perseroan mengajukan Surat Permohonan Perpanjangan Pembayaran (“SPPFK”) kepada BCA terkait perpanjangan waktu pembayaran atas pinjaman ini. Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari BCA dan waktu pembayaran diperpanjang sampai dengan tanggal 11 dan 21 Desember 2024.

Pada tanggal 30 Juni 2024, pinjaman dari fasilitas ini dijamin dengan piutang usaha senilai USD82.569 ribu.

2. Utang Usaha – Pihak Ketiga

Saldo utang usaha – pihak ketiga Perseroan pada tanggal 30 Juni 2024 adalah sebesar USD142.429 ribu, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

Keterangan	30 Juni 2024
<u>Berdasarkan pemasok</u>	
Pihak ketiga:	
Pemasok dalam negeri	136.913
Pemasok luar negeri	5.516
Jumlah	142.429
<u>Berdasarkan umur</u>	
Belum jatuh tempo	79.833
Sudah jatuh tempo	
Dibawah 30 hari	17.150
31 – 60 hari	7.759
61 – 90 hari	5.414
91 – 120 hari	7.990
>120 hari	24.283
Jumlah	142.429
<u>Berdasarkan mata uang</u>	
Mata uang fungsional	35.343
Dolar Amerika Serikat	
Mata uang lain	
Rupiah	100.778
Dolar Australia	4.343
Euro	1.955
Dolar Singapura	10
Jumlah	142.429

3. Utang Lain-Lain – Pihak Ketiga

Pada tanggal 30 Juni 2024, Perseroan memiliki saldo utang lain-lain – pihak ketiga sebesar USD1.040 ribu, terutama terkait dengan fasilitas kredit kepemilikan rumah yang diberikan kepada karyawan.

4. Utang Dividen

Berdasarkan RUPS tanggal 15 Mei 2023, pemegang saham menyetujui pembagian dividen tunai final untuk tahun buku 2022 sebesar USD76 juta atau USD0,07664 per lembar saham. Dividen kas dibayar pada tanggal 30 Mei 2023.

Berdasarkan RUPS tanggal 29 April 2024, pemegang saham menyetujui pembagian dividen tunai final untuk tahun buku 2023 sebesar USD3 juta atau USD0,00308 per lembar saham. Dividen kas dibayar pada tanggal 30 Mei 2024.

Pada tanggal 30 Juni 2024, saldo utang dividen kas Perseroan adalah sebesar USD957 ribu.

5. Utang Pajak

Saldo utang pajak Perseroan pada tanggal 30 Juni 2024 adalah sebesar USD2.255 ribu. Berikut dibawah ini rincian utang pajak Perseroan:

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

Keterangan	30 Juni 2024
Pajak kini	
Entitas Anak	87
Pajak penghasilan	
Pasal 4(2)	374
Pasal 15	8
Pasal 21	1.260
Pasal 23	502
Pasal 25	2
Pasal 26	22
Jumlah	2.255

6. Beban Masih Harus Dibayar

Saldo beban masih harus dibayar Perseroan pada tanggal 30 Juni 2024 adalah sebesar USD12.224 ribu, yang terdiri dari:

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

Keterangan	30 Juni 2024
Gaji dan bonus	6.336
Jasa keamanan	2.673
Tanggung jawab social perusahaan	1.397
Bagian lancar cuti berimbalan jangka panjang	556
Cuti tahunan	527
Pajak kendaraan	249
Lain-lain	486
Jumlah	12.224

7. Liabilitas Kontrak

Pada tanggal 30 Juni 2024, Perseroan memiliki saldo liabilitas kontrak sebesar USD30.812 ribu. Liabilitas kontrak adalah saldo terutang yang berkaitan dengan kontrak konstruksi dan jasa kontraktor pertambangan kepada pelanggan selama kontrak. Hal ini muncul jika tonggak pembayaran tertentu melebihi pendapatan yang diakui hingga saat ini berdasarkan metode biaya-ke-biaya.

Jumlah pendapatan yang diakui pada periode berjalan terkait kontrak dengan pelanggan dengan liabilitas kontrak bawaan sebesar USD30.516 ribu sampai pada 2024. Tidak ada pendapatan yang diakui pada periode berjalan yang terkait dengan kewajiban pelaksanaan yang telah dipenuhi di tahun lalu.

8. Pinjaman Jangka Panjang – Pihak Ketiga

Saldo pinjaman jangka panjang – pihak ketiga Perseroan pada tanggal 30 Juni 2024 adalah sebesar USD187.389 ribu. Adapun rincian mengenai pinjaman jangka panjang tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

Keterangan	30 Juni 2024
Pihak ketiga	
Dolar Amerika Serikat	
PT Bank Central Asia Tbk	107.512
Rupiah	
PT Bank Central Asia Tbk	79.877
Jumlah	187.389
Biaya pinjaman jangka panjang yang belum diamortisasi	(2.302)
Bunga yang masih harus dibayar	389
Jumlah	185.476
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	(9.758)
Pinjaman jangka panjang – bersih	175.718
Jadwal pembayaran pokok pinjaman	
Kurang dari satu tahun	9.369
Lebih dari satu tahun dan kurang dari lima tahun	61.422
Lebih dari lima tahun	116.598
Jumlah	187.389
Tingkat suku bunga per tahun:	
Dolar Amerika Serikat	3M Term SOFR + 2,25% p.a.
Rupiah	3M JIBOR + 1,95% p.a.

PT Bank Central Asia Tbk (“BCA”)

Pada tanggal 29 Mei 2024, BCA dan bersama-sama Perseroan, KBL dan CEP telah menyetujui beberapa pemberian fasilitas bank sebagai berikut:

a. Fasilitas pinjaman tunai

i. Kredit investasi 1 (“KI 1”)

Fasilitas ini senilai setara USD107 juta, dengan tenor 8 tahun, dan tingkat suku bunga *term* SOFR tiga bulan ditambah margin sebesar 2,25% per tahun untuk USD dan JIBOR tiga bulan ditambah margin sebesar 1,95% per tahun untuk Rupiah. Tujuan penggunaan fasilitas ini untuk *takeover* fasilitas *Term Loan* I, II, III dan *Senior Secured Term Loan* di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Fasilitas ini hanya dapat digunakan oleh Perseroan dan KBL.

Pada tanggal 30 Juni 2024, fasilitas KI 1 ini telah digunakan oleh Perseroan dan KBL sebesar USD97.180 ribu. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 29 Mei 2032.

ii. Kredit Investasi 2 (“KI 2”)

Fasilitas ini senilai setara USD83 juta, dengan tenor 10 tahun, dan tingkat suku bunga sebesar *term* SOFR ditambah margin sebesar 2,25% per tahun untuk USD dan tiga bulan JIBOR ditambah margin sebesar 1,95% per tahun untuk Rupiah. Tujuan penggunaan fasilitas ini untuk *takeover* fasilitas *Senior Secured Term Loan* di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Fasilitas ini hanya dapat digunakan oleh Perseroan dan KBL.

Pada tanggal 30 Juni 2024, fasilitas KI 2 ini telah digunakan oleh Perseroan sebesar USD81.698 ribu. Fasilitas KI 2 ini akan jatuh tempo pada tanggal 29 Mei 2034.

iii. Kredit Investasi 3 (“KI 3”)

Fasilitas ini senilai Rp500 miliar (setara dengan USD30,4 juta), dengan tenor 10 tahun, dan tingkat suku bunga JIBOR tiga bulan ditambah margin sebesar 1,95% per tahun untuk Rupiah. Tujuan penggunaan fasilitas ini untuk membiayai pembangunan infrastruktur CEP yang terletak di dekat tambang CEP. Fasilitas ini hanya dapat digunakan oleh CEP.

Pada tanggal 30 Juni 2024, fasilitas KI 3 ini telah digunakan oleh CEP sebesar Rp138 miliar (setara dengan USD8.512 ribu). Fasilitas KI 3 ini akan jatuh tempo pada tanggal 29 Mei 2034.

iv. Fasilitas Investasi 4 (“KI 4”)

Fasilitas ini senilai USD50 juta, dengan tenor 8 tahun, dan tingkat suku bunga *term* SOFR tiga bulan ditambah margin sebesar 2,25% per tahun. Tujuan penggunaan fasilitas ini untuk membiayai pembelian alat berat dan/atau mesin baru termasuk dengan komponen atas alat berat. Fasilitas ini hanya dapat digunakan oleh Perseroan, KBL dan CEP.

Pada tanggal 30 Juni 2024, belum ada penggunaan atas fasilitas KI 4 ini.

v. Kredit Investasi 5 (“KI 5”)

Fasilitas ini senilai Rp800 miliar (setara dengan USD48,7 juta), dengan tenor 8 tahun, dan tingkat suku bunga JIBOR tiga bulan ditambah margin sebesar 1,95% per tahun. Tujuan penggunaan fasilitas ini untuk membiayai pembelian alat berat dan/atau mesin baru termasuk dengan komponen atas alat berat. Fasilitas ini hanya dapat digunakan oleh Perseroan, KBL dan CEP.

Pada tanggal 30 Juni 2024, belum ada penggunaan atas fasilitas KI 5 ini.

b. Fasilitas pinjaman non-tunai

i. Kredit Multi Fasilitas (“KMF”)

Fasilitas ini senilai setara USD100 juta, dengan tenor fasilitas 1 tahun. Fasilitas ini dapat digunakan untuk LC/SKBDN, *Forex Forward Line*, dan BG/SBLC. Fasilitas ini dapat digunakan oleh Perseroan, KBL dan CEP.

Pada tanggal 30 Juni 2024, fasilitas ini telah digunakan oleh Perseroan sebesar USD88.506 ribu untuk penerbitan SBLC atas BG/SBLC dan LC/SKBDN.

Fasilitas pinjaman dengan BCA mencakup persyaratan keuangan seperti mempertahankan rasio lancar tidak kurang dari 100%, rasio EBITDA terhadap utang dan kewajiban bunga tidak kurang dari 115%, rasio utang terhadap ekuitas tidak melebihi 250%, yang dihitung berdasarkan laporan keuangan konsolidasian setiap tahunan.

9. Liabilitas Sewa

Saldo liabilitas sewa Perseroan pada tanggal 30 Juni 2024 adalah sebesar USD19.537 ribu, dengan rincian sebagai berikut:

		<i>(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)</i>
Keterangan		30 Juni 2024
Analisis jatuh tempo		
Tahun 1		9.110
Tahun 2		6.765
Tahun 3		4.120
Tahun 4		1.562
Tahun 5		623
Lebih dari 5 tahun		596
Jumlah		22.776
Beban keuangan ditangguhkan		(3.239)
Jumlah		19.537
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun		(7.944)
Liabilitas sewa – bersih – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun		11.593

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

Keterangan	30 Juni 2024
Rincian liabilitas sewa berdasarkan pesewa:	
Pihak ketiga:	
PT Mitsubishi HC Capital and Finance Indonesia ("MHCI")	7.214
PT Putra Otomona Jaya	2.365
PT Dokindo Aimas Papua	1.592
PT Hexa Finance Indonesia	1.352
PT Chandra Sakti Utama Leasing	1.091
PT Catepillar Finance Indonesia	818
PT SMFL Leasing Indonesia	751
PT Buana Jaya Rentama	688
PT Radios Apirja Sorong	613
PT Berca Mandiri Perkasa	556
PT KDB Tifa Finance Tbk	303
PT Bagong Dekaka Makmur	302
PT Gaya Makmur Mobil	299
PT Gelora Lintas Maharitas	279
PT Orix Indonesia Finance	197
PT Transkon Jaya	177
PT Gatra Kaltim Jaya	163
PT Komatsu Astra Finance	160
Lainnya (dibawah USD100 ribu)	617
Jumlah	19.537

Perseroan dan Perusahaan Anak membeli sebagian alat berat operasinya melalui transaksi jual dan sewa balik. Liabilitas sewa ini dijamin dengan aset sewa yang bersangkutan. Jangka waktu sewa adalah 2 sampai 5 tahun.

Syarat dan ketentuan atas perjanjian sewa adalah sebagai berikut:

- i. Perseroan tidak diperbolehkan untuk menjual, meminjamkan, melakukan sewa kembali, atau melepaskan atau, menghentikan pengendalian langsung atas, aset hak-guna; dan
- ii. Perseroan tidak diperbolehkan menggunakan aset hak-guna sebagai jaminan, termasuk jaminan deposito, atau garansi kepada lessor lainnya.

Perseroan

PT Mitsubishi HC Capital and Finance Indonesia ("MHCI")

Pada tanggal 19 September 2022, Perseroan dan MHCI menandatangani fasilitas kredit untuk sewa dimana Perseroan diberikan fasilitas kredit sewa. Perseroan mencairkan fasilitas sewa pada tanggal 28 Oktober 2022 sebesar Rp32,1 miliar (setara dengan USD2 juta) dengan masa sewa yang akan berakhir pada tanggal 28 Oktober 2027. Tingkat bunga fasilitas adalah 9,9% per tahun.

Perseroan mencairkan fasilitas sewa pada tanggal 3 November 2022 sebesar Rp18 miliar (setara dengan USD1 juta) dengan masa sewa yang akan berakhir pada tanggal 3 November 2027. Tingkat bunga fasilitas adalah 9,9% per tahun.

Perseroan mencairkan fasilitas sewa pada tanggal 23 Desember 2022 sebesar Rp26,7 miliar (setara dengan USD1,7 juta) dengan masa sewa yang akan berakhir pada tanggal 23 Desember 2027. Tingkat bunga fasilitas adalah 9,9% per tahun.

Perseroan mencairkan fasilitas sewa pada tanggal 30 Januari 2023 sebesar Rp13,8 miliar (setara dengan USD890 ribu) dengan masa sewa yang akan berakhir pada tanggal 30 Januari 2028. Tingkat bunga fasilitas adalah 9,9% per tahun.

Perseroan mencairkan fasilitas sewa pada tanggal 16 Februari 2023 sebesar Rp30 miliar (setara dengan USD1,9 juta) dengan masa sewa yang akan berakhir pada tanggal 16 Februari 2028. Tingkat bunga fasilitas adalah 9,9% per tahun.

Perseroan mencairkan fasilitas sewa pada tanggal 26 April 2023 sebesar Rp41,8 miliar (setara dengan USD2,7 juta) dengan masa sewa yang akan berakhir pada tanggal 27 April 2027. Tingkat bunga fasilitas adalah 9,9% per tahun.

PT Orix Indonesia Finance (“Orix”)

Pada tanggal 12 Juli 2019, Orix memberikan fasilitas sewa kepada Perseroan sebesar USD10.569 ribu. Pada tanggal 18 Juli 2019, Perseroan mencairkan fasilitas sewa. Fasilitas berakhir pada tanggal 18 Juli 2024. Tingkat bunga fasilitas adalah 2,30% ditambah LIBOR tiga bulan. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian interim, tidak terdapat perpanjangan atas fasilitas ini.

PT Komatsu Astra Finance (“Komatsu”)

Pada tahun 2019, Perseroan dan Komatsu menandatangani beberapa perjanjian fasilitas sewa jangka panjang dengan fasilitas kredit sewa sebesar USD5.068 ribu. Tingkat bunga fasilitas adalah 2,10% ditambah LIBOR tiga bulan dengan jangka waktu sewa selama 5 tahun.

Pada Juni 2023, Komatsu mengubah semua bunga acuan pinjaman USD dari LIBOR ditambah margin menjadi *term* SOFR ditambah margin dan CAS.

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian interim, tidak terdapat perpanjangan atas fasilitas ini.

PT KDB TIFA Finance Tbk

Pada tanggal 7 November 2023, Perseroan dan KDB TIFA menandatangani perjanjian fasilitas kredit untuk sewa di mana Perseroan diberikan fasilitas kredit sewa sebesar Rp5,65 miliar (setara dengan USD366 ribu). Tingkat bunga fasilitas ini adalah 11% per tahun. Fasilitas ini jatuh tempo pada 7 November 2027.

KBL

PT Mitsubishi HC Capital dan Finance Indonesia (“MHCI”)

Pada tanggal 13 Mei 2019, KBL dan MHCI menandatangani fasilitas kredit untuk sewa di mana KBL mendapatkan fasilitas kredit sewa sebesar USD3.768 ribu. KBL mencairkan fasilitas sewa pada tanggal 24 Mei 2019 dengan masa sewa yang telah berakhir pada tanggal 25 Mei 2024. Tingkat bunga fasilitas adalah 2,30% ditambah *term* SOFR tiga bulan. Fasilitas ini tidak diperpanjang.

Pada tanggal 12 Juli 2019, KBL dan MHCI menandatangani fasilitas kredit untuk sewa di mana KBL diberikan fasilitas kredit sewa sebesar USD177 ribu. KBL mencairkan fasilitas sewa pada 12 Juli 2024. Tingkat bunga fasilitas adalah 2,30% ditambah *term* SOFR tiga bulan. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian interim, tidak terdapat perpanjangan atas fasilitas ini.

Pada tanggal 7 November 2019, KBL dan MHCI menandatangani fasilitas kredit untuk sewa di mana KBL diberikan fasilitas kredit sewa sebesar USD3.389 ribu. KBL mencairkan fasilitas sewa pada tanggal 7 November 2019 dengan masa sewa yang akan berakhir pada tanggal 7 November 2024. Tingkat bunga fasilitas adalah 2,30% ditambah *term* SOFR tiga bulan.

Pada tanggal 9 Desember 2019, KBL dan MHCI menandatangani fasilitas kredit untuk sewa di mana KBL diberikan fasilitas kredit sewa sebesar USD1.653 ribu. KBL mencairkan fasilitas sewa pada tanggal 9 Desember 2019 dengan masa sewa yang akan berakhir pada tanggal 9 Desember 2024. Tingkat bunga fasilitas adalah 2,30% ditambah *term* SOFR tiga bulan.

Pada tanggal 3 Juli 2023, KBL dan MHCI menandatangani amandemen fasilitas kredit tersebut atas tingkat bunga yang berlaku adalah tarif per tahun berdasarkan 3 bulan *term* SOFR ditambah tarif Spread Adjustment ditambah 2,30%.

PT SMFL Leasing Indonesia ("SMFL")

Pada tanggal 24 Juni 2022, KBL dan SMFL menandatangani fasilitas kredit untuk sewa di mana KBL mendapatkan fasilitas kredit sewa sebesar Rp18 miliar (setara dengan USD1,1 juta). KBL mencairkan fasilitas sewa sebesar Rp6,5 miliar (setara dengan USD418 ribu) pada tanggal 26 Juli 2022 dengan masa sewa yang akan berakhir pada 26 Juli 2027. Tingkat bunga fasilitas adalah 7,75% per tahun.

KBL mencairkan fasilitas sewa sebesar Rp6,8 miliar (setara dengan USD437 ribu) pada tanggal 30 September 2022 dengan masa sewa yang akan berakhir pada tanggal 30 September 2027. Tingkat suku bunga fasilitas adalah 8,75% per tahun.

KBL mencairkan fasilitas sewa sebesar Rp4,5 miliar (setara dengan USD290 ribu) pada tanggal 28 Oktober 2022 dengan masa sewa yang akan berakhir pada tanggal 28 Oktober 2027. Tingkat suku bunga fasilitas adalah 8,75% per tahun.

PT Chanda Sakti Utama Leasing ("CSUL")

Pada tanggal 21 Oktober 2022, KBL dan CSUL menandatangani fasilitas kredit untuk sewa di mana KBL mendapatkan fasilitas kredit sewa sebesar USD2 juta. Fasilitas sewa akan berakhir pada tanggal 21 September 2026. Tingkat bunga fasilitas adalah 7,19% per tahun.

Pada tanggal 26 Oktober 2022, KBL mencairkan fasilitas kredit *sales* dan *leaseback* sebesar USD1,06 juta dengan masa sewa yang akan berakhir pada tanggal 26 September 2026. Tingkat bunga fasilitas adalah *term* SOFR tiga bulan ditambah margin sebesar 3,20% per tahun.

KBL mencairkan fasilitas sewa sebesar USD0,75 juta pada tanggal 4 November 2022 dengan masa sewa yang akan berakhir pada 4 Oktober 2026. Tingkat bunga fasilitas adalah *term* SOFR tiga bulan ditambah margin sebesar 3,20% per tahun.

PT Caterpillar Finance Indonesia ("CFI")

Pada tanggal 5 September 2023, KBL dan CFI menandatangani fasilitas kredit untuk sewa di mana KBL diberikan fasilitas kredit sewa sebesar Rp59 miliar (setara dengan USD3,8 juta). Fasilitas sewa akan berakhir pada tanggal 31 Mei 2024. Tingkat bunga fasilitas adalah 11,5% per tahun. Fasilitas ini tidak diperpanjang.

Pada tanggal 14 September 2023, KBL mencairkan fasilitas kredit *sales* dan *leaseback* sebesar Rp15,3 miliar (setara dengan USD985 ribu) dengan masa sewa yang akan berakhir pada tanggal 14 September 2028. Tingkat suku bunga fasilitas adalah 11,5% per tahun.

PT Hexa Finance Indonesia ("HFI")

Pada tanggal 3 Oktober 2023, KBL mencairkan fasilitas kredit *Direct Lease* sebesar Rp5,7 miliar (setara dengan USD367 ribu) dengan masa sewa yang akan berakhir pada 3 Oktober 2027. Tingkat suku bunga fasilitas adalah 10% per tahun.

Pada tanggal 20 Oktober 2023, KBL mencairkan fasilitas kredit *Direct Lease* sebesar Rp5,7 miliar (setara dengan USD367 ribu) dengan masa sewa yang akan berakhir pada 20 Oktober 2027. Tingkat suku bunga fasilitas adalah 10% per tahun.

Pada tanggal 23 Oktober 2023, KBL mencairkan fasilitas kredit *Direct Lease* sebesar Rp2,9 miliar (setara dengan USD187 ribu) dengan masa sewa yang akan berakhir pada 23 Oktober 2027. Tingkat suku bunga fasilitas adalah 10% per tahun.

Pada tanggal 1 November 2023, KBL mencairkan fasilitas kredit *Direct Lease* sebesar Rp2,9 miliar (setara dengan USD187 ribu) dengan masa sewa yang akan berakhir pada 1 November 2027. Tingkat suku bunga fasilitas adalah 10% per tahun.

Pada tanggal 30 November 2023, KBL mencairkan fasilitas kredit *Direct Lease* sebesar Rp8,6 miliar (setara dengan USD553 ribu) dengan masa sewa yang akan berakhir pada 30 November 2027. Tingkat suku bunga fasilitas adalah 10% per tahun.

10. Liabilitas Imbalan Kerja

Saldo liabilitas imbalan kerja Perseroan pada tanggal 30 Juni 2024 adalah sebesar USD25.164 ribu. Adapun rincian mengenai liabilitas imbalan kerja Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	30 Juni 2024
Imbalan pasca kerja	20.780
Cuti berimbalan jangka panjang	4.940
Liabilitas bersih	25.720
Bagian lancar cuti berimbalan jangka panjang	(556)
Bagian jangka panjang	25.164

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

Bagian lancar cuti berimbalan jangka panjang dicatat sebagai bagian dari beban akrual.

Biaya sehubungan dengan imbalan pasca kerja dihitung oleh KKA Steven & Mourtis, Aktuaris Independen. Asumsi utama yang digunakan dalam menentukan penilaian aktuarial adalah sebagai berikut:

Keterangan	30 Juni 2024
Tingkat diskonto	7,15% per tahun
Tingkat kenaikan gaji	8,00% per tahun
Tingkat pengunduran diri	7,00%
Tingkat cacat dari tabel mortalitas	5,00%
Usia pensiun normal	55
Tingkat mortalitas	TMI IV

Cuti Berimbalan Jangka Panjang

Perseroan juga memberikan cuti berimbalan jangka panjang untuk karyawan. Jumlah karyawan yang berhak atas cuti berimbalan jangka panjang tersebut pada tanggal 30 Juni 2024 adalah 4.071 karyawan.

Biaya sehubungan dengan cuti berimbalan jangka panjang dihitung oleh KKA steven & Mourits, Aktuaris Independen. Asumsi utama yang digunakan dalam menentukan penilaian aktuarial adalah sebagai berikut:

Keterangan	30 Juni 2024
Tingkat diskonto	7,15% per tahun
Tingkat kenaikan gaji	8,00% per tahun
Tingkat pengunduran diri	7,00% per tahun sampai dengan usia 40 tahun dan menurun linier hingga 0% pada usia 55 tahun
Tingkat cacat dari tabel mortalitas	5,00% dari tingkat mortalitas
Usia pensiun normal	55
Tingkat mortalitas	TMI IV

11. Liabilitas Pajak Tangguhan - Bersih

Saldo liabilitas pajak tangguhan Perseroan pada tanggal 30 Juni 2024 adalah sebesar USD29.647 ribu, adapun rincian liabilitas pajak tangguhan Perseroan adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

	1 Januari 2024	Dikreditkan (dibebankan) ke laporan laba rugi periode berjalan	Dibebankan ke penghasilan komprehensif lain	30 Juni 2024
Perseroan				
Liabilitas pajak tangguhan –bersih				
Liabilitas imbalan pasca kerja	6.124	101	(727)	5.498
Liabilitas sewa	2.412	687	-	3.099
Beban masih harus dibayar	1.200	(893)	-	307

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

	1 Januari 2024	Dikreditkan (dibebankan) ke laporan laba rugi periode berjalan	Dibebankan ke penghasilan komprehensif lain	30 Juni 2024
Persediaan	69	63	-	132
Piutang usaha	3	88	-	91
Aset tak berwujud	(22.578)	280	-	(22.298)
Aset tetap	(13.721)	279	-	(13.442)
Aset hak guna	(2.135)	(880)	-	(3.015)
Jumlah	(28.626)	(275)	(727)	(29.628)
Entitas anak				
Aset pajak tangguhan	805	(288)	(5)	512
Liabilitas pajak tangguhan	-	(16)	(3)	(19)
Jumlah aset pajak tangguhan	805	(288)	(5)	512
Jumlah liabilitas pajak tangguhan	(28.626)	(291)	(730)	(29.647)

Kejadian Penting Setelah Tanggal Laporan Keuangan

a. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (“BNI”)

Berdasarkan Surat Persetujuan Pemberian Kredit (“SPPK”) Sindikasi pada tanggal 30 Agustus 2024, BNI menyetujui pengajuan fasilitas kredit Perseroan sebesar Rp2.325 miliar (setara dengan USD151 juta) yang akan digunakan untuk membiayai capital expenditure dari bisnis Perseroan. Jangka waktu fasilitas ini adalah 96 bulan dengan bunga sebesar JIBOR 3 bulan ditambah margin sebesar 1,90% per tahun.

b. PT Mandiri Tunas Finance (“MTF”)

Pada tanggal 30 September 2024, Perseroan dan PT Mandiri Tunas Finance (“MTF”) menandatangani perjanjian fasilitas kredit untuk sewa sebesar Rp 13,23 miliar (setara dengan USD 874 ribu). Tingkat bunga dari fasilitas ini adalah 7,99% per tahun. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 23 September 2027.

Pada tanggal 31 Oktober 2024, Perseroan dan MTF menandatangani perjanjian fasilitas kredit untuk sewa sebesar Rp 28,92 miliar (setara dengan USD 1.830 ribu). Tingkat bunga dari fasilitas ini adalah 7,99% per tahun. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 23 Oktober 2028.

Komitmen Dan Kontrak Yang Signifikan

a. Mulai 1 Januari 2011, Perseroan memberikan jasa pemindahan tanah penutup dan penambangan batu bara dan jasa konstruksi kepada Kideco Jaya Agung (“KJA”).

Pada tanggal 22 Oktober 2010, Perseroan dan KJA, menandatangani Kontrak Perjanjian Pemindahan Tanah Penutup dan Produksi Batu bara senilai USD216 juta di SM Popor, Area Suara, Tambang Pasir, Kalimantan Timur. Perjanjian ini efektif mulai 1 Januari 2011 untuk jangka waktu lima tahun.

Pada tanggal 10 Mei 2013, Perseroan dan KJA menandatangani Kontrak Sewa Peralatan (*Wet Rental*) di wilayah SM Popor, Area Suara, Tambang Pasir, Kalimantan Timur.

Baik perjanjian terkait Perjanjian Pemindahan Tanah Penutup dan Produksi Batu bara maupun Kontrak Sewa Peralatan (*Wet Rental*) telah beberapa kali di amendemen. Perseroan dan KJA menandatangani amendemen terakhir atas Perjanjian Pemindahan Tanah Penutup tersebut melalui amendemen ke-13 pada tanggal 20 Mei 2024 perihal perubahan volume kontrak, harga kontrak terbaru dan kompensasi lumpur, dimana target volume produksi untuk tahun 2024 sebesar 43.471 juta bcm untuk tanah penutup dan 11.238 juta ton untuk tonase batu bara.

- b. Pada tanggal 15 Juni 2015, KPI mengadakan perubahan perjanjian untuk pemberian jasa kepada PT Freeport Indonesia (“PTFI”) yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2021. Berdasarkan perjanjian ini, KPI akan mengoperasikan dan memanfaatkan fasilitas yang dijelaskan dalam perjanjian hanya untuk pemberian jasa tersebut dan akan memberikan jasa secara eksklusif untuk kepentingan PTFI. Sebagai kompensasi, KPI akan menerima sebagai berikut:

- Beban KPI yang akan diganti terdiri dari semua *cash costs, expenses, charges, fees*, dan jumlah lain, baik *capital, ordinary or extraordinary in nature*, kecuali *extraordinary expenses* seperti yang didefinisikan dalam perjanjian, yang dikeluarkan oleh KPI dalam menjalankan kegiatannya di bawah dan sehubungan dengan perjanjian tersebut.
- Biaya bulanan tetap atas pelabuhan dan jasa operasi sejumlah USD142 ribu ditambah 7,5% dari biaya tenaga kerja langsung dari karyawan KPI yang dibayarkan secara langsung kepada karyawan atau sebagai biaya gaji terkait untuk bulan tersebut, dan insentif keamanan dengan jumlah sampai dengan 2,5% dari biaya yang disepakati. Insentif akan dihitung dan diakui bulanan dan dibayarkan setiap enam bulan.

Pada tanggal 1 Januari 2020, berdasarkan surat pemberitahuan dari PTFI tanggal 22 Oktober 2019, dilakukan pengurangan biaya bulanan tetap atas pelabuhan dan jasa operasi dari sebesar USD142 ribu menjadi USD42 ribu. Pada tahun 2021, biaya bulanan tetap atas pelabuhan dan jasa operasi disesuaikan kembali menjadi sebesar USD142 ribu. Tidak terdapat perubahan atas manfaat lainnya yang diperoleh KPI dari PTFI.

Pada 27 Desember 2023, KPI dan PTFI telah menandatangani perpanjangan perjanjian jasa sampai dengan 31 Agustus 2025.

- c. Pada tanggal 23 Juni 2017, Perseroan dan BP Berau Ltd. telah menandatangani Kontrak untuk Jasa *Supply Base services* di Sorong. Nilai kontrak adalah sebesar Rp734 miliar (setara dengan USD52 juta) dengan masa kontrak selama 5 tahun sampai dengan 22 Juni 2022, dengan opsi perpanjangan tiap tahun selama 3 tahun setelah durasi kontrak.

Pada tanggal 22 Juni 2023, kedua belah pihak telah menandatangani Perubahan No. 5 atas perjanjian ini dengan tambahan nilai kontrak sebesar Rp73,4 miliar (setara dengan USD4,7 juta) sehingga total nilai kontrak sebesar Rp807,6 miliar (setara dengan USD52 juta).

Pada tanggal 1 Juni 2024, kedua belah pihak telah menandatangani Perubahan No. 6 atas perjanjian ini. Perjanjian ini akan berakhir sampai dengan 22 Juni 2025.

- d. Pada tanggal 24 Mei 2017, Perseroan dan PTFI menandatangani *Master Services Agreement* untuk jasa pertambangan Grasberg Wanagon di Papua. Nilai kontrak adalah sebesar USD44 juta dengan masa kontrak selama 25 bulan yang terdiri dari 5 *Work Assignment*.

Pada tanggal 22 September 2023, kedua belah pihak setuju untuk memperpanjang masa kontrak hingga tanggal 31 Maret 2025.

Pada tanggal 5 Oktober 2023, kedua belah pihak setuju untuk memperpanjang masa kontrak hingga tanggal 31 Desember 2025.

- e. Pada tanggal 15 Juni 2022, Perseroan dan PTFI telah menandatangani dokumen Perjanjian untuk Proyek *Levee Stockpile Project Extension* dengan nilai kontrak sebesar USD125,16 juta. Proyek ini memiliki durasi penyelesaian hingga tanggal 30 Juni 2026.

Perjanjian telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir diamendemen dengan kontrak No. 015 yang memberikan tambahan nilai kontrak sebesar USD846,65 ribu.

Pada tanggal 31 Agustus 2023, Perseroan dan PTFI telah menandatangani amendemen kontrak No. 016. Amendemen ini memberikan tambahan nilai kontrak sebesar USD523,37 ribu.

Pada tanggal 28 November 2023, Perseroan dan PTFI telah menandatangani amendemen kontrak No. 017. Amendemen ini memberikan tambahan nilai kontrak sebesar USD1.483,75 ribu.

Pada tanggal 27 Maret 2024, Perseroan dan PTFI telah menandatangani amendemen kontrak No. 018. Amendemen ini memberikan tambahan nilai kontrak sebesar USD856,77 ribu.

- f. Pada tanggal 8 Agustus 2024, Perseroan dan CSTS *Joint Operation* telah menandatangani Perubahan No. 18 atas perjanjian *Loading Unloading & Storage Services Contract* di POSB Sorong dengan tambahan nilai kontrak sebesar Rp0,2 miliar (setara dengan USD12,1 ribu) sehingga jumlah nilai kontrak sebesar Rp337,5 miliar (setara dengan USD20,56 juta). Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian interim, kedua belah pihak masih dalam proses komunikasi perpanjangan kontrak ini.
- g. Pada tanggal 27 Juni 2021, Perseroan, PT Masmindo Dwi Area dan PT Indika Energy Tbk sebagai penjamin pembayaran telah menandatangani *Umbrella Service Agreement* dengan durasi sampai dengan 31 Oktober 2021 di mana Perseroan bertindak sebagai kontraktor untuk mengerjakan pekerjaan yang akan disepakati kemudian untuk memastikan progres implementasi Proyek Awak Mas.

Perjanjian telah mengalami beberapa kali amendemen. Amendemen terakhir pada tanggal 7 Oktober 2022, Perseroan dan PT Masmindo Dwi Area juga telah menandatangani *Early Works Contract for The Construction and Project Management Works Contract* dengan nilai Rp95.009 juta (setara dengan USD6.040 ribu). Periode pekerjaan berdasarkan perjanjian adalah sampai dengan tanggal 31 Agustus 2025.

- h. Pada tanggal 29 Desember 2020, Perseroan dan PT Kartika Selabumi Mining (“KSM”) dan PT Palm Mas Asri (sebagai pihak penjamin KSM) menandatangani Lembar Kesepakatan Jasa Pertambangan dengan volume produksi lapisan penutup tanah sebesar 80,1 juta bcm dan batubara sebesar 3,95 juta ton yang kemudian dialihkan kepada anak Perseroan, KBL.

Pada tanggal 6 April 2021, KBL menandatangani *Mining Service Agreement* dengan KSM dan PT Palm Mas Asri sebagai pihak penjamin dari KSM. Perjanjian ini berlaku hingga tahun 2027.

Pada tanggal 6 April 2021, KBL menandatangani *Plant Hire Agreement* dengan KSM dan PT Palm Mas Asri sebagai pihak penjamin dari KSM untuk penyewaan peralatan bergerak dan penyediaan tenaga kerja di lokasi tambang KSM. Perjanjian ini berlaku hingga tahun 2027.

- i. Pada tanggal 10 Oktober 2021, KBL menandatangani *Mining Service Agreement* dengan PT Hardaya Mining Energy (“HME”) dan PT Central Cipta Murdaya (“CCM”) sebagai pihak penjamin dari HME. Perjanjian ini berlaku hingga tanggal 31 Desember 2025.
- j. Pada tanggal 23 Maret 2022, Perseroan dan PT Indo Bara Pratama (“IBP”) menandatangani *Term Sheet* untuk penyediaan Jasa Pertambangan.

Pada tanggal 15 September 2022, Perseroan dan IBP menandatangani Kontrak Pekerjaan Jasa Pertambangan dengan durasi pekerjaan selama 5 tahun di Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur. Perseroan akan menyediakan jasa pertambangan dan *project management*.

- k. Pada tanggal 6 Juni 2023 telah diterbitkan LNTP dari PT Freeport Manyar Refinery (“FMR”) kepada Perseroan untuk tambahan paket pekerjaan CM002 – Struktural, Mekanikal, Perpipaian, Elektrikal dan Instrumen untuk *Main Process Building, Balance of Plant, dan High Security Building*. Nilai total LNTP ini adalah sebesar Rp356.760 juta (setara dengan USD23,1 juta). Nilai dari LNTP ini adalah sebagai bagian dari keseluruhan nilai kontrak dari paket pekerjaan tersebut, sebesar Rp870,64 miliar (setara dengan USD56,5 juta) dengan durasi penyelesaian pekerjaan hingga tanggal 30 Juni 2024.

Pada tanggal 28 November 2023, Dokumen Perjanjian untuk CM002 – Struktural, Mekanikal, Perpipaan, Elektrikal dan Instrumen untuk *Main Process Building, Balance of Plant, dan High Security Building* dengan nilai kontrak sebesar Rp870,64 miliar (setara dengan USD5.231 ribu) telah ditandatangani oleh Perseroan dan FMR. Dokumen Perjanjian ini secara otomatis akan berlaku menggantikan dokumen LNTP sebagaimana disebutkan di atas.

Pada tanggal 14 Desember 2023, Perseroan dan FMR telah menandatangani dokumen Change Order No. 001 dengan jumlah nilai sebesar Rp15,70 miliar (setara USD1.018 ribu).

Pada tanggal 8 Januari 2024, Perseroan dan FMR telah menandatangani dokumen Change Order No. 002 dengan jumlah nilai sebesar Rp10,01 miliar (setara USD649,5 ribu).

Pada tanggal 11 Maret 2024, Perseroan dan FMR telah menandatangani dokumen Change Order No. 003 dengan jumlah nilai sebesar Rp990,3 juta (setara USD62,5 ribu).

Pada tanggal 17 April 2024, FMR telah menerbitkan dokumen Change Order No. 004 kepada Perseroan dengan jumlah nilai sebesar Rp308 miliar (setara dengan USD18,8 juta).

Pada tanggal 7 Juli 2024, FMR telah menerbitkan dokumen Change Order No. 005 kepada Perseroan dengan jumlah nilai sebesar Rp411,37 miliar (setara dengan USD25.051 ribu). Perjanjian ini berlaku sampai dengan tanggal 30 November 2024.

- I. Pada tanggal 21 Desember 2022, Perseroan dan CEP telah menandatangani Perjanjian Operasi Bersama Pelaksanaan Pertambangan Batubara No. PTP/AGR/2022/XII-0105. Perseroan akan memberikan jasa manajemen tambang dari *pit* ke *port* selama jangka waktu IUP CEP.

Pada tanggal 28 Juni 2023, Perseroan dan CEP menandatangani Perjanjian Jasa Pertambangan No. PTP/AGR/2023/VIII-0005, dengan rencana produksi 456 juta bcm untuk tanah penutup dan 71,9 mt batu bara.

- m. Pada tanggal 17 April 2023, Perseroan dan PT Kedap Sayaaq (“KS”) menandatangani surat perikatan untuk jasa konsultasi.

Pada tanggal 18 April 2023, Perseroan dan KS telah menandatangani Perjanjian Jasa Pertambangan dengan volume penutup tanah 88.000 Kbcm dan tonase batu bara 16.000 Kton. Perjanjian ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2028.

Pada tanggal 18 September 2023, Perseroan dan KS telah menandatangani kontrak amendemen No. PTP/AGR/2023/IV-0003 dengan perubahan volume dan tarif 2023 yang berlaku dari Oktober – Desember 2023.

Pada tanggal 22 Maret 2024, Perseroan dan KS telah menandatangani amendemen kedua atas perjanjian No. PTP/AGR/2023/IV-0003 dengan perubahan tarif, perubahan biaya infrastruktur dan mobilisasi/demobilisasi, dan penambahan pasal mengenai jaminan pembayaran.

- n. Pada tanggal 19 Juni 2023, CEP dan Flame Asia Resources Pte. Ltd. telah menandatangani Perjanjian Penjualan dan Pembelian batu bara Uap yang mana Perseroan bertindak sebagai Pemohon. Kontrak tersebut mengisyaratkan bahwa dalam jangka waktu pengiriman pertama, CEP untuk menjual 750.000 mt batu bara +/- 10% atas opsi pembeli dalam 12 angsuran bulanan dan dengan pengiriman individu (+/- 10% atas opsi pembeli per pengiriman), yang dijadwalkan secara tentatif sesuai kontrak.

Perjanjian diatas telah diakhiri dan digantikan dengan Perjanjian No. FAR2024079 yang ditandatangani pada tanggal 5 Juni 2024 antara CEP dan Flame Asia Resources Pte. Ltd terkait dengan Perjanjian Penjualan dan Pembelian Batubara Uap yang mana CEP bertindak sebagai pembeli. Jangka waktu Perjanjian ini sampai dengan 30 September 2024 dan pembeli menerima 4 pengiriman dengan maksimum kuantitas 264.707 mt.

- o. Pada tanggal 19 September 2023, Perseroan dan PT Sumberdaya Arindo (“SDA”) telah menandatangani Perjanjian Jasa Operasi Penambangan, di mana Perseroan akan bertindak sebagai kontraktor untuk kegiatan operasi penambangan di lokasi proyek SDA dengan nilai kontrak Rp1.090 miliar (setara dengan USD70.347 ribu). Perjanjian ini berlaku hingga 22 September 2026.
- p. Pada tanggal 2 September 2024, Perseroan dan PT Global Bara Mandiri (GBM) telah menandatangani Perjanjian Jasa Pertambangan untuk Kontraktor Jasa Pertambangan dengan jumlah volume sebesar 65 juta bcm dan jangka waktu sampai 31 Desember 2032.
- q. Pada tanggal 18 Oktober 2024, Perseroan dan PT Tamtama Perkasa (TP) telah menandatangani Perjanjian Jasa Pertambangan untuk Kontraktor Jasa Pertambangan dengan jumlah volume sebesar 9,4 juta bcm dan jangka waktu sampai 31 Desember 2028.
- r. Pada tanggal 18 Oktober 2024, Perseroan dan PT Borneo Bangun Banua (BBB) telah menandatangani Perjanjian Jasa Pertambangan untuk Kontraktor Jasa Pertambangan dengan jumlah volume sebesar 50 juta bcm dan jangka waktu sampai 31 Desember 2028.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS PERSEROAN DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL 30 JUNI 2024 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK DAN LIABILITAS PERSEROAN DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SAMPAI DENGAN PERNYATAAN PENDAFTARAN MENJADI EFEKTIF.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 30 JUNI 2024 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

SETELAH TANGGAL 30 JUNI 2024 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN KECUALI LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DI DALAM PROSPEKTUS INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN YANG MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI PROSPEKTUS INI.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPAN UNTUK MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA.

SAMPAI DENGAN TANGGAL PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN YANG DILAKUKAN PERSEROAN ATAS PERSYARATAN YANG TERDAPAT DALAM PERJANJIAN UTANG PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN BERAKHIR SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI KELALAIAN DALAM MELAKUKAN PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting yang bersumber dari Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Liana Ramon Xenia & Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI dengan opini tanpa modifikasian dengan penambahan paragraf hal-hal lain mengenai penerbitan kembali Laporan Keuangan Konsolidasian Interim untuk menyesuaikan pengungkapan dengan peraturan pasar modal yang berlaku sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi dan Sukuk Ijarah untuk disertakan dalam Dokumen Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi dan Sukuk Ijarah dan tidak dimaksudkan dan tidak boleh digunakan untuk tujuan lain dan laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 yang tidak diaudit/ tidak direviu, dalam laporannya nomor 00126/2.1460/AU.1/02/1428-3/1/XI/2024 tanggal 1 November 2024 yang ditandatangani oleh Kasman.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2024	2023	2022
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan setara kas	92.271	72.987	61.760
Rekening bank dibatasi penggunaannya	-	2.828	-
Aset keuangan lainnya	383	414	356
Piutang usaha			
Pihak berelasi	29.297	20.842	23.871
Pihak ketiga	136.309	128.971	82.580
Piutang lain-lain			
Pihak berelasi	7	-	-
Pihak ketiga	1.073	49.242	16.146
Persediaan	15.143	19.204	18.517
Aset kontrak	281	5.755	12.295
Pajak dibayar di muka	3.308	1.530	11.345
Klaim pengembalian pajak	-	-	6.943
Beban dibayar di muka	6.939	5.072	5.606
Aset lancar lainnya	14.166	8.872	18.234
Jumlah Aset Lancar	299.177	315.717	257.653
ASET TIDAK LANCAR			
Piutang lain-lain – pihak ketiga	37.475	638	32.499
Pajak dibayar di muka	5.802	3.399	-
Aset tambang	2.325	2.497	-
Aset tetap	228.609	230.746	232.812
Aset hak-guna	28.527	37.552	33.949
<i>Goodwill</i>	19.768	19.768	781
Aset tak-berwujud	104.110	110.989	27.480
Rekening bank dibatasi penggunaannya	682	720	-
Aset pajak tangguhan	512	805	-
Aset tidak lancar lainnya	8.608	5.114	11.246
Jumlah Aset Tidak Lancar	436.418	412.228	338.767
JUMLAH ASET	735.595	727.945	596.420
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang bank	44.353	37.127	45.146
Utang usaha			
Pihak berelasi	-	-	674
Pihak ketiga	142.429	139.993	117.861

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2024	2023	2023	2022
Utang lain-lain - pihak ketiga	1.040	581	581	1.656
Utang dividen	957	928	928	287
Utang pajak	2.255	3.225	3.225	5.495
Beban masih harus dibayar	12.224	18.042	18.042	18.952
Liabilitas kontrak	30.812	22.277	22.277	5.694
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:				
Pinjaman jangka panjang – pihak ketiga	9.758	38.539	38.539	15.807
Liabilitas sewa	7.944	11.281	11.281	10.345
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	251.772	271.993	271.993	221.917

LIABILITAS JANGKA PANJANG

Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:

Pinjaman jangka panjang – pihak ketiga	175.718	148.656	148.656	28.315
Liabilitas sewa	11.593	15.138	15.138	16.113
Liabilitas imbalan pasca kerja	25.164	27.855	27.855	22.941
Liabilitas pajak tangguhan – bersih	29.647	28.626	28.626	9.143
Liabilitas jangka panjang lainnya	121	47	47	-
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	242.243	220.322	220.322	76.512
JUMLAH LIABILITAS	494.015	492.315	492.315	298.429

EKUITAS

Modal saham – nilai nominal Rp 50 per saham

Modal dasar – 4.034.420.000 saham

Modal ditempatkan dan disetor – 1.008.605.000 saham

Tambahan modal disetor	1.840	(4.602)	(4.602)	(4.602)
Saham treasuri	-	(2.033)	(2.033)	(2.033)
Penghasilan komprehensif lain	(4.863)	(4.087)	(4.087)	(5.463)
Saldo laba				
Ditentukan penggunaannya	1.475	1.475	1.475	1.475
Tidak ditentukan penggunaannya	208.866	210.594	210.594	274.394
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk	240.756	234.785	234.785	297.209
Kepentingan Nonpengendali	824	845	845	782
Jumlah Ekuitas	241.580	235.630	235.630	297.991
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	735.595	727.945	727.945	596.420

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2024	2023*	2023	2022
Pendapatan	318.024	274.025	577.617	476.317
Beban usaha langsung	(277.352)	(232.417)	(495.510)	(380.823)
Laba kotor	40.672	41.608	82.107	95.494
Beban penjualan dan administrasi	(26.571)	(21.406)	(46.779)	(34.561)
Beban bunga dan keuangan	(13.348)	(7.166)	(19.805)	(7.421)
Penghasilan bunga	395	604	1.070	1.017
Beban pajak final	(4.043)	(970)	(4.421)	(2.699)
Keuntungan dan kerugian lain-lain - bersih	6.031	611	3.875	(1.675)
Jumlah	(37.536)	(28.327)	(66.060)	(45.339)
Laba sebelum pajak	3.136	13.281	16.047	50.155
Beban pajak penghasilan -bersih	(1.613)	(1.570)	(3.609)	(8.989)
Laba bersih periode/tahun berjalan	1.523	11.711	12.438	41.166

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2024	2023*	2023	2022
(Rugi) penghasilan komprehensif lain - setelah pajak				
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pasti - setelah pajak	2.608	-	396	(130)
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:				
Perubahan nilai wajar atas derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai pada arus kas	-	-	-	210
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	(3.384)	2.248	980	(3.287)
Jumlah (rugi) penghasilan komprehensif lain periode/tahun berjalan - setelah pajak	(776)	2.248	1.376	(3.207)
Jumlah penghasilan komprehensif periode/tahun berjalan	747	13.959	13.814	37.959
Laba yang dapat diatribusikan kepada:				
Pemilik Entitas Induk	1.322	11.591	12.200	40.924
Kepentingan nonpengendali	201	120	238	242
Jumlah laba bersih periode/tahun berjalan	1.523	11.711	12.438	41.166
Jumlah penghasilan komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:				
Pemilik Entitas Induk	546	13.839	13.576	37.717
Kepentingan nonpengendali	201	120	238	242
Jumlah penghasilan komprehensif periode/tahun berjalan	747	13.959	13.814	37.959
Laba per saham dasar (dalam USD penuh)	0,0013	0,0117	0,0123	0,0413

*) tidak diaudit / tidak direviu

LAPORAN ARUS KAS

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2024	2023*	2023	2022
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				
Penerimaan kas dari pelanggan	326.749	258.191	562.342	453.901
Pembayaran kas kepada pemasok	(204.653)	(149.275)	(285.839)	(211.235)
Pembayaran kas kepada karyawan	(71.650)	(65.647)	(142.691)	(132.112)
Kas dihasilkan dari operasi	50.446	43.269	133.812	110.554
Pembayaran bunga dan beban keuangan	(12.857)	(7.166)	(18.856)	(6.564)
Pembayaran pajak penghasilan dan pajak lainnya	(7.547)	(7.619)	(15.279)	(18.725)
Penerimaan pengembalian pajak	-	6.943	7.019	3.126
Penerimaan bunga	395	604	1.070	1.017
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi	30.437	36.031	107.766	89.408
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				
Hasil penjualan aset tetap	89	-	1.943	632
Pembelian aset tetap	(19.432)	(21.651)	(62.110)	(54.496)
Akuisisi Entitas Anak, setelah dikurangi kas yang diperoleh	-	(90.542)	(90.542)	-
Perolehan aset tidak berwujud	(1.122)	(621)	(3.954)	(5.120)
Penempatan investasi entitas asosiasi	-	-	(2.316)	(574)
Pencairan aset keuangan lainnya	-	-	-	24.000
Pembayaran aset eksplorasi dan evaluasi dan properti tambang	(1.048)	-	-	-
Pemberian pinjaman jangka panjang – pihak ketiga	-	-	-	(54.969)
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(21.513)	(112.814)	(156.979)	(90.527)

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2024	2023*	2023	2022
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				
Penerimaan pinjaman jangka panjang pihak ketiga	184.034	170.505	174.324	-
Penerimaan pinjaman bank	59.226	44.673	81.509	107.000
Penerimaan dari transaksi jual dan sewa balik	-	7.516	8.693	7.839
Penerimaan dari penjualan saham treasury	8.475	-	-	-
Pembayaran pinjaman bank	(52.000)	(45.000)	(89.509)	(62.000)
Pembayaran dividen oleh Perusahaan	(3.021)	(75.857)	(75.359)	-
Pembayaran pinjaman jangka panjang kepada pihak ketiga	(183.472)	(9.612)	(28.714)	(58.879)
Pembayaran liabilitas sewa	(6.930)	(4.375)	(8.853)	(18.839)
Pencairan (penempatan) rekening bank dibatasi penggunaannya	2.828	-	(2.828)	-
Pembayaran dividen Entitas Anak	(222)	-	(175)	(191)
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Pendanaan	8.918	87.850	59.088	(25.070)
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas	17.842	11.067	9.875	(26.189)
Kas Dan Setara Kas Awal Periode/Tahun	72.987	61.760	61.760	89.325
Pengaruh perubahan kurs valuta asing atas kas dan setara kas	1.442	452	1.352	(1.376)
Kas dan setara Kas Akhir Periode/Tahun	92.271	73.279	72.987	61.760

RASIO-RASIO KEUANGAN PENTING

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2024	2023*	2023	2022
Rasio pertumbuhan (%)				
Pendapatan	16,06 ¹⁾	32,76 ²⁾	21,27	14,57
Laba Bersih Periode/Tahun Berjalan	(87,00) ¹⁾	7,53 ²⁾	(69,79)	21,24
Jumlah Aset	1,05	22,93	22,05	11,95
Jumlah Liabilitas	0,35	66,65	64,97	9,51
Ekuitas	2,53	(20,86)	(20,93)	14,51
Rasio Usaha (%)				
Laba Kotor / Pendapatan	12,79	15,18	14,21	20,05
Laba Sebelum Pajak Periode/Tahun Berjalan / Pendapatan	0,99	4,85	2,78	10,53
Laba Periode/Tahun Berjalan / Pendapatan (Margin Laba / Net Profit Margin)	0,48	4,27	2,15	8,64
Laba Tahun Berjalan / Ekuitas (Imbal Hasil Ekuitas / ROE) ³⁾	0,63	4,97	5,28	13,81
Laba Tahun Berjalan / Jumlah Aset (Imbal Hasil Aset / ROA) ³⁾	0,21	1,60	1,71	6,90
Rasio Keuangan (%)				
Aset Lancar / Liabilitas Jangka Pendek (Current Ratio)	118,83	123,67	116,08	116,10
Jumlah Aset / Jumlah Liabilitas	148,90	147,42	147,86	199,85
Jumlah Liabilitas / Ekuitas	204,49	210,89	208,94	100,15
Jumlah Liabilitas / Jumlah Aset	67,16	67,83	67,63	50,04
Interest Bearing Debt to Equity	103,22	118,68	106,41	38,84
Debt Service Coverage Ratio (DSCR) ⁴⁾	75,85	73,78	123,48	175,87
Kas Atau Setara Kas / Liabilitas Jangka Pendek (Cash Ratio)	36,65	31,00	26,83	27,83
Margin EBITDA	14,80	19,70	18,59	26,33
Rasio Pinjaman Bersih Terhadap EBITDA ⁴⁾	333,76	382,67	165,57	43,04
Interest Service Coverage Ratio (ISCR)	352,62	753,42	542,08	1.689,68

*) tidak diaudit / tidak direviu

¹⁾ Rasio pertumbuhan pada 30 Juni 2024, masing-masing dihitung dengan selisih angka pada tanggal 30 Juni 2024 dikurangi dengan angka pada periode sebelumnya, 30 Juni 2023, dibagi dengan angka pada periode sebelumnya 30 Juni 2023.

²⁾ Rasio pertumbuhan pada 30 Juni 2023, masing-masing dihitung dengan selisih angka pada tanggal 30 Juni 2023 dikurangi dengan angka pada periode sebelumnya, 30 Juni 2022, dibagi dengan angka pada periode sebelumnya 30 Juni 2022.

- 3) Perhitungan rasio ROE dan ROA untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 dihitung dengan menggunakan Laba Periode Berjalan 6 (enam) bulan dari masing-masing periode. Perhitungan rasio ROE dan ROA untuk tahun 2023 dan 2022 dihitung menggunakan Laba Tahun Berjalan 12 (dua belas) bulan dari masing-masing tahun.
- 4) Perhitungan rasio DSCR dan Rasio Pinjaman Bersih Terhadap EBITDA untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 dihitung dengan menggunakan EBITDA 6 (enam) bulan dari masing-masing periode. Perhitungan rasio DSCR dan Rasio Pinjaman Bersih Terhadap EBITDA untuk tahun 2023 dan 2022 dihitung dengan menggunakan EBITDA 12 (dua belas) bulan dari masing-masing tahun.

Catatan:

EBITDA merupakan *Adjusted* EBITDA dihitung menggunakan laba kotor yang dikurangi dengan beban penjualan dan administrasi, ditambah dengan penyusutan dan amortisasi. Margin EBITDA dihitung dengan *Adjusted* EBITDA dibagi dengan pendapatan.

Debt Service Coverage Ratio (DSCR) dihitung menggunakan *Adjusted* EBITDA dibagi dengan utang bank, jumlah pinjaman jangka panjang – pihak ketiga yang jatuh tempo dalam satu tahun dan liabilitas sewa yang jatuh tempo dalam satu tahun.

Interest Coverage Ratio (ISCR) dihitung menggunakan *Adjusted* EBITDA dibagi dengan beban bunga dan keuangan.

Pinjaman bersih dihitung dengan menjumlahkan jumlah pinjaman dikurang kas dan setara kas. Jumlah pinjaman dihitung dengan menjumlahkan utang bank, pinjaman jangka panjang – pihak ketiga yang jatuh tempo dalam satu tahun dan liabilitas sewa yang jatuh tempo dalam satu tahun, pinjaman jangka panjang – pihak ketiga setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun, liabilitas sewa setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun.

INFORMASI NILAI TUKAR (KURS) RUPIAH TERHADAP DOLAR AMERIKA SERIKAT

(1.000 Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat)

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2024	2023	2022
Kurs yang berlaku pada tanggal laporan	0,0609	0,0649	0,0636

PADA TANGGAL 30 JUNI 2024, PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK TELAH MEMENUHI SEMUA RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG PERSEROAN

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan oleh manajemen atas kondisi keuangan serta hasil operasi dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan ikhtisar data keuangan penting, Laporan Keuangan Perseroan dan Perusahaan Anak beserta Catatan Atas Laporan Keuangan yang terlampir dalam Prospektus ini.

Informasi keuangan yang disajikan di bawah ini berasal dan/atau dihitung berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Liana Ramon Xenia & Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI dengan opini tanpa modifikasi dengan penambahan paragraf hal-hal lain mengenai penerbitan kembali Laporan Keuangan Konsolidasian Interim untuk menyesuaikan pengungkapan dengan peraturan pasar modal yang berlaku sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi dan Sukuk Ijarah untuk disertakan dalam Dokumen Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi dan Sukuk Ijarah dan tidak dimaksudkan dan tidak boleh digunakan untuk tujuan lain dan laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 yang tidak diaudit/ tidak direviu, dalam laporannya nomor 00126/2.1460/AU.1/02/1428-3/1/XI/2024 tanggal 1 November 2024 yang ditandatangani oleh Kasman.

1. TINJAUAN UMUM

Perseroan merupakan perusahaan multi-disiplin yang bergerak di bidang kontrak pertambangan, rekayasa dan konstruksi serta jasa minyak & gas bumi dengan rekam jejak di Indonesia sejak 1972 yang berkomitmen penuh untuk mengedepankan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) dan aspek ESG sebagai kontinuitas dari strategi keberlanjutan Perseroan. Dengan memiliki rekam jejak pencapaian selama lebih dari 52 tahun, kami menawarkan keunggulan kompetitif melalui kemampuan untuk menyediakan solusi penambangan *pit-to-port* yang lengkap, kemampuan rekayasa, pengadaan dan konstruksi yang terintegrasi serta dukungan logistik, sekaligus menunjukkan komitmen mutlak terhadap keselamatan, kesehatan & lingkungan, manajemen mutu dan integritas bisnis. Perseroan menyediakan layanan kontrak penambangannya yang berbeda dari para pesaingnya dengan menawarkan solusi penambangan terintegrasi yang disesuaikan dengan kebutuhan setiap proyek, didukung dengan beragam layanan teknik dan konstruksi pelengkap.

2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONDISI KEUANGAN DAN KINERJA PERSEROAN

Perseroan, sebagai perusahaan yang terus berkembang, menghadapi berbagai faktor yang mempengaruhi kondisi keuangan dan kinerja Perseroan. Faktor eksternal utama meliputi kondisi ekonomi global yang tidak menentu, harga komoditas dan hal lain terkait sektor pertambangan dan energi. Pada tahun 2023, walaupun terdapat ketidakpastian ekonomi global, koreksi harga komoditas khususnya harga batu bara, pelemahan nilai tukar Rupiah dan konflik geopolitik dunia, Perseroan tetap berhasil mencatatkan kinerja positif dengan peningkatan total pendapatan menjadi USD 577.617 ribu, didorong oleh pertumbuhan pendapatan segmen rekayasa dan konstruksi sebesar 87,83% dan pertambangan sebesar 9,35%.

Pada tanggal 30 Juni 2024, Perseroan mencatatkan kinerja positif dengan peningkatan total pendapatan sebesar USD43.999 ribu atau sebesar 16,06%, pertumbuhan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pada pendapatan segmen rekayasa dan konstruksi sebesar 96,42%. Disisi lain, pendapatan Perseroan mengalami penurunan pada sektor pertambangan dan jasa yaitu masing-masing sebesar (12,67)% dan (12,20)%.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi keuangan dan kinerja perseroan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Efisiensi Operasional

Efisiensi operasional sangat penting untuk mempertahankan daya saing dan profitabilitas Perseroan. Proyek-proyek jasa pertambangan dan rekayasa dan konstruksi Perseroan dalam hal ini mengandalkan teknologi yang dapat secara signifikan meningkatkan efisiensi dan mengurangi

biaya operasional. Teknologi seperti otomatisasi, analitik data, dan sistem manajemen proyek yang terintegrasi memungkinkan Perseroan untuk memantau dan mengelola operasi secara *real-time*, mengidentifikasi masalah potensial sebelum menjadi masalah besar, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Selain itu, teknologi ini dapat mempercepat proses bisnis dan pekerjaan, meningkatkan kualitas output, dan mengurangi waktu *downtime* peralatan.

Manajemen Sumber Daya

Manajemen yang efisien terhadap tenaga kerja, peralatan, dan bahan material sangat penting untuk mempertahankan profitabilitas. Pengelolaan tenaga kerja yang baik meliputi penjadwalan yang efektif, pelatihan yang memadai dan penerapan sistem insentif yang memotivasi karyawan untuk mencapai kinerja terbaik. Sementara itu, manajemen peralatan yang baik mencakup pemeliharaan preventif yang rutin, perencanaan penggantian peralatan yang sudah tidak layak pakai, dan penggunaan teknologi untuk memantau kondisi peralatan secara *real-time*. Efisiensi dalam manajemen bahan materail melibatkan pengadaan yang tepat waktu dan sesuai kebutuhan, pengelolaan inventory yang efektif, dan sebagainya. Semua ini berkontribusi pada pengurangan biaya, peningkatan produktivitas, dan pada akhirnya dapat meningkatkan margin keuntungan Perseroan.

Manajemen Proyek

Manajemen proyek adalah salah satu faktor penting yang mempengaruhi kesuksesan dan profitabilitas Perseroan. Berikut adalah faktor dari Manajemen Proyek yang penting bagi Perseroan yang dipantau seperti:

- **Jenis Kontrak**

Jenis kontrak yang dipilih untuk proyek tertentu sangat mempengaruhi eksposur risiko dan margin keuntungan Perseroan. Kontrak harga tetap (*fixed-price contracts* atau *lumpsum contracts*) yang biasa dipilih pada proyek pertambangan dapat memberikan keuntungan yang lebih besar jika proyek dapat diselesaikan di bawah anggaran, namun juga meningkatkan risiko bagi Perseroan jika terjadi pembengkakan biaya. Sebaliknya, kontrak biaya-plus (*cost-plus contracts*) yang secara umum dipilih pada proyek rekayasa dan konstruksi mengurangi risiko pembengkakan biaya karena semua biaya yang timbul akan diganti oleh klien tetapi umumnya menawarkan margin keuntungan yang lebih rendah. Memilih jenis kontrak yang sesuai berdasarkan kondisi proyek dan kemampuan Perseroan sangat penting untuk mengelola risiko dan memaksimalkan keuntungan.

- **Eksekusi Proyek**

Perencanaan dan pelaksanaan proyek yang efektif adalah kunci untuk memenuhi tenggat waktu dan anggaran. Perencanaan yang matang pada scope pekerjaan yang jelas termasuk didalamnya seperti pengembangan jadwal yang realistis, alokasi sumber daya secara efisien, dan identifikasi serta mitigasi risiko potensial. Selain itu, manajemen proyek yang baik yang melibatkan koordinasi yang erat antara semua tim yang terlibat, pemantauan kemajuan secara terus-menerus, dan kemampuan untuk menyesuaikan rencana sesuai kebutuhan di lapangan. Penggunaan teknologi manajemen proyek, seperti perangkat lunak manajemen proyek dan sistem pelacakan *real-time*, membantu memastikan proyek-proyek sesuai jadwal dan anggaran dalam kontrak dengan klien. Semua faktor ini penting untuk mencapai kepuasan klien, mempertahankan reputasi Perseroan, dan memastikan margin keuntungan yang sehat.

- **Kontrol Biaya**

Pengendalian yang efektif atas biaya operasional dan administrasi sangat penting untuk menjaga kesehatan keuangan. Biaya operasional meliputi semua pengeluaran yang terkait langsung dengan proyek, seperti biaya proyek untuk bahan bakar, tenaga kerja, dan pemeliharaan peralatan. Biaya administrasi meliputi pengeluaran yang diperlukan untuk menjalankan fungsi manajemen seperti gaji staf kantor dan sewa kantor. Pengendalian biaya yang ketat dapat dicapai melalui pengalokasian biaya dan pemantauannya, juga selain itu penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi proyek, dan manajemen keuangan yang lebih baik. Menjaga biaya tetap terkendali memastikan Perseroan tetap kompetitif di pasar dan dapat meningkatkan margin keuntungan.

Dengan mengelola faktor-faktor ini secara efektif, Perseroan dapat meningkatkan kinerja keuangan dan memastikan keberlanjutan jangka panjang. Peningkatan kompetensi tenaga kerja dan manajemen sumber daya manusia yang strategis adalah kunci untuk mencapai keunggulan operasional dan menghadapi tantangan industri dengan lebih baik.

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

Dalam periode berjalan, Perseroan dan Perusahaan Anak telah menerapkan sejumlah amendemen/penyesuaian PSAK yang relevan dengan operasinya dan efektif untuk periode akuntansi yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2024, yaitu:

- PSAK 201 (sebelumnya PSAK 1) (amendemen) *Penyajian Laporan Keuangan: Penyajian Laporan Keuangan terkait Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan*
- PSAK 201 (sebelumnya PSAK 1) (amendemen) *Penyajian Laporan Keuangan: Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang*
- PSAK 207 (sebelumnya PSAK 2) (amandemen) *Laporan arus kas* dan PSAK 107 (sebelumnya PSAK 60) (amandemen) *Instrumen Keuangan: Pengungkapan: Pengaturan Pembiayaan Pemasok*
- PSAK 116 (sebelumnya PSAK 73) (amendemen) *Sewa: Liabilitas Sewa dalam Jual Beli dan Sewa-balik*

Mulai tanggal 1 Januari 2024, referensi terhadap masing-masing PSAK dan ISAK diubah sebagaimana diumumkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (“DSAK-IAI”).

Penerapan atas amendemen/penyesuaian tersebut tidak mengakibatkan perubahan atas kebijakan akuntansi Perseroan dan Perusahaan Anak dan tidak memiliki pengaruh signifikan atas pengungkapan atau jumlah yang dicatat di dalam laporan keuangan konsolidasian pada periode berjalan dan tahun-tahun sebelumnya.

Tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi yang berdampak material dalam jangka waktu 2 (dua) tahun buku terakhir Perseroan dan Perusahaan Anak.

4. ANALISIS LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

Tabel dibawah ini menyajikan data laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak selama periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2024	2023*	2023	2022
Pendapatan	318.024	274.025	577.617	476.317
Beban usaha langsung	(277.352)	(232.417)	(495.510)	(380.823)
Laba kotor	40.672	41.608	82.107	95.494
Laba bersih periode/tahun berjalan	1.523	11.711	12.438	41.166
Jumlah penghasilan komprehensif periode/tahun berjalan	747	13.959	13.814	37.959

*) tidak diaudit / tidak direviu

Pendapatan

Perbandingan Pendapatan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023

Pendapatan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 adalah sebesar USD318.024 ribu, meningkat sebesar 16,06% atau USD43.999 ribu bila dibandingkan dengan Pendapatan pada periode sebelumnya. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan pada pendapatan rekayasa dan konstruksi sebesar 96,42% dari USD 71.908 ribu menjadi USD 141.241 ribu.

Pendapatan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dari pendapatan penambangan menurun dari USD179.239 ribu untuk periode sebelumnya menjadi USD130.572 ribu. Pendapatan dari konstruksi dan rekayasa meningkat dari USD71.908 ribu menjadi USD141.241 ribu. Pendapatan dari jasa menurun dari USD21.664 ribu menjadi USD19.021 ribu. Pendapatan dari lain-lain naik dari USD1.214 ribu menjadi USD1.234 ribu. Selain itu, penjualan batu bara untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 tercatat sebesar USD25.956 ribu, sedangkan tidak ada penjualan batu bara yang tercatat pada periode sebelumnya.

Perbandingan Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar USD577.617 ribu, meningkat sebesar 21,27% atau USD101.300 ribu dibandingkan Pendapatan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Hal ini disebabkan karena meningkatnya pendapatan rekayasa dan konstruksi meningkat sebesar 87,83% serta dari pendapatan penambangan sebesar 7,09%.

Pendapatan dari penambangan meningkat dari USD340.036 ribu pada tahun 2022 menjadi USD364.147 ribu pada tahun 2023. Pendapatan dari segmen rekayasa dan konstruksi meningkat dari USD86.707 ribu pada tahun 2022 menjadi USD162.862 ribu pada tahun 2023. Pendapatan dari jasa menurun dari USD46.841 ribu pada tahun 2022 menjadi USD40.357 ribu pada tahun 2023. Pendapatan dari lain-lain menurun dari USD2.733 ribu pada tahun 2022 menjadi USD2.573 ribu pada tahun 2023. Selain itu, penjualan batu bara pada tahun 2023 tercatat sebesar USD7.678 ribu, sedangkan tidak ada penjualan batu bara yang tercatat pada tahun 2022.

Beban Usaha Langsung

Perbandingan Beban Usaha Langsung untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023

Beban Usaha Langsung Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 adalah sebesar USD277.352 ribu, meningkat sebesar 19,33% atau USD44.935 ribu bila dibandingkan dengan Beban Usaha Langsung periode sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya biaya subkontraktor, operasi alat berat & peralatan, biaya material serta sewa alat berat, kendaraan dan lain-lain.

Perbandingan Beban Usaha Langsung untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Beban Usaha Langsung Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar USD495.510 ribu, meningkat sebesar USD114.687 ribu atau 30,12% dibandingkan Beban Usaha Langsung pada tahun 2022. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan biaya subkontraktor sebesar USD43.463 ribu atau 61,45% dan peningkatan material sebesar USD19.094 ribu atau 72,50% untuk mendukung aktivitas operasional di segmen rekayasa dan konstruksi dan segmen pertambangan.

Laba Kotor

Perbandingan Laba Kotor untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023

Laba Kotor Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 adalah sebesar USD40.672 ribu, mengalami penurunan sebesar 2,25% atau USD936 ribu bila dibandingkan dengan Laba Kotor periode sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya beban usaha langsung untuk mendukung kegiatan operasional dan proyek ekspansi pada segmen rekayasa dan konstruksi.

Perbandingan Laba Kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Lab Kotor Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar USD82.107 ribu, menurun sebesar 14,02% atau USD13.387 ribu dibandingkan Laba Kotor pada tahun 2022. Penurunan ini disebabkan oleh peningkatan beban usaha langsung sebesar 30,12% disebabkan kenaikan biaya subkontraktor, material, serta operasi alat berat.

Lab Bersih Periode/Tahun Berjalan

Perbandingan Lab Bersih Periode Berjalan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023

Lab Bersih Periode Berjalan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 adalah sebesar USD1.523 ribu, menurun sebesar 87,00% atau USD10.188 ribu bila dibandingkan dengan Lab Bersih Periode Berjalan sebelumnya yaitu sebesar USD11.711 ribu. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya beban penjualan & administrasi serta beban bunga dan keuangan.

Perbandingan Lab Bersih Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Lab Bersih Tahun Berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar USD12.438 ribu, menurun sebesar 69,79% atau USD28.728 ribu dibandingkan Lab Bersih Tahun Berjalan pada tahun 2022. Penurunan ini disebabkan oleh naiknya beban bunga dan keuangan sebesar USD12.384 ribu atau meningkat sebesar 166,88% terutama disebabkan oleh pembiayaan akuisisi dan investasi tambang batu bara CEP serta penguatan modal kerja Perseroan terutama untuk mendukung kegiatan di segmen pertambangan dan segmen rekayasa dan konstruksi.

(Rugi) Penghasilan Komprehensif Lain

Perbandingan (Rugi) Penghasilan Komprehensif Lain untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023

Perseroan mencatatkan Rugi Komprehensif Lain untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 sebesar USD776 ribu, menurun sebesar 134,52% atau USD3.024 ribu bila dibandingkan dengan Penghasilan Komprehensif Lain periode sebelumnya sebesar USD2.248 ribu. Hal ini disebabkan oleh selisih kurs penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing.

Perbandingan Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Penghasilan Komprehensif Lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar USD1.376 ribu, meningkat dari Rugi Komprehensif Lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar USD(3.207) ribu. Peningkatan signifikan disebabkan oleh selisih kurs penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing.

Jumlah Penghasilan Komprehensif Periode / Tahun Berjalan

Perbandingan Jumlah Penghasilan Komprehensif untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023

Jumlah Penghasilan Komprehensif untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 adalah sebesar USD747 ribu, menurun sebesar 94,65% atau USD13.212 ribu bila dibandingkan dengan Jumlah Penghasilan Komprehensif periode sebelumnya sebesar USD13.959 ribu. Hal ini disebabkan oleh turunnya laba tahun berjalan.

Perbandingan Jumlah Penghasilan Komprehensif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Jumlah Penghasilan Komprehensif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar USD13.814 ribu, menurun sebesar USD24.145 ribu atau 63,61% dibandingkan Jumlah Penghasilan Komprehensif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Penurunan ini disebabkan oleh turunnya laba tahun berjalan.

5. ASET, LIABILITAS DAN EKUITAS KONSOLIDASIAN

Pertumbuhan aset, liabilitas, dan ekuitas Perseroan pada tanggal 30 Juni 2024, 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2024	2023	2022
Aset Lancar	299.177	315.717	257.653
Aset Tidak Lancar	436.418	412.228	338.767
Jumlah Aset	735.595	727.945	596.420
Liabilitas Jangka Pendek	251.772	271.993	221.917
Liabilitas Jangka Panjang	242.243	220.322	76.512
Jumlah Liabilitas	494.015	492.315	298.429
Ekuitas	241.580	235.630	297.991
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	735.595	727.945	596.420

a. Aset

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Jumlah aset Perseroan pada tanggal 30 Juni 2024 adalah sebesar USD735.595 ribu yang terdiri dari aset lancar sebesar USD299.177 ribu dan aset tidak lancar sebesar USD436.418 ribu.

Aset lancar Perseroan pada tanggal 30 Juni 2024 mengalami penurunan sebesar USD16.540 ribu atau sebesar 5,24% bila dibandingkan dengan aset lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023. Penurunan ini disebabkan oleh menurunnya persediaan dibandingkan pada akhir tahun 2023.

Aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 30 Juni 2024 mengalami peningkatan sebesar USD24.190 ribu atau sebesar 5,87% bila dibandingkan dengan aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya piutang lain-lain - pihak ketiga.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Jumlah aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar USD727.945 ribu yang terdiri atas aset lancar sebesar USD315.717 ribu dan aset tidak lancar sebesar USD412.228 ribu.

Aset lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar USD58.064 ribu atau sebesar 22,54% dibandingkan dengan 31 Desember 2022. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya piutang usaha dan piutang usaha lainnya dari pihak ketiga.

Aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar USD73.461 ribu atau sebesar 21,68% dibandingkan dengan 31 Desember 2022. Hal ini terutama disebabkan oleh meningkat aset tidak berwujud pada akhir tahun 2023.

b. Liabilitas***Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023***

Jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal 30 Juni 2024 adalah sebesar USD494.015 ribu yang terdiri dari liabilitas jangka pendek sebesar USD251.772 ribu dan liabilitas jangka panjang sebesar USD242.243 ribu.

Liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 30 Juni 2024 turun sebesar USD20.221 ribu atau 7,43% ketika dibandingkan dengan liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2023. Hal ini disebabkan oleh turunnya liabilitas jangka panjang yang sudah jatuh tempo dalam satu tahun dari pihak ketiga.

Liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 30 Juni 2024 meningkat sebesar USD21.921 ribu atau 9,95% bila dibandingkan dengan liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2023. Kenaikan tersebut terjadi karena adanya penambahan pinjaman jangka panjang dari pihak ketiga.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar USD492.315 ribu yang terdiri dari liabilitas jangka pendek sebesar USD271.993 ribu dan liabilitas jangka panjang sebesar USD220.322 ribu.

Liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 mengalami peningkatan sebesar USD50.076 ribu atau sebesar 22,57% dibandingkan dengan 31 Desember 2022. Hal ini terutama disebabkan oleh naiknya utang usaha dari pihak ketiga.

Liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 mengalami peningkatan sebesar USD143.810 ribu atau sebesar 187,96% dibandingkan dengan 31 Desember 2022. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan pinjaman jangka panjang.

c. Ekuitas***Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023***

Ekuitas Perseroan pada tanggal 30 Juni 2024 adalah sebesar 241.580 ribu, bila dibandingkan dengan Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023, Ekuitas Perseroan mengalami peningkatan sebesar USD5.950 ribu atau 2,53% yang terjadi karena adanya penjualan saham treasury selama periode 30 Juni 2023.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar USD 235.630 ribu, mengalami penurunan sebesar USD62.361 ribu atau turun 20,93% dibandingkan dengan 31 Desember 2022. Penurunan ini terutama disebabkan oleh laba bersih tahun berjalan yang di offset dengan dividen tahun berjalan. Dividen yang dibayarkan oleh Perseroan adalah sebesar USD76.000 ribu pada tahun 2023.

6. ARUS KAS

Tabel berikut memberikan informasi aliran arus kas Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, yang disebutkan:

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2024	2023*	2023	2022
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				
Penerimaan kas dari pelanggan	326.749	258.191	562.342	453.901
Pembayaran kas kepada pemasok	(204.653)	(149.275)	(285.839)	(211.235)
Pembayaran kas kepada karyawan	(71.650)	(65.647)	(142.691)	(132.112)
Kas dihasilkan dari operasi	50.446	43.269	133.812	110.554
Pembayaran bunga dan beban keuangan	(12.857)	(7.166)	(18.856)	(6.564)
Pembayaran pajak penghasilan dan pajak lainnya	(7.547)	(7.619)	(15.279)	(18.725)
Penerimaan pengembalian pajak	-	6.943	7.019	3.126
Penerimaan bunga	395	604	1.070	1.017
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi	30.437	36.031	107.766	89.408
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				
Hasil penjualan aset tetap	89	-	1.943	632
Pembelian aset tetap	(19.432)	(21.651)	(62.110)	(54.496)
Akuisisi Entitas Anak, setelah dikurangi kas yang diperoleh	-	(90.542)	(90.542)	-
Perolehan aset tidak berwujud	(1.122)	(621)	(3.954)	(5.120)
Penempatan investasi entitas asosiasi	-	-	(2.316)	(574)
Pencairan aset keuangan lainnya	-	-	-	24.000
Pembayaran aset eksplorasi dan evaluasi dan properti tambang	(1.048)	-	-	-
Pemberian pinjaman jangka panjang – pihak ketiga	-	-	-	(54.969)
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(21.513)	(112.814)	(156.979)	(90.527)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				
Penerimaan pinjaman jangka panjang pihak ketiga	184.034	170.505	174.324	-
Penerimaan pinjaman bank	59.226	44.673	81.509	107.000
Penerimaan dari transaksi jual dan sewa balik	-	7.516	8.693	7.839
Penerimaan dari penjualan saham treasury	8.475	-	-	-
Pembayaran pinjaman bank	(52.000)	(45.000)	(89.509)	(62.000)
Pembayaran dividen oleh Perusahaan	(3.021)	(75.857)	(75.359)	-
Pembayaran pinjaman jangka panjang kepada pihak ketiga	(183.472)	(9.612)	(28.714)	(58.879)
Pembayaran liabilitas sewa	(6.930)	(4.375)	(8.853)	(18.839)
Pencairan (penempatan) rekening bank dibatasi penggunaannya	2.828	-	(2.828)	-
Pembayaran dividen Entitas Anak	(222)	-	(175)	(191)
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Pendanaan	8.918	87.850	59.088	(25.070)
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas	17.842	11.067	9.875	(26.189)
Kas Dan Setara Kas Awal Periode/Tahun	72.987	61.760	61.760	89.325
Pengaruh perubahan kurs valuta asing atas kas dan setara kas	1.442	452	1.352	(1.376)
Kas dan setara Kas Akhir Periode/Tahun	92.271	73.279	72.987	61.760

*) tidak diaudit / tidak direviu

a. Arus kas dari aktivitas operasi

Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi tanggal 30 Juni 2024 adalah sebesar USD30.437 ribu, mengalami penurunan sebesar USD5.594 ribu atau 15,53% bila dibandingkan kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi pada tanggal 30 Juni 2023 yaitu sebesar USD36.031 ribu. Kenaikan ini disebabkan oleh kenaikan kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasional.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi sebesar USD107.766 ribu, dimana sebagian besar kas diperoleh dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar USD562.342 ribu dan digunakan untuk pembayaran kas kepada pemasok sebesar USD285.839 ribu, pembayaran kepada karyawan sebesar USD142.691 ribu, serta digunakan untuk pembayaran bunga dan beban keuangan sebesar USD18.856 ribu.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi sebesar USD89.408 ribu, dimana sebagian besar kas diperoleh dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar USD453.901 ribu dan digunakan untuk pembayaran kas kepada pemasok sebesar USD211.235 ribu, pembayaran kepada karyawan sebesar USD132.112 ribu, serta digunakan untuk pembayaran pajak penghasilan dan pajak lainnya sebesar USD18.725 ribu.

b. Arus kas dari aktivitas investasi

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi tanggal 30 Juni 2024 adalah sebesar USD21.513 ribu, mengalami penurunan sebesar USD91.301 atau 80,93% bila dibandingkan kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi pada tanggal 30 Juni 2023 yang sebesar USD112.814 ribu. Penurunan ini terjadi karena Perseroan lebih selektif dalam pembelian aset.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi sebesar USD156.979 ribu, digunakan terutama untuk akusisi Entitas Anak, setelah dikurangi kas yang diperoleh sebesar USD90.542 ribu dan untuk pengeluaran pembelian aset tetap sebesar USD62.110 ribu.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi sebesar USD90.527 ribu, digunakan untuk pengeluaran pembelian aset tetap sebesar USD54.496 ribu dan pemberian pinjaman jangka panjang pihak ketiga sebesar USD54.969 ribu.

c. Arus kas dari aktivitas pendanaan

Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan tanggal 30 Juni 2024 adalah sebesar USD8.918 ribu, mengalami penurunan sebesar USD78.932 ribu atau 89,85% bila dibandingkan kas bersih yang diperoleh dari aktivitas Pendanaan pada tanggal 30 Juni 2023 yang sebesar USD87.850 ribu. Hal ini disebabkan oleh adanya pembayaran utang bank.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan sebesar USD59.088 ribu, dimana sebagian besar kas diperoleh dari penerimaan pinjaman jangka panjang pihak ketiga sebesar USD174.324 ribu dan penerimaan pinjaman bank sebesar USD81.509 ribu yang di *offset* dengan pembayaran pinjaman bank sebesar USD89.509 ribu serta pembayaran dividen sebesar USD75.359 ribu.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan sebesar USD25.070 ribu, dimana sebagian besar kas digunakan untuk pembayaran utang bank sebesar USD62.000 ribu dan pembayaran pinjaman jangka panjang kepada pihak ketiga sebesar USD58.879 ribu yang di *offset* dengan penerimaan pinjaman bank sebesar USD107.000 ribu, serta pembayaran liabilitas sewa sebesar USD18.839 ribu.

7. LIKUIDITAS DAN SUMBER PERMODALAN

Likuiditas

Likuiditas menunjukkan tingkat kemampuan Perseroan untuk memenuhi seluruh kewajiban jangka pendek yang tercermin dari rasio antara aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek. Semakin tinggi rasio tersebut, semakin baik kemampuan Perseroan untuk memenuhi liabilitas jangka pendek.

Rasio aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar 118,83%, 123,67%, 116,08% dan 116,10%.

Meskipun rasio likuiditas pada 31 Desember 2023 tetap konsisten dengan rasio likuiditas pada 31 Desember 2022, Perseroan terus memantau dan mengelola sumber daya likuiditasnya dengan hati-hati. Stabilitas ini menunjukkan kemampuan Perseroan untuk mempertahankan keseimbangan antara aset lancar dan liabilitas jangka pendeknya.

Sumber likuiditas internal Perseroan berasal dari penerimaan kas dari pelanggan dan likuiditas eksternal berasal dari utang, baik utang bank maupun pinjaman jangka panjang – pihak ketiga.

Berikut adalah sumber likuiditas material yang belum digunakan oleh Perseroan pada 30 Juni 2024:

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

Kreditur	Jenis Fasilitas	Plafon	30 Juni 2024	Keterangan
BCA	Kredit Jangka Pendek	70.000	44.353	Telah digunakan oleh Perseroan
	Kredit Investasi 1	107.000	97.180	Telah digunakan oleh Perseroan dan KBL
	Kredit Investasi 2	83.000	81.698	Telah digunakan oleh Perseroan
	Kredit Investasi 3	30.400	8.512	Telah digunakan oleh CEP
	Kredit Investasi 4	50.000	-	Belum digunakan
	Kredit Investasi 5	48.700	-	Belum digunakan
BNI	Pinjaman Sindikasi	151.000	-	Belum digunakan

Hingga pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki modal kerja yang cukup dan belum pernah mengalami kekurangan dalam mencukupi modal kerja.

Solvabilitas

Solvabilitas merupakan kemampuan Perseroan untuk memenuhi seluruh liabilitasnya yang diukur dengan perbandingan antara jumlah liabilitas dengan jumlah ekuitas (solvabilitas ekuitas) maupun jumlah liabilitas dengan jumlah aset (solvabilitas aset). Solvabilitas ekuitas Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar 204,49%, 210,89%, 208,94% dan 100,15%, sedangkan solvabilitas aset Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar 67,16%, 67,83%, 67,63% dan 50,04%.

Imbal Hasil Ekuitas (*Return On Equity*)

Imbal Hasil Ekuitas menunjukkan kemampuan Perseroan untuk menghasilkan laba bersih yang diukur dengan membandingkan antara laba tahun berjalan dengan jumlah ekuitas. Imbal Hasil Ekuitas Perseroan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar 5,28% dan 13,81%.

Imbal hasil ekuitas pada 31 Desember 2023 dibandingkan dengan 31 Desember 2022 mengalami penurunan yang disebabkan oleh menurunnya laba tahun berjalan sebesar 69,79%, dari USD41.166 ribu pada tahun 2022 menjadi USD12.438 ribu pada tahun 2023.

Imbal Hasil Aset (*Return On Asset*)

Imbal Hasil Aset menunjukkan kemampuan Perseroan untuk menghasilkan laba bersih yang diukur dengan membandingkan antara laba tahun berjalan dengan jumlah aset. Imbal Hasil Aset Perseroan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar 1,71% dan 6,90%.

Imbah hasil aset Perseroan mengalami penurunan pada Imbal Hasil Aset di tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022 disebabkan oleh menurunnya laba tahun berjalan sebesar 69,79%, dari USD41.166 ribu pada tahun 2022 menjadi USD12.438 ribu pada tahun 2023.

Profitabilitas

Margin laba (*net profit margin*) Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 adalah sebesar 0,48%, menurun dari periode sebelumnya sebesar 4,27% pada tanggal 30 Juni 2023. Penurunan ini disebabkan oleh peningkatan beban usaha langsung dan biaya operasional yang lebih tinggi daripada peningkatan pendapatan serta meningkatnya beban bunga dan keuangan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, *net profit margin* Perseroan adalah sebesar 2,15%, sedangkan pada tahun 2022 adalah sebesar 8,64%. Penurunan net profit margin pada tahun 2023 dibandingkan tahun 2022 terutama disebabkan oleh peningkatan beban usaha langsung dan biaya operasional yang lebih tinggi daripada peningkatan pendapatan. Hal ini mencerminkan berbagai faktor termasuk kenaikan biaya subkontraktor sebesar 61,45%, biaya gaji dan upah sebesar 14,39%, serta biaya operasi alat berat dan peralatan sebesar 27,43%.

8. SEGMENT OPERASI

Segmen operasi Perseroan terbagi menjadi tiga lini bisnis utama yaitu segmen pertambangan, segmen rekayasa dan konstruksi, segmen jasa dan segmen tidak dialokasikan. Berikut ini adalah informasi mengenai segmen operasi Perseroan:

dalam ribuan Dolar Amerika Serikat

	Pertambangan		Rekayasa Konstruksi		Jasa		Tidak Dialokasikan		Jumlah Konsolidasi	
	30 Juni									
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Pendapatan dan Beban										
Pendapatan usaha	156.528	179.239	141.241	71.908	19.021	21.664	1.234	1.214	318.024	274.025
Hasil segmen	(4.282)	11.478	21.691	10.248	1.011	1.128	(4.319)	(2.652)	14.101	20.202
Penghasilan bunga	65	140	2	-	42	50	286	414	395	604
Beban bunga dan keuangan	(9.409)	(5.780)	(3.395)	(998)	(467)	(174)	(77)	(214)	(13.348)	(7.166)
Beban pajak final	-	-	(3.965)	(882)	(78)	(88)	-	-	(4.043)	(970)
Keuntungan dan kerugian lain-lain – bersih	3.051	2.252	2.803	-	255	(87)	(78)	(1.554)	6.031	611
Beban pajak penghasilan	(1.237)	(1.397)	-	-	(541)	(164)	165	(9)	(1.613)	(1.570)
Laba bersih periode berjalan	(11.812)	6.693	17.136	8.368	222	665	(4.023)	(4.015)	1.523	11.711
Beban non kas:										
Penyusutan	(23.457)	(27.275)	(1.949)	(2.123)	(1.216)	(1.254)	(77)	(49)	(26.699)	(30.701)
Amortisasi	(4.929)	(2.139)	(774)	(762)	-	-	(565)	(186)	(6.268)	(3.087)
Beban non-kas lainnya	(2.493)	(2.697)	(1.365)	(780)	(235)	(205)	-	(1.019)	(4.093)	(4.701)
Informasi lainnya*:										
Aset tambang	2.325	2.497	-	-	-	-	-	-	2.325	2.497
Aset tetap – bersih	190.841	182.774	25.301	24.858	11.022	11.866	1.445	11.248	228.609	230.746
Aset hak guna	26.917	35.615	18	21	1.553	1.668	39	248	28.527	37.552
Aset lainnya	234.348	294.278	211.461	128.896	28.478	31.940	1.847	2.036	476.134	457.150
Jumlah aset	454.431	515.164	236.780	153.775	41.053	45.474	3.331	13.532	735.595	727.945
Jumlah liabilitas	243.147	316.914	219.402	138.811	29.547	34.397	1.919	2.193	494.015	492.315
Pengeluaran barang modal (termasuk aset berwujud)	8.178	41.874	7.379	18.342	994	4.545	64	290	16.615	65.051

*perbandingan informasi lainnya pada periode 30 Juni 2023 menggunakan angka 31 Desember 2023.

Pada tanggal 30 Juni 2024, pendapatan dari segmen pertambangan tetap memberikan kontribusi terbesar terhadap total pendapatan Perseroan, yaitu sebesar 49,22%, diikuti dengan segmen rekayasa dan konstruksi sebesar 44,41% serta segmen jasa dan segmen tidak dialokasikan sebesar 5,98%.

Namun, pendapatan Perseroan dari Kontrak Pertambangan dicatatkan menurun sebesar 12,67% yang disebabkan oleh menurunnya aktivitas *overbuden removal volume* dan *coal production* pada bisnis Kontrak Pertambangan. Selanjutnya pada lini bisnis Jasa Logistik dan Pendukung Kegiatan Minyak & Gas Bumi pendapatan Perseroan juga mengalami penurunan sebesar USD2.643 ribu atau 12,20% karena menurunnya aktivitas pada operasi pelabuhan dan bongkar muat. Akan tetapi Perseroan memiliki pertumbuhan signifikan pada segmen rekayasa dan konstruksi sebesar 96,42% karena meningkat kegiatan operasional dan ekspansi proyek dari segmen rekayasa dan konstruksi.

dalam ribuan Dolar Amerika Serikat

	Pertambangan		Rekayasa Konstruksi		Jasa		Tidak Dialokasikan		Jumlah Konsolidasi	
	31 Desember									
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Pendapatan dan Beban										
Pendapatan usaha	371.825	340.036	162.862	86.707	40.357	46.841	2.573	2.733	577.617	476.317
Hasil segmen	20.242	49.175	22.971	15.119	2.766	1.990	(10.651)	(5.351)	35.328	60.933
Penghasilan bunga	264	186	5	325	113	79	688	427	1.070	1.017
Beban bunga dan keuangan	(17.088)	(5.139)	(2.308)	(923)	(406)	(299)	(3)	(1.060)	(19.805)	(7.421)
Keuntungan dan kerugian lain-lain – bersih	4.040	(930)	20	-	(185)	1.174	-	(1.919)	3.875	(1.675)
Beban pajak final	-	-	(4.323)	(855)	(98)	(88)	-	(1.756)	(4.421)	(2.699)
Beban pajak penghasilan	(3.236)	(7.881)	-	-	(351)	(1.047)	(22)	(61)	(3.609)	(8.989)
Laba bersih periode berjalan	4.222	35.411	16.365	13.666	1.839	1.809	(9.988)	(9.720)	12.438	41.166
Beban non kas:										
Penyusutan	(56.014)	(53.910)	(4.034)	(3.621)	(2.592)	(2.352)	(79)	(105)	(62.719)	(59.988)
Amortisasi	(7.226)	(2.932)	(1.538)	(1.258)	-	-	(547)	(280)	(9.311)	(4.470)
Beban non-kas lainnya	(4.105)	(4.522)	(1.834)	(1.165)	(425)	(490)	-	(1.486)	(6.364)	(7.663)
Informasi lainnya:										
Aset tambang	2.497	-	-	-	-	-	-	-	2.497	-
Aset tetap – bersih	182.774	189.143	24.858	22.602	11.866	20.573	11.248	494	230.746	232.812
Aset hak guna	35.615	31.537	21	281	1.668	2.131	248	-	37.552	33.949
Aset lainnya	294.278	235.340	128.896	60.009	31.940	32.418	2.036	1.892	457.150	329.659
Jumlah aset	515.164	456.020	153.775	82.892	45.474	55.122	13.532	2.386	727.945	596.420
Jumlah liabilitas	316.914	213.044	138.811	54.325	34.397	29.347	2.193	1.713	492.315	298.429
Pengeluaran barang modal (termasuk aset berwujud)	41.874	47.768	18.342	12.181	4.545	6.580	290	384	65.051	66.913

Pada tahun 2023, pendapatan dari segmen pertambangan tetap memberikan kontribusi terbesar terhadap total pendapatan Perseroan, yaitu sebesar 64,37%, diikuti dengan segmen rekayasa dan konstruksi sebesar 28,20% serta segmen jasa dan segmen tidak dialokasikan sebesar 6,99%.

Perseroan kembali mencatatkan kinerja positif dimana pertumbuhan pendapatan dari segmen pertambangan sebesar 9,35% hal ini disebabkan oleh peningkatan total pemindahan lapisan tanah penutup sebesar 5,33%, dari 124,07 juta BCM menjadi 130,68 juta BCM serta produksi batu bara sebesar 17,07 juta ton dan mencatatkan penjualan Batu bara sebesar USD7,678 juta selama tahun 2023. Pertumbuhan diikuti dengan peningkatan signifikan dari segmen rekayasa dan konstruksi sebesar 87,83% hal ini disebabkan oleh meningkatnya aktifitas dari proyek FPJO GBC Pre-Crusher Construction Services, Manyar Maju Refinery, rekayasa dan konstruksi Awak Mas Gold Mine serta beberapa proyek dari PT Freeport Indonesia. Sementara itu, segmen jasa dan segmen tidak dialokasikan mengalami penurunan pendapatan sebesar USD6.484 ribu atau 13,84% dikarenakan menurunnya aktivitas dan kegiatan operasional pelabuhan serta aktivitas bongkar muat di KPI dan POSB Sorong.

9. BELANJA MODAL

Dalam rangka mendukung lini bisnis kontrak pertambangan dan rekayasa dan konstruksi untuk memastikan kelancaran aktivitas operasional yang berlangsung, Perseroan telah merencanakan belanja modal setiap tahunnya. Belanja modal ini mencakup investasi dalam berbagai aset dan infrastruktur penting yang diperlukan untuk mendukung efektivitas operasional kontrak pertambangan & rekayasa dan konstruksi.

Komitmen investasi barang modal

Perseroan melakukan investasi barang modal untuk meningkatkan kapasitas operasionalnya dengan memperhatikan risiko investasi. Keduanya berpengaruh langsung terhadap reputasi Perseroan, sehingga manajemen mampu menjaga keseimbangan antara realisasi investasi barang modal dan perlindungan atas setiap risiko. Keseimbangan ini disesuaikan setiap tahunnya dengan memperhatikan kewajiban kontrak dan kebijakan struktur permodalan.

Realisasi Investasi Barang Modal			Juni	Desember	
Deskripsi	Sumber Dana		2024	2023	2022
			Belanja Modal untuk penambahan kapasitas & penggantian armada dalam meningkatkan kebutuhan operasional	Leasing keuangan, pinjaman jangka panjang – pihak ketiga & pihak berelasi	
Belanja Modal untuk komponen armada dalam menjaga kinerja operasional	Leasing keuangan, pinjaman jangka panjang – pihak ketiga & pihak berelasi		40,9%	45,0%	43,2%

10. PEMBATASAN TERHADAP PENGALIHAN DANA ENTITAS ANAK KEPADA PERSEROAN

Tidak terdapat pembatasan yang signifikan terhadap kemampuan Perusahaan Anak untuk mengalihkan dana kepada Perseroan, dan dampak dari adanya pembatasan tersebut terhadap kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban pembayaran tunai dianggap minimal.

11. KEJADIAN ATAU TRANSAKSI TIDAK NORMAL ATAU PERUBAHAN PENTING YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN DAN PROFITABILITAS

Tidak terdapat kejadian atau transaksi yang tidak normal atau jarang terjadi, serta perubahan signifikan dalam kondisi ekonomi, yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas yang dilaporkan dalam laporan keuangan terakhir yang telah diaudit oleh kantor Akuntan Publik, sebagaimana telah diuraikan dalam Prospektus ini.

12. RISIKO FLUKTUASI KURS MATA UANG ASING DAN SUKU BUNGA ACUAN

Perseroan menghadapi risiko fluktuasi nilai tukar mata uang asing. Meskipun mata uang fungsional Perseroan adalah Dolar Amerika Serikat, ada beberapa transaksi yang menggunakan mata uang selain Dolar Amerika Serikat, terutama Rupiah khususnya biaya operasional. Risiko fluktuasi terhadap Dolar Australia, Dolar Singapura dan Euro adalah tidak material.

Perseroan memegang kas dan setara kas dalam mata uang selain Dolar Amerika Serikat untuk modal kerja.

Perseroan mengelola eksposur terhadap mata uang asing, terutama Rupiah dengan mencocokkan, sebisa mungkin, penerimaan dan pembayaran dalam masing-masing individu mata uang.

Eksposur risiko tingkat bunga berhubungan dengan jumlah aset atau liabilitas dimana pergerakan pada tingkat suku bunga dapat mempengaruhi laba setelah pajak. Risiko pada pendapatan bunga bersifat terbatas karena Perseroan hanya bermaksud untuk menjaga saldo kas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan operasional. Dalam beban bunga, keseimbangan optimal antara utang dengan tingkat bunga tetap dan mengambang ditetapkan dimuka. Perseroan memiliki kebijakan dalam memperoleh pembiayaan yang akan memberikan kombinasi yang sesuai tingkat suku bunga mengambang dan tingkat bunga tetap. Persetujuan dari Dewan Komisaris dan Direksi harus diperoleh sebelum Perseroan dan Perusahaan Anak menggunakan instrumen keuangan tersebut untuk mengelola eksposur risiko suku bunga.

VI. FAKTOR RISIKO

Investasi dalam Obligasi dan Sukuk Ijarah mengandung sejumlah risiko. Para calon investor harus berhati-hati dalam mempertimbangkan seluruh informasi yang terdapat dalam Prospektus ini, khususnya risiko-risiko usaha di bawah ini, dalam melakukan evaluasi sebelum membeli Obligasi dan Sukuk Ijarah. Risiko tambahan yang saat ini belum diketahui atau dianggap tidak material oleh Perseroan juga dapat berpengaruh material dan merugikan pada kegiatan usaha, arus kas, hasil operasi, kondisi keuangan dan prospek usaha Perseroan.

Risiko-risiko yang akan diungkapkan dalam uraian berikut merupakan risiko-risiko material bagi Perseroan. Faktor risiko usaha dan risiko umum telah disusun berdasarkan bobot risiko yang dihadapi Perseroan.

A. Risiko Utama

Menurunnya permintaan Batu bara dan Mineral

Penurunan permintaan batu bara dan mineral di pasar global dapat menjadi risiko utama yang dihadapi perusahaan pada industri pertambangan di Indonesia. Meskipun dampak langsung terhadap perusahaan terbatas, penurunan ini dapat mempengaruhi investasi dan produksi perusahaan-perusahaan batu bara, yang secara tidak langsung berdampak pada potensi pertumbuhan Perseroan. Fluktuasi permintaan dapat mengurangi permintaan akan jasa pertambangan ke Perseroan dan mempengaruhi prospek permintaan proyek-proyek rekayasa dan konstruksi yang terkait dengan industri ini.

B. Risiko Terkait Kegiatan Usaha Perseroan

1). Efektivitas Operasi

Infrastruktur yang Tidak Memadai

Di daerah terpencil, infrastruktur yang tidak memadai, seperti jalan akses yang buruk atau pasokan listrik yang tidak stabil, dapat menyebabkan penundaan dalam operasi dan peningkatan biaya operasional karena harus membangun infrastruktur terlebih dahulu. Kurangnya akses terhadap infrastruktur yang memadai dapat menghambat pengiriman material, peralatan, dan tenaga kerja, yang berdampak negatif pada kemajuan proyek dan produktivitas keseluruhan.

Penundaan Jadwal Proyek

Manajemen proyek yang buruk dapat menyebabkan penundaan dalam jadwal, terutama pada proyek-proyek yang kompleks. Di Indonesia, persetujuan regulasi, akuisisi lahan, dan keterlibatan dengan Masyarakat setempat sering menjadi faktor utama penyebab keterlambatan proyek. Penundaan ini dapat mengganggu aliran kerja dan memperpanjang waktu penyelesaian proyek.

Pembengkakan Biaya

Perencanaan proyek yang tidak memadai, kesalahan dalam memperkirakan biaya, atau perubahan lingkup pekerjaan dapat menyebabkan pembengkakan biaya yang menguras kelayakan finansial proyek. Kenaikan biaya ini bisa menjadi beban, terutama jika terjadi di tengah jalan, ketika opsi untuk mengurangi biaya sudah sangat terbatas.

Pengalokasian Sumber Daya

Salah alokasi atau penggunaan sumber daya yang tidak efisien, termasuk sumber daya manusia, dapat menyebabkan kemacetan dalam operasional dan menurunkan produktivitas. Manajemen sumber daya yang buruk dapat menghambat kelancaran proyek dan mengakibatkan penyelesaian yang lebih lama serta biaya yang lebih tinggi.

2). Ketersediaan dan Kinerja Alat Berat

Kinerja Peralatan yang Tidak Optimal

Peralatan yang tidak mencapai tingkat produktivitas yang diharapkan dapat menyebabkan penundaan pekerjaan operasional dan peningkatan biaya. Dalam operasi pertambangan dan rekayasa dan konstruksi, produktivitas peralatan sangat bergantung pada keterampilan dan pengalaman operatornya. Kurangnya pelatihan atau ketersediaan tenaga kerja terampil dapat mengurangi efektivitas mesin, yang pada akhirnya menghambat kelancaran proyek.

Kerusakan Peralatan

Kerusakan mekanis yang sering terjadi pada peralatan dapat menyebabkan gangguan dalam operasi pertambangan dan rekayasa dan konstruksi. Hal ini menjadi lebih kritis di lokasi terpencil di mana fasilitas perbaikan terbatas. Masalah dalam pemeliharaan, seperti pemeliharaan yang tidak memadai atau tertunda, meningkatkan kemungkinan kegagalan peralatan yang mengakibatkan *downtime* yang tidak terencana. Selain itu, peralatan yang sudah tua cenderung lebih sering mengalami kerusakan dan membutuhkan perbaikan yang lebih sering, yang berdampak pada efisiensi operasional secara keseluruhan.

Gangguan Rantai Pasokan

Penundaan dalam pengadaan suku cadang akibat gangguan rantai pasokan dapat menghentikan operasi, menyebabkan penundaan proyek. Manajemen inventory yang buruk dapat mengakibatkan kekurangan atau kelebihan suku cadang, yang keduanya berdampak negatif pada proyek. Tantangan logistik di lokasi tambang dan proyek rekayasa dan konstruksi yang terpencil di Indonesia dapat memperburuk keterlambatan dalam pengiriman suku cadang, semakin memperlambat kemajuan progress proyek.

3). Harga Batu bara, Bahan Bakar dan Mineral

Fluktuasi Harga Batu bara

Harga batu bara di pasar global sangat fluktuatif dan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti permintaan dan penawaran global, kebijakan energi internasional, serta kondisi ekonomi dunia. Fluktuasi harga ini dapat berdampak langsung pada pendapatan dan profitabilitas dari klien Perseroan dan dapat berdampak pada pemesanan jasa pertambangan dan rekayasa dan konstruksi yang ditawarkan oleh Perseroan.

Kenaikan Harga Bahan Bakar

Operasi pertambangan sangat bergantung pada bahan bakar untuk menjalankan peralatan berat dan transportasi. Kenaikan harga bahan bakar dapat meningkatkan biaya operasional bagi klien Perseroan yang dalam hal ini biaya bahan bakar dalam kontrak jasa pertambangan adalah biaya yang ditanggung oleh pemilik IUP/perusahaan pemilik tambang/klien Perseroan.

Fluktuasi Harga Mineral

Seperti halnya batu bara, harga mineral juga rentan terhadap fluktuasi pasar global. Perubahan harga yang tajam dapat memengaruhi insentif bagi klien Perseroan karena mereka makin berhati-hati dalam hal ekspansi. Jika harga mineral turun drastis, perusahaan pemilik tambang mungkin harus menunda atau membatalkan proyek-proyek yang sedang berjalan untuk menghindari kerugian finansial yang lebih besar. Hal ini juga dapat mempengaruhi keputusan investasi jangka panjang dan strategi ekspansi mereka dan berdampak pada nilai dan jumlah jasa pertambangan dan rekayasa dan konstruksi ditawarkan ke Perseroan.

4). Kondisi cuaca

Hujan dan Banjir

Hujan lebat, yang sering terjadi di Indonesia, dapat menghentikan operasi pertambangan dan proyek rekayasa dan konstruksi, menunda produksi/pekerjaan proyek di lapangan, dan dapat menyebabkan banjir di area pertambangan. Banjir ini tidak hanya menimbulkan risiko bagi keselamatan personel, tetapi juga dapat merusak peralatan dan infrastruktur yang ada. Selain itu, genangan air akibat banjir dapat memperburuk situasi, mengakibatkan kerusakan pada fasilitas produksi Perseroan dan mengganggu kelancaran operasional.

Perubahan Cuaca Musiman

Pola cuaca seperti musim hujan yang panjang dimana membuat operasi proyek harus dihentikan atau dikurangi. Ini memerlukan perencanaan yang matang dan tindakan antisipasi untuk mengurangi dampak negatif terhadap kinerja proyek yang sedang berjalan. Tanpa persiapan yang matang, ketidak teraturan cuaca ini dapat menyebabkan penundaan proyek dan peningkatan biaya operasional.

Erosi dan Longsor

Curah hujan yang berkepanjangan dapat menyebabkan erosi dan tanah longsor, yang dapat merusak infrastruktur tambang, jalan akses, dan peralatan yang digunakan. Kerusakan ini berpotensi mengakibatkan penghentian proyek secara keseluruhan, memerlukan perbaikan yang mahal, dan memperpanjang waktu penyelesaian proyek.

5). Peraturan Pemerintah

Regulasi Pemerintah

Perubahan yang sering terjadi dalam undang-undang, peraturan, dan kebijakan terkait pertambangan dan proyek rekayasa dan konstruksi dan infrastruktur dapat menimbulkan risiko bagi Perseroan. Hal ini termasuk revisi terhadap peraturan lingkungan, pelarangan import maupun ekspor, serta perubahan dalam struktur pajak dan royalti. Perubahan mendadak dalam regulasi ini dapat mengganggu rencana bisnis dan menyebabkan penyesuaian operasional yang mahal.

Risiko Kepatuhan

Kegagalan untuk mematuhi hukum di daerah dan nasional, termasuk undang-undang ketenagakerjaan, standar lingkungan, dan peraturan keselamatan, dapat mengakibatkan denda, sanksi, atau bahkan penghentian operasi. Kepatuhan yang tidak memadai dapat menimbulkan risiko hukum dan merusak reputasi perusahaan di mata Pemerintah dan Masyarakat setempat.

6). Gangguan operasional

Kerusakan Lingkungan

Operasi pertambangan membawa risiko kerusakan lingkungan, yang dapat berdampak negatif pada ekosistem di sekitar area pertambangan yang harus ditanggung oleh pemilik IUP/klien. Kerusakan lingkungan ini bisa menyebabkan konsekuensi seperti denda dari pihak berwenang, tindakan hukum, dan reaksi negatif dari Masyarakat atau kelompok lingkungan mempengaruhi kelancaran operasional Perseroan di area tersebut.

Hubungan dengan Masyarakat

Manajemen yang buruk dalam menjalin hubungan dengan Masyarakat lokal dapat menimbulkan berbagai masalah sosial. Ketidakpuasan Masyarakat setempat bisa berujung pada protes, pemblokiran akses, atau tuntutan kompensasi yang berlebihan, yang semuanya dapat menghambat kelancaran proyek. Ketegangan dengan Masyarakat sekitar tidak hanya memperlambat proyek, tetapi juga dapat memicu konflik yang lebih besar, yang pada akhirnya meningkatkan biaya operasional dan memperpanjang waktu penyelesaian proyek.

7). Keselamatan, Kesehatan & Lingkungan (SHE / Safety, Health & Environment)

Kecelakaan di Tempat Kerja

Operasi pertambangan dan rekayasa dan konstruksi biasanya memiliki tingkat risiko yang tinggi, dan beroperasi di lingkungan kerja yang berbahaya. Kecelakaan di tempat kerja, seperti kecelakaan atau bahkan kematian, dapat menyebabkan penundaan proyek yang signifikan, peningkatan biaya operasional, dan potensi tanggung jawab hukum. Kecelakaan ini tidak hanya mempengaruhi kelancaran operasional, tetapi juga bisa merusak reputasi perusahaan di mata publik dan regulator.

Kesehatan Kerja

Kondisi kerja dari paparan debu, bahan kimia, atau kondisi kerja yang ekstrem, dapat menyebabkan masalah kesehatan jangka panjang bagi pekerja. Masalah kesehatan jangka pendek seringkali berakibat meningkatnya tingkat absensi dan penurunan produktivitas tenaga kerja. Dampak ini dapat memperlambat progres proyek, meningkatkan biaya asuransi kesehatan, dan memicu tuntutan hukum dari pekerja yang terkena dampak.

C. Risiko Umum**1. Ekonomi Makro****Risiko Ekonomi Makro**

Perubahan dalam kondisi ekonomi makro, seperti inflasi, dan suku bunga dapat mempengaruhi secara tidak langsung biaya operasional dan pendapatan Perseroan. Inflasi yang tinggi, misalnya, dapat meningkatkan biaya tenaga kerja dan bahan baku, sementara suku bunga yang tinggi dapat menambah beban biaya pinjaman.

Risiko Pasar

Kondisi pasar global dan regional juga berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan proyek pertambangan dan rekayasa dan konstruksi. Penurunan permintaan global untuk komoditas tertentu dapat menurunkan harga dan memperburuk kondisi pasar, sehingga mengurangi pendapatan dan memaksa Perseroan untuk menyesuaikan strategi bisnisnya. Selain itu, perubahan dalam kebijakan perdagangan internasional, seperti tarif impor atau ekspor, juga dapat mempengaruhi akses pasar dan biaya perdagangan, yang pada akhirnya berdampak pada operasi dan profitabilitas Perseroan.

2. Pertumbuhan Ekonomi Global**Pengaruh Perlambatan Pertumbuhan Ekonomi Global**

Pertumbuhan ekonomi global yang melambat dapat memiliki dampak signifikan terhadap industri pertambangan dan rekayasa dan konstruksi di Indonesia. Ketika pertumbuhan ekonomi global melambat, permintaan akan komoditas seperti batu bara, mineral, dan logam cenderung menurun. Penurunan permintaan ini dapat menyebabkan harga komoditas turun, yang pada gilirannya mengurangi pendapatan dan profitabilitas dari klien Perseroan. Dalam situasi ini, permintaan jasa pertambangan dan rekayasa dan konstruksi menurun dan menunda proyek-proyek baru, atau mengurangi kapasitas produksi.

Dampak Perubahan Ekonomi di Negara-Negara Tujuan Ekspor

Sebagai eksportir utama komoditas, Indonesia sangat bergantung pada kondisi ekonomi negara tujuan ekspor yaitu China. Demikian juga Perseroan tergantung pada kondisi ekonomi negara ini karena China adalah negara tujuan ekspor utama dari anak usaha Perseroan. Jika negara ini mengalami resesi atau pertumbuhan ekonomi yang lambat, permintaan impor mereka terhadap komoditas dari Indonesia bisa menurun. Penurunan ini dapat mengakibatkan penurunan pendapatan ekspor, yang pada akhirnya mempengaruhi sektor pertambangan dan rekayasa dan konstruksi di Indonesia. Selain itu, ketidakpastian ekonomi global juga dapat membuat investor lebih berhati-hati, sehingga mengurangi investasi dalam proyek-proyek pertambangan dan rekayasa dan konstruksi di Indonesia.

3. Energi Terbarukan / Substitusi Produk

Dengan semakin meningkatnya kesadaran global terhadap perubahan iklim dan dorongan untuk mengurangi emisi karbon, ada pergeseran menuju penggunaan energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan biomassa. Peralihan ini dapat mengurangi permintaan terhadap sumber energi fosil seperti batu bara, yang merupakan salah satu produk utama sektor pertambangan di Indonesia. Jika tren ini terus berlanjut dengan kecepatan yang tidak diantisipasi oleh Perseroan akibatnya Perseroan menghadapi permintaan jasa pertambangan khususnya jasa pertambangan batu bara, akan berdampak pada pendapatan dan keberlanjutan jangka panjang.

D. Risiko Bagi Investor Yang Berkaitan Dengan Obligasi dan Sukuk Ijarah

Pembeli Obligasi dan Sukuk Ijarah dalam Penawaran Umum ini menghadapi risiko atas investasi yang dilakukan, yaitu:

1. Risiko tidak likuidnya Obligasi dan Sukuk Ijarah yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yang antara lain disebabkan karena tujuan pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah sebagai investasi jangka panjang.
2. Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran bunga Obligasi, Cicilan Imbalan Ijarah, Pokok Obligasi dan/atau Sisa Imbalan Ijarah pada waktu yang telah ditetapkan atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO USAHA MATERIAL YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN, DAN RISIKO USAHA DAN RISIKO UMUM TELAH DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DALAM PROSPEKTUS.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak ada kejadian dan transaksi penting yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 1 November 2024 yang dapat berdampak material terhadap posisi keuangan dan hasil usaha Perseroan dan Entitas Anak.

Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Liana Ramon Xenia & Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI dengan opini tanpa modifikasian dengan penambahan paragraf hal-hal lain mengenai penerbitan kembali Laporan Keuangan Konsolidasian Interim untuk menyesuaikan pengungkapan dengan peraturan pasar modal yang berlaku sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi dan Sukuk Ijarah untuk disertakan dalam Dokumen Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi dan Sukuk Ijarah dan tidak dimaksudkan dan tidak boleh digunakan untuk tujuan lain dan laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 yang tidak diaudit/ tidak direviu, dalam laporannya nomor 00126/2.1460/AU.1/02/1428-3/1/XI/2024 tanggal 1 November 2024 yang ditandatangani oleh Kasman.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan pertama kali didirikan dengan nama “PT Petro-sea International Indonesia” berdasarkan Akta Pendirian Perseroan No. 75 tanggal 21 Februari 1972 yang dibuat di hadapan Djojo Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. Y.A.5/51/17 tanggal 30 November 1972 dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam buku register No. 3236 tanggal 7 Desember 1972, serta diumumkan dalam BNRI No. 12 tanggal 9 Februari 1973 dan dalam TBNRI No. 96 (“**Akta Pendirian Perseroan**”).

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan awal berdasarkan Akta Pendirian Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp415.000,- per lembar saham		%
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	2.500	1.037.500.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
1. Petro-sea International Holdings Ltd.	499	207.085.000	99,80
2. Mariano de Leon	1	415.000	0,20
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	500	207.500.000	100,00
Jumlah Saham Portepel	2.000	830.000.000	

Akta Pendirian Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dengan perubahan terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 4 tanggal 4 Desember 2023, yang dibuat di hadapan Shanti Indah Lestari, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang Selatan, yang telah memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0079682.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 19 Desember 2023 dan telah didaftarkan dalam daftar perseroan pada Menkumham No. AHU-0257132.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 19 Desember 2023 serta diumumkan dalam BNRI No. 4 tanggal 19 Desember 2023 dan dalam TBNRI No. 1180 (“**Akta Perseroan No. 4/2023**”).

Akta Pendirian Perseroan, beserta seluruh perubahannya termasuk dalam Akta Perseroan No. 4/2023, selanjutnya disebut sebagai “Anggaran Dasar Perseroan”.

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Tangerang Selatan, dan beralamat kantor di Indy Bintaro Office park, Gedung B Jalan Boulevard Bintaro Jaya blok B7/A6 sektor VII, CBD Bintaro Jaya, Desa/Kelurahan Pondok Jaya, Kec. Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten – 15224.

Perseroan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1972, Perseroan mencapai sebuah jejak langkah bersejarah dengan menjadi perusahaan rekayasa & konstruksi pertama di Indonesia yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (IDX:PTRO) sejak tahun 1990.

Dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya, Perseroan memiliki visi menjadi salah satu perusahaan terkemuka yang menyediakan jasa di sektor pertambangan, minyak dan gas serta infrastruktur di Asia Tenggara.

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah menjalankan usaha dibidang konstruksi, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, perdagangan, pengangkutan dan pergudangan, informasi dan komunikasi, aktivitas profesional, ilmiah dan teknis, aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, dan pendidikan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha:

- a. Konstruksi Gedung Industri, yaitu menyelenggarakan kegiatan usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk industri, seperti gedung perindustrian/pabrik, gedung workshop/bengkel kerja, bangunan pabrik untuk pengelolaan dan pemrosesan bahan nuklir. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung industri;
- b. Konstruksi Gedung Kesehatan, yang menyelenggarakan kegiatan usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk sarana kesehatan, seperti rumah sakit, poliklinik, puskesmas, balai pengobatan, gedung pelayanan kesehatan dan gedung laboratorium. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung kesehatan;
- c. Konstruksi Gedung Lainnya, yaitu menyelenggarakan kegiatan usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai penggunaan selain dalam kegiatan 41011 s.d. 41018, seperti tempat ibadah (masjid, gereja katolik, gereja kristen, pura, wihara, kelenteng), gedung terminal/stasiun, balai yasa (kereta api), bangunan monumental, gedung negara dan Pemerintah pusat/daerah, bangunan bandara, gedung hangar pesawat, gedung PKPPK (Pemadam Kebakaran di Bandar Udara), gedung bersejarah, gedung penjara, gedung balai pertemuan, gudang, gedung genset, rumah pompa, depo, gedung power house, gedung gardu listrik, gedung gardu sinyal, gedung tower, gedung penyimpanan termasuk penyimpanan bahan peledak dan lainnya. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung lainnya;
- d. Jasa Pekerjaan Konstruksi Prafabrikasi Bangunan Gedung, yaitu menyelenggarakan kegiatan pemasangan bahan hasil produksi pabrik seperti beton pracetak, baja, plastik, karet, dan hasil produksi pabrik lainnya dengan metode pabrikasi, erection, dan/ atau perakitan untuk bangunan gedung;
- e. Konstruksi Bangunan Sipil Jalan, yaitu menyelenggarakan kegiatan usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan jalan (raya, sedang, dan kecil), jalan bebas hambatan/jalan tol, dan jalan landasan terbang (pacu, taksi, dan parkir), dan lapangan penyimpanan peti kemas (containers yard). Termasuk kegiatan penunjang pembangunan, peningkatan, pemeliharaan konstruksi pagar/tembok penahan jalan. Tidak termasuk jalan layang;
- f. Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass, yaitu menyelenggarakan kegiatan usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan jembatan (termasuk jembatan rel), jalan layang, underpass, dan fly over. Termasuk kegiatan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan penunjang, pelengkap dan perlengkapan jembatan dan jalan layang, seperti pagar/tembok penahan, drainase jalan, marka jalan, dan rambu-rambu;
- g. Konstruksi Terowongan, yaitu menyelenggarakan kegiatan usaha pembangunan terowongan dengan menggunakan mesin bor dan/atau bahan peledak, bekisting, pembesian, dan pengecoran beton; pemeliharaan dan perbaikan bangunan terowongan di bawah permukaan air, di bukit atau pegunungan dan di bawah permukaan tanah;
- h. Jasa Pekerjaan Konstruksi Parapabrikasi Bangunan Sipil, yaitu menyelenggarakan kegiatan usaha pemasangan bahan hasil produksi pabrik seperti beton pracetak, baja, plastik, karet, dan hasil produksi pabrik lainnya dengan metode pabrikasi, erection, dan/ atau perakitan untuk bangunan sipil;
- i. Kegiatan ini mencakup usaha pembangunan pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan jaringan saluran air irigasi dan jaringan drainase.
- j. Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih, yaitu menyelenggarakan kegiatan usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan penyadap dan penyalur air baku, bangunan pengolahan air baku, bangunan pengolahan air minum, bangunan menara air minum, reservoir air minum, jaringan pipa/penyalur distribusi air bersih, tangki air minum dan bangunan pelengkap air minum lainnya.
- k. Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal, yaitu menyelenggarakan kegiatan usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan sipil elektrikal seperti bangunan sipil pembangkit, transmisi, distribusi dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik, jaringan pipa listrik lokal dan jarak jauh termasuk pembangunan gardu induk dan pemasangan tiang listrik dan menara;

- l. Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi Untuk Prasarana Transportasi, yaitu menyelenggarakan kegiatan usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan fasilitas telekomunikasi sarana bantu navigasi laut, bangunan telekomunikasi navigasi udara, bangunan sinyal dan telekomunikasi kereta api, termasuk bangunan menara/tiang/ pipa/antena dan bangunan sejenisnya;
- m. Konstruksi Sentral Telekomunikasi, yaitu menyelenggarakan kegiatan usaha pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan konstruksi bangunan sentral telekomunikasi beserta perlengkapannya, seperti bangunan sentral telepon, telegraf, bangunan menara pemancar, penerima radar gelombang mikro, bangunan stasiun bumi kecil dan stasiun satelit. Termasuk jaringan pipa komunikasi lokal dan jarak jauh, jaringan transmisi, dan jaringan distribusi kabel telekomunikasi/ telepon di atas permukaan tanah, di bawah tanah dan di dalam air;
- n. Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan Gas, yaitu menyelenggarakan kegiatan usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan pengolahan limbah padat, cair, dan gas, reservoir limbah, jaringan perpipaan limbah, bangunan jaringan air limbah dalam kota (jaringan pengumpul air limbah domestik/ manusia dan air limbah industri), bangunan tempat pembuangan dan pembakaran (incenerator) limbah, dan bangunan pelengkap limbah padat, cair, dan gas, bangunan tempat pembuangan akhir sampah beserta bangunan pelengkap, dan jasa pemasangan konstruksi sistem septik, konstruksi unit pengolahan limbah yang dihasilkan dari pembangkit thermal, hydro, panas bumi, energi baru dan terbarukan (EBT) lainnya;
- o. Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, dan Limbah lainnya, yaitu menyelenggarakan kegiatan usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan konstruksi lainnya yang belum tercakup dalam kegiatan 42201 s.d. 42207. Termasuk penataan bangunan dan lingkungan, prasarana kawasan permukiman, industri, rumah sakit, dan lain-lain;
- p. Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan, yaitu menyelenggarakan kegiatan usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan dermaga (jetty), trestle, sarana pelabuhan, dan sejenisnya pelabuhan bukan perikanan. Termasuk konstruksi jalan air atau terusan, pelabuhan dan sarana jalur sungai, dok (pangkalan), lock (panama canal lock, hoover dam) dan lain-lain;
- q. Konstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas Bumi, yaitu menyelenggarakan kegiatan usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan sipil pada kegiatan usaha hulu dan hilir minyak dan gas;
- r. Konstruksi Bangunan Sipil Pertambangan, yaitu menyelenggarakan kegiatan usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali fasilitas eksplorasi dan operasi produksi pertambangan, termasuk pengendalian dampak lingkungan;
- s. Konstruksi Bangunan Sipil Panas Bumi, yaitu menyelenggarakan kegiatan usaha jasa konstruksi untuk pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali, fasilitas hulu panas bumi, seperti sumur dan pipa penyalur;
- t. Pengerukan, yaitu menyelenggarakan kegiatan usaha pengerukan atau normalisasi dan pemeliharaan sungai, pelabuhan, rawa, danau, alur pelayaran, kolam dan kanal, baik dengan sifat pekerjaan ringan, sedang, maupun berat. Termasuk pengerukan untuk pembuatan jalur transportasi air.
- u. Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Yang Tidak Ditentukan Lain, yang mencakup kegiatan usaha pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan bangunan sipil lainnya yang belum tercakup dalam kegiatan 42911 s.d. 42918, seperti lapangan parkir dan sarana lingkungan pemukiman (di luar gedung) lainnya. Kegiatan ini mencakup pembagian lahan dengan pengembangannya (misalnya penambahan jalan, prasarana umum dan lain-lain). Termasuk pengadaan dan pelaksanaan konstruksi fasilitas mikroelektronika dan pabrik pengolahan, seperti yang memproduksi mikroprosesor, chip silikon dan wafer, mikrosirkuit, dan semikonduktor; pengadaan dan pelaksanaan konstruksi pabrik pengolahan tekstil dan pakaian; pengadaan dan pelaksanaan konstruksi pengolahan besi dan baja; dan/atau pengadaan dan pelaksanaan konstruksi pabrik pengolahan lainnya;
- v. Konstruksi Reservoir Pembangkit Listrik Tenaga Air, yang mencakup kegiatan usaha pembangunan reservoir, intake, control gate, penstock, dan outflow pada pembangkit listrik tenaga air;
- w. Penyiapan Lahan, yang mencakup kegiatan usaha penyiapan lahan untuk kegiatan konstruksi yang berikutnya, seperti pelaksanaan pembersihan dan pematangan lahan konstruksi, pembersihan semak belukar; pembukaan lahan/stabilisasi tanah, (penggalan,

membuat kemiringan, pengurukan, perataan lahan konstruksi, penggalian parit, pemindahan, penghancuran atau peledakan batu dan sebagainya); pelaksanaan pekerjaan tanah dan/atau tanah berbatu, penggalian, membuat kemiringan, perataan tanah dengan galian dan timbunan untuk konstruksi jalan (raya, sedang, dan kecil), jalan bebas hambatan, jalan rel kereta api, dan jalan landasan terbang (pacu, taksi, dan parkir), pabrik, pembangkit, transmisi, gardu induk, dan distribusi tenaga listrik, fasilitas produksi, serta bangunan gedung dan bangunan sipil lainnya; pemasangan, pemindahan, dan perlindungan utilitas, tes/uji dengan sondir dan bor, pemboran, ekstraksi material, dan penyelidikan lapangan/pengambilan contoh untuk keperluan konstruksi, geofisika, geologi atau keperluan sejenis; dan penyiapan lahan untuk fasilitas ketenaganukliran. Kegiatan penunjang penyiapan lahan seperti pemasangan fasilitas alat bantu konstruksi (pemasangan sheet pile, papan nama proyek, dan gorong-gorong untuk pemasangan kabel, pekerjaan pembuatan kantor, basecamp, direksi kit, gudang, bengkel proyek), pengukuran kembali, pembuatan/pengalihan jalan sementara, perbaikan dan pemeliharaan jalan umum, dewatering/pengeringan, mobilisasi dan demobilisasi, dan pekerjaan sejenis lainnya;

- x. Instalasi Listrik, yang mencakup kegiatan usaha pembangunan, pemasangan, pemeliharaan, pembangunan kembali instalasi listrik pada pembangkit, transmisi, gardu induk, distribusi tenaga listrik, sistem catu daya, dan instalasi listrik pada bangunan gedung baik untuk hunian maupun non hunian, seperti pemasangan instalasi jaringan listrik tegangan rendah. Termasuk kegiatan pemasangan dan pemeliharaan instalasi listrik pada bangunan sipil, seperti jalan raya, jalan kereta api dan lapangan udara;
- y. Instalasi Telekomunikasi, yang mencakup kegiatan usaha pemasangan instalasi telekomunikasi pada bangunan gedung baik untuk hunian maupun non hunian, seperti pemasangan antena. Kegiatan ini juga mencakup kegiatan pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan instalasi telekomunikasi pada sentral telepon/telegraf, stasiun pemancar radar gelombang mikro, stasiun bumi kecil/stasiun satelit dan sejenisnya. Termasuk kegiatan pemasangan transmisi dan jaringan telekomunikasi dan Instalasi telekomunikasi di bangunan gedung dan bangunan sipil;
- z. Jasa Instalasi Konstruksi Navigasi Laut, Sungai, dan Udara, yang mencakup kegiatan usaha pemasangan dan perawatan konstruksi dan peralatan terkait dengan sarana bantu navigasi laut, sungai dan udara, telekomunikasi-pelayaran/penerbangan, hidrografi dan meteorologi, alur perlintasan, pemanduan, untuk kepentingan keselamatan pelayaran dan penerbangan;
- aa. Instalasi Saluran Air (Plumbing), yang mencakup kegiatan usaha instalasi air bersih, air limbah dan saluran drainase, termasuk pekerjaan perpipaan pada bangunan gedung hunian maupun non hunian. Termasuk kegiatan pemeliharaan dan perbaikan instalasi saluran air, pipa distribusi air bersih dan instalasi Water Treatment Plant (WTP)/Reverse Osmosis (RO), pipa air kotor;
- bb. Instalasi Pemanas dan Geotermal, yang mencakup kegiatan usaha pemasangan dan perawatan peralatan pemanas (heating) dan geotermal pada bangunan gedung untuk hunian maupun bukan hunian, elektrik maupun non elektrik, termasuk pekerjaan pipa, ducting dan lembaran logam; sistem pengendali pemanasan sentral, penghubung ke sistem pemanasan area, termasuk boiler domestik alat pembakar (burner). Termasuk pekerjaan isolasi panas pada pipa atau tangki, pemasangan insulasi termal kedap cuaca sebelah luar dinding, pemasangan insulasi thermal (untuk pipa air panas dan dingin, ketel uap dan saluran pembuang), insulasi kedap kebakaran, dan pemasangan sistem pelindung kebakaran;
- cc. Instalasi Minyak dan Gas, yang mencakup kegiatan usaha pemasangan dan pemeliharaan instalasi minyak dan gas pada bangunan gedung hunian dan non hunian serta bangunan sipil lainnya, pekerjaan inspeksi, dan perawatan fasilitas produksi minyak, gas, petrokimia dan panas bumi termasuk pekerjaan instalasi perpipaannya di darat maupun di bawah laut. Termasuk instalasi fasilitas produksi dan penyimpanan di darat dan di laut untuk minyak, gas, petrokimia dan panas bumi termasuk anjungan lepas pantai dan bawah laut;
- dd. Instalasi Pendingin dan Ventilasi Udara, yang mencakup kegiatan usaha pemasangan dan perawatan ventilasi (ventilation), lemari pendingin dan penyejuk udara (Air Conditioner/AC) untuk bangunan gedung baik untuk hunian maupun bukan hunian, termasuk pekerjaan pipa, ducting dan lembaran logam;
- ee. Instalasi Konstruksi Lainnya Yang Tidak Ditentukan Lain, yang mencakup kegiatan usaha pemasangan instalasi gedung lainnya dan kegiatan pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan instalasi bangunan sipil lainnya yang belum tercakup dalam kegiatan 43291 s.d. 43294. Termasuk pemasangan dan pemeliharaan instalasi fasilitas pertambangan dan manufaktur seperti loading and discharging stations, winding shafts, chemical plants, iron foundries, blast furnaces dan

- coke oven; pemasangan instalasi sistem pengolahan dan peralatan pemurnian air laut, air payau, air tawar menjadi air murni pada pembangkit listrik;
- ff. Pengerjaan Pemasangan Kaca dan Alumunium, yang mencakup kegiatan usaha pemasangan kaca, alumunium, dan bahan lainnya untuk dinding luar dan dalam dalam rangka penyelesaian bangunan gedung hunian dan non hunian serta bangunan sipil lainnya. Termasuk instalasi atau pemasangan pintu (kecuali pintu otomatis dan pintu putar), jendela, rangka pintu dan jendela dari kayu atau bahan lainnya;
- gg. Pengerjaan Lantai, Dinding, Peralatan Saniter dan Plafon, yang mencakup kegiatan usaha pengerjaan lantai, dinding, kolom, peralatan saniter dan plafon dalam rangka penyelesaian bangunan gedung hunian dan non hunian serta bangunan sipil lainnya. Termasuk aplikasi bangunan atau proyek konstruksi lainnya dari plester (pelapisan) interior dan eksterior, termasuk bahan-bahan lathing yang berkaitan, penyelesaian interior seperti langit-langit, pelapisan dinding dengan kayu, gypsum, panel penutup akustik, partisi/sekat yang dapat dibongkar pasang dan sebagainya, pengubinan, penggantungan atau pemasangan dalam bangunan atau proyek konstruksi lainnya dari keramik, dinding, beton atau ubin lantai, parket (lantai dari papan yang bergambar) dan pelapisan lantai dengan kayu, pelapisan lantai linoleum dan karpet, termasuk karet atau plastik, teraso, marmer, granit atau pelapisan lantai atau dinding dan wallpaper (kertas dinding) serta dinding bangunan kedap suara;
- hh. Pengecatan, yang mencakup kegiatan usaha pengecatan interior dan eksterior bangunan dalam rangka penyelesaian bangunan gedung hunian dan non hunian serta bangunan sipil lainnya. Tidak termasuk pengecatan atap bangunan;
- ii. Pemasangan Pondasi dan Tiang Pancang, yang mencakup kegiatan usaha khusus pemasangan berbagai pondasi dan tiang pancang termasuk pengecoran beton dan pembesian pondasi untuk gedung, jalan/jembatan, bangunan pengairan, dermaga, bangunan lepas pantai dan sejenisnya sebagai bagian dari pekerjaan yang tercakup dalam konstruksi gedung hunian dan non hunian serta bangunan sipil lainnya;
- jj. Pemasangan Perancah (Steiger), yang mencakup kegiatan usaha khusus pemasangan perancah/steiger pada bangunan gedung, jalan/jembatan, bangunan pengairan, dermaga dan sejenisnya.
- kk. Pemasangan Rangka dan Atap/Roof Covering, yang mencakup kegiatan usaha khusus pemasangan kerangka dan atap bangunan gedung hunian dan non hunian sebagai bagian dari pekerjaan yang tercakup dalam konstruksi gedung. Termasuk pekerjaan talang dan pengecatan atap;
- ll. Pemasangan Kerangka Baja, yang mencakup kegiatan usaha khusus pemasangan kerangka baja sebagai bagian dari pekerjaan yang tercakup dalam konstruksi gedung;
- mm. Penyewaan Alat Konstruksi dengan Operator, yang mencakup kegiatan usaha penyewaan alat atau mesin konstruksi dan perlengkapannya dengan operator. Termasuk penyewaan alat produksi dan operasional minyak, gas, petrokimia, panas bumi, komunikasi seperti SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition), dan penyewaan derek. Penyewaan mesin konstruksi dan perlengkapannya tanpa operator dicakup dalam kegiatan 77393;
- nn. Konstruksi Khusus Lainnya Yang Tidak Ditentukan Lain, yang mencakup kegiatan usaha konstruksi khusus lainnya yang belum diklasifikasikan dalam kegiatan 43901 sampai dengan 43905 yang memerlukan keahlian atau perlengkapan khusus, seperti kegiatan pengerjaan menahan lembab dan air, dehumidifikasi (pelembaban) bangunan, shaft sinking, pemasangan cerobong asap dan oven untuk keperluan industri dan pekerjaan yang memerlukan keahlian memanjat dan penggunaan perlengkapan yang berkaitan, misalnya bekerja pada gedung-gedung yang tinggi. Termasuk pekerjaan di bawah permukaan tanah, pekerjaan lapis perkerasan beton; pekerjaan perkerasan aspal; pekerjaan perkerasan berbutir; pekerjaan konstruksi pengeboran dan injeksi semen bertekanan; pekerjaan beton struktur; pekerjaan konstruksi beton pascatarik (post tensioned); pekerjaan konstruksi kedap air pada tangki penyimpanan air, minyak, gas, dan lainnya yang sejenis; serta pemasangan konstruksi tahan api (tanur, anneling, flare, incenerator) untuk bangunan gedung hunian dan non hunian serta bangunan sipil lainnya;
- oo. Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya, yang mencakup kegiatan usaha jasa penunjang atas dasar balas jasa atau kontrak, yang dibutuhkan dalam kegiatan pertambangan golongan pokok 05, 07, dan 08, seperti jasa eksplorasi misalnya dengan cara tradisional seperti mengambil contoh bijih dan membuat observasi geologi, jasa pemompaan dan penyaluran hasil tambang dan jasa percobaan penggalian dan pengeboran ladang atau sumur tambang;

- pp. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Pertambangan dan Energi Serta Peralatannya, yang mencakup kegiatan usaha penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) mesin dan peralatan pertambangan dan penggalian tanpa operator yang secara umum digunakan sebagai barang modal oleh perusahaan, seperti mesin pembangkit listrik. Termasuk mesin penggerak atau uap dan turbin, alat pertambangan dan perminyakan, peralatan radio dan komunikasi profesional;
- qq. Industri Pencetakan 3D Printing, yang mencakup kegiatan usaha industri percetakan tiga dimensi (3D Printing) untuk berbagai keperluan dari polimer, plastik, clay, bijih logam dan lainnya;
- rr. Reparasi Mesin Untuk Keperluan Umum, yang mencakup kegiatan usaha reparasi mesin untuk keperluan umum yang tercakup dalam golongan 281, seperti reparasi dan perawatan mesin kapal laut atau kereta api, pompa dan peralatan yang terkait, peralatan tenaga uap atau zat cair, katup atau klep, roda gigi (persneling) dan peralatan kemudi, tungku pembakar pada proses industri, alat pengangkat dan pemindah, mesin dan peralatan kantor kecuali komputer dan perlengkapannya (cash register, mesin fotokopi, kalkulator, mesin ketik), perkakas tangan yang digerakkan tenaga, peralatan pendingin dan pembersih udara, timbangan, mesin penjual otomatis dan keperluan umum lainnya;
- ss. Reparasi Mesin Untuk Keperluan Khusus, yang mencakup kegiatan usaha reparasi dan perawatan mesin untuk keperluan khusus yang tercakup dalam golongan 282, seperti reparasi dan perawatan traktor pertanian, mesin pertanian dan mesin kehutanan dan penebangan, perkakas mesin pemotong logam dan pembentuk logam dan aksesorinya, perkakas mesin lainnya, mesin metalurgi, mesin pertambangan dan penggalian termasuk mesin pada ladang minyak dan gas, mesin konstruksi, mesin pengolahan makanan dan minuman, mesin pengolahan tembakau, mesin tekstil, mesin pembuatan pakaian dan pakaian dari kulit, mesin pembuatan kertas dan mesin keperluan khusus lainnya;
- tt. Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer, yang mencakup kegiatan usaha perdagangan besar komputer dan perlengkapan komputer;
- uu. Perdagangan Besar Piranti Lunak, yang mencakup kegiatan usaha perdagangan besar piranti lunak;
- vv. Perdagangan Besar Mesin Kantor dan Industri Pengolahan, Suku Cadang, dan Perlengkapannya, yang mencakup kegiatan usaha perdagangan besar mesin industri dan mesin kantor kecuali komputer, serta perlengkapannya, seperti mesin pengolahan kayu dan logam, macam-macam mesin untuk industri dan untuk keperluan kantor. Termasuk perdagangan besar robot-robot produksi pengolahan, mesin-mesin lain yang tidak termasuk dalam lainnya untuk keperluan industri, dan mesin yang dikendalikan komputer untuk industri tekstil serta mesin jahit dan rajut yang dikendalikan komputer;
- ww. Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya, yang mencakup kegiatan usaha perdagangan besar mesin dan peralatan serta perlengkapan yang belum diklasifikasikan dalam kegiatan 46591 sampai dengan 46594, seperti mesin penggerak mula, turbin, mesin pembangkit listrik dan mesin untuk keperluan rumah tangga. Termasuk perdagangan besar robot-robot produksi selain untuk pengolahan, mesin-mesin lain yang tidak termasuk dalam lainnya untuk perdagangan dan navigasi serta jasa lainnya, perdagangan besar kabel dan sakelar serta instalasi peralatan lain, perkakas mesin berbagai jenis dan untuk berbagai bahan, perkakas mesin yang dikendalikan komputer dan peralatan dan perlengkapan pengukuran;
- xx. Angkutan Bermotor Untuk Barang Khusus, yang mencakup kegiatan usaha operasional angkutan barang dengan kendaraan bermotor untuk barang yang secara khusus mengangkut satu jenis barang, seperti angkutan bahan bakar minyak, minyak bumi, hasil olahan, LPG, LNG dan CNG, angkutan barang berbahaya, limbah bahan berbahaya dan beracun, angkutan barang alat-alat berat, angkutan peti kemas, angkutan tumbuhan hidup, angkutan hewan hidup dan pengangkutan kendaraan bermotor;
- yy. Aktivitas Bounded Warehousing atau wilayah Kawasan Berikat, yang mencakup kegiatan usaha yang merupakan bagian dari wilayah pabean yang dengan peraturan Pemerintah diberikan perlakuan khusus seperti berada di luar wilayah pabean dan dikelola oleh suatu badan berbentuk perusahaan yang melakukan kegiatan pergudangan, seperti Daerah Industri Pulau Batam;
- zz. Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya, yang mencakup kegiatan usaha pergudangan dan penyimpanan lainnya yang belum tercakup dalam kegiatan 52101 s.d. 52108. Termasuk kegiatan depo peti kemas yang melakukan penyimpanan dan/atau penumpukan peti kemas, dan dapat

- dilengkapi dengan fasilitas lain;
- aaa. Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut, yang mencakup kegiatan usaha pelayanan kepelabuhan laut, yang berhubungan dengan angkutan perairan untuk penumpang, hewan atau barang, seperti pengoperasian fasilitas terminal misalnya pelabuhan dan dermaga, navigasi, pemeriksaan barang muatan dalam kargo dan/atau peti kemas dengan menggunakan sumber radiasi pengion (zat radioaktif dan pembangkit radiasi pengion), pelayaran dan kegiatan berlabuh, jasa penambatan, jasa pemanduan dan penundaan;
 - bbb. Aktivitas Penunjang Angkutan Perairan Lainnya, yang mencakup kegiatan usaha navigasi, pelayaran dan kegiatan berlabuh, kapal lightering, kegiatan salvage/pekerjaan bawah air (PBA), kegiatan mercusuar, operasi penguncian jalur air dan lain-lain, termasuk kapal Floating Production, Storage and Offloading (FPSO) dan Floating, Storage and Offloading (FSO) dan jasa penunjang angkutan perairan lainnya;
 - ccc. Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang) , yang mencakup kegiatan usaha penanganan bongkar muat barang kargo dari angkutan darat, angkutan jalan, angkutan air dan angkutan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak. Kegiatannya mencakup kegiatan memuat dan membongkar barang kargo terlepas dari jenis angkutan yang digunakan, Kegiatan terminal kargo berikut fasilitas pendukungnya, kegiatan bongkar muat kapal dan kegiatan bongkar muat kendaraan dengan kereta gerbong barang;
 - ddd. Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) , yang mencakup kegiatan usaha pengiriman dan atau pengepakan barang dalam volume besar, melalui angkutan kereta api, angkutan darat, angkutan laut maupun angkutan udara;
 - eee. Angkutan Multimoda, yang mencakup kegiatan usaha angkutan barang dengan menggunakan paling sedikit 2 (dua) moda angkutan yang berbeda atas dasar 1 (satu) kontrak sebagai dokumen angkutan multimoda dari satu tempat diterimanya barang oleh badan usaha angkutan multimoda ke suatu tempat yang ditentukan untuk penyerahan barang kepada penerima barang angkutan multimoda. Badan usaha angkutan multimoda tidak semata-mata memberikan layanan angkutan barang dari tempat asal sampai ke tujuan, tetapi juga memberikan jasa tambahan berupa jasa pengurusan transportasi (freight forwarding), jasa pergudangan, jasa konsolidasi muatan, penyediaan ruang muatan, serta pengurusan kepabeanan untuk angkutan multimoda ke luar negeri dan ke dalam negeri;
 - fff. Penerbitan Piranti Lunak (Software), yang mencakup kegiatan usaha penerbitan perangkat lunak yang siap pakai (bukan atas dasar pesanan), seperti sistem operasi, aplikasi bisnis dan lainnya dan video game untuk semua platform sistem operasi;
 - ggg. Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya, yang mencakup kegiatan usaha konsultasi yang berkaitan dengan analisis, desain dan pemrograman dari sistem yang siap pakai lainnya (selain yang sudah dicakup di kegiatan 62011 dan 62015). Kegiatan ini biasanya menyangkut analisis kebutuhan pengguna komputer dan permasalahannya, pemecahan permasalahan, dan membuat perangkat lunak berkaitan dengan pemecahan masalah tersebut. Termasuk pula penulisan program sederhana sesuai kebutuhan pengguna komputer. Perancangan struktur dan isi dari, dan/atau penulisan kode komputer yang diperlukan untuk membuat dan mengimplementasikan, seperti piranti lunak sistem (pemutakhiran dan perbaikan), piranti lunak aplikasi (pemutakhiran dan perbaikan), basis data dan laman web. Termasuk penyesuaian perangkat lunak, misalnya modifikasi dan penyesuaian konfigurasi aplikasi yang sudah ada sehingga berfungsi dalam lingkungan sistem informasi klien. Kegiatan penyesuaian perangkat lunak sejenis yang dilaksanakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penjualan perangkat lunak dimasukkan dalam subgolongan 47413;
 - hhh. Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya, yang mencakup kegiatan usaha konsultasi tentang tipe dan konfigurasi dari perangkat keras komputer dengan atau tanpa dikaitkan dengan aplikasi piranti lunak. Perencanaan dan perancangan sistem komputer yang mengintegrasikan perangkat keras, piranti lunak dan teknologi komunikasi komputer. Konsultasi biasanya menyangkut analisis kebutuhan pengguna komputer dan permasalahannya, serta memberikan jalan keluar yang terbaik. Unit yang diklasifikasikan dalam subgolongan ini dapat menyediakan komponen sistem perangkat keras dan piranti lunak sebagai bagian dari jasa yang terintegrasi atau komponen ini dapat disediakan oleh pihak ketiga atau vendor. Unit yang diklasifikasikan dalam subgolongan ini pada umumnya menginstal sistem dan melatih serta mendukung pengguna sistem. Termasuk penyediaan manajemen dan pengoperasian sistem komputer klien dan/atau fasilitas pengolahan data di tempat klien, demikian juga jasa pendukung terkait;

- iii. Aktivitas Konsultasi dan Perancangan Internet of Things (IoT) , yang mencakup kegiatan usaha layanan konsultasi, perancangan dan pembuatan solusi sistem terintegrasi berdasarkan pesanan (bukan siap pakai) dengan cara memodifikasi perangkat keras (hardware) yang sudah ada, seperti sensor, microcontroller, dan perangkat keras (hardware) lainnya. Modifikasi tersebut dilakukan pada perangkat keras (hardware) IoT dan/atau perangkat lunak (software) yang tertanam didalamnya. Kegiatan ini tidak mencakup aktivitas manufaktur chip (26120) dan aktivitas penerbitan/pengembangan perangkat lunak IoT (58200 dan 62019);
- jjj. Aktivitas Konsultasi Manajemen Industri, yang mencakup kegiatan usaha bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen perusahaan industri, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi;
- kkk. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya, yang mencakup kegiatan usaha ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan Masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur;
- III. Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis Yang Berhubungan Dengan Itu, yang mencakup kegiatan usaha perancangan teknik, dan konsultasi, seperti permesinan, pabrik dan proses industri; proyek yang melibatkan teknik sipil, teknik hidrolik, teknik lalu lintas; jasa nasihat dan konsultasi rekayasa teknik, jasa rekayasa konstruksi bangunan gedung hunian dan nonhunian, jasa rekayasa pekerjaan teknik sipil sumber daya air, jasa rekayasa untuk pekerjaan mekanikal dalam bangunan, jasa rekayasa bangunan fasilitas olahraga, jasa konsultasi teknik lingkungan, jasa konsultasi terkait konstruksi pekerjaan sistem kendali lalu lintas, jasa rekayasa konstruksi pembangkit jaringan transmisi, gardu induk, dan distribusi tenaga listrik serta jasa rekayasa untuk proses industrial, produksi dan fasilitas produksi, jasa rekayasa lainnya, perluasan dan realisasi proyek yang berhubungan dengan teknik listrik dan elektro, teknik pertambangan, teknik kimia, mekanik, teknik industri dan teknik sistem dan teknik keamanan; proyek manajemen air; dan kegiatan manajemen proyek dan jasa penyelidikan lapangan yang berkaitan dengan konstruksi; kegiatan perluasan proyek yang menggunakan AC, pendingin, kebersihan dan teknik pengontrolan polusi, teknik akustik dan lain-lain; kegiatan survei geofisika, geologi dan survei seismik atau gempa bumi termasuk jasa pembuatan prospektus dan jasa interpretasi geologi dan geofisika sektor konstruksi; kegiatan survei geodetik meliputi kegiatan survei batas dan tanah, survei hidrologi, survei keadaan di atas dan di bawah permukaan tanah dan kegiatan informasi spasial dan kartografi termasuk kegiatan pemetaan dan jasa pembuatan peta. Termasuk jasa rekayasa pekerjaan teknik sipil transportasi, jasa fasilitasi teknis prasarana dan sarana umum sektor konstruksi.
- mmm. Aktivitas Sertifikasi Profesi Pihak 1 (KBLI 74311) , yang mencakup kegiatan usaha Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pihak 1 yang bersifat independen dari Kementerian/Lembaga/Industri untuk mensertifikasi kompetensi karyawan atau siswanya sendiri;
- nnn. Aktivitas Sertifikasi Profesi Pihak 2, yang mencakup kegiatan usaha Kegiatan ini mencakup kegiatan Lembaga Sertifikasi Profesi (LPS) Pihak 2 yang bersifat independen dari Kementerian/ Lembaga/Industri untuk mensertifikasi mitra dan pemasoknya;
- ooo. Aktivitas Penyeleksian dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, yang mencakup kegiatan usahapendaftaran, penyeleksian dan penempatan tenaga kerja dalam negeri di berbagai bidang usaha yang dilakukan atas dasar Perjanjian Kerja melalui aktivitas bursa kerja, mekanisme antar kerja lokal dan antar kerja antar daerah oleh Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS), dan perusahaan perekrutan dan penempatan awak kapal di dalam negeri berdasarkan perjanjian kerja laut dan/atau kesepakatan kerja bersama (colletive bargaining agreement). Termasuk pula penyediaan tenaga kerja eksekutif kepada pihak lain;
- ppp. Penyediaan Sumber Daya Manusia dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia, yang mencakup kegiatan usaha penyediaan sumber daya manusia dan jasa manajemen sumber daya manusia untuk pemberi kerja. Kegiatan ini dikhususkan untuk menyelenggarakan sumber daya

manusia dan tugas manajemen personal. Kegiatan ini menyajikan riwayat kerja pekerja dalam hal yang berhubungan dengan upah, pajak dan masalah keuangan dan sumber daya lainnya termasuk penyedia jasa pekerja/buruh;

- qqq. Pelatihan Kerja Teknik Swasta, yang mencakup kegiatan usaha pelatihan kerja yang bertujuan untuk menambah ketrampilan/keahlian dalam bidang mesin produksi, instalasi pipa, kerja pelat, pengecoran logam, CNC, las industri, fabrikasi, las bawah air, teknik kendaraan ringan, teknik sepeda motor, teknik alat berat, instalasi penerangan, instalasi tenaga, otomasi industri, mekatronika, telekomunikasi, instrumentasi dan kontrol, audio video, refrigerasi domestik, teknik tata udara, konstruksi batu dan beton, konstruksi kayu, gambar bangunan, furniture, konstruksi baja ringan, pekerjaan gipsium, survei dan pemetaan, pembesian, dan lainnya yang diselenggarakan oleh swasta; dan
- rrr. Pendidikan Teknik Swasta, yang mencakup kegiatan usaha pendidikan teknik diselenggarakan swasta. Kegiatan yang termasuk dalam kegiatan ini adalah jasa pendidikan atau kursus desain, desain grafis, desain interior, elektronika, engineering, instalasi listrik, konstruksi, las, mekanik otomotif mobil dan motor, sekolah mengemudi kendaraan bermotor (mengemudi), pemetaan, perminyakan, rancang/tata bangunan, riset, teknik, teknik industri, teknik kelautan, teknik mesin, teknik sipil, teknisi alat berat, teknisi handphone, teknisi komputer, telekomunikasi dan lain-lain.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, kegiatan usaha yang benar-benar telah dijalankan oleh Perseroan adalah Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya (KBLI 09900), Reparasi Mesin Untuk Keperluan Khusus (KBLI 33122), Konstruksi Gedung Lainnya (KBLI 41019), Konstruksi Bangunan Sipil Jalan (KBLI 42101), Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang Fly Over, dan Underpass (KBLI 42102), Konstruksi Bangunan Pelabuhan (KBLI 42912), Konstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas Bumi (KBLI 42915), Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Pengolahan Produk Kimia, Petrokimia, Farmasi, dan Industri Lainnya (KBLI 42923), Instalasi Konstruksi Lainnya Yang Tidak Termasuk Dalam Lainnya (KBLI 43299), Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut (KBLI 52221), Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (KBLI 70209), Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Mesin Pertambangan dan Energi serta Peralatannya (KBLI 77395), Penyediaan Sumber Daya Manusia dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia (KBLI 78300), dan Pelatihan Kerja Teknik Swasta (KBLI 78421).

2. Perizinan

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan telah memiliki izin-izin umum, antara lain sebagai berikut:

No	Jenis dan Nomor	Tanggal Penerbitan/Masa Berlaku	Instansi yang Menerbitkan
1.	Nomor Induk Berusaha Berbasis Risiko No. 9120400242789	28 Februari 2019 sebagaimana diubah terakhir kali 5 Agustus 2024 / Berlaku selama menjalankan kegiatan usaha	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
2.	Nomor Pokok Wajib Pajak No. 01.001.703.6-091.000	25 November 1982 / Masa berlaku tidak diatur	Direktorat Jendral Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Waib Pajak Besar Satu
3.	Surat Keterangan Terdaftar No. S-74KT/WPJ.19/KP.0103/2015	1 Juli 2015 / Masa berlaku tidak diatur	Direktorat Jendral Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Waib Pajak Besar Satu
4.	Surat Pengukuhan Perusahaan Kena Pajak No. S-19PKP/WPJ.19/KP.0103/2015	1 Juli 2015 / Masa berlaku tidak diatur	Direktorat Jendral Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Waib Pajak Besar Satu

Selain daripada perizinan umum di atas, Perseroan telah memiliki izin-izin operasional yakni sebagai berikut:

No	Jenis dan Nomor	Tanggal Penerbitan/Masa Berlaku	Instansi yang Menerbitkan
1.	Izin Usaha Jasa Pertambangan No. 37/1/IUJP/PMDN/2023	16 Oktober 2023 / Masa berlaku sampai dengan 15 Oktober 2028	Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2.	Sertifikat Standar No. 91204002427890107	9 Oktober 2023 / Berlaku selama menjalankan kegiatan usaha	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan atas nama Wali Kota Balikpapan
3.	Sertifikat Standar No. 91204002427890010	19 Mei 2023/ Berlaku selama menjalankan kegiatan usaha	Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

No	Jenis dan Nomor	Tanggal Penerbitan/Masa Berlaku	Instansi yang Menerbitkan
4.	Sertifikat Standar No. 91204002427890008	12 April 2023 / Berlaku selama menjalankan kegiatan usaha	Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
5.	Sertifikat Standar No. 91204002427890032	5 April 2023 / Berlaku selama menjalankan kegiatan usaha	Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
6.	Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ("PB UMKU") Sertifikat Badan Usaha Konstruksi No. 912040024278900400007	18 Februari 2023 / Masa berlaku sampai dengan 17 Februari 2026	Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
7.	PB UMKU Sertifikat Badan Usaha Konstruksi No. 912040024278900400008	18 Februari 2023 / Masa berlaku sampai dengan 17 Februari 2026	Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
8.	PB UMKU Sertifikat Badan Usaha Konstruksi No. 912040024278900160002	13 Juli 2022 / Masa berlaku sampai 12 Juli 2025	Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
9.	PB UMKU Sertifikat Badan Usaha Konstruksi No. 912040024278900400005	29 Januari 2023 / Masa berlaku sampai 28 Januari 2026	Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
10.	PB UMKU Sertifikat Badan Usaha Konstruksi No. 912040024278900400006	16 Februari 2023 / Masa berlaku sampai 15 Februari 2026	Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
11.	PB UMKU Sertifikat Badan Usaha Konstruksi No. 912040024278900380003	28 Oktober 2022 / Masa berlaku sampai 27 Oktober 2025	Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
12.	PB UMKU Perpanjangan Izin Pengusahaan Air Tanah No. 912040024278900010001	3 April 2024 / Masa berlaku sampai 2 April 2027	Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
13.	PB UMKU Sertifikat Standar Perpanjangan Pengoperasian Terminal Untuk Kepentingan Sendiri No. 912040024278900880001	20 Desember 2023 / Masa berlaku sampai 15 Oktober 2028	Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
14.	Surat Kemampuan Usaha Penunjang Migas No. 985/19.07/DMB/2020	14 Mei 2020 / Berlaku selama menjalankan kegiatan usaha	Direktur Pembinaan Program Migas atas nama Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
15.	Izin Penyelenggara Pusat Logistik Berikat dan Izin Pengusaha Pusat Logistik Berikat No. 1514/KM.4/2018 jo. 09/KM.4/WBC.20/2022	28 Juni 2018 / Berlaku sampai perizinan berusaha berakhir	Kementerian Keuangan Republik Indonesia
16.	Izin Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri No. BX-275/PP008	9 Juni 2017 / Masa berlaku sampai 8 Juni 2027	Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan
17.	PB UMKU Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri No. 912040024278900910001	15 November 2023 / Masa berlaku sampai 14 November 2028	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur atas nama Gubernur Kalimantan Timur
18.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ("PKKPR") No. 19042210216401019	26 April 2022 / Masa berlaku sampai 25 April 2025	Menteri Investasi/Kepala Kementerian Investasi/BKPM atas nama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
19.	PKKPR No. 29052310213674080	16 Mei 2023 / Masa berlaku sampai 15 Mei 2026	Menteri Investasi/Kepala Kementerian Investasi/BKPM atas nama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
20.	PKKPR No. 30052210213674294	30 Mei 2022 / Masa berlaku sampai 29 Mei 2025	Menteri Investasi/Kepala Kementerian Investasi/BKPM atas nama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
21.	PKKPR No. 31052310216401002	19 Mei 2023 / Masa berlaku sampai 18 Mei 2026	Menteri Investasi/Kepala Kementerian Investasi/BKPM atas nama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
22.	PKKPR No. 21062310216407005	21 Juni 2023 / Masa berlaku sampai 20 Juni 2026	Kepala DPMPSTP Kabupaten Kutai Barat atas nama Bupati Kutai Barat
23.	PKKPR No. 27052310219404015	27 Mei 2023 / Masa berlaku sampai 26 Mei 2026	Menteri Investasi/Kepala Kementerian Investasi/BKPM atas nama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
24.	PKKPR No. 30092110216471126	26 April 2022 / Masa berlaku sampai 25 April 2025	Kepala DPMPSTP Kota Balikpapan atas nama Wali Kota Balikpapan

No	Jenis dan Nomor	Tanggal Penerbitan/Masa Berlaku	Instansi yang Menerbitkan
25.	PKKPR No. 01062210213674001	24 Mei 2022 / Masa berlaku sampai 23 Mei 2025	Menteri Investasi/Kepala Kementerian Investasi/BKPM atas nama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
26.	PKKPR No. 07062210213674031	7 Juni 2022 / Masa berlaku sampai 6 Juni 2025	Menteri Investasi/Kepala Kementerian Investasi/BKPM atas nama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
27.	PKKPR No. 07062210213674032	7 Juni 2022 / Masa berlaku sampai 6 Juni 2025	Menteri Investasi/Kepala Kementerian Investasi/BKPM atas nama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
28.	PKKPR No. 24062210219201011	24 Juni 2022 / Masa berlaku sampai 23 Juni 2025	Menteri Investasi/Kepala Kementerian Investasi/BKPM atas nama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
29.	PKKPR No. 21072210217317009	21 Juli 2022 / Masa berlaku sampai 20 Juli 2025	Menteri Investasi/Kepala Kementerian Investasi/BKPM atas nama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
30.	PKKPR No. 02082210216401045	2 Agustus 2022 / Masa berlaku sampai 1 Agustus 2025	Menteri Investasi/Kepala Kementerian Investasi/BKPM atas nama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
31.	PKKPR No. 07092210213674171	7 September 2022 / Masa berlaku sampai 6 September 2025	Menteri Investasi/Kepala Kementerian Investasi/BKPM atas nama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
32.	PKKPR No. 17042310216407010	17 April 2023 / Masa berlaku sampai 16 April 2026	Kepala DPMPSTSP Kabupaten Kutai Barat atas nama Bupati Kutai Barat
33.	PKKPR No. 09052310213674015	5 Mei 2023 / Masa berlaku sampai 4 Mei 2026	Menteri Investasi/Kepala Kementerian Investasi/BKPM atas nama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
34.	PKKPR No. 11052310213674018	8 Mei 2023 / Masa berlaku sampai 7 Mei 2026	Menteri Investasi/Kepala Kementerian Investasi/BKPM atas nama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
35.	PKKPR No. 09052310213674014	9 Mei 2023 / Masa berlaku sampai 8 Mei 2026	Menteri Investasi/Kepala Kementerian Investasi/BKPM atas nama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
36.	PKKPR No. 02062310213674002	24 Mei 2023 / Masa berlaku sampai 23 Mei 2026	Menteri Investasi/Kepala Kementerian Investasi/BKPM atas nama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
37.	PKKPR No. 06062310216471006	30 Mei 2023 / Masa berlaku sampai dengan 29 Mei 2026	Menteri Investasi/Kepala Kementerian Investasi/BKPM atas nama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
38.	PKKPR No. 06062310216471007	6 Juni 2023 / Masa berlaku sampai dengan 5 Juni 2026	Menteri Investasi/Kepala Kementerian Investasi/BKPM atas nama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
39.	PKKPR No. 09062310216401001	8 Jun 2023 / Masa berlaku sampai dengan 7 Juni 2026	Menteri Investasi/Kepala Kementerian Investasi/BKPM atas nama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
40.	PKKPR No. 05072310216402048	5 Juli 2023 / Masa berlaku sampai dengan 4 Juli 2026	Menteri Investasi/Kepala Kementerian Investasi/BKPM atas nama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
41.	PKKPR No. 17072310216471080	17 Juli 2023 / Masa berlaku sampai dengan 16 Juli 2026	Menteri Investasi/Kepala Kementerian Investasi/BKPM atas nama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
42.	PKKPR No. 18062410218206001	5 September 2023 / Masa berlaku sampai dengan 4 September 2026	Menteri Investasi/Kepala Kementerian Investasi/BKPM atas nama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
43.	PKKPR No. 06092310218206002	6 September 2023 / Masa berlaku sampai dengan 5 September 2026	Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional dan Menteri Investasi/Kepala BKPM
44.	PKKPR No. 05102310216471079	4 Oktober 2023 / Masa berlaku sampai dengan 3 Oktober 2026	Kepala DPMPSTSP Kota Balikpapan atas nama Wali Kota Balikpapan
45.	PKKPR No. 25012410216471011	22 Januari 2024 / Masa berlaku sampai dengan 21 Januari 2027	Menteri Investasi/Kepala Kementerian Investasi/BKPM atas nama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
46.	PKKPR No. 26012410216471017	26 Januari 2024 / Masa berlaku sampai dengan 25 Januari 2027	Kepala DPMPSTSP Kota Balikpapan atas nama Wali Kota Balikpapan
47.	PKKPR No. 28032410219206003	28 Maret 2024 / Masa berlaku sampai dengan 27 Maret 2027	Menteri Investasi/Kepala Kementerian Investasi/BKPM atas nama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional

No	Jenis dan Nomor	Tanggal Penerbitan/Masa Berlaku	Instansi yang Menerbitkan
48.	PKKPR No. 14052410219206003	14 Mei 2024 / Masa berlaku sampai dengan 13 Mei 2027	Menteri Investasi/Kepala Kementerian Investasi/BKPM atas nama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
49.	PKKPR No. 15072410216471005	15 Juli 2024 / Masa Berlaku sampai dengan 14 Juli 2027	Menteri Investasi/Kepala Kementerian Investasi/BKPM atas nama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
50.	PKKPR No. 20072410113174009	20 Juli 2024 / Masa berlaku sampai dengan 19 Juli 2027	Kepala DPMPSTSP atas nama Bupati Kapuas
51.	PKKPR No. 20072410113174008	20 Juli 2024 / Masa berlaku sampai dengan 19 Juli 2027	Menteri Investasi/Kepala Kementerian Investasi/BKPM atas nama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
52.	PKKPR No. 20072410113174007	20 Juli 2024 / Masa berlaku sampai dengan 19 Juli 2027	Menteri Investasi/Kepala Kementerian Investasi/BKPM atas nama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
53.	PKKPR No. 20072410113174006	20 Juli 2024 / Masa berlaku sampai dengan 19 Juli 2027	Menteri Investasi/Kepala Kementerian Investasi/BKPM atas nama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
54.	PKKPR No. 29052310213674080	16 Mei 2023 / Masa berlaku sampai dengan 15 Mei 2026	Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional dan Menteri Investasi/Kepala BKPM
55.	Izin Lingkungan atas Usaha dan/atau Kegiatan Kantor, Workshop, Terminal untuk Keperluan Sendiri (TUKS), Pemanfaatan Air Bawah Tanah (ABT), dan Fasilitas Penunjang Perseroan Support Facility di Jalan Sultan Hasanuddin RT 01 Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat No. 660/015/IL/BLH/2015	16 Desember 2015 / Masa berlaku sampai 15 Oktober 2028 atau berakhirnya kegiatan usaha	Bupati Paser Provinsi Kalimantan Timur
56.	Izin Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan Camp Karyawan di Desa Batu Kajang Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur No. 660/164/BLH/UKL-UPL/2016	1 Desember 2016 / Masa berlaku sampai 8 Juni 2017 atau berakhirnya kegiatan usaha	Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Balikpapan
57.	Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS), Pangkalan Logistik dan Fasilitas Pendukung Kegiatan Pertambangan, Minyak dan Gas Bumi (<i>Offshore Supply Base</i>) di Kelurahan Klabinain, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat No. SK.939/Menlhk/Setjen/PLA.4/12/2016	28 Desember 2016 / Masa berlaku sampai 8 Juni 2027 atau berakhirnya kegiatan usaha	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
58.	Kelayakan Lingkungan Hidup atas Kegiatan Pembangunan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS), Pangkalan Logistik dan Fasilitas Pendukung Kegiatan Pertambangan, Minyak dan Gas Bumi (<i>Offshore Supply Base</i>) di Kelurahan Klabinain, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat No. SK.100/MENLHK/SETJEN/PLA.4/2/2023	6 Februari 2023 / Masa berlaku sampai 8 Juni 2027 atau adanya persetujuan Pemerintah	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
59.	Persetujuan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup Kegiatan Tempat Parkir Unit Alat Berat dan Kendaraan berat dengan Luas Lahan ± 15.525 M2 Berlokasi di Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan No. 188.46/292.DLH	5 September 2023 / Masa berlaku sampai 15 Oktober 2028 atau berakhirnya persetujuan Pemerintah	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan
60.	Izin Pembuangan Air Limbah Ke Laut No. SK.394/Menlhk/Setjan/PKL.1/6/2019	13 Juni 2019 / 12 Juni 2024*	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia

**) Izin Pembuangan Air Limbah ke Laut berdasarkan SK. 394/Menlhk/Setjen/PKL.1/6/2019 tanggal 13 Juni 2019 dinyatakan tetap berlaku selama tidak ada perubahan usaha dan/atau kegiatan usaha sesuai dengan Surat No. S.82/PPKPL/PSPKPL/PKL./5/2024 tanggal 28 Mei 2024 perihal Arahan Pengurusan Persetujuan Teknis Perseroan – POSB Sorong yang diterbitkan oleh Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.*

Seluruh perizinan operasional tersebut di atas, masih berlaku sampai dengan tanggal Prospektus.

3. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 35 tanggal 20 April 2016, yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0043538 tanggal 26 April 2016, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0052171.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 26 April 2016 ("**Akta Perseroan No. 35/2016**"), struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp 201.721.000.000
Modal Ditempatkan	:	Rp 50.430.250.000
Modal Disetor	:	Rp 50.430.250.000

Modal dasar Perseroan terbagi atas 4.034.420.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp50 per lembar saham.

Struktur permodalan Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta Perseroan No. 35/2016 tidak mengalami perubahan dalam 2 (dua) tahun terakhir sebelum disampaikannya Pernyataan Pendaftaran.

Susunan pemegang Perseroan dalam 2 (dua) tahun terakhir sebelum disampaikannya Pernyataan Pendaftaran adalah sebagai berikut:

Tahun 2022

Berdasarkan DPS tertanggal 31 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku BAE Perseroan, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- per lembar saham		%
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	4.034.420.000	201.721.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
1. PT Caraka Reksa Optima	704.014.200	35.200.710.000	69,80
2. Drs. Lo Kheng Hong	151.480.600	7.574.030.000	15,02
3. Kepemilikan Masyarakat di bawah 5%	136.169.700	6.808.485.000	13,50
4. Saham Treasuri	16.940.500	847.025.000	1,68
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	1.008.605.000	50.430.250.000	100,00
Jumlah Saham Portepel	3.025.815.000	151.290.750.000	

Berdasarkan Akta Perseroan No. 29/2022 dan DPS tertanggal 31 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku BAE Perseroan, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- per lembar saham		%
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	4.034.420.000	201.721.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
1. PT Caraka Reksa Optima	905.705.657	45.285.282.850	89,80
2. Kepemilikan Masyarakat di bawah 5%	85.958.843	4.297.942.150	8,52
3. Saham Treasuri	16.940.500	847.025.000	1,68
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	1.008.605.000	50.430.250.000	100,00
Jumlah Saham Portepel	3.025.815.000	151.290.750.000	

Tahun 2023

Berdasarkan DPS tertanggal 30 September 2023 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku BAE Perseroan, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- per lembar saham		%
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	4.034.420.000	201.721.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
1. PT Caraka Reksa Optima	519.539.797	25.976.989.850	51,52
2. PT Maybank Sekuritas Indonesia	105.337.100	5.266.855.000	10,44
3. PT Sentosa Bersama Mitra	165.149.759	8.257.487.950	16,37
4. Kepemilikan Masyarakat di bawah 5%	201.637.844	10.081.892.200	19,99
5. Saham Treasuri	16.940.500	847.025.000	1,68
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	1.008.605.000	50.430.250.000	100,00
Jumlah Saham Portepel	3.025.815.000	151.290.750.000	-

Berdasarkan DPS tertanggal 31 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku BAE Perseroan, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- per lembar saham		%
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	4.034.420.000	201.721.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
1. PT Caraka Reksa Optima	694.964.098	34.748.204.900	68,91
2. PT Sentosa Bersama Mitra	190.149.759	9.507.487.950	18,85
3. Kepemilikan Masyarakat di bawah 5%	106.550.643	5.327.532.150	10,56
4. Saham Treasuri	16.940.500	847.025.000	1,68
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	1.008.605.000	50.430.250.000	100,00
Jumlah Saham Portepel	3.025.815.000	151.290.750.000	-

Tahun 2024

Berdasarkan DPS tertanggal 31 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku BAE, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- per lembar saham		%
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	4.034.420.000	201.721.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
1. PT Kreasi Jasa Persada	342.925.700	17.146.285.000	34,01
2. PT Caraka Reksa Optima	352.038.398	17.601.919.900	34,90
3. PT Sentosa Bersama Mitra	190.149.759	9.507.487.950	18,85
4. Kepemilikan Masyarakat di bawah 5%	117.026.843	5.851.342.150	11,60
5. Saham Treasuri	6.464.300	323.215.000	0,64
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	1.008.605.000	50.430.250.000	100,00
Jumlah Saham Portepel	3.025.815.000	151.290.750.000	-

Pada tahun 2024, Perseroan mengalami perubahan pengendali berdasarkan transaksi pengambilalihan yang dilakukan oleh KJP sebagai pembeli dengan CRO sebagai penjual sehubungan dengan pembelian 34% saham Perseroan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Pembelian Saham Bersyarat tanggal 7 November 2023 (“**Transaksi Pengambilalihan**”). Sehubungan dengan Transaksi Pengambilalihan, KJP merupakan perusahaan terkendali dari CUAN, dimana CUAN memiliki sebesar 99,98% dari total modal ditempatkan dan disetor KJP. Transaksi Pengambilalihan telah dilaksanakan oleh CUAN sesuai dengan prosedur yang diatur dalam POJK No. 9/2018. Setelah dilakukannya Transaksi Pengambilalihan maka pengendali dari Perseroan telah berubah dari CRO menjadi KJP.

Berdasarkan DPS tertanggal 30 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku BAE Perseroan, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- per lembar saham		%
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	4.034.420.000	201.721.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
1. PT Kreasi Jasa Persada	418.762.400	20.938.120.000	41,52
2. PT Caraka Reksa Optima	184.500.598	9.225.029.900	18,29
3. PT Sentosa Bersama Mitra	190.149.759	9.507.487.950	18,85
4. Kepemilikan Masyarakat di bawah 5%	215.192.243	10.759.612.150	21,34
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	1.008.605.000	50.430.250.000	100,00
Jumlah Saham Portepel	3.025.815.000	151.290.750.000	-

Berdasarkan DPS per 10 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku BAE Perseroan berdasarkan Surat Keterangan No.: DE/X/24-4411 tertanggal 11 Oktober 2024, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- per lembar saham		%
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	4.034.420.000	201.721.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
1. PT Kreasi Jasa Persada	418.762.400	20.938.120.000	41,52
2. PT Caraka Reksa Optima	344.650.357	17.232.517.850	34,17
3. Kepemilikan Masyarakat di bawah 5%	245.192.243	12.259.612.150	24,31
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	1.008.605.000	50.430.250.000	100,00
Jumlah Saham Portepel	3.025.815.000	151.290.750.000	-

4. Pengurusan Dan Pengawasan Perseroan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 3 tanggal 4 Desember 2023, yang dibuat di hadapan Shanti Indah Lestari, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang, yang telah diberitahukan kepada dan telah diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0197858 tanggal 19 Desember 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0257031.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 19 Desember 2023 (“**Akta Perseroan No. 3/2023**”), susunan pengurus dan pengawasan Perseroan yang sedang menjabat sampai dengan Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris merangkap Komisaris Independen	: Osman Sitorus
Komisaris	: Erwin Ciputra
Komisaris	: Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita
Komisaris	: Djauhar Maulidi S.E., M.B.A.
Komisaris	: Jend. Pol. (Purn.) Drs. Sutanto
Komisaris Independen	: Setia Untung Arimuladi S.H., M.Hum.

Direksi

Presiden Direktur	: Michael
Direktur	: Kartika Hendrawan
Direktur	: Ruddy Santoso
Direktur	: Meinar Kusumastuti
Direktur	: Iman Darus Hikhman

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi kualifikasi Direksi dan Dewan Komisaris Emiten dan/atau Perusahaan Publik sesuai dengan ketentuan POJK No. 33/2014. Pengangkatan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi ketentuan POJK No. 33/2014.

Berikut adalah riwayat singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

Dewan Komisaris



Osman Sitorus, Presiden Komisaris merangkap Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 64 tahun

Diangkat sebagai Presiden Komisaris merangkap Komisaris Independen Perseroan pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 2 September 2022. Sebagaimana dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 3 tanggal 2 September 2022 yang dibuat di hadapan Syarifudin, S.H., Notaris di Kota Tangerang yang telah mendapatkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09.0056140 tanggal 19 September 2022, yang telah mendapatkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09.0056140 tanggal 19 September 2022 (“**Akta Perseroan No. 3/2022**”), dengan masa tugas sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan di tahun 2025.

Pengalaman Kerja:

- Beliau memulai karir sebagai auditor tahun 1986 dengan bergabung di kantor akuntan publik lokal yang kemudian menjadi bagian dari Deloitte di Indonesia. Tahun 1995-2006, beliau menangani klien di berbagai industri termasuk energy & resources, manufaktur, konstruksi, shipping & aviation serta media dan telekomunikasi sebagai audit partner. Tahun 2006-2016, memimpin Bisnis Audit Deloitte di Indonesia dan menjadi Lead Client Service Partner untuk klien besar yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dan Badan Usaha Milik Negara.
- Anggota Asosiasi Profesi Akuntan serta pernah menjabat sebagai Ketua Bidang dan Ketua Forum Akuntan Pasar Modal, Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI).
- Anggota Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) serta pernah menjadi Anggota Dewan Standar Akuntansi Keuangan.

Rangkap Jabatan:

Presiden Komisaris merangkap Komisaris Independen dan Ketua Komite Audit, Risk & Compliance Perseroan (2023 sampai saat ini), Anggota Komite Audit, Risk & Compliance di PT Indika Energy Tbk (2020 sampai saat ini), Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen di PT Mulia Industrindo Tbk (2020 sampai saat ini), Ketua Komite Audit di PT Mulia Industrindo Tbk (2020 sampai saat ini), Anggota Komite Audit di PT Austindo Nusantara Jaya Tbk (2020 sampai saat ini).

Pendidikan:

Lulus di bidang Akuntansi, Fakultas Ekonomi, dari Universitas Sumatera Utara pada tahun 1986 dan merupakan anggota dari Chartered Accountant (CA) dari Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) serta Certified Public Accountant dari Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI).

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi lainnya, serta pemegang saham utama dan pengendali Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung.



Erwin Ciputra, Komisaris

Warga Negara Indonesia, 50 tahun

Diangkat sebagai Komisaris Perseroan pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 4 Desember 2023. Sebagaimana dituangkan dalam Akta Perseroan No. 3/2023, dengan masa tugas sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan di tahun 2026.

Pengalaman Kerja:

- Direktur di Chandra Asri Trading Company Pte. Ltd. (2020-2022)
- Presiden Komisaris di PT Synthetic Rubber Indonesia (2013-2019)
- Presiden Direktur di PT Styrimo Mono Indonesia (2010-2020)
- Presiden Direktur di PT Petrokimia Butadiene Indonesia (2010-2019)
- Direktur di Altus Capital Pte. Ltd. (sekarang Chandra Asri Trading Company Pte. Ltd.) (2010-2018)
- Presiden Direktur di PT Chandra Asri (2007-2010)
- Wakil Presiden Direktur di PT Chandra Asri (2004-2007)
- Corporate Planning Department di Barito Pacific Group (2003-2004)
- UOB Global Treasury and Assets Management (2002-2003)
- Portfolio Manager di Prism Capital Partners L.P. (2001-2002)
- Research Associate Inc. di JP Morgan Securities Inc. (1998-1999)
- Memulai karir sebagai analis di TIAA-CREF Management Inc. (1996-1998)

Rangkap Jabatan:

Komisaris Utama PT Multi Tambangjaya Utama (2024 sampai saat ini), Komisaris di PT Barito Renewables Tbk (2023 sampai saat ini), Komisaris PT Prima Mineral Investindo (2023 sampai saat ini), Komisaris PT Green Natural Investama (2023 sampai saat ini), Komisaris PT Krakatau Tirta Industri (2023 sampai saat ini), Komisaris PT Krakatau Daya Listrik (2023 sampai saat ini), Presiden Direktur PT Chandra Daya Investasi (2023 sampai saat ini), Presiden Direktur PT Chandra Asri Alkali (2023 sampai saat ini), Komisaris PT Barito Renewables Energy Tbk (2023 sampai saat ini), Komisaris Perseroan (2023 sampai saat ini), Komisaris Utama PT Armada Maritim Persada (2023 sampai saat ini), Komisaris PT Kreasi Jasa Persada (2023 sampai saat ini), Komisaris Utama di PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (2022 sampai saat ini), Direktur di Star Energy Group Holdings Pte. Ltd. (2022 sampai saat ini), Komisaris PT SCG Barito Logistics (2022 sampai saat ini), Direktur Star Energy Group Holdings Pte. Ltd. (2022 sampai saat ini), Komisaris PT Equator Sumber Energi (2022 sampai saat ini), Komisaris PT Tamtama Perkasa (2022 sampai saat ini), Komisaris PT Mareta Persada (2022 sampai saat ini), Komisaris PT Bara International (2022 sampai saat ini), Komisaris PT Intam (2022 sampai saat ini), Komisaris PT Daya Bumindo Karunia (2022 sampai saat ini), Komisaris PT Pika Utama Resources (2022 sampai saat ini), Presiden Direktur di PT Chandra Asri Perkasa (2017 sampai saat ini), Presiden Direktur di PT Chandra Asri Pacific Tbk (2011 sampai saat ini).

Pendidikan:

Lulus Sarjana Ekonomi dari Wharton School, University of Pennsylvania pada tahun 1996.

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi lainnya, serta pemegang saham utama dan pengendali, baik langsung maupun tidak langsung.

**Djauhar Maulidi, S.E., M.B.A., Komisaris**

Warga Negara Indonesia, 55 tahun

Diangkat sebagai Komisaris Perseroan pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 2 Desember 2022. Sebagaimana dituangkan dalam Akta Perseroan No. 3/2022, dengan masa tugas sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan di tahun 2025.

Pengalaman Kerja:

- Komisaris di PT Raharja Energi Cepu (2018-2019)
- Direktur Finance & Administration di PT Rukun Raharja Tbk (2011-2017)
- Presiden Direktur di PT Triguna Internusa Pratama (2010-2017)
- Presiden Direktur di PT Toha Sittah Salam (2009-2019)
- Direktur Finance & Business Development di PT Bumi Hasta Mukti (2006-2009)
- Corporate Banking Head di Sumitomo Mitsui Banking Corporation Indonesia (1993-2006)

Rangkap Jabatan:

Presiden Direktur di PT Rukun Raharja Tbk (2017 sampai saat ini), Presiden Komisaris di PT Energasindo Heksa Karya (2017 sampai saat ini), Presiden Komisaris di PT Triguna Internusa Pratama (2017 sampai saat ini), Direktur di PT Sentosa Bersama Mitra (2015 sampai saat ini).

Pendidikan:

Lulus MBA di bidang Energi dari Sekolah Bisnis Manajemen, Institut Teknologi Bandung, Jawa Barat pada tahun 2010, Sarjana Ekonomi di bidang International Trade and Economics dari Universitas Padjadjaran, Bandung, Jawa Barat pada tahun 1993.

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi lainnya, serta pemegang saham utama dan pengendali Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung.

**Prof. Ginandjar Kartasasmita, Komisaris**

Warga Negara Indonesia, 83 tahun

Diangkat sebagai Komisaris pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 4 Desember 2023. Sebagaimana dituangkan dalam Akta Perseroan No. 3/2023, dengan masa tugas sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan di tahun 2026.

Pengalaman Kerja:

- **Karir dalam dunia akademik**, Dosen Senior Program Pasca Sarjana Institut Teknologi Bandung (ITB) tahun 1995-1998, Senior Fellow tahun 2000-2001 dan Visiting Scholar tahun 2001-2003 di Weatherhead Center for International Affairs, Harvard University, Boston, Amerika Serikat, Profesor di Institute of Asia-Pacific Studies, Graduate School of Asia-Pacific Studies, Waseda University, Tokyo, Jepang tahun 2004-2011, Dosen Linkage Master Program (Double Degree) FIA-UNIBRAW and Japanese Universities tahun 2006-2009 sekaligus Dosen Program Doktor Bidang Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Kampus Jakarta tahun hingga 2010, Dosen Program Doktor Bidang Ilmu Manajemen dan Bidang Ilmu Sosial Universitas Pasundan tahun 2008 hingga sekarang, serta Visiting Professor di National Graduate Institute for Policy Study, Tokyo, Jepang 2012-2020.
- **Karir di militer**, diawali dari pangkat Letnan Satu Udara pada tahun 1966 dan pensiun sebagai Marsekal Madya TNI AU pada tahun 1996.

- **Karir di pemerintahan**, Sekretariat Kabinet: Kepala Bagian Penelitian pada Biro Analisa dan Perundang-undangan tahun 1968-1971, Kepala Bagian Evaluasi pada Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri tahun 1971-1972 dan Kepala Bagian Antar Negara pada Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri tahun 1972-1976, Asisten Sekretaris Negara Urusan Administrasi Pemerintahan tahun 1976-1978, Asisten Menteri/Sekretaris Negara Urusan Administrasi Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Non Departemen tahun 1978-1983 dan Anggota dan Wakil Ketua Tim Pengendali Pengadaan Barang Peralatan Pemerintah tahun 1980-1988. Menteri Muda Urusan Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri Kabinet Pembangunan IV tahun 1983-1988, merangkap Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal tahun 1985-1988, Menteri Pertambangan dan Energi Kabinet Pembangunan V tahun 1988-1993 dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Ketua Bappenas Kabinet Pembangunan VI tahun 1993-1998. Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri (Ekuin) merangkap sebagai Kepala Bappenas Kabinet Pembangunan VII, bulan Maret sampai Mei 1998. Diangkat kembali oleh Presiden BJ Habibie sebagai Menteri Koordinator Bidang Ekuin 1998-1999. Anggota Dewan Pertimbangan Presiden dalam Kabinet Indonesia Bersatu di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2010-2014.
- **Karir di bidang legislatif**, Anggota (Fraksi ABRI) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tahun 1982-1996 sebagai Ketua PAHI (GBHN) Badan Pekerja MPR tahun 1987-1991 dan sebagai Ketua Komisi A (GBHN) Sidang Umum MPR tahun 1982-1986. Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai Ketua Fraksi Karya Pembangunan tahun 1997-1998. Wakil Ketua MPR tahun 1999-2004. Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tahun 2004-2009.
- **Karir di bidang sosial kemanusiaan**, Pelaksana Harian Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) tahun 2014-2019.
- **Karir di badan kerjasama internasional**, Anggota Dewan Penasihat Internasional, Japan International Cooperation Agency (JICA) tahun 2018 sampai bulan Maret 2023.
- **Berbagai penghargaan dan tanda jasa/kehormatan dari Pemerintah RI dan negara-negara sahabat**, di antaranya: Bintang Republik Indonesia Utama (1998), Bintang Swa Bhuwana Paksa Pratama (1996) Bintang Yudha Dharma Pratama (1995), Bintang Legiun Veteran RI (1993), Bintang Swa Bhuwana Paksa Nararya (1992) dan Bintang Mahaputera Adipradana (1987). Order of Kuwait Fourth Class tahun 1978, Third Class of the Order of the Republic dari Mesir tahun 1978, Ordre National du Merite dari Perancis tahun 1987, Order of Diplomatic Service Merit Gwang Hwa Medal dari Republik Korea tahun 1988, Orden del Libertador Grand Cordon dari Venezuela tahun 1988, Grosse Goldene Ehrenzeichen (Commander's Cross) dari Austria tahun 1986, dan yang terakhir pada tahun 2008 The Grand Cordon of the Order of the Rising Sun, tanda jasa tertinggi yang diberikan kepada warga negara asing bukan Kepala Negara oleh Kaisar Jepang.

Rangkap Jabatan:

Ketua Dewan Pembina Persaudaraan Bela Diri Shorinji Kempo Indonesia (Perkemi) (1966 sampai saat ini), Pendiri & Pembina SMA Dwiwarna, Bogor, Jawa Barat (1998 sampai saat ini), Ketua Perhimpunan Persahabatan Indonesia-Jepang (2006 sampai saat ini), Dosen Program Doktor Bidang Ilmu Manajemen dan Ilmu Sosial Universitas Pasundan Bandung (2008 sampai sekarang), Deputy Chairman Lippo Group (2015 sampai saat ini), Konselor Administratif Eksternal pada Universitas Hiroshima Jepang (2015 sampai saat ini), Penasihat pada Japan Overseas Infrastructure Investment Corporation for Transport and Urban Development (JOIN), Jepang (2018 sampai saat ini), Wakil Ketua Umum Palang Merah Indonesia periode 2014-2024, Ketua Dewan Pengawas pada Koperasi Simpan Pinjam Nusantara Pos (Kopnupos) (2022 sampai saat ini).

Pendidikan:

Lulus dari Institut Teknologi Bandung tahun 1959-1960, Sarjana Teknik Kimia dari Tokyo University for Agriculture and Technology, Chemical Engineering tahun 1960-1965, Sarjana Administrasi Negara pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) LAN tahun 1970-1980, Doktor HC dari Takushoku University di Jepang dan Northeastern University Amerika Serikat pada tahun 1995, Universitas Gadjah Mada tahun 1995, dan Tokyo University for Agriculture and Technology, Tokyo tahun 2005, Guru Besar Ilmu Administrasi dari Universitas Brawijaya tahun 1996, Doktor Bidang Government dari National Graduate, Institute for Policy Studies (GRIPS) tahun 2016.

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi lainnya, serta pemegang saham utama dan pengendali Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung.

**Jenderal Pol. (Purn.) Drs. Sutanto, Komisaris**

Warga Negara Indonesia, 73 tahun

Diangkat sebagai Komisaris Perseroan pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 2 Desember 2022. Sebagaimana dituangkan dalam Akta Perseroan No. 3/2022, dengan masa tugas sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan di tahun 2025.

Pengalaman Kerja:

- Kepala Badan Intelijen Negara Republik Indonesia (2010-2011)
- Kapolri (2005-2008)
- Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional (Februari 2005-Juli 2005)
- Kepala Lembaga Pendidikan & Latihan Polri (2002-2005)
- Kapolda Jawa Timur (2000-2002)
- Kapolda Sumatera Utara (2000)

Rangkap Jabatan:

Komisaris Utama, Komisaris Independen dan Komisaris di beberapa badan usaha berbentuk perseroan terbatas.

Pendidikan:

Lulus dari Akabri Kepolisian pada tahun 1973, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) pada tahun 1983, SESPIMPOL, Lembang Bandung pada tahun 1990, Lemhanas pada tahun 2000.

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi lainnya, serta pemegang saham utama dan pengendali Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung.

**Setia Untung Arimuladi S.H., M.Hum., Komisaris Independen**

Warga Negara Indonesia, 62 tahun

Diangkat sebagai Komisaris pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 2 Desember 2022. Sebagaimana dituangkan dalam Akta Perseroan No. 3/2022, dengan masa tugas sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan di tahun 2025.

Pengalaman Kerja:

- Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia (2020)
- Kepala Badan Pendidikan & Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia (2017)
- Sekretaris Jaksa Agung Muda Intelijen (2017)
- Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (2016)
- Kepala Biro Umum (2015)
- Kepala Kejaksaan Tinggi Riau (2014)
- Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia (2012)
- Asisten Khusus Jaksa Agung Republik Indonesia (2011)

Rangkap Jabatan:

Beliau tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan lain.

Pendidikan:

Lulus Pasca Sarjana Hukum dari Universitas Parahyangan, Bandung pada tahun 2004 dan Sarjana Hukum dari Universitas Islam Nusantara, Bandung pada tahun 1980.

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi lainnya, serta pemegang saham utama dan pengendali Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung.

Direksi



Michael, Presiden Direktur

Warga Negara Indonesia, 36 tahun

Diangkat sebagai Presiden Direktur Perseroan pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 4 Desember 2023. Sebagaimana dituangkan dalam Akta Perseroan No. 3/2023, dengan masa tugas sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan di tahun 2026.

Pengalaman Kerja:

- Direktur Utama di anak perusahaan PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk (2017-2018)
- Memulai karirnya sebagai konsultan di Skha Management Consulting (2011-2017)

Rangkap Jabatan:

Direktur Utama di PT Multi Tambangjaya Utama (2024 sampai saat ini), Direktur Utama di PT Karya Bhumi Lestari (2024 sampai saat ini), Komisaris Utama di PT Kinarya Bangun Sesama (2024 sampai saat ini), Komisaris Utama di PT Kemilau Mulia Sakti (2024 sampai saat ini), Komisaris Utama di PT Cristian Eka Pratama (2024 sampai saat ini), Komisaris Utama di PT POSB Infrastructure Indonesia (2024 sampai saat ini), Direktur Utama di PT Prima Mineral Investindo (2023 sampai saat ini), Direktur Utama di PT Green Natural Investama (2023 sampai saat ini), Direktur Utama di PT Kreasi Jasa Persada (2023 sampai saat ini), Direktur Utama di PT Armada Maritim Persada (2023 sampai saat ini), Direktur Utama di PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (2022 sampai saat ini), Direktur Utama di PT Equator Sumber Energi (2022 sampai saat ini), Direktur Utama di PT Tamtama Perkasa (2022 sampai saat ini), Direktur Utama di PT Mareta Persada (2022 sampai saat ini), Direktur Utama di PT Bara International (2022 sampai saat ini), Direktur Utama di PT Intam (2022 sampai saat ini), Direktur Utama di PT Daya Bumindo Karunia (2022 sampai saat ini), Direktur Utama di PT Pika Utama Resources (2022 sampai saat ini), Direktur Utama di PT Silika Salut Jaya (2021 sampai saat ini), Direktur Utama di PT Barito Pacific Lumber (2018 sampai saat ini).

Pendidikan:

Lulus Magister Manajemen dari Universitas Prasetiya Mulya pada tahun 2012 dan Sarjana Teknik dari Universitas Katolik Parahyangan pada tahun 2010.

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi lainnya, serta pemegang saham utama dan pengendali Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung.

**Kartika Hendrawan, Direktur**

Warga Negara Indonesia, 44 tahun

Diangkat sebagai Direktur Perseroan pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 4 Desember 2023. Sebagaimana dituangkan dalam Akta Perseroan No. 3/2023, dengan masa tugas sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan di tahun 2026.

Pengalaman Kerja:

- CFO Sirclo / Orami (2015-2023)
- Investment Director di PT Eastspring Investments Indonesia (2013-2015)
- Principal di Indies Capital (2008-2013)
- Investment Banking Associate di Citigroup (2007-2008)
- Memulai karirnya sebagai Analyst di NERA Economic Consulting (2001-2005)

Rangkap Jabatan:

Komisaris Utama di PT Karya Bhumi Lestari (2024 sampai saat ini), Komisaris di PT POSB Infrastructure Indonesia (2024 sampai saat ini), Komisaris di PT Mahaka Industri Persada (2024 sampai saat ini), Komisaris di PT Cristian Eka Pratama (2024 sampai saat ini), Komisaris di PT Kemilau Mulia Sakti (2024 sampai saat ini), Direktur di PT Multi Tambangjaya Utama (2024 sampai saat ini), Group CFO di PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (2023 sampai saat ini), Direktur di PT Armada Maritim Persada (2023 sampai saat ini) dan Komisaris Independen di PT BNI Modal Ventura (2022 sampai saat ini).

Pendidikan:

Lulus Master of Business Administration dari Wharton School, University of Pennsylvania pada tahun 2007 dan Sarjana Ekonomi dan Informatika dari Wesleyan University pada tahun 2001.

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi lainnya, serta pemegang saham utama dan pengendali Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung.

**Ruddy Santoso, Direktur**

Warga Negara Indonesia, 46 tahun

Diangkat sebagai Direktur Perseroan pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 2 Desember 2022. Sebagaimana dituangkan dalam Akta Perseroan No. 3/2022, dengan masa tugas sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan di tahun 2025.

Pengalaman Kerja:

- Financial Controller di Perseroan (Februari 2018-September 2022)
- Corporate Planning Manager di Perseroan (Agustus 2015-Januari 2018)
- COSMO (Corporate Strategy Management Office) di Perseroan (Februari 2015-Agustus 2015)

- Asset Management Accounting Manager di Perseroan (Februari 2013-Januari 2015)
- Accounts Payable Manager di Perseroan (Februari 2011-Januari 2013)
- Accounting Manager – Mining di Perseroan (November 2009-Januari 2011)
- Senior Project Accountant di Perseroan (Juli 2008-Oktober 2009)
- Project Accountant di Perseroan (Juli 2007-Juni 2008)
- System Implementation Officer di Perseroan (November 2006-Juni 2007)
- Financial Controller di PT Mahaka Industri Perdana (2015-2016)
- Internal Audit Officer (2005-2006) dan Management Trainee (Februari 2005-Juli 2005) di PT Sarana Titian Permata (anak perusahaan Kuok Group, Malaysia), Jakarta
- Assistant Sales & Operational Manager di Expert Computer International, Inc., Gardena, California, Amerika Serikat (Februari 2004-Oktober 2004)

Rangkap Jabatan:

Komisaris PT Rekayasa Karya Nusantara (2024 sampai saat ini), Komisaris di PT Karya Bhumi Lestari (2022 sampai saat ini) dan Direktur di PT POSB Infrastructure Indonesia (2021 sampai saat ini).

Pendidikan:

Lulus Magister Administrasi Bisnis di bidang Teknologi Informasi dari Universitas Oklahoma City, Oklahoma, Amerika Serikat pada tahun 2003 dan Sarjana Ekonomi di bidang Akuntansi dari Universitas Tarumanagara pada tahun 2001.

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi lainnya, serta pemegang saham utama dan pengendali Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung.



Meinar Kusumastuti, Direktur

Warga Negara Indonesia, 49 tahun

Diangkat sebagai Direktur pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 4 Desember 2023. Sebagaimana dituangkan dalam Akta Perseroan No. 3/2023, dengan masa tugas sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan di tahun 2026.

Pengalaman Kerja:

- Wakil Direktur Legal & Communications di Perseroan (2022-2023)
- Komisaris di PT Kinarya Bangun Sesama (2021 – 2022)
- Direktur di Perseroan (2020-2022)
- Komisaris di PT Rekayasa Karya Nusantara (2020 – 2022)
- Komisaris di PT Karya Bhumi Lestari (2018 – 2022)
- Direktur di PT Kinarya Bangun Sesama (2018 – 2020)
- Head of Corporate Legal di Perseroan (2010-2020)
- Corporate Secretary di Perseroan (2010-2014)
- Legal Manager di PT Indika Energy Tbk (Januari 2008 - Juni 2010)
- Legal Counsel di PT Bhakti Investama Tbk (Juli 1999 - Desember 2007)

Beliau memiliki pengalaman kerja di bidang hukum selama lebih dari 26 tahun.

Rangkap Jabatan:

Komisaris di PT Kemilau Mulia Sakti (2024 sampai saat ini), Komisaris di PT Cristian Eka Pratama (2024 sampai saat ini), Komisaris di PT Kinarya Bangun Sesama (2024 sampai saat ini) dan Direktur Utama di PT POSB Infrastructure Indonesia (2021 sampai saat ini).

Pendidikan:

Lulus Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia pada tahun 1998.

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi lainnya, serta pemegang saham utama dan pengendali Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung.



Iman Darus Hikhman, Direktur

Warga Negara Indonesia, 43 tahun

Diangkat sebagai Direktur pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 4 Desember 2023. Sebagaimana dituangkan dalam Akta Perseroan No. 3/2023, dengan masa tugas sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan di tahun 2026.

Pengalaman Kerja:

- Direktur di PT Cristian Eka Pratama (2023 -2024)
- Direktur Mining (non akta) di Perseroan (2020-2023)
- Mining General Manager di Perseroan (2018-2020)
- Direktur di PT Mahaka Industri Perdana (2017-2018)
- Area Mining Manager di Perseroan (2015-2018)
- Technical Services Manager di Perseroan (2012-2015)
- Mine Planning & Development Manager di PT KBB (CCOW) (2010-2012)
- Management trainee dan beberapa posisi lainnya (2004-2010)

Beliau memiliki pengalaman kerja di bidang mining operations selama lebih dari 19 tahun.

Rangkap Jabatan:

Komisaris Utama di PT Rekayasa Karya Nusantara (2024 sampai saat ini).

Pendidikan:

Lulus Master of Business Administration dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 2018 dan Sarjana Teknik Pertambangan dari Universitas Islam Bandung pada tahun 2004.

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi lainnya, serta pemegang saham utama dan pengendali Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung.

Hingga Prospektus ini diterbitkan, tidak ada Kepentingan lain yang bersifat material di luar kapasitasnya sebagai anggota Direksi terkait Penawaran Umum Efek bersifat utang atau pencatatannya di Bursa Efek serta Hal-hal yang dapat menghambat kemampuan anggota Direksi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi demi kepentingan Perseroan.

5. Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance/GCG)

Perseroan terus melanjutkan komitmennya dalam pelaksanaan GCG dan mengadopsi praktik-praktik berstandar internasional yang disyaratkan oleh *Asean Corporate Governance Scorecard (ACGS)* termasuk OJK. Perseroan juga senantiasa mengutamakan aspek *Environmental, Social & Governance (ESG)* secara berkelanjutan sebagai bagian dari strategi dekarbonisasi perusahaan, termasuk dengan memanfaatkan teknologi digital terkini.

Berkat komitmennya dalam menjalankan *good corporate governance* secara konsisten dan berkelanjutan, Perseroan kembali meraih berbagai penghargaan, di antaranya “Best Responsibility of the Board” dan masuk ke dalam kategori “Top 50 Mid Capitalization Public Listed Company” pada acara 14th IICD Corporate Governance Award 2023 yang diselenggarakan oleh Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD). Penghargaan tahun 2023 merupakan yang kedua kalinya bagi Perseroan, setelah menerima penghargaan yang sama dari IICD di tahun sebelumnya.

Sepanjang tahun 2023, Perseroan juga meraih berbagai penghargaan terkait GCG lainnya sebagai wujud dari pelaksanaan prinsip transparansi, seperti Corporate Emission Transparency Awards 2023 di kategori Gold Plus dari B Universe, Investor Daily & Bumi Global Karbon Foundation, ESG Disclosure Transparency Awards 2023 di level Management BBB dari Investortrust.id dan Bumi Global Karbon Foundation, serta Best Corporate Secretary dan Top Good Corporate Governance untuk sektor *Oil & Gas and Coal Equipment & Services* dari The Economics.

Pada tahun 2023, manajemen memperkuat budaya GCG menuju pelaksanaan tahap “*good sustainability citizenship*” dalam roadmap GCG Perseroan, dengan tujuan untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam berbagai program tanggung jawab sosial perusahaan sebagai bagian dari prinsip keberlanjutan.

Perseroan yakin bahwa Perseroan berada pada posisi yang baik untuk memperoleh berbagai peluang bisnis. Didukung oleh kemampuan Perseroan dalam mengimplementasikan strategi diversifikasi dengan memanfaatkan Minerva Digital Platform guna meningkatkan efisiensi dan produktivitas kegiatan operasional sebagai pelaksanaan *operational excellence* dan *continuous improvement* secara berkelanjutan.

Prinsip GCG

Perseroan merumuskan prinsip, kebijakan dan prosedur GCG sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang perseroan terbatas dan pasar modal Indonesia, peraturan OJK dan BEI, Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia, serta ASEAN *Corporate Governance Scorecard*. Perseroan menerapkan empat prinsip GCG berikut ini:

- **Perilaku Beretika** – senantiasa mengedepankan kejujuran, memperlakukan semua pihak dengan hormat, memenuhi komitmen, membangun serta menjaga nilai-nilai moral dan kepercayaan secara konsisten.
- **Akuntabilitas** – mempertanggungjawabkan kinerja secara transparan dan wajar.
- **Transparansi** – menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan.
- **Keberlanjutan** – berkomitmen melaksanakan tanggung jawab terhadap Masyarakat dan lingkungan.

Penerapan empat prinsip GCG di Perseroan yang dimaksudkan adalah untuk menjalankan praktik governansi korporat berstandar internasional yang direkomendasikan untuk korporasi yang terdaftar di pasar modal dan mengelola dana Masyarakat guna melindungi kepentingan dan memenuhi harapan para pemegang saham, kreditur, debitur, serta para pemangku kepentingan lain agar tercapai penciptaan nilai korporasi yang berkelanjutan dalam jangka panjang.

Penerapan pedoman ini oleh berbagai korporasi tersebut pada akhirnya diharapkan dapat mendorong percepatan perkembangan pasar modal dan sektor jasa keuangan di Indonesia.

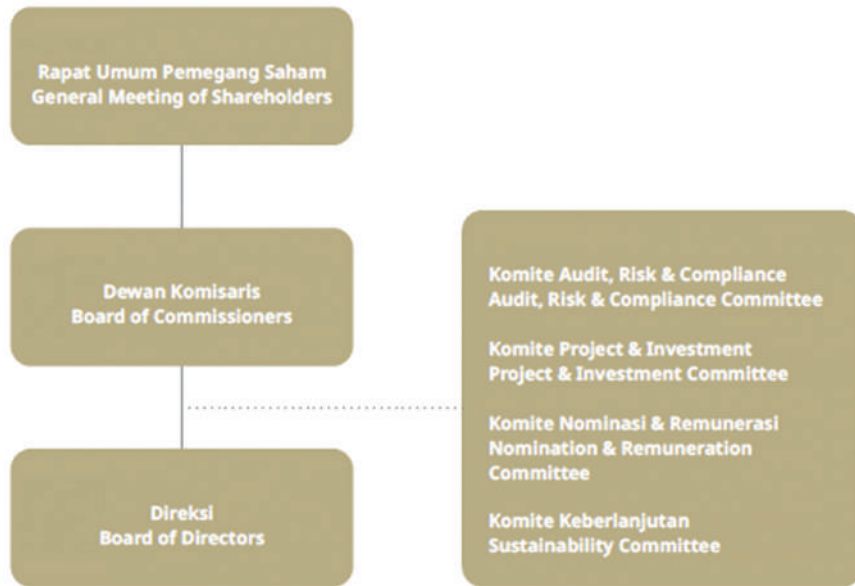
Pilar Tata Kelola Perseroan

RUPS memegang otoritas tertinggi dalam penerapan GCG Perseroan dan Dewan Komisaris didukung oleh empat komite dalam menjalankan tugasnya.

Struktur governansi korporat meliputi tiga organ, yaitu organ kepemilikan, organ pengelolaan dan organ pengawasan. RUPS merupakan organ kepemilikan korporasi yang digunakan oleh Direksi dan Dewan Komisaris sebagai forum untuk mempertanggungjawabkan aktivitas pengelolaan korporasi dan aktivitas pengawasan, termasuk untuk memenuhi hak-hak pemegang saham.

Perseroan dikelola oleh dua organ, yaitu Direksi yang berperan sebagai organ pengelolaan korporasi dan Dewan Komisaris yang berperan sebagai organ pengawasan dalam mengawasi aktivitas pengelolaan yang dilaksanakan oleh Direksi. Direksi mempertanggungjawabkan peran pengelolannya dan Dewan Komisaris mempertanggungjawabkan peran pengawasannya kepada para pemegang saham melalui organ RUPS.

Secara singkat, arsitektur tata kelola perusahaan terdiri atas pilar eksekutif dan pilar pengawasan berikut ini:



TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris merupakan organ perusahaan yang bertanggung jawab atas tugas pengawasan, termasuk memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalani tugas pengelolaan Perseroan. Dewan Komisaris juga mendampingi Direksi guna memastikan pengelolaan Perseroan mematuhi prinsip-prinsip dan praktik terbaik GCG. Selain itu, Dewan Komisaris juga bertanggung jawab mendampingi Direksi dalam menentukan strategi Perseroan, serta memberikan saran, nasihat dan rekomendasi kepada Direksi terkait isu maupun permasalahan yang ada di dalam industri.

Dewan Komisaris Perseroan terdiri atas enam orang, yaitu satu Presiden Komisaris merangkap Komisaris Independen, empat Komisaris, dan satu Komisaris Independen. Masing-masing anggota memiliki tugas dan tanggung jawab secara terpisah, terutama dalam memimpin rapat komite dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, di samping menjalankan peran sebagai anggota Dewan Komisaris.

Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya dari para anggota Dewan Komisaris ditentukan oleh Rapat Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi. Jumlah remunerasi untuk tahun yang berakhir pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024, dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 yang dibayarkan kepada Dewan Komisaris adalah masing-masing sebesar USD256 ribu, USD1.716 ribu dan USD743 ribu.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris bertanggung jawab mengawasi pengelolaan Perseroan, baik secara umum maupun secara khusus, serta bertugas memberikan saran, nasehat dan rekomendasi terkait kepengurusan Perseroan kepada Direksi, sesuai peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar Perseroan, serta *Board Manual* Perseroan. Dewan Komisaris juga memiliki tugas untuk memantau implementasi GCG di lingkungan Perseroan, dalam rangka menjaga keberlanjutan, usaha, serta lingkungan Perseroan.

Tugas dan tanggung jawab tersebut antara lain:

1. Melakukan pengawasan untuk kepentingan Perseroan terhadap tindakan pengurusan yang dilakukan Direksi, baik mengenai Perseroan maupun terhadap kegiatan usaha Perseroan, termasuk tugas-tugas yang secara khusus diberikan kepadanya sesuai dengan keputusan RUPS, keputusan Dewan Komisaris dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Meneliti, menelaah dan menyetujui Laporan Tahunan yang disiapkan oleh Direksi, dan memastikan bahwa dalam Laporan Tahunan Perseroan telah memuat informasi mengenai identitas, pekerjaan, tanggung jawab utama serta jabatan anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan di perusahaan-perusahaan lain (bila ada), termasuk rapat-rapat yang telah dilakukan Dewan Komisaris dalam satu tahun buku (baik rapat Dewan Komisaris maupun rapat gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi), serta honorarium, fasilitas, dan/atau tunjangan lain yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris dari Perseroan;
3. Mengkaji, menelaah, memberikan saran dan persetujuan atas usulan Rencana Jangka Panjang (RJP) Perseroan yang disampaikan oleh Direksi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum periode 5 (lima) tahun periode berikutnya dimulai;
4. Mengkaji, menelaah, memberikan saran dan persetujuan atas usulan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Perseroan yang disampaikan oleh Direksi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tahun buku berikutnya dimulai;
5. Mengawasi pelaksanaan RJP Perseroan dan RKAT Perseroan serta menyampaikan hasil penilaian dan pendapatnya kepada RUPS;
6. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan dan memberikan pendapat dan saran kepada Direksi, sesuai dengan tugas pengawasannya, atas setiap persoalan yang dianggap penting dalam pengurusan Perseroan, termasuk hal-hal penting yang diperkirakan akan berdampak besar pada usaha dan kinerja Perseroan, secara tepat waktu dan relevan;
7. Memantau efektivitas praktik-praktik tata kelola perusahaan yang baik yang diterapkan di Perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan praktik-praktik tata kelola perusahaan yang baik secara konsisten dan sesuai dengan Tata Nilai Perseroan. Hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi tersebut dilaporkan kepada RUPS;
8. Menyampaikan kepada Direksi saran, harapan, permasalahan dan keluhan yang disampaikan oleh Pemangku Kepentingan kepada Dewan Komisaris, untuk ditindaklanjuti;
9. Membentuk Komite Audit serta komite lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal;
10. Melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk menentukan sistem nominasi, evaluasi kinerja dan remunerasi yang transparan bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Evaluasi kinerja dilakukan secara periodik, sesuai dengan Indikator Pencapaian Kinerja (*Key Performance Indicator/KPI*) yang disetujui oleh Dewan Komisaris. Untuk fungsi nominasi dan remunerasi, Dewan Komisaris membentuk Komite Nominasi & Remunerasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris Perseroan dan dilaporkan kepada RUPS;
11. Meneliti dan menelaah laporan-laporan dari Komite-Komite Dewan Komisaris Perseroan;
12. Mengadakan rapat Dewan Komisaris sekurang kurangnya satu kali setiap dua bulan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
13. Menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi Perseroan;
14. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang telah lampau kepada RUPS, disertai dengan saran;
15. Meningkatkan kompetensi dan pengetahuannya secara berkesinambungan untuk menjalankan tugasnya sebagai Dewan Komisaris secara profesional;
16. Menginformasikan kepada Sekretaris Perusahaan mengenai kepemilikan sahamnya di Perseroan, termasuk setiap perubahannya untuk dilaporkan kepada regulator sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
17. Menginformasikan kepada Sekretaris Perusahaan setiap dan seluruh jabatan pada perusahaan lain, termasuk perusahaan terbuka lainnya, termasuk jabatan dalam komite-komite yang ada di bawah Dewan Komisaris perusahaan terbuka lainnya (bila ada); dan
18. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar Perseroan dan/atau keputusan RUPS Perseroan.

Piagam Dewan Komisaris

Perseroan memiliki *Board Manual* yang mencakup pedoman bagi Dewan Komisaris, Direksi, Program Pengenalan, Peningkatan Kapabilitas, Nilai-Nilai dan Etika Dewan Komisaris dan Direksi, serta Kegiatan Antar Organ Perusahaan. Masing-masing pedoman merupakan bab tersendiri.

Board Manual Perseroan disusun sesuai dengan UUPT, UUPM, Pedoman GCG Indonesia Tahun 2006, Anggaran Dasar Perseroan, POJK No. 32/2014, POJK No. 33/2014, POJK No. 34/2014, POJK No. 35/2014, dan Peraturan BEI I-A. Selain Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, Perseroan juga mengacu kepada standar internasional ASEAN *Corporate Governance Scorecard*.

Di dalam Board Manual terdapat bab mengenai Dewan Komisaris yang mencakup:

- I. Lingkup Pengawasan Dewan Komisaris
 - a. Prinsip Dasar Pengawasan
 - b. Tugas dan Kewajiban
 - c. Kewenangan dan Hak
- II. Komposisi Dewan Komisaris
 - a. Keanggotaan Dewan Komisaris
 - b. Komisaris Independen
- III. Komite-Komite Dewan Komisaris
- IV. Sekretaris Dewan Komisaris
- V. Rapat-Rapat Dewan Komisaris
 - a. Kebijakan Umum Rapat Dewan Komisaris
 - b. Mekanisme dan Pelaksanaan Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris dilarang menyalahgunakan *insider information* selain untuk kepentingan Perseroan. Perseroan tidak memiliki kebijakan terkait keterbukaan informasi atas transaksi saham Perseroan oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang harus dilaporkan dalam waktu tiga hari kerja, namun menerapkan praktek terbaik dalam hal tersebut. Selain itu, Perseroan juga menghindari praktik pemberian pinjaman kepada anggota Dewan Komisaris maupun Direksi, namun tidak memiliki kebijakan yang spesifik terkait hal tersebut.

Rapat Dewan Komisaris

Sesuai ketentuan di dalam Board Manual, Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 31 ayat 1 POJK No. 33/2014, Dewan Komisaris wajib untuk mengadakan rapat paling sedikit satu kali dalam dua bulan (enam rapat dalam setahun).

Board Manual juga menjelaskan terkait penyelenggaraan rapat baik untuk rapat terjadwal dan yang tidak terjadwal termasuk terkait penyampaian bahan rapat. Untuk rapat yang telah dijadwalkan, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat lima hari sebelum rapat diselenggarakan sedangkan untuk rapat yang tidak terjadwal, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.

Sepanjang tahun 2023, Dewan Komisaris telah menyelenggarakan 6 (enam) kali rapat. Tiga rapat diikuti oleh anggota Dewan Komisaris yang dibentuk berdasarkan RUPST 2022, dua rapat diikuti oleh anggota Dewan Komisaris yang dibentuk berdasarkan RUPST 2023 tanggal 15 Mei 2023 dan satu rapat diikuti oleh anggota Dewan Komisaris yang dibentuk berdasarkan RUPSLB 2023 tanggal 4 Desember 2023. Berikut adalah frekuensi dan kehadiran rapat Dewan Komisaris sepanjang 2023:

Anggota Dewan Komisaris	Jumlah Kehadiran	Persentase
Osman Sitorus	6/6	100,00%
Prof. Ginandjar Kartasmita	5/6	83,33%
Djauhar Maulidi S.E., M.B.A.	5/6	83,33%
Erwin Ciputra**	1/1	100,00%
Jend. Pol. (Purn.) Drs. Sutanto	5/6	83,33%
Setia Untung Arimuladi S.H., M.Hum.	6/6	100,00%
Haji Romo Nitiyudo Wachjo*	2/5	40,00%
Prof. Dr. Supandi, S.H., M.Hum.*	3/5	60,00%

*menjabat sebelum RUPSLB tanggal 4 Desember 2023

**menjabat setelah RUPSLB tanggal 4 Desember 2023

Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024, Perseroan telah mengadakan rapat Dewan Komisaris sebanyak 3 (tiga) kali. Berikut adalah frekuensi rapat dan tingkat kehadiran Dewan Komisaris Perseroan:

Anggota Dewan Komisaris	Jumlah Kehadiran	Persentase
Osman Sitorus	3/3	100,00%
Prof. Ginandjar Kartasasmita	3/3	100,00%
Djauhar Maulidi, S.E., M.B.A	2/3	66,67%
Erwin Ciputra	3/3	100,00%
Jenderal Pol (Purn.) Drs. Sutanto	2/3	66,67%
Setia Untung Arimuladi S.H., M.Hum.	2/3	66,67%

Direksi

Direksi merupakan organ perusahaan yang bertanggung jawab atas kepemimpinan dan pengelolaan Perseroan. Direksi mengusahakan dan menjamin terlaksananya kegiatan Perseroan, terpenuhinya hak-hak Pemangku Kepentingan, sesuai kepentingan jangka panjang Perseroan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Direksi Perseroan terdiri atas lima orang, yaitu satu Presiden Direktur dan empat Direktur. Masing-masing anggota memiliki tugas dan tanggung jawab secara terpisah.

Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya dari para anggota Direksi ditentukan oleh Rapat Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi. Jumlah remunerasi untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 yang dibayarkan kepada Direksi adalah masing-masing sebesar USD575 ribu, USD2.926 ribu dan USD1.985 ribu.

Sepanjang tahun 2023 dan hingga pada saat Prospektus ini diterbitkan, Dewan Komisaris dan Direksi tidak mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi baik melalui pendidikan dan pelatihan.

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

1. Memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan dan senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektifitas Perseroan;
2. Memelihara, menjaga dan mengurus kekayaan Perseroan;
3. Menyiapkan Struktur Organisasi Perseroan lengkap dengan rincian tugasnya;
4. Menetapkan pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi;
5. Mengembangkan dan memimpin penerapan pedoman tata kelola perusahaan yang baik;
6. Menyiapkan pada waktunya RJP Perseroan dan kemudian menyampaikannya kepada Dewan Komisaris guna mendapatkan persetujuan dan pengesahan;
7. Menyiapkan RKAT Perseroan dan menyampaikannya kepada Dewan Komisaris selambatnya 45 hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang guna mendapatkan persetujuan dan pengesahan;
8. Membangun dan melaksanakan program manajemen risiko korporasi secara terpadu yang merupakan bagian dari pelaksanaan tata kelola;
9. Menetapkan kebijakan tentang Sistem Pengendalian Internal yang efektif untuk mengamankan investasi, kegiatan usaha dan aset Perseroan;
10. Menyusun sistem akuntansi sesuai Standar Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsip prinsip pengendalian internal, terutama pemisahan fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan dan pengawasan;
11. Mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi Perseroan untuk menghasilkan penyelenggaraan pembukuan yang tertib, kecukupan modal kerja dengan biaya modal yang efisien, struktur neraca yang baik dan kokoh, penyajian laporan dan analisa keuangan tepat waktu dan akurat serta prinsip prinsip lain sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu perusahaan;
12. Menyampaikan Laporan Keuangan, laporan berkala lainnya kepada Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
13. Menyiapkan dan menyampaikan Laporan Tahunan kepada OJK selambat-lambatnya pada akhir bulan keempat sejak tahun buku berakhir atau pada tanggal pemanggilan RUPS Tahunan Perseroan, mana yang lebih dahulu;

14. Memastikan tersedianya Laporan Tahunan kepada Pemegang Saham Perseroan paling lambat pada akhir bulan keempat sejak tahun buku berakhir atau pada tanggal pemanggilan RUPS Tahunan Perseroan, mana yang lebih dahulu;
15. Menyelenggarakan RUPS Tahunan selambat lambatnya bulan keenam setelah tahun buku berakhir;
16. Memanggil dan menyelenggarakan RUPS Tahunan dan/atau RUPS Luar Biasa menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan perundang-undangan yang berlaku;
17. Memiliki fungsi Sekretaris Perusahaan;
18. Membuat, menyimpan dan memelihara dokumen perusahaan, di tempat kedudukan Perseroan, antara lain daftar pemegang saham, risalah RUPS, risalah rapat Dewan Komisaris dan risalah rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan serta dokumen-dokumen Perseroan lainnya;
19. Mengungkapkan informasi penting terkait Perseroan dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan kepada Pemegang Saham atau pihak lain, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku secara tepat waktu, akurat, jelas dan objektif;
20. Mengadakan rapat Direksi sekurang-kurangnya satu kali setiap satu bulan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
21. Menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi Perseroan;
22. Memastikan Perseroan melakukan tanggung jawab sosialnya;
23. Meningkatkan kompetensi dan pengetahuannya secara berkesinambungan untuk menjalankan tugasnya sebagai Direksi Perseroan secara profesional;
24. Menginformasikan kepada Sekretaris Perusahaan mengenai kepemilikan sahamnya di Perseroan, termasuk setiap perubahannya untuk dilaporkan kepada OJK sebagai regulator sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
25. Menginformasikan kepada Sekretaris Perusahaan setiap dan seluruh jabatan pada perusahaan lain, termasuk perusahaan terbuka lainnya, termasuk jabatan dalam komite-komite yang ada di bawah Dewan Komisaris perusahaan terbuka lainnya (bila ada); dan
26. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar Perseroan dan/atau keputusan RUPS Perseroan.

Piagam Direksi

Perseroan memiliki *Board Manual* yang mencakup pedoman bagi Direksi, Program Pengenalan, Peningkatan Kapabilitas, Nilai-Nilai dan Etika Direksi, serta Kegiatan Antar Organ Perusahaan. Masing-masing pedoman dinyatakan sebagai bab tersendiri. Direksi memimpin proses pengembangan dan peninjauan strategi Perseroan, termasuk Rencana Jangka Panjang Perseroan dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan. Direksi mengembangkan, menjalankan dan mengawasi sistem-sistem manajemen untuk mengimplementasikan strategi Perseroan.

Rapat Direksi

Sesuai ketentuan di dalam *Board Manual*, Anggaran Dasar dan Pasal 16 ayat 1 POJK 33/2014, Direksi wajib untuk mengadakan rapat Direksi paling sedikit satu kali dalam satu bulan (12 rapat dalam setahun).

Board Manual juga menjelaskan terkait penyelenggaraan rapat baik untuk rapat terjadwal dan yang tidak terjadwal termasuk terkait penyampaian bahan rapat. Untuk rapat yang telah dijadwalkan, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat lima hari sebelum rapat diselenggarakan sedangkan untuk rapat yang tidak terjadwal, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.

Sepanjang tahun 2023, Direksi telah menyelenggarakan 20 (dua puluh) rapat. Lima belas rapat diikuti oleh anggota Direksi yang dibentuk berdasarkan RUPST 2022, lima rapat diikuti oleh anggota Direksi yang dibentuk berdasarkan RUPSLB 4 Desember 2023. Berikut adalah frekuensi kehadiran rapat Direksi sepanjang tahun 2023:

Anggota Direksi	Jumlah Kehadiran	Persentase
Romi Novan Indrawan*	15/15	100,00%
Rafael Nitiyudo*	6/15	40,00%
Ruddy Santoso***	20/20	100,00%
Pankaj Motilal*	13/15	86,67%
Aldi Rakhmatillah*	10/15	66,67%
Michael**	5/5	100,00%
Kartika Hendrawan**	5/5	100,00%
Meinar Kusumastuti**	5/5	100,00%
Imam Darus Hikhman**	4/5	80,00%

*menjabat sebelum RUPSLB tanggal 4 Desember 2023

**menjabat setelah RUPSLB tanggal 4 Desember 2023

***menjabat sepanjang tahun 2023

Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024, Perseroan telah mengadakan rapat Direksi sebanyak 19 (sembilan belas) kali. Berikut adalah frekuensi rapat dan tingkat kehadiran Direksi Perseroan:

Anggota Direksi	Jumlah Kehadiran	Persentase
Michael	19/19	100,00%
Iman Darus Hikhman	17/19	89,47%
Ruddy Santoso	19/19	100,00%
Meinar Kusumastuti	19/19	100,00%
Kartika Hendrawan	19/19	100,00%

Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi

Rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan merupakan bentuk koordinasi antara Dewan Komisaris dan Direksi, antara lain untuk membahas laporan-laporan periodik dari Direksi, kondisi dan prospek usaha, perkembangan kebijakan nasional maupun internasional yang berdampak pada kinerja Perusahaan, serta rencana kerja.

Dewan Komisaris memberikan tanggapan, catatan dan nasihat yang dituangkan dalam suatu risalah rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi, serta juga hal lain yang dianggap perlu, termasuk tetapi tidak terbatas untuk persiapan RUPS maupun pembahasan penyajian dan publikasi laporan tahunan dan laporan keuangan berkala Perseroan.

Sesuai dengan ketentuan POJK 33/2014 Pasal 31 ayat 3 jo. Pasal 16 ayat 3, Anggaran Dasar Pasal 13 ayat 2 dan Board Manual Perseroan, Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama (gabungan) dengan Direksi paling kurang satu kali dalam setiap empat bulan (tiga rapat dalam setahun) begitu pula sebaliknya Direksi wajib mengadakan rapat bersama (gabungan) dengan Dewan Komisaris paling kurang satu kali dalam setiap empat bulan (tiga rapat dalam setahun). Sehingga jumlah rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menurut ketentuan adalah sejumlah enam kali rapat.

Frekuensi dan kehadiran rapat gabungan sepanjang tahun 2023 telah diselenggarakan sebanyak enam kali rapat gabungan.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris	Jumlah Kehadiran	Persentase
Osman Sitorus	6/6	100,00%
Prof. Ginandjar Kartasasmita	6/6	100,00%
Djauhar Maulidi S.E., M.B.A.	6/6	100,00%
Erwin Ciputra**	0/3	0%
Jend. Pol. (Purn.) Drs. Sutanto	6/6	100,00%
Setia Untung Arimuladi S.H., M.Hum.	6/6	100,00%
Haji Romo Nitiyudo Wachjo*	3/3	100,00%
Prof. Dr. Supandi, S.H., M.Hum.*	2/3	66,67%
Romi Novan Indrawan*	3/3	100,00%

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris	Jumlah Kehadiran	Persentase
Rafael Nitiyudo*	3/3	100,00%
Pankaj Motilal*	3/3	100,00%
Aldi Rakhmatillah*	3/3	100,00%
Ruddy Santoso	6/6	100,00%
Michael**	3/3	100,00%
Kartika Hendrawan**	3/3	100,00%
Meinar Kusumastuti**	3/3	100,00%
Imam Darus Hikhman**	3/3	100,00%

*menjabat sebelum RUPSLB tanggal 4 Desember 2023

**menjabat setelah RUPSLB tanggal 4 Desember 2023

Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024, Perseroan telah mengadakan rapat gabungan Direksi dan Dewan Komisaris sebanyak 2 (dua) kali. Berikut adalah frekuensi rapat dan tingkat kehadiran Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan:

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris	Jumlah Kehadiran	Persentase
Osman Sitorus	2	100,00%
Prof. Ginandjar Kartasasmita	2	100,00%
Djauhar Maulidi, S.E., M.B.A	2	100,00%
Erwin Ciputra	2	100,00%
Jenderal Pol (Purn.) Drs. Sutanto	1	50,00%
Setia Untung Arimuladi S.H., M.Hum.	1	50,00%
Michael	2	100,00%
Kartika Hendrawan	2	100,00%
Ruddy Santoso	2	100,00%
Meinar Kusumastuti	2	100,00%
Iman Darus Hikhman	2	100,00%

Untuk Rapat Direksi dan Dewan Komisaris selanjutnya di tahun 2024, dijadwalkan pada kuartal 3 dan 4 sesuai dengan *corporate calendar* Perseroan tahun 2024.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Perseroan mempunyai Komite Nominasi & Remunerasi yang telah disahkan oleh Dewan komisaris sesuai POJK No. 34/POJK.4/2014 tentang Komite Nominasi & Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik. Berdasarkan Keputusan Sirkular Dewan Komisaris Perseroan No. PTP/RES/BOC/III/2024-0003 pada tanggal 5 Maret 2024 jo. No. PTP/RES/BOC/VII/2023-0012 pada tanggal 1 September 2023, susunan anggota Komite Nominasi & Remunerasi adalah sebagai berikut:

Ketua : Osman Sitorus
 Anggota : Erwin Ciputra
 : Djauhar Maulidi S.E., M.B.A.

Riwayat singkat mengenai ketua dan masing-masing anggota komite nominasi dan remunerasi dapat dilihat pada Prospektus ini halaman 83 – 85, subbab Pengurusan dan Pengawasan Perseroan.

Pelaksanaan Tugas Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Nominasi dan Remunerasi wajib bertindak secara independen dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Tugas Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

1. Fungsi Nominasi
 - 1) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan
 - Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - 2) Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;

- 3) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- 4) Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS; dan
- 5) Meninjau, mengusulkan dan merekomendasikan sampai dengan satu level di bawah Direksi dalam hal pelaksanaan tugas yang menyangkut *talent management* dan *succession planning*.

Di dalam menjalankan fungsi nominasi anggota Direksi, Komite mengidentifikasi kualitas calon anggota Direksi sesuai visi, misi dan strategi Perseroan. Perseroan tidak menggunakan jasa perekrutan kandidat atau sumber kandidat eksternal lainnya (seperti database Direktur yang dibuat oleh Direktur atau badan pemegang saham) Ketika mencari kandidat untuk Dewan Komisaris dan/atau Direksi.

2. Fungsi Remunerasi

- 1) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai struktur remunerasi, kebijakan atas remunerasi, dan besaran remunerasi; dan
- 2) Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Komite Audit

Perseroan memiliki Komite Audit, *Risk & Compliance* yang telah disahkan oleh Dewan Komisaris sesuai POJK No. 55/2015 dan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Pengganti Rapat Dewan Komisaris Perseroan No.PTP/RES/BOC/XI/2023-0020 pada tanggal 11 Desember 2023, susunan Komite Audit, *Risk & Compliance* adalah sebagai berikut:

Ketua : Osman Sitorus
 Anggota : M. Oka Lesmana Firdauzi
 : Sahat Pardede
 : Madelin A. Hardjapamekas

Riwayat Singkat

Riwayat singkat ketua komite audit dapat dilihat pada Prospektus halaman 83, subbab Pengurusan dan Pengawasan Perseroan. Berikut adalah riwayat singkat anggota komite audit :

M. Oka Lesmana Firdauzi

Warga Negara Indonesia, 51 tahun. Menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di bidang Akuntansi dari Universitas Trisakti pada tahun 1996. Diangkat sebagai Anggota Komite Audit, *Risk & Compliance* berdasarkan keputusan Dewan Komisaris pada tanggal 11 Desember 2023.

Rangkat Jabatan:

- Komisaris di PT Bravo Delta Persada (2020 sampai saat ini)
- Komisaris di PT Raharja Energi Cepu (2019 sampai saat ini)
- Komisaris di PT Petrogas Jatim Utama Cendana (2018 sampai saat ini)
- Presiden Direktur di PT Panji Raya Alamindo (2017 sampai saat ini)
- Direktur Keuangan di PT Rukun Raharja Tbk (2016 sampai saat ini)

Pengalaman Kerja:

- Presiden Komisaris di PT Heksa Energi Mitraniaga (2020-2023)
- Direktur dan Chief Financial Officer di Volvo Group Indonesia (2014-2016)
- Financial Controller di PT Trakindo Utama (2010-2014)
- Financial Controller di PT Luxindo Raya (2008-2010)
- Management Controller di PT ICI Paints Indonesia (2004-2008)
- Accounting Manager di PT L'Oreal Indonesia (2003-2004)
- Senior Associate di PricewaterhouseCoopers (1996-2003)

Sahat Pardede

Warga Negara Indonesia, 62 tahun. Menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar Master of Business Administration dari Saint Mary's University, Halifax, Kanada pada tahun 1993 dan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), Jakarta pada tahun 1989. Diangkat sebagai Anggota Komite Audit, *Risk & Compliance* berdasarkan keputusan Dewan Komisaris pada tanggal 11 Desember 2023.

Rangkap Jabatan:

- Tenaga Ahli di PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) (2022 sampai saat ini)
- Anggota Komite Audit di PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (2021 sampai saat ini)
- Tenaga Ahli Dekom / Anggota Komite Audit di Bank BRI (Persero) Tbk (2019 sampai saat ini)
- Anggota Komite Audit di PT AKR Corporindo (2015 sampai saat ini)
- Rekan di Kantor Akuntan Publik (KAP) Sahat Handoko dan Rekan (2001 sampai saat ini)

Pengalaman Kerja:

- Anggota Dewan Standar Profesional Akuntan Publik II (DSPAP II) dari Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) (2019-2021)
- Penasehat Ahli di Komisi Pengawas SKK Migas (2013-2020)
- Ketua dan Anggota Komite Asistensi dan Implementasi Standar Profesi (KAISP) dari Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) (2016-2019)
- Anggota Komite Audit di PT Semen Indonesia (Persero) (2007-2017)
- Anggota Komite Audit di PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (2004-2014)
- Anggota Komite Risiko dan Kepatuhan di Bank BNI (2006- 2007)
- Auditor Pemerintah di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) (1983-2000)

Madelin A. Hardjapamekas

Warga Negara Indonesia, 47 tahun. Menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Trisakti pada tahun 1999. Diangkat sebagai Anggota Komite Audit, *Risk & Compliance* berdasarkan keputusan Dewan Komisaris pada tanggal 11 Desember 2023.

Rangkap Jabatan:

- Anggota Komite Audit di PT Haloni Jane Tbk (2023 sampai saat ini)
- Anggota Komite Audit di PT Hetzer Medical Indonesia Tbk (2023 sampai saat ini)
- Anggota Komite Audit di PT Semacom Integrated Tbk (2021 sampai saat ini)

Pengalaman Kerja:

- *Senior Cost Control Specialist* di ConocoPhillips Indonesia – Suban Compression Project (2015-2020)
- *Senior Cost Control Specialist* di ConocoPhillips Indonesia – Dayung Compression & Central Gas Plant Debottleneck Project (2012-2015)
- *Cost Control Specialist* di ConocoPhillips Indonesia – Gas Concord Turret Integration Project (2011)
- *Cost Control Specialist* di ConocoPhillips Indonesia – Belanak & Belida FSO Project (2003-2011)
- *Tax & Assistant Accountant* di PT Saipem Indonesia (2001-2003)
- Konsultan Pajak Profesional di Deloitte Touche Tax & Management Consultants (1999-2001)
- *Apprenticeship/intern* di Price Waterhouse Public (1997- 1998)
- Akuntan Publik di S. Mannan, Sumantri & Rekan (1997)

No.	Tugas	Uraian
1.	Laporan Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan dan informasi keuangan lainnya; 2. Melakukan penelaahan bersama manajemen, Internal Audit dan Eksternal Auditor atas hasil audit termasuk kesulitan yang dihadapi; 3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Eksternal Auditor atas jasa yang diberikannya; 4. Melakukan penelaahan atas laporan tahunan untuk meyakinkan kecukupan konsistensi dan keakuratan informasi.

No.	Tugas	Uraian
2.	Penunjukan dan Kinerja Auditor Eksternal	Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan KAP dan auditor eksternal, dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh auditor eksternal
3.	Sistem Pengendalian Internal	Memonitor, menelaah dan mendiskusikan dengan manajemen, internal auditor dan eksternal auditor mengenai kecukupan dan efektivitas pengendalian internal atas laporan keuangan, termasuk adanya defisiensi baik dalam desain dan implementasi maupun operasi, yang dapat mengganggu kemampuan Perseroan dalam mencatat, memproses, mengikhtisarkan dan melaporkan informasi keuangan
4.	Audit Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meninjau piagam audit internal sebelum disetujui oleh Dewan Komisaris; 2. Menyetujui cakupan tugas dan program tahunan fungsi audit internal; 3. Memantau efektivitas kerja audit internal Perseroan; 4. Memberikan pendapat dan saran kepada Dewan Komisaris untuk bahan pertimbangan dalam memberikan persetujuan terhadap pengangkatan dan pemberhentian Kepala unit Audit Internal; 5. Melakukan penelaahan terhadap setiap laporan audit internal yang disampaikan kepada Dewan Komisaris dalam hal ini Komite Audit, Risk & Compliance termasuk setiap laporan mengenai penyimpangan yang disampaikan kepada Direksi; 6. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.
5.	Pengaduan	Melakukan penelaahan dan diskusi dengan manajemen, audit internal dan atau audit eksternal tentang pencegahan, pendeteksian dan tindak lanjut penanganan laporan pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan, serta kasus-kasus hukum dan litigasi yang signifikan yang dihadapi Perseroan (apabila ada).
6.	Manajemen Risiko	Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi serta melakukan pengkajian terhadap pelaksanaan tindakan mitigasi risiko yang dilakukan oleh Direksi.

Sekretaris Perusahaan

Berdasarkan Keputusan Direksi Pengganti Rapat Direksi Perseroan No. PTP/RES/BOD/VIII/2014-0006 tertanggal 19 Agustus 2014, Direksi Perseroan telah menyetujui pengangkatan Anto Broto sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan sebagaimana disyaratkan dalam POJK No. 35/2014.

Riwayat Singkat

Warga negara Indonesia, 53 tahun. Telah menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar Magister Manajemen dari Universitas Prasetya Mulya pada tahun 2021 dan Sarjana Ekonomi & Akuntansi dari Universitas Indonesia pada tahun 1995.

Pengalaman Kerja:

- Investor Relations Senior Manager PT Indika Energy Tbk (2009-2014)
- Direktur PT Tavesco International serta Vice President of Finance PT Tason Holding (2005-2009)
- Direktur Keuangan PT Calmusindo Energy Services (2003-2005)
- Direktur Keuangan PT Syahrir Securities (1995-2003).

Selama karirnya, beliau memperoleh beberapa lisensi di bidang pasar modal.

Berikut dibawah ini merupakan program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Sekretaris Perusahaan selama tahun 2023 :

Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi :	
1	Sosialisasi POJK Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas POJK Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (ICSA)
2	Sosialisasi POJK 9 tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan (OJK)
3	Sosialisasi Peraturan Bursa Nomor I-V Ketentuan Khusus Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat di Papan Akselerasi (PT Bursa Efek Indonesia)

Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi :	
4	<i>Compliance Refreshment</i> (PT Bursa Efek Indonesia)
5	Sosialisasi eASY.KSEI (KSEI)
6	<i>Listed Companies Compliance Refreshment</i> (ICSA)
7	<i>Accelerating Net Zero and Unlocking Indonesia Carbon Market Potential Through IDX Carbon</i> (Indonesia Carbon Exchange)
8	Sosialisasi Ketentuan dan Pelaporan <i>Free Float</i> (PT Bursa Efek Indonesia)
9	Sosialisasi POJK No. 13/2023 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Pada Kondisi Pasar Yang Berfluktuasi Signifikan (OJK)
10	Sosialisasi POJK No. 14/POJK.04/2023 tentang Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon dan SEOJK No. 12/SEOJK.04/2023 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Perdagangan Karbon (OJK)
11	Sosialisasi SEOJK Nomor 13/SEOJK.04/2023 tentang Pembelian Kembali Saham Perusahaan Terbuka Sebagai Akibat Dibatalkannya Pencatatan Efek oleh Bursa Efek karena Kondisi atau Peristiwa yang Signifikan Berpengaruh Negatif terhadap Kelangsungan Usaha (OJK)
12	Sosialisasi POJK Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan (OJK)
13	Sosialisasi SEOJK Nomor 18/SEOJK.03/2023 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan (OJK)
14	Economic Outlook 2024: Penguatan Ekonomi Indonesia (ICSA)

Fungsi Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang pasar modal;
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi: (i) keterbukaan informasi kepada Masyarakat termasuk ketersediaan informasi pada situs web Perseroan; (ii) penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu; (iii) penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS; (iv) penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan (v) pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
4. Sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, OJK dan pemangku kepentingan lainnya.

Informasi mengenai kontak Sekretaris Perusahaan Perseroan adalah sebagai berikut:

Alamat : Indy Bintaro Office Park, Gedung B
Jl. Boulevard Bintaro Jaya, Blok B7/A6
Sektor VII, CBD Bintaro Jaya
Tangerang Selatan 15224, Indonesia
Telepon : +62 21 2977 0999
Faksimili : +62 21 2977 0988
Email : corporate.secretary@petrosea.com
U.P. : Sekretaris Perusahaan

Unit Audit Internal

Perseroan memiliki Unit Audit Internal yang dikepalai oleh Muhammad Faisal Erlantara sesuai POJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal. Diangkat sebagai Kepala Unit Audit Internal pada 11 Agustus 2023 sesuai dengan Surat Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Unit Audit Internal oleh Presiden Direktur atas persetujuan Dewan Komisaris.

Berikut riwayat singkat mengenai kepala Unit Audit Internal :

Warga negara Indonesia, 38 tahun. Telah menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia pada tahun 2008. Beliau juga memperoleh *Certified Internal Auditor* (CIA) dari The Institute of Internal Auditors Inc. pada tahun 2017, *Certified Information Systems Auditor* (CISA) dari ISACA pada tahun 2021 serta *Certified in Risk Management Assurance* (CRMA) dari The Institute of Internal Auditors Inc. pada tahun 2022.

Pengalaman Kerja:

- Senior Internal Assurance Manager Perseroan (2022-2023)
- Unit Audit Internal Perseroan (2011-2022)
- Auditor di kantor RSM Indonesia (dahulu RSM AAJ Associates) (2008-2011)

Manajemen Risiko

Perseroan secara konsisten memastikan implementasi sistem manajemen risiko yang efektif untuk mendukung strategi digitalisasi dan diversifikasi, serta inisiatif yang berhubungan dengan *Environmental, Social & Governance* (ESG):

1. Komunikasi dan konsultasi – tepat waktu dan memastikan bahwa informasi relevan telah dikumpulkan, disusun, dipadukan, dan dibagikan sebagaimana mestinya, dan bahwa umpan balik telah diperoleh, serta langkah peningkatan telah dilaksanakan
2. Lingkup, konteks, dan kriteria – ruang lingkup proses, pemahaman konteks eksternal dan internal, serta penentuan kriteria dampak dan kemungkinan
3. Penilaian risiko - keseluruhan proses identifikasi risiko, analisa risiko dan evaluasi risiko harus dilakukan secara sistematis:
 - a. Identifikasi – untuk menemukan, mengenali dan menggambarkan risiko dan peluang
 - b. Analisis – melibatkan pertimbangan terperinci tentang ketidakpastian, sumber risiko, konsekuensi, kemungkinan, peristiwa, skenario, kontrol, dan keefektifannya
 - c. Evaluasi – membandingkan hasil analisis risiko dengan kriteria risiko dan peluang yang ditetapkan untuk menentukan di mana tindakan tambahan diperlukan (berdasarkan prioritas risiko)
 - d. Penanganan – rencana untuk mengelola risiko dan peluang
4. Memantau dan meninjau – menyematkan proses peninjauan berkelanjutan yang berkembang sebagai respons terhadap gangguan dan perkembangan baru di seluruh lingkungan digital, persyaratan hukum dan peraturan
5. Pencatatan dan pelaporan - proses manajemen risiko dan hasilnya harus didokumentasikan dan dilaporkan melalui mekanisme yang sesuai.

Jenis Risiko & Pengelolaannya		
Jenis Risiko	Penjelasan Jenis Risiko	Mitigasi Risiko
Risiko Utama Perseroan		
Risiko Menurunnya permintaan Batu bara dan Mineral	Penurunan permintaan batubara dan mineral khususnya untuk termal coal disebabkan oleh peralihan menuju energi terbarukan, kebijakan pemerintah yang mendukung energi bersih, dan fluktuasi ekonomi global. Hal ini dapat berdampak pada penurunan harga komoditas batubara termal dan menurunnya pendapatan Perseroan.	<ul style="list-style-type: none"> • Diversifikasi Usaha: Mengembangkan bisnis coking coal dan ke sektor mineral lain seperti nikel dan emas. • Efisiensi Operasional: Menekan biaya produksi untuk mempertahankan daya saing. • Pemantauan Pasar: Menyesuaikan strategi sesuai perubahan pasar dan kebijakan.
Risiko Terkait Kegiatan Usaha Perseroan		
• Efektivitas Operasi	<p>Infrastruktur yang buruk di daerah terpencil dapat menyebabkan penundaan dan peningkatan biaya operasional.</p> <p>Manajemen proyek yang buruk dapat menyebabkan keterlambatan, terutama dalam hal regulasi dan ada kepentingan Masyarakat yang tidak diakomodir dengan baik.</p> <p>Kesalahan perencanaan dan perubahan scope proyek bisa meningkatkan biaya secara signifikan.</p> <p>Alokasi sumber daya yang tidak efisien dapat menghambat proyek dan menurunkan produktivitas.</p>	<p>Melakukan survei awal, kerjasama dengan pihak lokal, dan pertimbangkan investasi infrastruktur.</p> <p>Meningkatkan perencanaan dan pengawasan proyek serta bangun hubungan baik dengan pihak berwenang dan Masyarakat.</p> <p>Melakukan perencanaan biaya yang akurat dan monitoring ketat, serta siapkan dana darurat.</p> <p>Mengoptimalkan manajemen sumber daya, berikan pelatihan, dan pemantauan secara berkala.</p>

Jenis Risiko & Pengelolaannya		
Jenis Risiko	Penjelasan Jenis Risiko	Mitigasi Risiko
<ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan dan Kinerja 	<p>Produktivitas peralatan yang rendah, akibat kurangnya keterampilan operator atau pelatihan yang tidak memadai, dapat menyebabkan penundaan dan peningkatan biaya operasional.</p> <p>Kerusakan mekanis, terutama di lokasi terpencil dengan fasilitas perbaikan terbatas, dapat mengganggu operasi dan menurunkan efisiensi, terutama pada peralatan yang sudah tua dan membutuhkan pemeliharaan lebih sering.</p> <p>Penundaan pengadaan suku cadang dan manajemen inventaris yang buruk dapat menghentikan operasi dan memperlambat proyek, terutama di lokasi terpencil dengan tantangan logistik.</p>	<p>Melakukan pelatihan rutin untuk operator, menggunakan teknologi monitoring, dan memastikan ketersediaan tenaga kerja terampil.</p> <p>Menerapkan pemeliharaan preventif, menggunakan manajemen perawatan berkala, dan memperbarui peralatan yang sudah tua.</p> <p>Manajemen inventaris yang efektif, menjaga hubungan dengan pemasok, dan mempertimbangkan opsi pengadaan lokal untuk mengurangi keterlambatan.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Harga Batu bara, Bahan Bakar dan Mineral 	<p>Harga batu bara yang fluktuatif di pasar global dapat memengaruhi pendapatan dan profitabilitas klien, sehingga berdampak pada pemesanan jasa pertambangan dan rekayasa dan konstruksi dari Perseroan.</p> <p>Kenaikan harga bahan bakar meningkatkan biaya operasional klien, yang dapat mempengaruhi volume kontrak jasa pertambangan yang diterima Perseroan.</p> <p>Harga mineral yang tidak stabil dapat membuat klien menunda atau membatalkan proyek, yang berdampak pada jumlah dan nilai kontrak jasa yang dapat ditawarkan Perseroan.</p>	<p>Perseroan tidak terpapar langsung oleh fluktuasi harga bahan bakar dan mineral, karena kontrak jasa yang diberikan kepada klien adalah kontrak jasa dengan harga tetap (<i>fixed cost</i>), dimana biaya bahan bakar ditanggung oleh klien serta atau kontrak <i>cost-plus</i>. Hal ini memastikan pendapatan Perseroan tetap stabil meskipun terjadi kenaikan harga-harga ini.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Kondisi cuaca 	<p>Hujan lebat dan banjir yang sering terjadi di Indonesia dapat menghentikan operasi pertambangan dan proyek rekayasa dan konstruksi, merusak peralatan, infrastruktur, serta mengganggu kelancaran operasional.</p>	<p>Perseroan mengatasi risiko ini melalui perencanaan matang, pembangunan infrastruktur tahan cuaca, pemantauan cuaca serta prosedur tanggap darurat untuk meminimalkan dampak negatif kondisi cuaca terhadap operasional.</p>
Risiko Umum		
<ul style="list-style-type: none"> • Ekonomi Makro 	<p>Risiko ekonomi makro meliputi perubahan inflasi dan suku bunga yang dapat meningkatkan biaya operasional dan beban pinjaman, sehingga mengurangi profitabilitas perusahaan.</p>	<p>Perseroan mengatasi risiko ini melalui diversifikasi <i>service</i> (Pertambangan dan rekayasa dan konstruksi), manajemen keuangan yang disiplin, serta penyesuaian anggaran secara berkala untuk menjaga stabilitas keuangan.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan Ekonomi Global 	<p>Perlambatan pertumbuhan ekonomi global dapat menurunkan permintaan dan harga komoditas seperti batu bara dan mineral, yang berdampak negatif pada pendapatan dan profitabilitas sektor pertambangan dan rekayasa dan konstruksi di Indonesia.</p>	<p>Strategi mitigasi meliputi peningkatan efisiensi operasional, fokus pada proyek-proyek dari group sendiri yang lebih <i>favorable</i> dan berjangka panjang.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Energi Terbarukan / Substitusi Produk 	<p>Dengan meningkatnya kesadaran global terhadap perubahan iklim dan peralihan ke energi terbarukan, permintaan untuk batu bara sebagai sumber energi fosil dapat menurun</p>	<p>Perseroan melakukan diversifikasi jasa tidak hanya di sektor batu bara tetapi ke pertambangan mineral lain, selain proyek-proyek rekayasa dan konstruksi yang terkait dengan infrastruktur, energi non-batu bara dan meningkatkan efisiensi operasional.</p>

Tinjauan atas Efektivitas Sistem

Perseroan melakukan tinjauan atas efektivitas Sistem Manajemen Risiko secara berkala. Evaluasi dilakukan secara independen dan komprehensif melalui proses audit internal dan audit eksternal, dan mencakup aspek Sistem Manajemen Mutu ISO 9001, Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001, Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja ISO 45001, Sistem Manajemen Anti Penyusunan ISO 37001 serta Sistem Manajemen Aset ISO 55001. Hasil peninjauan disampaikan secara tahunan kepada Komite Audit, *Risk & Compliance*, yang kemudian menyampaikan hasil evaluasinya kepada Dewan Komisaris.

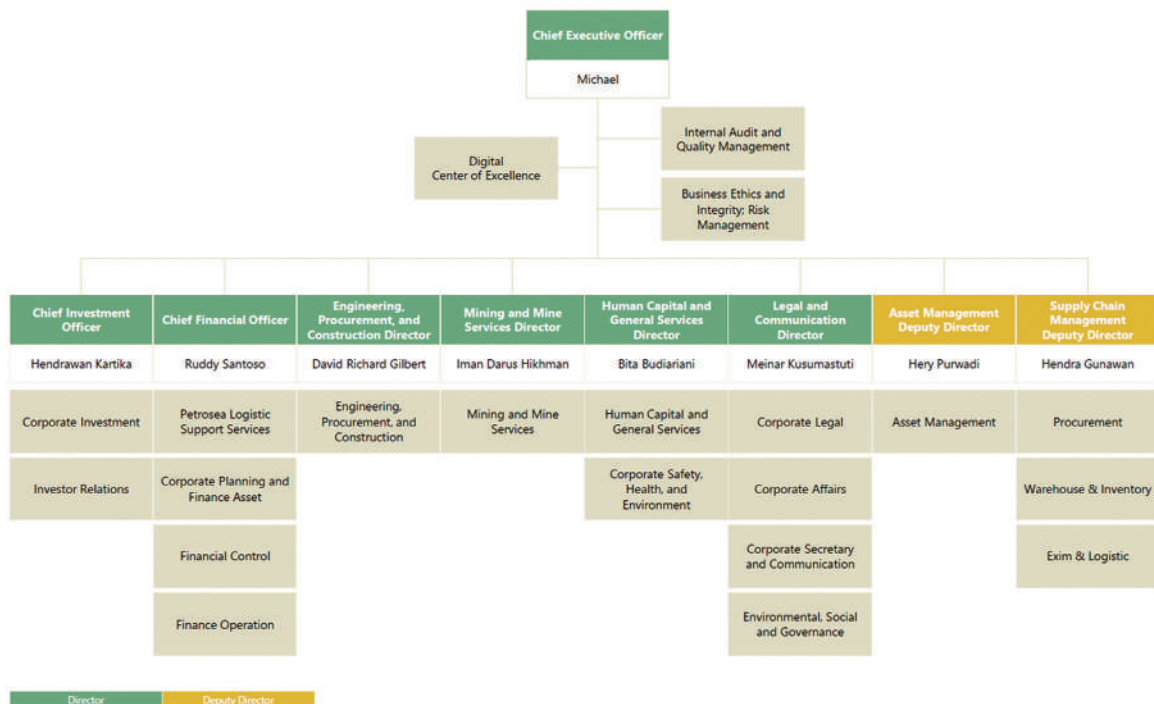
Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atau Komite Audit

Berdasarkan telaah Komite Audit, *Risk & Compliance* yang telah disampaikan kepada Dewan Komisaris pada tanggal 21 Maret 2024, Perseroan menyatakan Sistem Manajemen Risiko Perseroan telah berjalan efektif dan mencukupi kebutuhan Perseroan selama tahun 2023, serta tidak ada defisiensi signifikan yang teridentifikasi. Dewan Komisaris akan terus memantau perkembangan Sistem Manajemen Risiko Perseroan melalui telaah Komite Audit, *Risk & Compliance*.

Hingga Prospektus ini diterbitkan, tidak ada kontrak terkait imbalan kerja setelah masa kerja berakhir.

6. Struktur Organisasi

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Berikut ini adalah struktur organisasi Perseroan:



7. Sumber Daya Manusia

Tabel berikut ini menunjukkan perkembangan komposisi karyawan menurut jenjang jabatan, usia, pendidikan, status, aktivitas utama dan lokasi untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022:

Komposisi Karyawan Tetap Menurut Jenjang Jabatan

Keterangan	30 Juni 2024		31 Desember 2023		31 Desember 2022	
	Perseroan	Perusahaan Anak	Perseroan	Perusahaan Anak	Perseroan	Perusahaan Anak
General Manager	26	2	27	2	31	1
Manager	158	9	140	8	130	9
Superintendent	292	42	277	43	224	39
Supervisor / Senior Engineer	692	18	650	17	532	9
Foreman / Engineer / Officer	841	228	765	239	742	238
Junior Staff	37	11	64	11	49	14
Operator / Juru Tulis / Non Staff	4.387	1.609	3.465	1.815	2.415	1.929
Jumlah	6.433	1.919	5.388	2.135	4.123	2.239

Komposisi Karyawan Tetap Menurut Usia

Keterangan	30 Juni 2024		31 Desember 2023		31 Desember 2022	
	Perseroan	Perusahaan Anak	Perseroan	Perusahaan Anak	Perseroan	Perusahaan Anak
< 20 Tahun	16	3	23	4	10	4
20 – 30 Tahun	1.710	384	1.441	445	1.038	497
31 – 40 Tahun	2.632	572	2.283	666	1.869	719
41 – 50 Tahun	1.713	718	1.370	757	1.022	749
51 – 55 Tahun	304	234	232	251	169	260
> 55 Tahun	58	8	39	12	15	10
Jumlah	6.433	1.919	5.388	2.135	4.123	2.239

Komposisi Karyawan Tetap Menurut Jenjang Pendidikan

Keterangan	30 Juni 2024		31 Desember 2023		31 Desember 2022	
	Perseroan	Perusahaan Anak	Perseroan	Perusahaan Anak	Perseroan	Perusahaan Anak
S3	-	-	-	-	1	-
S2	82	5	77	6	69	5
S1	1.319	215	1.181	225	1.018	214
Diploma	384	110	364	120	336	115
SMA	4.182	1.471	3.495	1.652	2.529	1.760
Lain-lain	466	118	271	132	170	145
Jumlah	6.433	1.919	5.388	2.135	4.123	2.239

Komposisi Karyawan Menurut Aktivitas Utama dan Lokasi

Keterangan	30 Juni 2024		31 Desember 2023		31 Desember 2022	
	Perseroan	Perusahaan Anak	Perseroan	Perusahaan Anak	Perseroan	Perusahaan Anak
Jawa Timur	2.455	-	1.060	-	134	-
Kalimantan Barat	-	-	-	-	6	-
Kalimantan Tengah	19	-	-	-	-	-
Kalimantan Timur	2.693	452	3.081	435	2.695	460
Kalimantan Utara	158	594	176	782	164	800
Maluku Utara	212	-	233	-	157	-
Nusa Tenggara Barat	3	-	51	-	3	-
Papua	245	860	255	904	215	970
Papua Barat	101	-	103	-	123	-
Sorong	79	-	-	-	-	-
Sulawesi Selatan	-	2	-	2	-	2
Sulawesi Tengah	77	-	41	-	12	-
Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	229	-
Tangerang Selatan	391	11	388	12	385	7
Jumlah	6.433	1.919	5.388	2.135	4.123	2.239

Komposisi Karyawan Menurut Status Kepegawaian

Keterangan	30 Juni 2024		31 Desember 2023		31 Desember 2022	
	Perseroan	Perusahaan Anak	Perseroan	Perusahaan Anak	Perseroan	Perusahaan Anak
Permanen	3.394	1.522	3.518	1.606	3.246	1.277
Kontrak	3.039	397	1.870	529	877	962
Jumlah	6.433	1.919	5.388	2.135	4.123	2.239

Perseroan tidak memiliki pegawai dengan keahlian khusus yang dengan ketidakteradannya, dapat mengganggu kelangsungan kegiatan operasional/usahanya.

Tenaga kerja asing

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki beberapa tenaga kerja asing. Berikut adalah komposisi tenaga kerja asing yang sedang dipekerjakan oleh Perseroan:

No.	Nama	Warga Negara	Jabatan	Dokumen Perizinan
1	Dale Brian Munting	Selandia Baru	Manajer Komersial	- ITAS No. 2C21JB0836-A, berlaku hingga 22 Juni 2025 - RPTKA No. B.3/065892/PK.04.01/V/2024, berlaku hingga 22 Juni 2025
2	David Richard Gilbert	Australia	Manajer Pengembangan Bisnis	- ITAS No. 2C221JE6601-A, berlaku hingga 12 Juni 2025 - RPTKA No. B.3/060384/PK.04.01/V/2024, berlaku hingga 12 Juni 2025
3	Nicola Moussious	Australia	Manajer Konstruksi Lainnya	- ITAS No. 2C21JE6188-A, berlaku hingga 9 Juni 2025 - RPTKA No. B.3/057357/PK.04.01/V/2024, tanggal 15 Mei 2024, berlaku hingga 9 Juni 2025
4	Simon Neil Megginson	Inggris	Manajer Proyek	- KITAP No. 2D21AF0098-U, pelaporan berikutnya 29 Oktober 2025 - RPTKA No. B.3/057357/PK.04.01/V/2024, berlaku hingga 23 Juli 2025
5	William Jason Tei	Australia	Manajer Operasi	- ITAS No. 2C21JE0479AA, berlaku hingga 9 September 2025 - RPTKA No. B.3/091883/PK.04.01/VIII/2023, berlaku hingga 9 September 2025
6	Daniel Frederick Britz	Afrika Selatan	Manajer Koordinator Proyek	- ITAS No. 2C11EE0340-X, berlaku hingga 5 Desember 2024 - RPTKA No. B.3/153062/PK.04.01/XI/2023, berlaku hingga 5 Desember 2024
7	Grant David Hansen	Australia	Manajer Pemeliharaan	- ITAS No. J1U1SAEP79361, berlaku hingga 5 Desember 2024 - RPTKA No. B.3/149557/PK.04.01/XI/2023, berlaku hingga 5 Desember 2024
8	Johannes Marthinys Dippenaar	Afrika Selatan	Manajer Konstruksi Lainnya	- ITAS No. 2C21FF0008-A, berlaku hingga 26 Juni 2025 - RPTKA No. B.3/060383/PK.04.01/V/2024 tanggal 20 Mei 2024, berlaku hingga 26 Juni 2025
9	Neil James Harvey	Inggris	Manajer Pengendalian Proyek Lokasi	- ITAS No. 2C11DF0023GA, berlaku hingga 20 Mei 2025 - RPTKA No. B.3/057178/PK.04.01/V/2024, berlaku hingga 20 Mei 2025
10	Neil James Mccallum	Selandia Baru	Inspektur Umum	- ITAS No. 2C21FF0017-X, berlaku hingga 25 Desember 2024 - RPTKA No. B.3/146694/PK.04.01/XI/2023, berlaku hingga 25 Desember 2024
11	Sybrandt Roodt	Afrika Selatan	Manajer Pemeliharaan	- ITAS No. 2C11DD0104GA, berlaku hingga 3 Agustus 2025 - RPTKA No. B.3/094654/PK.04.01/VII/2024, berlaku hingga 3 Agustus 2025
12	Timothy Jon Bradshaw	Inggris	Manajer Koordinator Proyek	- ITAS No. 2C21CD1796-X, berlaku hingga 3 Januari 2025 - RPTKA No. B.3/156225/PK.04.01/XII/2023, berlaku hingga 3 Januari 2025
13	William Robert Gibbs	Inggris	Manajer Koordinator Proyek	- ITAS No. 2C21D10348-A, berlaku hingga 20 Juli 2025 - RPTKA No. B.3/076218/PK.04.01/VI/2024, berlaku hingga 20 Juli 2025

Kesejahteraan Karyawan

Kesejahteraan karyawan senantiasa menjadi prioritas utama bagi Perseroan, dimana Perseroan selalu berupaya untuk mengedepankan aspek kesejahteraan dan kesehatan seluruh karyawan dan keluarga, baik secara fisik maupun mental.

Peningkatan kompetensi, kualifikasi dan kesejahteraan dengan dukungan lingkungan kerja yang aman, sehat, inklusif dan setara merupakan salah satu inisiasi yang selalu dikembangkan oleh Perseroan.

Perseroan menetapkan kebijakan remunerasi secara adil dan merata berdasarkan tingkat jabatan, masa kerja, beban kerja, lokasi kerja, hingga kinerja setiap karyawan, termasuk menentukan besaran nilai gaji pokok karyawan berdasarkan matriks gaji yang disesuaikan dengan survei pasar pada tahun berjalan.

Karyawan laki-laki maupun Perempuan memiliki rasio perbandingan gaji pokok yang sama yakni 1:1. Hal ini berlaku juga terhadap pemberian fasilitas (paket kesejahteraan, upah, dan hak cuti) yang diterima oleh karyawan *staff* maupun *non-staff*.

Sebagai bentuk nyata dari komitmen dalam memastikan kesejahteraan karyawan, Perseroan juga mengimplementasikan program *health benefit* dan *tax benefit* untuk karyawan. Selain itu, pada tahun 2023 Perseroan juga bekerja sama dengan institusi kesehatan jiwa untuk menilai tingkat kesehatan jiwa karyawan, serta melaksanakan berbagai kampanye dan *workshop* terkait *stress management* dan *employee self-care*, sertaterus berkomitmen untuk mengimplementasikan program Petrosea Active Challenge (PACE) yang fokus kepada peningkatan tingkat kesehatan karyawan melalui penerapan gaya hidup yang sehat.

Pemberian program kesehatan mental serta strategi remunerasi dan benefit yang kompetitif oleh Perseroan ditujukan tidak hanya untuk meningkatkan retensi karyawan, namun juga untuk menjadikan Perseroan sebagai perusahaan pilihan di industri saat ini.

Berikut dibawah ini merupakan rincian atas paket remunerasi yang diberikan oleh Perseroan:

Paket Remunerasi Perseroan									
Komponen	Status Karyawan		Lokasi		Periode Kalkulasi			Tipe	
	Staff	Non-Staff	Kantor	Proyek	Harian	Bulanan	Tahunan	Tetap	Variabel
Umum									
Basic Salary	√	√	√	√	-	√	-	√	-
Overtime		√	√	√	√	-	-	-	√
Tunjangan / Allowance									
Daily / Site Allowance	√	-	√	√	√	-	-	-	√
Communication Allowance	√	-	√	√	-	√	-	-	√
Position Allowance	√	-	√	√	-	√	-	-	√
Car Allowance	√	-	√	-	-	√	-	-	√
Responsibility Allowance	√	-	√	√	√	-	-	-	√
Out of Camp Compensation	√	√	-	√	√	-	-	-	√
Out of Town Compensation	√	√	-	√	√	-	-	-	√
BP Compensation	√	√	-	√	√	-	-	-	√
Papua Compensation	√	√	-	√	√	-	-	-	√
Highland Allowance	√	√	-	√	√	-	-	-	√
Meal Allowance	√	√	√	√	√	-	-	-	√
Transportation Allowance	√	√	√	√	√	-	-	-	√
Accommodation & Transportation Compensation	√	√	-	√	√	-	-	-	√
Natura Allowance	√	√	-	√	-	√	-	-	√
Tax Borne by Company	√	√	√	√	-	√	-	-	√
BPJS Tenaga Kerja (JK, JKK, JKM)	√	√	√	√	-	√	-	√	-
BPJS Pension	√	√	√	√	-	√	-	√	-
BPJS Kesehatan	√	√	√	√	-	√	-	√	-
Bonus & Insentif / Bonus & Incentive									
Festive Bonus (THR)	√	√	√	√	-	-	√	-	√
DOH Bonus	√	√	√	√	-	-	√	-	√
Five Years Bonus	√	√	√	√	-	-	√	-	√
Petrosea Bonus (P-BOS)	√	-	√	√	-	-	√	-	√
Mining Incentive Scheme (MIS) Bonus	-	√	-	√	-	√	-	-	√
Daily Without Accident (DWA) Bonus	-	√	-	√	-	√	-	-	√

Paket Remunerasi Perseroan									
Komponen	Status Karyawan		Lokasi		Periode Kalkulasi			Tipe	
	Staff	Non-Staff	Kantor	Proyek	Harian	Bulanan	Tahunan	Tetap	Variabel
Media & Asuransi / Medical & Insurance									
<i>Inpatient</i>	√	√	√	√	-	-	-	-	-
<i>Outpatient, Glasses, Maternity, and Pre & Post Maternity</i>	√	√	√	√	-	-	-	-	-
<i>Personal Accident & Group Term Life (PA &GTL)</i>	√	√	√	√	-	-	-	-	-
<i>Mental Health</i>	√	√	√	√	-	-	-	-	-

Selain itu, Perseroan juga terus memberikan kesempatan yang sama kepada setiap karyawan untuk berkembang dengan menyediakan pengembangan karir melalui jalur lateral dan vertikal. Untuk memaksimalkan kesempatan tersebut, Human Capital & General Services (“HCGS”) Perseroan melaksanakan program pendidikan dan pelatihan bagi karyawan yang fokus terhadap peningkatan kemampuan kepemimpinan, pembangunan karakter dan kemampuan analisis digital. Tabel dibawah ini menggambarkan kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi karyawan Perseroan:

Kegiatan Pendidikan & Pelatihan				
Keterangan	Satuan	30 Juni 2024	2023	2022
Jumlah Pelatihan	Pelatihan	692	898	627
Jumlah Jam Pelatihan	Jam	210.529	401.101	324.251
Jumlah Karyawan	Orang	6.297	5.388	4.123
Rata-rata Jam Pelatihan	Jam/Total Karyawan	33.43	78,89	42,84
Jumlah Biaya Pelatihan	USD	32.010,40	121.785,37	344.580

Petrosea Academy (“PetA”)

PetA bertugas untuk mendesain, merencanakan dan menjalankan program-program pelatihan dan sertifikasi di Perseroan. Saat ini, terdapat dua lembaga di bawah naungan PetA, yaitu:

- **Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) – P2**

Tahun 2023, PetA melalui Lembaga Sertifikasi Profesi (“LSP”) telah memperluas kapabilitasnya dengan menjalankan sembilan skema sertifikasi yang sebelumnya telah diluncurkan pada tahun 2022. Saat ini LSP Perseroan telah memiliki 21 skema sertifikasi yang telah diverifikasi oleh Badan Nasional Sertifikasi (BNSP).

Berikut 12 (dua belas) skema sertifikasi tersebut:

1. Skema *Pipe Welder*
2. Skema Pengoperasian *Crane Mobil*
3. Skema Operator *Dump Truck*
4. Skema Pengoperasian *Flatbed*
5. Skema Pengoperasian Kendaraan Ringan
6. Skema Teknisi Ruang Terbatas
7. Skema Penerapan K3 Dalam Pekerjaan Ketinggian
8. Skema Pemeriksaan Kecelakaan Tambang
9. Skema Pengambilan Contoh Air
10. Skema Instruktur
11. Skema Ahli K3
12. Skema *Operator Crane Mobil s/d 35T*
13. Skema *Operator Crane Mobil s/d 70T*
14. Skema *Operator Crane Mobil >70T*
15. Skema Pengoperasian *Forklift*
16. Skema Operasi Pemindahan Beban (*Rigger*)
17. Skema *Preventive Maintenance Mechanical* Alat Berat
18. Skema *Preventive AC & Electrical* Alat Berat

19. Skema *Repair & Maintenance Mechanical* Alat Berat
20. Skema *Overhaul Drive Train*
21. Skema *Overhaul* Transmisi Alat Berat

Tingkat aktualisasi LSP pada tahun 2024 telah mencapai 51% dengan 227 asesi yang telah diuji.

- **Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKs)**

Pada tanggal 9 Oktober 2023 LPKs Perseroan telah berhasil diregistrasikan dibawah Dinas Tenaga Kerja kota Balikpapan. Untuk tahun ini LPKs berfokus untuk mengembangkan Pelatihan Berbasis Kompetensi (“PBK”) yang secara sah menurut hukum, dimana program-program pelatihan yang dikembangkan bertujuan untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan.

Berikut ini adalah PBK yang telah dikembangkan dan diregistrasikan pada Kementerian Ketenagakerjaan, yaitu:

1. Pengelasan Pelat dan Pipa
2. Pengoperasian Kendaraan Ringan
3. Pengoperasian Kendaraan Angkutan Barang
4. Pengoperasian *Dump Truck*
5. Pengoperasian *Crane* Mobil

Selain LSP & PBK di atas, PetA juga secara berkelanjutan menjalankan beberapa program-program *Legal Licensing*, *Internal Licensing* dan program-program strategis untuk memastikan operasional yang aman, efektif dan produktif. Berikut ini program-program yang dijalankan:

1. Kartu Izin Pengoperasian Perkakas (KIPP)
2. Kartu Izin Mengoperasikan Peralatan Perusahaan (KIMPER)
3. Pengawas Operasional Pratama (POP) & Pengawas Operasional Madya (POM) Pertambangan
4. *Technical Safety, Health Environment & Rescue*
5. Peningkatan Produksi; Pengembangan / Peningkatan Keterampilan Operator Alat Berat
6. Pengembangan Teknisi Alat Berat / *upskilling*

Learning & Development

Perseroan menyelenggarakan berbagai program *learning & development* melalui PetA, termasuk “*Green*” *Training Program* yang diperuntukan untuk karyawan *nonexperienced & fresh graduate* sebagai berikut:

1. *Graduate Development Program* (GDP) - 56 peserta lulusan S1 untuk *Contract Mining, Asset Management, Engineering Procurement & Construction, SHE dan Human Capital*
2. *Rebuild Technician Traineeship* - 10 peserta lulusan D3 Politeknik
3. *Fabrication Traineeship Program* - 7 peserta lulusan SMK
4. *Technician Development Program* (TDP) - 20 peserta lulusan SMK
5. *Technician Acceleration Program* (TAP) - 7 peserta lulusan D3 Teknik Mesin
6. *Operator Traineeship Program* (OTP) untuk Perseroan dan Perusahaan Anak - 34 peserta lulusan SMU sederajat
7. *Petrosea link & match program* dengan Politeknik Balikpapan (POLTEKBA) jurusan D3 Teknik Mesin Alat Berat - 32 peserta terdiri dari angkatan tahun 2022 & 2023

Learning Management System

Platform *Learning Management System* I-CON juga disediakan untuk mempermudah proses pengembangan karyawan. Platform tersebut merupakan bagian dari HCGS *Digitalization Project*, yaitu inisiatif untuk mendukung strategi Perseroan dengan menyediakan akses ke layanan *human capital* yang lebih efektif dan efisien.

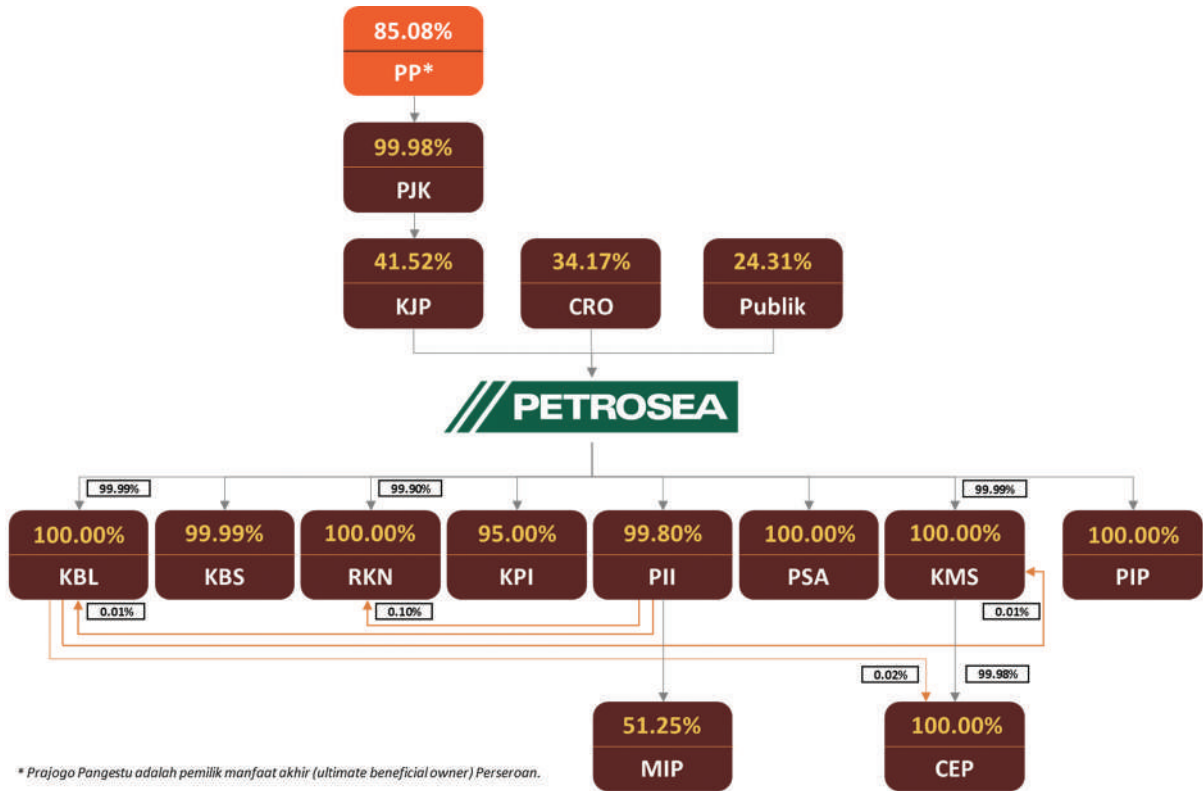
Serikat Pekerja

Sampai dengan Tanggal Prospektus ini, Perseroan tidak mempunyai serikat pekerja.

Hingga Prospektus ini diterbitkan, tidak ada perjanjian yang melibatkan karyawan dan manajemen dalam kepemilikan saham Perseroan termasuk perjanjian yang berkaitan dengan program kepemilikan saham Perseroan oleh karyawan atau anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

8. Struktur Hubungan Kepemilikan, Pengawasan Dan Pengurusan Perseroan Dengan Pemegang Saham

Pada saat Prospektus ini diterbitkan struktur kepemilikan Perseroan adalah sebagai berikut:

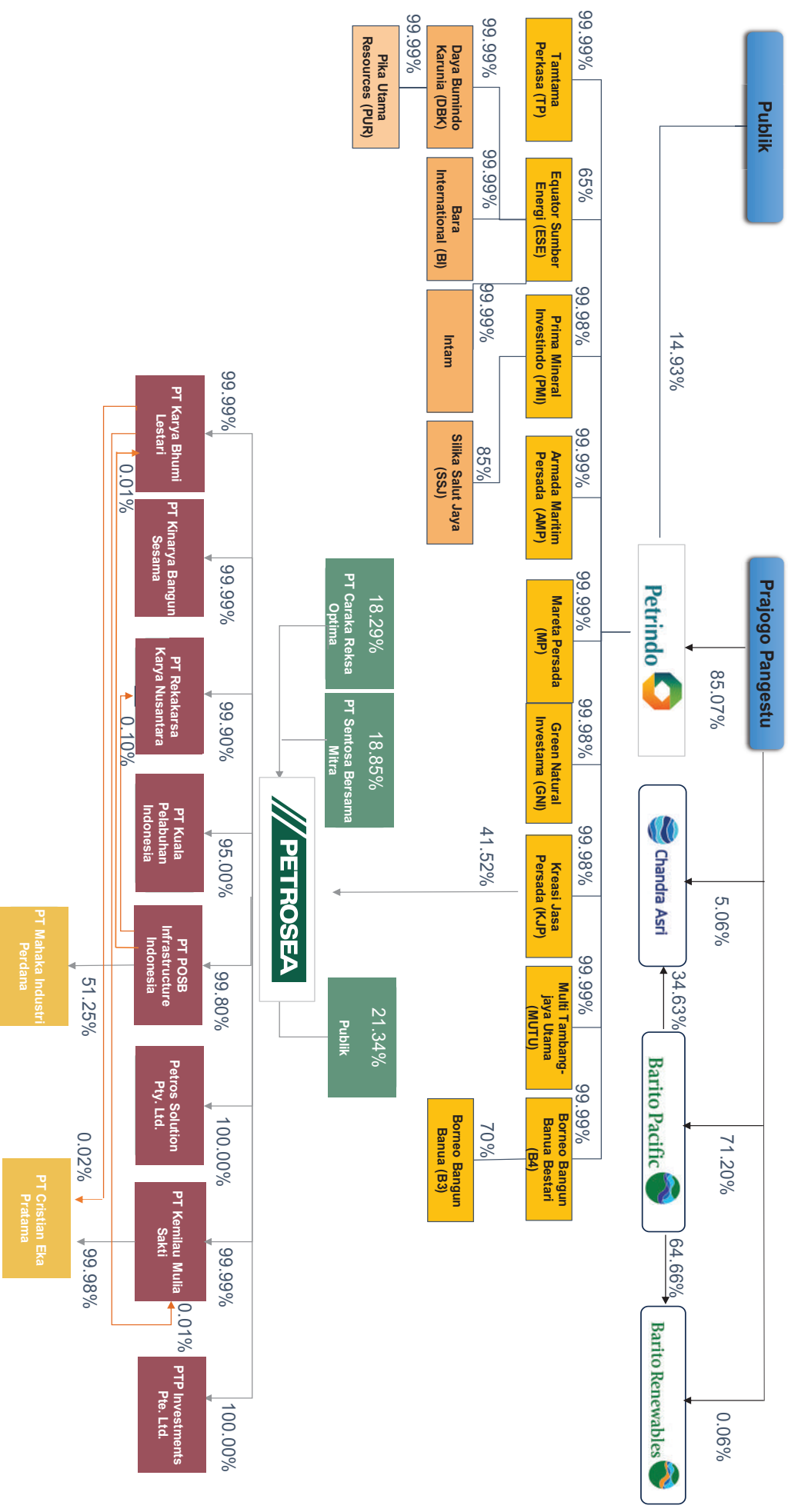


- * Prajogo Pangestu adalah pemilik manfaat akhir (ultimate beneficial owner) Perseroan.
- | | | | |
|-----|--------------------------------|-----|------------------------------------|
| CEP | : PT Cristian Eka Pratama | MIP | : PT Mahaka Industri Perdana |
| CRO | : PT Caraka Reksa Optima | PII | : PT POSB Infrastructure Indonesia |
| KBL | : Karya Bhumi Lestari | PIP | : PTP Investments Pte. Ltd. |
| KBS | : Kinarya Bangun Sesama | PJK | : PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk. |
| KJP | : PT Kreasi Jasa Persada | PP | : Prajogo Pangestu |
| KMS | : PT Kemilau Mulia Sakti | PSA | : Petros Solution Pty. Ltd. |
| KPI | : PT Kuala Pelabuhan Indonesia | RKN | : PT Rekakarsa Karya Nusantara |

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, pengendali Perseroan adalah Prajogo Pangestu melalui kepemilikan sahamnya di PJK yang merupakan pemegang saham 99,98% pada KJP. Prajogo Pangestu, melalui KJP, memiliki kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan kebijakan Perseroan dimana kemampuan tersebut diperoleh berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 7 November 2023, dimana CRO setuju untuk melepaskan kendali atas Perseroan dan menunjuk KJP untuk melakukan pengendalian dan akan bekerja sama dengan KJP untuk memastikan hal tersebut.

Pemilik manfaat akhir (ultimate beneficial owner) Perseroan adalah Prajogo Pangestu sesuai dengan kriteria dalam Pasal 4 ayat (1) huruf (f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, sebagaimana dibuktikan dengan Surat Pernyataan Kepemilikan Manfaat dari Perseroan yang ditandatangani pada tanggal 24 Oktober 2024 yang telah dilaporkan ke sistem Menkumham pada tanggal 25 Oktober 2024.

Pada tanggal 30 Juni 2024, struktur perusahaan sepengendali (*sister company*) adalah sebagai berikut:



Pengendali atas *sister company* Perseroan adalah Prajogo Pangestu.

9. Tabel Hubungan Kepengurusan, Pengawasan, Kepemilikan Antara Perseroan Dan Pemegang Saham Utama Perseroan

Nama	Perseroan	KJP
<u>Dewan Komisaris</u>		
Osman Sitorus	Presiden Komisaris merangkap Komisaris Independen	-
Prof. Ginandjar Kartasasmita	Komisaris	-
Djauhar Maulidi, S.E., M.B.A	Komisaris	-
Erwin Ciputra	Komisaris	Komisaris
Jenderal Pol (Purn.) Drs. Sutanto	Komisaris	-
Setia Untung Arimuladi S.H., M.Hum.	Komisaris Independen	-
<u>Direksi</u>		
Michael	Presiden Direktur	Direktur Utama
Kartika Hendrawan	Direktur	-
Ruddy Santoso	Direktur	-
Meinar Kusumastuti	Direktur	-
Iman Darus Hikhman	Direktur	-

10. Keterangan Singkat Mengenai Pemegang Saham Utama yang Berbentuk Badan Hukum dengan Kepemilikan 20% (dua puluh persen) atau Lebih

a. PT Kreasi Jasa Persada (“KJP”)

Riwayat Singkat

KJP, berkedudukan di Jakarta Barat, adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan dan diatur berdasarkan hukum Republik Indonesia. KJP didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 3 tanggal 3 Agustus 2023, yang dibuat di hadapan Suharyo Adi Nugroho, S.H., M.Kn., M.H., Notaris di Kabupaten Karawang, yang mana telah mendapat pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0056910.AH.01.01.Tahun 2023 tanggal 4 Agustus 2023 dan telah didaftarkan dalam daftar perseroan pada Menkumham No. AHU-0149318.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 4 Agustus 2023 (“**Akta Pendirian KJP**”).

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, anggaran dasar KJP yang terakhir adalah sebagaimana termuat di dalam Akta Pendirian KJP.

KJP berkantor di Gedung Wisma Barito Pacific, Lantai 3B, Jalan Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63, Palmerah, Jakarta 11410, Indonesia.

Berdasarkan Pasal 3 Akta Pendirian KJP, ruang lingkup kegiatan KJP ialah berusaha dalam bidang Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya. Namun, sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, KJP belum menjalankan kegiatan usaha apa pun.

Struktur Permodalan dan Susunan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta Pendirian KJP dan pada saat Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan Pemegang Saham KJP adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per lembar saham		%
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	15.000	15.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
1. CUAN	4.999	4.999.000.000	99,98
2. PT Tamtama Perkasa	1	1.000.000	0,02
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	5.000	5.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Portepel	10.000	10.000.000.000	-

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pendirian KJP, susunan Direksi dan Dewan Komisaris KJP pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Erwin Ciputra

Direksi

Direktur Utama : Michael

Direktur : Diana Arsiyanti

b. PT Caraka Reksa Optima (“CRO”)

Riwayat Singkat

CRO, berkedudukan di Jakarta Utara, adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan dan diatur berdasarkan hukum Republik Indonesia. CRO didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 16 tanggal 29 September 2021, yang dibuat di hadapan Rifein Narwis, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Karawang, yang mana telah mendapat pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0061334.AH.01.01.TAHUN 2021 tanggal 30 September 2021 dan telah didaftarkan dalam daftar perseroan pada Menkumham No. AHU-0168990.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 30 September 2023 (“**Akta Pendirian CRO**”).

Anggaran dasar CRO telah mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana terakhir kali diubah dengan Akta Penyertaan Keputusan Para Pemegang Saham No. 12 tanggal 13 Maret 2024, yang dibuat di hadapan Citra Buana Tungga, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU.0016906.AH.01.02.Tahun 2024 dan diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0063498 yang kedua nya tertanggal 15 Maret 2024, serta telah didaftarkan dalam daftar perseroan pada Menkumham No. AHU-0054891.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 15 Maret 2024 (“**Anggaran Dasar CRO**”).

CRO berkantor di Office Park Thamrin Residence, Blok A01-05, Jl. Thamrin Boulevard, Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat 11410, Indonesia.

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar CRO, ruang lingkup kegiatan CRO ialah berusaha dalam bidang Aktivitas Keuangan dan Asuransi dan Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis. Namun, pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, kegiatan usaha yang saat ini telah benar-benar dijalankan CRO adalah Aktivitas Perusahaan Holding (KBLI 64200) dan Aktivitas Manajemen Lainnya (KBLI 70209).

Struktur Permodalan dan Susunan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Anggaran Dasar CRO, struktur permodalan dan susunan Pemegang Saham CRO adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per lembar saham		%
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	10.310	10.310.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
1. PT Sentosa Bersama Mitra	8.457	8.457.000.000	82,03
2. PT Dua Usaha Karya Negeri	1.387	1.387.000.000	13,45
3. PT Tata Masa Nusantara	466	466.000.000	4,52
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	10.310	10.310.000.000	100,00
Jumlah Saham Portepel	-	-	-

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 52 tanggal 12 Oktober 2023, yang dibuat di hadapan Ungke Mulawanti, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bekasi, dan telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0173020 tanggal 12 Oktober 2023, serta telah didaftarkan dalam daftar perseroan pada Menkumham No. AHU-0203065.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 12 Oktober 2023, susunan Direksi dan Dewan Komisaris CRO pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : M. Oka Lesmana Firdauzi

Direksi

Direktur Utama : Ogi Rulino

11. Keterangan Tentang Perusahaan Anak

Pada tanggal 30 Juni 2024, Perseroan memiliki 10 Perusahaan Anak dengan pernyataan secara langsung dan tidak langsung, sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan Anak	Domisili	Tahun Penyertaan	Kegiatan Usaha	Kepemilikan Saham (%)	Status Operasional	Jumlah Aset Perusahaan Anak sebelum eliminasi terhadap Jumlah Aset Konsolidasian (%)	Jumlah Liabilitas Perusahaan Anak sebelum eliminasi terhadap Jumlah Liabilitas Konsolidasian (%)	Laba (Rugi) Sebelum Pajak Perusahaan Anak sebelum eliminasi terhadap Laba (Rugi) sebelum pajak Konsolidasian (%)
Kepemilikan langsung									
1.	PTP Investments Pte. Ltd.	Singapura	2005	Investasi	100,00	Tidak aktif	0,00	0,00	4,75
2.	PT Kinarya Bangun Sesama	Tangerang Selatan	2010	Pertanian, Industri Pengolahan dan Pertambangan	99,99	Aktif	0,14	0,00	0,16
3.	PT POSB Infrastructure Indonesia	Tangerang Selatan	2015	Pengelolaan Pelabuhan Khusus	99,80	Aktif	0,26	0,22	2,65
4.	PT Rekakarsa Karya Nusantara	Balikpapan	2017	Jasa Rekayasa	99,90 Melalui Perseroan	Aktif	0,06	0,00	5,42
5.	PT Karya Bhumi Lestari	Tangerang Selatan	2017	Jasa Penunjang Perusahaan Pertambangan	99,90 Melalui Perseroan	Aktif	9,02	7,16	81,06
6.	PT Kuala Pelabuhan Indonesia	Jakarta Selatan	2018	Operasi Pelabuhan, Transportasi, Contracting (Jalan) dan Jasa Renderring	95,00	Aktif	1,71	2,11	54,75
7.	Petros Solution Pty. Ltd.	Australia	2021	Solution Provider Dalam Bidang Geologi, Pertambangan, Rekayasa dan Konstruksi	100,00	Aktif	0,53	0,15	(23,18)

No.	Nama Perusahaan Anak	Domisili	Tahun Penyertaan	Kegiatan Usaha	Kepemilikan Saham (%)	Status Operasional	Jumlah Aset Perusahaan Anak sebelum eliminasi terhadap Jumlah Aset Konsolidasian (%)	Jumlah Liabilitas Perusahaan Anak sebelum eliminasi terhadap Jumlah Liabilitas Konsolidasian (%)	Laba (Rugi) Sebelum Pajak Perusahaan Anak sebelum eliminasi terhadap Laba (Rugi) sebelum pajak Konsolidasian (%)
8.	PT Kemilau Mulia Sakti	Tangerang Selatan	2023	Perusahaan Holding	99,99 Melalui Perseroan 0,01 Melalui KBL (Karya Bhumi Lestari)	Aktif	1,59	0,02	(147,90)
Kepemilikan tidak langsung									
1.	PT Mahaka Industri Perdana	Tangerang Selatan	2023	Pertambangan, Perindustrian, Agrobisnis, Perdagangan Umum	51,25 Melalui PII (POSB Infrastructure Indonesia)	Aktif	0,19	0,05	6,54
2.	PT Cristian Eka Pratama	Tangerang Selatan	2023	Tambang Batu Bara	99,98 Melalui KMS (Kemilau Mulia Sakti) 0,02 Melalui KBL (Karya Bhumi Lestari)	Aktif	6,12	7,28	(146,97)

Adapun sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, alasan PTP Investment Pte. Ltd. berstatus sebagai perusahaan yang tidak aktif adalah karena PTP Investment Pte. Ltd. tidak lagi menjalankan kegiatan usaha secara komersial.

Berikut adalah keterangan Perusahaan Anak Perseroan yang memiliki kontribusi di atas 10% atau lebih dari jumlah aset, jumlah liabilitas, atau laba (rugi) sebelum pajak Konsolidasian Perseroan per tanggal 30 Juni 2024:

1. PT Karya Bhumi Lestari (“KBL”)

Riwayat Singkat

KBL, berkedudukan di Tangerang Selatan, adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia. KBL didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 25 tanggal 23 Maret 2017, dibuat di hadapan Liestiani Wang, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0014329.AH.01.01.Tahun 2017 tanggal 24 Maret 2017 dan telah didaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0039873.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 24 Maret 2017 serta diumumkan dalam BNRI No. 65 tanggal 14 Agustus 2020 dan dalam TBNRI No. 30096 (“**Akta Pendirian KBL**”).

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham pada saat pendirian KBL sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian KBL adalah sebagai berikut:

Struktur Permodalan dan Susunan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Anggaran Dasar KBL, struktur permodalan KBL dan susunan pemegang saham KBL adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per lembar saham		%
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	2.000	2.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Perseroan	495	495.000.000	99,00
2. PII	5	5.000.000	1,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	500	500.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	1.500	1.500.000.000	

Akta Pendirian KBL telah mengalami beberapa kali perubahan dengan perubahan terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham KBL No. 24 tanggal 30 Agustus 2021, dibuat di hadapan Ungke Mulawanti, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bekasi yang telah menerima Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0444029 tertanggal 3 September 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0150311.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 3 September 2021 serta diumumkan dalam BNRI No. 081 tanggal 8 Oktober 2024 dan dalam TBNRI No. 032061 (“**Akta KBL No. 24/2021**”).

Akta Pendirian KBL dan Akta KBL No. 24/2021, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai “**Anggaran Dasar KBL**”.

Kegiatan Usaha dan Perizinan

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar KBL, maksud dan tujuan KBL adalah melakukan usaha dalam bidang pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, dan ketenagakerjaan. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, kegiatan usaha yang telah benar-benar dijalankan KBL adalah Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya (KBLI 09900).

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, KBL telah memiliki izin-izin umum dan operasional, sebagai berikut:

No	Jenis dan Nomor	Tanggal Penerbitan/Masa Berlaku	Instansi yang Menerbitkan
1.	Nomor Induk Berusaha Berbasis Risiko No. 0220109621358	26 Mei 2023 / Berlaku selama menjalankan kegiatan usaha	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga OSS
2.	Nomor Pokok Wajib Pajak No. 82.119.165.7-453.000	5 Juni 2017 / Masa berlaku tidak diatur	Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pondok Aren
3.	Surat Keterangan Terdaftar No. S-11485KT/WPJ.08/KP.1003/2017	5 Juni 2017 / Masa berlaku tidak diatur	Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pondok Aren
4.	Surat Pengukuhan Perusahaan Kena Pajak No. S-390PKP/WPJ.08/KP.1003/2018	9 Juli 2018 / Masa berlaku tidak diatur	Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pondok Aren
5.	Izin Usaha Jasa Pertambangan No. 85/1/IUJP-PB/PMDN/2023	4 Agustus 2023 / Masa berlaku sampai 18 Oktober 2027	Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
6.	Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri No. 022010962135800030001	11 April 2023 / Berlaku selama KBL menjalankan kegiatan usaha	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur atas nama Gubernur Kalimantan Timur
7.	PKKPR No. 04072310216402030	4 Juli 2023 / Masa berlaku sampai 3 Juli 2026	Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
8.	PKKPR No. 04012310216402038	4 Januari 2023 / Masa berlaku sampai 3 Januari 2026	Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
9.	PKKPR No. 06012310216503002	6 Januari 2023 / Masa berlaku sampai 5 Januari 2026	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Bupati Kutai Kartanegara

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat KBL No. 19 tanggal 13 Mei 2024, yang dibuat di hadapan Ungke Mulawanti, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bekasi, yang telah diberitahukan kepada dan telah diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU.AH.01.09-0202555 tanggal 15 Mei 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0093603.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 15 Mei 2024, susunan Direksi dan Dewan Komisaris KBL pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Kartika Hendrawan
 Komisaris : Ruddy Santoso

Direksi

Direktur Utama : Michael
 Direktur : Hery Purwadi
 Direktur : Ridwan Malawi
 Direktur : Raysuli Abin Arsyad
 Direktur : Lim Hendra Gunawan

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Laporan Posisi Keuangan

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2024	2023	2023	2022
Aset Lancar	44.606	52.785	69.319	69.319
Aset Tidak Lancar	21.769	24.671	23.321	23.321
Jumlah Aset	66.375	77.456	92.640	92.640
Liabilitas Jangka Pendek	31.107	36.507	55.399	55.399
Liabilitas Jangka Panjang	4.274	5.322	3.586	3.586
Jumlah Liabilitas	35.381	41.829	58.985	58.985
Ekuitas	30.994	35.627	33.655	33.655
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	66.375	77.456	92.640	92.640

Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2024	2023*	2023	2022
Pendapatan	66.685	95.862	188.123	148.767
Beban usaha langsung	(63.925)	(88.272)	(173.466)	(127.319)
Laba kotor	2.760	7.590	14.657	21.448
Laba bersih periode/tahun berjalan	1.829	5.988	11.141	16.284
Penghasilan Komprehensif Periode/Tahun Berjalan	(366)	7.603	11.992	13.544

*) tidak diaudit / tidak direviu

Analisis dan Pembahasan Atas Perubahan Signifikan Dalam Data Keuangan Penting

a. Aset

Jumlah aset KBL pada tanggal 30 Juni 2024, 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar USD66.375 ribu, USD77.456 ribu dan USD92.640 ribu. Jumlah aset KBL pada tanggal 30 Juni 2024 mengalami penurunan sebesar 14,31% atau USD11.081 ribu bila dibandingkan dengan jumlah aset KBL pada tanggal 31 Desember 2023. Penurunan ini terjadi karena turunnya piutang usaha dari pihak ketiga dan aset hak guna pada periode berjalan. Selanjutnya, jumlah aset KBL pada tanggal 31 Desember 2023 juga mengalami penurunan sebesar 16,39% atau USD15.184 ribu bila dibandingkan dengan 31 Desember 2022. Penurunan ini terjadi karena menurunnya kas dan setara kas dan piutang usaha dari pihak ketiga pada tahun berjalan.

b. Liabilitas

Jumlah liabilitas KBL pada tanggal 30 Juni 2024, 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar USD35.381 ribu, USD41.829 ribu dan USD58.985 ribu. Jumlah liabilitas KBL pada tanggal 30 Juni 2024 mengalami penurunan sebesar 15,42% atau USD6.448 ribu bila dibandingkan dengan liabilitas KBL pada tanggal 31 Desember 2023. Penurunan ini disebabkan oleh turunnya utang

usaha dari pihak berelasi dan pihak ketiga serta liabilitas sewa pembiayaan pada periode berjalan. Perseroan juga membukukan penurunan pada jumlah liabilitas KBL pada tanggal 31 Desember 2023 bila dibandingkan dengan 31 Desember 2022 sebesar USD17.156 ribu atau 29,09%. Penurunan ini disebabkan oleh turunnya utang usaha dari pihak berelasi dan pihak ketiga serta pada pinjaman jangka panjang pada pihak ketiga yang jatuh tempo dalam satu tahun pada tahun berjalan.

c. Ekuitas

KBL membukukan ekuitas masing-masing sebesar USD30.994 ribu, USD35.627 ribu dan USD33.655 ribu untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022. Pada tanggal 30 Juni 2024 KBL ekuitas mengalami penurunan sebesar USD4.633 ribu atau 13,00%, hal ini terjadi karena saldo laba dikurangi pembagian dividen pada periode berjalan.

Ekuitas KBL mengalami peningkatan pada 31 Desember 2023 bila dibandingkan dengan 31 Desember 2022 sebesar 5,86% atau USD1.972 ribu yang disebabkan oleh saldo laba dikurangi pembagian dividen pada periode tahun berjalan.

d. Pendapatan

Pendapatan KBL untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 adalah sebesar USD66.685 ribu, menurun sebesar 30,44% atau USD29.177 ribu bila dibandingkan dengan Pendapatan periode sebelumnya. Penurunan ini disebabkan oleh menurunnya aktivitas operasional pada periode berjalan.

Pendapatan KBL untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar USD188.123 ribu, meningkat sebesar USD39.356 ribu atau 26,45% bila dibandingkan Pendapatan pada tahun 2022. Peningkatan terjadi karena meningkatnya aktivitas operasional pada tahun berjalan.

e. Beban Usaha Langsung

Beban Usaha Langsung KBL untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 adalah sebesar USD63.925 ribu, menurun sebesar 27,58% atau USD24.347 ribu bila dibandingkan dengan Beban Usaha Langsung periode sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh seiring dengan menurunnya aktivitas operasional pada beberapa proyek pada periode berjalan.

Beban Usaha Langsung KBL untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar USD173.466 ribu, meningkat sebesar USD46.147 ribu atau 36,25% bila dibandingkan Beban Usaha Langsung pada tahun 2022. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya aktivitas operasional beberapa proyek pada tahun berjalan.

f. Laba Kotor

Laba Kotor KBL untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 adalah sebesar USD2.760 ribu, menurun sebesar 63,64% atau USD4.830 ribu bila dibandingkan dengan Laba Kotor periode sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh menurunnya pendapatan dan beban usaha langsung pada periode berjalan.

Laba Kotor KBL untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar USD14.657 ribu, menurun sebesar USD6.791 ribu atau 31,66% bila dibandingkan Laba Kotor pada tahun 2022. Penurunan ini disebabkan oleh meningkatnya beban usaha langsung pada tahun berjalan.

g. Laba Bersih Periode/Tahun Berjalan

Laba Bersih Periode Berjalan KBL untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 adalah sebesar USD1.829 ribu, menurun sebesar 69,46% atau USD4.159 ribu bila dibandingkan dengan periode sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh turunnya pendapatan pada periode berjalan.

Laba Bersih Tahun Berjalan KBL untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar USD11.141 ribu, menurun sebesar USD5.143 ribu atau 31,58% bila dibandingkan dengan tahun 2022. Penurunan ini disebabkan oleh meningkatnya beban usaha langsung pada tahun berjalan.

2. PT Kemilau Mulia Sakti (“KMS”)

Riwayat Singkat

KMS, berkedudukan di Tangerang Selatan, adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia. KMS didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 37 tanggal 19 Desember 2007, dibuat di hadapan Merry Susanti Siaril, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-04408.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 29 Januari 2008 dan telah didaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0006644.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 29 Januari 2008 serta diumumkan dalam BNRI No. 29 tanggal 9 April 2009 dan dalam TBNRI No.10005 (“**Akta Pendirian KMS**”).

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham pada saat pendirian KMS sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian KMS adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000,- per lembar saham		%
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	100.000	100.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Romo Nitiyudo Wachjo	13.750	13.750.000	55,00
2. Nur Aida Nafsiah	7.500	7.500.000	30,00
3. Bambang Sutrisno	3.750	3.750.000	15,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	25.000	25.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	75.000	75.000.000	

Akta Pendirian KMS telah mengalami beberapa kali perubahan dengan perubahan terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham KMS No. 102 tanggal 31 Agustus 2023, dibuat di hadapan Ungke Mulawanti, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bekasi yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0054808.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 12 September 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0179889.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 12 September 2023 serta telah memperoleh Penerimaan Pemberitahuan dari Menkumham No. AHU-AH.01.03-0116929 tanggal 11 September 2023 serta diumumkan dalam BNRI No. 082 tanggal 11 Oktober 2024 dan dalam TBNRI No. 032283 (“**Akta KMS No. 102/2023**”).

Akta Pendirian KMS dan Akta KMS No. 102/2023, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai “**Anggaran Dasar KMS**”.

Struktur Permodalan dan Susunan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Anggaran Dasar KMS, struktur permodalan KMS dan susunan pemegang saham KMS adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000,- per lembar saham		%
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	1.122.457.500	1.122.457.500.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Perseroan	280.589.375	280.589.375.000	99,99
2. KBL	25.000	25.000.000	0,01
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	280.614.375	280.614.375.000	100,00
Saham Dalam Portepel	841.843.125	841.843.125.000	

Kegiatan Usaha dan Perizinan

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar KMS, maksud dan tujuan KMS adalah melakukan usaha dalam bidang aktivitas keuangan dan asuransi, aktivitas perusahaan holding, bidang usaha aktivitas profesional, ilmiah dan teknis, aktivitas konsultasi manajemen lainnya dan bidang usaha pertambangan dan penggalian pertambangan batu bara. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, kegiatan usaha yang telah benar-benar dijalankan KMS adalah Aktivitas Perusahaan Holding (KBLI 64200).

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, KMS telah memiliki izin-izin umum dan operasional, sebagai berikut:

No	Jenis dan Nomor	Tanggal Penerbitan/Masa Berlaku	Instansi yang Menerbitkan
1.	Nomor Induk Berusaha Berbasis Risiko No. 2610230099259	26 Oktober 2023 / Berlaku selama menjalankan kegiatan usaha	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga OSS
2.	Nomor Pokok Wajib Pajak No. 40.416.510.2-027.000	28 Maret 2023 / Masa berlaku tidak diatur	Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pondok Aren
3.	Surat Keterangan Terdaftar No. PEM-00217/WPJ.06/KP.0503/2008	18 Januari 2008 / Masa berlaku tidak diatur	Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pondok Aren
4.	PKKPR No. 26102310213674168	26 Oktober 2023 / Masa berlaku sampai 25 Oktober 2026	Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 59 tanggal 29 Februari 2024, yang dibuat di hadapan Ungke Mulawanti, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bekasi, yang telah diberitahukan kepada dan telah diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU.AH.01.09-0202555 tanggal 15 Mei 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-AH.01.09-0091260 tanggal 4 Maret 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0046618.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 4 Maret 2024, susunan Direksi dan Dewan Komisaris KMS pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Michael
Komisaris	:	Kartika Hendrawan
Komisaris	:	Meinar Kusumastuti

Direksi

Direktur Utama	:	Daniel JR Lopez Laurente
Direktur	:	Joko Suratmo
Direktur	:	Haryanto Ginting

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Laporan Posisi Keuangan

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2024	2023	2022*
Aset Lancar	20.275	19.095	-
Aset Tidak Lancar	16.308	13.914	-
Jumlah Aset	36.583	33.009	-
Liabilitas Jangka Pendek	17.439	16.483	-
Liabilitas Jangka Panjang	8.324	183	-
Jumlah Liabilitas	25.763	16.666	-
Ekuitas	10.820	16.343	-
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	36.583	33.009	-

* tidak relevan karena belum menjadi entitas anak Perseroan

Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2024	2023*	2023	2022**
Pendapatan	25.956	-	7.678	-
Beban usaha langsung	(20.782)	(20)	(5.889)	-
Laba kotor	5.174	(20)	1.789	-
Rugi bersih periode/tahun berjalan	(4.652)	(90)	(1.746)	-
Penghasilan (Rugi) Komprehensif Periode/Tahun Berjalan	(5.533)	15	(1.693)	-

* tidak diaudit / tidak direviu

** tidak relevan karena belum menjadi entitas anak Perseroan

Analisis dan Pembahasan Atas Perubahan Signifikan Dalam Data Keuangan Penting

a. Aset

Jumlah aset KMS pada tanggal 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar USD36.583 ribu dan USD33.009 ribu. Jumlah aset KMS pada tanggal 30 Juni 2024 mengalami peningkatan sebesar 10,83% atau USD3.574 ribu bila dibandingkan dengan jumlah aset KMS pada tanggal 31 Desember 2023. Peningkatan ini terjadi karena meningkatnya kas dan setara kas pada periode berjalan.

b. Liabilitas

Jumlah liabilitas KMS pada tanggal 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar USD25.763 ribu dan USD16.666 ribu. Jumlah liabilitas KMS pada tanggal 30 Juni 2024 mengalami peningkatan sebesar 54,58% atau USD9.097 ribu bila dibandingkan dengan liabilitas KMS pada tanggal 31 Desember 2023. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya utang usaha dan pinjaman jangka panjang dari pihak ketiga pada periode berjalan.

c. Ekuitas

Ekuitas KMS untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 serta tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar USD10.820 ribu dan USD16.343 ribu. Ekuitas KMS mengalami penurunan pada 30 Juni 2024 bila dibandingkan dengan 31 Desember 2023 sebesar 33,79% atau USD5.523 ribu yang disebabkan oleh menurunnya saldo laba ditentukan penggunaannya pada periode berjalan.

d. Pendapatan

KMS mencatatkan Pendapatan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 sebesar USD25.956 ribu dan pada tahun buku 31 Desember 2023 sebesar USD7.678 ribu. Peningkatan ini disebabkan naiknya volume penjualan Batubara pada periode berjalan. Pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dan tahun buku 31 Desember 2022, KMS belum membukukan pendapatan dikarenakan anak usaha diakuisisi perseroan pada tanggal 30 Juni 2023.

e. Beban Usaha Langsung

Beban Usaha Langsung KMS untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar USD20.782 ribu dan USD20 ribu. Peningkatan ini sejalan dengan peningkatan volume penjualan batubara pada periode berjalan. Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, KMS mencatatkan Beban Usaha Langsung sebesar USD5.889 ribu.

KMS belum membukukan Beban Usaha Langsung pada tahun 2022.

f. Laba Kotor

KMS mencatatkan Laba Kotor sebesar USD5.174 ribu untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan Rugi Kotor sebesar USD20 ribu untuk periode sebelumnya. Peningkatan ini sejalan dengan peningkatan volume penjualan batubara pada periode berjalan. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, Laba Kotor KMS adalah sebesar USD1.789 ribu.

KMS belum membukukan Laba Kotor pada tahun 2022.

g. Rugi Bersih Periode/Tahun Berjalan

KMS mencatatkan Rugi Bersih Periode Berjalan sebesar USD4.652 ribu untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan Rugi Bersih Periode Berjalan sebesar USD90 ribu untuk periode sebelumnya. KMS mengalami peningkatan rugi bersih sebesar USD4.562 ribu atau 5.068,89% yang disebabkan oleh anak usaha baru mulai beroperasi.

Pada tahun 2023 KMS mencatatkan Rugi Bersih Tahun Berjalan sebesar USD1.746 ribu pada tanggal 31 Desember 2023 disebabkan oleh anak usaha baru mulai beroperasi.

3. PT Kuala Pelabuhan Indonesia (“KPI”)

Riwayat Singkat

KPI, berkedudukan di Tangerang Selatan, adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia. KPI pertama kali didirikan dengan nama “PT Alatief P&O Port Development Company” berdasarkan Akta Pendirian No. 7 tanggal 5 Januari 1995, dibuat di hadapan Amrul Partomuan Pohan, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. 02-2.840 HT.01.01.Th 95 tanggal 22 Februari 1995, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 28 tanggal 7 April 1995 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 3078 (“**Akta Pendirian KPI**”).

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham pada saat pendirian KPI sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian KPI adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp54.950.000,- per lembar saham		%
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	1.000	54.950.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Alatief Nusakarya Corporation	500	27.475.000.000	50
2. P&O Singapore Pte. Ltd.	500	27.475.000.000	50
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.000	54.950.000.000	100
Saham Dalam Portepel	-	-	-

Akta Pendirian KPI telah mengalami beberapa kali perubahan dengan perubahan terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham KPI No. 5 tanggal 11 Maret 2020, dibuat di hadapan Ungke Mulawanti, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bekasi yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0021669.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 12 Maret 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0050043.AH.01.11. Tahun 2020 tanggal 12 Maret 2020 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 29 tanggal 10 Maret 2020 dan TBNRI No. 15187 (“**Akta KPI No. 05/2020**”).

Akta Pendirian KPI dan Akta KPI No. 05/2020, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai “**Anggaran Dasar KPI**”.

Struktur Permodalan dan Susunan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Anggaran Dasar KPI, struktur permodalan KPI dan susunan pemegang saham KPI adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp2.198,- per lembar saham		%
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	400.000	879.200.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Perseroan	380.000	835.240.000	95,00
2. Tripatra Singapore Pte. Ltd.	20.000	43.960.000	5,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	400.000	879.200.000	100,00
Saham Dalam Portepel	-	-	-

Kegiatan Usaha dan Perizinan

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar KPI, maksud dan tujuan KPI adalah melakukan usaha dalam bidang pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, konstruksi, pengangkutan dan pergudangan, aktivitas profesional, ilmiah dan teknis, serta aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, kegiatan usaha yang telah benar-benar dijalankan KPI adalah Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (KBLI 70209) dan Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya (KBLI 09900).

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, KPI telah memiliki izin-izin umum dan operasional, sebagai berikut:

No	Jenis dan Nomor	Tanggal Penerbitan/Masa Berlaku	Instansi yang Menerbitkan
1.	Nomor Induk Berusaha Berbasis Risiko No. 2009230038682	20 September 2023 / Berlaku selama menjalankan kegiatan usaha	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga OSS
2.	Nomor Pokok Wajib Pajak No. 01.070.939.2-058.000	6 Maret 2002 / Masa berlaku tidak diatur	Direktorat Jendral Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Lima
3.	Surat Keterangan Terdaftar No. S-19/WPJ.07/KP.0603/2002	6 Maret 2002 / Masa berlaku tidak diatur	Direktorat Jendral Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Lima
4.	Surat Pengukuhan Perusahaan Kena Pajak No. PEM-272U/WP.J.07/KP.0603/2002	1 Maret 2002 / Masa berlaku tidak diatur	Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Wilayah VII Jakarta Raya Khusus Kantor Pelayanan Pajak PMA Lima
5.	Izin usaha No. 67//PERHUBUNGAN/1998	16 Februari 1999 / Masa berlaku sampai dengan April 2025	Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Perhubungan
6.	PKKPR No. 20092310219404002	20 September 2023 / Masa berlaku sampai dengan 19 September 2023	Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham KPI No. 61 tanggal 29 Februari 2024, yang dibuat di hadapan Ungke Mulawanti, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bekasi, yang telah diberitahukan kepada dan telah diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU.AH.01.09-0091264 tanggal 4 Maret 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0046620.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 4 Maret 2024, susunan Direksi dan Dewan Komisaris KPI pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	David Richard Gilbert
Komisaris	:	Richard Bruce Ness
Komisaris	:	Bitu Budiariani

Direksi

Direktur Utama : Jibril Muchtar Bahar
 Direktur : Ir. Arony Dominggus Faruwu
 Direktur : Firzani

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Laporan Posisi Keuangan

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2024	2023	2023	2022
Aset Lancar	12.190	13.480	13.480	13.380
Aset Tidak Lancar	368	602	602	514
Jumlah Aset	12.558	14.082	14.082	13.894
Liabilitas Jangka Pendek	10.416	9.915	9.915	9.712
Liabilitas Jangka Panjang	-	-	-	-
Jumlah Liabilitas	10.416	9.915	9.915	9.712
Ekuitas	2.142	4.167	4.167	4.182
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	12.558	14.082	14.082	13.894

Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2024	2023*	2023	2022
Pendapatan	16.118	17.892	32.867	35.216
Beban usaha langsung	(14.300)	(15.951)	(29.088)	(31.086)
Laba kotor	1.818	1.941	3.779	4.130
Laba bersih periode/tahun berjalan	1.175	1.300	2.515	2.526
Jumlah penghasilan komprehensif periode/tahun berjalan	1.175	1.300	2.515	2.526

*) tidak diaudit / tidak direviu

Analisis dan Pembahasan Atas Perubahan Signifikan Dalam Data Keuangan Penting

a. Aset

Jumlah aset KPI pada tanggal 30 Juni 2024, 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar USD12.558 ribu, USD14.082 ribu dan USD13.894 ribu. Jumlah aset KPI pada tanggal 30 Juni 2024 mengalami penurunan sebesar 10,82% atau USD1.524 ribu bila dibandingkan dengan jumlah aset KPI pada tanggal 31 Desember 2023. Penurunan ini terjadi karena turunnya kas setara kas pada periode berjalan. Selanjutnya, jumlah aset KPI pada tanggal 31 Desember 2023 mengalami peningkatan sebesar 1,35% atau USD188 ribu bila dibandingkan dengan 31 Desember 2022. Peningkatan ini terjadi karena meningkatnya aset keuangan lainnya dan piutang karyawan jangka panjang.

b. Liabilitas

Jumlah liabilitas KPI pada tanggal 30 Juni 2024, 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar USD10.416 ribu, USD9.915 ribu dan USD9.712 ribu. Jumlah liabilitas KPI pada tanggal 30 Juni 2024 mengalami peningkatan sebesar 5,05% atau USD501 ribu bila dibandingkan dengan liabilitas KPI pada tanggal 31 Desember 2023. Kenaikan ini disebabkan oleh meningkatnya beban yang masih harus dibayar pada periode berjalan. Perseroan juga membukukan peningkatan pada jumlah liabilitas KPI untuk tanggal 31 Desember 2023 bila dibandingkan dengan 31 Desember 2022 sebesar USD203 ribu atau 2,09%. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya beban yang masih harus dibayar pada tahun berjalan.

c. Ekuitas

KPI memiliki ekuitas masing-masing sebesar USD2.142 ribu, USD4.167 ribu dan USD4.182 ribu untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022. Ekuitas KPI mengalami penurunan signifikan pada tanggal 30 Juni 2024 bila dibandingkan dengan 31 Desember 2023 sebesar 48,60% atau USD2.025 ribu yang disebabkan menurunnya saldo laba dikurangi pembagian dividen pada periode berjalan. Pada tanggal 31 Desember 2023 Ekuitas KPI juga mengalami penurunan sebesar USD15 ribu atau 0,36% karena menurunnya saldo laba dikurangi pembagian dividen pada tahun berjalan.

d. Pendapatan

Pendapatan KPI untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 adalah sebesar USD16.118 ribu, menurun sebesar 9,92% atau USD1.774 ribu bila dibandingkan dengan Pendapatan periode sebelumnya. Penurunan ini disebabkan oleh menurunnya kegiatan operasional pada periode berjalan.

Pendapatan KPI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar USD32.867 ribu, menurun sebesar USD2.349 ribu atau 6,67% bila dibandingkan Pendapatan pada tahun 2022. Hal ini disebabkan oleh menurunnya kegiatan operasional pada tahun berjalan.

e. Beban Usaha Langsung

Beban Usaha Langsung KPI untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 adalah sebesar USD14.300 ribu, menurun cukup signifikan sebesar 10,35% atau USD1.651 ribu bila dibandingkan dengan Beban Usaha Langsung periode sebelumnya. Hal ini disebabkan seiring dengan turunnya biaya operasional pada periode berjalan

Beban Usaha Langsung KPI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar USD29.088 ribu, menurun sebesar USD1.998 ribu atau 6,43% bila dibandingkan Beban Usaha Langsung pada tahun 2022. Penurunan ini terjadi karena seiring dengan turunnya biaya operasional pada tahun berjalan.

f. Laba Kotor

Laba Kotor KPI untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 adalah sebesar USD1.818 ribu, menurun sebesar 6,34% atau USD123 ribu bila dibandingkan dengan Laba Kotor periode sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh turunnya pendapatan pada periode berjalan.

Laba Kotor KPI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar USD3.779 ribu, menurun sebesar USD351 ribu atau 8,50% bila dibandingkan Laba Kotor pada tahun 2022. Penurunan ini disebabkan oleh turunnya pendapatan pada tahun berjalan.

g. Laba Bersih Periode/Tahun Berjalan

Laba Bersih Periode Berjalan KPI untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 adalah sebesar USD1.175 ribu, menurun sebesar 9,62% atau USD125 ribu bila dibandingkan dengan periode sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh turunnya pendapatan pada periode berjalan.

Laba Bersih Tahun Berjalan KBL untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar USD2.515 ribu, menurun sebesar USD11 ribu atau 0,44% bila dibandingkan dengan tahun 2022. Penurunan ini disebabkan oleh turunnya pendapatan pada tahun berjalan.

12. Perjanjian-Perjanjian Penting Dengan Pihak Ketiga

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dan Perusahaan Anak telah membuat dan menandatangani perjanjian-perjanjian penting dengan pihak ketiga, antara lain berupa perjanjian-perjanjian sebagai berikut:

a. Perjanjian Material

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dan Perusahaan Anak telah membuat dan menandatangani perjanjian-perjanjian penting dengan pihak ketiga sebagai berikut:

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu	Deskripsi Singkat
Perseroan				
1.	<i>Mill Optimization for Underground Ores Project Engineering, Procurement, Construction and Construction Management Master Agreement No. TP1900216-000</i> tertanggal 11 Maret 2020 sebagaimana telah terdapat <i>Supplement to Onshore Master Services Agreement No. TP1900216-005</i> tertanggal 12 Agustus 2024	<ul style="list-style-type: none"> Perseroan dan PT Flour Daniel Indonesia (“FDI”) sebagai kontraktor PT Freeport Indonesia (“PTFI”) sebagai penerima jasa 	15 Februari 2022 sampai dengan 26 Maret 2024	<p>Perseroan dan FDI memberikan jasa konstruksi dengan menyediakan tenaga kerja, perlengkapan dan peralatan untuk menyelesaikan proyek dimiliki PTFI berdasarkan perjanjian yang akan ditandatangani dengan ketentuan berdasarkan Perjanjian ini.</p> <p>Nilai perjanjian ini adalah Rp1.614.000.000.000.</p>
2.	<i>Contract Agreement of Waste Removal & Coal Production SM Popor, Suara Area Pasir Mine East Kalimantan No. KJA-010P</i> tertanggal 22 Oktober 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah melalui <i>13th Amendment to Contract Agreement of Waste Removal & Coal Production Contract No. KJA-010P</i> antara PT Kideco Jaya Agung dan PT Petrosea Tbk tertanggal 20 Mei 2024	<ul style="list-style-type: none"> Perseroan sebagai kontraktor PT Kideco Jaya Agung (“KJA”) sebagai penerima jasa 	1 Januari 2011 sampai dengan Desember 2028	<p>Perseroan menyediakan jasa pertambangan yang meliputi pembebasan lahan (<i>land clearing</i>), <i>top soil removal</i>, penggalian (<i>excavation</i>), pengeboran (<i>drill & blast</i>), <i>overburden and top soil</i>, pengelolaan kualitas air (<i>control box</i>), penyaliran dan penanganan lumpur membangun/mendirikan/merancang jalan di dalam lokasi tambang, produksi batu bara dan pengeringan, sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan KJA yang berlokasi di Kalimantan Timur dan dimiliki oleh KJA.</p> <p>Nilai perjanjian ini adalah USD216.000.000.</p>
3.	<i>Contract for Sorong Supply Base Services No. 4420001807</i> tertanggal 23 Juni 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah melalui Amandemen No. 6 untuk <i>Sorong Supply Base Services</i> tertanggal 1 Juni 2024	<ul style="list-style-type: none"> Perseroan sebagai kontraktor BP Berau Ltd. (“BP”) sebagai penerima jasa 	23 Juni 2017 sampai dengan 22 Juni 2025	<p>Perseroan menyediakan jasa manajemen, perekayasa, rancangan, pengawasan, tenaga kerja, logistik, peralatan dan fasilitas lainnya untuk layanan <i>supply base services</i> dalam rangka pemenuhan kebutuhan logistik <i>Tanggung LNG Operation</i> dan <i>Tanggung Integrated Drilling Program</i> atau <i>Tanggung Expansion Program</i> di Sorong yang dimiliki BP.</p> <p>Nilai perjanjian ini adalah Rp807.600.000.000.</p>
4.	<i>Master Services Agreement (MSA) No. JK1700044-000</i> tertanggal 24 Mei 2017 sebagaimana terakhir diubah dengan Perjanjian No. 013 tertanggal 5 Oktober 2023	<ul style="list-style-type: none"> Perseroan sebagai kontraktor PTFI sebagai penerima jasa 	24 Mei 2017 sampai dengan 31 Desember 2025	<p>Perseroan memberikan jasa pertambangan termasuk namun tidak terbatas pada jasa pendukung konstruksi fasilitas pertambangan, jasa logistik, penyediaan alat kendaraan berat, layanan transportasi, untuk Proyek Grasberg di Papua yang dimiliki PTFI.</p> <p>Nilai perjanjian ini adalah USD44.000.000.</p>
5.	<i>Amended and Restated Construction Services Agreement on Levee Construction and Stockpile Project No. TP1500131-001</i> tertanggal 1 September 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah melalui Amendemen No. 018 tertanggal 27 Maret 2024	<ul style="list-style-type: none"> Perseroan sebagai kontraktor PTFI sebagai penerima jasa 	30 Juni 2015 sampai dengan 30 Juni 2026	<p>Perseroan memberikan jasa konstruksi pertambangan dengan di antaranya menyediakan tenaga kerja, pendirian dan pemeliharaan komunikasi infrastruktur dan jaringan komunikasi, melakukan perlindungan dan pemeliharaan borrow areas dari erosi dan dampak-dampak alam lain yang mungkin terjadi pada lokasi pekerjaan di Papua yang dimiliki PTFI.</p> <p>Nilai perjanjian ini adalah USD856.770.</p>

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu	Deskripsi Singkat
6.	<i>Construction and Project Management Works Contract No. 330-800-CN-CC-0005</i> tertanggal 26 Juli 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah melalui <i>Amendment II to the Construction and Project Management Works Contract No. 330-800-CN-CCC-0012 for the Awak Mas Gold Project</i> tertanggal 23 Agustus 2023	<ul style="list-style-type: none"> Perseroan sebagai kontraktor PT Masmindo Dwi Area ("MDA") sebagai penerima jasa 	26 Juli 2022 sampai dengan seluruh kewajiban kontraktor telah selesai atau diakhiri oleh para pihak	<p>Perseroan memberikan jasa dibidang teknis, desain, pengadaan, konstruksi dan manajemen diantaranya pengadaan tenaga kerja, penyediaan alat berat, pabrik, dan kendaraan berat untuk Proyek Awak Mas Gold yang dimiliki oleh MDA.</p> <p>Nilai perjanjian ini adalah Rp95.009.000.000.</p>
7.	<i>Engineering, Procurement, and Construction (EPC) Contract No. 330-800-CN-CCC-0004</i> tertanggal 26 Juli 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah melalui <i>Amendment II to Engineering, Procurement, and Construction (EPC) Contract No. 330-800-CN-CCC-0011 for Awak Mas Gold Project</i> tertanggal 23 Agustus 2023	<ul style="list-style-type: none"> Perseroan sebagai kontraktor MDA sebagai penerima jasa 	26 Juli 2022 sampai dengan seluruh kewajiban kontraktor telah selesai atau diakhiri oleh para pihak	<p>Perseroan memberikan jasa dibidang teknis, pengadaan, dan konstruksi diantaranya pengadaan tenaga kerja, penyediaan alat berat, pabrik, dan kendaraan berat untuk Proyek Awak Mas Gold yang dimiliki oleh MDA.</p> <p>Nilai perjanjian ini adalah Rp1.237.582.690.770.</p>
8.	Perjanjian Jasa Pertambangan No. KBL/AGR/2021/IV-0001 tertanggal 6 April 2021 (" Perjanjian Jasa Pertambangan KSM ")	<ul style="list-style-type: none"> Perseroan sebagai kontraktor manajemen proyek KBL sebagai kontraktor PT Kartika Selabumi Mining ("KSM") sebagai penerima jasa PT Palm Mas Asri ("PMA") sebagai penjamin penerima jasa 	6 April 2021 sampai dengan 31 Desember 2027	<p>Perseroan sebagai penyedia jasa manajemen proyek untuk pekerjaan jasa pertambangan dan KBL sebagai penyedia jasa pertambangan untuk mengambil material tanah penutup dan pengangkutan batu bara termasuk namun tidak terbatas pada penyediaan peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan untuk proyek tambang batu bara di Kota Bangun, Muara Muntai dan Loa Kulu, Kalimantan Timur yang dimiliki oleh KSM, dimana pembayaran terhadap jasa KBL tersebut dijamin oleh PMA.</p> <p>Nilai Perjanjian Jasa Pertambangan KSM adalah Rp2.700.000.000.000.</p>
9.	Perjanjian Rental Peralatan untuk Rental Peralatan Bergerak & Personil di Lokasi Tambang PT Kartika Sela Bumi No. KBL/AGR/2021/IV-0002 tertanggal 6 April 2021 (" Perjanjian Rental Peralatan KSM ")	<ul style="list-style-type: none"> Perseroan sebagai kontraktor manajemen proyek penjamin KBL sebagai pemberi sewa KSM sebagai penerima sewa PMA sebagai pemberi jaminan 	24 April 2021 sampai dengan 31 Desember 2027 atau hingga cadangan batu bara KSM yang dapat ditambang telah habis	<p>Perseroan sebagai penyedia jasa manajemen proyek untuk pekerjaan jasa pertambangan dan KBL sebagai penyedia jasa sewa peralatan tambang batu bara termasuk namun tidak terbatas pada tenaga kerja yang dibutuhkan untuk melakukan pengoperasian dan perawatan atas peralatan tersebut yang dibutuhkan KSM untuk pelaksanaan proyek tambang batu bara sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Jasa Pertambangan KSM.</p> <p>Nilai Perjanjian Rental Peralatan KSM sesuai dengan penggunaan rental peralatan setiap bulanan.</p>

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu	Deskripsi Singkat
10.	Perjanjian Penyediaan Jasa Pemetaan Topografi No. PTP/AGR/2024/II-0002 tertanggal 2 Februari 2024 (" Perjanjian KSM ")	<ul style="list-style-type: none"> Perseroan sebagai penyedia jasa PT Kartika Selabumi Mining ("KSM") sebagai penerima jasa 	2 Februari 2024 sampai dengan seluruh kewajiban para pihak telah selesai atau hingga diakhiri lebih awal sesuai Perjanjian KSM	<p>Perseroan menyediakan jasa pemetaan topografi dengan drone LIDAR dengan metodologi yang mencakup pembuatan benchmark (BM), survey GPS statik, survey drone lidar, survey drone photogrammetry, pengolahan data dan pelaporan untuk area IUP-OP yang dimiliki KSM di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.</p> <p>Nilai Perjanjian KSM adalah Rp378.400.000.</p>
11.	Perjanjian Jasa Pertambangan No. KBL/AGR/2021/X-0003 tertanggal 10 Oktober 2021 (" Perjanjian Jasa Pertambangan HME ")	<ul style="list-style-type: none"> Perseroan sebagai kontraktor manajemen proyek KBL sebagai kontraktor PT Hardaya Mining Energy ("HME") sebagai penerima jasa PT Central Cipta Murdaya ("CCM") sebagai penjamin penerima jasa 	10 Oktober 2021 sampai dengan 31 Desember 2025	<p>Perseroan sebagai penyedia jasa manajemen proyek untuk pekerjaan jasa pertambangan dan KBL sebagai penyedia jasa pertambangan untuk mengambil material tanah penutup dan pengangkutan batu bara termasuk namun tidak terbatas pada penyediaan peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan untuk proyek tambang batu bara di Nunukan, Kalimantan Utara yang dimiliki oleh CCM melalui HME, dimana pembayaran terhadap jasa KBL tersebut dijamin oleh CCM.</p> <p>Nilai Perjanjian Jasa Pertambangan HME adalah USD265.000.000.</p>
12.	Kontrak Pekerjaan Jasa Pertambangan No. KBL/AGR/2022/IX-0002 tanggal 15 September 2022 (" Perjanjian Jasa Pertambangan IBP ")	<ul style="list-style-type: none"> Perseroan sebagai kontraktor manajemen proyek KBL sebagai kontraktor PT Indo Bara Pratama ("IBP") sebagai penerima jasa 	5 tahun sejak tanggal mulai pekerjaan	<p>Perseroan sebagai penyedia jasa manajemen proyek untuk pekerjaan jasa pertambangan dan KBL sebagai penyedia jasa pertambangan batu bara termasuk namun tidak terbatas pada pengupasan dan pemindahan lapisan tanah penutup ke <i>disposa</i>, pembuatan dan pewataan lereng dan jalan angkut, pengelolaan air tambang, pengangkutan batu bara dan reklamasi yang berlokasi di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur yang dimiliki oleh IBP.</p> <p>Nilai Perjanjian Jasa Pertambangan IBP adalah Rp2.891.570.000.000.</p>
13.	Perjanjian Jasa Operasi Penambangan No. PTP/AGR/2022/VI-0063 tertanggal 3 Juni 2022	<ul style="list-style-type: none"> Perseroan sebagai kontraktor PT Cipta Djaya Selaras Mining ("CDSM") dan PT Agung Pratama Mineral ("APM") sebagai penerima jasa 	11 Oktober 2022 sampai dengan 2 Juni 2026	<p>Perseroan menyediakan jasa operasi pertambangan yang meliputi namun tidak terbatas pada pembuatan rencana tambang, operasi penambangan, pengangkutan batu bara ke pelabuhan dan aktivitas pelabuhan yang berlokasi di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara yang dimiliki dan dioperasikan oleh CDSM dan APM.</p> <p>Nilai perjanjian ini adalah USD108.990.000.</p>

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu	Deskripsi Singkat
14.	Perjanjian Manajemen dan Pemeliharaan Pabrik Pengelolaan <i>Tailing</i> No. PTP/AGR/2022/VII-0072 tertanggal 18 Juli 2022 sebagaimana telah diakhiri melalui Perjanjian Penyelesaian atas Perjanjian Manajemen dan Pemeliharaan Pabrik Pengelolaan <i>Tailing</i> tanggal 9 Februari 2022 sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan Amandemen dan Pernyataan Kembali Perjanjian Manajemen dan Pemeliharaan Pabrik Pengelolaan <i>Tailing</i> tanggal 28 September 2022 (" Perjanjian Pabrik Pengolahan ")	<ul style="list-style-type: none"> Perseroan sebagai kontraktor PT Santana Rekso Nidhana ("SRN") sebagai penerima jasa 	18 Juli 2022 sampai dengan 4 Agustus 2023	<p>Perseroan memberikan jasa pembangunan, pengelolaan dan pemeliharaan pabrik pengolahan untuk pengelolaan emas yang berlokasi di Gosowong, Maluku Utara yang dimiliki oleh SRN.</p> <p>Nilai Perjanjian Pabrik Pengolahan adalah Rp130.892.000.000.</p>

Catatan:

Jangka waktu Perjanjian Pabrik Pengolahan telah berakhir, namun masih terdapat kewajiban SRN kepada Perseroan. Berdasarkan konfirmasi Perseroan, Perseroan telah mengalihkan sisa kewajiban SRN berdasarkan Perjanjian Pabrik Pengolahan melalui Perjanjian Pengalihan Tagihan Atas Penyelesaian Tagihan tanggal 4 Agustus 2023 tertanggal 27 September 2023 kepada PT Insan Global Pawulang ("**IGP**"). Berdasarkan Surat Pembayaran atas Tagihan atas Proyek SRN No. CORPLEGAL/L/2024/VI-022 tertanggal 28 Juni 2024, Perseroan memberikan jangka waktu pelunasan kewajiban SRN berdasarkan Perjanjian Pabrik Pengolahan kepada IGP sampai 31 Desember 2027.

15.	Perjanjian Operasi Bersama Pelaksanaan Pertambangan Ore Mas No. PTP/AGR/2022/IX-0091A tertanggal 23 September 2022 sebagaimana telah diakhiri melalui Perjanjian Penyelesaian Atas Perjanjian Operasi Bersama Pelaksanaan Pertambangan Ore Emas Tanggal 23 September 2022 tertanggal 4 Agustus 2023 (" Perjanjian Pertambangan Ore Mas ")	<ul style="list-style-type: none"> Perseroan sebagai kontraktor PT Nusa Halmahera Minerals ("NHM") sebagai penerima jasa 	1 Mei 2022 sampai dengan 4 Agustus 2023	<p>Perseroan memberikan jasa pertambangan yang terdiri dari pemindahan lapisan tanah penutup, penambangan emas, dan pekerjaan lainnya yang berlokasi di Gosowong, Maluku Utara yang dimiliki oleh NHM.</p> <p>Nilai Perjanjian Pertambangan Ore Mas adalah Rp133.890.000.000.</p>
-----	--	---	---	---

Catatan:

Jangka waktu Perjanjian Pabrik Pertambangan Ore Mas telah berakhir, namun masih terdapat kewajiban NHM kepada Perseroan. Berdasarkan konfirmasi Perseroan, Perseroan telah mengalihkan sisa kewajiban NHM berdasarkan Perjanjian Pertambangan Ore Mas melalui Perjanjian Pengalihan Tagihan Atas Perjanjian Penyelesaian Tagihan atas Perjanjian Pertambangan Ore Mas tertanggal 27 September 2023 kepada IGP. Berdasarkan Surat Pembayaran atas Tagihan atas Proyek NHM No. CORPLEGAL/L/2024/VI-023 tertanggal 28 Juni 2024, Perseroan memberikan jangka waktu pelunasan kewajiban NHM berdasarkan Perjanjian Pertambangan Ore Mas kepada IGP sampai 31 Desember 2027.

16.	<i>Construction Agreement</i> No. SL2300019-001 tertanggal 6 Juni 2023	<ul style="list-style-type: none"> Perseroan sebagai kontraktor PT Freeport Manyar Refinery ("FMR") sebagai penerima jasa 	1 Oktober 2024 sampai dengan 30 November 2024	<p>Perseroan memberikan jasa konstruksi termasuk namun tidak terbatas pada jasa pembangunan struktural, mekanikal, jalur pipa, kelistrikan, pabrik penyulingan logam dan bangunan kepada FMR.</p> <p>Nilai perjanjian ini adalah Rp870.640.000.000.</p>
-----	--	--	---	---

Catatan:

Construction Agreement No. SL2300019-001 tertanggal 6 Juni 2023 yang akan berakhir tanggal 30 November 2024 tidak akan dilakukan perpanjangan oleh Perseroan.

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu	Deskripsi Singkat
17.	<i>Mining Services Agreement West Kutai, East Kalimantan Contract</i> No. PTP/AGR/2023/IV-0003 tertanggal 18 April 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah melalui Perubahan No.2 tertanggal 22 Maret 2024 atas Kontrak No. PTP/AGR/2023/IV-0003 tanggal 18 April 2023	<ul style="list-style-type: none"> Perseroan sebagai kontraktor PT Kedap Sayaaq ("PTKS") sebagai penerima jasa 	2 Mei 2023 sampai dengan 31 Desember 2028	<p>Perseroan menyediakan jasa pertambangan yang meliputi pembukaan lahan, pengupasan tanah pucuk, penggalian, pengangkutan tanah penutup dan tanah pucuk, jalan angkut dan jalan pintas, area pembuangan, produksi batu bara dan pengeringan pembuangan limbah, sesuai dengan rencana pengembangan tambang yang berlokasi di Kalimantan Barat yang dimiliki oleh PTKS.</p> <p>Nilai perjanjian ini adalah USD352.221.000.</p>
18.	Kontrak Jasa Pekerjaan Material Removal, Pengangkutan Bijih Nikel Tambang Tanjung Buli Halmahera Timur, Maluku Utara No. PTP/AGR/2023/IX-0010 tertanggal 19 September 2023 sebagaimana telah diubah melalui Amandemen I Kontrak No. PTP/AGR/2023/IX-0010 Jasa Pekerjaan Material Removal, Pengangkutan Bijih Nikel Tambang Tanjung Buli Halmahera Timur, Maluku Utara tertanggal 19 Oktober 2023	<ul style="list-style-type: none"> Perseroan sebagai Kontraktor PT Sumberdaya Arindo ("SDA") sebagai penerima jasa 	19 September 2023 sampai dengan 22 September 2026	<p>Perseroan menyediakan jasa pekerjaan material yang meliputi penggalian, pemuatan dan pengangkutan material, serta pengangkutan bijih nikel tambang termasuk penyediaan tenaga kerja yang berlokasi di Tanjung Buli, Halmahera Timur, Maluku Utara yang dimiliki oleh SDA.</p> <p>Nilai perjanjian ini adalah Rp1.090.000.000.000.</p>
19.	<i>Services Agreement</i> No. 2200036-001 tertanggal 25 Mei 2022 sebagaimana telah diakhiri dan diganti dengan <i>Short Form Services Agreement</i> No. 2300110-001 tertanggal 1 Juli 2024	<ul style="list-style-type: none"> Perseroan sebagai pemberi jasa PTFI sebagai penerima jasa 	1 Juli 2024 sampai dengan 31 Desember 2024	<p>Perseroan memberikan jasa penyediaan alat berat beserta dengan operator dan <i>rigger</i> untuk membantu pengangkutan barang-barang material sehubungan proyek yang dimiliki PTFI.</p> <p>Nilai perjanjian ini adalah Rp8.180.353.152.</p>
20.	<i>Contract for Onshore Early Works Engineering, Procurement, and Construction (EPC) for Ubadari, Tangguh EDR/CCUS, and Tangguh Onshore Compression (UCC) Project</i> No. 4420003405A tertanggal 1 Februari 2024 (" Perjanjian Proyek Tangguh ")	<ul style="list-style-type: none"> Perseroan sebagai kontraktor BP sebagai penerima jasa 	1 Februari 2024 sampai dengan 25 November 2025	<p>Perseroan memberikan jasa penyediaan manajemen, perekrutan teknisi, rancangan, pengawasan, pekerja, peralatan konstruksi, kapal dan fasilitas lainnya untuk pembangunan jalan, drainase dan infrastruktur untuk Proyek Tangguh yang dimiliki oleh BP.</p> <p>Nilai Perjanjian Proyek Tangguh adalah Rp4.660.000.000.000.</p>
21.	Perjanjian Pengadaan dan Konstruksi Pembangunan Tambang Blok Pomalaa No. 4600082007 tertanggal 3 Juli 2024 (" Perjanjian PTVI ")	<ul style="list-style-type: none"> Perseroan sebagai kontraktor PT Vale Indonesia Tbk ("PTVI") sebagai penerima jasa 	3 Juli 2024 sampai dengan seluruh kewajiban kontraktor telah selesai atau hingga diakhiri lebih awal sesuai Perjanjian PTVI	<p>Perseroan memberikan jasa konstruksi berupa penyediaan tenaga kerja, keterampilan dan sumber daya untuk pengembangan dan pembangunan Proyek Tambang Blok Pomalaa yang dimiliki oleh PTVI.</p> <p>Nilai perjanjian ini adalah Rp2.800.000.000.000.</p>

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu	Deskripsi Singkat
22.	Surat Penunjukan Pemenang untuk Infrastruktur Tambang di Kapuas Bara Utama No. 031/LOA/TNBS-PTRO/IV/2024 tertanggal 23 April 2024	<ul style="list-style-type: none"> Perseroan sebagai kontraktor PT Triasih Nawasena Bumi Sejahtera ("TNBS") sebagai penerima jasa 	23 April 2024 sampai dengan 22 Desember 2024	<p>Perseroan memberikan jasa konstruksi jalan yang termasuk namun tidak terbatas atas <i>preliminary works</i> yang terdiri dari survey rincian pekerjaan, <i>design engineering</i> pekerjaan, dan konstruksi yang terdiri dari pekerjaan <i>preliminary</i>, pembangunan jalan angkut dan pipa baja bergelombang / <i>Corrugated Steel Pipe</i> ("CSP") segmen 1, pembangunan jalan angkut dan konstruksi jembatan CSP segmen 2, pembangunan jalan angkut dan konstruksi jembatan CSP segmen 3 dan pekerjaan tambahan untuk mendukung pembangunan jalan angkut dan konstruksi jembatan CSP segmen 1 dan 2.</p> <p>Nilai perjanjian ini adalah Rp54.600.000.000.</p>
23.	Perjanjian Jasa Pertambangan No. PTP/AGR/2024/IX-0027 tertanggal 2 September 2024	<ul style="list-style-type: none"> Perseroan sebagai kontraktor PT Global Bara Mandiri ("GBM") sebagai penerima jasa 	2 September 2024 sampai dengan 31 Desember 2032	<p>Perseroan memberikan jasa penambangan kepada GBM yang terdiri dari penggalian lapisan penutup, pengupasan batu bara dan pemuatan batu bara di wilayah pertambangan batu bara GBM di Kecamatan Kapuas Tengah, Kalimantan Tengah.</p> <p>Nilai perjanjian ini adalah USD153.563.050.</p>
24.	Perjanjian Jasa Konsultan Geologis No. PTP/AGR/2024/VI-0010 tertanggal 26 Juni 2024	<ul style="list-style-type: none"> Perseroan sebagai penerima jasa PT Prima Mineral Investindo ("PMI") sebagai pemberi jasa 	26 Juni 2024 sampai dengan 25 Juni 2026	<p>PMI memberikan jasa konsultasi dan saran profesional di bidang geologi yang mencakup ruang pelaksanaan <i>desktop study/preliminary study</i> (studi pendahuluan), <i>technical review study</i> dan <i>site visit</i> dan memberikan <i>review general</i> guna mendukung kegiatan usaha yang dilakukan Perseroan.</p> <p>Nilai perjanjian ini adalah Rp27.200.000.000.</p>
25.	Perjanjian Jasa Pertambangan No. PTP/AGR/2024/VIII-0020 tertanggal 9 Agustus 2024	<ul style="list-style-type: none"> Perseroan sebagai kontraktor PT Pasir Bara Prima ("PBP") sebagai penerima jasa 	9 Agustus 2024 sampai dengan cadangan batu bara dalam IUP OP PBP habis (<i>life of mine</i>)	<p>Perseroan memberikan jasa pertambangan termasuk namun tidak terbatas kepada pengupasan, pemuatan, pengangkutan penumpukan dan penataan tanah pucuk serta pengupasan, pemuatan, pengangkutan dan penimbunan tanah penutup, pengangkutan tanah pucuk dan tanah penutup, pemberian material batuan, penambangan dan pemuatan batu bara sesuai dengan rencana tambang yang disepakati untuk PBP di Kapuas, Kalimantan Tengah.</p> <p>Nilai perjanjian ini adalah USD511.000.000.</p>
26.	Perjanjian Sewa Menyewa Indy Bintaro Office Park No. 042/CSL-PDS/AGR/VI/2015 tertanggal 26 Juli 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah melalui Addendum Kesembilan Perjanjian Sewa Menyewa Indy Bintaro Office Park No. 030/IE/CSL/AGR/VIII/2024 tertanggal 15 Juli 2024 ("Perjanjian Sewa INDY")	<ul style="list-style-type: none"> PT Indy Energi Tbk ("INDY") sebagai pemilik PT Indy Properti Indonesia ("IPI") sebagai pengelola Perseroan sebagai penyewa 	16 Februari 2015 sampai dengan 30 November 2025	<p>Perseroan menyewa ruang dan bangunan dari INDY selaku pemberi sewa yang dikelola oleh IPI dan berlokasi di Jalan Boulevard Bintaro Jaya Blok B7/A6, Sektor VII, CBD Bintaro Jaya, Pondok Jaya, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten.</p> <p>Nilai Perjanjian Sewa INDY adalah Rp11.944.755.473.</p>

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu	Deskripsi Singkat
KBL				
1.	Kontrak Pekerjaan Jasa Pertambangan No. KBL/AGR/2022/IX-0002 tanggal 15 September 2022	<ul style="list-style-type: none"> Perseroan sebagai kontraktor manajemen proyek KBL sebagai kontraktor lapangan IBP sebagai penerima jasa 	5 tahun sejak tanggal mulai pekerjaan	<p>KBL menyediakan jasa pertambangan batu bara termasuk namun tidak terbatas pada pengupasan dan pemindahan lapisan tanah penutup ke disposa, pembuatan dan pewataan lereng dan jalan angkut, pengelolaan air tambang, pengangkutan batu bara dan reklamasi yang berlokasi di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur yang dimiliki oleh IBP.</p> <p>Nilai Perjanjian Jasa Pertambangan IBP adalah Rp2.891.570.000.000.</p>
2.	Perjanjian Jasa Pertambangan No. KBL/AGR/2021/X-0003 tertanggal 10 Oktober 2021	<ul style="list-style-type: none"> Perseroan sebagai kontraktor manajemen proyek KBL sebagai kontraktor HME sebagai penerima jasa CCM sebagai pemberi jaminan 	10 Oktober 2021 sampai dengan 31 Desember 2025	<p>KBL menyediakan jasa pertambangan untuk mengambil material tanah penutup dan pengangkutan batu bara termasuk namun tidak terbatas pada penyediaan peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan untuk proyek tambang batu bara di Nunukan, Kalimantan Utara yang dimiliki oleh CCM melalui HME.</p> <p>Nilai Perjanjian Jasa Pertambangan HME adalah USD265.000.000.</p>
3.	Perjanjian Jasa Pertambangan No. KBL/AGR/2021/IV-0001 tertanggal 6 April 2021	<ul style="list-style-type: none"> Perseroan sebagai kontraktor manajemen proyek KBL sebagai kontraktor KSM sebagai penerima jasa PMA sebagai penjamin penerima jasa 	6 April 2021 sampai dengan 31 Desember 2027	<p>KBL menyediakan jasa pertambangan untuk mengambil material tanah penutup dan pengangkutan batu bara termasuk namun tidak terbatas pada penyediaan peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan untuk proyek tambang batu bara di Kota Bangun, Muara Muntai dan Loa Kulu, Kalimantan Timur yang dimiliki oleh KSM, dimana pembayaran terhadap jasa KBL tersebut dijamin oleh PMA.</p> <p>Nilai Perjanjian Jasa Pertambangan KSM adalah Rp2.700.000.000.000.</p>
4.	Perjanjian Rental Peralatan untuk Rental Peralatan Bergerak & Personil di Lokasi Tambang PT Kartika Sela Bumi No. KBL/AGR/2021/IV-0002 tertanggal 6 April 2021	<ul style="list-style-type: none"> Perseroan sebagai kontraktor manajemen proyek KBL sebagai pemberi sewa KSM sebagai penerima sewa PMA sebagai pemberi jaminan 	24 April 2021 sampai dengan 31 Desember 2027	<p>KBL bermaksud untuk menyediakan jasa sewa peralatan tambang batu bara termasuk namun tidak terbatas pada tenaga kerja yang dibutuhkan untuk melakukan pengoperasian dan perawatan atas peralatan tersebut yang dibutuhkan untuk KSM untuk proyek tambang batu bara di Kota Bangun, Muara Muntai dan Loa Kulu, Kabupaten Kartanegara, Kalimantan Timur.</p> <p>Nilai Perjanjian Rental Peralatan KSM sesuai dengan penggunaan rental peralatan setiap bulanan.</p>

b. Perjanjian Kredit

Berikut ini tabel yang menyajikan ringkasan dari perjanjian atau instrumen utang yang dimiliki oleh Perseroan dan Perusahaan Anak, sebagai berikut:

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu	Deskripsi Singkat
Perseroan				
1.	Akta Perjanjian Kredit No. 94 tanggal 29 Mei 2024 yang dibuat dihadapan Sri Buena Brahmama, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta (“ Perjanjian Kredit BCA ”)	<ul style="list-style-type: none"> Perseroan, KBL, dan CEP sebagai debitur BCA sebagai kreditur 	<p><u>Batas Waktu Penarikan dan/ atau Penggunaan Fasilitas Kredit:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> 29 November 2024 untuk fasilitas kredit investasi 1 dan fasilitas kredit investasi 2; 29 Mei 2025 untuk fasilitas kredit multi, fasilitas kredit investasi 4, dan fasilitas kredit investasi 5; dan 29 Mei 2026 untuk fasilitas <i>time loan revolving</i>. <p><u>Jatuh Tempo Pembayaran:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Maksimal 29 Mei 2026 untuk fasilitas <i>time loan revolving</i>; 96 bulan setelah tanggal penarikan pertama fasilitas kredit investasi 1; 120 bulan setelah tanggal penarikan pertama fasilitas kredit investasi 2; 96 bulan setelah tanggal penarikan pertama fasilitas kredit investasi 4; dan 96 bulan setelah tanggal penarikan pertama fasilitas kredit investasi 5. 	<p>Pemberian fasilitas-fasilitas perbankan dari BCA kepada Perseroan, antara lain:</p> <p><u>Untuk Perseroan dan KBL:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> fasilitas kredit investasi 1 dengan jumlah pokok tidak melebihi USD107.000.000 untuk mengambilalih utang Perseroan dan Perusahaan Anak di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“Mandiri”) namun tidak termasuk utang berupa <i>senior secured loan tranche A</i>; dan fasilitas kredit investasi 2 dengan jumlah pokok tidak melebihi USD83.000.000 untuk mengambilalih utang Perseroan dan Perusahaan Anak di Mandiri khusus atas utang berupa <i>senior secured loan tranche A</i>. <p><u>Untuk Perseroan, KBL, dan CEP:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> fasilitas <i>time loan revolving</i> dengan jumlah pokok tidak melebihi USD70.000.000 untuk membiayai modal kerja, termasuk mengambilalih utang fasilitas modal kerja Perseroan pada PT Bank HSBC Indonesia; fasilitas kredit multi (terdiri dari <i>letter of credit</i>, surat kredit berdokumen dalam negeri, bank garansi, <i>standby letter of credit</i>, dan <i>forex forward line</i>) dengan jumlah pokok tidak melebihi dari USD100.000.000 untuk mendukung kegiatan operasional yang utamanya digunakan untuk menjamin pembelian komponen/<i>sparepart</i>, menjamin tender, menjamin uang muka pendapatan, menjamin pelaksanaan proyek, menerbitkan SBLC untuk menjamin L/C yang fasilitas kreditnya telah diambilalih dari bank lain, dan lindung nilai kurs dana hasil ekspor sumber daya alam;

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu	Deskripsi Singkat
				<ul style="list-style-type: none"> • fasilitas kredit investasi 4 dengan jumlah pokok tidak melebihi USD50.000.000 untuk membiayai pembelian dan/atau membiayai kembali pembelian alat berat dan/atau mesin baru, termasuk komponen atas alat berat dan/atau mesin baru <i>capital expenditure</i> tahun 2024-2025; dan • fasilitas kredit investasi 5 dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp800.000.000.000 untuk membiayai pembelian dan/atau membiayai kembali pembelian alat berat dan/atau mesin baru, termasuk komponen atas alat berat dan/atau mesin baru <i>capital expenditure</i> tahun 2024-2025. <p>Bunga</p> <p>Bunga yang dibayar atas pinjaman yang diberikan berdasarkan Perjanjian Perjanjian Kredit BCA dihitung dengan rincian sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Jakarta Inter Bank Offered Rated</i> (“JIBOR”) 3 bulan + Marjin per tahun, yang dihitung dari jumlah fasilitas <i>time loan revolving</i> yang telah ditarik dalam mata uang Rupiah dan belum dibayar kembali oleh debitur, untuk fasilitas <i>time loan revolving</i>; • <i>Secured Overnight Financing Rate Data</i> (“SOFR”) <i>Term 3</i> (tiga) bulan + Marjin per tahun, yang dihitung dari jumlah fasilitas <i>time loan revolving</i> yang telah ditarik dalam mata uang USD dan belum dibayar kembali oleh debitur, untuk fasilitas <i>time loan revolving</i>; • JIBOR 3 bulan + Marjin per tahun yang dihitung dari jumlah fasilitas kredit investasi 1 yang telah ditarik dalam mata uang Rupiah dan belum dibayar kembali oleh debitur, untuk fasilitas kredit investasi 1; • SOFR <i>Term 3</i> bulan + Marjin per tahun yang dihitung dari jumlah fasilitas kredit investasi 1 yang telah ditarik dalam mata uang USD dan belum dibayar kembali oleh debitur, untuk fasilitas kredit investasi 1;

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu	Deskripsi Singkat
				<ul style="list-style-type: none"> JIBOR 3 bulan + Marjin per tahun yang - dihitung dari jumlah fasilitas kredit investasi 2 yang telah ditarik dalam mata uang Rupiah dan belum dibayar kembali oleh debitur, untuk fasilitas kredit investasi 2; SOFR Term 3 (tiga) bulan + Marjin per tahun yang dihitung dari jumlah fasilitas kredit investasi 2 yang telah ditarik dalam mata uang USD dan belum dibayar kembali oleh debitur, untuk fasilitas kredit investasi 2; SOFR Term 3 (tiga) bulan + Marjin per tahun yang dihitung dari jumlah fasilitas kredit investasi 4 yang telah ditarik dan belum dibayar kembali oleh debitur, untuk fasilitas kredit investasi 4; dan JIBOR 3 bulan + Marjin per tahun yang dihitung dari jumlah fasilitas kredit investasi 5 yang - telah ditarik dan belum dibayar kembali oleh debitur, untuk fasilitas kredit investasi 5. <p><i>Outstanding</i></p> <p>Jumlah fasilitas yang telah digunakan sampai 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> Untuk fasilitas kredit investasi 1 telah digunakan Perseroan dan KBL sebesar USD97.180.000.000; Untuk fasilitas kredit investasi 2 telah digunakan Perseroan sebesar USD81.698.000; dan Untuk fasilitas kredit investasi 4 dan 5 belum digunakan oleh Perseroan.
2.	Akta Perjanjian Perubahan dan Pernyataan Kembali terhadap Perjanjian Fasilitas Berjangka Senior No. 64 tertanggal 30 Agustus 2024 yang dibuat Sri Buena Brahmata, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta (“ Perjanjian Fasilitas Berjangka Senior ”)	<ul style="list-style-type: none"> Perseroan sebagai peminjam awal PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagai bank koordinator dan penataan BNI dan Mandiri sebagai para pengatur utama dan pembuku yang diamanatkan 	<p><u>Periode Penarikan Fasilitas:</u></p> <p>12 bulan sejak ditandatangani Perjanjian Fasilitas Berjangka Senior.</p> <p><u>Jatuh Tempo Pembayaran:</u></p> <p>96 bulan sejak ditandatangani Perjanjian Fasilitas Berjangka Senior.</p>	<p>Pemberian fasilitas perbankan dari Para Pemberi Pinjaman kepada Perseroan dengan nilai fasilitas sejumlah Rp3.100.000.000.000 untuk mendanai belanja modal terkait pembelian setiap aset usaha untuk seluruh usaha Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada kontrak jasa pertambangan, kontrak jasa rekayasa, pengadaan, dan pembangunan (<i>engineering, procurement and construction</i>) atau kontrak terkait kegiatan usaha lainnya yang disebutkan dalam Anggaran Dasar Perseroan.</p>

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu	Deskripsi Singkat
		<ul style="list-style-type: none"> • BNI dan Mandiri sebagai para pemberi pinjaman awal ("Para Pemberi Pinjaman") • BNI sebagai agen • BNI sebagai agen jaminan awal • Mandiri sebagai agen jaminan 		<p><u>Bunga</u></p> <p>Bunga yang dibayar atas pinjaman yang diberikan berdasarkan Perjanjian Fasilitas Berjangka Senior dihitung dengan komponen-komponen: (i) margin yang ditentukan oleh Para Pemberi Pinjaman dan (ii) JIBOR.</p> <p><u>Outstanding</u></p> <p>Perseroan belum menggunakan fasilitas dalam Perjanjian Fasilitas Berjangka Senior.</p>
3.	Perjanjian Induk Sewa Guna Usaha (Dengan Hak Opsi) No. PR22091689 tertanggal 19 September 2022 sebagaimana telah diubah melalui Amandemen Perjanjian Induk Sewa Guna Usaha (Dengan Hak Opsi) No. PR22091689 tanggal 19 September 2022 (" Perjanjian No. PR22091689 ")	<ul style="list-style-type: none"> • Perseroan sebagai <i>lessee</i> • PT Mitsubishi HC Capital and Finance Indonesia ("MHCI") sebagai <i>lessor</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Skedul Turunan 01: 60 bulan sejak Tanggal Permulaan Sewa Guna Usaha (sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian No. PR22091689); • Skedul Turunan 02: 60 bulan sejak Tanggal Permulaan Sewa Guna Usaha; • Skedul Turunan 03: 60 bulan sejak Tanggal Permulaan Sewa Guna Usaha; • Skedul Turunan 04: 60 bulan sejak Tanggal Permulaan Sewa Guna Usaha; dan • Skedul Turunan 05: 48 bulan sejak Tanggal Permulaan Sewa Guna Usaha. 	<p>Pemberian fasilitas pembiayaan oleh MHCI untuk pengadaan sejumlah barang modal Perseroan melalui mekanisme penjualan dan penyewagunausahaan kembali (<i>sale and lease back</i>).</p> <p>Perseroan telah mencairkan beberapa fasilitas pembiayaan sebagaimana tertuang dalam skedul-skedul turunan dari Perjanjian No. PR22091689 dengan rincian sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skedul Sewa Guna Usaha Turunan No. 01 tertanggal 19 September 2022 ("Skedul Turunan 01"); • Skedul Sewa Guna Usaha Turunan No. 02 tertanggal 19 September 2022 ("Skedul Turunan 02"); • Skedul Sewa Guna Usaha Turunan No. 03 tertanggal 30 September 2022 ("Skedul Turunan 03"); • Skedul Sewa Guna Usaha Turunan No. 04 tertanggal 7 Desember 2022 ("Skedul Turunan 04"); dan • Skedul Sewa Guna Usaha Turunan No. 05 tertanggal 3 Februari 2023 ("Skedul Turunan 05").
4.	Perjanjian Jual Beli Dalam Rangka Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi dengan Cara <i>Sale and Lease Back</i> No.: SPA/192085126 tertanggal 30 Desember 2019 sebagaimana telah diubah melalui Perubahan Pertama Perjanjian Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi Nomor: 192085126 tertanggal 20 September 2023 (" Perjanjian SGU No. 192085126 ")	<ul style="list-style-type: none"> • Perseroan sebagai <i>lessee</i> • PT Komatsu Astra Finance ("KAF") sebagai <i>lessor</i> 	30 Desember 2019 sampai dengan 30 Desember 2024	<p>Pemberian fasilitas pembiayaan oleh KAF untuk pengadaan sejumlah barang modal Perseroan melalui mekanisme sewa guna usaha atau <i>sale and lease back</i>, sesuai dengan Perjanjian SGU No. 192085126.</p>

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu	Deskripsi Singkat
5.	Perjanjian Sewa Pembiayaan No. JJKLS23070011 tertanggal 19 Oktober 2023	<ul style="list-style-type: none"> Perseroan sebagai <i>lessee</i> PT KDB Tifa Finance Tbk (“KDB”) sebagai <i>lessor</i> 	7 November 2023 sampai dengan 7 November 2027	Pemberian fasilitas pembiayaan oleh KDB untuk pengadaan sejumlah barang modal Perseroan melalui mekanisme sewa guna usaha atau <i>sale and lease back</i> .
KBL				
1.	Akta Perjanjian Kredit No. 94/2024	<ul style="list-style-type: none"> Perseroan, KBL, dan CEP sebagai debitur Bank BCA sebagai kreditur 	<p><u>Batas Waktu Penarikan dan/ atau Penggunaan Fasilitas Kredit:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> 29 November 2024 untuk fasilitas kredit investasi 1 dan fasilitas kredit investasi 2; 29 Mei 2025 untuk fasilitas kredit multi, fasilitas kredit investasi 4, dan fasilitas kredit investasi 5; dan 29 Mei 2026 untuk fasilitas <i>time loan revolving</i>. <p><u>Jatuh Tempo Pembayaran:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Maksimal 29 Mei 2026 untuk fasilitas <i>time loan revolving</i>; 96 bulan setelah tanggal penarikan pertama fasilitas kredit investasi 1; dan 120 bulan setelah tanggal penarikan pertama fasilitas kredit investasi 2. 	<p>Pemberian fasilitas-fasilitas perbankan dari BCA kepada Perseroan, antara lain:</p> <p><u>Untuk Perseroan dan KBL:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> fasilitas kredit investasi 1 dengan jumlah pokok tidak melebihi USD107.000.000 untuk mengambil utang Perseroan dan Perusahaan Anak di Mandiri namun tidak termasuk utang berupa <i>senior secured loan tranche A</i>; dan fasilitas kredit investasi 2 dengan jumlah pokok tidak melebihi USD83.000.000 untuk mengambil utang Perseroan dan Perusahaan Anak di Mandiri khusus atas utang berupa <i>senior secured loan tranche A</i>. <p><u>Untuk Perseroan, KBL, dan CEP:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> fasilitas <i>time loan revolving</i> dengan jumlah pokok tidak melebihi USD70.000.000 untuk membiayai modal kerja, termasuk mengambil utang fasilitas modal kerja Perseroan pada PT Bank HSBC Indonesia; fasilitas kredit multi (terdiri dari <i>letter of credit</i>, surat kredit berdokumen dalam negeri, bank garansi, <i>standby letter of credit</i>, dan <i>forex forward line</i>) dengan jumlah pokok tidak melebihi dari USD100.000.000 untuk mendukung kegiatan operasional yang utamanya digunakan untuk menjamin pembelian komponen/<i>spaprepart</i>, menjamin tender, menjamin uang muka pendapatan, menjamin pelaksanaan proyek, menerbitkan SBLC untuk menjamin L/C yang fasilitas kreditnya telah diambilalih dari bank lain, dan lindung nilai kurs dana hasil ekspor sumber daya alam;

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu	Deskripsi Singkat
				<ul style="list-style-type: none"> • fasilitas kredit investasi 4 dengan jumlah pokok tidak melebihi USD50.000.000 untuk membiayai pembelian dan/atau membiayai kembali pembelian alat berat dan/atau mesin baru, termasuk komponen atas alat berat dan/atau mesin baru <i>capital expenditure</i> tahun 2024-2025; dan • fasilitas kredit investasi 5 dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp800.000.000.000 untuk membiayai pembelian dan/atau membiayai kembali pembelian alat berat dan/atau mesin baru, termasuk komponen atas alat berat dan/atau mesin baru <i>capital expenditure</i> tahun 2024-2025. <p><u>Bunga</u></p> <p>Bunga yang dibayar atas pinjaman yang diberikan berdasarkan Perjanjian Perjanjian Kredit BCA dihitung dengan rincian sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • JIBOR 3 bulan + Marjin per tahun, yang dihitung dari jumlah fasilitas <i>time loan revolving</i> yang telah ditarik dalam mata uang Rupiah dan belum dibayar kembali oleh debitur, untuk fasilitas <i>time loan revolving</i>; • SOFR <i>Term</i> 3 (tiga) bulan + Marjin per tahun, yang dihitung dari jumlah fasilitas <i>time loan revolving</i> yang telah ditarik dalam mata uang USD dan belum dibayar kembali oleh debitur, untuk fasilitas <i>time loan revolving</i>; • JIBOR 3 bulan + Marjin per tahun yang dihitung dari jumlah fasilitas kredit investasi 1 yang telah ditarik dalam mata uang Rupiah dan belum dibayar kembali oleh debitur, untuk fasilitas kredit investasi 1; • SOFR <i>Term</i> 3 bulan + Marjin per tahun yang dihitung dari jumlah fasilitas kredit investasi 1 yang telah ditarik dalam mata uang USD dan belum dibayar kembali oleh debitur, untuk fasilitas kredit investasi 1;

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu	Deskripsi Singkat
				<ul style="list-style-type: none"> JIBOR 3 bulan + Marjin per tahun yang - dihitung dari jumlah fasilitas kredit investasi 2 yang telah ditarik dalam mata uang Rupiah dan belum dibayar kembali oleh debitur, untuk fasilitas kredit investasi 2; SOFR <i>Term</i> 3 (tiga) bulan + Marjin per tahun yang dihitung dari jumlah fasilitas kredit investasi 2 yang telah ditarik dalam mata uang USD dan belum dibayar kembali oleh debitur, untuk fasilitas kredit investasi 2; SOFR <i>Term</i> 3 (tiga) bulan + Marjin per tahun yang dihitung dari jumlah fasilitas kredit investasi 4 yang telah ditarik dan belum dibayar kembali oleh debitur, untuk fasilitas kredit investasi 4; dan JIBOR 3 bulan + Marjin per tahun yang dihitung dari jumlah fasilitas kredit investasi 5 yang - telah ditarik dan belum dibayar kembali oleh debitur, untuk fasilitas kredit investasi 5. <p><u>Outstanding</u></p> <p>Jumlah fasilitas yang telah digunakan sampai 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> Untuk fasilitas kredit investasi 1 telah digunakan Perseroan dan KBL sebesar USD97.180.000.000; Untuk fasilitas kredit investasi 2 telah digunakan Perseroan sebesar USD81.698.000; dan Untuk fasilitas kredit investasi 4 dan 5 belum digunakan oleh Perseroan.
2.	Perjanjian Pembiayaan Investasi – Jual dan Sewa Balik No. KBL19041382 tertanggal 13 Mei 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir melalui Amandemen Perjanjian Pembiayaan Investasi – Jual dan Sewa Balik No. KBL19041382 tertanggal 3 Juli 2023 (“ Perjanjian Pembiayaan Investasi No. KBL19041382 ”)	<ul style="list-style-type: none"> KBL sebagai <i>lessee</i> MHCI (dahulu bernama PT Mitsubishi UFJ Lease & Finance Indonesia) sebagai <i>lessor</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Skedul No. KBL19041382-001: 60 bulan sejak Tanggal Permulaan Sewa Guna Usaha (sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian Pembiayaan Investasi No. KBL19041382); Skedul No. KBL19041382-002 60 bulan sejak Tanggal Permulaan Sewa Guna Usaha; 	<p>Pemberian fasilitas pembiayaan oleh MHCI untuk pengadaan sejumlah barang modal melalui mekanisme penjualan dan penyewagunausahaan kembali (<i>sale and lease back</i>).</p> <p>KBL telah mencairkan beberapa fasilitas pembiayaan sebagaimana tertuang dalam skedul-skedul turunan dari Perjanjian Pembiayaan Investasi No. KBL19041382 dengan rincian sebagai berikut:</p>

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu	Deskripsi Singkat
			<ul style="list-style-type: none"> • Skedul No. KBL19041382-003: 60 bulan sejak Tanggal Permulaan Sewa Guna Usaha; dan • Untuk Skedul No. KBL19041382-004 60 bulan sejak Tanggal Permulaan Sewa Guna Usaha. 	<ul style="list-style-type: none"> • Skedul No. KBL19041382-001 tertanggal 13 Mei 2019 (“Skedul No. KBL19041382-001”); • Skedul No. KBL19041382-002 tertanggal 24 Juni 2019 (“Skedul No. KBL19041382-002”); • Skedul No. KBL19041382-003 tertanggal 25 Juli 2019 (“Skedul No. KBL19041382-003”); dan • Skedul No. KBL19041382-004 tertanggal 6 Desember 2019 (“Skedul No. KBL19041382-004”).
3.	Perjanjian Sewa Pembiayaan No. FL2200255 tertanggal 19 Juli 2022	<ul style="list-style-type: none"> • KBL sebagai <i>lessee</i> • PT SMFL Leasing Indonesia (“SMFL”) sebagai <i>lessor</i> 	26 Juli 2022 sampai dengan 26 Juli 2027	Pemberian fasilitas pembiayaan oleh SMFL untuk pengadaan barang modal KBL melalui mekanisme sewa guna usaha atau <i>sale and lease back</i> , sesuai dengan syarat dan ketentuan perjanjian ini.
4.	Perjanjian Sewa Pembiayaan No. FL2200393 tertanggal 16 September 2022	<ul style="list-style-type: none"> • KBL sebagai <i>lessee</i> • SMFL sebagai <i>lessor</i> 	30 September 2022 sampai dengan 30 September 2027	Pemberian fasilitas pembiayaan oleh SMFL untuk pengadaan barang modal KBL melalui mekanisme sewa guna usaha atau <i>sale and lease back</i> sesuai dengan syarat dan ketentuan perjanjian ini.
5.	Perjanjian Sewa Pembiayaan No. FL2200496 tertanggal 19 Oktober 2022	<ul style="list-style-type: none"> • KBL sebagai <i>lessee</i> • SMFL sebagai <i>lessor</i> 	28 Oktober 2022 sampai dengan 28 Oktober 2027	Pemberian fasilitas pembiayaan oleh SMFL untuk pengadaan barang modal KBL melalui mekanisme sewa guna usaha atau <i>sale and lease back</i> sesuai dengan syarat dan ketentuan perjanjian ini.
6.	Perjanjian Pembiayaan Investasi dengan Fasilitas Sewa Pembiayaan (<i>Financial Lease</i>) No. 34 tertanggal 21 Oktober 2022	<ul style="list-style-type: none"> • KBL sebagai <i>lessee</i> • PT Chandra Sakti Utama Leasing (“CSUL”) sebagai <i>lessor</i> 	26 Oktober 2022 sampai dengan 26 Oktober 2026	Pemberian fasilitas pembiayaan oleh CSUL untuk pengadaan barang modal KBL melalui mekanisme sewa pembiayaan sesuai dengan syarat dan ketentuan perjanjian ini.
7.	Perjanjian Pembiayaan Investasi dengan Fasilitas Sewa Pembiayaan (<i>Financial Lease</i>) No. 36 tertanggal 21 Oktober 2022	<ul style="list-style-type: none"> • KBL sebagai <i>lessee</i> • CSUL sebagai <i>lessor</i> 	4 November 2022 sampai dengan 4 November 2026	Pemberian fasilitas pembiayaan oleh CSUL untuk pengadaan barang modal KBL melalui mekanisme sewa pembiayaan sesuai dengan syarat dan ketentuan perjanjian ini.
8.	Perjanjian Sewa Pembiayaan No. 805-20003678 tertanggal 5 September 2023 (“ Perjanjian Sewa Pembiayaan No. 805-20003678 ”)	<ul style="list-style-type: none"> • KBL sebagai <i>lessee</i> • PT Caterpillar Finance Indonesia (“CFI”) sebagai <i>lessor</i> 	60 bulan sejak Tanggal Mulai Sewa (seabgaimana didefinisikan dalam Perjanjian Sewa Pembiayaan No. 805-20003678)	KBL bermaksud untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan melalui mekanisme sewa guna usaha dengan hak opsi membeli kembali kepada CFI sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Sewa Pembiayaan No. 805-20003678.

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu	Deskripsi Singkat
9.	Akta Perjanjian Pembiayaan Investasi dengan Cara Sewa Pembiayaan No. 214 tertanggal 21 Agustus 2023 yang dibuat di hadapan Benhard Sihite, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor ("Akta Pembiayaan Investasi No. 214/2023")	<ul style="list-style-type: none"> • KBL sebagai <i>lessee</i> • Hexa Finance Indonesia ("HFI") sebagai <i>lessor</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Lampiran 01 A: 48 bulan sejak tanggal Berita Acara Serah Terima (sebagaimana didefinisikan dalam Akta Pembiayaan Investasi No. 214/2023; • Lampiran 01 B 48 bulan sejak tanggal Berita Acara Serah Terima; • Lampiran 01 C 48 bulan sejak tanggal Berita Acara Serah Terima; • Lampiran 01 D 48 bulan sejak tanggal Berita Acara Serah Terima; • Lampiran 01 E 48 bulan sejak tanggal Berita Acara Serah Terima; dan • Lampiran 01 F 48 bulan sejak tanggal Berita Acara Serah Terima. 	<p>Pemberian fasilitas pembiayaan oleh HFI untuk pengadaan barang modal KBL melalui mekanisme sewa pembiayaan sesuai dengan syarat dan ketentuan perjanjian ini.</p> <p>KBL telah mencairkan beberapa fasilitas pembiayaan sebagaimana tertuang dalam lampiran-lampiran Akta Pembiayaan Investasi No. 214/2023 dengan rincian sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lampiran 01 A No. FL/23/06/121/001 Akta Pembiayaan Investasi No. 214/2023 tertanggal 21 Agustus 2023 ("Lampiran 01 A"); • Lampiran 01 B No. FL/23/06/121/002 Akta Perjanjian Investasi No. 214/2023 tertanggal 21 Agustus 2023 ("Lampiran 01 B"); • Lampiran 01 C No. FL/23/06/121/003 Akta Perjanjian Investasi No. 214/2023 tertanggal 21 Agustus 2023 ("Lampiran 01 C"); • Lampiran 01 D No. FL/23/06/121/004 Akta Perjanjian Investasi No. 214/2023 tertanggal 6 September 2023 ("Lampiran 01 D"); • Lampiran 01 E No. FL/23/06/121/005 Akta Perjanjian Investasi No. 214/2023 tertanggal 6 September 2023 ("Lampiran 01 E"); dan • Lampiran 01 F No. FL/23/06/121/006 Akta Perjanjian Investasi No. 214/2023 tertanggal 6 September 2023 ("Lampiran 01 F").

13. Perjanjian-Perjanjian Penting dengan Pihak Terafiliasi

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dan Perusahaan Anak telah membuat dan menandatangani perjanjian-perjanjian penting dengan pihak Afiliasi, antara lain berupa perjanjian-perjanjian sebagai berikut:

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu	Deskripsi Singkat
Perseroan				
1.	<i>Perjanjian Operasi Bersama Pelaksanaan Pertambangan Batu Bara No. PTP/AGR/2022/XII-0105 tertanggal 21 Desember 2022 ("Perjanjian Operasi Bersama")</i>	<ul style="list-style-type: none"> Perseroan sebagai kontraktor CEP sebagai penerima jasa 	6 September 2021 sampai dengan habisnya masa berlaku IUP-OP CEP	<p>Perseroan menyediakan jasa pengelolaan tambang dari hulu ke hilir, termasuk namun tidak terbatas dari pengembangan proyek, konstruksi fasilitas proyek, manajemen proyek, penggalian lapisan penutup, penyewaan alat untuk pelepasan batu bara dan pengangkutan batu bara untuk proyek tambang batu bara yang dimiliki oleh CEP.</p> <p>Nilai Perjanjian Operasi Bersama adalah USD1.126.754.257,602.</p>

Catatan:

Perjanjian Operasi CEP merupakan perjanjian yang bersifat Afiliasi yang dikarenakan CEP merupakan bagian dari Perusahaan Anak.

2.	Perjanjian Jasa Pertambangan No. PTP/AGR/2023/VIII-0005 dan No. CEP/AGR/2023/VIII-0002 tertanggal 28 Juni 2023 ("Perjanjian Jasa Pertambangan CEP")	<ul style="list-style-type: none"> Perseroan sebagai kontraktor CEP sebagai penerima jasa 	1 Juni 2023 sampai dengan habisnya masa berlaku IUP-OP CEP	<p>Sehubungan dengan Perjanjian Operasi Bersama, CEP memberikan surat perintah kerja kepada Perseroan untuk melakukan pekerjaan persiapan, pembangunan infrastruktur tambang, pekerjaan tambang khususnya pengupasan, pemuatan, pengangkutan, penumpukan tanak pucuk, penimbunan tanah penutup dan/ atau pekerjaan lain yang disepakati oleh Perseroan dan CEP, pada wilayah kerja tambang batu bara CEP.</p> <p>Nilai Perjanjian Jasa Pertambangan CEP adalah USD1.126.754.257,602.</p>
----	--	---	--	--

Catatan:

Perjanjian Jasa Pertambangan CEP merupakan perjanjian yang bersifat Afiliasi yang dikarenakan CEP merupakan bagian dari Perusahaan Anak.

3.	Perjanjian Layanan Manajemen No. Petrindo/AGR/2024/VI-0011 dan No. PTP/AGR/2024/VI-0011 tertanggal 26 Juni 2024	<ul style="list-style-type: none"> Perseroan sebagai pemberi jasa CUAN sebagai penerima jasa 	26 Juni 2024 sampai dengan 25 Juni 2026	<p>Perseroan memberikan jasa konsultan manajemen dan manajemen kepada CUAN dan perusahaan anaknya yang bergerak dibidang usaha pertambangan dalam bidang manajemen proyek, operasional (ketenagakerjaan, peralatan dan infrastruktur) dan teknologi.</p> <p>Nilai perjanjian ini adalah Rp107.000.000.000.</p>
----	--	--	---	--

Catatan:

Perjanjian ini merupakan perjanjian yang bersifat Afiliasi yang dikarenakan CUAN merupakan pemegang saham secara tidak langsung Perseroan dan pemilik manfaat akhir dari Perseroan dan CUAN adalah orang yang sama, yaitu Pragojo Pangestu.

4.	Perjanjian Jasa Pengembangan Infrastruktur Tambang No. PTP/AGR/2024/VI-0012 tertanggal 26 Juni 2024	<ul style="list-style-type: none"> Perseroan sebagai kontraktor PT Daya Bumindo Karunia ("DBK") sebagai penerima jasa 	12 bulan sejak tanggal mulai pekerjaan atau disepakati lain oleh para pihak atau pada saat penandatanganan BAST selesai pekerjaan	<p>Perseroan memberikan jasa pengembangan infrastruktur dalam bentuk konstruksi jalan tambang di dalam dan sekitar area operasi DBK yang mencakup pekerjaan awal yang terdiri dari survei, pembaruan dan tinjauan terperinci dari studi kelayakan dan studi sosial, serta pembangunan infrastruktur pertambangan.</p> <p>Nilai perjanjian ini adalah Rp1.000.000.000.000.</p>
----	--	---	---	---

Catatan:

Perjanjian ini merupakan perjanjian yang bersifat Afiliasi yang dikarenakan terdapat anggota Direksi dalam Perseroan yang menjabat sebagai anggota Direksi DBK dan pemilik manfaat akhir dari Perseroan dan DBK adalah orang yang sama yaitu Pragojo Pangestu.

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu	Deskripsi Singkat
5.	Perjanjian Sewa Menyewa Wisma Barito Pacific Jakarta tertanggal 21 Juni 2024	<ul style="list-style-type: none"> Perseroan sebagai penyewa PT Griya Idola ("PTGI") sebagai pemberi sewa 	31 Agustus 2024 sampai dengan 30 Agustus 2026	<p>Perseroan menyewa ruang dan bangunan dari PTGI selaku pemberi sewa yang berlokasi di Wisata Barito Pacific Jakarta yang dipergunakan untuk kantor pusat Perseroan.</p> <p>Nilai perjanjian ini adalah bergantung pada penggunaan dan pemakaian secara aktual luas bangunan yang disewa.</p> <p>Tarif sewa per bulan adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> Untuk tahun 2024 sebesar Rp114.000 per meter persegi; dan Untuk tahun 2025 sebesar Rp117.000 per meter persegi.

Catatan:

Perjanjian ini merupakan perjanjian yang bersifat Afiliasi yang dikarenakan terdapat pemilik manfaat akhir dari Perseroan dan PTGI adalah orang yang sama yaitu Prajogo Pangestu."

14. Aset Tetap

Pada tanggal 30 Juni 2024, jumlah nilai aset tetap – bersih yang dimiliki Perseroan adalah sebesar USD228.609 ribu yang terdiri antara lain:

a. Peralatan Berat

Perseroan memiliki aset tetap yang berupa alat-alat berat yang terdiri dari compactor, crane, dozer, excavator, forklift, telehandler, truk, loader, dan lain-lain dengan perincian sebagai berikut:

No.	Jenis	Jumlah
1.	<i>Amphibious Passanger Hydratek</i>	1
2.	<i>Backhoe Loader</i>	1
3.	<i>Bucyrus</i>	2
4.	<i>Compactor</i>	9
5.	<i>Crane</i>	20
6.	<i>Dozer</i>	64
7.	<i>Drill</i>	5
8.	<i>Excavator</i>	60
9.	<i>Forklift</i>	5
10.	<i>Grader</i>	34
11.	<i>Hauling Truck</i>	21
12.	<i>Handler Manitou</i>	17
13.	<i>Loader</i>	8
14.	<i>Module Service Truck</i>	1
15.	<i>Pontoon</i>	20
16.	<i>Telehandler</i>	4
17.	<i>Trailer</i>	13
18.	<i>Troop Carrier</i>	5
19.	<i>Truck Artic Dump</i>	3
20.	<i>Truck Crane</i>	14
21.	<i>Truck Drop Tray</i>	2
22.	<i>Truck Dump</i>	261
23.	<i>Truck Fire</i>	1
24.	<i>Truck Fuel</i>	24
25.	<i>Truck Manhaul</i>	34
26.	<i>Truck Mixer</i>	7
27.	<i>Truck P-Mover</i>	2
28.	<i>Truck Prime Mover</i>	11
29.	<i>Truck Service</i>	26

No.	Jenis	Jumlah
30.	<i>Truck Tyre</i>	2
31.	<i>Truck Wash</i>	2
32.	<i>Truck Water</i>	22
33.	<i>Truck Welding</i>	1
34.	<i>Vibrator Roller</i>	3
Total		705

b. Tanah dan Bangunan

Perseroan memiliki dan/atau menguasai tanah dan bangunan dengan total luas 438.272 m², dengan keterangan sebagai berikut:

No.	Jenis	No. Sertifikat	Lokasi	Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhirnya Hak	Luas Wilayah (m ²)	Pemanfaatan
1.	SHGB	002	Belo / Nusa Tenggara Barat	19 September 2000	18 September 2030	89.218	Disewakan kepada pihak ketiga
2.	SHGB	1209	Kariangau / Kalimantan Timur	10 Desember 2018	13 Desember 2048	7.918	Tidak dipergunakan untuk apapun (tanah kosong)
3.	SHGB	140	Batu Kajang / Kalimantan Timur	19 Desember 2017	10 Oktober 2037	93.465	<i>Mess</i>
4.	SHGB	142	Batu Kajang / Kalimantan Timur	9 Oktober 2018	11 Juli 2038	7.737	<i>Mess</i>
5.	SHGB	017	Wanagon / Papua	5 November 2021	5 November 2051	92.872	Tidak dipergunakan untuk apapun (tanah kosong)
6.	SHGB	191	Batu Kajang / Kalimantan Timur	1 Agustus 2022	28 Juli 2052	9.967	<i>Mess</i>
7.	SHGB	192	Batu Kajang / Kalimantan Timur	1 Agustus 2022	28 Juli 2052	17.960	<i>Mess</i>
8.	SHGB	442	Kariangau / Kalimantan Timur	10 Februari 2009	10 Februari 2029	22.728	Kantor dan <i>workshop</i>
9.	SHGB	444	Kariangau / Kalimantan Timur	3 Maret 2009	3 Maret 2029	3.830	Kantor dan <i>workshop</i>
10.	SHGB	649	Kariangau / Kalimantan Timur	22 Maret 2013	22 Maret 2043	11.557	Kantor dan <i>workshop</i>
11.	SHGB	001	Rumaju / Sulawesi Selatan	20 Februari 2023	1 Februari 2048	912	Tidak dipergunakan untuk apapun (tanah kosong)
12.	SHGB	668	Kwamki / Irian Jaya	18 Agustus 1998	18 Agustus 2028	42.459	<i>Mess</i> dan <i>workshop</i>

No.	Jenis	No. Sertifikat	Lokasi	Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhirnya Hak	Luas Wilayah (m ²)	Pemanfaatan
13.	SHGB	011	Batu Kajang / Kalimantan Timur	13 Januari 2010	28 September 2029	20.000	Mess
14.	SHGB	1964	Kariangau / Kalimantan Timur	18 April 2024	18 April 2044	6.097	Tidak dipergunakan untuk apapun (tanah kosong)
15.	SHGB	1676	Kariangau / Kalimantan Timur	9 Maret 2023	8 Februari 2053	11.552	Penempatan alat berat

15. Sifat dan Transaksi Dengan Pihak Afiliasi

Sifat Pihak Afiliasi

Pada tanggal 16 Februari 2024, telah terjadi perubahan pengendalian Perseroan yang semula CRO menjadi KJP. Setelah tanggal 16 Februari 2024, sifat hubungan dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

- KJP adalah pengendali Perseroan.
- PT Sentosa Bersama Mitra dan CRO adalah pemegang saham Perseroan.
- PT Sentosa Bersama Mitra, PT Sarana Adiwilaga Persada, PT Dua Usaha Karya Negeri dan PT Tata Masa Nusantara adalah pemegang saham dari CRO.
- PT Rukun Raharja Tbk (“RAJA”), CUAN, PT Prima Mineral Investindo (“PMI”), PT Daya Bumindo Karunia (“DBK”) mempunyai beberapa manajemen kunci yang sama dengan Perseroan.
- PT Tamtama Perkasa, PMI, DBK, dan PT Griya Idola yang mempunyai pemegang saham yang sama secara langsung maupun tidak langsung.
- PT Triguna Internusa Pratama (“TIP”) merupakan anak perusahaan dari RAJA, di mana RAJA merupakan pemegang saham PT Sentosa Bersama Mitra.

Kepemilikan Dalam Operasi Bersama

Pada tanggal 11 Maret 2020, Perseroan melakukan kerja sama operasi dengan FDI yang dikenal dengan nama Flour-Petrosea Joint Organization (“FPJO”) di mana dilaksanakan pengendalian bersama.

Bagian Perseroan dalam kerja sama ini secara keseluruhan adalah 40% sehubungan dengan *Mill Optimization for Underground Ores Project* untuk PT Freeport Indonesia. Perseroan dan Perusahaan Anak berhak atas proporsional bagian dari penghasilan konstruksi dan rekayasa yang diterima dan menanggung bagian proporsional dari biaya operasi bersama.

Ringkasan keuangan di bawah ini merupakan jumlah yang ditunjukkan dalam laporan keuangan operasi bersama sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia:

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

	30 Juni 2024	30 Juni 2023	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Jumlah aset	37.271	N/A	31.658	44.735
Jumlah liabilitas	36.307	N/A	30.240	41.737
Jumlah pendapatan	35.562	39.650	66.040	31.780
Jumlah beban	30.883	37.380	62.307	29.464

Transaksi-transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

a. FPJO

Pada tanggal 11 Maret 2020, Perseroan bersama dengan FDI telah membentuk suatu kerjasama organisasi FPJO untuk melaksanakan Proyek Optimalisasi Pabrik Biji Bawah Tanah (*Mill Optimization for Underground Ores Project*) untuk PT Freeport Indonesia.

Selanjutnya, FPJO bersama dengan PT Freeport Indonesia menandatangani *Engineering, Procurement, Construction and Construction Management Master Agreement*.

Pada tanggal 3 November 2020, FPJO dan PT Freeport Indonesia menandatangani *Supplement Agreement* dengan nilai estimasi total USD100.122 ribu.

Pada periode 12 November 2021 sampai dengan 10 Oktober 2023, FPJO dan PT Freeport Indonesia menandatangani *Change Order* 001- 010 untuk Proyek SAG3 (*Change Order* untuk *Supplement Agreement* No. TP1900216-002). Melalui *Change Order* ini, durasi proyek diperpanjang hingga tanggal 30 Mei 2024, dengan tambahan nilai kontrak sebesar USD92.733 ribu.

Pada periode 30 November 2021 sampai dengan 1 Agustus 2023, FPJO dan PT Freeport Indonesia menandatangani beberapa LNTP dan *Supplement Agreement* untuk Proyek *Copper Cleaner Circuit Construction Services* ("CUCL"). Proyek ini telah diselesaikan pada tanggal 31 Desember 2023 dengan jumlah nilai kontrak sebesar Rp802.087 juta (setara dengan USD52.029 ribu).

Pada tanggal 10 Maret 2024, FPJO dan PT Freeport Indonesia menandatangani *Supplement Agreement* No. TP1900216-005 untuk Proyek CUCL. Melalui *Supplement Agreement* ini, Proyek CUCL diperpanjang hingga tanggal 31 Agustus 2024 dan mendapatkan tambahan nilai kontrak sebesar Rp1.614 miliar (setara dengan USD105 juta).

Pada tanggal 15 Januari 2024, PT Freeport Indonesia telah menunjuk FPJO untuk mengerjakan Proyek *Redundant Conveyor* ("RECON") *Construction Services* dengan nilai pekerjaan sebesar Rp66.122 juta melalui LNTP No. TP1900216-007. LNTP ini berlaku efektif dari tanggal 15 Januari 2024 hingga 30 April 2024.

Pada tanggal 18 Juni 2024, PT Freeport Indonesia telah menerbitkan LNTP kepada FPJO untuk menyediakan tenaga kerja dan peralatan untuk mendukung pekerjaan konstruksi di SAG2. Nilai LNTP ini adalah Rp25,9 miliar (setara dengan USD1,6 juta) dan berlaku hingga ditandatangani *Supplement Agreement* untuk pekerjaan ini.

Pendapatan yang berasal dari jasa konstruksi dan rekayasa untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2024 sebesar USD36.028 ribu (2023: USD27.687 ribu).

Biaya atas jasa konstruksi dan rekayasa untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2024 sebesar USD30.882 ribu (2023: USD21.781 ribu).

Saldo piutang usaha dan piutang lain-lain atas FPJO pada 30 Juni 2024 masing-masing sebesar USD29.297 ribu dan USD7 ribu (31 Desember 2023: USD20.842 ribu dan Nihil). Persentase saldo piutang tersebut terhadap jumlah aset pada 30 Juni 2024 adalah sebesar 3,85% (31 Desember 2023: 2,86%).

16. Asuransi

Perseroan telah memiliki asuransi yang menutup/meng-cover risiko-risiko untuk Perseroan dan Perusahaan Anak sebagai berikut:

Nomor Polis	Jenis Asuransi	Penanggung	Tertanggung	Periode	Obyek Pertanggungan
L08-01-08-2022-00000001	Asuransi Tanggung Gugat Profesional atas Satu Project	PT Asuransi Cakrawala Proteksi	Perseroan	1 September 2022 – 11 Maret 2025	Segala biaya kerugian yang timbul akibat kesalahan Perseroan dalam menjalankan proyek tertentu di Sulawesi Selatan.
MOP/01/2023/C05/001	Asuransi Kargo Laut	PT Asuransi Cakrawala Proteksi	<ul style="list-style-type: none"> Perseroan; dan Perusahaan Anak 	7 Juni 2023 sampai diakhiri para pihak	Segala jenis benda dan/atau logistik termasuk namun tidak terbatas batu bara.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan sedang dalam proses perpanjangan/pembaharuan terhadap beberapa polis asuransi Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2024, sebagaimana dibuktikan dengan *cover note* perpanjangan polis asuransi sebagai berikut:

- a. *Cover Note* No. 0045/LGI/BKR/10/2024 tertanggal 30 Oktober 2024 untuk tipe pertanggungan asuransi tanggung gugat umum komprehensif dengan penanggung adalah (i) PT Lippo General Insurance Tbk ("**LPGI**"), (ii) PT Asuransi Candi Utama ("**ACU**"), (iii) PT Asuransi Jasa Indonesia ("**AJI**"), (iv) PT Asuransi Wahana Tata ("**AWT**"), dan (v) PT Asuransi Central Asia ("**ACA**") serta tertanggung adalah Perseroan dan Perusahaan Anak (kecuali PSA), jangka waktu pertanggungan 31 Oktober 2024 sampai 31 Oktober 2025;
- b. *Cover Note* No. 0046/LGI/BKR/10/2024 tertanggal 31 Oktober 2024 untuk tipe pertanggungan asuransi mesin dan pabrik kontraktor dengan penanggung adalah (i) LPGI, (ii) ACU, (iii) PT Asuransi Harta Aman Pratama ("**AHAP**"), (iv) AJI, (v) PT Asuransi Tripakarta Syariah ("**ATS**"), dan (vi) ACA serta tertanggung adalah Perseroan dan Perusahaan Anak, jangka waktu pertanggungan 31 Oktober 2024 sampai 31 Oktober 2025;
- c. *Cover Note* No. 0047/LGI/BKR/10/2024 tertanggal 31 Oktober 2024 untuk tipe pertanggungan asuransi tanggung jawab direktur dan pegawai dengan penanggung adalah LPGI serta tertanggung adalah Perseroan, jangka waktu pertanggungan adalah 31 Oktober 2024 sampai 31 Oktober 2025;
- d. *Cover Note* No. 0044/LGI/BKR/10/2024 tertanggal 30 Oktober 2024 untuk tipe pertanggungan asuransi kerusakan mesin termasuk gangguan bisnis dengan penanggung adalah (i) LPGI, (ii) ACU, (iii) AJI, (iv) ACA, (v) PT BRI Asuransi Indonesia ("**BAI**"), (vi) PT Asuransi Jasindo Syariah ("**AJS**"), (vii) AHAP, (viii) PT Asuransi Tugu Pratama ("**ATP**"), (ix) PT Asuransi Artarindo ("**AA**"), dan (x) ATS serta tertanggung adalah Perseroan dan Perusahaan Anak, jangka waktu pertanggungan adalah 31 Oktober 2024 sampai 31 Oktober 2025;
- e. *Cover Note* No. 325/CN/MKT/RSN/X/2024 tertanggal 30 Oktober 2024 untuk tipe pertanggungan asuransi kendaraan bermotor dengan penanggung adalah AWT serta tertanggung adalah Perseroan, jangka waktu pertanggungan adalah 31 Oktober 2024 sampai 31 Oktober 2025;
- f. *Cover Note* No. 0043/LGI/BKR/10/2024 tertanggal 30 Oktober 2024 untuk tipe pertanggungan asuransi properti dan gangguan bisnis termasuk gempa bumi dengan penanggung adalah (i) LPGI, (ii) ACU, (iii) AJI, (iv) ACA, (v) BAI, (vi) AJS, (vii) AHAP, (viii) ATP, (ix) AA, dan (x) ATS serta tertanggung adalah Perseroan dan Perusahaan Anak, jangka waktu pertanggungan adalah 31 Oktober 2024 sampai 31 Oktober 2025;
- g. *Cover Note* No. 128/10/EEI/2024 tertanggal 1 November 2024 untuk tipe pertanggungan asuransi peralatan elektronik dengan penanggung adalah (i) ACU, (ii) ATP, (iii) ATS, (iv) BAI, (v) LPGI, (vi) AHAP, dan (vii) AA serta tertanggung adalah Perseroan dan Perusahaan Anak, jangka waktu pertanggungan adalah 31 Oktober 2024 sampai 31 Oktober 2025;
- h. *Cover Note* No. 0048/LGI/BKR/10/2024 tertanggal 31 Oktober 2024 untuk tipe asuransi ganti rugi profesional dengan penanggung adalah LPGI serta tertanggung adalah Perseroan dan Perusahaan Anak, jangka waktu pertanggungan adalah 31 Oktober 2024 sampai 31 Oktober 2025; dan
- i. *Cover Note* No. 0748/ACA/BDII/2024 tertanggal 1 November 2024 untuk tipe asuransi kargo laut dengan penanggung (i) ACA, (ii) PT AIG Insurance Indonesia, (iii) AJI, dan (iv) AA serta tertanggung adalah Perseroan dan Perusahaan Anak, jangka waktu pertanggungan adalah 31 Oktober 2024 sampai 31 Oktober 2025.

Adapun nilai pertanggungan pada asuransi-asuransi yang dimiliki oleh Perseroan dapat menutupi risiko-risiko kerugian tertanggung yang dapat muncul dikemudian hari, yaitu mencerminkan nilai pemulihan aset dan/atau batas ganti rugi yang diminta dalam kontrak (*liability*).

17. Perkara Yang Sedang Dihadapi Perseroan dan Perusahaan Anak, serta anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dan Perusahaan Anak

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Perusahaan Anak, maupun masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak, tidak sedang terlibat dalam perkara hukum, baik pada bidang perdata maupun pidana dan/atau perselisihan/tuntutan di pengadilan dan/atau badan arbitrase di Republik Indonesia atau dalam perselisihan administratif dengan badan Pemerintah termasuk perselisihan yang terkait dengan kewajiban pajak atau perselisihan yang terkait dengan masalah perburuhan atau diajukan untuk kepailitan oleh pihak ketiga, atau mengajukan kepailitan yang dapat memengaruhi kegiatan operasional, kegiatan usaha dan pendapatan Perseroan secara negatif dan material, serta dapat menghalangi pelaksanaan transaksi Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Petrosea Tahap I Tahun 2024 ini.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak ada somasi, baik yang dihadapi Perseroan dan Perusahaan Anak maupun masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak yang berpotensi menjadi perkara yang bersifat material dan dapat mempengaruhi kegiatan operasional, kegiatan usaha atau pendapatan Perseroan dan Perusahaan Anak secara negatif dan material, serta dapat menghalangi pelaksanaan transaksi Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Petrosea Tahap I Tahun 2024 ini.

18. Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)

Berikut adalah tabel kepemilikan dan/atau penguasaan hak atas kekayaan intelektual Perseroan:

a. Merek

No.	Nomor Permohonan	Tanggal Penerimaan	Merek	Kelas	Etiket Merek
1.	IDM000419413	23 Desember 2011	Petrosea + logo	37	
2.	IDM000906181	21 Agustus 2020	Petrosea Minerva + logo	37	
3.	IDM000906186	21 Agustus 2020	Minerva + logo	37	
4.	IDM000906184	21 Agustus 2020	Petrosea Minerva + logo	42	
5.	IDM000906191	21 Agustus 2020	Minerva + logo	42	
6.	IDM000910336	11 September 2020	Minerva Arms + logo	37	
7.	IDM000910342	11 September 2020	Minerva Arms + logo	42	
8.	IDM000910344	11 September 2020	Minerva Ecm + logo	37	
9.	IDM000910345	11 September 2020	Minerva Ecm + logo	42	
10.	IDM000910348	11 September 2020	Minerva Fom + logo	37	
11.	IDM000910349	11 September 2020	Minerva Fom + logo	42	
12.	IDM000910350	11 September 2020	Minerva Fra + logo	37	

No.	Nomor Permohonan	Tanggal Penerimaan	Merek	Kelas	Etiket Merek
13.	IDM000910489	11 September 2020	Minerva Fra + logo	42	MINERVA FRA
15.	IDM000910235	11 September 2020	Minerva Mpo + logo	37	MINERVA MPO
16.	IDM000910239	11 September 2020	Minerva Mpo + logo	42	MINERVA MPO
17.	IDM00091024	11 September 2020	Minerva PdM + logo	37	MINERVA PdM
18.	IDM000910242	11 September 2020	Minerva PdM + logo	42	MINERVA PdM
19.	IDM000910330	11 September 2020	Minerva Pmt + logo	37	MINERVA PMT
20.	IDM000910335	11 September 2020	Minerva Pmt + logo	42	MINERVA PMT
21.	IDM000910338	11 September 2020	Minerva Mda + logo	37	MINERVA MDA
22.	IDM000910341	11 September 2020	Minerva Mda + logo	42	MINERVA MDA

b. Hak Cipta

No.	Nomor Pencatatan	Tanggal Pendaftaran	Jenis Ciptaan	Judul Ciptaan
1.	000101623	14 Februari 2018	Program Komputer	PBMS (Petrosea Base Management System)
2.	000101624	14 Februari 2018	Program Komputer	PBMS (Petrosea Base Management System) Scheduling Agent
3.	000101625	14 Februari 2018	Program Komputer	PBMS (Petrosea Base Management System) Integration Agent
4.	000101626	14 Februari 2018	Program Komputer	PLB (Pusat Logistik Berikat) Web Report
5.	000101628	14 Februari 2018	Program Komputer	POSB (Petrosea Offshore Supply Base) Portal File Management
6.	000101627	14 Februari 2018	Program Komputer	POSB (Petrosea Offshore Supply Base) Operation Dashboard
7.	000101629	14 Februari 2018	Program Komputer	PBMS (Petrosea Base Management System) PVA (Performance Vessel Alongside) Dashboard
8.	000101630	14 Februari 2018	Program Komputer	PIMS (Petrosea Interactive Media Station)
9.	000197037	5 Agustus 2020	Program Komputer	Predictive Maintenance (PdM)
10.	000198063	5 Agustus 2020	Program Komputer	Mine Dashboard (MineDash)
11.	000205440	21 September 2020	Program Komputer	Mining Dashboard
12.	000197993	5 Agustus 2020	Program Komputer	Effective Validation of Attendance (EVA)
13.	000204521	5 Agustus 2020	Program Komputer	Minerva Mobile Application (MineApp)
14.	000198018	5 Agustus 2020	Program Komputer	Mine Operation Control And Monitoring (MOCOM)
15.	000197522	5 Agustus 2020	Program Komputer	Asset Resource Management System (ARMS)
16.	000197541	5 Agustus 2020	Program Komputer	Mine Operation Planning Dashboard (MOPAD)
17.	000578747	10 Januari 2024	Program Komputer	ENVO 360

B. KEGIATAN USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK DAN KECENDERUNGAN SERTA PROSPEK USAHA

1. Umum

Perseroan didirikan pada tahun 1972 sebagai perusahaan jasa pertambangan terintegrasi di Indonesia yang berkomitmen penuh untuk mengedepankan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) dan aspek ESG sebagai kontinuitas dari strategi keberlanjutan Perseroan.

Pada tahun 2019, Perseroan diseleksi oleh *World Economic Forum* sebagai satu-satunya perusahaan tambang dan satu satunya perusahaan milik Indonesia yang masuk ke dalam *Global Lighthouse Network* berkat kesuksesan dalam mengimplementasikan teknologi Industri 4.0 untuk mendukung kinerja.

Sejak akhir tahun 2019, Perseroan telah meluncurkan strategi 3D, yaitu Diversifikasi, Digitalisasi & Dekarbonisasi, sebagai *enabler* dan pilar kunci untuk terus memberikan *value proposition* kepada seluruh pemangku kepentingan. Dalam menjalankan strateginya, Perseroan telah merumuskan kebijakan strategis untuk meningkatkan kinerja keuangan dan operasional melalui penyediaan jasa pertambangan & rekayasa dan konstruksi terintegrasi dan pengembangan *business model* yang inovatif di sektor batu bara termasuk mengintensifkan diversifikasi usaha ke sector mineral lainnya.

Pada tahun 2022, pemilik mayoritas saham Perseroan beralih dari PT Indika Energy Tbk ke CRO, perusahaan Indonesia yang menjalankan kegiatan usaha di bidang aktivitas keuangan dan asuransi, serta aktivitas profesional, ilmiah dan teknis. Pemilik mayoritas saham yang baru ini berkomitmen untuk mempertahankan dan bahkan meningkatkan kinerja ESG Perseroan.

Pada tahun 2023, Perseroan berhasil mencapai sebuah jejak langkah penting, yaitu penuntasan transaksi pembelian 99,99% saham KMS, yang merupakan pemilik 99,90% saham CEP, perusahaan penambangan batu bara dengan area operasional yang berlokasi di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur.

Akuisisi tersebut merupakan wujud akselerasi strategi jangka panjang Perseroan untuk menjadi *sustainable company* di masa mendatang melalui kepemilikan tambang dan diversifikasi portofolio proyek ke sektor mineral lainnya dengan menyediakan jasa pertambangan dan rekayasa dan konstruksi terintegrasi.

Pada tanggal 16 Februari 2024, KJP telah menyelesaikan pengambilalihan atas 342.925.700 saham atau mewakili 34% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan yang dimiliki oleh CRO. KJP merupakan Entitas Anak langsung yang dikendalikan dan dimiliki sebesar 99,98% oleh CUAN.

Pada tanggal 7 Juni 2024, KJP telah menambah kepemilikan saham sebanyak 75.836.700 saham yang mewakili 7,5% dari modal disetor dan ditempatkan pada Perseroan. Sehingga, kepemilikan saham KJP di Perseroan menjadi sebesar 41,5%.

2. Kegiatan Usaha

Perseroan mengelompokkan kegiatan-kegiatan usahanya ke dalam tiga lini bisnis operasional, yaitu Kontrak Pertambangan, Rekayasa dan Konstruksi, serta Jasa Logistik dan Pendukung Kegiatan Minyak & Gas Bumi. Pada bulan Juni 2024, Perseroan mencatatkan peningkatan pendapatan yang signifikan dari lini bisnis rekayasa dan konstruksi sebesar 96,42%, sementara pendapatan dari kontrak pertambangan menurun sebesar 27,15%.

Bisnis Kontrak Pertambangan

Dengan pengalaman lebih dari 52 tahun, Perseroan memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai evolusi industri pertambangan di Indonesia, termasuk pengaplikasian teknologi terkini, serta berbagai kapabilitas teknis yang dapat memenuhi ekspektasi para pelanggan. Pada tahun 2023, Perseroan mencapai tingkat kinerja operasional yang lebih tinggi dari yang ditargetkan.

Lini bisnis Kontrak Pertambangan Perseroan menawarkan berbagai layanan proyek mulai dari penambangan terbuka hingga pelabuhan, termasuk aktivitas layanan penambangan kontrak, konstruksi sipil & infrastruktur, manajemen proyek penambangan, konsultasi studi teknis & kelayakan, serta solusi digital Minerva yang dapat diaplikasikan di setiap operasional pertambangan mineral termasuk batu bara. Pada 30 Juni 2024, Perseroan mencatatkan penurunan aktivitas operasional terutama pada beberapa proyek Kontrak Pertambangan, dengan total volume *overburden removal* turun 16,16% dari 60,94 juta BCM menjadi 51,09 juta BCM dan produksi batu bara juga turun 5,06% dari 8,69 juta ton menjadi 8,25 juta ton.

Pada tahun 2023, Perseroan berhasil meningkatkan pangsa pasar di sektor pertambangan mineral dengan memperoleh beberapa kontrak baru, seperti perjanjian jasa pertambangan antara Perseroan dan PT Sumberdaya Arindo yang berlokasi di Halmahera Timur untuk pekerjaan material removal dan pengangkutan bijih nikel dengan nilai kontrak sebesar Rp1,09 triliun dan jangka waktu kontrak selama 3 tahun. Selain itu Perseroan juga berhasil memperoleh dua kontrak baru jasa pertambangan di Kalimantan Timur antara Perseroan dan PT Kedap Sayaaq dengan durasi kontrak selama 5 tahun yang mendukung kontribusi terbesar terhadap pendapatan Perseroan.

Hingga tanggal 30 Juni 2024, Perseroan terus berupaya untuk mendiversifikasi dan ekspansi bisnis terutama pada bisnis Kontrak Pertambangan. Selama periode ini, Perseroan telah mendapatkan beberapa kontrak baru diantaranya dengan PT Pasir Bara Prima, PT Global Bara Mandiri, PT Prima Mineral Investindo serta PT Triasih Nawasena Bumi Sejahtera untuk menunjang keberlanjutan usaha Perseroan.

Perseroan melanjutkan komitmennya untuk tetap menjadi yang terdepan dalam pengembangan dan penerapan teknologi dalam industri pertambangan. Penyempurnaan yang dilakukan secara berkelanjutan telah memberikan manfaat signifikan bagi kinerja operasional Perseroan sejak tahun 2018. Minerva Digital Platform menawarkan berbagai fitur inovatif dan terintegrasi sebagai dukungan proses penambangan dari hulu hingga hilir. Langkah ini merupakan upaya penting untuk memastikan kinerja terbaik yang berkelanjutan di masa depan yang mengutamakan tata kelola perusahaan dan aspek ESG. Selain itu, Perseroan juga melakukan diversifikasi horizontal ke sektor mineral lainnya seperti nikel, bauksit, dan emas, serta mendukung proyek hilirisasi industri tembaga.

Bisnis Rekayasa dan Konstruksi

Lini bisnis Rekayasa dan Konstruksi Perseroan menawarkan berbagai layanan proyek yang meliputi desain, rekayasa, pengadaan, konstruksi, hingga commissioning. Perseroan dikenal dengan kapabilitasnya dalam menangani proyek multidisiplin mulai dari desain konsep hingga penyelesaian proyek. Pada tahun 2023, Perseroan menandatangani amandemen Master Services Agreement dengan PT Freeport Indonesia untuk proyek Grasberg Wanagon Mining Services di Papua dengan perpanjangan masa kontrak hingga 28 Februari 2024.

Lini bisnis rekayasa dan konstruksi telah mengimplementasikan teknologi digital terbaru untuk mendorong kinerja operasional. Digitalisasi rekayasa dan konstruksi semakin diperkuat dengan adanya Tactical Room atau TAC Room di kantor pusat Perseroan yang menggunakan teknologi Building Information Modeling (BIM), Digital Twin, dan Digital Boardroom. Inisiatif digitalisasi ini dirancang untuk menyelesaikan berbagai isu operasional di tingkat proyek dengan mengadopsi teknologi Industri 4.0, termasuk meningkatkan transparansi dan efisiensi, serta memastikan proses pengambilan keputusan yang lebih baik.

Hingga tanggal 30 Juni 2024, Perseroan terus berupaya untuk mendiversifikasi dan ekspansi bisnis terutama pada bisnis rekayasa dan konstruksi. Selama periode ini, Perseroan telah mendapatkan beberapa kontrak baru diantaranya dengan BP Berau Ltd, PT Daya Bumindo Karunia dan VALE P&C Construction untuk menunjang keberlanjutan usaha Perseroan.

Bisnis Jasa Logistik dan Pendukung Kegiatan Minyak & Gas Bumi

Lini bisnis Jasa Logistik dan Pendukung Kegiatan Minyak & Gas Bumi Perseroan menawarkan berbagai layanan yang meliputi dukungan operasional dan layanan logistik pelabuhan untuk sektor minyak & gas bumi di wilayah Indonesia Timur melalui KPI Perusahaan Anak Perseroan yang diakuisisi sebesar 95% pada tahun 2018. KPI mengelola dan mengoperasikan peralatan dan fasilitas PT Freeport Indonesia ("PTFI") untuk mendukung operasi tambang di Amamapare, Papua.

Perseroan menyediakan jasa supply base melalui Petrosea Offshore Supply Base ("POSB") yang berlokasi di Sorong, Papua. Supply base ini menyediakan operasi dermaga, manajemen transportasi dan pelabuhan, serta jasa lainnya seperti pembuatan manifes, handling material parts, agen perkapalan, manajemen limbah, manajemen bulk, goods tracking, inspeksi, sertifikasi, dan layanan teknologi. POSB Sorong secara konsisten memberikan layanan berstandar internasional dan hemat biaya untuk seluruh klien Perseroan, yang termasuk BP, CSTS, Saipem, dan Weatherford.

Pada tahun 2023, lini bisnis ini melanjutkan pengembangan modul aplikasi berbasis web yang tergabung dalam Logistics Integrated Automation System (“LINTAS”) untuk aktivitas port & logistic base. LINTAS memudahkan Perseroan untuk melakukan administrasi kebutuhan klien karena dilengkapi dengan fitur *reporting*, *dashboard*, dan transaksi terkait lainnya.

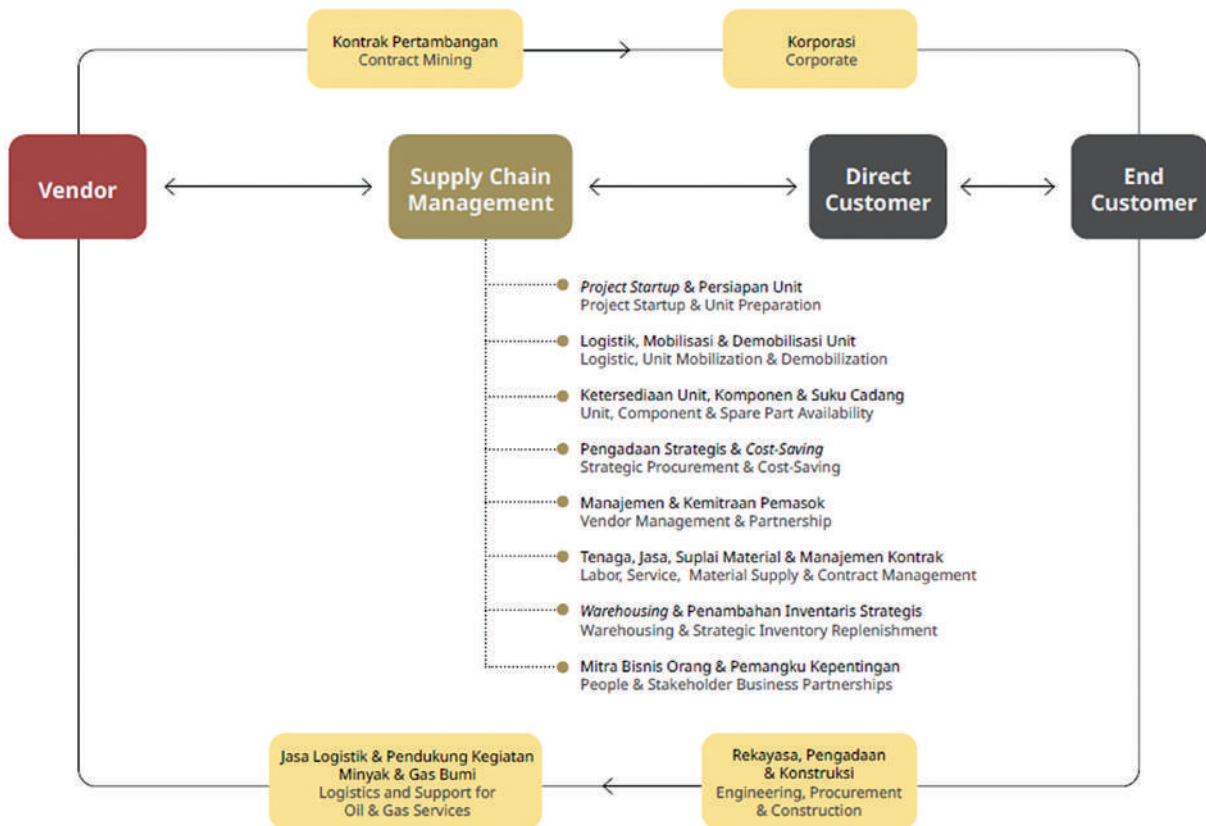
POSB Sorong juga menyediakan layanan logistics & support services melalui pemberian layanan Pusat Logistik Berikat (“PLB”) dan logistics & freight forwarding services. Perseroan melalui KPI juga menjaga hubungan strategis jangka panjang dengan PTFI untuk mendukung kegiatan pengelolaan dan pengoperasian peralatan dan fasilitas PTFI untuk mendukung operasi tambang di Amamapare, Papua.

Penjualan Batu Bara

Pada tahun 2023, Perseroan berhasil menuntaskan transaksi pembelian 100% saham KMS, selaku pemilik 99% saham CEP, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang operasi pertambangan batu bara. CEP berlokasi di Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, Indonesia. Memiliki total sumber daya batu bara sekitar 145 juta ton, cadangan batu bara sebesar 70,9 juta ton dan *stripping ratio* sekitar 6,3 kali di area seluas 4.776 hektar. CEP mulai melakukan penjualan batu bara pada kuartal 4 tahun 2023, dan terus meningkatkan kapasitas produksinya demi mencapai target produksi di jangka panjang. Pada tahun 2023, volume produksi batu bara CEP mencapai 250,8 ribu ton dengan volume penjualan sebesar 178,5 ribu ton sejak kuartal 4 tahun 2023. Pada Juni 2024, volume produksi batu bara CEP mencapai 590,6 ribu ton dengan volume penjualan sebesar 597,7 ribu ton.

Proses Manajemen Rantai Pasok

Berikut ini adalah bagan proses rantai pasok kegiatan operasional *Supply Chain Management (SCM)* yang telah didukung oleh sistem *Enterprise Resource Planning (ERP)* Perseroan:



Divisi SCM juga telah menerapkan prinsip pengadaan berkelanjutan melalui penerapan aspek *Environment, Social & Governance (“ESG”)* ke dalam kegiatan pengadaan untuk meningkatkan pendapatan dan efisiensi kegiatan operasional Perseroan dengan dampak seminimal mungkin terhadap aspek lingkungan dan sosial.

Sejak awal tahun 2023, *Sustainable Procurement Squad* Perseroan telah mengidentifikasi berbagai inisiatif yang dikategorikan sebagai inisiatif penting untuk mendukung penerapan aspek ESG dan keberlanjutan di Perseroan. Salah satunya adalah *Go Local Project* yang merupakan komitmen untuk mempromosikan keberlanjutan dengan menggantikan produk impor dengan alternatif lokal berkualitas tinggi dengan harga murah, sekaligus mengembangkan kapabilitas pemasok lokal dan nasional demi meningkatkan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Perseroan. Manfaat lainnya juga termasuk memperkuat reputasi Perseroan melalui kinerja sosial dalam mengembangkan perekonomian lokal dan mendukung pemasok lokal, serta mengurangi emisi karbon dari kategori barang yang dibeli (*Scope 3 Carbon Emission*) dan mengurangi biaya logistik dari pemasok luar.

Divisi SCM senantiasa mendukung pemasok lokal untuk bekerja sama dalam proses pengadaan barang dan jasa untuk Perseroan.

Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Barang & Jasa			
Pemasok	Pengadaan		
	30 Juni 2024	2023	2022
Lokal	96	95	94
Non Lokal	4	5	6

Pada tanggal 30 Juni 2024, Perseroan bekerja sama dengan 791 pemasok yang tersebar di tingkat lokal, nasional dan internasional dengan rincian sebagai berikut:

Jumlah Pemasok Barang & Jasa				
Jenis Jasa	Pemasok			Jumlah
	Lokal	Nasional	Internasional	
Jasa Boga & Camp	14	7	-	21
Jasa Sipil Struktur	27	102	4	133
Jasa Pemeliharaan	95	265	10	370
Jasa K3 & Peralatan <i>Safety</i>	11	24	1	36
Jasa Umum, dll.	52	170	9	231
Total	199	568	24	791

3. Keunggulan Kompetitif

Perseroan memiliki keunggulan kompetitif sebagai berikut:

1. Portfolio klien yang terdiversifikasi yang beragam dan klien-klien blue-chip yang menegaskan kehadiran pasar dan keandalan bisnis Perseroan.
2. Performa keuangan yang kuat dengan arus kas yang stabil dan neraca yang kuat.
3. Tim dengan keahlian mendalam dalam seluruh spektrum operasi Pertambangan dan rekayasa dan konstruksi, serta kemampuan yang kuat mencakup eksplorasi, geologi, perencanaan tambang, inovasi digital, serta manajemen proyek dan rekayasa yang komprehensif.
4. Pemimpin dalam operasi digital yang diakui secara global sebagai *'Lighthouse'* oleh Forum Ekonomi Dunia untuk Industri 4.0 dan aplikasi digital dalam pertambangan.
5. Jaringan *Original Equipment Manufacturer* di seluruh dunia, penyedia teknologi yang terintegrasi di seluruh rantai pasokan untuk memastikan efisiensi biaya dan kualitas.
6. Penguasaan teknologi dan keahlian dari pengalaman selama 52 tahun, memastikan proyek diselesaikan tepat waktu dan sesuai anggaran.
7. Dukungan dari Induk Perseroan mempermudah Perseroan dalam mendapatkan proyek baru dan akses pendanaan.
8. Dukungan keuangan dari berbagai Bank dan Lembaga keuangan lainnya termasuk dalam bentuk pendanaan obligasi akan lebih leluasa dalam mengatur arus kas dan memiliki senioritas dalam hal jatuh tempo.

4. Startegi Usaha

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memiliki 5 Pilar Strategi Jangka Panjang, antara lain:

Efisiensi Operasional dan Peningkatan Nilai bagi Pemangku Kepentingan

Meningkatkan efektifitas Perseroan dalam memberikan nilai tambah kepada semua klien dan pemangku kepentingan sebagai kontribusi nyata bagi sektor pertambangan di Indonesia.

Peningkatan Penciptaan Nilai bagi Klien

Memperkuat lini bisnis Perseroan saat ini dengan meningkatkan penciptaan nilai bagi klien yang ada serta yang baru.

Diversifikasi Portofolio Strategis

Mendiversifikasi portofolio proyek Perseroan ke sektor pertambangan mineral lainnya dan menangkap peluang bisnis lain di sektor minyak, gas alam, dan infrastruktur, sejalan dengan perkembangan industri yang ada.

Komitmen untuk Meningkatkan Kompetensi

Melanjutkan proses transformasi menyeluruh dalam meningkatkan kompetensi dan manajemen sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan inovasi.

Menciptakan Keunggulan dalam Keselamatan dan Kesehatan

Terus berupaya memperkuat budaya keselamatan, kesehatan dan lingkungan melalui penerapan target nol kecelakaan dan keunggulan operasional, serta menjalankan berbagai program inisiatif ESG serta komitmen yang tinggi terhadap GCG.

5. Pemasaran

Perseroan mencanangkan berbagai target pengembangan usaha dengan tujuan untuk meningkatkan pangsa pasar, termasuk memperkuat *positioning* Perseroan sebagai wujud dari implementasi strategi pemasaran yang tepat.

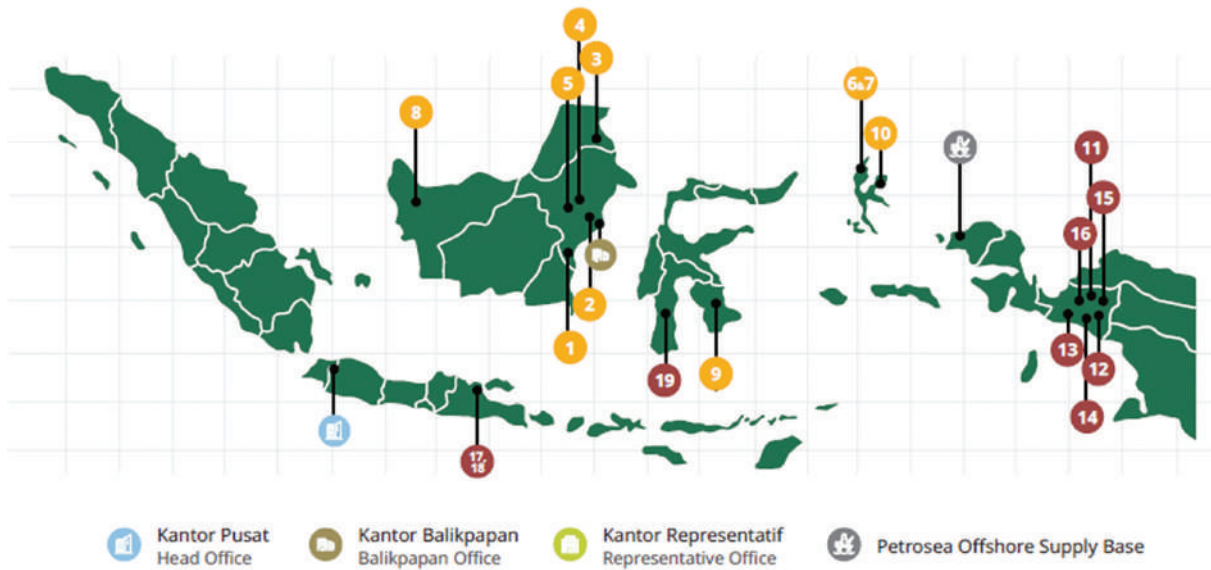
Implementasi strategi pemasaran tersebut fokus pada diferensiasi produk dan jasa di setiap lini bisnis, khususnya Kontrak Pertambangan dan rekayasa dan konstruksi dengan dukungan teknologi digital terkini melalui Minerva Digital Platform. Pasar yang menjadi sasaran adalah sektor pertambangan mineral dan batu bara serta minyak & gas bumi, dengan target perolehan kontrak-kontrak baru melalui pendekatan B2B atau *business to business*.

Sementara itu, untuk memperkuat posisinya di pasar, Perseroan mengimplementasikan strategi komunikasi yang efektif dan meningkatkan pelayanan yang diberikan kepada seluruh klien strategisnya. Lebih lanjut lagi, Perseroan juga terus berinovasi melalui pengembangan business model yang dirancang khusus untuk keperluan setiap klien, dengan tujuan untuk memberikan *added value* serta memastikan terjadinya *customer satisfaction*.

Dalam mendukung setiap aktivitas pemasaran, Perseroan mempromosikan layanan pertambangan dan rekayasa dan konstruksi berinovasi dengan mengimplementasikan *technology integration & flexible business model*. Untuk mendukung inovasi tersebut, berbagai program *public relations* (PR) dilaksanakan, termasuk mengikuti berbagai seminar dan forum diskusi pertambangan serta rekayasa & konstruksi. Seluruh promosi dan PR program yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan *awareness* publik dan pelaku pasar di dalam industri dimana Perseroan berada.

Selain itu, Perseroan juga terus mengkomunikasikan komitmennya terhadap pelaksanaan GCG sebagai bagian integral dalam menjaga *trust & confidence* bagi seluruh pemangku kepentingan yang telah terbukti menjadi *enabler* dalam mendukung pengembangan usaha Perseroan. Sepanjang tahun 2023, berbagai penghargaan terkait GCG diperoleh oleh Perseroan sebagai wujud *cultivated relationship* dengan para pemangku kepentingan.

Wilayah Operasional



Berikut ini merupakan beberapa proyek utama yang sedang berjalan hingga Prospektus ini diterbitkan:

Proyek Utama	Klien	Lokasi	Tahun
Kontrak Pertambangan			
1 Kideco OB Removal & Coal Production	PT Kideco Jaya Agung	Kalimantan Timur	2022 - 2028
2 KSM Project Management & Mining Services	PT Kartika Selabumi Mining	Kalimantan Timur	2021 - 2027
3 CCM Project Management & Mining Services	PT Central Cipta Murdaya	Kalimantan Utara	2021 - 2025
4 CEP Project Management & Mine Services	PT Cristian Eka Pratama	Kalimantan Timur	2023 - 2038
5 IBP Project Management & Mine Services	PT Indo Bara Pratama	Kalimantan Timur	2022 - 2026
6 SDA Nickel Mining Services	PT Sumberdaya Arindo	Maluku Utara	2023 - 2026
Rekayasa, Pengadaan & Konstruksi			
7 Freeport Master Services Agreement	PT Freeport Indonesia	Papua Tengah	2017 - 2024
8 Freeport Levee Construction & Stockpile Extension	PT Freeport Indonesia	Papua Tengah	2022 - 2026
9 Construction Services at Portside (Corrosion Remediation)	PT Freeport Indonesia	Papua Tengah	2019 - 2024
10 GBC Pre-crusher (SAG3) Onshore Early Construction Services	PT Freeport Indonesia	Papua Tengah	2020 - 2024
11 CUCL Kasuang Copper Cleaner Circuit Construction Services	PT Freeport Indonesia	Papua Tengah	2022 - 2024
12 LNGPP Feasibility Study	PT Freeport Indonesia	Papua Tengah	2022 - 2023
13 CC001 Earthworks, Concrete & Buried Utilities	PT Manyar Maju Refinery	Jawa Timur	2022 - 2024
14 Structural, Mechanical, Piping & Electrical Installation (SMPEI) Works – CM002 Main Process Building, Balance of Plant & High Security Building	PT Manyar Maju Refinery	Jawa Timur	2023 - 2024
15 Construction & Project Management Works – Awak Mas Gold Project	PT Masmindo Dwi Area	Sulawesi Selatan	2022 – 2024
16 EPC Processing Plant Infrastructure - Awak Mas Gold Project	PT Masmindo Dwi Area	Sulawesi Selatan	2022 – 2025
Jasa Logistik dan Pendukung Kegiatan Minyak & Gas Bumi			
17 Provision of Supply Base Services	BP Berau Ltd.	Papua Barat Daya	2017 - 2024
18 Provision of Logistic Base	Saipem Indonesia	Papua Barat Daya	2020 - 2023
19 Provision of Loading Unloading and Storage Services at POSB Sorong	CSTS Joint Operation	Papua Barat Daya	2018 - 2024
20 Third Party Logistics	Enesco Sarida Offshore	Papua Barat Daya	2018 - 2024

6. Prospek Usaha

Pada tahun 2024, Perseroan telah menjadi bagian dari grup CUAN yang juga terafiliasi dengan grup Barito Pacific, Perseroan akan memanfaatkan sinergi strategis dengan grup konglomerasi ini, terutama dalam sektor energi, petrokimia, dan infrastruktur termasuk energi terbarukan (*renewable energy*). Hal ini memungkinkan Perseroan untuk beradaptasi secara efektif dengan transisi energi global dan memperluas operasi ke sektor lain yang sedang berkembang.

Kolaborasi dengan grup CUAN yang memiliki cadangan tambang besar untuk memperkuat posisi pasar Perseroan di industri pertambangan, sehingga meminimalkan ketergantungan pada proyek jasa pertambangan dari eksternal. Sinergi ini memastikan aliran pendapatan yang stabil dan berkelanjutan, mendukung kemampuan Perseroan untuk menangani proyek besar dan kompleks.

Strategi diversifikasi dan sinergi dengan grup Barito Pacific yang bergerak di sektor energi, petrokimia dan infrastruktur, yang diterapkan oleh Perseroan akan memiliki dampak yang signifikan terhadap keberlanjutan dan pertumbuhan Perseroan. Pertama, diversifikasi membantu Perseroan mengurangi ketergantungan pada satu proyek jasa pertambangan dari komoditas tertentu, seperti batu bara, dengan memperluas operasi ke sektor jasa pertambangan di komoditas lain seperti nikel, emas, dan mineral lainnya selain dari proyek-proyek rekayasa dan konstruksi dari berbagai sektor industri. Hal ini membuat Perseroan lebih tahan terhadap fluktuasi harga komoditas tertentu dan memberikan pendapatan yang stabil.

Kedua, diversifikasi membuka peluang baru bagi Perseroan untuk masuk ke pasar dan industri yang sedang berkembang, seperti energi terbarukan dan infrastruktur. Dengan memanfaatkan sinergi dengan grup CUAN dan Barito Pacific, Perseroan dapat mengakses sumber daya, meningkatkan efisiensi operasional, dan memperkuat posisi kompetitifnya di industri.

Sinergi dengan Perusahaan Induk CUAN

CUAN berkomitmen mendukung semua anak perusahaannya, mendorong sinergi dan membentuk perusahaan terintegrasi dalam sektor pertambangan. CUAN mendorong Perseroan menjadi kontraktor utama untuk konsesi pertambangan yang dimilikinya. Dorongan ini dilakukan berdasarkan prinsip kesetaraan dan kepatuhan terhadap semua peraturan yang berlaku, serta disetujui secara independen oleh masing-masing entitas.

Sebagai Perusahaan Anak utama dalam grup CUAN, Perseroan secara strategis diposisikan untuk memanfaatkan sinergi dengan perusahaan induknya, meningkatkan kapabilitas operasionalnya, dan memperkuat perannya sebagai kontraktor utama untuk aset pertambangan CUAN.

Keunggulan dan Sinergi

- **Sinergi sebagai Kontraktor Utama:** Perseroan dapat berperan sebagai kontraktor utama untuk portofolio aset pertambangan CUAN yang luas. Sinergi yang terbentuk dapat memastikan Perseroan menjadi mitra pilihan untuk semua aktivitas terkait pertambangan, didukung oleh keahlian dan solusi pertambangan terintegrasi yang dimiliki Perseroan. Menjadi kontraktor pilihan memungkinkan Perseroan mendapatkan proyek jangka panjang, meningkatkan stabilitas pendapatan dan prospek pertumbuhan.
- **Sinergi berbagi Kapabilitas:** Sinergi antara Perseroan dengan CUAN memfasilitasi berbagi kapabilitas yang dimiliki masing-masing pihak. Perseroan mendapatkan keuntungan dari akses ke aset pertambangan CUAN, meningkatkan kepastian pendapatan jangka panjang, sementara CUAN dapat mengakses layanan pertambangan berkualitas tinggi.
- **Sinergi kerjasama Proyek:** Proyek yang dikerjakan bersama-sama antara Perseroan dan CUAN menggabungkan kekuatan masing-masing. Misalnya, kemampuan menangani proyek pertambangan yang didukung oleh digitalisasi dan keterampilan manajemen proyek Perseroan dapat melengkapi eksploitasi aset strategis CUAN, meningkatkan kinerja proyek, dan menciptakan nilai bagi kedua perusahaan.
- **Sinergi Operasional:** Dengan merampingkan proses operasional seperti logistik dan manajemen rantai pasokan, kedua perusahaan mencapai efisiensi dan efektivitas biaya yang lebih besar. Integrasi ini menghasilkan praktik operasional terstandar, kontrol atas kualitas yang lebih baik, dan waktu penyelesaian proyek yang lebih singkat.

- **Peningkatan Posisi di Pasar:** Sebagai kontraktor utama untuk CUAN, Perseroan meningkatkan posisi di pasar dan daya saingnya di industri pertambangan. Kolaborasi ini memberikan Perseroan platform yang kokoh untuk memperluas penawaran layanannya, menambah daya jual, daya ungkit untuk memasuki pasar baru, dan potensi menambah klien baru. Posisi pasar yang kuat ini juga meningkatkan kemampuan Perseroan untuk mendapatkan proyek yang lebih besar dan kompleks.
- **Stabilitas Keuangan:** dukungan nilai penjualan dari kerjasam poyek dari CUAN memberikan Perseroan modal yang diperlukan untuk melaksanakan proyek pertambangan skala besar. Stabilitas keuangan ini memungkinkan Perseroan memperluas kapasitas operasionalnya. Dukungan sumber daya bersama ini memfasilitasi investasi bersama di masa depan dalam usaha baru dan proyek inovatif.

Sinergi Dengan Perusahaan Afiliasi

Selain dari sinergi dengan CUAN, Perseroan juga akan mendapatkan keunggulan dan sinergi dengan perusahaan Afiliasi, sebagai berikut:

- **Solusi Bisnis Terintegrasi:** Dari perusahaan-perusahaan terafiliasi dengan CUAN, Perseroan dapat menawarkan solusi bisnis terintegrasi yang memanfaatkan sumber daya dan keunggulannya kepada jaringan usaha ini.
- **Inovasi Kolaboratif:** Bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan afiliasi dari CUAN, Perseroan dapat berpartisipasi dalam bisnis pertambangan yang cakupannya lebih luas dari bisnis yang dimiliki saat ini.
- **Peluang Bisnis Baru:** Kolaborasi dengan CUAN dan grup Afiliasinya membuka peluang bisnis dan pasar baru di berbagai sektor, termasuk energi, petrokimia, dan infrastruktur. Dengan memanfaatkan pengetahuan pasar dan kekuatan keuangan grup ini, Perseroan dapat mendiversifikasi bisnis dengan memasuki bisnis dan pasar baru yang diharapkan akan menjadi sumber pertumbuhan bagi Perseroan ke depannya.

Perseroan memandang tahun 2025 dengan optimis melalui implementasi strategi diversifikasi usaha yang didukung strategi digitalisasi. Perseroan percaya bahwa pertumbuhan ekonomi nasional dan pemulihan ekonomi global masih akan berlangsung, meskipun tingkat pertumbuhannya sangat bergantung pada pemulihan yang tidak merata. Namun, pertumbuhan tersebut diyakini dapat memberikan peluang besar untuk mencatatkan kinerja yang lebih baik lagi di bisnis rekayasa dan konstruksi, sejalan dengan prospek implementasi hilirisasi dan industrialisasi, serta batu bara dan sektor mineral lainnya seperti emas dan nikel.

Komitmen Pemerintah dalam melaksanakan transisi energi untuk mengatasi perubahan iklim dan ketergantungan terhadap bahan bakar fosil masih menghadapi berbagai kendala, seperti pelemahan perekonomian sebagai dampak dari pandemi COVID-19 dan besarnya investasi. Diperkirakan investasi pada sektor Energi Baru Terbarukan ("EBT") di tahun 2023 menjadi yang terendah dalam kurun waktu enam tahun terakhir, dimana realisasi investasi Energi Baru Terbarukan Dan Konversi Energi (EBTKE) baru mencapai USD1,17 miliar atau 64,49% dari target.

Pemanfaatan batu bara sebagai sumber energi berdasarkan energy mix di tahun 2025 masih sebesar 30%, sedangkan EBT ditargetkan mencapai 26% dibandingkan tahun 2011 yang sebesar 11%. Asosiasi Pertambangan Batu bara Indonesia ("APBI") melihat batu bara masih akan menjadi tulang punggung sumber energi di Indonesia hingga tiga dekade ke depan dikarenakan masih menjadi sumber energi termurah dalam negeri yang dapat diandalkan.

Prospek Bisnis Kontrak Pertambangan: Sektor Batu Bara

Prospek batu bara Indonesia juga masih dipengaruhi oleh perkembangan dari konflik geopolitik yang terjadi di Eropa dan Timur Tengah. Normalisasi pasokan serta pelemahan pertumbuhan ekonomi global akibat dari tingginya suku bunga masih memberikan tekanan kepada harga batu bara. Namun, bank sentral Amerika Serikat (The Fed) dan berbagai negara di dunia diperkirakan akan mengupayakan pemangkasan suku bunga secara bertahap sejalan dengan tren inflasi di 2024.

Faktor lain yang juga mempengaruhi permintaan batu bara adalah perkembangan dinamika global terhadap transisi energi menuju EBT, yang sempat tertunda akibat pandemi COVID-19 dan turunnya harga produk substitusi seperti gas alam dikarenakan musim dingin yang lebih hangat, serta pelemahan ekonomi China yang berlanjut di 2024.

Menurut Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), produksi batu bara Indonesia ditargetkan sebesar 710 juta ton di tahun 2024, lebih tinggi dibandingkan target 2023 sebesar 695 juta ton. Sedangkan realisasi produksi di tahun 2023 mencapai 775 juta ton yang merupakan rekor produksi tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.

Pemerintah juga terus menggenjot program pengembangan serta pemanfaatan teknologi hilirisasi untuk menciptakan *value added product* bagi industri batu bara. Adapun produk hilirisasi tersebut adalah sebagai berikut:

Program Pengembangan dan Pemanfaatan Batu bara			
No.	Teknologi Hilirisasi	Produk Hilirisasi	
Pengembangan	1.	Coal Gasification	Methanol & DME
	2.		SNG, Ammonia, Hidrogen, Olefin
	3.	Coal Liquefaction	Gasoline & Solar
	4.	Coal Briquette	Briket Batu bara Biomassa & Briket Terkarbonisasi
	5.	Cokes Making	Batu bara Metalurgi
	6.	Coal Upgrading	Batu bara untuk Kelistrikan & Industri
	7.		Material Maju & LTJ
	8.	Ekstraksi Batu bara	Asam Humat & Asam Fulvat
Pemanfaatan	9.	Blending Facility, Cofiring, Biomass & IGCC Implementation	Kelistrikan & Penerapan CCT pada Pembangkit
	10.	Penerapan CCS/CCUS Fasilitas Pengembangan & Pemanfaatan Batu bara	Penurunan Emisi CO ₂

Sumber : Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI

Dalam upaya untuk mencapai program pengembangan dan pemanfaatan batu bara, Pemerintah telah menyiapkan berbagai peraturan guna mendukung pelaksanaan program tersebut. Untuk gasifikasi batu bara, Pemerintah telah menetapkan tarif royalty batu bara sebesar 0%. Dalam pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) batu bara yang khusus digunakan sebagai pasokan batu bara untuk gasifikasi, masa IUP akan diberikan sesuai umur ekonomis industri gasifikasi batu bara serta pembebasan PPN bagi proyek-proyek rekayasa dan konstruksi terkait hilirisasi batu bara.

Dalam menyongsong transisi menuju energi ramah lingkungan, Pemerintah telah menyusun *roadmap* hilirisasi bagi sektor energi. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut ada beberapa kendala yang akan dihadapi, di antaranya kurangnya pemahamannya atas teknologi dan inovasi dalam menjalankan proses hilirisasi serta nilai investasi yang besar.

Prospek Bisnis Kontrak Pertambangan: Sektor Nikel

Harga nikel dengan kadar mineral 99,8% di *London Metal Exchange* (LME) mencapai USD16.460,84 per ton di akhir tahun 2023, menurun 43,13% dibandingkan dengan tahun 2022. Prospek harga nikel di 2024 berdasarkan *Commodity Market Outlook* yang rilis pada Oktober 2023 diperkirakan akan melanjutkan tren penurunan di 2024. Faktor yang mengakibatkan penurunan tersebut adalah meningkatnya pasokan di negara-negara produsen seperti China, Indonesia, dan Filipina. Sedangkan di sisi permintaan, produksi *lithium iron phosphate* (LFP) sebagai produk substitusi nikel dalam pemanfaatan teknologi baterai kendaraan listrik diperkirakan akan menekan harga nikel di 2024. Namun, *World Bank* memperkirakan bahwa harga nikel akan kembali menguat di 2025.

Prospek Bisnis Rekayasa dan Konstruksi

Prospek positif bisnis rekayasa dan konstruksi di 2024 akan sangat dipengaruhi oleh program Pemerintah dalam melaksanakan hilirisasi dan pengembangan industrialisasi. Keahlian rancang bangun sangat dibutuhkan dalam pembangunan infrastruktur, dari fasilitas pengolahan mineral mentah menjadi berbagai produk bernilai tambah tinggi. Prospek tersebut didukung oleh Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2022 tentang Kebijakan Industri Nasional 2020-2024 yang turut memasukkan sektor rekayasa dan konstruksi sebagai salah satu jasa industri prioritas.

Target 2025

Pada tahun 2025, Perseroan akan memperluas kapasitas dan kapabilitasnya di bisnis pertambangan dan rekayasa dan konstruksi, melanjutkan pengembangan bisnis yang dilakukan pada tahun 2024, terutama setelah sinergi dengan grup CUAN dan grup Barito Pacific semakin menguat. Perseroan melihat prospek positif sektor rekayasa dan konstruksi di tahun 2025 akan sejalan dengan pembangunan infrastruktur dan pengolahan mineral menjadi berbagai produk bernilai tinggi. Perseroan juga melihat sektor batu bara masih tetap akan menjadi tulang punggung ekspor Indonesia dalam waktu kedepan.

Target-target yang telah dicanangkan oleh Perseroan di tahun 2025 adalah:

- **Kinerja Keuangan Yang Stabil:** Perseroan berkomitmen untuk menjaga kinerja keuangan yang stabil sesuai dengan rencana dan target yang ditetapkan. Perseroan juga fokus untuk menjaga rasio keuangan tetap stabil dan terus meningkat, seiring dengan pertumbuhan EBITDA yang semakin kuat.
- **Kinerja Operasional Yang Tumbuh:** Perseroan akan memastikan skala produksi dan nilai kontrak terus bertumbuh, sambil tetap menjaga struktur modal yang optimal. Perseroan juga akan melakukan capital expenditure secara hati-hati dan selektif serta memastikan bahwa aset yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara maksimal.
- **Sinergi dengan Perusahaan Induk dan Afiliasi:** Sebagai bagian dari Grup CUAN dan Group Barito, Perseroan ingin secara strategis memanfaatkan sinergi yang kuat dengan perusahaan induk dan afiliasinya. Sinergi ini mencakup peran Perseroan sebagai kontraktor utama untuk konsesi pertambangan yang dimiliki oleh CUAN serta kolaborasi dalam proyek-proyek inovatif yang mendukung energi terbarukan dan pengembangan infrastruktur berkelanjutan.
- **Diversifikasi Portofolio:** Perseroan akan terus mendiversifikasi portofolio proyeknya, tidak hanya terbatas pada sektor batu bara, tetapi juga merambah ke sektor nikel, emas, dan mineral lainnya serta juga di sektor minyak & gas bumi. Strategi ini memungkinkan Perseroan memanfaatkan peluang bisnis baru, mengurangi ketergantungan pada satu sektor, dan memperkuat posisinya di pasar.
- **Peningkatan Kompetensi dan Inovasi:** Perseroan berkomitmen untuk terus meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan inovasi. Selain itu, Perseroan akan terus memperkuat budaya keselamatan dan kesehatan kerja, serta menjalankan berbagai program inisiatif ESG (*Environmental, Social, and Governance*). Perseroan juga memiliki komitmen yang tinggi terhadap GCG.

7. Riset dan Pengembangan

Perseroan melihat digitalisasi sebagai kunci keberhasilan operasional dan daya saing. Perseroan telah menetapkan kebijakan sistem pengelolaan riset dan pengembangan yang dirancang untuk memastikan keunggulan kompetitif, implementasi strategi Perseroan dan mengoptimalkan peluang bisnis. Kebijakan riset dan pengembangan ini difokuskan untuk mendukung kepentingan jangka pendek dan jangka panjang Perseroan. Sebagai contoh, Perseroan berinvestasi dalam platform digital seperti Minerva untuk meningkatkan efisiensi operasional mining dan untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data real time dari lapangan. Berikut merupakan rincian biaya dan bentuk riset dan pengembangan yang dilakukan Perseroan:

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

Keterangan	30 Juni 2024	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Software Development Costs (Minerva, Brain, IDEal, SAP/ Hana etc)	3.473	6.323	4.374
Engineering Designs and Prototypes (EV development)	116	32	-
Mining Exploration Costs (CEP exploration cost include JORC cost)	-	2.538	-
Jumlah	3.589	8.893	4.374
Pendapatan	318.024	577.617	476.317
Kontribusi terhadap pendapatan	1,13%	1,54%	0,92%

8. Corporate Social Responsibility (“CSR”)

Sejak pendiriannya, Perseroan bersama dengan Perusahaan Anak menanamkan komitmen kuat terhadap upaya tanggung jawab sosial perusahaan, baik terkait ekosistem maupun masyarakat sekitar Perseroan maupun Perusahaan Anak. Misi Perseroan adalah membangun ekonomi yang adil bagi semua dan Perseroan melekatkan elemen tanggung jawab sosial di seluruh model bisnisnya. Berikut dibawah ini merupakan program-program yang dilakukan Perseroan:



Program Peningkatan Kapasitas Guru

Program pada bidang pendidikan ini bertujuan untuk membantu meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Pelaksanaan program memiliki beberapa indikator keberhasilan, yaitu peningkatan kualitas kegiatan belajar mengajar terhadap siswa agar lebih mandiri, terbentuknya kelompok kegiatan guru sebagai tindak lanjut dari pelatihan dan menghasilkan modul pembelajaran sebagai pedoman bagi guru. Peserta pelatihan ini melibatkan 40 orang guru SD dari 10 sekolah yang ada di Kecamatan Sebuku, serta 50 guru mata pelajaran agama dan olahraga tingkat SMP di Kecamatan Batu Sopang.

Program Peningkatan Literasi Berbasis Masyarakat

Melalui program ini, Perseroan memberikan pelajaran bahasa Inggris di Desa Samurangau, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur bekerja sama dengan Pemerintah Desa Samurangau. Total penerima manfaat adalah sebanyak 30 peserta didik dari kalangan masyarakat usia produktif, perangkat aparat desa, serta siswa sekolah dasar hingga sekolah menengah atas.

Program Pelatihan Peningkatan Keterampilan

Program ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dalam menjalankan usahanya. Peserta pelatihan mencapai 30 orang dengan rentang usia 20-35 tahun yang berasal dari masyarakat Desa Biu, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Program ini dilaksanakan bekerja sama dengan Pusat Kegiatan Belajar Mengajar Karya Mandiri Desa Biu.



Program Pelatihan Peningkatan Keterampilan

Program ini dilaksaProgram Peningkatan Gizi dan Pencegahan Stunting Pelaksanaan program ini diawali dengan kegiatan screening untuk mengelompokkan individu yang memiliki potensi gejala stunting dan kurang gizi. Setelah itu, dilanjutkan dengan aktivitas tahap 1 yang memberikan nutrisi selama periode 14 hari. Pada tahap ini, para kader Posyandu terus memantau asupan gizi yang diberikan oleh ibu kepada anak-anaknya yang dilakukan selama periode enam bulan. Dari pengamatan kader Posyandu terhadap 97 balita setelah mendapat intervensi gizi awal dan lanjutan selama 28 hari, terlihat hasil yang positif, baik dari peningkatan tinggi maupun berat badan anak.

Program Petrosea Peduli Malaria

Program ini dilaksanakan di sekitar area operasional proyek Levee Stockpile yang berlokasi di Timika, Papua dengan tujuan untuk mengurangi jumlah kasus penyakit malaria sebagai penyakit endemik di daerah Timika. Dalam pelaksanaannya, Perseroan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika, Malaria Center Mimika, Malaria Control dari PTFI, Puskesmas Pasar Sentral, serta Pemerintah Distrik Wania Kabupaten Timika, Pemerintah Kampung Mandiri Jaya dan Pemerintah Kampung Nayaro. Sebagai dampak langsung dari pelaksanaan kegiatan dari program ini, jumlah kasus penyakit malaria telah turun sebanyak 2%. Kegiatan pencegahan dan pemberantasan sarang nyamuk anopheles dilakukan dengan penyemprotan Indoor Residual Spraying (IRS) dan juga memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya melaksanakan gerakan 3M (Menutup, Menguras dan Mengubur) di area yang berpotensi adanya genangan air yang kemudian dapat menjadi tempat hidupnya jentik nyamuk anopheles.

Program Penanganan dan Pencegahan Anemia

Pelaksanaan program yang ditujukan kepada siswi SMP 16 Kariangau diawali dengan kegiatan screening. Dari hasil dari screening awal tersebut, 13 siswi teridentifikasi memiliki rata-rata hemoglobin (Hb) dibawah 11,2. Bekerja sama dengan sekolah, pemerintah kecamatan dan Puskesmas setempat, Perseroan kemudian memberikan konsultasi gizi, menyiapkan asupan vitamin, serta menyediakan

makanan bergizi untuk remaja yang terindikasi anemia tersebut. Setelah delapan bulan, 92% dari 13 siswa yang mendapat pendampingan dinyatakan telah memiliki Hb di atas 11,3 dan terjadi peningkatan berat badan, tinggi badan, serta perubahan status gizi.



Program Pengembangan Usaha Hortikultura

Kelompok Wanita Tani (KWT) Melalui program ini, Perseroan menyediakan kegiatan pelatihan untuk meningkatkan kapabilitas para anggota KWT Berkah Mandiri di Desa Samurangau, Kabupaten Paser terkait usaha tani hortikultura, serta membantu meningkatkan produktivitas dengan memanfaatkan inovasi dan teknologi tepat guna. Harapannya adalah bahwa program ini akan dapat membantu para anggota KWT untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Hingga akhir tahun 2023, 21 orang di Desa Samurangau telah mengikuti program ini dan menerima manfaatnya.

Program Pengembangan Usaha Budidaya Ikan Nila

Perusahaan bersama dengan masyarakat binaan di sekitar Perseroan Support Facilities (PSF) melaksanakan program budidaya perikanan air tawar dengan menggunakan metode Reservoir System (RAS) dengan media bioflok. Selain untuk mendukung ketahanan pangan dalam konteks lokal, program ini juga bertujuan untuk memberikan alternatif mata pencaharian dan peningkatan pendapatan ekonomi rumah tangga. Program ini dilakukan bersama Kelompok Budidaya Ikan Ikhlas Mandiri dengan total anggota 12 orang. Melalui pelaksanaan pelatihan teknis usaha budidaya dan penguatan kelembagaan serta dukungan sarana prasarana, Kelompok Ikhlas Mandiri sudah mampu mendapatkan panen 185 kg Ikan Nila dan semuanya dapat dijual ke pasar ikan air tawar sekitar kota Balikpapan.

Program Pengembangan Usaha Pertanian Hortikultura untuk Kelompok Tani Suku Amungme

Program ini dimulai dengan kegiatan sosialisasi pertanian hortikultura kepada petani wanita, dan selanjutnya membentuk Kelompok Tani menjadi koperasi yang didaftarkan resmi ke Dinas Pertanian Kabupaten Mimika. Pelatihan bagi kelompok tani wanita asal Suku Amungme ini dilakukan bekerja sama dengan PPL Dinas Pertanian. Hasil pelatihan menunjukkan bahwa kelompok tani telah mampu bertani dengan menggunakan metode hortikultura, mengelola hasil pertanian dan lahan pertanian, serta meningkatkan kerjasama antar petani lain.



Program Pengelolaan Sampah dan Penguatan Kelembagaan Bank Sampah

Program ini dilaksanakan melalui kolaborasi dengan Kelompok Usaha Bersama ("KUBE") Srikandi di Kariangau, Balikpapan yang beranggotakan 12 orang. Pada tahun 2023, KUBE Srikandi sudah mampu mengelola 9 ton sampah Perusahaan yang terdiri dari 849 kg sampah organik dan 21.955 kg sampah anorganik. Dari total 22.804 kg sampah yang dikelola, 32% dapat dimanfaatkan dan 68% menjadi sampah residu. Selain aktivitas pengelolaan sampah, KUBE Srikandi juga menyiapkan kelompoknya menjadi sebuah lembaga ekonomi lokal yang dapat mengelola keuangan simpan pinjam untuk anggotanya.

Program Pengelolaan Sampah Organik Terintegrasi dengan Program Usaha Pertanian

Program yang telah dijalankan di proyek Kideco Jaya Agung dan Levee Stockpile ini bertujuan untuk mendaur ulang 100% sampah sisa makanan menjadi sampah organik dan pupuk organik cair (POC) yang nantinya dapat dimanfaatkan sebagai pupuk untuk usaha budidaya hortikultura. Dalam menjalankan program ini, Perseroan memanfaatkan mesin steam dengan kapasitas 300 kg yang sampai dengan akhir tahun 2023 telah berhasil mendaur ulang sebanyak 197 kg sampah organik menjadi pupuk. Pupuk tersebut langsung didistribusikan kepada kelompok tani muda yang berada di Desa Biu, Kecamatan Muara Samu. Sedangkan pemanfaatan limbah pencucian beras melalui proses fermentasi dapat menghasilkan 365 liter POC yang langsung digunakan oleh Kelompok Wanita Tani (KWT). Dengan adanya sampah organik dan POC, maka biaya pertanian menjadi lebih efisien dan kualitas tanaman menjadi lebih baik sehingga hasil panen juga meningkat.

Berikut rincian Kegiatan CSR pada tahun 2022, 2023 dan hingga periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024:

Deskripsi	Satuan	30 Juni		
		2024	2023	2022
Kegiatan CSR	Program	27	45	42
Jumlah Penerima Manfaat Program CSR	Orang	6.655	18.549	11.340
Peserta Pelatihan Internal	Karyawan	29.680	5.388	4.123*
Jumlah Karyawan yang Mengikuti Pelatihan <i>Soft Skill</i>		183	279	836
Biaya Peningkatan Kompetensi Karyawan	USD	32.010	121.785	344.580
Total Jam Pelatihan Karyawan	Jam	210.529	401.101	324.351*
Tingkat <i>Turnover</i> Karyawan	%	12,79	18,19	25,64
Komposisi Karyawan Perempuan di Level Senior Management		15,38	14,81	16,13

*penyajian data kembali akibat perubahan metode perhitungan

9. Kecenderungan Yang Signifikan

Hingga pada saat Prospektus ini diterbitkan, tidak ada kecenderungan yang signifikan dalam produksi, penjualan, persediaan, beban dan harga penjualan sejak tahun buku terakhir Perseroan yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan.

Hingga pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak menghadapi kecenderungan, ketidakpastian, permintaan komitmen atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat mempengaruhi secara signifikan terhadap penjualan bersih atau pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang.

10. Ketergantungan Perseroan Terhadap Kontrak dan Pemasok

Perseroan memiliki ketergantungan yang signifikan terhadap beberapa kontrak utama dengan berbagai pelanggan besar, pada kontrak di sektor pertambangan, rekayasa, dan konstruksi.

Kontrak-kontrak ini memiliki nilai besar dan durasi yang panjang, menunjukkan bahwa keberlangsungan operasi Perseroan sangat dipengaruhi oleh hubungan kontraktual dengan klien.

Ketergantungan ini tidak hanya pada klien-klien utama tetapi juga dengan pemasok yang tersebar secara lokal, nasional, dan internasional, yang berjumlah sekitar 791 pemasok per Juni 2024. Perseroan bekerja sama dengan pemasok dalam menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan untuk mendukung operasional pertambangan dan konstruksi, serta untuk mendukung proyek-proyek strategis yang sedang berlangsung.

Hingga Prospektus ini diterbitkan, tidak ada sifat musiman dari kegiatan usaha Perseroan dan kegiatan usaha Perseroan sehubungan dengan modal kerja yang menimbulkan risiko khusus.

IX. PERPAJAKAN

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Oleh Pemegang Obligasi dan Sukuk Ijarah

Perpajakan atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Obligasi dan Sukuk Ijarah yang diterima atau diperoleh Pemegang Obligasi dan Sukuk Ijarah diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2021 tanggal 2 Februari 2021 Pasal 3 atas penghasilan bunga obligasi termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap dikenakan tarif pemotongan sebesar 10% atau sesuai dengan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B). Tarif pajak sebagaimana yang dimaksud mulai berlaku setelah 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2021 (03 Agustus 2021).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 91 Tahun 2021 tanggal 30 Agustus 2021 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap, penghasilan yang diterima atau diperoleh bagi Wajib Pajak berupa bunga dan diskonto Obligasi dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 10% (sepuluh persen) yaitu:

1. Atas bunga dari Obligasi dengan kupon, sebesar jumlah bruto sesuai dengan masa kepemilikan Obligasi;
2. Atas diskonto dari Obligasi dengan kupon, sebesar selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan Obligasi, tidak termasuk bunga berjalan; dan
3. Diskonto dari Obligasi tanpa bunga, sebesar selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan Obligasi.

Pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final ini dilakukan oleh:

- a. Penerbit obligasi atau kustodian selaku agen pembayaran yang ditunjuk, atas bunga, dan/atau diskonto yang diterima pemegang obligasi dengan kupon pada saat jatuh tempo bunga obligasi, dan diskonto yang diterima pemegang obligasi tanpa bunga pada saat jatuh tempo obligasi;
- b. Perusahaan efek, dealer, atau bank, selaku pedagang perantara, atas bunga dan/atau diskonto yang diterima atau diperoleh penjual obligasi pada saat transaksi; dan/atau
- c. Kustodian atau *subregistry* selaku pihak yang melakukan pencatatan mutasi hak kepemilikan, atas bunga dan diskonto yang diterima penjual obligasi dalam hal transaksi penjualan dilakukan secara langsung tanpa melalui perantara dan pembeli obligasi bukan pihak yang ditunjuk sebagai pemotong sebagaimana dimaksud dalam huruf b.

Sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 91 Tahun 2021, bagi Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berupa:

- Bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia;
- Dana Pensiun yang pendirian/pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau telah mendapatkan izin dari OJK dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-Undang Pajak Penghasilan dan peraturan pelaksanaannya; Tidak dikenakan pemotongan Pajak Final atas bunga Obligasi.

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Perseroan

Perseroan memiliki kewajiban perpajakan sebagai Wajib Pajak dan Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

CALON PEMBELI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PENERIMAAN BUNGA, CICILAN IMBALAN IJARAH, PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN DENGAN CARA LAIN ATAS OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.

X. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah, para Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah yang namanya tercantum di bawah ini, telah menyetujui untuk menawarkan Obligasi Berkelanjutan I Petrosea Tahap I Tahun 2024 kepada Masyarakat sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Petrosea Tahap I Tahun 2024 sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) dengan kesanggupan penuh (*full commitment*).

Susunan dan besarnya persentase penjaminan emisi Obligasi adalah sebagai berikut:

No.	Nama Penjamin Emisi	Porsi Penjaminan (dalam jutaan Rupiah)				Jumlah	%
		Seri A	Seri B	Seri C	Seri D		
1.	PT BCA Sekuritas	2.105	26.340	122.530	168.255	319.230	31,92
2.	PT BNI Sekuritas	7.100	38.200	99.000	10.050	154.350	15,44
3.	PT Henan Putihrai Sekuritas	35.500	51.000	94.500	-	181.000	18,10
4.	PT Sucor Sekuritas	500	52.000	58.000	100	110.600	11,06
5.	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	1.795	4.100	91.370	137.555	234.820	23,48
Total		47.000	171.640	465.400	315.960	1.000.000	100,00

Susunan dan besarnya persentase penjaminan emisi Sukuk Ijarah adalah sebagai berikut:

No.	Nama Penjamin Emisi	Porsi Penjaminan (dalam jutaan Rupiah)				Jumlah	%
		Seri A	Seri B	Seri C	Seri D		
1.	PT BCA Sekuritas	6.740	35.140	66.050	1.260	109.190	21,84
2.	PT BNI Sekuritas	9.500	11.000	3.750	650	24.900	4,98
3.	PT Henan Putihrai Sekuritas	3.000	21.300	160.000	-	184.300	36,86
4.	PT Sucor Sekuritas	7.000	38.000	21.000	30.000	96.000	19,20
5.	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	6.760	22.920	3.800	52.130	85.610	17,12
Total		33.000	128.360	254.600	84.040	500.000	100,00

Selain Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Emisi Sukuk Ijarah tersebut di atas tidak terdapat perjanjian lain yang dibuat antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah yang isinya bertentangan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Emisi Sukuk Ijarah. Selanjutnya Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah yang turut dalam Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum. Berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, pihak yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan untuk Obligasi dan Sukuk Ijarah ini adalah PT BNI Sekuritas.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah, serta Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah dalam rangka Penawaran Umum ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun secara tidak langsung sesuai dengan definisi Pihak Terafiliasi dalam UUPPSK.

Metode Penentuan Tingkat Bunga dan Cicilan Imbalan Ijarah

Tingkat Bunga Obligasi dan Cicilan Imbalan Ijarah, ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah dengan mempertimbangkan beberapa faktor dan parameter, yaitu hasil penawaran awal (*bookbuilding*), kondisi pasar, *benchmark* kepada Obligasi dan Sukuk Ijarah Pemerintah yang disesuaikan dengan waktu jatuh tempo masing-masing seri Obligasi dan Sukuk Ijarah, serta *risk premium* yang disesuaikan dengan masing-masing pemeringkatan Obligasi dan Sukuk Ijarah.

XI. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan profesi penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

Akuntan Publik	: Liana Ramon Xenia & Rekan The Plaza Office Tower 32 nd Floor Jl. M.H. Thamrin Kav. 28 – 30, RT.09/RW.05 Kota Jakarta Pusat, 10350, Indonesia
Telepon	: (021) 50818000
Faksimili	: (021) 29928200
Nama Rekan	: Kasman
STTD No.	: STTD.AP-71/PM.223/2021 tanggal 8 Desember 2021
Keanggotaan Asosiasi	: Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI)
Pedoman Kerja	: Pedoman kerja yang digunakan oleh Akuntan Publik mengikuti ketentuan yang diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP).
Surat Penugasan	: Surat Perseroan No. CORPLEGAL/L/2024/VII-030 tertanggal 2 Juli 2024

Tugas utama Akuntan Publik dalam rangka Penawaran Umum ini adalah melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI. Standar tersebut mengharuskan akuntan publik untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian bebas dari kesalahan penyajian material. Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan akuntan publik, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, akuntan publik mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

Konsultan Hukum	: TnP Law Firm Satrio Tower Lantai 15 Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. C4
Telepon	: 021 22513653
Nama Rekan	: Rambun Tjajo, S.H.
STTD No.	: STTD.KH-277/PJ-1/PM.021/2023 tanggal 12 September 2023
Keanggotaan Asosiasi	: HKHPM
Pedoman Kerja	: Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal yang dikeluarkan oleh HKHPM berdasarkan Surat Keputusan HKHPM No. Kep.03/ HKHPM/ XI/2021 tentang Perubahan Surat Keputusan HKHPM No. Kep.02/ HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal.
Surat Penunjukan	: Surat Perseroan No. CORPLEGAL/L/2024/VIII-052 tertanggal 28 Agustus 2024

Tugas utama dari Konsultan Hukum dalam rangka Penawaran Umum ini adalah melakukan pemeriksaan dan penelitian (dari segi hukum) atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan Perusahaan Anak yang berbadan hukum di Indonesia dan keterangan lain yang berkaitan sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan tersebut telah dimuat dalam Laporan Hasil Uji Tuntas dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri, serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum.

Wali Amanat : **PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk**
Financial Institution & Capital Market Division (FICD)
Menara 2 Bank BTN Lantai 8
Jl. H.R. Rasuna Said No. 1
Jakarta Selatan 12980

Website : www.btn.co.id
Telepon : (021) 38825147
STTD No. : 10/STTD-WA/PM/1996 tanggal 14 Agustus 1996
Pedoman Kerja : Perjanjian Perwaliamanatan, UUPM dan Pedoman Operasional Wali Amanat.
Surat Penunjukan : Surat Perseroan No: CORPLEGAL/L/2024/VII-029 dan Surat BTN No. 467/FICD/FS/VII/2024

Tugas utama Wali Amanat dalam rangka Penawaran Umum ini adalah mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Ijarah baik di dalam maupun di luar pengadilan mengenai pelaksanaan hak-hak Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Ijarah sesuai dengan syarat-syarat Obligasi dan Sukuk Ijarah, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai ketentuan dalam POJK No. 19/2020, BTN selaku Wali Amanat, menyatakan bahwa selama menjadi Wali Amanat, BTN:

1. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan;
2. Tidak memiliki hubungan kredit dengan Perseroan;
3. Tidak menerima dan meminta pelunasan terlebih dahulu atas kewajiban Perseroan kepada Wali Amanat selaku kreditur dalam hal Perseroan mengalami kesulitan keuangan, sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Petrosea Tahap I Tahun 2024 dan Pemegang Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Petrosea Tahap I Tahun 2024; dan/atau
4. Tidak merangkap sebagai penanggung dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Petrosea Tahap I Tahun 2024 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Petrosea Tahap I Tahun 2024.

Notaris : **Aulia Taufani, S.H.**
Menara Sudirman, lantai 18 A,B,D
Jl. Jend. Sudirman Kav. 60
Jakarta 12190

Telepon : (+62 21) 5204778
Faksimili : (+62 21) 5204779/80
STTD No. : STTD No: STTD.N-5/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 9 Februari 2023
Keanggotaan Asosiasi : Anggota Ikatan Notaris Indonesia (INI) Nomor: 0060219710719
Pedoman Kerja : Undang-Undang No. 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.
Surat Penunjukan : Surat Perseroan No. 05/VII/2024 tanggal 2 Juli 2024

Ruang lingkup tugas Notaris dalam rangka Penawaran Umum ini adalah menyiapkan dan membuat akta-akta antara lain Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi, Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Ijarah, Pengakuan Utang Obligasi, Pengakuan Kewajiban Sukuk Ijarah, Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah, Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi, Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah, Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, serta akta-akta perubahannya, sesuai dengan peraturan jabatan dan kode etik Notaris.

Pemeringkat Efek : **PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)**
Equity Tower Lantai 30
Sudirman Central Business District, Lot.9
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

- Izin Kegiatan Usaha : KEP-39/PM-PI/1994 tanggal 13 Agustus 1994 tentang Pemberian Izin Usaha di Bidang Penasehat Investasi kepada PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)
- Pedoman Kerja : POJK No. 51/POJK.04/2015 tentang Perilaku Perusahaan Pemeringkat Efek.

Tugas utama Pemeringkat Efek yaitu mengeluarkan hasil pemeringkatan berupa Peringkat Awal dan keputusan akhir atas Peringkat Obligasi dan Sukuk Ijarah setelah secara seksama mempertimbangkan seluruh informasi dan penjelasan, melakukan kaji ulang secara berkala terhadap hasil pemeringkatan dan mengeluarkan Peringkat baru apabila terjadi perubahan Peringkat sesuai dengan yang telah disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

TIM AHLI SYARIAH

Berdasarkan surat Dewan Syariah Nasional MUI nomor U-0551/DSN-MUI/VIII/2024 tanggal 13 Agustus 2024, Tim Ahli Syariah yang bertugas memberikan pendampingan dalam penerbitan Sukuk Ijarah adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Izin
1.	Mohammad Bagus Teguh Perwira	Ketua	KEP-02/PM.223/PJ-ASPM/2021
2.	Tri Meryta	Anggota	KEP-19/PM.223/ASPM-P/2019

Ruang lingkup tugas Tim Ahli Syariah dalam rangka Penawaran Umum ini adalah:

1. Memberikan nasihat dan saran serta mengawasi pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal atas Penerbitan Sukuk Perseroan sesuai dengan prinsip hukum Islam dalam Kegiatan Syariah di Pasar Modal berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia;
2. Membuat dan menerbitkan Pernyataan kesesuaian syariah sehubungan dengan rangka Penerbitan Sukuk Perseroan;
3. Menghadiri pertemuan dan/atau telekonferensi sehubungan dengan Penerbitan Sukuk Perseroan; dan
4. Berkomunikasi dengan konsultan atau pihak profesi penunjang pasar modal lainnya yang terlibat dalam rangka Penerbitan Sukuk Perseroan apabila diperlukan.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 1 Angka 1 juncto Angka 23 UUPM, Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam Penawaran Umum ini menyatakan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK.

XII. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Petrosea Tahap I Tahun 2024 & Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Petrosea Tahap I Tahun 2024, BTN telah ditunjuk oleh Perseroan sebagai Wali Amanat dalam Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan ini. Dengan demikian, BTN akan bertindak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan dan bertindak untuk dan atas nama Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Ijarah dalam rangka Penawaran Umum ini sesuai dengan ketentuan UUPPSK.

BTN dalam Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan ini telah terdaftar di OJK dengan No. 10/STTD-WA/PM/1996 tanggal 14 Agustus 1996 sesuai dengan UUPPSK. Sehubungan dengan penerbitan Obligasi dan Sukuk Ijarah ini telah dibuat Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Sukuk Ijarah antara Perseroan dengan BTN.

Berdasarkan:

- Surat pernyataan No. 568/FICD/FS/IX/2024 tanggal 17 September 2024, Wali Amanat menyatakan selama menjadi Wali Amanat sebagaimana diatur dalam POJK No.19/2020:
 - 1) Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan;
 - 2) Tidak memiliki hubungan Kredit dan/atau pembiayaan dengan Perseroan;
 - 3) Tidak menerima dan meminta pelunasan terlebih dahulu atas kewajiban Perseroan kepada Wali Amanat selaku kreditur dalam hal Perseroan mengalami kesulitan keuangan, sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Petrosea Tahap I Tahun 2024 dan Pemegang Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Petrosea Tahap I Tahun 2024; dan/atau
 - 4) Tidak merangkap sebagai penanggung dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Petrosea Tahap I Tahun 2024 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Petrosea Tahap I tahun 2024.
- Surat pernyataan No. 567/FICD/FS/IX/2024 tanggal 17 September 2024, Wali Amanat menyatakan telah melakukan *due diligence* terhadap Perseroan atas rencana penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Petrosea Tahap I Tahun 2024 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Petrosea Tahap I Tahun 2024, sebagaimana diatur dalam POJK No. 20/2020.
- Surat pernyataan No. 566/FICD/FS/IX/2024 tanggal 17 September 2024, Wali Amanat mempunyai 1 (satu) orang anggota Direksi yang memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman di bidang keuangan syariah.

1. Riwayat Singkat

BTN pertama kali didirikan dengan nama Postpaarbank sebagaimana diumumkan dalam Staatsblad van Nederlandsch-Indie No. 653 Tahun 1934 yang kemudian berganti nama menjadi Bank Tabungan Pos berdasarkan Undang-undang Darurat No. 9 Tahun 1950 jo Undang-undang No. 36 Tahun 1953. Bank Tabungan Pos kemudian menjadi Bank Tabungan Negara berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 1964 *juncto* Undang-Undang No.20 Tahun 1968 tentang Bank Tabungan Negara.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 tanggal 29 April 1992 tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Tabungan Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Bank Tabungan Negara disesuaikan bentuk hukumnya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Dengan disesuaikannya bentuk hukum Bank Tabungan Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) sebagaimana dimaksud di atas, berdasarkan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Bank Tabungan Negara beralih menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Bank Tabungan Negara.

Pendirian Perusahaan Persero BTN berdasarkan Akta Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Tabungan Negara “PT Bank Tabungan Negara (Persero)” No. 136 tanggal 31 Juli 1992, dibuat dihadapan Muhani Salim, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. C2-6587.HT.01.01.TH.92 tanggal 12 Agustus 1992, didaftarkan di dalam register pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 18 Agustus 1992 di bawah No.603/A.P.T/Wapan/1992/PNJS, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.73 tanggal 11 September 1992, Tambahan No.6A (“**Akta Pendirian**”).

Anggaran dasar BTN yang termuat dalam Akta Pendirian telah mengalami beberapa kali perubahan dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Tabungan Negara Tbk. atau disingkat PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. No. 8 tanggal 6 Maret 2024 yang dibuat di hadapan Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 5 April 2024 sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan No: AHU-0022194.AH.01.02.Tahun 2024 serta yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0085123 tanggal 5 April 2024.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi terakhir sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Tabungan Negara Tbk. atau disingkat PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk No. 07 tanggal 6 Maret 2024 yang dibuat di hadapan Notaris Ashoya Ratam, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0105385 tanggal 15 Maret 2024 (“**Akta BTN No. 07**”).

2. Permodalan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk No. 8 tanggal 6 Maret 2024 yang dibuat di hadapan Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No: AHU-0022194.AH.01.02 tanggal 5 April 2024 dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0085123 tanggal 5 April 2024 perihal Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. dan Surat Keterangan Daftar Pemegang Saham BTN yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek No. DE/VIII/2024-3613 tanggal 2 Agustus 2024 perihal Laporan Bulanan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham terakhir BTN per 31 Juli 2024 adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp500 per lembar Saham		Persentase Kepemilikan (%)
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Saham Nominal	
Modal Dasar			
- Saham Seri A Dwiwarna	1	500	0,00
- Saham Biasa Atas Nama Seri B	20.478.431.999	10.239.215.999.500	100,00
Jumlah Modal Dasar	20.478.432.000	10.239.216.000.000	100,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- Saham Seri A Dwiwarna	1	500	0,00
- Saham Seri B			
1. Pemerintah	8.420.666.647	4.210.333.323.500	60,00
2. Masyarakat (<5%)	5.613.777.765	2.806.888.882.500	40,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	14.034.444.413	7.017.222.206.500	100,00
Sisa Saham dalam Portepel			
- Saham Seri A Dwiwarna	-	-	
- Saham Seri B	6.443.987.587	3.221.993.793.500	
Total Saham dalam Portepel	6.443.987.587	3.221.993.793.500	

3. Pengurusan Dan Pengawasan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir sebagaimana dimuat dalam Akta BTN No. 07 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama / Independen	: Chandra Hamzah
Wakil Komisaris Utama / Independen	: Iqbal Latanro
Komisaris	: Andin Hadiyanto
Komisaris	: Herry Trisaputra Zuna
Komisaris	: Himawan Arief Sugoto
Komisaris Independen	: Armand Bachtiar Arief
Komisaris Independen	: Bambang Widjanarko
Komisaris Independen	: Sentot Achmad Sentausa
Komisaris Independen	: Adi Sulistyowati

Direksi:

Direktur Utama	: Nixon Lambok Pahotan Napitupulu
Wakil Direktur Utama	: Oni Febriarto Rahardjo
Direktur Consumer	: Hirwandi Gafar*)
Direktur Finance	: Nofry Rony Poetra
Direktur Human Capital, Compliance and Legal	: Eko Waluyo
Direktur Assets Management	: Elisabeth Novie Riswanti
Direktur Distribution and Institutional Funding	: Jasmin
Direktur Information Technology	: Andi Nirwoto
Direktur Risk Management	: Setiyo Wibowo
Direktur Operational and Customer Experience	: Hakim Putratama
Direktur SME and Retail Funding	: Muhammad Iqbal

*) *Direksi yang memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman di bidang keuangan syariah.*

4. Kegiatan Usaha

BTN selaku Bank Umum menjalankan usaha di bidang perbankan dalam arti seluas-luasnya dengan visi “Menjadi The Best Mortgage Bank di Asia Tenggara pada tahun 2025” dan misi antara lain secara aktif mendukung Pemerintah dalam memajukan kesejahteraan Masyarakat Indonesia melalui kepemilikan rumah, mewujudkan kehidupan yang diimpikan jutaan rakyat Indonesia melalui penyediaan rumah yang layak, menjadi mitra keuangan bagi para pemangku kepentingan dalam ekosistem perumahan dengan menyediakan solusi menyeluruh dan layanan terbaik melalui inovasi digital.

Pada tahun 1974 BTN ditunjuk Pemerintah sebagai satu-satunya institusi yang menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR), sejalan dengan program Pemerintah yang menggalakkan program perumahan untuk rakyat. BTN mencatatkan saham perdana pada 17 Desember 2009 di Bursa Efek Indonesia, dan menjadi bank pertama di Indonesia yang melakukan Sekuritisasi Aset KPR melalui pencatatan transaksi Kontrak Investasi Kolektif–Efek Beragun Aset (KIK–EBA).

BTN sebagai perbankan yang berfokus di sektor pembiayaan perumahan, BTN telah menjadi bagian dari solusi untuk menjawab tantangan terkait penyediaan rumah bagi Masyarakat Indonesia. Termasuk juga kebutuhan rumah bagi para “Milenial”, sebutan bagi generasi produktif Indonesia.

Salah satu melakukan terobosan strategi pengembangan produk untuk menangkap peluang yang timbul dari demografi penduduk Indonesia yang didominasi oleh Gen Z dan milenial. Hal tersebut diwujudkan dengan mengembangkan fitur dan layanan Bank BTN dalam memiliki rumah, investasi dan menyiapkan dana pensiun yang terintegrasi secara *digital* melalui *Hero Campaign*-nya yaitu Hidup Gak Cuma Tentang Hari Ini (HGCTHI).

Seiring dengan transformasi bisnis yang telah dilakukan dengan tujuan meningkatkan kinerja BTN dan memberikan hasil terbaik kepada pemangku kepentingan, BTN membangun *one stop shop financial solution* layanan perbankan secara menyeluruh di segmen SME Komersial, Korporasi dan Nasabah Lembaga untuk memperkuat kapabilitas digitalisasi bisnis, khususnya untuk mengembangkan bisnis berbasis ekosistem perumahan melalui ekspansi *value chain* bisnis perumahan.

Saat ini BTN terus meningkatkan layanan perbankan yang dimiliki untuk memacu performa layanan digital seperti *banking from home* dan *new* aplikasi *mobile banking* BTN serta membuat variasi produk KPR bersama produk *cash management* maupun produk tabungan untuk menarik nasabah agar lebih loyal terhadap BTN seperti *launching* KPR BTN Gaess for Milenials, KPR BTN *Rent To Own*, Tabungan BTN Bisnis, peluncuran Portal BTN Properti, BTN Solusi dan Program Batara Spekta. Diperkuat dengan mengusung budaya AKHLAK yang terdiri dari Amanah, Kompeten, Harmoni, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif, pandemi menjadi motivasi untuk memacu kinerja dalam memperbaiki dan meningkatkan *business process* serta mengembangkan sejumlah strategi meningkatkan pelayanan perbankan dan juga mendukung Pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi, sebagai mitra Pemerintah dalam menyalurkan bantuan sosial dan stimulus untuk menunjang perekonomian Masyarakat.

Di Tahun 2024, BTN melalui penerapan berbagai kebijakan strategis berhasil meraih penghargaan pada ajang *Mob-ex Award* Tahun 2024 di Singapura dalam kategori *Best Launch* pada kampanye BTN Mobile, BTN berhasil masuk daftar *Fortune Southeast Asia 500* Tahun 2024, BTN meraih penghargaan *Customer Experience Initiative of The Year* dalam ajang *ABF Retail Banking Awards 2024, Gold Award* dalam kategori *Corporate Governance & Investor Relation* Tahun 2024, *ASEAN GRC Award Winner 2023, Top 50 Of Biggest Market Capitalization Public Listed Companies*, serta BTN meraih penghargaan sebagai *The Best GRC for IT/Digital Transformation 2023 (Banking Industries)*.

BTN memperoleh sertifikat SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan di bidang kredit komersial dan pengadaan. Selain itu, BTN memperoleh Sertifikasi ISO 27001 dalam rangka memastikan bahwa SDM, tata kelola dan teknologi yang digunakan telah sesuai dengan standar industri (*International Standar Organization*), BTN telah melaksanakan proses sertifikasi dan mendapatkan akreditasi No. IS 790715 tahun 2023, dll.

BTN telah mengembangkan berbagai produk dan menambah layanan digital berbasis *digital banking* seperti yang telah lama berjalan *Cash Management* BTN dan pembukaan *Smart Branch* BTN yang dilengkapi beragam layanan untuk memfasilitasi kebutuhan nasabah yang berbasis digital. BTN sebagai pemeran utama dalam program sejuta rumah konsisten melakukan pengembangan *Digital Housing Ecosystem*, layanan *Direct Digital Bank* dan memperkuat kapabilitas organisasi serta memperkuat pilar – pilar *enabler* untuk pertumbuhan bisnis yang efisien. Melangkah ke depan BTN menapaki fase transformasi *Global-Playership* yang mampu membawa produk dan layanan BTN beroperasi sesuai standar layanan internasional dan kelas dunia.

Empat produk utama BTN, yakni *consumer banking, wealth management, commercial banking* dan perbankan Syariah. Untuk nasabah dari setiap jenis layanan perbankan ini, BTN menyediakan pinjaman, pendanaan, dan layanan jasa yang ditargetkan dapat memenuhi kebutuhan berbagai kelompok nasabah tersebut.

Layanan *consumer banking* BTN ditujukan untuk seluruh lapisan Masyarakat yaitu produk kredit perumahan (KPR), apartemen (KPA), dan kredit lainnya. *Wealth Management* menawarkan produk Bancassurance, Reksa Dana, Surat Berharga Negara Ritel, Surat Berharga Negara Pasar Sekunder dan Foreign Exchange. *Consumer banking* juga menyalurkan layanan kredit dan perbankan jenis lainnya kepada nasabah, seperti KPR BTN Gaess for Milenials, KPR BTN *Rent To Own*, BTN *Property*, BTN *Smart Residence*, kredit multiguna dengan rumah sebagai jaminan dan kredit tanpa agunan. BTN juga menawarkan produk pendanaan seperti Tabungan BTN Bisnis, BTN Solusi, giro, tabungan, dan deposito berjangka.

Layanan *commercial banking* BTN termasuk kredit konstruksi, kredit modal kerja, kredit investasi dan kredit komersial lainnya, BTN *Property for Developer* serta kredit usaha kecil dan menengah (UKM). BTN juga menawarkan produk pendanaan di segmen *commercial* seperti giro dan deposito berjangka.

BTN Syariah menawarkan produk jasa, pembiayaan dan pendanaan komersial maupun konsumen yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam seperti produk baru KPR BTN HITS (*Hijrah To Syariah*) for *Milenials*.

Dalam menunjang kegiatan-kegiatan di pasar modal, BTN selama 4 (empat) tahun terakhir berperan aktif antara lain sebagai Wali Amanat dalam penerbitan:

- Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap VI Tahun 2020;
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap VI Tahun 2020;
- Obligasi Berkelanjutan I Tunas Baru Lampung Tahap II Tahun 2020;
- Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific Tahap II Tahun 2020;
- Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahap III Tahun 2020;
- Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap VII Tahun 2020;
- Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2020;
- Obligasi Berkelanjutan IV PLN Tahap I Tahun 2020;
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV PLN Tahap I Tahun 2020;
- Obligasi Berkelanjutan IV BFI Finance Indonesia Tahap III Tahun 2020;
- Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific Tahap III Tahun 2020;
- Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2020;
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II BJB Tahap II Tahun 2020;
- Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap III Tahun 2021;
- Obligasi Berkelanjutan V BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2021;
- Obligasi Berkelanjutan V BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2021;
- Obligasi Berkelanjutan II Barito Pacific Tahap I Tahun 2021;
- Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap IV Tahun 2021;
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank BJB Tahap I Tahun 2021;
- Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap V Tahun 2022;
- Obligasi Berkelanjutan II Barito Pacific Tahap II Tahun 2022;
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank BJB Tahap II Tahun 2022;
- Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2022;
- Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap IV Tahun 2022;
- Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap V Tahun 2022;
- Obligasi Berkelanjutan II Semen Indonesia Tahap I Tahun 2022;
- Obligasi I Pos Indonesia Tahun 2022;
- Obligasi Berkelanjutan V BFI Finance Indonesia Tahap III Tahun 2023.
- Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap VI Tahun 2023;
- Obligasi Berkelanjutan III Barito Pacific Tahap I Tahun 2023;
- Obligasi Wajib Konversi Kimia Farma I Tahun 2023;
- Obligasi VII Danareksa Tahun 2023;
- Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2023;
- Obligasi Berkelanjutan II Tunas Baru Lampung Tahap I Tahun 2023;
- Obligasi Berkelanjutan V BFI Finance Indonesia Tahap IV Tahun 2023
- Obligasi Berkelanjutan V BFI Finance Indonesia Tahap V Tahun 2023;
- Obligasi Subordinasi IV Bank BRI Tahun 2023;
- Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2023;
- Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap III Tahun 2023;
- Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank BRI Tahap II Tahun 2023;
- Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap II Tahun 2023;
- Obligasi Berkelanjutan III Barito Pacific Tahap II Tahun 2023;
- Obligasi VIII Danareksa Tahun 2023;
- Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2024;
- Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap IV Tahun 2024;
- Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank BRI Tahap III Tahun 2024;
- Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap I Tahun 2024;
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank BJB Tahap I Tahun 2024;
- Obligasi Berkelanjutan I Dayamitra Telekomunikasi Tahap I Tahun 2024; dan
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Dayamitra Telekomunikasi Tahap I Tahun 2024.

5. Kantor Cabang

Sejalan dengan perkembangan kegiatan usahanya, jaringan operasional BTN terus meluas sebagai berikut:

- Jaringan Perbankan Konvensional:
BTN telah memiliki 2 Kantor Pusat, 8 Kantor Wilayah, 82 Kantor Cabang, 539 Kantor Cabang Pembantu (KCP), 4 Kantor Fungsional, dan 51 Mobil BTN *Move* didukung dengan 2.146 *Automatic Teller Machine* (ATM) dan *Cash Recycling Machine* (CRM) di seluruh Indonesia, serta menyediakan akses jaringan lebih dari 80.000 jaringan ATM Link, ATM Bersama, ATM Alto, ATM MEPS dan ATM Prima.
- Jaringan Perbankan Syariah :
BTN Syariah memiliki 34 Kantor Cabang Syariah, 76 Kantor Cabang Pembantu Syariah.

6. Tugas Pokok Wali Amanat

Sesuai dengan POJK No. 19/2020 dan kemudian ditegaskan lagi di dalam akta Perjanjian Perwaliamanatan, tugas pokok Wali Amanat antara lain adalah :

- a. mewakili kepentingan para Pemegang Obligasi dan Sukuk Ijarah, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan, POJK No.20/2020 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- b. mengikatkan diri untuk melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam huruf a sejak menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan, tetapi mulai berlaku efektif pada saat Obligasi dan Sukuk telah didistribusikan kepada Pemegang Obligasi dan Sukuk Ijarah;
- c. melaksanakan tugas sebagai Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan, Peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia; dan
- d. memberikan semua keterangan atau informasi sehubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas perwaliamanatan kepada OJK.

7. Penunjukan, Penggantian dan Berakhirnya Tugas Wali Amanat

- i. Penunjukan Wali Amanat untuk pertama kalinya dilakukan oleh Perseroan, sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
- ii. Penggantian Wali Amanat dilakukan bilamana terjadi salah satu dari sebab-sebab sebagai berikut:
 - a. Wali Amanat tidak lagi memenuhi ketentuan untuk menjalankan fungsi sebagai Wali Amanat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Ijin usaha bank umum yang melakukan kegiatan sebagai Wali Amanat dicabut;
 - c. Pembatalan surat tanda terdaftar atau pembekuan kegiatan usaha Wali Amanat di Pasar Modal;
 - d. Wali Amanat dibubarkan oleh suatu badan peradilan yang berwenang dan telah mempunyai hukum yang tetap atau oleh suatu badan resmi lainnya atau dianggap telah bubar berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
 - e. Wali Amanat dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang dan telah mempunyai hukum yang tetap atau dibekukan operasinya dan/atau kegiatan usahanya oleh pihak yang berwenang;
 - f. Wali Amanat tidak dapat melaksanakan kewajibannya, berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau keputusan RUPO dan RUPSI dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di sektor jasa keuangan;
 - g. Wali Amanat melanggar ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
 - h. Atas permintaan para Pemegang Obligasi melalui RUPO dan RUPSI sebagaimana diatur dalam POJK No. 19/2020;
 - i. Timbulnya hubungan Afiliasi antara Wali Amanat dengan Perseroan setelah penunjukan Wali Amanat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal oleh Pemerintah;

- j. Timbulnya hubungan kredit pembiayaan yang melampaui jumlah sebagaimana diatur dalam POJK No. 19/2020; atau
 - k. Atas permintaan Wali Amanat dalam hal Wali Amanat mengundurkan diri karena Perseroan tidak membayarkan imbalan jasa Wali Amanat sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 Perjanjian Perwaliamanatan setelah Wali Amanat mengajukan permintaan pembayaran secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut kepada Perseroan
- iii. Berakhirnya tugas, kewajiban, dan tanggung jawab Wali Amanat adalah pada saat:
- a. Obligasi dan Sukuk telah dilunasi baik Pokok Obligasi, Sisa Imbalan Ijarah, Bunga Obligasi, Cicilan Imbalan Ijarah termasuk Denda (jika ada) dan Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan (jika ada) serta Wali Amanat telah menerima laporan pemenuhan kewajiban Perseroan dari Agen Pembayaran;
 - b. Obligasi dan Sukuk telah dikonversi seluruhnya menjadi saham;
 - c. tanggal tertentu yang telah disepakati dalam Perjanjian Perwaliamanatan setelah tanggal jatuh tempo Pokok Obligasi dan Sukuk; atau
 - d. setelah diangkatnya wali amanat baru.

8. Ikhtisar Laporan Keuangan Wali Amanat

Tabel-tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data Laporan keuangan BTN pada tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 yang tidak diaudit serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja (member of Ernst & Young Global) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2024	2023	2022
ASET			
Kas dan setara kas	1.558.429	2.127.489	1.661.533
Giro pada Bank Indonesia	15.952.471	18.145.761	25.416.941
Giro pada bank lain – neto	6.595.532	2.201.594	1.470.510
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain – neto	12.038.092	30.561.122	12.975.955
Efek-efek- neto	18.826.541	5.282.970	1.720.769
Obligasi Pemerintah	32.864.203	35.893.929	51.964.973
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	-	-	-
Kredit yang diberikan – neto	297.153.150	282.392.324	252.552.651
Pembiayaan/piutang syariah – neto	39.950.843	35.713.853	30.054.130
Tagihan akseptasi	828.847	520.691	420.426
Aset pajak tangguhan – neto	3.198.740	2.998.282	2.915.428
Aset tetap – neto	8.367.728	8.117.812	6.353.803
Bunga yang masih akan diterima	11933.585	11.526.687	10.750.302
Aset lain-lain	6.236.357	3.235.046	2.352.762
TOTAL ASET	455.600.624	438.749.736	402.148.312
LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS			
LIABILITAS			
Liabilitas segera	3.972.925	3.277.514	3.205.358
Simpanan dari nasabah	335.966.255	322.501.148	297.099.801
Simpanan dari Bank Lain	2.304.618	91.312	136.408
Liabilitas akseptasi	829.134	544.567	420.562
Liabilitas Derivatif	6.531	-	-
Surat-surat berharga yang diterbitkan – neto	6.738.346	8.272.098	8.652.260
Pinjaman yang diterima	29.360.339	33.762.089	24.821.005
Bunga yang masih harus dibayar	634.359	647.496	629.366
Liabilitas imbalan kerja dan lain-lain	2.178.439	2.951.848	7.248.985
Pinjaman subordinasi	9.408.925	9.112.837	9.158.219
TOTAL LIABILITAS	395.950.638	381.164.489	351.376.683

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2024	2023	2023	2022
DANA SYIRKAH TEMPORER				
Simpanan Nasabah	28.589.025	27.082.860	24.823.456	
Simpanan dari Bank Lain	28.273	23.235	38.819	
TOTAL DANA SYIRKAH TEMPORER	28.617.298	27.106.095	24.862.275	
EKUITAS				
Modal ditempatkan dan disetor penuh	7.017.222	7.017.222	5.295.000	
Tambahan modal disetor	4.418.900	4.418.900	2.054.454	
Opsi saham	-	-	2.756.575	
Keuntungan (Kerugian) neto yang belum direalisasi atas efek-efek dan obligasi Pemerintah yang tersedia untuk dijual, setelah pajak tangguhan	(999.514)	(769.001)	(1.193.252)	
Pengukuran kembali Program Imbalan Pasti - setelah pajak tangguhan surplus revaluasi aset tetap	(532.855)	(560.339)	(409.657)	
Arus kas	(77.445)	(32.346)	(49.301)	
Pajak tangguhan surplus revaluasi aset tetap	3.565.773	3.565.773	3.508.565	
Saldo laba telah ditentukan penggunaannya	15.982.004	13.181.214	10.745.157	
Saldo laba belum ditentukan penggunaannya	1.658.603	3.657.72	3.201.813	
TOTAL EKUITAS	31.032.688	30.479.152	25.909.354	
TOTAL LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS	455.600.624	438.749.736	402.148.312	

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2024	2023	2023	2022
Pendapatan bunga dan bagi hasil	14.965.534	13.530.202	28.281.252	25.907.368
Beban bunga, bagi hasil, dan bonus	(9.044.306)	(7.144.375)	(14.850.962)	(10.910.084)
Pendapatan bunga dan bagi hasil – neto	5.291.228	6.385.827	13.430.290	14.997.284
Pendapatan operasional lainnya	1.958.048	1.709.702	3.891.147	2.274.852
Penyisihan kerugian penurunan nilai kerugian aset keuangan dan non-aset keuangan	(927.692)	(1.940.665)	(3.765.397)	(4.017.378)
Beban operasional lainnya	(5.038.117)	(4.147.231)	(9.017.450)	(9.438.880)
Laba operasional	1.915.976	2.000.380	4.539.729	3.814.803
Pendapatan (beban) bukan operasional – neto	(38.844)	(134.079)	(159.519)	60.887
Laba sebelum pajak	1.877.132	1.866.301	4.380.210	3.875.690
Beban pajak	(375.270)	(391.923)	(879.222)	(830.617)
Laba periode/ tahun berjalan	1.501.862	1.474.378	3.500.988	3.045.073
Pendapatan (beban) komprehensif lain	(248.128)	289.971	347.732	(1.061.317)
Laba komprehensif selama periode/ tahun berjalan	1.253.734	1.764.349	3.848.720	1.983.756
Laba bersih per saham dasar (nilai penuh)	107	105	249	288

9. Informasi Mengenai Wali Amanat

Alamat Wali Amanat:
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
 Financial Institution & Capital Market Division (FICD)
 Menara 2 BTN Lantai 8
 Jl. H.R. Rasuna Said No. 1
 Jakarta Selatan 12980, Indonesia
 Tel.: 38825147
 Website : www.btn.co.id
 Untuk Perhatian : Wali Amanat - Financial Services Department

XIII. TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

1. Pemesan yang Berhak

Perorangan Warga Negara Indonesia dan/atau perorangan Warga Negara Asing, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing yang berkedudukan di Indonesia yang berhak membeli Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah.

2. Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah

Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah harus dilakukan dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Prospektus ini dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi (FPPO) dan/atau Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah (FPPSI). Para pemesan dapat melakukan pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah, harus diajukan dengan menggunakan FPPO dan/atau FPPSI yang dapat diperoleh dari Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah melalui email para Penjamin Emisi Obligasi, dan Sukuk Ijarah sebagaimana tercantum dalam Bab XIV Prospektus ini dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (1) 1 (satu) alamat email hanya berhak untuk melakukan 1 (satu) kali pemesanan;
 - (2) Email yang akan diikutsertakan dalam proses pemesanan adalah email yang diterima pada pukul 08.00 – 16.00 WIB pada Masa Penawaran Umum;
 - (3) Pemesan harus melampirkan fotokopi KTP atau identitas lainnya;
 - (4) Pemesanan yang telah dimasukkan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan.
- b. Pemesan akan mendapatkan email balasan yang berisikan hasil *scan* FPPO dan/atau FPPSI yang sudah dibubuhi Nomor Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi (FPPO) dan/atau Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah (FPPSI) atau informasi tolakan yang dikarenakan oleh email ganda, nomor sub rekening efek yang tidak terdaftar atau tidak sesuai, KTP atau identitas yang dilampirkan tidak berlaku, informasi dalam sub rekening yang tidak sesuai dengan informasi dalam KTP atau identitas lainnya, dan kekurangan informasi lainnya terkait pemesanan pembelian Obligasi, dan/atau Sukuk Ijarah;
- c. Pemesan melakukan pembayaran selambat-lambatnya tanggal 12 Desember 2024 pukul 16.00 WIB ke rekening dan persyaratan yang tercantum dalam subbab Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah serta mengisi lengkap FPPO dan/atau FPPSI yang dikirimkan melalui email. Kemudian bukti setor dan *scan* FPPO dan/atau FPPSI yang telah diisi lengkap wajib dikirimkan ke alamat email para Penjamin Emisi Obligasi, Dan Sukuk Ijarah selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB dengan informasi pada badan email yang mengungkapkan nomor FPPO dan/atau FPPSI serta nama pemesan sesuai dengan KTP atau identitas lainnya yang berlaku;

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Pemesanan pembelian Obligasi, dan/atau Sukuk Ijarah yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

Setiap pemesan Obligasi, dan/atau Sukuk Ijarah harus memiliki rekening Efek pada Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI

3. Jumlah Minimum Pemesanan

Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

4. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Obligasi dan Sukuk Ijarah dimulai pada tanggal 9 Desember 2024 dan ditutup pada tanggal 10 Desember 2024 pukul 16.00 WIB.

5. Pendaftaran Obligasi dan Sukuk Ijarah ke Dalam Penitipan Kolektif

Obligasi dan Sukuk Ijarah yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan ini didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi dan Perjanjian Pendaftaran Sukuk Ijarah di KSEI serta perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang akan dibuat di kemudian hari yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkan Obligasi dan Sukuk Ijarah tersebut di KSEI maka atas Obligasi dan Sukuk Ijarah yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dan Sukuk Ijarah dalam bentuk sertifikat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi, Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang disimpan KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan Sukuk Ijarah. Obligasi dan Sukuk Ijarah akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Obligasi dan Sukuk Ijarah hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek pada tanggal 13 Desember 2024;
- b. Konfirmasi Tertulis berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dan Sukuk Ijarah, dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek dengan Pemegang Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah. Konfirmasi Tertulis merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah yang tercatat dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian;
- c. Pengalihan kepemilikan Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI. Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening;
- d. Pemegang Obligasi dan Sukuk Ijarah yang tercatat dalam rekening efek berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, pelunasan Pokok Obligasi, pembayaran Sisa Imbalan Ijarah, memberikan suara dalam RUPO dan/atau RUPSI, serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah;
- e. Pembayaran Bunga Obligasi, pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Sisa Imbalan Ijarah kepada pemegang Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah dilaksanakan oleh Perseroan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian, sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi, pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, pelunasan Pokok Obligasi, dan pembayaran Sisa Imbalan Ijarah yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi dan Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Ijarah. Perseroan melaksanakan pembayaran tersebut berdasarkan data kepemilikan Obligasi, Dan Sukuk Ijarah yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan;
- f. Hak untuk menghadiri RUPO dan/atau RUPSI dilaksanakan oleh pemilik manfaat Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah atau kuasanya dengan membawa asli surat Konfirmasi Tertulis untuk RUPO dan/atau RUPSI dan yang diterbitkan oleh KSEI dan, Obligasi dan Sukuk Ijarah yang bersangkutan dibekukan sampai dengan berakhirnya RUPO dan/atau RUPSI;
- g. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi dan Sukuk Ijarah wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk menerima dan menyimpan Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah yang didistribusikan oleh Perseroan.

6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah

Pemesanan harus mengajukan FPPO dan/atau FPPSI selama jam kerja yang umum berlaku kepada para Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah yang tercantum dalam Bab XIV Prospektus ini mengenai Penyebarluasan Prospektus Dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah

Para Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah akan menyerahkan kembali kepada pemesan satu tembusan dari FPPO dan/atau FPPSI yang telah ditandatangani sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

8. Penjatahan Obligasi dan Sukuk Ijarah

Apabila jumlah keseluruhan Obligasi dan Sukuk Ijarah yang dipesan melebihi jumlah Obligasi dan Sukuk Ijarah yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh Penjamin Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Sukuk Ijarah sesuai dengan porsi penjaminan masing-masing dengan persetujuan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah, dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah dan Peraturan No. IX.A.7 – Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum (“Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.7”). Tanggal penjatahan adalah tanggal 11 Desember 2024.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi dan Sukuk Ijarah dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah, melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan, Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan sesuai dengan Peraturan Bapepam No. IX.A.2.

Manajer Penjatahan dalam hal ini adalah PT BNI Sekuritas, wajib menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman kepada Peraturan No. VIII.G.12 – Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.7 paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

9. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah

Pemesan dapat melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara transfer yang ditujukan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah selambat-lambatnya tanggal 12 Desember 2024 pada rekening berikut:

	Obligasi	Sukuk Ijarah
PT BCA Sekuritas	Bank Central Asia Cabang: KCK No. Rekening: 2050026674 Atas Nama: PT BCA Sekuritas	BCA Syariah Cabang: Jatinegara No. Rekening: 0019808088 Atas Nama: PT BCA Sekuritas
PT BNI Sekuritas	Bank Negara Indonesia Cabang: Mega Kuningan No. Rekening: 8999998875 Atas Nama: PT BNI Sekuritas	BCA Syariah Cabang: KCP Kenari No. Rekening: 0062226667 Atas Nama: PT BNI Sekuritas
PT Henan Putihrai Sekuritas	Bank Mandiri Cabang: Bursa Efek Indonesia No. Rekening: 1040005728006 Atas Nama: PT Henan Putihrai Sekuritas	CIMB Niaga Syariah Cabang: Millennium Centennial Center No. Rekening: 860012283200 Atas Nama: PT Henan Putihrai Sekuritas

	Obligasi	Sukuk Ijarah
PT Sucor Sekuritas	Bank Sinarmas Cabang: Tanah Abang No. Rekening: 0029095116 Atas Nama: PT Sucor Sekuritas	Bank Nano Syariah Cabang: Cik Ditiro No. Rekening: 9930290103 Atas Nama: PT Sucor Sekuritas
PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	Bank Permata Cabang : Sudirman No. Rekening : 04001763984 Atas Nama : PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	Bank Permata Syariah Cabang : Bursa Efek Indonesia No Rek : 00970613161 Atas Nama : PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban Pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

Selanjutnya, setelah dana telah diterima oleh Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah melalui Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah, wajib mentransfer dana Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah kepada Perseroan pada Tanggal Pembayaran sesuai Tanggal Emisi yaitu pada tanggal 13 Desember 2024 ke rekening Perseroan.

10. Distribusi Obligasi dan Sukuk Ijarah Secara Elektronik

Distribusi Obligasi dan Sukuk Ijarah secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 13 Desember 2024. Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi dan Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi dan Sukuk Ijarah pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi dan Sukuk Ijarah semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah dan KSEI.

Segera setelah Obligasi dan Sukuk Ijarah diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah, selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah memberi instruksi kepada KSEI untuk mendistribusikan Obligasi dan Sukuk Ijarah ke dalam Rekening Efek dari Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi dan Sukuk Ijarah kepada Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi dan Sukuk Ijarah semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah yang bersangkutan.

11. Pengembalian Uang Pemesanan Obligasi dan Sukuk Ijarah

Dalam hal suatu pemesanan Efek ditolak sebagian atau seluruhnya dan jika pesanan Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah sudah dibayar maka uang pemesanan harus dikembalikan oleh Manajer Penjatahan Efek kepada para pemesan, paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal penjatahan.

Apabila pencatatan Obligasi dan Sukuk Ijarah tidak dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi dengan alasan tidak dipenuhinya persyaratan pencatatan pada Bursa Efek dan pengembalian uang pemesanan yang telah diterima oleh Perseroan, maka tanggung jawab pengembalian tersebut menjadi tanggungan Perseroan yang pengembalian pembayarannya melalui KSEI paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal tidak dipenuhinya persyaratan pencatatan pada Bursa Efek.

Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah atau Perseroan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kepada para pemesan untuk tiap hari keterlambatan denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi masing-masing seri Obligasi dan/atau kompensasi kerugian sebesar-besarnya maksimum ekuivalen 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Cicilan Imbalan Sukuk Ijarah dari masing-masing seri Sukuk Ijarah dengan mengacu dan mempertimbangkan kerugian riil yang terjadi, yang dihitung secara harian berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan pembayaran seluruh jumlah yang seharusnya dibayar ditambah denda dan/atau kompensasi kerugian, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan atau setelah tanggal tidak dipenuhinya persyaratan pencatatan pada Bursa Efek, maka Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi dan Sukuk Ijarah.

Perseroan tidak bertanggung jawab dan dengan ini dibebaskan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah dan Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah, dan Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah, tidak bertanggung jawab dan karenanya harus dibebaskan oleh Perseroan dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Perseroan.

Pengembalian uang kepada pemesan dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrument pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau bilyet giro yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah yang relevan, dengan menunjukkan atau menyerahkan bukti tanda terima pemesanan dan bukti tanda jati diri.

12. Penundaan Masa Penawaran Umum atau Pembatalan Penawaran Umum

Dalam jangka waktu sejak Pernyataan Pendaftaran Efektif sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum. Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran Efektif atau membatalkan Penawaran Umum apabila terjadi kondisi-kondisi berikut:

- (i) Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
- (ii) Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
- (iii) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir Nomor: IX.A.2-11 lampiran 11.

Keputusan Perseroan untuk menunda atau membatalkan Penawaran Umum tersebut harus diberitahukan kepada OJK serta mengumumkannya dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berperedaran nasional. Dengan mengacu pada Peraturan Nomor IX.A.2 Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar. Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
- b. Menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a;
- c. Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
- d. Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Efek telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan efek kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Dalam hal Perseroan akan melakukan penundaan Penawaran Umum karena alasan sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:

- 1) Dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas, maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) Hari Kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;

- 2) Dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas, maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
- 3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
- 4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam angka 3) di atas kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud.

13. Lain-Lain

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah berhak untuk menerima atau menolak Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

XIV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

Prospektus, Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah dapat diperoleh pada Masa Penawaran Umum yaitu tanggal 9 Desember 2024 sampai dengan 10 Desember 2024 pukul 09.00 sampai 16:00 dengan menghubungi Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah di bawah ini:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI, DAN SUKUK IJARAH / PENJAMIN EMISI EFEK OBLIGASI, DAN SUKUK IJARAH

PT BCA Sekuritas

Menara BCA, Grand Indonesia, 41st Floor
Jl. MH Thamrin No.1
Jakarta 10310
Telepon: (021) 2358 7222
Faksimile: (021) 2358 7250 / 2358 7300
Website: www.bcasekuritas.co.id
Email: dcm@bcasekuritas.co.id

PT Henan Putihrai Sekuritas

Sahid Sudirman Center Lt. 46
Jl. Jend. Sudirman No. 86
Jakarta 10220
Telepon: (021) 5206464
Faksimile: (021) 5206797
Website www.hpfinancials.co.id
Email: dcm@henanputihrai.com

PT BNI Sekuritas

Sudirman Plaza,
Indofood Tower, Lt. 16
Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78
Jakarta 12910
Telepon: (021) 2554 3946
Website: www.bnisekuritas.com
Email: dcm@bnisekuritas.co.id

PT Sucor Sekuritas

Sahid Sudirman Center, 12th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 86
Jakarta 10220
Telepon: (021) 8067 3000
Faksimili: (021) 2788 9288
Website: www.sucorsekuritas.com
Email: fi@sucorsekuritas.com

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

Gedung Artha Graha 18th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telepon: (021) 2924 9088
Faksimile: (021) 2924 9150
Website: www.trimegah.com
Email: fit@trimegah.com;
Investment.banking@trimegah.com

Halaman ini sengaja dikosongkan

XV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Halaman ini sengaja dikosongkan

Jakarta, 29 November 2024

Ref. No. 482/TnP-KY/XI/2024

Kepada Yang Terhormat,

PT PETROSEA TBK

Indy Bintaro Office Park, Building B
Jl. Boulevard Bintaro Jaya Blok B7/A6
Sektor VII, CBD Bintaro Jaya
Tangerang Selatan, 15224
Indonesia

U.p. : Direksi

Perihal : PENDAPAT DARI SEGI HUKUM DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I DAN SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I PETROSEA TAHAP I TAHUN 2024

Dengan hormat,

Untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, kami kantor konsultan hukum TnP Law Firm ("**TnP**"), dalam hal ini diwakili oleh Rambun Tjajo, S.H., yang telah memiliki Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.KH-277/PJ-1/PM.021/2023 tertanggal 12 Desember 2023, dan telah terdaftar dalam Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("**HKHPM**") dengan Nomor 98037, selaku konsultan hukum yang bebas dan mandiri, telah ditunjuk oleh PT Petrosea Tbk ("**Perseroan**") berdasarkan Surat No. CORPLEGAL/L/2024/VIII-052 tertanggal 28 Agustus 2024, untuk melakukan Uji Tuntas dan mempersiapkan Laporan Uji Tuntas ("**LUT**") serta memberikan Pendapat dari Segi Hukum atas Perseroan ("**Pendapat Hukum**") sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan PUB Obligasi Berkelanjutan I Petrosea Tahap I Tahun 2024 (sebagaimana didefinisikan di bawah) dan PUB Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Petrosea Tahap I Tahun 2024 (sebagaimana didefinisikan di bawah) yang merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Petrosea dengan target dana yang dihimpun sebesar Rp2.000.000.000.000 dan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Petrosea dengan target sisa imbalan ijarah sebesar Rp1.000.000.000.000 sebagaimana yang diuraikan lebih lanjut di bawah ini ("**PUB Obligasi dan Sukuk Ijarah I**").

Dengan tetap memperhatikan ruang lingkup, pembatasan dan asumsi yang akan disebutkan di bawah, Pendapat Hukum ini dapat diubah, ditambah berdasarkan dokumen-dokumen tambahan dari Perseroan dan keterangan-keterangan Perseroan yang kami peroleh, setelah tanggal dikeluarkannya Pendapat Hukum ini sampai dengan pernyataan pendaftaran atas dokumen PUB Obligasi dan Sukuk Ijarah I Tahap I (sebagaimana didefinisikan di bawah) dinyatakan efektif oleh OJK (sebagaimana didefinisikan di bawah).

Pendapat Hukum ini merupakan Pendapat Hukum satu-satunya yang kami sampaikan untuk menggantikan seluruhnya Pendapat Hukum yang telah diberikan sebelumnya dengan Ref. No. 435/TnP-KY/XI/2024 tertanggal 7 November 2024, Ref. No. 379/TnP-KY/X/2024

tertanggal 14 Oktober 2024, dan Ref. No. 310/TnP-KY/IX/2024 tertanggal 18 September 2024.

A. URAIAN TRANSAKSI

Dalam rangka PUB Obligasi dan Sukuk Ijarah I tersebut, Perseroan akan:

1. menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan I Petrosea Tahap I Tahun 2024 dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp1.000.000.000.000, yang terdiri dari 4 seri, yaitu Obligasi Seri A, Obligasi Seri B, Obligasi Seri C dan Obligasi Seri D yang masing-masing ditawarkan sebesar 100% dari jumlah Pokok Obligasi. Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"). Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih Seri Obligasi yang dikehendaki sebagai berikut:
 - (a) Seri A: sebesar Rp47.000.000.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,50% per tahun dengan jangka waktu 367 Hari Kalender sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo;
 - (b) Seri B: sebesar Rp171.640.000.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,00% per tahun dengan jangka waktu 3 tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo;
 - (c) Seri C: sebesar Rp465.400.000.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,75% per tahun dengan jangka waktu 5 tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo; dan
 - (d) Seri D: sebesar Rp315.960.000.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,50% per tahun dengan jangka waktu 7 tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo,

(secara bersama-sama disebut sebagai "**PUB Obligasi Berkelanjutan I Petrosea Tahap I Tahun 2024**");
2. menerbitkan dan menawarkan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Petrosea Tahap I Tahun 2024 dengan sisa imbalan ijarah sebesar Rp500.000.000.000, yang terdiri dari 4 seri, yaitu Sukuk Ijarah Seri A, Sukuk Ijarah Seri B, Sukuk Ijarah Seri C dan Sukuk Ijarah Seri D yang masing-masing ditawarkan sebesar 100% dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah. Sukuk Ijarah ini diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterbitkan atas nama KSEI. Sukuk Ijarah memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih seri Sukuk Ijarah yang dikehendaki sebagai berikut:
 - (a) Seri A: sebesar Rp33.000.000.000 dengan Cicilan Imbalah Ijarah sebesar Rp2.145.000.000 per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri A atau sebesar Rp65.000.000 per Rp1.000.000.000

per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Seri A dengan jangka waktu 367 Hari Kalender sejak Tanggal Emisi;

- (b) Seri B: sebesar Rp128.360.000.000 dengan Cicilan Imbalah Ijarah sebesar Rp10.268.800.000 per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri B atau sebesar Rp80.000.000 per Rp1.000.000.000 per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Seri B dengan jangka waktu 3 tahun sejak Tanggal Emisi;
- (c) Seri C: sebesar Rp254.600.000.000 dengan Cicilan Imbalah Ijarah sebesar Rp22.277.500.000 per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri C atau sebesar Rp87.500.000 per Rp1.000.000.000 per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Seri C dengan jangka waktu 5 tahun sejak Tanggal Emisi; dan
- (d) Seri D: sebesar Rp84.040.000.000 dengan Cicilan Imbalah Ijarah sebesar Rp7.983.800.000 per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri D atau sebesar Rp95.000.000 per Rp1.000.000.000 per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Seri D dengan jangka waktu 7 tahun sejak Tanggal Emisi,

(secara bersama-sama disebut sebagai “**PUB Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Petrosea Tahap I Tahun 2024**”).

PUB Obligasi Berkelanjutan I Petrosea Tahap I Tahun 2024 dan PUB Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Petrosea Tahap I Tahun 2024, secara bersama-sama disebut “**PUB Obligasi dan Sukuk Ijarah I Tahap I**”.

PUB Obligasi dan Sukuk Ijarah I Tahap I ini dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) oleh PT BCA Sekuritas, PT Henan Putihrai Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT Sucor Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk selaku para penjamin pelaksana emisi dan para penjamin emisi obligasi dan sukuk ijarah dalam PUB Obligasi dan Sukuk Ijarah I Tahap I (“**Para Penjamin Pelaksana Emisi**”). Adapun untuk PUB Obligasi dan Sukuk Ijarah I Tahap I ini, Perseroan telah menunjuk PT Bank Tabungan Negara Tbk selaku wali amanat (“**Wali Amanat**”).

Berdasarkan keterangan Perseroan dan hasil pemeriksaan kami, antara Perseroan dan Para Penjamin Pelaksana Emisi tidak terdapat hubungan Afiliasi.

Sehubungan dengan PUB Obligasi dan Sukuk Ijarah I Tahap I, Perseroan telah menandatangani:

1. Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Petrosea Tahap I Tahun 2024 No. 49 tertanggal 17 September 2024, sebagaimana telah diubah melalui Akta Addendum Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Petrosea Tahap I Tahun 2024 No. 18 tanggal 14 Oktober 2024, Akta Addendum II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Petrosea Tahap I Tahun 2024 No. 2 tanggal 1 November 2024, dan Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Petrosea Tahap I Tahun 2024 No. 92 tanggal 28 November 2024, antara

Perseroan dan Wali Amanat, yang seluruhnya dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan (**"Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi"**);

2. Akta Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Petrosea Tahap I Tahun 2024 No. 52 tertanggal 17 September 2024, sebagaimana telah diubah melalui Akta Addendum Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Petrosea Tahap I Tahun 2024 No. 21 tanggal 14 Oktober 2024, Akta Addendum II Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Petrosea Tahap I Tahun 2024 No. 5 tanggal 1 November 2024, dan Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Petrosea Tahap I Tahun 2024 No. 96 tanggal 28 November 2024, antara Perseroan dan Wali Amanat, yang seluruhnya dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan (**"Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah"**);
3. Akta Pernyataan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Petrosea Tahap I Tahun 2024 No. 48 tertanggal 17 September 2024, sebagaimana telah diubah melalui Akta Addendum Pernyataan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Petrosea Tahap I Tahun 2024 No. 17 tanggal 14 Oktober 2024, Akta Addendum II Pernyataan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Petrosea Tahap I Tahun 2024 No. 1 tanggal 1 November 2024, dan Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Petrosea Tahap I Tahun 2024 No. 91 tanggal 28 November 2024, yang seluruhnya dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan (**"Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi"**);
4. Akta Pernyataan Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Petrosea Tahap I Tahun 2024 No. 51 tertanggal 17 September 2024, sebagaimana telah diubah melalui Akta Addendum Pernyataan Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Petrosea Tahap I Tahun 2024 No. 20 tanggal 14 Oktober 2024, Akta Addendum II Pernyataan Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Petrosea Tahap I Tahun 2024 No. 4 tanggal 1 November 2024, dan Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Petrosea Tahap I Tahun 2024 No. 95 tanggal 28 November 2024, yang seluruhnya dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan (**"Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah"**);
5. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I Perseroan Tahap I Tahun 2024 No. 50 tertanggal 17 September 2024, sebagaimana telah diubah melalui Akta Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I Perseroan Tahap I Tahun 2024 No. 19 tanggal 14 Oktober 2024, Akta Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I Perseroan Tahap I Tahun 2024 No. 3 tanggal 1 November 2024, dan Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I Perseroan Tahap I Tahun 2024 No. 93 tanggal 28 November 2024, antara Perseroan dan Para Penjamin Pelaksana Emisi, yang seluruhnya dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan (**"Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi"**);

6. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Perseroan Tahap I Tahun 2024 No. 53 tertanggal 17 September 2024, sebagaimana telah diubah melalui Akta Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Perseroan Tahap I Tahun 2024 No. 22 tanggal 14 Oktober 2024, Akta Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Perseroan Tahap I Tahun 2024 No. 6 tanggal 1 November 2024, dan Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Perseroan Tahap I Tahun 2024 No. 97 tanggal 28 November 2024, antara Perseroan dan Para Penjamin Pelaksana Emisi, yang seluruhnya dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan ("**Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah**");
7. Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 91 tertanggal 26 September 2024 antara Perseroan dan KSEI, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan ("**Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi**");
8. Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 92 tertanggal 26 September 2024 antara Perseroan dan KSEI, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan ("**Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Ijarah**");
9. Akad Ijarah Sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Petrosea Tahap I Tahun 2024 tertanggal 17 September 2024, yang dibuat di bawah tangan antara Perseroan dan Wali Amanat ("**Akad Ijarah**");
10. Akad Wakalah Sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Petrosea Tahap I Tahun 2024 tertanggal 17 September 2024, yang dibuat di bawah tangan antara Perseroan dan Wali Amanat ("**Akad Wakalah**");
11. Akta Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan I Petrosea Tahap I Tahun 2024 No. 94 tertanggal 28 November 2024, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan ("**Akta Pengakuan Utang**"); dan
12. Akta Pengakuan Kewajiban Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Petrosea Tahap I Tahun 2024 No. 98 tertanggal 28 November 2024, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan ("**Akta Pengakuan Kewajiban Sukuk Ijarah**").

Dokumen-dokumen sebagaimana disebutkan di atas selanjutnya secara bersama-sama disebut dengan "**Perjanjian Sehubungan Dengan PUB Obligasi dan Sukuk Ijarah I Tahap I**".

Sehubungan dengan pelaksanaan PUB Obligasi dan Sukuk Ijarah I Tahap I, Direksi Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Perseroan No. PTP/RES/BOC/IX/2024-0017 tertanggal 3 September 2024.

Sebagaimana diungkapkan dalam Prospektus, setelah dikurangi biaya-biaya emisi terkait maka:

1. seluruh dana yang diperoleh dari hasil PUB Obligasi Berkelanjutan I Petrosea Tahap I Tahun 2024 ini, akan dipergunakan oleh Perseroan seluruhnya untuk modal kerja Perseroan, melalui proyek-proyek yang dikerjakan Perseroan pada proyek-proyek pertambangan dan proyek-proyek rekayasa dan konstruksi yang merupakan kegiatan usaha utama Perseroan, dengan rincian sebagai berikut:
 - (a) sekitar 40% akan dipergunakan untuk pembelian material dan jasa terkait pembelian material yang bersifat beli putus sesuai kebutuhan Perseroan dan ketersediaan material dari pihak yang tidak terafiliasi dengan Perseroan;
 - (b) sekitar 27% akan dipergunakan untuk biaya operasi alat berat dan peralatan;
 - (c) sekitar 25% akan dipergunakan untuk biaya-biaya tenaga kerja; dan
 - (d) sisanya akan dipergunakan untuk beban usaha lainnya.

2. seluruh dana yang diperoleh dari PUB Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Petrosea Tahap I Tahun 2024 ini, akan dipergunakan oleh Perseroan seluruhnya untuk modal kerja Perseroan, melalui proyek-proyek yang dikerjakan Perseroan pada proyek-proyek pertambangan dan proyek-proyek rekayasa dan konstruksi yang merupakan kegiatan usaha utama Perseroan, dengan rincian sebagai berikut:
 - (a) sekitar 40% akan dipergunakan untuk pembelian material dan jasa terkait pembelian material yang bersifat beli putus sesuai kebutuhan Perseroan dan ketersediaan material dari pihak yang tidak terafiliasi dengan Perseroan;
 - (b) sekitar 27% akan dipergunakan untuk biaya operasi alat berat dan peralatan;
 - (c) sekitar 25% akan dipergunakan untuk biaya-biaya tenaga kerja; dan
 - (d) sisanya akan dipergunakan untuk beban usaha lainnya.

(Rencana penggunaan dana yang diperoleh Perseroan dari PUB Obligasi Berkelanjutan I Petrosea Tahap I Tahun 2024 dan PUB Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Petrosea Tahap I Tahun 2024, selanjutnya disebut sebagai "**Rencana Penggunaan Dana**".)

Perseroan juga telah memperoleh persetujuan prinsip dari BEI atas permohonan pencatatan berdasarkan Surat No. S-11282/BEI.PP1/10-2024 tanggal 29 Oktober 2024 tentang Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang.

Apabila Perseroan akan melakukan perubahan penggunaan dana hasil PUB Obligasi dan Sukuk Ijarah I Tahap I, maka sesuai dengan POJK No. 30/2015:

- (a) menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil penawaran umum Obligasi atau Sukuk Ijarah kepada OJK paling lambat 14 hari sebelum penyelenggaraan rapat umum pemegang efek Obligasi atau Sukuk Ijarah; dan
- (b) memperoleh persetujuan dari Wali Amanat setelah memperoleh persetujuan dari rapat umum pemegang efek Obligasi atau Sukuk Ijarah.

Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil PUB Obligasi dan Sukuk Ijarah I Tahap I ini sesuai dengan ketentuan POJK No. 30/2015.

B. DEFINISI

Selain dari istilah yang telah didefinisikan di bawah ini, istilah-istilah lain yang dipakai, namun tidak diatur dalam Pendapat Hukum ini memiliki arti yang sama dengan istilah-istilah sebagaimana didefinisikan di dalam LUT:

“**Anggaran Dasar**” berarti anggaran dasar suatu PT yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia;

“**Bapepam-LK**” berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Republik Indonesia, sebagaimana digantikan oleh OJK yang pendirian dan penyelenggaraannya diatur dalam UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK, sebagaimana terakhir diubah dengan UUP2SK;

“**BCA**” berarti PT Bank Central Asia Tbk;

“**BNI**” berarti PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk;

“**BPJS**” berarti Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;

“**Dewan Komisaris**” berarti dewan komisaris dari suatu PT;

“**Direksi**” berarti direksi dari suatu PT;

“**HKHPM**” berarti Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal;

“**Hukum Indonesia**” berarti hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara sah di Republik Indonesia sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum;

“**KBLI**” berarti Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan Peraturan BPS No. 2/2020;

“**KJP**” berarti PT Kreasi Jasa Persada;

“**LUT**” berarti Laporan Uji Tuntas atas Perseroan dan Perusahaan Anak yang memuat hasil Uji Tuntas TnP, yang disusun dengan memperhatikan ketentuan Standar HKHPM dan ketentuan Hukum Indonesia yang relevan terhadap pelaksanaan Uji Tuntas;

“**Mandiri**” berarti PT Bank Mandiri (Persero) Tbk;

“**Menkumham**” berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

“**OJK**” berarti Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang, pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;

“**Pengendali**” berarti, untuk keperluan Pendapat Hukum, pihak yang baik langsung maupun tidak langsung (a) memiliki lebih dari 50% dari total modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan atau (b) mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun pengelolaan dan/atau kebijakan Perseroan;

“**Peraturan BPS No. 2/2020**” berarti Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia;

“**Peraturan No. IX.J.1**” berarti Peraturan No. IX.J.1, sebagaimana yang dilampirkan dalam Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-179/BL/2008 Tahun 2008 tertanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik;

“**Periode Uji Tuntas**” berarti periode terhitung sejak tanggal prospektus penawaran umum perdana saham Perseroan tanggal 6 April 1990 sampai dengan Tanggal LUT ini, kecuali yang terkait dengan (a) pemeriksaan terhadap Anggaran Dasar hanya merujuk kepada Anggaran Dasar pada saat pendirian dan perubahan terakhir dan (b) pemeriksaan saham dan struktur permodalan hanya untuk 2 tahun terakhir;

“**Perizinan Lingkungan Hidup**” berarti perizinan dari Perseroan di bidang lingkungan hidup yang bersifat material terhadap kegiatan usaha utama Perseroan;

“**Perizinan Operasional**” berarti perizinan operasional yang bersifat material terhadap kelangsungan kegiatan usaha utama dari Perseroan;

“**Perizinan Umum**” berarti perizinan umum yang bersifat administratif sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan;

“**Perjanjian Fasilitas Berjangka Senior**” berarti Akta Perjanjian Perubahan dan Pernyataan Kembali terhadap Perjanjian Fasilitas Berjangka Senior No. 64 tertanggal 30 Agustus 2024, yang dibuat oleh Sri Buena Brahmana, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta;

“**Perjanjian Kredit**” berarti perjanjian-perjanjian kredit/instrumen hutang yang mengikat Perseroan dan Perusahaan Anak sebagaimana diungkapkan dalam LUT;

“**Perjanjian Kredit BCA**” berarti Akta Perjanjian Kredit No. 94 tanggal 29 Mei 2024 yang dibuat di hadapan Sri Buena Brahmana, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, oleh dan antara Perseroan, KBL, dan CEP sebagai debitur dan BCA sebagai kreditur;

“**Perjanjian Material**” berarti perjanjian-perjanjian yang mengikat Perseroan, dengan Pihak Terafiliasi dan/atau pihak ketiga yang bersifat material terhadap pelaksanaan

kegiatan usaha utama dari Perseroan sebagaimana diungkapkan dalam LUT;

“Perpres No. 13/2018” berarti Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenai Pemilik Manfaat atas Korporasi, sebagaimana diimplementasikan oleh Peraturan Menkumham No. 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenai Pemilik Manfaat dari Korporasi;

“Perusahaan Anak” berarti perusahaan-perusahaan yang berbentuk badan hukum PT berdasarkan Hukum Indonesia yang saham-sahamnya dimiliki baik langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan, di mana kepemilikan Perseroan pada perusahaan-perusahaan tersebut lebih dari 50% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dalam perusahaan-perusahaan tersebut, dan laporan keuangannya dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Republik Indonesia, yang dalam hal ini adalah PT Kinarya Bangun Sesama (**“KBS”**), PT POSB Infrastructure Indonesia (**“PII”**), PT Rekakarsa Karya Nusantara (**“RKN”**), PT Karya Bhumi Lestari (**“KBL”**), PT Kuala Pelabuhan Indonesia (**“KPI”**), PT Kemilau Mulia Sakti (**“KMS”**), PT Mahaka Industri Perdana (**“MIP”**), dan PT Cristian Eka Pratama (**“CEP”**);

“Perusahaan Anak Asing” berarti perusahaan-perusahaan yang didirikan di luar yurisdiksi Hukum Indonesia yang saham-sahamnya dimiliki baik langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan dan laporan keuangannya dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Republik Indonesia, yang dalam hal ini adalah Petros Solutions Australia Pty Ltd (**“PSA”**) dan PTP Investments Pte. Ltd (**“PIP”**);

“Pihak Terafiliasi” berarti pihak yang memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan, dan **“Afiliasi”** berarti afiliasi sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK;

“POJK” berarti Peraturan OJK;

“POJK No. 33/2014” berarti POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;

“POJK No. 34/2014” berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik;

“POJK No. 35/2014” berarti POJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik;

“POJK No. 36/2014” berarti POJK No. 36/POJK.04/2014 Tahun 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang Dan/atau Sukuk;

“POJK No. 30/2015” berarti POJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum;

“POJK No. 55/2015” berarti POJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;

“POJK No. 56/2015” berarti POJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal;

“**POJK No. 11/2017**” berarti POJK No. 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka;

“**POJK No. 15/2020**” berarti POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka;

“**POJK No. 16/2020**” berarti POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik;

“**POJK No. 17/2020**” berarti POJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha;

“**POJK No. 19/2020**” berarti POJK No. 19/POJK.04/2020 tentang Bank Umum Yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat

“**POJK No. 42/2020**” berarti POJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan;

“**POJK No. 3/2021**” berarti POJK No. 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal;

“**Prospektus**” berarti prospektus yang dikeluarkan oleh Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan PUB Obligasi dan Sukuk Ijarah I Tahap I;

“**PT**” berarti Perseroan Terbatas;

“**RUPS**” berarti Rapat Umum Pemegang Saham;

“**Standar HKHPM**” berarti Standar Pemeriksaan Hukum dan Standar Pendapat Hukum yang dikeluarkan oleh HKHPM berdasarkan Keputusan HKHPM No. Kep. 03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021;

“**Surat Pernyataan Komitmen**” berarti surat pernyataan pemenuhan komitmen oleh Perseroan pada tanggal 14 Oktober 2024;

“**Surat Pernyataan Perseroan**” berarti surat yang diberikan oleh Perseroan pada tanggal 29 November 2024;

“**Tanggal LUT**” berarti tanggal dikeluarkannya LUT, yaitu tanggal 29 November 2024;

“**Tanggal Pendapat Hukum**” berarti tanggal dikeluarkannya Pendapat Hukum ini, yaitu tanggal 29 November 2024;

“**TBNRI**” berarti Tambahan Berita Negara Republik Indonesia;

“**Uji Tuntas**” berarti uji tuntas dari segi hukum atas Perseroan dan Perusahaan Anak yang dilaksanakan oleh kami sehubungan dengan rencana pelaksanaan transaksi PUB Obligasi dan Sukuk Ijarah I Tahap I oleh Perseroan, dengan memperhatikan ruang lingkup, pembatasan dan asumsi dari LUT sebagaimana dimuat dalam Bab I.C LUT;

“UU” berarti Undang-Undang;

“UU Cipta Kerja” berarti UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

“UU Minerba” berarti UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah dengan UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara;

“UUP2SK” berarti UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;

“UUPM” berarti UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah sebagian berdasarkan UUP2SK;

“UUPT” berarti UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana diubah sebagian berdasarkan UU Cipta Kerja;

“UUPT 1995” berarti UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang telah digantikan oleh UUPT; dan

“UUTK” berarti UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana diubah sebagian berdasarkan UU Cipta Kerja.

C. RUANG LINGKUP, PEMBATASAN, DAN ASUMSI

Pendapat Hukum ini mempunyai ruang lingkup dan pembatasan-pembatasan sebagai berikut:

1. Pendapat Hukum ini disusun khusus atas keadaan Perseroan selama Periode Uji Tuntas;
2. Pendapat Hukum ini disusun berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen asli, turunan, salinan dan fotokopi yang kami peroleh dari Perseroan dan Perusahaan Anak, serta pernyataan dan keterangan lisan maupun tertulis yang diberikan oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris, wakil dan/atau pegawai dari masing-masing Perseroan dan Perusahaan Anak yang hasilnya termuat dalam LUT, yang menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Hukum ini;
3. Pendapat Hukum ini disusun dalam kerangka Hukum Indonesia dan karenanya tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi hukum negara lain;
4. seluruh Pendapat Hukum kami sehubungan dengan Perusahaan Anak Asing disusun berdasarkan pendapat dari segi hukum dari konsultan hukum yang berwenang pada yurisdiksi dari Perusahaan Anak Asing tersebut dan data-data yang diberikan Perseroan dan Perusahaan Anak Asing yang terkait; dan

5. seluruh ruang lingkup dan pembatasan pemeriksaan sebagaimana dimuat dalam LUT menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari ruang lingkup dan pembatasan dalam Pendapat Hukum ini.

Dengan memperhatikan Ruang Lingkup dan Pembatasan di atas, dalam menyusun Pendapat Hukum ini, kami berasumsi bahwa:

1. semua tanda tangan adalah asli dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang (kecuali Perseroan dan Perusahaan Anak yang terhadapnya kami lakukan Uji Tuntas), semua dokumen yang diperlihatkan atau diserahkan kepada kami sebagai asli adalah otentik, dan bahwa salinan atau fotokopi dari tanda tangan dan dokumen yang diberikan kepada kami adalah sama dengan dokumen aslinya;
2. Perseroan dan Perusahaan Anak telah memberikan kepada kami seluruh dokumen dan informasi yang relevan dan material dengan pelaksanaan Uji Tuntas ("**Informasi Uji Tuntas**") dan tidak ada dokumen dan informasi lainnya yang relevan dan bersifat material yang tidak atau belum diberikan atau diberitahukan kepada kami untuk diperiksa oleh kami sampai dengan Tanggal LUT, dimana seandainya dokumen dan informasi yang tidak diberikan tersebut diketahui oleh kami, maka akan menyebabkan terjadinya perubahan terhadap isi dan kesimpulan dari Pendapat Hukum ini;
3. seluruh dokumen dan informasi yang relevan dengan pelaksanaan Uji Tuntas beserta dengan seluruh fakta yang dinyatakan dalam informasi tersebut beserta dengan seluruh fakta yang dinyatakan dalam Informasi Uji Tuntas tersebut, termasuk juga pernyataan dan keterangan tertulis (termasuk turunan dan salinannya) atau lisan yang diberikan oleh pejabat pemerintah, badan peradilan dan pihak ketiga lainnya yang telah menjadi dasar penyusunan LUT dan Pendapat Hukum ini, adalah benar, akurat, lengkap, tidak menyesatkan, sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, belum diubah dan masih berlaku sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, serta tidak ada hal-hal lain yang berkaitan yang disembunyikan dengan sengaja maupun tidak;
4. dokumen asli masih ada dan belum diubah, dibatalkan maupun digantikan oleh dokumen atau perjanjian atau tindakan lain yang tidak kami ketahui;
5. dokumen-dokumen yang mengatur kewajiban yang mengikat para pihak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah ditandatangani oleh Perseroan dan Perusahaan Anak untuk kepentingannya masing-masing;
6. untuk setiap dokumen dimana pihaknya berbentuk perusahaan, selain dari Perseroan, pihak tersebut masih tetap berdiri dan mempunyai kewenangan dan memperoleh perizinan/persetujuan korporat dan pihak yang berwenang yang diperlukan untuk menandatangani perjanjian tersebut dan perjanjian tersebut telah ditandatangani dengan benar untuk keuntungan/kepentingan pihak tersebut dan bahwa para pihak tidak dalam keadaan pailit atau keadaan lain pada saat penandatanganan perjanjian tersebut serta perubahan-perubahan, pengalihan, penunjukan pihak lainnya oleh pihak tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi para pihak tersebut;

7. untuk setiap dokumen dimana pihaknya merupakan individu/perorangan, pihak tersebut cakap hukum, tidak di bawah pengampunan, mempunyai kewenangan serta memperoleh persetujuan yang diperlukan (antara lain, persetujuan pasangan) untuk menandatangani dokumen tersebut dan dokumen tersebut telah ditandatangani dengan benar untuk keuntungan/kepentingan pihak tersebut dan bahwa para pihak tidak dalam keadaan pailit atau keadaan lain pada saat penandatanganan dokumen tersebut;
8. setiap pihak yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan dan Perusahaan Anak, atau para pejabat Pemerintah yang mengeluarkan perizinan Perseroan dan Perusahaan Anak melakukan pendaftaran atau pencatatan untuk kepentingan Perseroan dan Perusahaan Anak mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat berdasarkan Hukum Indonesia;
9. bahwa untuk setiap dokumen di mana Perseroan dan Perusahaan Anak menjadi pihak, yang diatur atau tunduk berdasarkan hukum yang berlaku di luar yurisdiksi Republik Indonesia ("**Hukum Asing**"), dokumen tersebut berlaku secara sah dan mengikat Perseroan dan Perusahaan Anak sesuai dengan Hukum Asing tersebut, bahwa dokumen tersebut tidak melanggar ketentuan dari Hukum Asing yang relevan, dan bahwa dokumen tersebut masih tetap berlaku sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum;
10. dokumen, informasi beserta dengan pernyataan dan keterangan tertulis (termasuk turunan dan salinannya) atau lisan yang diberikan oleh pejabat pemerintah, badan peradilan dan pihak ketiga lainnya terkait dengan pelaksanaan Uji Tuntas adalah benar, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya; dan
11. pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan tertulis atau lisan yang diberikan oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau pegawai Perseroan dan Perusahaan Anak sehubungan dengan pelaksanaan Uji Tuntas dan penyusunan Pendapat Hukum adalah benar, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya;
12. bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan, PIP yang merupakan Perusahaan Anak Asing tidak aktif beroperasi secara komersial dan penyertaan Perseroan pada PIP tidak bersifat material terhadap kelangsungan usaha Perseroan, sehingga terhadap PIP tidak dilakukan Uji Tuntas; dan
13. bahwa tidak ada pertimbangan yang telah diberikan sehubungan dengan pertanyaan apakah Perseroan atau Perusahaan Anak pernah mengalami kerugian sebesar 50% atau lebih dari total modal Perseroan atau Perusahaan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang dapat mempengaruhi keberadaan Perseroan atau Perusahaan Anak sebagai badan hukum menurut Hukum Indonesia.

D. PENDAPAT HUKUM

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen sebagaimana dirinci lebih lanjut dalam LUT, serta memperhatikan asumsi dan kualifikasi di atas, Pendapat Hukum kami adalah sebagai berikut:

1. Perseroan (pertama kali didirikan dengan nama PT Petro-sea International Indonesia), berkedudukan di Jakarta Selatan, adalah sebuah PT yang didirikan berdasarkan dan diatur menurut hukum Republik Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian No. 50, tanggal 18 Oktober 1995, yang dibuat di hadapan H.M. Afdal Gazali, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah sah menjadi badan hukum sejak tanggal 19 Oktober 1995 berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman No. C2-13273.HT.01.01.Th.95 tanggal 19 Oktober 1995, dan telah diumumkan dalam BNRI No. 98 tanggal 8 Desember 1995, TBNRI No. 10081 (**"Akta Pendirian Perseroan"**). Perseroan telah mencatatkan seluruh saham-sahamnya di Bursa Efek Indonesia.

Dalam Periode Uji Tuntas, Anggaran Dasar Perseroan telah diubah beberapa kali, terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 4 tanggal 4 Desember 2023, yang dibuat di hadapan Shanti Indah Lestari, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang Selatan, yang telah memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0079682.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 19 Desember 2023 dan telah didaftarkan dalam daftar perseroan pada Menkumham No. AHU-0257132.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 19 Desember 2023 (**"Akta No. 4/2023"**), yang menyetujui perubahan Pasal 3 mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan (**"Anggaran Dasar Perseroan"**).

Anggaran Dasar Perseroan adalah sah dan berlaku serta telah sesuai dengan UUPT, POJK No. 15/2020 dan POJK No. 33/2014. Namun, berdasarkan pemeriksaan kami Anggaran Dasar Perseroan belum sesuai dengan Peraturan No. IX.J.1 karena kegiatan usaha Perseroan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan belum terbagi menjadi kegiatan usaha utama dan penunjang sesuai Angka 4 huruf c dan d Peraturan No. IX.J.1. Berdasarkan Surat Pernyataan Komitmen, Perseroan berkomitmen untuk menyesuaikan Anggaran Dasar Perseroan dengan Peraturan No. IX.J.1 selambat-lambatnya 30 hari setelah Perseroan memperoleh persetujuan dari para pemegang saham Perseroan untuk mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan pada saat RUPS Luar Biasa yang akan selenggarakan pada tanggal yang sama dengan pelaksanaan RUPS Tahunan Perseroan di tahun 2025.

Akta pendirian Perusahaan Anak dan perubahan terakhir anggaran dasar Perusahaan Anak telah sah dan berlaku sesuai dengan Hukum Indonesia.

2. Struktur permodalan Perseroan tidak mengalami perubahan selama 2 tahun terakhir. Struktur permodalan Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 35 tanggal 20 April 2016, yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0043538 tanggal 26 April 2016, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0052171.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 26 April 2016, adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp201.721.000.000

Modal Ditempatkan : Rp50.430.250.000

Modal Disetor : Rp50.430.250.000

Modal dasar Perseroan terbagi atas 4.034.420.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp50 per lembar saham.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perusahaan Anak selama 2 tahun terakhir telah dilakukan secara sah dan berkesinambungan sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan Anak.

3. Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per 31 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan tertanggal 2 November 2024, susunan pemegang saham Perseroan sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum ini adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp50 per Saham		(%)
		Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nominal (Rp)	
1.	PT Kreasi Jasa Persada	418.762.400	20.938.120.000	41,52
2.	PT Caraka Reksa Optima	344.650.357	17.232.517.850	34,17
3.	Masyarakat (kepemilikan di bawah 5%)*	245.192.243	12.259.612.150	24,31
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		1.008.605.000	50.430.250.000	100,00
Saham Dalam Portepel		3.025.815.000	151.290.750.000	-

*) Tidak terdapat pihak yang memiliki sekurang-kurangnya 5% dari modal disetor dan ditempatkan Perseroan.

Susunan pemegang saham Perseroan di atas, sejak 2 tahun terakhir sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, telah dibuat secara berkesinambungan dan telah memperoleh seluruh persetujuan yang diperlukan dari instansi yang berwenang sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan Hukum Indonesia.

Sebagaimana yang juga telah diungkapkan dalam Prospektus, pada Tanggal Pendapat Hukum ini, Pengendali Perseroan adalah Prajogo Pangestu melalui kepemilikannya sahamnya di PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk yang merupakan pemegang saham 99,98% pada KJP. Prajogo Pangestu, melalui KJP, memiliki kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan kebijakan Perseroan dimana kemampuan tersebut diperoleh berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 7 November 2023, dimana CRO setuju untuk melepaskan kendali atas Perseroan dan menunjuk KJP untuk melakukan pengendalian dan akan bekerja sama dengan KJP untuk memastikan hal tersebut.

Pemilik manfaat akhir (*ultimate beneficial owner*) Perseroan adalah Prajogo Pangestu sesuai dengan kriteria dalam Pasal 4 ayat (1) huruf (f) Perpres 13/2018, sebagaimana dibuktikan dengan Surat Pernyataan Kepemilikan

Manfaat dari Perseroan yang ditandatangani pada tanggal 24 Oktober 2024 yang telah dilaporkan ke sistem Menkumham pada tanggal 25 Oktober 2024.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan dan Perusahaan Anak telah sesuai dengan Anggaran Dasar mereka masing-masing.

Berdasarkan pemeriksaan kami dan Surat Pernyataan Perseroan, terdapat beberapa anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang memiliki saham pada Perseroan dimana seluruhnya telah memenuhi kewajiban pelaporannya sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (1) UUPM *juncto* Pasal 2 ayat (1) POJK No. 11/2017, sebagai berikut:

- (a) Erwin Ciputra selaku Komisaris memiliki sebanyak 451.400 lembar saham Perseroan, sebagaimana telah dilaporkan kepada OJK melalui Surat No. Ref.: CORSEC/L/2024/VIII-0082 tertanggal 13 Agustus 2024;
 - (b) Michael selaku Presiden Direktur memiliki sebanyak 60.000 lembar saham Perseroan, sebagaimana telah dilaporkan kepada OJK melalui Surat No. Ref.: CORSEC/L/2024/V-0066 tertanggal 25 Juni 2024; dan
 - (c) Kartika Hendrawan selaku Direktur memiliki sebanyak 88.800 lembar saham Perseroan, sebagaimana telah dilaporkan kepada OJK melalui Surat No. Ref.: CORSEC/L/2024/V-0043 tertanggal 7 Mei 2024.
4. Berdasarkan pemeriksaan kami dan Surat Pernyataan Perseroan, Perseroan telah menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih sejumlah Rp10.260.000.000 atau sebesar 20,34% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan, sebagai cadangan wajib sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UUPT.
 5. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 3 tanggal 4 Desember 2023, yang dibuat di hadapan Shanti Indah Lestari, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang, yang telah diberitahukan kepada dan telah diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0197858 tanggal 19 Desember 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0257031.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 19 Desember 2023, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terkini adalah sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur	: Michael
Direktur	: Kartika Hendrawan
Direktur	: Ruddy Santoso
Direktur	: Meinar Kusumastuti
Direktur	: Iman Darus Hikhman

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris/Komisaris Independen	: Osman Sitorus
---	-----------------

Komisaris	: Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita
Komisaris	: Djauhar Maulidi
Komisaris	: Erwin Ciputra
Komisaris	: Drs. Sutanto
Komisaris Independen	: Setia Untung Arimuladi

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan di atas dan selama anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut menjabat telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Hukum Indonesia, termasuk POJK No. 33/2014.

Masing-masing anggota Direksi Perseroan tidak menduduki jabatan sebagai anggota direksi pada badan usaha jasa konstruksi lain dan masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan tidak menduduki jabatan sebagai anggota dewan komisaris pada badan usaha jasa konstruksi lain, pada waktu yang bersamaan, sebagaimana dibuktikan dengan surat pernyataan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang seluruhnya tertanggal 11 Oktober 2024.

6. Perseroan telah memiliki:
 - (a) Komite Audit sebagaimana dipersyaratkan oleh POJK No. 55/2015 dan Perseroan telah menyusun Piagam Komite Audit sesuai dengan ketentuan POJK No. 55/2015;
 - (b) Sekretaris Perusahaan sebagaimana disyaratkan oleh POJK No. 35/2014;
 - (c) Kepala Unit Audit sebagaimana dipersyaratkan oleh POJK No. 56/2015 dan Perseroan telah menyusun Piagam Audit Internal sesuai dengan ketentuan POJK No. 56/2015; dan
 - (d) Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana dipersyaratkan oleh POJK No. 34/2014 dan Perseroan telah menyusun Pedoman Nominasi dan Remunerasi sebagaimana dipersyaratkan oleh POJK No. 34/2014.
7. Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang dibidang konstruksi, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, perdagangan, pengangkutan dan pergudangan, informasi dan komunikasi, aktivitas profesional, ilmiah dan teknis, aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, dan pendidikan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha di bidang Konstruksi Gedung Industri (KBLI 41013); Konstruksi Gedung Kesehatan (KBLI 41015); Konstruksi Gedung Lainnya (KBLI 41019); Jasa Pekerjaan Konstruksi Prefabrikasi Bangunan Gedung (KBLI 41020); Konstruksi Bangunan Sipil Jalan (KBLI 42101); Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass (KBLI 42102); Konstruksi Terowongan (KBLI 42104); Jasa Pekerjaan

Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil (KBLI 42930); Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase (KBLI 42201); Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih (KBLI 42202); Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal (KBLI 42204); Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi Untuk Prasarana Transportasi (KBLI 42205); Konstruksi Sentral Telekomunikasi (KBLI 42206); Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan Gas (KBLI 42203); Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, dan Limbah lainnya (KBLI 42209); Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan (KBLI 42912); Konstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas Bumi (KBLI 42915); Konstruksi Bangunan Sipil Pertambangan (KBLI 42916); Konstruksi Bangunan Sipil Panas Bumi (KBLI 42917); Pengerukan (KBLI 42914); Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Yang Tidak Ditentukan Lain (KBLI 42919); Konstruksi Reservoir Pembangkit Listrik Tenaga Air (KBLI 42921); Penyiapan Lahan (KBLI 43120); Instalasi Listrik (KBLI 43211); Instalasi Telekomunikasi (KBLI 43212); Jasa Instalasi Konstruksi Navigasi Laut, Sungai, dan Udara (KBLI 43214); Instalasi Saluran Air (*Plumbing*) (KBLI 43221); Instalasi Pemanas dan Geotermal (KBLI 43222); Instalasi Minyak dan Gas (KBLI 43223); Instalasi Pendingin dan Ventilasi Udara (KBLI 43224); Instalasi Konstruksi Lainnya Yang Tidak Ditentukan Lain (KBLI 43299); Pengerjaan Pemasangan Kaca dan Aluminium (KBLI 43301); Pengerjaan Lantai, Dinding, Peralatan Saniter dan Plafon (KBLI 43302); Pengecatan (KBLI 43303); Pemasangan Pondasi dan Tiang Pancang (KBLI 43901); Pemasangan Perancah (*Steiger*) (KBLI 43902); Pemasangan Rangka dan Atap/*Roof Covering* (KBLI 43903); Pemasangan Kerangka Baja (KBLI 43904); Penyewaan Alat Konstruksi dengan Operator (KBLI 43905); Konstruksi Khusus Lainnya Yang Tidak Ditentukan Lain (KBLI 43909); Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya (KBLI 09900); Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Pertambangan dan Energi Serta Peralatannya (KBLI 77395); Industri Pencetakan 3D *Printing* (KBLI 18113); Reparasi Mesin Untuk Keperluan Umum (KBLI 33121); Reparasi Mesin Untuk Keperluan Khusus (KBLI 33122); Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer (KBLI 46511); Perdagangan Besar Piranti Lunak (KBLI 46512); Perdagangan Besar Mesin Kantor dan Industri Pengolahan, Suku Cadang, dan Perlengkapannya (KBLI 46591); Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya (KBLI 46599); Angkutan Bermotor Untuk Barang Khusus (KBLI 49432); Aktivitas *Bounded Warehousing* atau wilayah Kawasan Berikat (KBLI 52103); Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya (KBLI 52109); Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut (KBLI 52221); Aktivitas Penunjang Angkutan Perairan Lainnya (KBLI 52229); Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang) (KBLI 52240); Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) (KBLI 52291); Angkutan Multimoda (KBLI 52295); Penerbitan Piranti Lunak (*Software*) (KBLI 58200); Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya (KBLI 62019); Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya (KBLI 62029); Aktivitas Konsultasi dan Perancangan *Internet of Things* (IoT) (KBLI 62024); Aktivitas Konsultasi Manajemen Industri (KBLI 70204); Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (KBLI 70209); Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis Yang Berhubungan Dengan Itu (KBLI 71102); Aktivitas Sertifikasi Profesi Pihak 1 (KBLI 74311); Aktivitas Sertifikasi Profesi Pihak 2 (KBLI 74312); Aktivitas Penyeleksian dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri (KBLI 78101); Penyediaan Sumber Daya Manusia dan Manajemen Fungsi Sumber Daya

Manusia (KBLI 78300); Pelatihan Kerja Teknik Swasta (KBLI 78421); dan Pendidikan Teknik Swasta (KBLI 85497).

Kegiatan usaha tersebut termasuk ke dalam ruang lingkup usaha sebagaimana diuraikan dalam Anggaran Dasar Perseroan terkini dan telah sesuai dengan Hukum Indonesia.

Berdasarkan pemeriksaan kami dan Surat Pernyataan Perseroan, kegiatan usaha yang benar-benar dijalankan oleh Perseroan adalah Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya (KBLI 09900), Reparasi Mesin Untuk Keperluan Khusus (KBLI 33122), Konstruksi Gedung Lainnya (KBLI 41019), Konstruksi Bangunan Sipil Jalan (KBLI 42101), Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang *Fly Over*, dan Underpass (KBLI 42102), Konstruksi Bangunan Pelabuhan (KBLI 42912), Konstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas Bumi (KBLI 42915), Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Pengolahan Produk Kimia, Petrokimia, Farmasi, dan Industri Lainnya (KBLI 42923), Instalasi Konstruksi Lainnya Yang Tidak Termasuk Dalam Lainnya (KBLI 43299), Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut (KBLI 52221), Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (KBLI 70209), Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Mesin Pertambangan dan Energi serta Peralatannya (KBLI 77395), Penyediaan Sumber Daya Manusia dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia (KBLI 78300), dan Pelatihan Kerja Teknik Swasta (KBLI 78421).

Pengungkapan maksud dan tujuan Perseroan sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Peraturan No. IX.J.1, kecuali Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan belum sesuai dengan Angka 4 huruf c dan d Peraturan No. IX.J.1 karena belum terbagi menjadi kegiatan usaha utama dan penunjang sesuai ketentuan Angka 4 huruf c dan d Peraturan No. IX.J.1. Berdasarkan Surat Pernyataan Komitmen, Perseroan berkomitmen untuk menyesuaikan Anggaran Dasar Perseroan dengan Peraturan No. IX.J.1 selambat-lambatnya 30 hari setelah Perseroan memperoleh persetujuan dari para pemegang saham Perseroan untuk mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan pada saat RUPS Luar Biasa yang akan selenggarakan pada tanggal yang sama dengan pelaksanaan RUPS Tahunan Perseroan di tahun 2025.

Perseroan dan Perusahaan Anak juga telah menyesuaikan Anggaran Dasar mereka masing-masing untuk mengikuti ketentuan KBLI 2020 berdasarkan Peraturan BPS No. 2/2020.

Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan dan pemeriksaan kami, kegiatan usaha Perusahaan Anak termasuk ke dalam ruang lingkup usaha sebagaimana diuraikan dalam Anggaran Dasar terkini dari Perusahaan Anak dan telah sesuai dengan UUPT.

8. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, PUB Obligasi dan Sukuk Ijarah I Tahap I tidak memerlukan persetujuan RUPS terlebih dahulu namun memerlukan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan, persetujuan mana telah diperoleh berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Perseroan No. PTP/RES/BOC/IX/2024-0017 tertanggal 3 September 2024.

9. Perseroan dan Perusahaan Anak telah memperoleh Perizinan Operasional dan Perizinan Umum yang material yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha utamanya yang telah dijalankan secara komersial sebagaimana disyaratkan dalam Hukum Indonesia dan Perizinan Operasional dan Perizinan Umum tersebut masih berlaku sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, kecuali sehubungan dengan:

- (a) Perseroan yang belum memperoleh sertifikat laik fungsi untuk mess karyawan, kantor dan workshop yang berlokasi di (i) Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur; dan (ii) Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, dimana sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan sedang dalam proses pengurusan sertifikat laik fungsi untuk bangunan-bangunan tersebut pada pemerintah daerah setempat.

Berdasarkan Pasal 44 *juncto* 45 UU No. 28 Tahun 2002 tentang Gedung dan Bangunan sebagaimana diubah dengan UU Cipta Kerja, kelalaian untuk mendapatkan sertifikat laik fungsi dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan pembangunan, penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan, penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung, pembekuan persetujuan bangunan gedung, pencabutan persetujuan bangunan gedung pembekuan sertifikat laik fungsi bangunan gedung, pencabutan sertifikat laik fungsi bangunan gedung, atau perintah pembongkaran bangunan gedung. Selain pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud di atas dapat dikenai sanksi denda paling banyak 10% dari nilai bangunan yang sedang atau telah dibangun.

- (b) KPI yang belum memperoleh IUJP untuk kegiatan usaha Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya (KBLI 09900) sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 35 UU Minerba, dimana berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan, KPI sedang dalam proses pengurusan IUJP pada instansi yang berwenang, dimana sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum ini, pengurusan IUJP tersebut sedang dalam proses persetujuan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Berdasarkan Pasal 158 UU Minerba, dalam hal KPI tidak memiliki IUJP, maka KPI dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000.

10. Perseroan dan Perusahaan Anak telah memperoleh Perizinan Lingkungan Hidup yang material yang diwajibkan untuk menjalankan kegiatan usaha utamanya sebagaimana disyaratkan dalam Hukum Indonesia dan Perizinan Lingkungan Hidup tersebut masih berlaku sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum.

11. Perseroan dan Perusahaan Anak telah memiliki dan/atau menguasai aset-aset yang bersifat material untuk kegiatan usahanya sebagaimana diungkapkan dalam LUT dan aset-aset tersebut telah dimiliki dan/atau dikuasai secara sah,

tidak sedang dibebankan dengan hak jaminan/agunan untuk menjamin kewajiban kepada pihak ketiga, dan tidak sedang dalam sengketa, kecuali sehubungan dengan:

- (a) (i) sejumlah aset-aset Perseroan, KBL dan KMS yang akan dibebani jaminan tertentu untuk menjamin pelunasan utang Perseroan, KBL dan CEP kepada BCA berdasarkan Perjanjian Kredit BCA; dan (ii) sejumlah aset Perseroan yang sedang dibebani jaminan tertentu untuk menjamin pelunasan utang Perseroan kepada Mandiri berdasarkan Perjanjian Fasilitas Berjangka Senior.

Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan dan pemeriksaan kami sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum ini, aset-aset Perseroan, KBL dan KMS sedang dalam proses penyempurnaan untuk dibebani jaminan sesuai dengan Hukum Indonesia berdasarkan Surat Keterangan No. 68/V/S.Ket./2024 tanggal 29 Mei 2024 yang diterbitkan oleh Sri Buena Brahma, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat.

Direksi Perseroan berkeyakinan bahwa (a) Perseroan, KBL dan CEP memiliki kemampuan untuk membayar utangnya masing-masing kepada BCA berdasarkan Perjanjian Kredit BCA; dan (b) Perseroan memiliki kemampuan untuk membayar utangnya kepada BNI dan Mandiri berdasarkan Perjanjian Fasilitas Berjangka Senior, sehingga Perseroan berkeyakinan kemungkinan eksekusi terhadap aset yang akan dijamin milik Perseroan, KBL dan KMS tersebut adalah kecil.

Adapun berdasarkan pemeriksaan kami dan Surat Pernyataan Perseroan, apabila terjadi eksekusi jaminan atas aset-aset yang bersifat material untuk kegiatan usaha Perseroan, KBL dan KMS sebagaimana diungkapkan dalam LUT, maka proses eksekusi akan dilakukan melalui pelelangan umum atau penjualan secara privat berdasarkan ketentuan Hukum Indonesia. Dengan demikian, Perseroan dan Perusahaan Anak dapat kehilangan hak kepemilikan atas aset yang akan dijamin tersebut dan dapat berdampak secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan, KBL dan KMS. Namun demikian, berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan, Perseroan, KBL dan KMS akan senantiasa mematuhi dan memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian jaminan dimana Perseroan, KBL dan KMS terikat didalamnya untuk menghindari terjadinya wanprestasi sehingga tidak akan terjadi eksekusi jaminan atas aset Perseroan, KBL dan KMS.

Berdasarkan pemeriksaan kami, sehubungan dengan transaksi pemberian jaminan sebagai berikut:

- (i) transaksi pemberian jaminan oleh Perseroan, KBL dan KMS kepada BCA berupa:
 - (1) pemberian jaminan atas harta kekayaan milik Perseroan kepada BCA untuk menjamin kewajiban Perseroan, KBL, dan CEP berupa (i) gadai atas 292.697.616 saham

KBL kepada BCA berdasarkan Akta Perjanjian Gadai Saham No. 128 tertanggal 26 Juli 2024, (ii) gadai atas 280.589.375 saham KMS kepada BCA berdasarkan Akta Perjanjian Gadai Saham No. 131 tertanggal 26 Juli 2024 dan (iii) gadai atas 380.000 saham KPI kepada BCA berdasarkan Akta Perjanjian Gadai Saham No. 133 tertanggal 26 Juli 2024, yang seluruhnya dibuat di hadapan Meyranda Lista Br. Purba, S.H., M.Kn., sebagai notaris pengganti dari Sri Buena Brahmata, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat, merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020, dimana transaksi dilakukan oleh suatu perusahaan terbuka untuk kepentingan afiliasi dari perusahaan terbuka tersebut, sehingga transaksi tersebut tunduk pada ketentuan POJK No. 42/2020. Namun demikian, mengingat KBL dan CEP merupakan perusahaan terkendali yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% oleh Perseroan, maka Perseroan hanya wajib melaporkan transaksi afiliasi tersebut kepada OJK paling lambat pada akhir hari kerja ke-2 setelah tanggal transaksi afiliasi sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) POJK 42/2020. Berdasarkan pemeriksaan kami sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah melaporkan transaksi afiliasi tersebut kepada OJK berdasarkan Surat No. Ref. CORSEC/L/2024/XI-0111 tertanggal 1 November 2024. Namun demikian, penyampaian pelaporan transaksi afiliasi tersebut telah melewati jangka waktu 2 hari kerja setelah tanggal transaksi afiliasi tersebut;

- (2) pemberian jaminan atas harta kekayaan milik KBL kepada BCA untuk menjamin kewajiban Perseroan, KBL dan CEP berupa (i) gadai atas 50 saham CEP berdasarkan Akta Perjanjian Gadai Saham No. 120 tertanggal 26 Juli 2024 dan (ii) gadai atas 25.000 saham KMS berdasarkan Akta Perjanjian Gadai Saham No. 132 tertanggal 26 Juli 2024, yang seluruhnya dibuat di hadapan Meyranda Lista Br. Purba, S.H., M.Kn., sebagai notaris pengganti dari Sri Buena Brahmata, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat, merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020, dimana transaksi dilakukan oleh suatu perusahaan terkendali untuk kepentingan afiliasi dari perusahaan terbuka tersebut, sehingga transaksi tersebut tunduk pada ketentuan POJK No. 42/2020, dimana kewajiban untuk melakukan prosedur transaksi afiliasi tersebut dilakukan oleh Perseroan selaku perusahaan terbuka. Berdasarkan pemeriksaan kami sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah melaporkan transaksi afiliasi tersebut kepada OJK berdasarkan Surat No. Ref.

CORSEC/L/2024/XI-0111 tertanggal 1 November 2024. Namun demikian, penyampaian pelaporan transaksi afiliasi tersebut telah melewati jangka waktu 2 hari kerja setelah tanggal transaksi afiliasi tersebut; dan

- (3) pemberian jaminan atas harta kekayaan milik KMS kepada BCA untuk menjamin kewajiban Perseroan, KBL dan CEP berupa gadai atas 249.950 saham CEP berdasarkan Akta Perjanjian Gadai Saham No. 130 tertanggal 26 Juli 2024, yang dibuat di hadapan Meyranda Lista Br. Purba, S.H., M.Kn., sebagai notaris pengganti dari Sri Buena Brahmana, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat, merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020, dimana transaksi dilakukan oleh suatu perusahaan terkendali untuk kepentingan afiliasi dari perusahaan terbuka tersebut, sehingga transaksi tersebut tunduk pada ketentuan POJK No. 42/2020, dimana kewajiban untuk melakukan prosedur transaksi afiliasi tersebut dilakukan oleh Perseroan selaku perusahaan terbuka. Namun demikian, mengingat KMS merupakan perusahaan terkendali yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% oleh Perseroan, maka Perseroan hanya wajib melaporkan transaksi afiliasi tersebut kepada OJK paling lambat pada akhir hari kerja ke-2 setelah tanggal transaksi afiliasi sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) POJK 42/2020. Berdasarkan pemeriksaan kami sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah melaporkan transaksi afiliasi tersebut kepada OJK berdasarkan Surat No. Ref. CORSEC/L/2024/XI-0111 tertanggal 1 November 2024. Namun demikian, penyampaian pelaporan transaksi afiliasi tersebut telah melewati jangka waktu 2 hari kerja setelah tanggal transaksi afiliasi tersebut.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 27 POJK No. 42/2020, setiap pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 POJK No. 42/2020 dapat dikenai sanksi administratif berupa (i) peringatan tertulis; (ii) denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; (iii) pembatasan kegiatan usaha; (iv) pembekuan kegiatan usaha; (v) pencabutan izin usaha; (vi) pembatalan persetujuan; dan (vii) pembatalan pendaftaran.

- (ii) transaksi pemberian jaminan oleh Perseroan kepada BNI dan Mandiri berupa:
 - (1) fidusia atas benda bergerak, berdasarkan Akta Perjanjian Jaminan Fidusia Atas Benda Bergerak No. 66 tertanggal 13 September 2024 yang dibuat di hadapan Sri Buena Brahmana, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta dan

telah menerima Sertifikat Jaminan Fidusia No. W12.00761540.AH.05.01 Tahun 2024 tertanggal 25 September 2024 yang diterbitkan oleh Menkumham;

- (2) fidusia atas hasil klaim asuransi, berdasarkan Akta Perjanjian Jaminan Fidusia No. 67 tertanggal 13 September 2024 yang dibuat di hadapan Sri Buena Brahmata, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta dan telah menerima Sertifikat Jaminan Fidusia No. W12.00864393.AH.05.01 Tahun 2024 tertanggal 10 Oktober 2024 yang diterbitkan oleh Menkumham;
- (3) fidusia atas piutang, berdasarkan Akta Perjanjian Jaminan Fidusia No. 68 tertanggal 13 September 2024 yang dibuat di hadapan Sri Buena Brahmata, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta dan telah menerima Sertifikat Jaminan Fidusia No. W12.00761539.AH.05.01 Tahun 2024 tertanggal 25 September 2024 yang diterbitkan oleh Menkumham; dan
- (4) gadai atas hak terhadap rekening bank, berdasarkan Akta Perjanjian Gadai atas Hak-Hak Terhadap Rekening Bank No. 69 tertanggal 13 September 2024 yang dibuat di hadapan Sri Buena Brahmata, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta,

merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/2020. Namun demikian, mengingat transaksi material tersebut merupakan transaksi pemberian jaminan kepada bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c POJK No. 17/2020, maka Perseroan tidak wajib untuk menggunakan penilai dan memperoleh persetujuan RUPS akan tetapi Perseroan wajib mengumumkan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan keterbukaan informasi tersebut kepada OJK paling lambat 2 hari kerja setelah tanggal transaksi material sesuai Pasal 6 POJK No. 17/2020. Namun sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan pemeriksaan kami, Perseroan belum mengumumkan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan keterbukaan informasi kepada OJK atas transaksi material tersebut.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 34 POJK No. 17/2020, setiap pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 POJK No. 17/2020 dapat dikenai sanksi administratif berupa (i) peringatan tertulis; (ii) denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; (iii) pembatasan kegiatan usaha; (iv) pembekuan kegiatan usaha; (v) pencabutan izin usaha; (vi) pembatalan persetujuan; dan (vii) pembatalan pendaftaran.

- (b) SHGB No. 668/Kwamki yang sedang menjadi objek sengketa di Pengadilan Negeri Timika dengan perkara No. 54/Pdt.G.2024/PN Tim sebagaimana diungkapkan di dalam LUT dan diuraikan lebih lanjut pada angka 16 Pendapat Hukum ini.

12. Perseroan memiliki penyertaan saham dalam Perusahaan Anak dan Perusahaan Anak Asing, yaitu sebagai berikut:

Nama Entitas	Lembar Saham	Total Nilai Nominal	Kepemilikan Perseroan (%)	Tahun Penyertaan oleh Perseroan	Status Operasional
Penyertaan Saham Perseroan Secara Langsung					
KBL	292.697.616	Rp292.697.616.000	99,99%	2017	Aktif
KBS	17.999	Rp17.999.000.000	99,99%	2010	Aktif
RKN	4.995	Rp4.995.000.000	99,99%	2017	Aktif
KPI	380.000	Rp835.240.000	95,00%	2018	Aktif
PII	499	Rp499.000.000	99,80%	2010	Aktif
KMS	280.589.375	Rp280.589.375.000	99,99%	2023	Aktif
PSA	20.050.247	AUD20.050.247	100,00%	2021	Aktif
PIP	2	SGD2	100,00%	2005	Tidak Aktif
Penyertaan Saham Perseroan Secara Tidak Langsung					
MIP	4.100	Rp4.100.000.000	51,25% (melalui PII)	2015	Aktif
CEP	250.000	Rp250.000.000.000	100% (melalui KMS dan KBL)	2012	Aktif

Penyertaan saham dalam Perusahaan Anak tersebut telah didukung oleh dokumen-dokumen saham dan telah memperoleh persetujuan yang diperlukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan masing-masing Perusahaan Anak serta Hukum Indonesia.

13. Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki:

- (a) Perjanjian Material yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak; dan
- (b) Perjanjian Kredit yang masih berlaku dan mengikat Perseroan dan Perusahaan Anak,

sebagaimana diungkapkan di dalam LUT, serta telah sesuai dengan ketentuan Hukum Indonesia, kecuali sehubungan dengan:

- (a) transaksi pemberian pinjaman dari BCA kepada Perseroan, KBL dan CEP berdasarkan Perjanjian Kredit BCA yang merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/2020. Namun demikian, mengingat transaksi material tersebut merupakan transaksi pinjaman yang diterima secara langsung dari bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b POJK No. 17/2020, maka Perseroan

tidak wajib untuk menggunakan penilai dan memperoleh persetujuan RUPS akan tetapi Perseroan wajib mengumumkan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan keterbukaan informasi tersebut kepada OJK paling lambat 2 hari kerja setelah tanggal transaksi material sesuai Pasal 6 POJK No. 17/2020. Berdasarkan pemeriksaan kami, Perseroan telah mengumumkan keterbukaan informasi tertanggal 30 Mei 2024, namun demikian isi dari keterbukaan informasi tersebut belum memenuhi seluruh informasi yang disyaratkan dalam Pasal 17 POJK No. 17/2020, yakni (i) penjelasan, pertimbangan, dan alasan dilakukannya transaksi material serta pengaruh transaksi tersebut pada kondisi keuangan Perseroan; (ii) pernyataan dewan komisaris dan direksi bahwa transaksi material tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020; dan transaksi benturan semua informasi material telah diungkapkan dan informasi tersebut tidak menyesatkan; dan

- (b) transaksi pemberian pinjaman dari BNI dan Mandiri kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Fasilitas Berjangka Senior yang merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/2020. Namun demikian, mengingat transaksi material tersebut merupakan transaksi pinjaman yang diterima secara langsung dari bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b POJK No. 17/2020, maka Perseroan tidak wajib untuk menggunakan penilai dan memperoleh persetujuan RUPS akan tetapi Perseroan wajib mengumumkan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan keterbukaan informasi tersebut kepada OJK paling lambat 2 hari kerja setelah tanggal transaksi material sesuai Pasal 6 POJK No. 17/2020. Berdasarkan pemeriksaan kami, Perseroan telah mengumumkan keterbukaan informasi tertanggal 3 September 2024, namun demikian isi dari keterbukaan informasi tersebut belum memenuhi seluruh informasi yang disyaratkan dalam Pasal 17 POJK No. 17/2020, yakni (i) penjelasan, pertimbangan, dan alasan dilakukannya transaksi material serta pengaruh transaksi tersebut pada kondisi keuangan Perseroan; (ii) pernyataan dewan komisaris dan direksi bahwa transaksi material tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020; dan transaksi benturan semua informasi material telah diungkapkan dan informasi tersebut tidak menyesatkan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 34 POJK No. 17/2020, setiap pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 POJK No. 17/2020 dapat dikenai sanksi administratif berupa (i) peringatan tertulis; (ii) denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; (iii) pembatasan kegiatan usaha; (iv) pembekuan kegiatan usaha; (v) pencabutan izin usaha; (vi) pembatalan persetujuan; dan (vii) pembatalan pendaftaran.

Seluruh Perjanjian Material dan Perjanjian Kredit yang diungkapkan dalam LUT tersebut tidak memiliki pembatasan, bertentangan dengan, atau dapat menghalangi rencana Perseroan untuk melakukan transaksi PUB Obligasi dan Sukuk Ijarah I Tahap I, dan tidak memiliki pembatasan, bertentangan dengan,

atau dapat menghalangi rencana penggunaan dana hasil PUB Obligasi dan Sukuk Ijarah I Tahap I serta tidak memuat pembatasan yang dapat merugikan hak-hak para pemegang obligasi dan sukuk ijarah, kecuali untuk pembatasan-pembatasan yang terdapat dalam Perjanjian Kredit BCA.

Sehubungan dengan pembatasan-pembatasan yang terdapat dalam Perjanjian Kredit BCA, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari BCA untuk melaksanakan PUB Obligasi dan Sukuk Ijarah I Tahap I berdasarkan Surat No. 1080/GBK/2024 tanggal 11 September 2024, perihal *Consent* Penerbitan Obligasi dan Sukuk Ijarah a.n. PT Petrosea Tbk.

Selain dari pada di atas, Perseroan tidak memiliki kewajiban untuk melakukan mendapatkan persetujuan dan memberikan pemberitahuan kepada pihak ketiga untuk pelaksanaan rencana PUB Obligasi dan Sukuk Ijarah I Tahap I.

14. Berdasarkan pemeriksaan Uji Tuntas kami dan Surat Pernyataan Perseroan, Perseroan dan Perusahaan Anak telah memenuhi ketentuan material sehubungan dengan aspek ketenagakerjaan sesuai dengan Hukum Indonesia di bidang ketenagakerjaan yang berlaku umum termasuk telah mengikutsertakan dan mendaftarkan secara patut seluruh karyawan Perseroan dan Perusahaan Anak dalam program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan serta membayar iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan untuk periode 3 bulan terakhir, kecuali sehubungan dengan perjanjian kerja waktu tertentu ("**PKWT**") KBS dan KPI yang belum daftarkan kepada dinas ketenagakerjaan di domisili KBS dan KPI, dimana sesuai Pasal 59 UUTK, tidak didaftarkannya PKWT tersebut dapat mengakibatkan PKWT KBS dan KPI demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu.
15. Berdasarkan pemeriksaan kami dan Surat Pernyataan Perseroan, Perseroan dan Perusahaan Anak telah menutup asuransi atas aset-aset Perseroan dan Perusahaan Anak yang bernilai material dan bahwa jangka waktu asuransi tersebut masih berlaku sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum dan jumlah pertanggungan asuransi memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungkan.
16. Berdasarkan pemeriksaan Uji Tuntas kami yang didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan, sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, Perseroan dan Perusahaan Anak (a) tidak sedang terlibat dalam perkara hukum baik perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan, ataupun dinyatakan pailit oleh pihak ketiga atau dalam perselisihan terkait dengan persaingan usaha tidak sehat yang bersifat material dan dapat mengganggu jalannya kegiatan operasional, kegiatan usaha dan pendapatan Perseroan dan Perusahaan Anak atau secara material berdampak negatif terhadap rencana PUB Obligasi dan Sukuk Ijarah I atau kemampuan Perseroan untuk melakukan pembayaran kepada pemegang obligasi dan/atau pemegang sukuk ijarah; dan (b) tidak ada pemberitahuan, ancaman maupun somasi yang melibatkan atau diajukan kepada Perseroan dan Perusahaan Anak yang berpotensi menjadi

perkara yang bersifat material dan dapat mempengaruhi kegiatan operasional, kegiatan usaha dan pendapatan Perseroan dan Perusahaan Anak atau secara material berdampak negatif terhadap rencana PUB Obligasi dan Sukuk Ijarah I atau kemampuan Perseroan melakukan pembayaran kepada pemegang obligasi dan/atau pemegang sukuk ijarah, kecuali sehubungan dengan perkara Gugatan Perdata Perbuatan Melawan Hukum No. 54/Pdt.G/2024/PN Tim dengan tanggal register perkara pada 9 Juli 2024, dimana Perseroan menjadi Tergugat II ("**Gugatan No. 54/PN Tim**").

Adapun kronologi Gugatan No. 54/PN Tim adalah terkait dengan gugatan dari Helena Beanal, salah satu warga daerah Mimika ("**Penggugat**") yang mengklaim mempunyai warisan tanah adat berupa hak ulayat sekitar 30 Hektare atau seluas 300.000 meter persegi yang mencakup lokasi tanah milik Perseroan yang beralaskan SHGB No. 668/Kwamki.

Penggugat mendalilkan bahwa Reynold Donny Kabian ("**Tergugat I**") yang merupakan salah satu karyawan Perseroan telah melakukan kecurangan pada saat pemberian ganti rugi terhadap pembebasan lahan untuk menjadi SHGB No. 668/Kwamki.

Berdasarkan keterangan Perseroan dan pemeriksaan kami, sidang pertama atas Gugatan No. 54/PN Tim telah dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 2024. Lebih lanjut, Perseroan dan Penggugat telah melakukan upaya mediasi namun tidak berhasil dan status terkini dari Gugatan No. 54/PN Tim adalah sedang dalam proses persidangan dengan agenda jawab-menjawab antara Penggugat dengan Tergugat.

Namun demikian, berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan dan pemeriksaan kami, perkara tersebut tidak bersifat material dan dapat mengganggu jalannya kegiatan operasional, kegiatan usaha dan pendapatan Perseroan atau secara material berdampak negatif terhadap rencana PUB Obligasi dan Sukuk Ijarah I Tahap I atau kemampuan Perseroan melakukan pembayaran kepada pemegang obligasi dan/atau pemegang sukuk ijarah.

17. Berdasarkan pemeriksaan Uji Tuntas kami yang didukung dengan surat pernyataan dari anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, tidak ada anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Perseroan dan Perusahaan Anak yang sedang terlibat dalam perkara hukum baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang, yang mana dapat menyebabkan dampak material terhadap posisi dan keberlanjutan Perseroan, tidak sedang terlibat perkara, tidak ada pemberitahuan, ancaman maupun somasi yang melibatkan atau diajukan kepada masing-masing anggota Direksi maupun anggota Dewan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak yang berpotensi menjadi perkara yang bersifat material dan dapat mempengaruhi kegiatan operasional, kegiatan usaha dan pendapatan Perseroan dan Perusahaan Anak atau secara material berdampak negatif terhadap rencana PUB Obligasi dan Sukuk Ijarah I Tahap I atau kemampuan Perseroan melakukan pembayaran kepada pemegang obligasi dan/atau pemegang sukuk ijarah.

18. Aspek-aspek hukum dalam Prospektus yang meliputi Anggaran Dasar, struktur permodalan dan susunan pemegang saham, Perizinan Umum, Perizinan Operasional, Perjanjian Material, aset material, asuransi serta keterlibatan perkara telah sesuai dengan LUT.
19. Rencana Penggunaan Dana yang diperoleh dari PUB Obligasi dan Sukuk Ijarah I Tahap I adalah sebagaimana diuraikan di bagian Uraian Transaksi di atas.

Dalam hal implementasi atas Rencana Penggunaan Dana tersebut di atas merupakan suatu (a) transaksi afiliasi atau benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020 dan/atau (b) transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/2020, maka Perseroan akan memenuhi ketentuan POJK No. 42/2020 dan/atau POJK No. 17/2020 (sebagaimana berlaku).

20. Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) dengan peringkat *idA+* (*single A Plus*) berdasarkan Surat No.: RC-1133/PEF-DIR/IX/2024 tanggal 12 September 2024 dan hasil pemeringkatan surat utang syariah jangka panjang dengan peringkat *idA+(sy)* (*single A Plus Syariah*) berdasarkan Surat No.: RC-1134/PEF-DIR/IX/2024 tanggal 12 September 2024, yang mana seluruhnya telah memenuhi Pasal 5 POJK No. 36/2014.
21. Berdasarkan keterangan Perseroan dan hasil pemeriksaan kami, pada Tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan dan Wali Amanat tidak memiliki hubungan Afiliasi dan/atau hubungan kredit. Dengan demikian, Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah yang dibuat antara Perseroan dan Wali Amanat telah sesuai dengan ketentuan POJK No. 19/2020.
22. Perseroan telah memenuhi kriteria sebagai pihak yang dapat melakukan penawaran umum berkelanjutan sebagaimana diatur dalam POJK No. 36/2014 (sebagaimana didefinisikan di bawah), yakni Perseroan telah menjadi emiten dalam kurun waktu paling singkat 2 tahun dan tidak pernah mengalami gagal bayar selama 2 tahun terakhir sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran kepada OJK dalam rangka PUB Obligasi dan Sukuk Ijarah I.
23. Dalam rangka PUB Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Petrosea Tahap I Tahun 2024, sesuai dengan ketentuan POJK No. 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk, Perseroan telah memperoleh Pernyataan Kesesuaian Syariah dari Tim Ahli Syariah berdasarkan Pernyataan Kesesuaian Syariah tanggal 16 September 2024.
24. Perjanjian Sehubungan Dengan PUB Obligasi dan Sukuk Ijarah I Tahap I telah dibuat dan ditandatangani oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan termasuk POJK No. 36/2014 dan POJK No. 20/2020.

Demikianlah Pendapat Hukum ini kami persiapkan dalam kapasitas kami sebagai konsultan hukum yang bebas dan mandiri, dengan penuh kejujuran dan tidak berpihak serta terlepas dari kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap usaha Perseroan, dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat Hukum ini.

Hormat kami,
TnP Law Firm



Rambun Tjajo, S.H.
STTD.KH-277/PJ-1/PM.021/2023

Tembusan:
Kepala Eksekutif Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan

XVI. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN

Halaman ini sengaja dikosongkan

**PT PETROSEA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/
AND ITS SUBSIDIARIES**

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM/
INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2024 DAN 2023 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023 DAN 2022/
*FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED
JUNE 30, 2024 AND 2023 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2023 AND 2022*

DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN/
AND INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

	<u>Halaman/ Page</u>	
SURAT PERNYATAAN DIREKSI		DIRECTORS' STATEMENT LETTER
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN		INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM – Untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2024 dan 2023 (tidak diaudit) dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022		INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS – For the six-month periods ended June 30, 2024 and 2023 (unaudited) and for the years ended December 31, 2023 and 2022
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Interim	1	Interim Consolidated Statements of Financial Position
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Interim	3	Interim Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian Interim	4	Interim Consolidated Statements of Changes in Equity
Laporan Arus Kas Konsolidasian Interim	5	Interim Consolidated Statements of Cash Flows
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Interim	6	Notes to Interim Consolidated Financial Statements

PT Petrosea Tbk.(Head Office)

Indy Bintaro Office Park, Building B
Jl. Boulevard Bintaro Jaya Blok B7/A6
Sektor VII, CBD Bintaro Jaya
Tangerang Selatan, 15224
Indonesia

T +62 21 29770999
F +62 21 29770988
W www.petrosea.com

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2024 DAN 2023 (TIDAK DIAUDIT) DAN UNTUK
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

**DIRECTORS' STATEMENT LETTER
RELATING TO THE RESPONSIBILITY ON
THE INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED JUNE 30, 2024
AND 2023 (UNAUDITED) AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2023 AND 2022**

**PT PETROSEA Tbk ("Perusahaan")
DAN ENTITAS ANAK**

**PT PETROSEA Tbk (the "Company")
AND ITS SUBSIDIARIES**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini / *We, the undersigned:*

- | | | | |
|----|--|---|--|
| 1. | Nama / Name | : | Michael |
| | Alamat Kantor / Office address | : | Indy Bintaro Office Park, Building B, Jl. Boulevard Bintaro Jaya Blok B7/A6, Sektor VII, CBD Bintaro Jaya, Tangerang Selatan |
| | Alamat Domisili sesuai KTP atau kartu identitas lain / Domicile as stated in ID card | : | Jl. Raya Joglo Perumahan Magnolia 6 Blok K.2 No. 8, RT 008/RW 008, Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat |
| | Nomor Telepon / Phone Number | : | (021) 29770999 |
| | Jabatan / Position | : | Presiden Direktur/President Director |
| 2. | Nama / Name | : | Ruddy Santoso |
| | Alamat Kantor / Office address | : | Indy Bintaro Office Park, Building B, Jl. Boulevard Bintaro Jaya Blok B7/A6, Sektor VII, CBD Bintaro Jaya, Tangerang Selatan |
| | Alamat domisili sesuai KTP atau kartu identitas lain / Domicile as stated in ID card | : | Jl. Kelapa Kopyor Timur 4/Bl.1/17 Kelapa Gading Jakarta Utara |
| | Nomor Telepon / Phone Number | : | (021) 29770999 |
| | Jabatan / Position | : | Direktur Keuangan/Finance Director |

Menyatakan bahwa / *State that:*

- | | | | |
|----|---|----|---|
| 1. | Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian interim; | 1. | We are responsible for the preparation and presentation of the interim consolidated financial statements; |
| 2. | Laporan keuangan konsolidasian interim telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia; | 2. | The interim consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards; |
| 3. | a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian interim telah dimuat secara lengkap dan benar; | 3. | a. All information contained in the consolidated financial statements are complete and correct; |
| | b. Laporan keuangan konsolidasian interim tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; dan | 3. | b. The consolidated financial statements do not contain misleading material information or facts, and do not omit material information and facts; and |
| 4. | Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Perusahaan dan entitas anak. | 4. | We are responsible for the Company and its subsidiaries' internal control system. |

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement letter is made truthfully.

Atas nama dan mewakili Direksi / *For and on behalf of the Board of Directors*
Tangerang Selatan, 1 November 2024 / November 1, 2024



Michael
Presiden Direktur/President Director

Ruddy Santoso
Direktur Keuangan/Finance Director

Laporan Auditor Independen

No. 00126/2.1460/AU.1/02/1428-3/1/XI/2024

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

PT Petrosea Tbk

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian interim PT Petrosea Tbk dan entitas anak ("Grup"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian interim tanggal 30 Juni 2024, 31 Desember 2023 dan 2022 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian interim, laporan perubahan ekuitas konsolidasian interim, dan laporan arus kas konsolidasian interim untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022, serta catatan atas laporan keuangan konsolidasian interim, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian interim terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian interim Grup tanggal 30 Juni 2024, 31 Desember 2023 dan 2022, serta kinerja keuangan konsolidasian interim dan arus kas konsolidasian interimnya untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Interim pada laporan kami. Kami independen terhadap Grup berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian interim di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Independent Auditor's Report

No. 00126/2.1460/AU.1/02/1428-3/1/XI/2024

The Stockholders, Board of Commissioners and Directors

PT Petrosea Tbk

Opinion

We have audited the interim consolidated financial statements of PT Petrosea Tbk and its subsidiaries (the "Group"), which comprise the interim consolidated statements of financial position as of June 30, 2024, December 31, 2023 and 2022 and the interim consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, interim consolidated statements of changes in equity, and interim consolidated statements of cash flows for the six-month period ended June 30, 2024 and for the years ended December 31, 2023 and 2022, and notes to the interim consolidated financial statements, including material accounting policy information.

In our opinion, the accompanying interim consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the interim consolidated financial position of the Group as of June 30, 2024, December 31, 2023 and 2022, and its interim consolidated financial performance and its interim consolidated cash flows for the six-month period ended June 30, 2024 and for the years ended December 31, 2023 and 2022, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Interim Consolidated Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Group in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the interim consolidated financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Liana Ramon Xenia & Rekan

Liana Ramon Xenia & Rekan

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian interim periode ini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan konsolidasian interim secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan konsolidasian interim terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Penyisihan untuk kerugian kredit ekspektasian (KKE) atas piutang usaha

Pada tanggal 30 Juni 2024, piutang usaha bersih Grup adalah sebesar US\$ 165.606 ribu, terdiri dari jumlah piutang usaha sebesar US\$ 166.023 ribu dan cadangan KKE sebesar US\$ 417 ribu.

Sesuai dengan PSAK 109 (dahulu PSAK 71) *Instrumen Keuangan*, Grup menentukan KKE dengan menerapkan pendekatan yang disederhanakan, yang menggunakan KKE sepanjang umur dengan basis masa depan. Tingkat KKE adalah berdasarkan tingkat kerugian kredit historis atas pengelompokan berbagai segmen pelanggan yang memiliki risiko kredit yang sama, disesuaikan dengan informasi masa depan. Sesuai yang diungkapkan pada Catatan 4 atas laporan keuangan konsolidasian interim, penilaian ini melibatkan pertimbangan dan estimasi manajemen yang signifikan.

Pengungkapan Grup mengenai piutang usaha dijelaskan dalam Catatan 6a atas laporan keuangan konsolidasian interim.

Bagaimana hal ini ditangani dalam audit

Kami telah melakukan pemahaman terkait dengan alur proses bagaimana manajemen menentukan dan menghitung KKE dalam penentuan penyisihan KKE atas piutang usaha. Kami juga melakukan tes desain dan implementasi dari pengendalian internal terkait dengan perhitungan KKE.

Kami mengevaluasi keakuratan dan kelengkapan data yang digunakan dalam model KKE dan memeriksa keakuratan matematis dari perhitungan tersebut.

Kami mengevaluasi kewajaran asumsi (yaitu definisi gagal bayar, pengelompokan atas segmen pelanggan, karakteristik risiko kredit, dan informasi masa depan) yang digunakan oleh manajemen untuk mengestimasi penyisihan KKE.

Kami menilai kesesuaian penyajian dalam laporan keuangan konsolidasian interim.

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the interim consolidated financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the interim consolidated financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

Allowance for expected credit losses (ECL) for trade accounts receivable

As of June 30, 2024, the Group's net trade accounts receivable amounting to US\$ 165,606 thousand, comprise of gross trade accounts receivable amounting to US\$ 166,023 thousand and an allowance for ECL amounting to US\$ 417 thousand.

In accordance with PSAK 109 (previously PSAK 71) *Financial Instruments*, the Group determines ECL by applying the simplified approach, which uses a lifetime ECL on a forward-looking basis. The ECL rates are based on historical defaults rates for groupings of various customer segments that have similar credit risk characteristics, adjusted with forward looking information. As disclosed in Note 4 to the interim consolidated financial statements, these assessments involve significant management judgement and estimates.

The Group's disclosures on the trade accounts receivable are set out in Note 6a to the interim consolidated financial statements.

How the matter was addressed in the audit

We obtained an understanding on the process flow of how management determine and calculate the ECL in respect of the allowance for ECL of trade accounts receivable. We also performed the test of design and implementation of the relevant controls related to the calculation of ECL.

We evaluated accuracy and completeness of data used in the expected credit loss model and checked mathematical accuracy of the calculation.

We evaluated the reasonableness of key assumptions (i.e. definition of default, grouping of various customer segments, credit risk characteristics, and forward looking information) used by management to estimate the allowance for ECL.

We assessed the appropriateness of the related disclosures in the interim consolidated financial statements.

Liana Ramon Xenia & Rekan

Penurunan nilai *goodwill*

Pada tanggal 30 Juni 2024, nilai tercatat *goodwill* yang diperoleh dari akuisisi PT Kemilau Mulia Sakti dan entitas anak (KMS) adalah sebesar US\$ 18.987 ribu.

Goodwill diisyaratkan untuk penilaian penurunan nilai setiap tahun ketika keadaan mengindikasikan bahwa nilai tercatat mungkin mengalami penurunan nilai. Manajemen melakukan penilaian atas penurunan nilai *goodwill* dari akuisisi KMS dan menentukan jumlah perulihan menggunakan model nilai pakai ("VIU") dari unit penghasil kas ("CGU"). Model tersebut melibatkan pertimbangan dan estimasi yang signifikan dari manajemen sehubungan dengan tingkat diskonto dan proyeksi pendapatan.

Mengingat kompleksitas dan sifat penilaian dari pengujian penurunan nilai, manajemen melibatkan penilai eksternal independen untuk mengestimasi VIU dari CGU.

Pengungkapan Grup mengenai *goodwill* dijelaskan dalam Catatan 14 atas laporan keuangan konsolidasian interim.

Bagaimana hal ini ditangani dalam audit

Kami memperoleh pemahaman dan mengevaluasi desain dan implementasi dari pengendalian internal Grup yang relevan sehubungan dengan proses penilaian penurunan nilai *goodwill*.

Kami menilai ketepatan identifikasi CGU oleh manajemen dan mengevaluasi apakah proses penilaian penurunan nilai telah diterapkan secara konsisten di seluruh CGU.

Kami menilai kompetensi, kapabilitas, dan objektivitas penilai eksternal independen yang dilibatkan oleh manajemen.

Kami melibatkan spesialis penilai internal untuk membantu kami dalam menguji asumsi utama yang digunakan oleh spesialis manajemen, khususnya tingkat diskonto.

Kami menilai kewajaran proyeksi arus kas dan membandingkan input utama dengan data historis dan kinerja Grup. Hal ini mencakup analisis *lookback* dan memeriksa akurasi matematis dari perhitungan.

Kami menilai apakah keseluruhan VIU berada dalam kisaran yang dapat diterima dengan melakukan analisis sensitivitas pada hasil penilaian penurunan nilai manajemen.

Kami menilai kesesuaian penyajian dalam laporan keuangan konsolidasian interim.

Impairment of goodwill

As of June 30, 2024, the carrying amount of goodwill arising from the acquisition of PT Kemilau Mulia Sakti and its subsidiary (KMS) amounted to US\$ 18,987 thousand.

Goodwill is required to be assessed for impairment annually and when circumstances indicate that the carrying value may be impaired. Management performed an impairment assessment on goodwill from the acquisition of KMS and determined recoverable amount using the value-in-use ("VIU") model of the cash-generating unit ("CGU"). This model involves significant judgements and estimates from management in respect of discount rates and revenue projection.

Given the complexity and judgement nature of the impairment testing, management engaged an independent external valuer to estimate the VIU of CGU.

The Group's disclosures on impairment of goodwill are set out in Note 14 to the interim consolidated financial statements.

How the matter was addressed in the audit

We obtained an understanding and evaluated the design and implementation of the Group's relevant controls in respect of goodwill impairment assessment process.

We assessed the appropriateness of the management's identification of the CGU and evaluate whether the impairment assessment process has been applied consistently across the CGU.

We assessed the competence, capability, and objectivity of the independent external valuer engaged by management.

We engaged internal valuation expert to assist us in testing certain key assumption used by management's specialist, particularly the discount rate.

We assessed the reasonableness of the cash flow projections and compared the key inputs against the CGU's historical data and performance. This included lookback analysis and checked the mathematical accuracy of the calculation.

We assessed whether the overall VIU is within the acceptable range by performing sensitivity analysis on the results of the management's impairment assessment.

We assessed the appropriateness of the related disclosures in the interim consolidated financial statements.

Liana Ramon Xenia & Rekan

Hal-hal Lain

Informasi komparatif untuk laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian interim, laporan perubahan ekuitas konsolidasian interim dan laporan arus kas konsolidasian interim, serta catatan atas laporan keuangan konsolidasian interim terkait untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2023, tidak diaudit atau direviu oleh kami.

Kami sebelumnya telah menerbitkan laporan auditor independen No. 00108/2.1460/AU.1/02/1428-3/1/X/2024 tanggal 10 Oktober 2024 atas laporan keuangan konsolidasian interim PT Petrosea Tbk dan entitas anak untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2024 dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022, dengan opini tanpa modifikasi dengan paragraf hal-hal lain.

Sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi dan Sukuk Ijarah, PT Petrosea Tbk menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian interim ini untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2024 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 untuk menyesuaikan pengungkapan dengan peraturan pasar modal yang berlaku, seperti dijelaskan pada Catatan 42 atas laporan keuangan konsolidasian interim.

Laporan ini disusun untuk disertakan dalam Dokumen Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi dan Sukuk Ijarah dan tidak dimaksudkan dan tidak boleh digunakan untuk tujuan lain.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian interim

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian interim tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian interim yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian interim, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Grup dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Grup atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Other Matters

The comparative information for the interim consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, interim consolidated statement of changes in equity, and interim consolidated statement of cash flows, and notes to the interim consolidated financial statements for the six-month period ended June 30, 2023, were neither audited nor reviewed by us.

We have previously issued our independent auditor's report No. 00108/2.1460/AU.1/02/1428-3/1/X/2024 dated October 10, 2024 on the interim consolidated financial statements of PT Petrosea Tbk and its subsidiaries for the six-month period ended June 30, 2024 and for the years ended December 31, 2023 and 2022, with unmodified opinion and other matters paragraph.

In connection with the planned Public Offering of Continuous Bonds and Sukuk Ijarah, PT Petrosea Tbk reissued these interim consolidated financial statements for the six-month period ended June 30, 2024 and for the years ended December 31, 2023 and 2022 to conform the disclosures with prevailing capital market regulations, as described in Note 42 to these interim consolidated financial statements.

This report has been prepared for inclusion in the Public Offering Document of Continuous Bonds and Sukuk Ijarah and is not intended to be and should not be used for any other purposes.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Interim Consolidated Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the interim consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of interim consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the interim consolidated financial statements, management is responsible for assessing the Group's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Liana Ramon Xenia & Rekan

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Grup.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Interim

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian interim secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan konsolidasian interim tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian interim, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Grup.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Group's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Interim Consolidated Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the interim consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these interim consolidated financial statements.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the interim consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Group's internal control.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.

Liana Ramon Xenia & Rekan

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian interim atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Grup tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan konsolidasian interim secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan konsolidasian interim mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.
- Memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait informasi keuangan entitas atau aktivitas bisnis dalam Grup untuk menyatakan opini atas laporan keuangan konsolidasian interim. Kami bertanggung jawab atas arahan, supervisi, dan pelaksanaan audit Grup. Kami tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas opini audit kami.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the interim consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the interim consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the interim consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.
- Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities business activities within the Group to express an opinion on the interim consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the group audit. We remain solely responsible for our audit opinion.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan jika relevan, pengamanan terkait.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

Liana Ramon Xenia & Rekan

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian interim periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the interim consolidated financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

LIANA RAMON XENIA & REKAN



Kasman

Izin Akuntan Publik/ *Public Accountant License* No. AP.1428

1 November 2024/ *November 1, 2024*



00126

	Catatan/ Notes	30 Juni/ June 30, 2024 US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2023 US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2022 US\$ '000	
ASET					ASSETS
ASET LANCAR					CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas	5	92.271	72.987	61.760	Cash and cash equivalents
Rekening bank dibatasi penggunaannya		-	2.828	-	Restricted cash in banks
Aset keuangan lainnya		383	414	356	Other financial assets
Piutang usaha	6a				Trade accounts receivable
Pihak berelasi	35	29.297	20.842	23.871	Related parties
Pihak ketiga		136.309	128.971	82.580	Third parties
Piutang lain-lain	6b				Other accounts receivable
Pihak berelasi	35	7	-	-	Related party
Pihak ketiga		1.073	49.242	16.146	Third parties
Persediaan	7	15.143	19.204	18.517	Inventories
Aset kontrak	8	281	5.755	12.295	Contract assets
Pajak dibayar di muka	9	3.308	1.530	11.345	Prepaid taxes
Klaim pengembalian pajak		-	-	6.943	Claims for tax refund
Beban dibayar di muka	10	6.939	5.072	5.606	Prepaid expenses
Aset lancar lainnya	11	14.166	8.872	18.234	Other current assets
Jumlah Aset Lancar		<u>299.177</u>	<u>315.717</u>	<u>257.653</u>	Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR					NON-CURRENT ASSETS
Piutang lain-lain - pihak ketiga	6b	37.475	638	32.499	Other accounts receivable - third parties
Pajak dibayar di muka	9	5.802	3.399	-	Prepaid taxes
Aset tambang		2.325	2.497	-	Mining properties
Aset tetap	12	228.609	230.746	232.812	Property, plant and equipment
Aset hak-guna	13	28.527	37.552	33.949	Right-of-use assets
Goodwill	14	19.768	19.768	781	Goodwill
Aset tak-berwujud - bersih	16	104.110	110.989	27.480	Intangible assets - net
Rekening bank dibatasi penggunaannya		682	720	-	Restricted cash in bank
Aset pajak tangguhan	31	512	805	-	Deferred tax asset
Aset tidak lancar lainnya	11	8.608	5.114	11.246	Other non-current assets
Jumlah Aset Tidak Lancar		<u>436.418</u>	<u>412.228</u>	<u>338.767</u>	Total Non-current Assets
JUMLAH ASET		<u><u>735.595</u></u>	<u><u>727.945</u></u>	<u><u>596.420</u></u>	TOTAL ASSETS

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian interim yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian interim.

See accompanying notes to interim consolidated financial statements which are an integral part of the interim consolidated financial statements.

	Catatan/ Notes	30 Juni/ June 30, 2024 US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2023 US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2022 US\$ '000	
LIABILITAS DAN EKUITAS					LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS JANGKA PENDEK					CURRENT LIABILITIES
Utang bank	17	44.353	37.127	45.146	Bank loans
Utang usaha	18				Trade accounts payable
Pihak berelasi	35	-	-	674	Related parties
Pihak ketiga		142.429	139.993	117.861	Third parties
Utang lain-lain - pihak ketiga		1.040	581	1.656	Other accounts payable - third parties
Utang dividen	24	957	928	287	Dividends payable
Utang pajak	19	2.255	3.225	5.495	Taxes payable
Beban masih harus dibayar	20	12.224	18.042	18.952	Accrued expenses
Liabilitas kontrak	21	30.812	22.277	5.694	Contract liabilities
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:					Current maturities of long-term liabilities:
Pinjaman jangka panjang - pihak ketiga	22a	9.758	38.539	15.807	Long-term loans - third parties
Liabilitas sewa	23	7.944	11.281	10.345	Lease liabilities
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		251.772	271.993	221.917	Total Current Liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG					NON-CURRENT LIABILITIES
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:					Long-term liabilities - net of current maturities:
Pinjaman jangka panjang - pihak ketiga	22a	175.718	148.656	28.315	Long-term loans - third parties
Liabilitas sewa	23	11.593	15.138	16.113	Lease liabilities
Liabilitas imbalan pasca kerja	33	25.164	27.855	22.941	Employee benefits obligation
Liabilitas pajak tangguhan - bersih	31	29.647	28.626	9.143	Deferred tax liabilities - net
Liabilitas jangka panjang lainnya	22b	121	47	-	Other long-term liabilities
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		242.243	220.322	76.512	Total Non-current Liabilities
Jumlah Liabilitas		494.015	492.315	298.429	Total Liabilities
EKUITAS					EQUITY
Modal saham - nilai nominal Rp 50 per saham					Capital stock - Rp 50 par value per share
Modal dasar - 4.034.420.000 saham					Authorized - 4,034,420,000 shares
Modal ditempatkan dan disetor - 1.008.605.000 saham	24	33.438	33.438	33.438	Subscribed and paid-up - 1,008,605,000 shares
Tambahan modal disetor	24	1.840	(4.602)	(4.602)	Additional paid-in capital
Saham treasuri	24	-	(2.033)	(2.033)	Treasury shares
Penghasilan komprehensif lain		(4.863)	(4.087)	(5.463)	Other comprehensive income
Saldo laba					Retained earnings
Ditentukan penggunaannya	24	1.475	1.475	1.475	Appropriated
Tidak ditentukan penggunaannya		208.866	210.594	274.394	Unappropriated
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk		240.756	234.785	297.209	Equity attributable to owners of the Company
Kepentingan Nonpengendali		824	845	782	Non-controlling interests
Jumlah Ekuitas		241.580	235.630	297.991	Total Equity
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		735.595	727.945	596.420	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian interim yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian interim.

See accompanying notes to interim consolidated financial statements which are an integral part of the interim consolidated financial statements.

PT PETROSEA Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
KONSOLIDASIAN INTERIM
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2024 DAN 2023 (TIDAK DIAUDIT) DAN UNTUK TAHUN-TAHUN
YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

PT PETROSEA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
INTERIM CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED
JUNE 30, 2024 AND 2023 (UNAUDITED) AND FOR THE YEARS
ENDED DECEMBER 31, 2023 AND 2022

		2023				
		2024	(Enam bulan)/ (Six-month)	2023	2022	
	Catatan/ Notes	(Enam bulan)/ (Six-month)	(Tidak diaudit)/ (Unaudited)	(Satu tahun)/ (One year)	(Satu tahun)/ (One year)	
		US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	
PENDAPATAN	25	318.024	274.025	577.617	476.317	REVENUES
BEBAN USAHA LANGSUNG	26	<u>(277.352)</u>	<u>(232.417)</u>	<u>(495.510)</u>	<u>(380.823)</u>	DIRECT COSTS
LABA KOTOR		40.672	41.608	82.107	95.494	GROSS PROFIT
Beban penjualan dan administrasi	27,28	(26.571)	(21.406)	(46.779)	(34.561)	Selling and administration expenses
Beban bunga dan keuangan	29	(13.348)	(7.166)	(19.805)	(7.421)	Interest expenses and finance charges
Penghasilan bunga		395	604	1.070	1.017	Interest income
Beban pajak final		(4.043)	(970)	(4.421)	(2.699)	Final tax expense
Keuntungan dan kerugian lain-lain - bersih	30	<u>6.031</u>	<u>611</u>	<u>3.875</u>	<u>(1.675)</u>	Other gains and losses - net
Jumlah		<u>(37.536)</u>	<u>(28.327)</u>	<u>(66.060)</u>	<u>(45.339)</u>	Total
LABA SEBELUM PAJAK		3.136	13.281	16.047	50.155	PROFIT BEFORE TAX
BEBAN PAJAK PENGHASILAN - BERSIH	31	<u>(1.613)</u>	<u>(1.570)</u>	<u>(3.609)</u>	<u>(8.989)</u>	INCOME TAX EXPENSE - NET
LABA BERSIH PERIODE/TAHUN BERJALAN		<u>1.523</u>	<u>11.711</u>	<u>12.438</u>	<u>41.166</u>	NET PROFIT FOR THE PERIOD/YEAR
(RUGI) PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN - SETELAH PAJAK						OTHER COMPREHENSIVE (LOSS) INCOME - NET OF TAX
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi: Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pasti - setelah pajak		2.608	-	396	(130)	Item that will not be reclassified subsequently to profit or loss: Remeasurement of defined benefits obligation - net of tax
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi: Perubahan nilai wajar atas derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai pada arus kas		-	-	-	210	Items that may be reclassified subsequently to profit or loss: Changes in fair value of derivative designated as hedging instrument under cash flow hedge
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing		<u>(3.384)</u>	<u>2.248</u>	<u>980</u>	<u>(3.287)</u>	Exchange differences on foreign currency currency translation adjustment
Jumlah (rugi) penghasilan komprehensif lain pada periode/tahun berjalan - setelah pajak		<u>(776)</u>	<u>2.248</u>	<u>1.376</u>	<u>(3.207)</u>	Total other comprehensive (loss) income for the period/year - net of tax
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN		<u>747</u>	<u>13.959</u>	<u>13.814</u>	<u>37.959</u>	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE PERIOD/YEAR
LABA YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:						PROFIT ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik Entitas Induk		1.322	11.591	12.200	40.924	Owners of the Company
Kepentingan Nonpengendali		<u>201</u>	<u>120</u>	<u>238</u>	<u>242</u>	Non-controlling interests
Jumlah laba bersih pada periode/tahun berjalan		<u>1.523</u>	<u>11.711</u>	<u>12.438</u>	<u>41.166</u>	Net profit for the period/year
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:						TOTAL COMPREHENSIVE INCOME ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik Entitas Induk		546	13.839	13.576	37.717	Owners of the Company
Kepentingan Nonpengendali		<u>201</u>	<u>120</u>	<u>238</u>	<u>242</u>	Non-controlling interests
Jumlah penghasilan komprehensif periode/tahun berjalan		<u>747</u>	<u>13.959</u>	<u>13.814</u>	<u>37.959</u>	Total comprehensive income for the period/year
Laba per saham dasar (dalam US\$ penuh)	32	0,0013	0,0117	0,0123	0,0413	Basic earnings per share (in full US\$)

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian interim yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian interim.

See accompanying notes to interim consolidated financial statements which are an integral part of the interim consolidated financial statements.

Catatan/ Notes	Penghasilan komprehensif lain/ Other comprehensive income							Saldo laba/ Retained earnings		Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk/ Equity attributable to owners of the Company		Kepentingan Nonpengendali/ Non-controlling interests	Jumlah ekuitas/ Total equity		
	Modal disetor/ Paid-up capital US\$ '000	Tambahannya modal disetor/ Additional paid-in capital US\$ '000	Saham treasury/ Treasury shares US\$ '000	Pengukuran kembali imbalan pasca kerja/ Remeasurement of defined benefits obligation US\$ '000	Instrumen lindung nilai arus kas/ Cash flow hedging reserve US\$ '000	Selisih penjabaran laporan keuangan/ Foreign currency translation adjustment US\$ '000	Ditentukan penggunaannya/ Appropriated US\$ '000	Tidak ditentukan penggunaannya/ Unappropriated US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000				US\$ '000
Saldo per 1 Januari 2022	33.438	(4.602)	(2.033)	(1.944)	(210)	(102)	1.475	233.470	259.492	731	260.223	Balance as of January 1, 2022			
Laba bersih tahun berjalan	-	-	-	-	-	-	-	40.924	40.924	242	41.166	Net profit for the year			
(Rugi) penghasilan komprehensif lain - setelah pajak:												Other comprehensive (loss) income - net of tax:			
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pasti	-	-	-	(130)	-	-	-	-	(130)	-	(130)	Remeasurements of defined benefits obligation			
Perubahan nilai wajar atas derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai pada arus kas	-	-	-	-	210	-	-	-	210	-	210	Changes in fair value of derivative designated as hedging instrument under cash flow hedge			
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-	-	-	-	-	(3.287)	-	-	(3.287)	-	(3.287)	Exchange differences on foreign currency translation adjustment			
Jumlah penghasilan komprehensif	-	-	-	(130)	210	(3.287)	-	40.924	37.717	242	37.959	Total comprehensive income			
Dividen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(191)	(191)	Dividends			
Saldo per 31 Desember 2022	33.438	(4.602)	(2.033)	(2.074)	-	(3.389)	1.475	274.394	297.209	782	297.991	Balance as of December 31, 2022			
Laba bersih tahun berjalan	-	-	-	-	-	-	-	11.591	11.591	120	11.711	Net profit for the year			
Penghasilan komprehensif lain - setelah pajak: Selisih kurs penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-	-	-	-	-	2.248	-	-	2.248	-	2.248	Other comprehensive income - net of tax: Exchange differences on foreign currency translation adjustment			
Jumlah penghasilan komprehensif	-	-	-	-	-	2.248	-	11.591	13.839	120	13.959	Total comprehensive income			
Dividen	-	-	-	-	-	-	-	(76.000)	(76.000)	(127)	(76.127)	Dividends			
Saldo per 30 Juni 2023 (tidak diaudit)	33.438	(4.602)	(2.033)	(2.074)	-	(1.141)	1.475	209.985	235.048	775	235.823	Balance as of June 30, 2023 (unaudited)			
Saldo 1 Januari 2023	33.438	(4.602)	(2.033)	(2.074)	-	(3.389)	1.475	274.394	297.209	782	297.991	Balance as of January 1, 2023			
Laba bersih tahun berjalan	-	-	-	-	-	-	-	12.200	12.200	238	12.438	Net profit for the year			
Penghasilan komprehensif lain - setelah pajak: Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pasti	-	-	-	396	-	-	-	-	396	-	396	Other comprehensive income - net of tax: Remeasurements of defined benefits obligation			
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-	-	-	-	-	980	-	-	980	-	980	Exchange differences on foreign currency translation adjustment			
Jumlah penghasilan komprehensif	-	-	-	396	-	980	-	12.200	13.576	238	13.814	Total comprehensive income			
Dividen	-	-	-	-	-	-	-	(76.000)	(76.000)	(175)	(76.175)	Dividends			
Saldo per 31 Desember 2023	33.438	(4.602)	(2.033)	(1.678)	-	(2.409)	1.475	210.594	234.785	845	235.630	Balance as of December 31, 2023			
Laba bersih tahun berjalan	-	-	-	-	-	-	-	1.322	1.322	201	1.523	Net profit for the year			
Penghasilan (rugi) komprehensif lain - setelah pajak: Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pasti	-	-	-	2.608	-	-	-	-	2.608	-	2.608	Other comprehensive income (loss) - net of tax: Remeasurements of defined benefits obligation			
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-	-	-	-	-	(3.384)	-	-	(3.384)	-	(3.384)	Exchange differences on foreign currency translation adjustment			
Jumlah penghasilan komprehensif	-	-	-	2.608	-	(3.384)	-	1.322	546	201	747	Total comprehensive income			
Additional paid-in capital	-	6.442	-	-	-	-	-	-	6.442	-	6.442	Additional paid-in capital			
Saham treasury	-	-	2.033	-	-	-	-	-	-	-	2.033	Treasury shares			
Dividen	-	-	-	-	-	-	-	(3.050)	(3.050)	(222)	(3.272)	Dividends			
Saldo per 30 Juni 2024	33.438	1.840	-	930	-	(5.793)	1.475	208.866	240.756	824	241.580	Balance as of June 30, 2024			

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian interim yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian interim.

See accompanying notes to interim consolidated financial statements which are an integral part of the interim consolidated financial statements.

Catatan/ Notes	2024	2023	2023	2022		
	(Enam bulan)/ (Six-month) US\$ '000	(Enam bulan)/ (Six-month) (Tidak diaudit)/ (Unaudited) US\$ '000	(Satu tahun)/ (One year) US\$ '000	(Satu tahun)/ (One year) US\$ '000		
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI						
Penerimaan kas dari pelanggan	326.749	258.191	562.342	453.901	CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES Cash received from customers	
Pembayaran kas kepada pemasok	(204.653)	(149.275)	(285.839)	(211.235)	Cash paid to suppliers	
Pembayaran kas kepada karyawan	(71.650)	(65.647)	(142.691)	(132.112)	Cash paid to employees	
Kas dihasilkan dari operasi	50.446	43.269	133.812	110.554	Cash generated from operations	
Pembayaran bunga dan beban keuangan	(12.857)	(7.166)	(18.856)	(6.564)	Payment of interest and finance charges	
Pembayaran pajak penghasilan dan pajak lainnya	(7.547)	(7.619)	(15.279)	(18.725)	Payment of income taxes and other taxes	
Penerimaan bunga	395	604	1.070	1.017	Interest received	
Penerimaan pengembalian pajak	-	6.943	7.019	3.126	Receipt of tax refunds	
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi	30.437	36.031	107.766	89.408	Net Cash Provided by Operating Activities	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI						
Hasil penjualan aset tetap	12	89	-	1.943	632	Proceeds from sale property, plant and equipment
Pembelian aset tetap	12,40	(19.432)	(21.651)	(62.110)	(54.496)	Acquisitions of property, plant and equipment
Perolehan aset tak-berwujud	16,40	(1.122)	(621)	(3.954)	(5.120)	Acquisitions of intangible assets
Pembayaran aset eksplorasi dan evaluasi dan properti pertambangan	(1.048)	-	-	-	-	Payment for exploration and evaluation assets and mining properties
Akuisi entitas anak, setelah dikurangi kas yang diperoleh	34	-	(90.542)	(90.542)	-	Acquisition of a subsidiary, net of cash acquired
Penempatan investasi entitas asosiasi	-	-	(2.316)	(574)	(574)	Placement of investment in associate
Pencairan aset keuangan lainnya	-	-	-	24.000	24.000	Withdrawal in other financial assets
Memberian pinjaman jangka panjang - pihak ketiga	-	-	-	(54.969)	(54.969)	Long-term receivables provided - third party
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(21.513)	(112.814)	(156.979)	(90.527)	(90.527)	Net Cash Used in Investing Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN						
CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES						
Penerimaan pinjaman jangka panjang - pihak ketiga	22	184.034	170.505	174.324	-	Proceeds from long-term loan - third parties
Penerimaan pinjaman bank	17	59.226	44.673	81.509	107.000	Proceeds from bank loans
Penerimaan dari penjualan saham treasury	24	8.475	-	-	-	Proceeds of sales of treasury stocks
Pencairan rekening bank dibatasi penggunaannya	-	2.828	-	-	-	Withdrawal of restricted cash in bank
Pembayaran pinjaman jangka panjang - pihak ketiga	22	(183.472)	(9.612)	(28.714)	(58.879)	Payment of long-term loan - third parties
Pembayaran pinjaman bank	17	(52.000)	(45.000)	(89.509)	(62.000)	Payment of bank loans
Pembayaran liabilitas sewa	23	(6.930)	(4.375)	(8.853)	(18.839)	Payment of lease liabilities
Pembayaran dividen oleh Perusahaan	24	(3.021)	(75.857)	(75.359)	-	Payment of dividends by the Company
Pembayaran dividen entitas anak	-	(222)	-	(175)	(191)	Payment of dividends by subsidiaries
Penerimaan dari transaksi jual dan sewa balik	23	-	7.516	8.693	7.839	Proceeds from sale and lease back
Penempatan rekening bank dibatasi penggunaannya	-	-	(2.828)	-	-	Placement of restricted cash in banks
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	8.918	87.850	59.088	(25.070)	(25.070)	Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS						
	17.842	11.067	9.875	(26.189)	(26.189)	NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE/TAHUN						
	72.987	61.760	61.760	89.325	89.325	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF THE PERIOD/YEAR
Pengaruh perubahan kurs valuta asing atas kas dan setara kas						
	1.442	452	1.352	(1.376)	(1.376)	Effect of changes in foreign exchange rate on cash and cash equivalents
KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE/TAHUN						
	92.271	73.279	72.987	61.760	61.760	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF THE PERIOD/YEAR

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

1. UMUM

a. Pendirian dan Informasi Umum

PT Petrosea Tbk (“Perusahaan”) didirikan berdasarkan Akta No. 75 tertanggal 21 Februari 1972 dibuat oleh Djojo Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Penanaman Modal Asing tahun 1967. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman dalam surat keputusan No. Y.A.5/51/17 tanggal 30 November 1972 dan diumumkan dalam Berita Negara No. 12 Tambahan No. 96 tanggal 9 Februari 1973. Anggaran dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir anggaran dasar Perusahaan berdasarkan Akta No. 4 tertanggal 4 Desember 2023 yang dibuat di hadapan Shanti Indah Lestari, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang dan telah mendapatkan persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-0079682.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 19 Desember 2023 terkait dengan perubahan Peralihan Saham.

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir termuat dalam Akta Notaris No. 3 tertanggal 4 Desember 2023 yang dibuat oleh Shanti Indah Lestari, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, dan telah disimpan dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan surat No. AHU-0079682.AH.01.02.TAHUN 2023 tertanggal 19 Desember 2023.

Kantor pusat Perusahaan berlokasi di Indy Bintaro Office Park, Gedung B, Jl. Boulevard Bintaro Jaya Blok B7/A6 Sektor VII, CBD Bintaro Jaya, Kel. Pondok Jaya, Kec. Pondok Aren, Tangerang Selatan 15224 dan memiliki kantor pendukung di Jl. KM 5,5 Kariangau, RT 14, Kel. Kariangau Balikpapan Barat, Kalimantan Timur serta di Jl. Poros Pengalengan RT 04/RW 02, Kel. Klabinain Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, Papua Barat.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan meliputi bidang konstruksi, pertambangan dan penggalan, industri pengolahan, perdagangan, pengangkutan dan pergudangan, informasi dan komunikasi, aktivitas profesional, ilmiah dan teknis, aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, serta pendidikan.

1. GENERAL

a. Establishment and General Information

PT Petrosea Tbk (the “Company”) was established under Deed No. 75 dated February 21, 1972 made by Djojo Muljadi, S.H., Notary in Jakarta, within the framework of the Foreign Capital Investment Law of 1967. The deed of establishment was approved by the Minister of Justice in his decision letter No. Y.A.5/51/17, dated November 30, 1972, and was published in State Gazette No. 12 Supplement No. 96, dated February 9, 1973. The articles of association have been amended several times, with most recent changes by Deed No. 4 dated December 4, 2023 made before Shanti Indah Lestari, S.H. M.Kn., Notary in Tangerang Regency and have obtained approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia under Letter of Receipt of Notification of Changes in the Company's Data No. AHU-0079682.AH.01.02.TAHUN 2023 dated December 19, 2023 related to the change in the Share Conversion.

The latest composition of the Board of Directors and Board of Commissioner is stated in Deed No. 3 dated December 4, 2023 made before Shanti Indah Lestari, S.H. M.Kn., Notary in Tangerang Regency, which have been recorded in Legal Entity Administration System as per letter No. AHU-0079682.AH.01.02.TAHUN 2023 dated December 19, 2023.

The Company's head office is located at Indy Bintaro Office Park, Building B, Jl. Boulevard Bintaro Jaya Blok B7/A6 Sektor VII, CBD Bintaro Jaya, Kel. Pondok Jaya, Kec. Pondok Aren, South Tangerang 15224 and its support offices are located in Jl. KM 5.5 Kariangau, RT 14, Kel. Kariangau, West Balikpapan, East Kalimantan and in Jl. Poros Pengalengan RT 04/RW 02, Kel. Klabinain Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, West Papua.

In accordance with Article 3 of the Company's Articles of Association, the scope of its activities includes construction, mining and quarrying, processing industry, trading, transportation and warehousing, information and communication, professional, scientific and technical activities, leasing and leasing activities without option rights, employment, and education.

Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1972. Saat ini, kegiatan Perusahaan terutama dalam bidang aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian, reparasi mesin, konstruksi gedung, bangunan pelabuhan, bangunan sipil dan jalan, instalasi konstruksi, aktivitas pelayanan kepelabuhan laut, aktivitas konsultasi manajemen, aktivitas penyewaan, penyedia dan fungsi manajemen sumber daya manusia, dan pelatihan kerja teknik yang berlokasi di beberapa kota di Indonesia, seperti Kalimantan, Sulawesi dan Papua, dan di luar Indonesia, yaitu Australia.

Perusahaan dan entitas anak (secara bersama-sama disebut sebagai "Grup") mempunyai 8.947 karyawan (termasuk 4.475 karyawan tidak tetap) pada 30 Juni 2024, 8.131 karyawan (termasuk 3.476 karyawan tidak tetap) pada 31 Desember 2023 dan 6.474 karyawan (termasuk 2.463 karyawan tidak tetap) pada 31 Desember 2022 (tidak diaudit).

Berdasarkan surat No. 31/V/PMDN/2009 dari Badan Koordinasi Penanaman Modal ("BKPM") tanggal 23 Juni 2009, status Perusahaan berubah menjadi penanaman modal dalam negeri efektif mulai tanggal tersebut. Berdasarkan Akta No. 57 tanggal 27 Mei 2009, Perusahaan tergabung dalam kelompok usaha PT Indika Energy Tbk. Pada tanggal 28 Juli 2022, PT Indika Energy Tbk telah mengalihkan kepemilikannya kepada PT Caraka Reksa Optima (CARA).

Pada tanggal 16 Februari 2024, merujuk pada surat pemberitahuan dari PT Kreasi Jasa Persada (KJP), entitas anak langsung yang dikendalikan dan dimiliki sebesar 99,98% oleh PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN), kepada Perusahaan, KJP telah menyelesaikan pengambilalihan atas 342.925.700 lembar saham (mewakili 34% dari keseluruhan modal disetor dan ditempatkan Perusahaan) yang dimiliki CARA.

Pada tanggal 7 Juni 2024, KJP telah menambah kepemilikan saham sebanyak 75.836.700 saham yang mewakili 7,5% dari modal disetor dan ditempatkan Perusahaan, yang merupakan hasil divestasi yang dilakukan oleh CARA. Sehingga, kepemilikan saham KJP di Perusahaan adalah sebesar 41,5%.

Sehubungan dengan rencana penerbitan obligasi dan sukuk ijarah, Perusahaan menerbitkan laporan keuangan konsolidasian interim untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2024 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

The Company started its commercial operations in 1972. Currently, the Company's activities mainly comprise of mining activities and other quarrying, machinery repairs, building, port building, civil building and road constructions, construction installations, sea port services, management consultancy activities, leasing activities, provision and management function of human resources, and technical job training located in several cities in Indonesia, such as Kalimantan, Sulawesi and Papua, and outside Indonesia, which is Australia.

The Company and its subsidiaries (collectively referred to as the "Group") had total number of employees of 8,947 (including 4,475 non-permanent employees) as of June 30, 2024, 8,131 (including 3,476 non-permanent employees) as of December 31, 2023 and 6,474 (including 2,463 non-permanent employees) as of December 31, 2022 (unaudited).

Based on letter No. 31/V/PMDN/2009 of Investment Coordinating Board ("BKPM") dated June 23, 2009, the Company's status is changed to a domestic capital investment effective from such date. In accordance with Deed No. 57 dated May 27, 2009, the Company is one of the Group of companies owned by PT Indika Energy Tbk. On July 28, 2022, PT Indika Energy Tbk has transferred the ownership to PT Caraka Reksa Optima (CARA).

On February 16, 2024, referring to the notification letter from PT Kreasi Jasa Persada (KJP), direct subsidiary controlled and owned 99.98% by PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN), to the Company, KJP has completed the acquisition of 342,925,700 shares (represents 34% from the total issued and paid up capital in the Company) which is owned by CARA.

On June 7, 2024, KJP increased its ownership by 75,836,700 shares, which represents 7.5% of the Company's paid-up and issued capital, as a result of divestment carried out by CARA. Therefore, the share ownership of KJP in the Company amounts to 41.5%.

In connection with the plan to issue bonds and sukuk ijarah, the Company issued the interim consolidated financial statements for the six-month period ended June 30, 2024 and for the years ended December 31, 2023 and 2022.

Susunan Dewan Komisaris, Direksi, dan Komite Audit Perusahaan adalah sebagai berikut:

The Board of Commissioners, Directors, and Audit Committee of the Company consisted of the following:

	30 Juni 2024/ June 30, 2024	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	
Presiden Komisaris :	Osman Sitorus	Osman Sitorus	Haji Romo Nityudo Wachjo	: President Commissioner
Wakil Presiden Komisaris :	-	-	Hanifa Indradjaya	: Vice President Commissioner
Komisaris Independen :	Osman Sitorus Setia Untung Arimuladi, S.H., M.Hum.	Osman Sitorus Setia Untung Arimuladi, S.H., M.Hum.	Hasnul Suhaimi Osman Sitorus Setia Untung Arimuladi, S.H., M.Hum. Prof. Dr. Supandi, S.H., M.Hum.	: Independent Commissioners
Komisaris :	Prof. Ginandjar Kartasasmita Djauhar Maulidi, S.E., MBA Erwin Ciputra Jendral Polisi (Purn) Drs. Sutanto	Prof. Ginandjar Kartasasmita Djauhar Maulidi, S.E., MBA Erwin Ciputra Jendral Polisi (Purn) Drs. Sutanto	Djauhar Maulidi, S.E., MBA Prof. Ginandjar Kartasasmita Jendral Polisi (Purn) Drs. Sutanto -	: Commissioners
Presiden Direktur :	Michael	Michael	Romi Novan Indrawan	: President Director
Wakil Presiden Direktur :	-	-	Rafael Nityudo	: Vice President Director
Direktur :	Kartika Hendrawan	Kartika Hendrawan	Aldi Rakhmatillah	: Director
Direktur Keuangan :	Ruddy Santoso	Ruddy Santoso	Ruddy Santoso	: Finance Director
Direktur :	Meinar Kusumastuti	Meinar Kusumastuti	Pankaj Motilal	: Director
Direktur :	Iman Darus Hikhman	Iman Darus Hikhman	-	: Director
Audit Komite, Resiko & Kepatuhan				The Audit, Risk & Compliance Committee
Ketua :	Osman Sitorus	Osman Sitorus	Osman Sitorus	: Chairman
Anggota :	Sahat Pardede M. Oka Lesmana Firdauzi Madelin A. Hardjapamekas -	Sahat Pardede M. Oka Lesmana Firdauzi Madelin A. Hardjapamekas -	Sahat Pardede Desy Utami Lestari Pardanus Adrianus Bayu Mahendra M. Oka Lesmana Firdauzi Abdul Fatir	: Members
Sekretaris Perusahaan :	Anto Broto	Anto Broto	Anto Broto	: Corporate Secretary
Audit Internal :	Muhammad Faisal Erlantara	Muhammad Faisal Erlantara	Haryanto Ginting	: Internal Audit

b. Penawaran Umum Efek Perusahaan

Pada tanggal 21 Mei 1990, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif untuk melakukan penawaran umum perdana atas 4.500.000 saham dari 13.500.000 saham yang ditempatkan dengan nilai nominal Rp 1.000 per saham. Selanjutnya, Perusahaan menerbitkan saham bonus dengan perbandingan 1:1 pada bulan November 1994, saham bonus dengan perbandingan 9:10 pada bulan Maret 1998 dan melakukan pemecahan saham pada tahun 1998, sehingga jumlah saham diterbitkan meningkat menjadi 102.600.000 saham dengan nilai nominal Rp 500 per saham.

Pada tahun 2009, Perusahaan mengurangi jumlah saham beredar melalui pembelian kembali saham sebanyak 1.739.500 lembar.

Pada bulan Februari 2012, Perusahaan melakukan pemecahan nilai nominal saham dari semula sebesar Rp 500 menjadi sebesar Rp 50 per saham, sehingga jumlah modal ditempatkan dan disetor meningkat dari 100.860.500 lembar saham menjadi 1.008.605.000 lembar saham.

b. Public Offering of Shares of the Company

On May 21, 1990, the Company obtained an effective statement to offer 4,500,000 of the 13,500,000 issued shares to the public in Initial Public Offering with a par value of Rp 1,000 per share. Since then, a 1:1 share bonus in November 1994, a 9:10 share bonus in March 1998 and a stock split in 1998 have resulted in an increase of issued shares to 102,600,000 with a par value of Rp 500 per share.

In 2009, the Company reduced its issued capital stock by 1,739,500 shares through the share buyback.

In February 2012, the Company changed the par value from Rp 500 to Rp 50 per share, thus increasing the number of issued and paid-up capital stocks from 100,860,500 shares to 1,008,605,000 shares.

Pada tahun 2020, Perusahaan mengurangi jumlah saham beredar melalui pembelian kembali saham sebanyak 16.940.500 lembar saham (Catatan 24).

In 2020, the Company reduced its issued capital stock by 16,940,500 shares through the share buyback (Note 24).

Selama periode dari tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan 4 Juni 2024, Perusahaan melakukan pengalihan saham hasil *buyback* (saham treasury) sebanyak 16.940.500 saham kepada masyarakat untuk mendukung likuiditas Perusahaan. Keuntungan dari jumlah pengalihan saham hasil *buyback* disajikan dalam ekuitas sebagai tambahan modal di setor.

During the period from May 15, 2024 to June 4, 2024, the Company transferred 16,940,500 shares resulting from the buyback (treasury shares), to the public to support the Company's liquidity. The gains from the transfer of shares resulting from a buyback are presented in equity as additional paid-in capital.

Pada tanggal 30 Juni 2024, 31 Desember 2023 dan 2022, seluruh saham Perusahaan sebanyak masing-masing 1.008.605.000 saham, 991.664.500 saham dan 991.664.500 saham tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) (Catatan 24).

As of June 30, 2024, December 31, 2023 and 2022 all of the Company's 1,008,605,000 shares, 991,664,500 shares and 991,664,500 shares, respectively, are listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) (Note 24).

c. Entitas Anak yang Dikonsolidasi

Perusahaan secara langsung dan tidak langsung memiliki entitas anak berikut:

c. Consolidated Subsidiaries

The Company has direct and indirect ownership in the following subsidiaries:

Anak Perusahaan/ Subsidiaries	Domisili/ Domicile	Jenis Usaha/ Nature of Business	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership			Tahun Beroperasi Sesuai Komersial/ Start of Commercial Operations	Jumlah Aset Sebelum Eliminasi/ Total Assets Before Elimination		
			30 Juni/ June 30,	31 Desember/ December 31,	31 Desember/ December 31,		30 Juni/ June 30,	31 Desember/ December 31,	31 Desember/ December 31,
			2024	2023	2022		2024	2023	2022
			%	%	%		US\$ 000	US\$ 000	US\$ 000
PTP Investments Pte. Ltd. (PTPTS)	Singapura/ Singapore	Investasi/ Investment	100,00%	100,00%	100,00%	Tidak aktif/ Domant	3	3	3
PT Kinarya Bangun Sesama (PTKBS) (dih/ formerly PT Petrosea Kalimantan (PTPK))	Tangerang Selatan/ South Tangerang	Pertanian, industri pengolahan dan pertambangan/ Agriculture, processing industry and trading	99,99%	99,99%	99,80%	2021	995	1.055	1.107
PT POSB Infrastructure Indonesia (PTPII)	Tangerang Selatan/ South Tangerang	Pengelolaan pelabuhan khusus/ Special port management	99,80%	99,80%	99,80%	2015	1.911	1.854	1.750
PT Rekayasa Kaya Nusantara (PTRKN) (dih/ formerly PT Petrosea Rekayasa dan Konstruksi Indonesia (PTPRKI) *)	Balikpapan/ Balikpapan	Jasa rekayasa/ Engineering services	99,90%	99,90%	99,90%	2022	406	255	320
PT Karya Bhumi Lestari (PTKBL)	Tangerang Selatan/ South Tangerang	Jasa penunjang perusahaan pertambangan/ Support mining companies services	99,99%	99,99%	99,99%	2018	66.375	77.456	92.640
PT Kuala Pelabuhan Indonesia (PTKPI)	Jakarta Selatan/ South Jakarta	Operasi pelabuhan, transportasi, contracting (jalan) dan jasa rendering/ Port operation, transportation, contracting (roads) and the rendering of services	95,00%	95,00%	95,00%	1995	12.558	14.082	13.894
Petros Solution Pty Ltd (PSA)	Australia/ Australia	Solution provider dalam bidang geologi, pertambangan, rekayasa dan konstruksi/ Solution provider in geology, mining & EFC	100,00%	100,00%	100,00%	2021	3.909	4.894	5.308
PT Kemilau Mulia Sakti (PTKMS)	Tangerang Selatan/ South Tangerang	Tambang batu bara/ Coal Mining	99,99%	99,99%	-	2023	11.691	32.329	-
Kepemilikan tidak langsung melalui entitas anak/ Indirect ownership through subsidiary									
PT Mahaka Industri Perdana (PTMIP) **)	Tangerang Selatan/ South Tangerang	Pertambangan, perindustrian, agrobisnis, perdagangan umum/ Mining, industry, agrobusiness, general trading	51,25%	51,25%	51,25%	1994	1.390	1.335	1.230
PT Cristian Eka Pratama (PTCEP) ***)	Tangerang Selatan/ South Tangerang	Tambang batu bara/ Coal mining	99,98%	99,90%	-	2023	45.014	43.370	-

*) Sedang tidak menjalankan kegiatan usaha secara komersial atau tidak aktif beroperasi. / Currently not performing business activities commercially or not actively operating.

***) Pemilikan tidak langsung melalui PTPII sebesar 51,25%. / Indirect ownership through PTPII of 51,25%.

****) Pemilikan tidak langsung melalui PTKMS sebesar 99,98% dan PTKBL sebesar 0,02%. / Indirect ownership through PTKMS of 99,98% and PTKBL of 0,02%.

Berdasarkan Akta No. 17 tanggal 6 Agustus 2015, Perusahaan melalui entitas anak, PTPII, telah mengakuisisi 51,25% saham dari PTMIP, yang berdomisili di Tangerang Selatan. Akuisisi dilakukan untuk memperkuat lini bisnis Perusahaan. *Goodwill* yang timbul dari transaksi akuisisi ini sebesar US\$ 781 ribu (Catatan 14).

Based on Deed No. 17 dated August 6, 2015, the Company through its subsidiary, PTPII, has acquired 51.25% shares of PTMIP, a Company domiciled in South Tangerang. Acquisition was done to strengthen the Company's business lines. Goodwill arising from the acquisition amounted to US\$ 781 thousand (Note 14).

Pada tanggal 24 Maret 2017, Perusahaan mendirikan entitas anak baru, PTPRKI dan PTKBL dengan kepemilikan saham masing-masing sebesar 99,90% dan 99,00%, sisanya sebesar 0,10% saham PTPRKI dan 1% saham PTKBL dimiliki oleh PTPII.

On March 24, 2017, the Company established new subsidiaries, PTPRKI and PTKBL with 99.90% and 99.00% ownership interest, respectively, the remaining ownership 0.10% shares of PTPRKI and 1% shares of PTKBL were owned by PTPII.

Pada tanggal 28 Juni 2018, Perusahaan telah mengakuisisi 95% saham PTKPI, yang berdomisili di Jakarta Selatan. Akuisisi ini merupakan kombinasi bisnis antara entitas pengendali. Selisih antara jumlah imbalan yang ditransfer dengan jumlah tercatat aset bersih PTKPI sebesar US\$ 5.421 ribu disajikan dalam ekuitas sebagai tambahan modal disetor.

On June 28, 2018, the Company has acquired 95% shares of PTKPI, a Company domiciled in South Jakarta. The acquisition constituted business combination among entities under common control. The difference between the amount transferred and the carrying amount of net assets of PTKPI amounted to US\$ 5,421 thousand was presented in equity as additional paid-in capital.

Pada tanggal 8 Maret 2021, Perusahaan mendirikan entitas anak baru, PSA yang berkedudukan di Australia dengan kepemilikan saham sebesar 100%.

On March 8, 2021, the Company established a new subsidiary, PSA which located in Australia with 100% ownership of shares.

Pada tanggal 27 Agustus 2021, melalui keputusan sirkuler para pemegang saham PTKBL, Perusahaan meningkatkan jumlah modal disetor PTKBL melalui skema *inbreng* benda bergerak sebesar US\$ 17.811 ribu sehingga total modal disetor PTKBL menjadi US\$ 20.406 ribu. Tidak ada perubahan komposisi kepemilikan saham Perusahaan pada PTKBL sebesar 99,99%, sisa kepemilikan sebesar 0,01% tetap dimiliki oleh PTPII.

On August 27, 2021, through a circular decision of the shareholders of PTKBL, the Company increased the total paid-up capital of PTKBL through the *inbreng* moving assets scheme amounted to US\$ 17,811 thousand, hence the total paid-up capital of PTKBL is US\$ 20,406 thousand. There is no change in the composition of the Company's share ownership in PTKBL of 99.99%, the remaining 0.01% remains owned by PTPII.

Pada tanggal 30 Agustus 2021, melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang disahkan dengan Akta No. 22 yang dibuat dihadapan notaris Ungke Mulawanti, S.H., M.Kn., PT Petrosea Rekayasa dan Konstruksi Indonesia (PTPRKI) resmi berubah nama menjadi PT Rekayasa Karya Nusantara (PTRKN) dan perubahan tempat kedudukan semula berkedudukan di Tangerang Selatan menjadi berkedudukan di Kota Balikpapan. Jumlah kepemilikan saham Perusahaan tidak berubah baik sebelum atau sesudah pergantian nama, yaitu 99,90%.

On August 30, 2021, through the decision of the General Meeting of Shareholders which was ratified by Deed No. 22 made before a notary Ungke Mulawanti, S.H., M.Kn., PT Petrosea Rekayasa dan Konstruksi Indonesia (PTPRKI) officially changed its name to PT Rekayasa Karya Nusantara (PTRKN) and the change of domicile, previously in South Tangerang to become in Balikpapan City. The Company's total shareholding did not change either before or after the name change, which was 99.90%.

Pada tanggal 1 September 2021, melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang disahkan dengan akta notaris No. 1 yang dibuat dihadapan notaris Ungke Mulawanti, S.H., M.Kn., PT Petrosea Kalimantan (PTPK) resmi berubah nama menjadi PT Kinarya Bangun Sesama (PTKBS) dan perubahan tempat kedudukan semula berkedudukan di Kota Balikpapan menjadi berkedudukan di Tangerang Selatan. Jumlah kepemilikan saham Perusahaan tidak berubah baik sebelum atau sesudah pergantian nama, yaitu 99,80%.

On September 1, 2021, through the decision of the General Meeting of Shareholders which was ratified by notarial deed No. 1 made before a notary Ungke Mulawanti, S.H., M.Kn., PT Petrosea Kalimantan (PTPK) officially changed its name to PT Kinarya Bangun Sesama (PTKBS) and the change of domicile, previously in Balikpapan City to be changed in South Tangerang. The Company's total shareholding did not change either before or after the name change, which was 99.80%.

Pada tanggal 16 September 2021, Perusahaan meningkatkan jumlah modal disetor PSA sebesar AU\$ 5.003 ribu (setara dengan US\$ 3.627 ribu).

On September 16, 2021, the Company increased the total paid-up capital of PSA by AU\$ 5,003 thousand (equivalent to US\$ 3,627 thousand).

Pada tanggal 9 Februari 2022, melalui keputusan sirkuler para pemegang saham PTKBS, Perusahaan meningkatkan jumlah modal disetor PTKBS sebesar Rp 17,5 miliar sehingga total modal disetor menjadi Rp 18 miliar (setara dengan US\$ 1.251 ribu). Terdapat perubahan komposisi kepemilikan saham Perusahaan pada PTKBS dari yang sebelumnya sebesar 99,80% menjadi sebesar 99,99%.

On February 9, 2022, through a circular decision of the shareholders of PTKBS, the Company increased the total paid-up capital of PTKBS by Rp 17.5 billion, hence the total paid-up capital of PTKBS is Rp 18 billion (equivalent to US\$ 1,251 thousand). There is a change in the composition of the Company's share ownership in PTKBS from previously 99.80% to 99.99%.

Pada tanggal 18 Agustus 2022, Perusahaan meningkatkan jumlah modal disetor PSA sebesar AU\$ 4.638 ribu (setara dengan US\$ 3.298 ribu).

On August 18, 2022, the Company increased the total paid-up capital of PSA by AU\$ 4,638 thousand (equivalent to US\$ 3,298 thousand).

Pada tanggal 28 Desember 2022, Perusahaan meningkatkan jumlah modal disetor PSA sebesar AU\$ 220 ribu (setara dengan US\$ 148 ribu).

On December 28, 2023, the Company increased the total paid-up capital of PSA by AU\$ 220 thousand (equivalent to US\$ 148 thousand).

Pada tanggal 10 Mei 2023, Perusahaan meningkatkan jumlah modal disetor PSA sebesar AU\$ 3.610 ribu (setara dengan US\$ 2.437 ribu).

On May 10, 2023, the Company increased the total paid-up capital of PSA by AU\$ 3,610 thousand (equivalent to US\$ 2,437 thousand).

Pada tanggal 23 Juni 2023, Perusahaan dan PTKBL telah mengakuisisi 100% saham di PT Kemilau Mulia Sakti (PTKMS) dan entitas anak, PT Cristian Eka Pratama (PTCEP) yang berdomisili di Tangerang Selatan. Akuisisi dilakukan untuk memperkuat lini bisnis Perusahaan. *Goodwill* yang timbul dari transaksi akuisisi ini sebesar US\$ 19 juta (Catatan 14).

On June 23, 2023, the Company and PTKBL acquired 100% shares in PT Kemilau Mulia Sakti (PTKMS) and its subsidiary, PT Cristian Eka Pratama (PTCEP) domiciled in South Tangerang. Acquisition was done to strengthen the Company's business lines. Goodwill arising from the acquisition amounted to US\$ 19 million (Note 14).

Pada tahun 2023, Perusahaan dan PTKBL menyetorkan dana kepada PTKMS sejumlah Rp 245 miliar (setara dengan US\$ 15,8 juta) sehingga jumlah modal disetor kepada PTKMS adalah sebesar Rp 280,6 miliar (setara dengan US\$ 18,3 juta).

In 2023, the Company and PTKBL injected funds to PTKMS amounted to Rp 245 billion (equivalent to US\$ 15.8 million) resulting the total paid-up capital to PTKMS amounted to Rp 280.6 billion (equivalent to US\$ 18.3 million).

Pada tanggal 31 Agustus 2023, PTKMS menyetorkan dana kepada PTCEP sejumlah Rp 245 miliar (setara dengan US\$ 15,8 juta), sehingga jumlah modal disetor kepada PTCEP adalah sebesar Rp 250 miliar (setara dengan US\$ 16,2 juta).

On August 31, 2023, PTKMS deposited funds to PTCEP amounted to Rp 245 billion (equivalent to US\$ 15.8 million) resulting the total paid-up capital to PTCEP amounted to Rp 250 billion (equivalent to US\$ 16.2 million).

Pada tanggal 30 November 2023, Perusahaan meningkatkan jumlah modal disetor PSA sebesar AU\$ 6.578 ribu (setara dengan US\$ 4.256 ribu).

On November 30, 2023, the Company increased the total paid-up capital of PSA by AU\$ 6,578 thousand (equivalent to US\$ 4,256 thousand).

d. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur No. 503/1175/IUP-OP/DPMPPTSP/VII/2018 pada tanggal 23 Juli 2018, PTCEP telah memperoleh persetujuan untuk perubahan izin usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi dengan luas 5.273 Ha. PTCEP mempunyai hak untuk melakukan kegiatan konstruksi, produksi, pengangkutan dan penjualan serta pengolahan dan pemurnian batubara yang akan berakhir pada tanggal 22 Juli 2038.

Izin tersebut terakhir kali diubah melalui Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 503/7380/IUP-OP/DPMPPTSP/XII/2019 tanggal 9 Desember 2019 untuk perubahan luas IUP seluas 4.776 Ha yang akan berakhir pada tanggal 22 Juli 2038.

d. Production Operation Mining Business Permit

Based on the Decree of the Head of Investment Office and One-Stop Integrated Services of East Kalimantan Province No. 503/1175/IUP-OP/DPMPPTSP/VII/2018 dated July 23, 2018, PTCEP obtained an approval for a change of its mining exploration right to become mining production right with area 5,273 Ha. PTCEP has rights for construction, production, hauling and selling which included coal processing and refining which will expire on July 22, 2038.

The permit was last amended through East Kalimantan Governor Decree No. 503/7380/IUP-OP/DPMPPTSP/XII/2019 dated December 9, 2019 for changes in IUP area of 4,776 Ha which will expire on July 22, 2038.

2. PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN BARU DAN REVISI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK)

a. Amendemen/Penyesuaian Standar yang Berlaku Efektif pada Tahun Berjalan

Dalam periode berjalan, Grup telah menerapkan sejumlah amendemen/penyesuaian PSAK yang relevan dengan operasinya dan efektif untuk periode akuntansi yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2024, yaitu:

- PSAK 201 (sebelumnya PSAK 1) (amendemen) *Penyajian Laporan Keuangan: Penyajian Laporan Keuangan terkait Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan*
- PSAK 201 (sebelumnya PSAK 1) (amendemen) *Penyajian Laporan Keuangan: Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang*
- PSAK 207 (sebelumnya PSAK 2) (amendemen) *Laporan Arus Kas dan PSAK 107 (sebelumnya PSAK 60) (amendemen) Instrumen Keuangan: Pengungkapan: Pengaturan Pembiayaan Pemasok*
- PSAK 116 (sebelumnya PSAK 73) (amendemen) *Sewa: Liabilitas Sewa dalam Jual Beli dan Sewa-balik*

2. ADOPTION OF NEW AND REVISED STATEMENTS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS ("PSAK")

a. Amendments/Improvements to Standards Effective in the Current Year

In the current period, the Group has applied a number of amendments/improvements to PSAK that are relevant to its operations and effective for accounting period beginning on or after January 1, 2024, which are:

- PSAK 201 (previously PSAK 1) (amendment) *Presentation of financial statements: Non-current Liabilities with Covenants*
- PSAK 201 (previously PSAK 1) (amendment) *Presentation of financial statements: Classification of Liabilities as Current or Non-current*
- PSAK 207 (previously PSAK 2) (amendment) *Statement of Cash Flows and PSAK 107 (previously PSAK 60) (amendment) Financial Instruments: Disclosures: Supplier Finance Arrangements*
- PSAK 116 (previously PSAK 73) (amendment) *Lease: Lease Liabilities in sale and leaseback*

Mulai tanggal 1 Januari 2024, referensi terhadap masing-masing PSAK dan ISAK akan diubah sebagaimana diumumkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK-IAI").

Penerapan atas amendemen/penyesuaian tersebut tidak mengakibatkan perubahan atas kebijakan akuntansi Grup dan tidak memiliki pengaruh signifikan atas pengungkapan atau jumlah yang dicatat di dalam laporan keuangan konsolidasian pada periode berjalan dan tahun-tahun sebelumnya.

b. Standar dan Amendemen/Penyesuaian Standar Telah Diterbitkan Tapi Belum Diterapkan

Pada tanggal persetujuan laporan keuangan konsolidasian interim dan amendemen-amendemen atas PSAK yang relevan bagi Grup, yang telah diterbitkan namun belum berlaku efektif, dengan penerapan dini diijinkan, adalah sebagai berikut:

Efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2025

- PSAK 221 (sebelumnya PSAK 10) (amendemen) *Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing: Kekurangan Ketertukaran*

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian interim, dampak dari amendemen-amendemen tersebut terhadap laporan keuangan konsolidasian interim tidak dapat diketahui atau diestimasi oleh manajemen.

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

a. Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan konsolidasian interim Grup disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan ketentuan akuntansi di bidang pasar modal yaitu Peraturan No. VIII.G.7 mengenai "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik" yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK").

b. Dasar Penyusunan

Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian interim adalah biaya historis, kecuali instrumen keuangan tertentu yang diukur pada nilai wajar pada setiap akhir periode pelaporan, yang dijelaskan dalam kebijakan akuntansi di bawah ini.

Beginning January 1, 2024, references to the individual PSAKs and ISAKs will be changed as published by Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK-IAI").

The adoption of these amendments/improvements does not result in changes to the Group's accounting policies and has no material impact to disclosures or on the amounts recognized in the current period and prior years consolidated financial statements.

b. Standard and Amendments/Improvements to Standards Issued not yet Adopted

At the date of authorization of these interim consolidated financial statements, the following amendments to PSAK relevant to the Group were issued but not effective, with early application permitted:

Effective for period beginning on or after January 1, 2025

- PSAK 221 (previously PSAK 10) (amendment) *The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates: Lack of Exchangeability*

As of the issuance date of the interim consolidated financial statements, the effects of adopting these amendments on the interim consolidated financial statements are not known nor reasonably estimable by management.

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION

a. Statement of Compliance

The interim consolidated financial statements of the Group have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards and Regulation No. VIII.G.7 regarding "Financial Statements Presentation and Disclosures of Listed or Public Company" issued by the Indonesian Financial Services Authority ("OJK").

b. Basis of Preparation

The interim consolidated financial statements have been prepared on the historical cost basis, except for certain financial instruments that are measured at fair values at the end of each reporting period, as explained in the accounting policies below.

Biaya historis umumnya didasarkan pada nilai wajar dari imbalan yang diberikan dalam pertukaran barang dan jasa.

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam suatu transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Laporan arus kas konsolidasian interim disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Direksi memiliki, pada saat persetujuan laporan keuangan konsolidasian interim, suatu ekspektasi yang memadai bahwa Grup memiliki sumber daya yang cukup untuk melanjutkan keberadaan operasinya untuk di masa yang akan datang. Sehingga, mereka melanjutkan penerapan dasar akuntansi kelangsungan usaha dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian interim.

c. Dasar Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian interim menggabungkan laporan keuangan Perusahaan dan entitas yang dikendalikan oleh Grup (termasuk entitas terstruktur). Pengendalian tercapai jika Perusahaan memiliki kekuasaan atas *investee*; eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee*; dan kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas *investee* untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil investor.

Perusahaan menilai kembali apakah entitas tersebut adalah *investee* jika fakta dan keadaan yang mengindikasikan adanya perubahan terhadap satu atau lebih dari tiga elemen pengendalian yang disebutkan di atas.

Ketika Perusahaan memiliki hak suara kurang dari mayoritas di-*investee*, ia memiliki kekuasaan atas *investee* ketika hak suara investor cukup untuk memberinya kemampuan praktis untuk mengarahkan aktivitas relevan secara sepihak. Perusahaan mempertimbangkan seluruh fakta dan keadaan yang relevan dalam menilai apakah hak suara Perusahaan cukup untuk memberikan Perusahaan kekuasaan, termasuk (i) ukuran kepemilikan hak suara Perusahaan relatif terhadap ukuran dan penyebaran kepemilikan pemilik hak suara lain; (ii) hak suara potensial yang dimiliki oleh Perusahaan, pemegang suara lain atau pihak lain; (iii) hak yang timbul dari pengaturan kontraktual lain; dan (iv) setiap fakta dan keadaan tambahan apapun mengindikasikan bahwa Perusahaan memiliki, atau tidak memiliki, kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas yang relevan pada saat keputusan perlu dibuat, termasuk pola suara pemilihan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebelumnya.

Historical cost is generally based on the fair value of the consideration given in exchange for goods and services.

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date.

The interim consolidated statements of cash flows are prepared using the direct method with classifications of cash flows into operating, investing and financing activities.

The Directors have, at the time of approving the interim consolidated financial statements, a reasonable expectation that the Group has adequate resources to continue in operational existence for the foreseeable future. Thus, they continue to adopt the going concern basis of accounting in preparing the interim consolidated financial statements.

c. Basis of Consolidation

The interim consolidated financial statements incorporate the financial statements of the Company and entities (including structured entities) controlled by the Group. Control is achieved where the Company has the power over the investee; is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with the investee; and has the ability to use its power to affect its returns.

The Company reassesses whether or not it controls an investee if facts and circumstances indicate that there are changes to one or more of the three elements of control listed above.

When the Company has less than a majority of the voting rights of an investee, it has power over the investee when the voting rights are sufficient to give it the practical ability to direct the relevant activities of the investee unilaterally. The Company considers all relevant facts and circumstances in assessing whether or not the Company's voting rights in an investee are sufficient to give it power, including (i) the size of the Company's holding of voting rights relative to the size and dispersion of holding of the other vote holders; (ii) potential voting rights held by the Company, other vote holders or other parties; (iii) rights arising from other contractual arrangements; and (iv) any additional facts and circumstances that indicate that the Company has, or does not have, the current ability to direct the relevant activities at the time that decisions need to be made, including voting patterns at previous General Shareholders' Meetings.

Konsolidasi entitas anak dimulai ketika Perusahaan memperoleh pengendalian atas entitas anak dan akan dihentikan ketika Perusahaan kehilangan pengendalian pada entitas anak. Secara khusus, pendapatan dan beban entitas anak diakuisisi atau dijual selama tahun berjalan termasuk dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian interim dari tanggal diperolehnya pengendalian Perusahaan sampai tanggal ketika Perusahaan berhenti untuk mengendalikan entitas anak.

Jika diperlukan, penyesuaian dapat dilakukan terhadap laporan keuangan entitas anak agar kebijakan akuntansi sesuai dengan kebijakan akuntansi Grup.

Seluruh aset dan liabilitas dalam intra Grup, ekuitas, pendapatan, biaya dan arus kas yang berkaitan dengan transaksi dalam Grup dieliminasi secara penuh pada saat konsolidasi.

Kepentingan nonpengendali di entitas anak diidentifikasi secara terpisah dari ekuitas Grup yang ada. Kepentingan pemegang saham nonpengendali yang merupakan kepentingan kepemilikan yang memberikan pemiliknya hak terhadap bagian proporsional aset bersih pada saat likuidasi pada awalnya dapat diukur sebesar nilai wajar atau bagian proporsional kepentingan nonpengendali atas nilai wajar aset bersih teridentifikasi pihak yang diakuisisi. Pilihan pengukuran dibuat untuk masing-masing akuisisi. Kepentingan nonpengendali lain awalnya diukur sebesar nilai wajar. Setelah akuisisi, jumlah tercatat kepentingan nonpengendali adalah jumlah kepentingan tersebut pada pengakuan awal ditambah bagian kepentingan nonpengendali dari perubahan selanjutnya di ekuitas.

Laba rugi dan setiap komponen penghasilan komprehensif lain diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan untuk kepentingan nonpengendali. Perusahaan juga mengatribusikan total laba komprehensif entitas anak kepada pemilik entitas induk dan kepentingan nonpengendali meskipun hal tersebut mengakibatkan kepentingan nonpengendali memiliki saldo defisit.

d. Kombinasi Bisnis

Akuisisi bisnis dicatat dengan menggunakan metode akuisisi. Imbalan yang dialihkan dalam suatu kombinasi bisnis diukur pada nilai wajar, yang dihitung sebagai hasil penjumlahan dari nilai wajar tanggal akuisisi atas seluruh aset yang dialihkan oleh Grup, liabilitas yang diakui oleh Grup kepada pemilik sebelumnya dari pihak yang diakuisisi dan kepentingan ekuitas yang diterbitkan oleh Grup dalam pertukaran pengendalian dari pihak yang diakuisisi. Biaya-biaya terkait akuisisi diakui di dalam laba rugi pada saat terjadinya.

Consolidation of a subsidiary begins when the Company obtains control over the subsidiary and ceases when the Company loses control of the subsidiary. Specifically, income and expense of a subsidiary acquired or disposed of during the year are included in the interim consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income from the date the Company gains control until the date when the Company ceases to control the subsidiary.

When necessary, adjustments are made to the financial statements of subsidiaries to bring their accounting policies in line with the Group's accounting policies.

All intra Group assets and liabilities, equity, income, expenses and cash flows relating to transactions between members of the Group are eliminated in full on consolidation.

Non-controlling interests in subsidiaries are identified separately from the Group's equity therein. Those interests of non-controlling stockholders that are present ownership interests entitling their holders to a proportionate share of net assets upon liquidation may initially be measured at fair value or at the non-controlling interests' proportionate share of the fair value of the acquiree's identifiable net assets. The choice of measurement is made on an acquisition-by-acquisition basis. Other non-controlling interests are initially measured at fair value. Subsequent to acquisition, the carrying amount of non-controlling interests is the amount of those interests at initial recognition plus the non-controlling interests' share of subsequent changes in equity.

Profit or loss and each component of other comprehensive income are attributed to the owners of the Company and to the non-controlling interest. Total comprehensive income of subsidiaries is attributed to the owners of the Company and the non-controlling interest even if this results in the non-controlling interest having a deficit balance.

d. Business Combinations

Acquisitions of businesses are accounted for using the acquisition method. The consideration transferred in a business combination is measured at fair value, which is calculated as the sum of the acquisition-date fair values of the assets transferred by the Group, liabilities incurred by the Group to the former owners of the acquiree, and the equity interests issued by the Group in exchange for control of the acquiree. Acquisition related costs are recognized in profit or loss as incurred.

Pada tanggal akuisisi, aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih diakui pada nilai wajar, kecuali untuk:

- aset atau liabilitas pajak tangguhan yang berkaitan dengan pengaturan imbalan kerja diakui dan diukur masing-masing berdasarkan PSAK 212 (sebelumnya PSAK 46) *Pajak Penghasilan* dan PSAK 219 (sebelumnya PSAK 24) *Imbalan Kerja*;
- instrumen liabilitas atau ekuitas yang berkaitan dengan perjanjian pembayaran berbasis saham dari pihak yang diakuisisi atau pengaturan pembayaran berbasis saham Grup yang dibuat untuk menggantikan pengaturan pembayaran berbasis saham dari pihak yang mengakuisisi diukur berdasarkan PSAK 102 (sebelumnya PSAK 53) *Pembayaran Berbasis Saham* pada tanggal akuisisi; dan
- aset (atau kelompok lepasan) yang diklasifikasikan sebagai yang dimiliki untuk dijual berdasarkan PSAK 105 (sebelumnya PSAK 58) *Aset Tidak Lancar yang Dikuasai untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan* diukur sesuai dengan standar tersebut.

Goodwill diukur sebagai selisih lebih dari nilai gabungan dari imbalan yang dialihkan, jumlah setiap kepentingan nonpengendali pada pihak diakuisisi dan nilai wajar pada tanggal akuisisi kepentingan ekuitas yang sebelumnya dimiliki oleh pihak pengakuisisi pada pihak diakuisisi (jika ada) atas jumlah neto dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih pada tanggal akuisisi. Jika, setelah penilaian kembali, jumlah neto dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih pada tanggal akuisisi melebihi jumlah imbalan yang dialihkan, jumlah dari setiap kepentingan nonpengendali pada pihak diakuisisi dan nilai wajar pada tanggal akuisisi kepentingan ekuitas yang sebelumnya dimiliki oleh pihak pengakuisisi pada pihak diakuisisi (jika ada), selisih lebih diakui segera dalam laba rugi sebagai keuntungan pembelian dengan diskon.

Bila imbalan yang dialihkan oleh Grup dalam suatu kombinasi bisnis termasuk aset atau liabilitas yang berasal dari pengaturan imbalan kontinjen (*contingent consideration arrangement*), imbalan kontinjen tersebut diukur pada nilai wajar pada tanggal akuisisi dan termasuk sebagai bagian dari imbalan yang dialihkan dalam suatu kombinasi bisnis.

At the acquisition date, the identifiable assets acquired and the liabilities assumed are recognized at their fair value, except that:

- deferred tax assets or liabilities and assets or liabilities related to employee benefit arrangements are recognized and measured in accordance with PSAK 212 (previously PSAK 46) *Income Taxes* and PSAK 219 (previously PSAK 24) *Employee Benefits*, respectively;
- liabilities or equity instruments related to share-based payment arrangements of the acquiree or share-based payment arrangements of the Group entered into to replace share-based payment arrangements of the acquirer are measured in accordance with PSAK 102 (previously PSAK 53) *Shared Based Payment* at the acquisition date; and
- assets (or disposal groups) that are classified as held for sale in accordance with PSAK 105 (previously PSAK 58) *Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations* are measured in accordance with that standard.

Goodwill is measured as the excess of the sum of the consideration transferred, the amount of any non-controlling interests in the acquiree, and the fair value of the acquirer's previously held equity interest in the acquiree (if any) over the net of the acquisition-date amounts of the identifiable assets acquired and the liabilities assumed. If, after the reassessment, the net of the acquisition-date amounts of the identifiable assets acquired and liabilities assumed exceeds the sum of the consideration transferred, the amount of any non-controlling interests in the acquiree and the fair value of the acquirer's previously held interest in the acquiree (if any), the excess is recognized immediately in profit or loss as a bargain purchase gain.

When the consideration transferred by the Group in a business combination includes assets or liabilities resulting from a contingent consideration arrangement, the contingent consideration is measured at its acquisition-date fair value and included as part of the consideration transferred in a business combination.

e. Transaksi dan Penjabaran Laporan Keuangan dalam Mata Uang Asing

Laporan keuangan individu masing-masing entitas Grup diukur dan disajikan dalam mata uang dari lingkungan ekonomi utama dimana entitas beroperasi (mata uang fungsional). Laporan keuangan konsolidasian interim dari Grup disajikan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat (US\$) yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan dan mata uang penyajian untuk laporan keuangan konsolidasian interim.

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian interim setiap entitas individual Grup, transaksi dalam mata uang asing selain mata uang fungsional entitas (mata uang asing) diakui pada kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada setiap akhir periode pelaporan, pos moneter dalam valuta asing dijabarkan kembali pada kurs yang berlaku pada tanggal tersebut. Pos-pos nonmoneter yang diukur pada nilai wajar dalam valuta asing dijabarkan kembali pada kurs yang berlaku pada tanggal ketika nilai wajar ditentukan. Pos nonmoneter diukur dalam biaya historis dalam valuta asing yang tidak dijabarkan kembali.

Selisih kurs diakui dalam laba rugi pada periode saat terjadinya kecuali untuk:

- Selisih kurs atas transaksi yang ditetapkan untuk tujuan lindung nilai risiko valuta asing tertentu;
- Selisih nilai tukar yang muncul dari penjabaran kembali pos-pos nonmoneter, di mana keuntungan atau kerugian diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Untuk pos-pos nonmoneter tersebut, setiap keuntungan atau kerugian dari komponen pertukaran tersebut juga diakui dalam penghasilan komprehensif lain.

Untuk tujuan penyajian laporan keuangan konsolidasian interim, aset dan liabilitas dari entitas anak, kecuali PTKPI, dijabarkan ke dalam Dolar Amerika Serikat dengan menggunakan kurs yang berlaku pada akhir periode pelaporan. Pos penghasilan dan beban dijabarkan menggunakan kurs rata-rata untuk periode tersebut, kecuali kurs berfluktuasi secara signifikan selama periode tersebut, dalam hal ini kurs yang berlaku pada tanggal transaksi yang digunakan. Selisih kurs yang timbul diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan diakumulasi dalam ekuitas (dan diatribusikan pada kepentingan nonpengendali).

e. Foreign Currency Transactions and Translation

The individual financial statements of each Group entity are measured and presented in the currency of the primary economic environment in which the entity operates (its functional currency). The interim consolidated financial statements of the Group are presented in U.S. Dollar (US\$), which is the functional currency of the Company and the presentation currency for the interim consolidated financial statements.

In preparing the interim consolidated financial statements of each individual Group entity, transactions in currencies other than the entity's functional currency (foreign currencies) are recognized at the rates of exchange prevailing at the dates of the transactions. At the end of each reporting period, monetary items denominated in foreign currencies are retranslated at the rates prevailing at that date. Non-monetary items carried at fair value that are denominated in foreign currencies are retranslated at the rates prevailing at the date when the fair value was determined. Non-monetary items that are measured in terms of historical cost in a foreign currency are not retranslated.

Exchange differences are recognized in profit or loss in the period in which they arise except for:

- Exchange differences on transactions entered into in order to hedge certain foreign currency risks;
- Exchange differences arising on the retranslation of non-monetary items carried at fair value, of which gains and losses are recognized in other comprehensive income. For such non-monetary items, any exchange component of that gain or loss is also recognized in other comprehensive income.

For the purpose of presenting these interim consolidated financial statements, the assets and liabilities of the subsidiaries, except PTKPI, are translated into U.S. Dollar using exchange rates prevailing at the end of each reporting period. Income and expense items are translated at the average exchange rates for the period, unless exchange rates fluctuate significantly during that period, in which case the exchange rates at the dates of the transactions are used. Exchange differences arising, if any, are recognized in other comprehensive income and accumulated in equity (and attributed to non-controlling interests as appropriate).

Goodwill dan penyesuaian nilai wajar aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang dialihkan melalui akuisisi dari kegiatan usaha luar negeri diperlakukan sebagai aset dan liabilitas dari kegiatan usaha luar negeri dan dijabarkan pada kurs yang berlaku pada akhir periode pelaporan. Selisih kurs yang timbul diakui pada penghasilan komprehensif lain.

Goodwill and fair value adjustments to identifiable assets acquired and liabilities assumed through acquisition of a foreign operation are treated as assets and liabilities of the foreign operation and translated at the rate of exchange prevailing at the end of each reporting period. Exchange differences arising are recognized in other comprehensive income.

f. Transaksi Pihak-pihak Berelasi

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Grup (entitas pelapor):

- a. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - i. memiliki pengendalian atau ventura bersama entitas pelapor;
 - ii. memiliki pengaruh signifikan entitas pelapor; atau
 - iii. personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.
- b. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lainnya).
 - ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
 - iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
 - iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
 - v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.

f. Transactions with Related Parties

A related party is a person or entity that is related to the Group (the reporting entity):

- a. A person or a close member of that person's family is related to the reporting entity if that person:
 - i. has control or joint venture over the reporting entity;
 - ii. has significant influence over the reporting entity; or
 - iii. is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.
- b. An entity is related to the reporting entity if any of the following conditions applies:
 - i. The entity, and the reporting entity are members of the same Group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others).
 - ii. One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a Group of which the other entity is a member).
 - iii. Both entities are joint ventures of the same third party.
 - iv. One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity.
 - v. The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity, or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity.

- vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).
- vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).
- viii. Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

Transaksi signifikan yang dilakukan dengan pihak-pihak berelasi, baik yang dilakukan dengan kondisi dan persyaratan yang sama dengan pihak ketiga maupun tidak, diungkapkan pada laporan keuangan konsolidasian interim (Catatan 35).

g. Instrumen Keuangan

Aset keuangan

Grup mengklasifikasikan aset keuangan dalam ketogori berikut ini:

- Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi: dan
- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi ("FVTPL").

Aset keuangan dan liabilitas keuangan pada awalnya diukur pada nilai wajar. Biaya transaksi yang terkait langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan dan liabilitas keuangan ditambahkan atau dikurangkan dari nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan, jika diperlukan, pada pengakuan awal.

Klasifikasi aset keuangan

Instrumen utang selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi, jika memenuhi kedua kondisi berikut ini:

- aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

- vi. The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a).
- vii. A person identified in (a) (i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or a parent of the entity).
- viii. The entity, or any member of a Group of which it is a part, provides key management personnel services to the reporting entity or to the parent of the reporting entity.

Significant transactions with related parties, whether or not made at similar terms and conditions as those done with third parties, are disclosed in the interim consolidated financial statements (Note 35).

g. Financial Instrument

Financial assets

The Group classifies its financial assets into the following categories:

- Financial assets measured at amortized costs; and
- Financial assets measured at fair value through profit or loss ("FVTPL").

Financial assets and financial liabilities are initially measured at fair value. Transaction costs that are directly attributable to the acquisition or issue of financial assets and financial liabilities are added to or deducted from the fair value of the financial assets and financial liabilities, as appropriate, on initial recognition.

Classification of financial assets

Debt instruments that meet the following conditions are subsequently measured at amortized cost:

- the financial asset is held within a business model whose objective is to hold financial assets in order to collect contractual cash flows; and
- the contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.

Seluruh aset keuangan lain selanjutnya diukur pada FVTPL.

Meskipun telah ditetapkan sebelumnya, Grup dapat menetapkan pilihan tidak terbatalkan pada saat pengakuan awal aset keuangan sebagai berikut:

- menyajikan perubahan selanjutnya nilai wajar investasi pada instrumen ekuitas dalam penghasilan komprehensif lain jika kriteria tertentu dipenuhi; dan
- menetapkan instrumen utang yang memenuhi kriteria biaya perolehan diamortisasi atau FVTOCI diukur pada FVTPL, jika penetapan itu mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan inkonsistensi pengukuran dan pengakuan.

Biaya perolehan diamortisasi dan metode suku bunga efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan dalam menghitung biaya perolehan instrumen utang dan dalam pengalokasian pendapatan bunga selama periode yang relevan.

Untuk aset keuangan selain aset keuangan yang mengalami penurunan nilai kredit yang berasal atau berasal (yaitu aset yang mengalami penurunan nilai kredit pada saat pengakuan awal), suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan kas masa depan (termasuk imbalan dan komisi yang dibayarkan atau diterima yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi dan premium atau diskonto lainnya), tidak termasuk kerugian kredit ekspektasian, selama perkiraan umur instrumen utang, atau, jika lebih tepat periode yang lebih pendek, terhadap jumlah tercatat bruto dari instrumen utang pada saat pengakuan awal. Untuk aset keuangan yang mengalami penurunan nilai kredit yang berasal atau berasal, suku bunga efektif yang disesuaikan dengan kredit dihitung dengan mendiskontokan perkiraan arus kas masa depan, termasuk perkiraan kerugian kredit, ke biaya perolehan diamortisasi instrumen utang pada pengakuan awal.

Biaya perolehan diamortisasi aset keuangan adalah jumlah aset keuangan yang diukur saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh tempo aset keuangan, disesuaikan dengan penyisihan kerugian. Selain itu, jumlah tercatat bruto aset keuangan adalah biaya perolehan diamortisasi sebelum disesuaikan dengan penyisihan kerugian.

By default, all other financial assets are subsequently measured at FVTPL.

Despite the foregoing, the Group may make the following irrevocable election/designation at initial recognition of a financial asset:

- to present subsequent changes in fair value of an equity investment in other comprehensive income if certain criteria are met; and
- to designate a debt investment that meets the amortized cost or FVTOCI criteria as measured at FVTPL if doing so eliminates or significantly reduces an accounting mismatch.

Amortized cost and effective interest method

The effective interest method is a method of calculating the amortized cost of a debt instrument and of allocating interest income over the relevant period.

For financial assets other than purchased or originated credit-impaired financial assets (i.e. assets that are credit-impaired on initial recognition), the effective interest rate is the rate that exactly discounts estimated future cash receipts (including all fees and points paid or received that form an integral part of the effective interest rate, transaction costs and other premiums or discounts) excluding expected credit losses, through the expected life of the debt instrument, or, where appropriate, a shorter period, to the gross carrying amount of the debt instrument on initial recognition. For purchased or originated credit-impaired financial assets, a credit-adjusted effective interest rate is calculated by discounting the estimated future cash flows, including expected credit losses, to the amortized cost of the debt instrument on initial recognition.

The amortized cost of a financial asset is the amount at which the financial asset is measured at initial recognition minus the principal repayments, plus the cumulative amortization using the effective interest method of any difference between that initial amount and the maturity amount, adjusted for any loss allowance. On the other hand, the gross carrying amount of a financial asset is the amortized cost of a financial asset before adjusting for any loss allowance.

Pendapatan bunga diakui dengan menggunakan metode suku bunga efektif untuk instrumen utang yang selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dan pada FVTOCI.

Untuk instrumen keuangan lain, kecuali aset keuangan yang dibeli atau berasal dari aset keuangan memburuk, pendapatan bunga dihitung dengan menerapkan suku bunga efektif terhadap jumlah tercatat bruto aset keuangan.

Untuk aset keuangan yang berasal dari aset keuangan memburuk, pendapatan bunga diakui dengan menerapkan suku bunga efektif terhadap biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan tersebut. Jika pada periode pelaporan keuangan selanjutnya, risiko kredit aset keuangan tersebut membaik sehingga aset keuangan tidak lagi mengalami penurunan nilai kredit, maka pendapatan bunga diakui dengan menerapkan suku bunga efektif terhadap jumlah tercatat bruto aset keuangan.

Untuk aset keuangan yang mengalami penurunan nilai kredit yang berasal atau berasal, Grup mengakui pendapatan bunga dengan menerapkan suku bunga efektif yang disesuaikan dengan kredit ke biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan sejak pengakuan awal. Perhitungan tidak kembali ke basis bruto bahkan jika risiko kredit dari aset keuangan selanjutnya membaik sehingga aset keuangan tidak lagi mengalami penurunan nilai kredit.

Pendapatan bunga diakui dalam laba rugi.

Aset keuangan pada FVTPL

Aset keuangan yang tidak memenuhi kriteria yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau FVTOCI diukur pada FVTPL, khususnya:

- Investasi dalam instrumen ekuitas diklasifikasi sebagai FVTPL, kecuali Grup menetapkan investasi ekuitas yang dimiliki tidak untuk diperdagangkan dan bukan merupakan imbalan kontinjen dari kombinasi bisnis, sebagai FVTOCI pada pengakuan awal.
- Instrumen utang yang tidak memenuhi kriteria biaya perolehan diamortisasi atau FVTOCI, diklasifikasi sebagai FVTPL. Sebagai tambahan, instrumen utang yang memenuhi kriteria biaya perolehan diamortisasi dan FVTOCI dapat ditetapkan sebagai FVTPL pada saat pengakuan awal apabila penetapan tersebut mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan inkonsistensi pengukuran dan pengakuan yang timbul dari pengukuran aset atau liabilitas atau pengakuan keuntungan dan kerugian dengan basis berberda. Grup tidak menetapkan instrumen utang sebagai FVTPL.

Interest income is recognized using the effective interest method for debt instruments measured subsequently at amortized cost and at FVTOCI.

For financial instruments other than purchased or originated credit-impaired financial assets, interest income is calculated by applying the effective interest rate to the gross carrying amount of a financial asset.

For financial assets that have subsequently become credit-impaired, interest income is recognized by applying the effective interest rate to the amortized cost of the financial asset. If, in subsequent reporting periods, the credit risk on the credit-impaired financial instrument improves so that the financial asset is no longer credit-impaired, interest income is recognized by applying the effective interest rate to the gross carrying amount of the financial asset.

For purchased or originated credit-impaired financial assets, the Group recognizes interest income by applying the credit-adjusted effective interest rate to the amortized cost of the financial asset from initial recognition. The calculation does not revert to the gross basis even if the credit risk of the financial asset subsequently improves so that the financial asset is no longer credit-impaired.

Interest income is recognized in profit or loss.

Financial assets at FVTPL

Financial assets that do not meet the criteria for being measured at amortized cost or FVTOCI are measured at FVTPL, specifically:

- Investments in equity instruments are classified as at FVTPL, unless the Group designate an equity investment that is neither held for trading nor a contingent consideration arising from a business combination as at FVTOCI on initial recognition.
- Debt instruments that do not meet the amortized cost criteria or the FVTOCI criteria are classified as at FVTPL. In addition, debt instruments that meet either the amortized cost criteria or the FVTOCI criteria may be designated as at FVTPL upon initial recognition if such designation eliminates or significantly reduces a measurement or recognition inconsistency that would arise from measuring assets or liabilities or recognizing the gains and losses on them on different bases. The Group have not designated any debt instruments as at FVTPL.

Aset keuangan pada FVTPL diukur pada nilai wajar pada setiap tanggal pelaporan. Keuntungan atau kerugian diakui dalam laba rugi sepanjang bukan merupakan bagian dari hubungan lindung nilai yang ditetapkan. Keuntungan atau kerugian bersih yang diakui dalam laba rugi termasuk dividen atau bunga yang diperoleh atas aset keuangan dan dimasukkan dalam pos "keuntungan atau kerugian lain-lain".

Keuntungan dan kerugian kurs mata uang asing

Jumlah tercatat aset keuangan dalam mata uang asing ditentukan dalam mata uang tersebut dan dijabarkan dengan menggunakan kurs spot pada setiap tanggal pelaporan. Secara spesifik:

- Untuk aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi yang bukan merupakan bagian dari hubungan lindung nilai ditetapkan, selisih kurs diakui dalam laba rugi pada pos "keuntungan dan beban lain-lain";
- Untuk instrumen utang diukur pada FVTOCI yang bukan merupakan bagian dari hubungan lindung nilai ditetapkan, selisih kurs atas biaya perolehan diamortisasi dari instrumen hutang diakui dalam laba rugi pada pos "keuntungan dan beban lain-lain". Perbedaan nilai tukar lainnya diakui pada pendapatan komprehensif lain dalam cadangan revaluasi investasi.
- Untuk aset keuangan diukur pada FVTPL yang bukan merupakan bagian dari hubungan lindung nilai ditetapkan, selisih kurs diakui dalam laba rugi pada pos "keuntungan dan beban lain-lain"; dan
- Untuk instrumen ekuitas diukur pada FVTOCI, selisih kurs diakui pada penghasilan komprehensif lain dalam cadangan revaluasi investasi.

Penurunan nilai aset keuangan

Grup mengakui penyisihan kerugian untuk kerugian kredit ekspektasian ("KKE") atas investasi pada instrumen utang yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Jumlah kerugian kredit ekspektasian diukur pada setiap tanggal pelaporan untuk mencerminkan perubahan dalam risiko kredit sejak pengakuan awal instrumen keuangan tersebut.

Financial assets at FVTPL are measured at fair value as at each reporting date, with any fair value gains or losses recognized in profit or loss to the extent they are not part of a designated hedging relationship. The net gain or loss recognized in profit or loss includes any dividend or interest earned on the financial asset and is included in the "other gains and losses" line item.

Foreign exchange gains and losses

The carrying amount of financial assets that are denominated in a foreign currency is determined in that foreign currency and translated at the spot rate as at each reporting date. Specifically:

- For financial assets measured at amortized cost that are not part of a designated hedging relationship, exchange differences are recognized in profit or loss in the "other gains and losses" line item;
- For debt instruments measured at FVTOCI that are not part of a designated hedging relationship, exchange differences on the amortized cost of the debt instrument are recognized in profit or loss in the "other gains and losses" line item. Other exchange differences are recognized in other comprehensive income in the investments revaluation reserve.
- For financial assets measured at FVTPL that are not part of a designated hedging relationship, exchange differences are recognized in profit or loss in the "other gains and losses" line item; and
- For equity instruments measured at FVTOCI, exchange differences are recognized in other comprehensive income in the investments revaluation reserve.

Impairment of financial assets

The Group recognized a loss allowance for expected credit losses ("ECL") on investments in debt instruments that are measured at amortized cost. The amount of expected credit losses is updated at each reporting date to reflect changes in credit risk since initial recognition of the respective financial instrument.

Grup mengakui KKE sepanjang umur untuk piutang usaha, piutang lain-lain dan aset kontrak. Kerugian kredit ekspektasian dari aset keuangan tersebut diestimasi menggunakan matriks provisi berdasarkan pengalaman kerugian kredit secara historis dari Grup, disesuaikan dengan faktor-faktor spesifik terkait debitur, kondisi ekonomi umum dan penilaian baik atas kondisi sekarang maupun perkiraan arah kondisi pada tanggal pelaporan, termasuk nilai waktu dari uang jika perlu.

Untuk semua instrumen keuangan lainnya, Grup mengakui KKE sepanjang umur ketika telah ada peningkatan risiko kredit yang signifikan sejak pengakuan awal. Jika, sebaliknya, risiko kredit pada instrumen keuangan tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, Grup mengukur penyisihan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah KKE 12 bulan. Penilaian apakah KKE sepanjang umur harus diakui didasarkan pada peningkatan signifikan dalam kemungkinan terjadinya atau pada risiko gagal bayar sejak pengakuan awal dan bukan didasarkan pada bukti aset keuangan yang mengalami kerugian kredit pada tanggal pelaporan atau kejadian gagal bayar sebenarnya.

KKE sepanjang umur merupakan kerugian kredit ekspektasian yang dihasilkan dari seluruh kemungkinan peristiwa gagal bayar selama perkiraan umur instrumen keuangan. Sebaliknya, KKE 12 bulan merupakan porsi dari KKE sepanjang umur yang diperkirakan timbul dari peristiwa gagal bayar instrumen keuangan yang mungkin terjadi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Peningkatan risiko kredit secara signifikan

Dalam menilai apakah risiko kredit atas instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, Grup membandingkan risiko gagal bayar instrumen keuangan yang terjadi pada tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar pada saat pengakuan awal. Dalam melakukan penilaian, Grup mempertimbangkan baik informasi kuantitatif maupun informasi kualitatif yang wajar dan terdukung, termasuk pengalaman historis dan informasi bersifat perkiraan masa depan, yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan. Informasi masa depan yang dipertimbangkan mencakup prospek masa depan industri di mana debitur Grup beroperasi, yang diperoleh dari laporan ahli ekonomi, analisis keuangan, badan pemerintah, lembaga terkait, dan organisasi serupa lainnya, serta pertimbangan berbagai sumber eksternal aktual dan prakiraan informasi ekonomi yang terkait dengan operasi inti Grup.

The Group recognizes lifetime ECL for trade accounts receivables, other accounts receivables and contract assets. The expected credit losses on these financial assets are estimated using a provision matrix based on historical credit loss experience of the Group, adjusted for factors that are specific to the debtors, general economic conditions and an assessment of both the current as well as the forecast direction of conditions at the reporting date, including time value of money where appropriate.

For all other financial instruments, the Group recognizes lifetime ECL when there has been a significant increase in credit risk since initial recognition. If, on the other hand, the credit risk on the financial instrument has not increased significantly since initial recognition, the Group measures the loss allowance for that financial instrument at an amount equal to 12-month ECL. The assessment of whether lifetime ECL should be recognized is based on significant increases in the likelihood or risk of a default occurring since initial recognition instead of on evidence of a financial asset being credit impaired at the reporting date or an actual default occurring.

Lifetime ECL represents the expected credit losses that will result from all possible default events over the expected life of a financial instrument. In contrast, 12 months ECL represents the portion of lifetime ECL that is expected to result from default events on a financial instrument that are possible within 12 months after the reporting date.

Significant increase in credit risk

In assessing whether the credit risk on a financial instrument has increased significantly since initial recognition, the Group compares the risk of a default occurring on the financial instrument as at the reporting date with the risk of a default occurring on the financial instrument as at the date of initial recognition. In making this assessment, the Group considers both quantitative and qualitative information that is reasonable and supportable, including historical experience and forward looking information that is available without undue cost or effort. Forward-looking information considered includes the future prospects of the industries in which the Group's debtors operate, obtained from economic expert reports, financial analysts, governmental bodies, relevant think-tanks and other similar organizations, as well as consideration of various external sources of actual and forecast economic information that relate to the Group's core operations.

Terlepas dari hasil penilaian di atas, Grup mengasumsikan bahwa risiko kredit pada aset keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal ketika pembayaran kontrak lebih dari 30 hari lewat jatuh tempo, kecuali jika Grup memiliki alasan yang masuk akal dan dapat didukung informasi yang menunjukkan sebaliknya.

Meskipun demikian, Grup mengasumsikan bahwa risiko kredit pada instrumen keuangan tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal jika instrumen keuangan tersebut ditetapkan memiliki risiko kredit yang rendah pada tanggal pelaporan. Instrumen keuangan bertekad memiliki risiko kredit rendah jika:

- Instrumen keuangan memiliki risiko gagal bayar yang rendah;
- Debitur memiliki kapasitas yang kuat untuk memenuhi kewajiban arus kas kontraktualnya dalam waktu dekat; dan
- Memburuknya ekonomi dan bisnis dalam jangka panjang dapat, tetapi tidak selalu, menurunkan kemampuan peminjam untuk memenuhi kewajiban arus kas kontraktualnya.

Grup menganggap aset keuangan memiliki risiko kredit rendah ketika aset memiliki peringkat kredit eksternal *'investment grade'* sesuai dengan definisi yang dipahami secara global atau jika peringkat eksternal tidak tersedia, aset tersebut memiliki peringkat internal *'performing'*. *Performing* berarti bahwa rekanan memiliki posisi keuangan yang kuat dan tidak ada jumlah yang lewat jatuh tempo.

Grup secara teratur memantau efektivitas kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi apakah telah terjadi peningkatan risiko kredit yang signifikan dan merevisinya jika perlu untuk memastikan bahwa kriteria tersebut mampu mengidentifikasi peningkatan risiko kredit yang signifikan sebelum jumlahnya jatuh tempo.

Definisi gagal bayar

Grup menganggap hal-hal berikut ini merupakan peristiwa gagal bayar untuk tujuan manajemen risiko kredit internal karena pengalaman historis menunjukkan bahwa aset keuangan yang memenuhi salah satu kriteria berikut umumnya tidak dapat dipulihkan:

- Ketika terdapat pelanggaran persyaratan keuangan oleh debitur; atau
- Informasi yang dikembangkan secara internal atau diperoleh dari sumber eksternal menunjukkan bahwa debitur kemungkinan tidak akan membayar kreditornya, termasuk Grup, secara penuh (tanpa memperhitungkan jaminan yang dimiliki oleh Grup).

Irrespective of the outcome of the above assessment, the Group presumes that the credit risk on a financial asset has increased significantly since initial recognition when contractual payments are more than 30 days past due, unless the Group has reasonable and supportable information that demonstrates otherwise.

Despite the foregoing, the Group assumes that the credit risk on a financial instrument has not increased significantly since initial recognition if the financial instrument is determined to have low credit risk at the reporting date. A financial instrument is determined to have low credit risk if:

- The financial instrument has a low risk of default;
- The debtor has a strong capacity to meet its contractual cash flow obligations in the near term; and
- Adverse changes in economic and business conditions in the longer term may, but will not necessarily, reduce the ability of the borrower to fulfil its contractual cash flow obligations.

The Group considers a financial asset to have low credit risk when the asset has external credit rating of *'investment grade'* in accordance with the globally understood definition or if an external rating is not available, the asset has an internal rating of *'performing'*. *Performing* means that the counterparty has a strong financial position and there is no past due amounts.

The Group regularly monitors the effectiveness of the criteria used to identify whether there has been a significant increase in credit risk and revises them as appropriate to ensure that the criteria are capable of identifying significant increase in credit risk before the amount becomes past due.

Definition of default

The Group considers the following as constituting an event of default for internal credit risk management purposes as historical experience indicates that financial assets that meet either of the following criteria are generally not recoverable:

- When there is a breach of financial covenants by the debtor; or
- Information developed internally or obtained from external sources indicates that the debtor is unlikely to pay its creditors, including the Group, in full (without taking into account any collateral held by the Group).

Terlepas dari analisis di atas, Grup menganggap bahwa gagal bayar telah terjadi ketika aset keuangan telah lewat lebih dari 90 hari, kecuali jika Grup memiliki informasi yang cukup wajar dan dapat terdukung untuk menunjukkan bahwa kriteria yang lebih panjang lebih tepat.

Aset keuangan memburuk

Aset keuangan mengalami penurunan nilai kredit ketika satu atau lebih peristiwa yang memiliki dampak buruk pada estimasi arus kas masa depan dari aset keuangan tersebut telah terjadi. Bukti bahwa aset keuangan mengalami penurunan nilai termasuk data yang dapat diobservasi tentang peristiwa berikut:

- kesulitan keuangan yang signifikan dari penerbit atau peminjam.
- pelanggaran kontrak, seperti kejadian *default* atau lewat jatuh tempo.
- pihak pemberi pinjaman, untuk alasan ekonomik atau kontraktual sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak peminjam, telah memberikan konsesi pada pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan tersebut.
- terjadi kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya.
- hilangnya pasar aktif untuk aset keuangan itu karena kesulitan keuangan.
- pembelian atau penerbitan aset keuangan dengan diskon sangat besar yang mencerminkan kerugian kredit yang terjadi.

Kebijakan penghapusan

Grup menghapus aset keuangan ketika terdapat informasi yang mengindikasikan bahwa debitur dalam kesulitan keuangan yang parah dan tidak ada prospek pemulihan yang realistis, misalnya ketika debitur telah ditempatkan dalam likuidasi atau telah memasuki proses kebangkrutan, atau dalam hal piutang dagang, ketika jumlahnya lebih dari satu tahun yang lewat jatuh tempo, mana yang terjadi lebih cepat. Aset keuangan yang dihapuskan masih dapat dikenakan kegiatan penegakan hukum berdasarkan prosedur pemulihan Grup, dengan mempertimbangkan nasihat hukum yang sesuai. Setiap pemulihan yang dilakukan diakui pada laba rugi.

Irrespective of the above analysis, the Group considers that default has occurred when a financial asset is more than 90 days past due unless the Group has reasonable and supportable information to demonstrate that a more lagging default criterion is more appropriate.

Credit-impaired financial assets

A financial asset is credit-impaired when one or more events that have a detrimental impact on the estimated future cash flows of that financial asset have occurred. Evidence that a financial asset is credit-impaired includes observable data about the following events:

- significant financial difficulty of the issuer or the borrower.
- a breach of contract, such as a default or past due event.
- the lender(s) of the borrower, for economic or contractual reasons relating to the borrower's financial difficulty, having granted to the borrower a concession(s) that the lender(s) would not otherwise consider.
- it is becoming probable that the borrower will enter bankruptcy or other financial reorganization.
- the disappearance of an active market for that financial asset because of financial difficulties.
- the purchase or origination of a financial asset at a deep discount that reflects the incurred credit losses.

Write-off policy

The Group writes off a financial asset when there is information indicating that the debtor is in severe financial difficulty and there is no realistic prospect of recovery, e.g., when the debtor has been placed under liquidation or has entered into bankruptcy proceedings, or in the case of trade accounts receivable, when the amounts are over one years past due, whichever occurs sooner. Financial assets written off may still be subject to enforcement activities under the Group's recovery procedures, taking into account legal advice where appropriate. Any recoveries made are recognized in profit or loss.

Pengukuran dan pengakuan atas kerugian kredit yang diharapkan

Pengukuran kerugian kredit ekspektasian merupakan fungsi dari *probability of default*, *loss given default* (yaitu besarnya kerugian jika terjadi gagal bayar) dan eksposur pada gagal bayar. Penilaian *probability of default* dan *loss given default* berdasarkan data historis yang disesuaikan dengan informasi masa depan seperti dijelaskan di atas. Adapun eksposur atas gagal bayar, untuk aset keuangan, diwakili oleh nilai tercatat bruto aset pada tanggal pelaporan; untuk kontrak jaminan keuangan, eksposur mencakup jumlah yang ditarik pada tanggal pelaporan, ditambah dengan jumlah yang diperkirakan akan ditarik di masa depan sebelum tanggal gagal bayar yang ditentukan berdasarkan tren historis, pemahaman Grup mengenai kebutuhan pembiayaan masa depan yang spesifik dari debiturnya, dan informasi perkiraan masa depan lainnya yang relevan.

Untuk aset keuangan, kerugian kredit ekspektasian merupakan selisih antara arus kas kontraktual yang jatuh tempo kepada Grup sesuai dengan kontrak, dan arus kas yang diperkirakan akan diterima Grup, didiskontokan dengan suku bunga efektif awal.

Apabila KKE sepanjang umur diukur secara kolektif untuk memenuhi dimana bukti kenaikan signifikan risiko kredit pada level instrumen individual tidak tersedia, dalam hal ini instrumen keuangan dikelompokkan dengan dasar sebagai berikut:

- jenis instrumen keuangan (piutang usaha, piutang lain-lain dan jumlah tagihan kepada pelanggan yang masing-masing dinilai sebagai Grup terpisah. Piutang pihak berelasi yang dinilai untuk kerugian kredit ekspektasian atas dasar individual);
- status jatuh tempo;
- sifat, besaran dan jenis industri debitur;
- peringkat kredit eksternal jika tersedia.

Pengelompokkan ditelaah secara teratur oleh manajemen untuk memastikan setiap kelompok mempunyai karakteristik risiko yang sama.

Jika Grup mengukur penyisihan kerugian instrumen keuangan pada jumlah yang sama dengan KKE sepanjang umur periode pelaporan sebelumnya, namun menentukan bahwa untuk periode sekarang, kondisi KKE sepanjang umur tidak terpenuhi lagi, maka Grup mengukur penyisihan kerugian pada jumlah yang sama dengan KKE 12 bulan pada periode pelaporan berjalan.

Measurement and recognition of expected credit losses

The measurement of expected credit losses is a function of the probability of default, loss given default (i.e., the magnitude of the loss if there is a default) and the exposure at default. The assessment of the probability of default and loss given default is based on historical data adjusted by forward-looking information as described above. As for the exposure at default, for financial assets, this is represented by the assets' gross carrying amount at the reporting date; for financial guarantee contracts, the exposure includes the amount drawn down as at the reporting date, together with any additional amounts expected to be drawn down in the future by default date determined based on historical trend. The Group's understanding of the specific future financing needs of the debtors, and other relevant forward-looking information.

For financial assets, the expected credit loss is estimated as the difference between all contractual cash flows that are due to the Group in accordance with the contract and all the cash flows that the Group expect to receive, discounted at the original effective interest rate.

Where lifetime ECL is measured on a collective basis to cater for cases where evidence of significant increases in credit risk at the individual instrument level may not yet be available, the financial instruments are grouped on the following basis:

- nature of financial instruments (i.e., The Group's trade and other receivables and amounts due from customers are each assessed as a separate group. Loans to related parties are assessed for expected credit losses on an individual basis);
- past-due status;
- nature, size, and industry of debtors;
- external credit ratings where available.

The grouping is regularly reviewed by management to ensure the constituents of each group continue to share similar credit risk characteristics.

If the Group have measured the loss allowance for a financial instrument at an amount equal to lifetime ECL in the previous reporting period but determines at the current reporting date that the conditions for lifetime ECL are no longer met, the Group measure the loss allowance at an amount equal to 12 months ECL at the current reporting date.

Grup mengakui keuntungan atau kerugian penurunan nilai dalam laba rugi untuk semua instrumen keuangan dengan menyesuaikan jumlah tercatat melalui akun penyisihan kerugian.

Penghentian pengakuan aset keuangan

Grup menghentikan pengakuan aset keuangan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan berakhir, atau aset keuangan dialihkan dan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan dialihkan ke pihak lain. Jika Grup tidak mentransfer atau menahan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan dan mempertahankan pengendalian atas aset yang ditransfer, maka Grup mengakui hak dalam aset yang ditahan dan mengakui kewajiban sebesar jumlah yang mungkin harus dibayar. Jika Grup menahan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan yang ditransfer, maka Grup tetap mengakui aset keuangan dan juga mengakui pinjaman terjamin sebesar dana diterima.

Pada penghentian pengakuan aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, selisih antara jumlah tercatat aset dan jumlah pembayaran diterima dan piutang diakui dalam laba rugi.

Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas

Klasifikasi sebagai utang atau ekuitas

Instrumen utang atau ekuitas yang diterbitkan oleh Grup direklasifikasi sebagai liabilitas keuangan atau ekuitas sesuai substansi pengaturan kontraktual dan sesuai dengan definisi dari liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas.

Instrumen ekuitas

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang membuktikan hak residual dalam aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. Instrumen ekuitas yang diterbitkan suatu Grup entitas diakui sebesar dana diterima, setelah dikurangi biaya langsung penerbitannya.

Liabilitas keuangan

Liabilitas keuangan diklasifikasikan pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif.

The Group recognize an impairment gain or loss in profit or loss for all financial instruments with a corresponding adjustment to their carrying amount through a loss allowance.

Derecognition of financial assets

The Group derecognize a financial asset only when the contractual rights to the cash flows from the asset expire, or when it transfers the financial asset and substantially all the risks and rewards of ownership of the asset to another party. If the Group neither transfer nor retain substantially all the risks and rewards of ownership and continues to control the transferred asset, the Group recognize their retained interest in the asset and an associated liability for amounts it may have to pay. If the Group retain substantially all the risks and rewards of ownership of a transferred financial asset, The Group continues to recognize the financial asset and also recognizes a collateralised borrowing for the proceeds received.

On derecognition of a financial asset measured at amortized cost, the difference between the asset's carrying amount and the sum of the consideration received and receivable is recognized in profit or loss.

Financial Liabilities and Equity Instruments

Classification as debt or equity

Debt and equity instruments issued by the Group are classified as either financial liabilities or as equity in accordance with the substance of the contractual arrangements and the definitions of a financial liability and an equity instrument.

Equity instruments

An equity instrument is any contract that evidences a residual interest in the assets of an entity after deducting all its liabilities. Equity instruments issued by a group entity are recognized at the proceeds received, net of direct issue costs.

Financial liabilities

Financial liabilities are classified at amortized cost using the effective interest method.

Liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi

Liabilitas keuangan yang bukan merupakan 1) imbalan kontingen dari pihak pengakuisisi dalam kombinasi bisnis, 2) dimiliki untuk diperdagangkan atau 3) ditetapkan sebagai FVTPL, selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Metode suku bunga efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari liabilitas keuangan dan metode untuk mengalokasikan biaya bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran kas masa depan (mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan dan diterima yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi dan premium dan diskonto lainnya) selama perkiraan umur liabilitas keuangan, atau (jika lebih tepat) digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih pada saat pengakuan awal.

Keuntungan dan kerugian kurs mata uang asing

Untuk liabilitas keuangan dalam mata uang asing dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi pada setiap tanggal pelaporan, keuntungan atau kerugian kurs mata uang asing ditentukan berdasarkan biaya perolehan diamortisasi dari instrumen. Keuntungan atau kerugian kurs mata uang asing diakui dalam laba rugi untuk liabilitas keuangan yang tidak merupakan bagian dari hubungan lindung nilai ditetapkan. Bagi mereka yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai untuk lindung nilai atas risiko mata uang asing, keuntungan dan kerugian selisih kurs diakui dalam pendapatan komprehensif lain dan diakumulasikan dalam komponen ekuitas yang terpisah.

Nilai wajar liabilitas keuangan dalam mata uang asing ditentukan dalam mata uang asing tersebut dan dijabarkan pada kurs yang berlaku pada akhir periode pelaporan.

Penghentian pengakuan liabilitas keuangan

Grup menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas keuangan tersebut dilepaskan, dibatalkan atau kadaluarsa. Selisih antara jumlah tercatat liabilitas keuangan yang dihentikan pengakuannya dan imbalan yang dibayarkan, termasuk aset nonkas yang transfer atau liabilitas yang ditanggung, diakui dalam laba rugi.

Financial liabilities measured at amortized cost

Financial liabilities that are not 1) contingent consideration of an acquirer in a business combination, 2) held-for-trading or 3) designated as at FVTPL, are subsequently measured at amortized cost using the effective interest method.

Effective interest method

The effective interest method is a method of calculating the amortized cost of a financial liability and of allocating interest expense over the relevant period. The effective interest rate is the rate that exactly discounts estimated future cash payments (including all fees and points paid or received that form an integral part of the effective interest rate, transaction costs and other premiums or discounts) through the expected life of the financial liability, or (where appropriate) a shorter period to the net carrying amount on initial recognition.

Foreign exchange gains and losses

For financial liabilities that are denominated in a foreign currency and are measured at amortized cost as at each reporting date, the foreign exchange gains and losses are determined based on the amortized cost of the instruments. These foreign exchange gains and losses are recognized in profit or loss for financial liabilities that are not part of a designated hedging relationship. For those which are designated as a hedging instrument for a hedge of foreign currency risk, foreign exchange gains and losses are recognized in other comprehensive income and accumulated in a separate component of equity.

The fair value of financial liabilities denominated in a foreign currency is determined in that foreign currency and translated at the spot rate at the end of the reporting period.

Derecognition of financial liabilities

The Group derecognizes financial liabilities when, and only when, the financial liabilities are discharged, cancelled or they expire. The difference between the carrying amount of the financial liability derecognized and the consideration paid, including any non-cash assets transferred or liabilities assumed, is recognized in profit or loss.

Ketika Grup bertukar dengan pemberi pinjaman yang ada, satu instrumen utang menjadi instrumen lain dengan persyaratan yang berbeda secara substansial, pertukaran tersebut dicatat sebagai pelunasan liabilitas keuangan asli dan pengakuan liabilitas keuangan baru. Demikian pula, Grup memperhitungkan modifikasi substansial dari ketentuan liabilitas yang ada atau bagian dari liabilitas tersebut sebagai pelepasan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas baru. Diasumsikan bahwa persyaratannya berbeda secara substansial jika nilai sekarang yang didiskontokan dari arus kas berdasarkan ketentuan yang baru, termasuk biaya yang dibayarkan setelah dikurangi biaya yang diterima dan didiskontokan menggunakan tarif efektif asli sekurang-kurangnya 10 persen berbeda dari hadiah yang didiskontokan nilai sisa arus kas dari liabilitas keuangan asli. Jika modifikasi tidak substansial, perbedaan antara: (1) jumlah tercatat liabilitas sebelum modifikasi; dan (2) nilai sekarang dari arus kas setelah modifikasi diakui dalam laporan laba rugi sebagai keuntungan atau kerugian modifikasi dalam keuntungan dan kerugian lainnya.

h. Kas dan Setara Kas

Untuk tujuan penyajian arus kas, kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan semua investasi yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan yang tidak dijamin serta tidak dibatasi penggunaannya.

i. Kepemilikan dalam Operasi Bersama

Operasi bersama adalah pengaturan bersama dimana para pihak yang memiliki pengendalian bersama atas pengaturan memiliki hak atas aset dan kewajiban terhadap liabilitas terkait dengan pengaturan tersebut. Pengendalian bersama adalah persetujuan kontraktual untuk berbagi pengendalian atas suatu pengaturan, yang ada hanya ketika keputusan mengenai aktivitas relevan mensyaratkan persetujuan dengan suara bulat dari seluruh pihak yang berbagi pengendalian.

Ketika entitas Grup melakukan kegiatan berdasarkan operasi bersama, Grup sebagai operator bersama mengakui hal berikut terkait dengan kepentingannya dalam operasi bersama:

- Aset, mencakup bagiannya atas setiap aset yang dimiliki bersama.
- Liabilitas, mencakup bagiannya atas liabilitas yang terjadi bersama.
- Pendapatan dari penjualan bagiannya atas *output* yang dihasilkan dari operasi bersama.

When the Group exchanges with the existing lender one debt instrument into another one with the substantially different terms, such exchange is accounted for as an extinguishment of the original financial liability and the recognition of a new financial liability. Similarly, the Group accounts for substantial modification of terms of an existing liability or part of it as an extinguishment of the original financial liability and the recognition of a new liability. It is assumed that the terms are substantially different if the discounted present value of the cash flows under the new terms, including any fees paid net of any fees received and discounted using the original effective rate is at least 10 percent different from the discounted present value of the remaining cash flows of the original financial liability. If the modification is not substantial, the difference between: (1) the carrying amount of the liability before the modification; and (2) the present value of the cash flows after modification is recognized in profit or loss as the modification gain or loss within other gains and losses.

h. Cash and Cash Equivalents

For cash flow presentation purposes, cash and cash equivalents consist of cash on hand and in banks and all unrestricted investments with maturities of three months or less from the date of placement.

i. Interest in Joint Operations

A joint operation is a joint arrangement whereby the parties that have joint control of the arrangement have rights to the assets, and obligations for the liabilities, relating to the arrangement. Joint control is the contractually agreed sharing of control of an arrangements which exists only when decisions about the relevant activities require unanimous consent of the parties sharing control.

When a Group entity undertakes its activities under joint operations, the Group as a joint operator recognizes in relation to its interest in a joint operation:

- Its assets, including its share of any assets held jointly.
- Its liabilities, including its share of any liabilities incurred jointly.
- Its revenue from the sale of its share of the output arising from the joint operation.

- Bagiannya atas pendapatan dari penjualan *output* oleh operasi bersama; dan
- Beban, mencakup bagiannya atas setiap beban yang terjadi secara bersama-sama.

Grup mencatat aset, liabilitas, pendapatan dan beban terkait dengan kepentingannya dalam operasi bersama sesuai dengan PSAK yang dapat diterapkan untuk aset, liabilitas, pendapatan dan beban tertentu.

Ketika entitas Grup melakukan transaksi dengan operasi bersama yang entitas Grup tersebut bertindak sebagai salah satu operator bersamanya (seperti penjualan atau kontribusi aset), Grup melakukan transaksi dengan pihak lain dalam operasi bersama dan, dengan demikian, operator bersama mengakui keuntungan dan kerugian yang dihasilkan dari transaksi diakui di dalam laporan keuangan konsolidasian interim Grup tersebut hanya sebatas kepentingan para pihak lain dalam operasi bersama.

Ketika entitas Grup melakukan transaksi dengan operasi bersama yang entitas tersebut bertindak sebagai salah satu operator bersamanya (seperti pembelian aset), Grup tidak mengakui bagian keuntungan dan kerugiannya sampai Grup menjual kembali aset tersebut kepada pihak ketiga.

j. Persediaan

Persediaan yang terdiri atas suku cadang dan bahan pembantu, batubara termal, bahan bakar, dan lainnya diakui berdasarkan yang lebih rendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi bersih. Biaya perolehan ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang.

Biaya perolehan batubara termal mencakup alokasi komponen biaya bahan baku, tenaga kerja, dan biaya tidak langsung yang berkaitan dengan aktivitas pertambangan.

Nilai realisasi bersih merupakan estimasi harga jual dari persediaan dikurangi seluruh biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk penjualan. Penyisihan untuk persediaan usang dan yang pergerakannya lambat ditentukan berdasarkan estimasi penggunaan masing-masing jenis persediaan pada masa mendatang.

k. Beban Dibayar Di muka

Beban dibayar di muka diamortisasi selama manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

- Its share of the revenue from the sale of the output by the joint operation; and
- Its expenses, including its share of any expenses incurred jointly.

The Group accounts for the assets, liabilities, revenues, and expenses relating to its interest in a joint operation in accordance with the PSAKs applicable to the particular assets, liabilities, revenues and expenses.

When a Group entity transacts with a joint operation in which a Group entity is a joint operator (such as a sale or contribution of assets), the Group is considered to be conducting the transaction with the other parties to the joint operation, and gains and losses resulting from the transactions are recognized in the Group's interim consolidated financial statements only to the extent of other parties' interests in the joint operation.

When a Group entity transacts with a joint operation in which a Group entity is a joint operator (such as a purchase of assets), the Group does not recognize its share of the gains and losses until it resells those assets to a third party.

j. Inventories

Inventories consist of spare parts and supplies, thermal coal, fuel and others are recognized at the lower of cost and net realizable value. Cost is determined using the weighted average method.

Cost of thermal coal, includes an appropriate allocation of material costs, labor costs and overhead costs related to mining activities.

Net realizable value represents the estimated selling price for inventories less all estimated costs of completion and costs necessary to make the sale. The provision for obsolete and slow moving inventories is determined on the basis of estimated future usage of individual inventory items.

k. Prepaid Expenses

Prepaid expenses are amortized over their beneficial periods using the straight-line method.

I. Aset Tetap - Pemilikan Langsung

Aset tetap yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif dicatat berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai.

Penyusutan diakui sebagai penghapusan biaya perolehan aset dikurangi nilai residu dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap sebagai berikut:

	<u>Tahun/ Years</u>
Gedung dan perbaikan gedung	8 - 20
Alat berat, peralatan dan kendaraan	4 - 18
Perabotan dan perlengkapan	4 - 5

Beberapa komponen dari alat berat, peralatan dan kendaraan disusutkan atas dasar penggunaan jam kerja selama taksiran umur operasi komponen tersebut.

Masa manfaat ekonomis, nilai residu dan metode penyusutan direviu setiap akhir tahun dan pengaruh dari setiap perubahan estimasi tersebut berlaku prospektif.

Aset yang telah disusutkan sepenuhnya yang masih digunakan tetap termasuk dalam laporan keuangan konsolidasian interim.

Tanah dinyatakan berdasarkan biaya perolehan dan tidak disusutkan.

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laba rugi pada saat terjadinya. Biaya-biaya lain yang terjadi selanjutnya yang timbul untuk menambah, mengganti atau memperbaiki aset tetap dicatat sebagai biaya perolehan aset jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.

Aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan timbul dari penggunaan aset secara berkelanjutan. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari pelepasan atau penghentian pengakuan suatu aset tetap ditentukan sebagai selisih antara hasil penjualan dan nilai tercatat aset dan diakui dalam laba rugi.

I. Property, Plant and Equipment - Direct Acquisitions

Property, plant and equipment held for use in the production or supply of goods or services, or for administrative purposes, are stated at cost, less accumulated depreciation and any accumulated impairment losses.

Depreciation is recognized so as to write-off the cost of assets less residual values using the straight-line method based on the estimated useful lives of the assets as follows:

Buildings and improvements
Plant, equipment and vehicles
Furniture and fixtures

Certain components of plant, equipment, and vehicles are depreciated using hourly utilization basis over their estimated operating life.

The estimated useful lives, residual values and depreciation method are reviewed at each year end, with the effect of any changes in estimate accounted for on a prospective basis.

Fully depreciated assets still in use are retained in the interim consolidated financial statements.

Land is stated at acquisition cost and is not depreciated.

The cost of maintenance and repairs is charged to profit or loss as incurred. Other costs incurred subsequently to add to, replace part of, or service an item of property, plant and equipment, are recognized as asset if, and only if it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the entity and the cost of the item can be measured reliably.

An item of property, plant and equipment is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected to arise from the continued use of the asset. Any gain or loss arising on the disposal or retirement of an item of property, plant and equipment is determined as the difference between the sales proceeds and the carrying amount of the asset and is recognized in profit or loss.

Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan tersebut termasuk biaya pinjaman yang terjadi selama masa pembangunan yang timbul dari utang yang digunakan untuk pembangunan aset tersebut. Aset dalam penyelesaian akan dipindahkan ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat selesai dan siap digunakan.

m. Aset Eksplorasi dan Evaluasi

Aktivitas eksplorasi dan evaluasi meliputi pencarian sumber daya batubara, penentuan kelayakan teknis dan penilaian komersial atas sumber daya mineral spesifik.

Pengeluaran eksplorasi dan evaluasi meliputi biaya yang berhubungan langsung dengan:

- perolehan hak untuk eksplorasi;
- kajian topografi, geologi, geokimia, dan geofisika;
- pengeboran eksplorasi;
- pamaritan dan pengambilan contoh; dan
- aktivitas yang terkait dengan evaluasi kelayakan teknis dan komersial atas penambangan sumber daya batubara.

Biaya eksplorasi dan evaluasi yang berhubungan dengan suatu *area of interest* dibebankan pada saat terjadinya kecuali biaya tersebut dikapitalisasi dan ditangguhkan, berdasarkan *area of interest*, apabila memenuhi salah satu dari ketentuan berikut ini:

- (i) biaya tersebut diharapkan dapat diperoleh kembali melalui keberhasilan pengembangan dan eksploitasi di *area of interest* tersebut atau melalui penjualan atas *area of interest* tersebut; atau
- (ii) kegiatan eksplorasi dalam *area of interest* tersebut belum mencapai tahap yang memungkinkan penentuan adanya cadangan terbukti yang secara ekonomis dapat diperoleh, serta kegiatan yang aktif dan signifikan dalam atau berhubungan dengan *area of interest* tersebut masih berlanjut.

Biaya yang dikapitalisasi mencakup biaya-biaya yang berkaitan langsung dengan aktivitas eksplorasi dan evaluasi pada *area of interest* yang relevan. Biaya umum dan administrasi dialokasikan sebagai aset eksplorasi atau evaluasi hanya jika biaya tersebut berkaitan langsung dengan aktivitas operasional pada *area of interest* yang relevan.

Construction in progress is stated at cost which includes borrowing costs during construction on debts incurred to finance the construction. Construction in progress is transferred to the respective property, plant and equipment account when completed and ready for use.

m. Exploration and Evaluation Assets

Exploration and evaluation activity involves the search for coal resources, determination of the technical feasibility and assessment of the commercial viability of the mineral resource.

Exploration and evaluation expenditures comprise of costs that are directly attributable to:

- acquisition of rights to explore;
- topographical, geological, geochemical and geophysical studies;
- exploratory drilling;
- trenching and sampling; and
- activities involved in evaluating the technical feasibility and commercial viability of extracting coal resources.

Exploration and evaluation expenditures related to an *area of interest* is charged as incurred, unless they are capitalized and carried forward, on an *area of interest* basis, provided one of the following conditions is met:

- (i) the costs are expected to be recouped through successful development and exploitation of the *area of interest* or, alternatively, by its sale; or
- (ii) exploration activities in the *area of interest* have not yet reached the stage which permits a reasonable assessment of the existence or otherwise of economically recoverable reserves and active and significant operations in or in relation to the *area of interest* are continuing

Capitalized costs include costs directly related to exploration and evaluation activities in the relevant *area of interest*. General and administrative costs are allocated to an exploration or evaluation asset only to the extent that those costs can be related directly to operational activities in the relevant *area of interest*.

Aset eksplorasi dan evaluasi dicatat sebesar harga perolehan dikurangi kerugian penurunan nilai. Karena belum siap untuk digunakan, aset tersebut tidak disusutkan.

Aset eksplorasi dan evaluasi diuji penurunan nilainya ketika fakta dan kondisi mengindikasikan adanya penurunan nilai. Aset eksplorasi dan evaluasi juga diuji penurunan nilainya ketika terjadi penemuan cadangan komersial, sebelum aset tersebut dialihkan ke properti pertambangan.

n. Aset Pertambangan

Ketika biaya pengembangan lebih lanjut atas properti pertambangan terjadi setelah dimulainya aktivitas produksi, maka biaya tersebut akan ditangguhkan sebagai bagian dari properti pertambangan apabila terdapat kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan tambahan sehubungan dengan biaya tersebut akan mengalir ke Grup. Jika tidak, biaya tersebut dibebankan sebagai biaya produksi.

Properti pertambangan (termasuk biaya eksplorasi, evaluasi dan pengembangan, dan pembayaran untuk memperoleh hak atas batubara dan sewa) diamortisasi menggunakan metode unit produksi, dengan perhitungan terpisah untuk setiap wilayah kepemilikan. Basis unit produksi menghasilkan pembebanan amortisasi secara proporsional berdasarkan depleksi cadangan terbukti dan cadangan terduga.

Properti pertambangan diuji penurunan nilai setiap tahun berdasarkan kebijakan pada Catatan 3s.

o. Aset Aktivitas Pengupasan Lapisan Tanah

Rasio pengupasan lapisan tanah tahunan yang direncanakan ditetapkan berdasarkan rencana pengembangan batubara dan diperkirakan tidak akan berbeda jauh dengan rasio pengupasan lapisan tanah jangka panjang yang direncanakan. Jika rasio pengupasan lapisan tanah aktual melebihi rasio yang direncanakan, kelebihan biaya pengupasan lapisan tanah tersebut akan dibukukan sebagai biaya pengupasan lapisan tanah yang ditangguhkan dalam laporan posisi keuangan. Perubahan atas rasio yang direncanakan merupakan perubahan estimasi dan diterapkan secara prospektif.

Grup mencatat biaya tersebut sebagai aset aktivitas pengupasan lapisan tanah jika memenuhi kriteria berikut:

- a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomis masa depan (peningkatan akses menuju badan batubara) yang terkait dengan aktivitas pengupasan lapisan tanah akan mengalir kepada Grup;

Exploration and evaluation assets are recorded at cost less impairment charges. As the asset is not available for use, it is not depreciated.

Exploration and evaluation assets are assessed for impairment if facts and circumstances indicate that impairment may exist. Exploration and evaluation assets are also tested for impairment once commercial reserves are found, before the assets are transferred to mining properties.

n. Mining Properties

When further development expenditure is incurred on a mining property after the commencement of production, the expenditure is carried forward as part of the mining property when it is probable that additional future economic benefits associated with the expenditure will flow to the Group. Otherwise this expenditure is classified as a cost of production.

Mining properties (including exploration, evaluation and development expenditures, and payments to acquire coal rights and leases) are amortized using the units-of-production method, with separate calculations being made for each area of interest. The units-of-production basis results in an amortization charge proportional to the depletion of the proved and probable reserves.

Mining properties are tested for impairment annually in accordance with the policy described in Note 3s.

o. Stripping Activity Asset

The annual planned stripping ratio is determined based on current knowledge of the disposition of coal resources and is estimated not to be materially different from the long term planned stripping ratio. If the actual stripping ratio exceeds the planned ratio, the excess stripping costs are recorded in the statements of financial position as deferred stripping costs. Changes in the planned stripping ratio are considered as changes in estimates and are accounted for on a prospective basis.

The Group recognized these costs as a stripping activity asset if all of the following criteria are met:

- a. It is probable that the future economic benefit (improved access to the coal body) associated with the stripping activity will flow to the Group;

- b. Grup dapat mengidentifikasi komponen badan batubara yang aksesnya telah ditingkatkan; dan
- c. Biaya yang terkait dengan aktivitas pengupasan lapisan tanah dengan komponen tersebut dapat diukur secara andal.

Aset aktivitas pengupasan lapisan tanah termasuk dalam aset tidak lancar lainnya. Amortisasi aset aktivitas pengupasan lapisan tanah termasuk dalam "Beban Pokok Penjualan".

p. Estimasi Liabilitas Pengelolaan dan Reklamasi Lingkungan Hidup

Restorasi, rehabilitasi dan biaya lingkungan hidup lainnya yang timbul selama tahap produksi dibebankan sebagai bagian dari biaya produksi.

Grup memiliki liabilitas tertentu untuk restorasi dan rehabilitasi daerah pertambangan sesudah produksi selesai. Kewajiban tersebut dicadangkan, sehingga penyisihan tersebut akan cukup untuk memenuhi liabilitas yang timbul ketika produksi sudah selesai. Perubahan taksiran biaya restorasi dan lingkungan hidup yang akan terjadi dihitung secara prospektif berdasarkan sisa umur tambang.

Kewajiban lingkungan terdiri dari biaya-biaya yang berkaitan dengan reklamasi tambang selama masa operasi, penutupan tambang dan pembongkaran dan pemindahan fasilitas dan aktivitas penutupan lainnya.

Provisi untuk estimasi biaya reklamasi tambang dan penutupan tambang dicatat pada saat: Grup memiliki kewajiban hukum atau konstruktif yang timbul sebagai akibat dari peristiwa yang terjadi dimasa lalu; besar kemungkinan penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya; dan jumlahnya dapat diestimasi dengan andal.

Provisi diukur pada nilai kini dari perkiraan pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban, menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan penilaian pasar atas nilai waktu uang dan risiko yang terkait dengan kewajiban tersebut. Peningkatan provisi karena berlalunya waktu diakui pada laporan laba rugi sebagai beban keuangan. Perubahan atas estimasi waktu, jumlah pengeluaran atau tingkat diskonto diperlakukan sebagai perubahan atas nilai tercatat aset terkait. Pada kondisi di mana penurunan nilai provisi lebih besar daripada sisa nilai tercatat aset terkait yang belum disusutkan, nilai tercatat aset tersebut dikurangkan menjadi nol dan penyesuaian sisanya dicatat dalam laporan laba rugi.

- b. The Group can identify the components of the coal body for which access has been improved; and
- c. The costs relating to the stripping activity associated with that component can be measured reliably.

Stripping activity assets are included in other non-current assets. Amortization of stripping activity asset is included in "Cost of Goods Sold".

p. Estimated Liabilities for Environmental Management and Reclamation

Restoration, rehabilitation and other environmental costs incurred during the production phase of exploration are expensed as part of production costs.

The Group has certain obligations to restore and rehabilitate mining areas following the completion of production. Such obligations are accrued, so that the accrual will be adequate to meet those obligations once the production process is fully completed. Changes in estimated restoration and environmental costs to be incurred are accounted for on a prospective basis over the remaining life of the mine.

The environmental obligations consist of costs associated with mine reclamation during mine operation, mine closure and decommissioning and demobilization of facilities and other closure activities.

Provision for estimated costs of mine reclamation and mine closure is recorded when: the Group has a present legal or constructive obligation as a result of past events; it is probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation; and the amount can be reliably estimated.

Provision is measured at the present value of expenditure expected to be required to settle the obligation using a pre-tax rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the obligation. The increase in the provision due to passage of time is recognized in profit or loss under finance charges. Changes in the estimated timing or amount of the expenditure or discount rate are accounted for as a change in the corresponding capitalized costs. At the time where a reduction in the provision is greater than the undepreciated capitalized cost of the related assets, the capitalized cost is reduced to nil and the remaining adjustment is recognized in profit or loss.

Provisi untuk pembongkaran, pemindahan, dan restorasi dicatat untuk mengakui kewajiban hukum yang berkaitan dengan penarikan aset tetap yang berasal dari akuisisi, pembangunan atau pengembangan dan/atau operasi normal aset tetap. Penarikan aset tetap ini termasuk penjualan, peninggalan, pendaurulangan atau penghapusan dengan cara lain, bukan dikarenakan penghentian sementara pemakaian.

Untuk hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan yang mungkin tidak berkaitan dengan penarikan aset, dimana Grup merupakan pihak yang bertanggung jawab atas kewajiban tersebut dan kewajiban tersebut ada dan jumlahnya bisa diukur, Grup mencatat estimasi kewajiban tersebut. Dalam menentukan keberadaan kewajiban yang berkaitan dengan lingkungan tersebut, Grup mengacu pada kriteria pengakuan kewajiban sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

q. Goodwill

Goodwill timbul atas akuisisi dari suatu bisnis yang dicatat pada biaya perolehan yang ditetapkan pada tanggal akuisisi dari bisnis tersebut (lihat Catatan 3d diatas) dikurangi akumulasi penurunan nilai, jika ada.

Goodwill tidak diamortisasi tetapi direviu untuk penurunan nilai setidaknya setiap tahun. Untuk tujuan uji penurunan nilai, *goodwill* dialokasikan pada setiap unit penghasil kas dari Grup (atau kelompok unit penghasil kas) yang diperkirakan memberikan manfaat dari sinergi kombinasi bisnis tersebut. Unit penghasil kas yang telah memperoleh alokasi *goodwill* diuji penurunan nilainya setiap tahun, atau lebih sering jika terdapat indikasi bahwa unit penghasil kas tersebut mungkin mengalami penurunan nilai.

r. Aset Tak-Berwujud

Aset tak-berwujud yang diperoleh dari kombinasi bisnis, diidentifikasi dan diakui terpisah dari *goodwill* apabila definisi aset tak-berwujud dipenuhi dan nilai wajarnya dapat diukur secara andal. Biaya perolehan aset tak-berwujud adalah nilai wajar pada tanggal perolehan.

Setelah pengakuan awal, aset tak-berwujud yang diperoleh dari kombinasi bisnis dilaporkan sebesar biaya dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi kerugian penurunan nilai.

Aset tak-berwujud, selain yang diperoleh dari kombinasi bisnis, diamortisasi selama 4 – 10 tahun dengan menggunakan metode garis lurus.

Provision for decommissioning, demobilization and restoration provides for legal obligations associated with the retirement of a tangible long-lived asset that results from the acquisition, construction or development and/or the normal operation of a long-lived asset. The retirement of a long-lived asset includes its sale, abandonment, recycling or disposal in some other manner, other than temporary removal from service.

For environmental issues that may not involve the retirement of an asset, where the Group is a responsible party and it is determined that a liability exists, and amounts can be quantified, the Group accrues for the estimated liability. In determining whether a liability exists in respect of such environmental issues, the Group applies the criteria for liability recognition under applicable accounting standards.

q. Goodwill

Goodwill arising on an acquisition of a business is carried at cost as established at the date of acquisition of the business (see Note 3d above) less accumulated impairment losses, if any.

Goodwill is not amortized but is reviewed for impairment at least annually. For the purpose of impairment testing, goodwill is allocated to each of the Group's cash-generating units (or Group of cash-generating units) expected to benefit from the synergies of the combination. A cash-generating unit to which goodwill has been allocated is tested for impairment annually, or more frequently when there is an indication that the unit may be impaired.

r. Intangible Assets

Intangible assets acquired in a business combination are identified and recognized separately from goodwill when they satisfy the definition of an intangible asset and their fair value can be measured reliably. The cost of such intangible assets is their fair value at the acquisition date.

Subsequent to initial recognition, intangible assets acquired in a business combination are reported at cost less accumulated amortization and accumulated impairment losses.

Intangible asset, other than acquired from business combination, is amortized over 4 – 10 years using the straight-line method.

Aset tak-berwujud atas hak pertambangan yang diperoleh dari kombinasi bisnis diamortisasi selama umur perijinan tambang dengan menggunakan metode garis lurus.

s. Penurunan Nilai Aset Nonkeuangan kecuali Goodwill

Pada tanggal pelaporan, Grup menelaah nilai tercatat aset nonkeuangan untuk menentukan apakah terdapat indikasi bahwa aset tersebut telah mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset diestimasi untuk menentukan tingkat kerugian penurunan nilai (jika ada). Bila tidak memungkinkan untuk mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali atas suatu aset individu, Grup mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali dari unit penghasil kas atas aset. Ketika dasar alokasi yang wajar dan konsisten dapat diidentifikasi, aset perusahaan juga dialokasikan ke masing-masing kelompok unit penghasil kas, atau sebaliknya mereka dialokasikan ke kelompok terkecil dari kelompok unit penghasil kas di mana dasar alokasi yang wajar dan konsisten dapat diidentifikasi.

Perkiraan jumlah yang dapat diperoleh kembali adalah nilai tertinggi antara harga jual neto atau nilai pakai. Dalam menilai nilai pakai, estimasi arus kas masa depan didiskontokan ke nilai kini menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset yang mana estimasi arus kas masa depan belum disesuaikan.

Kebijakan akuntansi untuk penurunan nilai aset keuangan dijelaskan dalam Catatan 3g, penurunan nilai untuk *goodwill* dijelaskan dalam Catatan 3q.

t. Sewa

Sebagai penyewa

Grup menilai apakah kontrak merupakan, atau mengandung sewa pada tanggal inisiasi kontrak. Grup mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa terkait semua perjanjian sewa, kecuali untuk sewa jangka pendek (masa sewa 12 bulan atau kurang) dan sewa dengan aset pendasar bernilai rendah. Untuk kontrak sewa ini, Grup mengakui pembayaran sewa sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa, kecuali terdapat dasar sistematis lain yang dapat lebih mencerminkan pola waktu dari manfaat aset yang dinikmati pengguna.

Intangible assets, comprising of mining rights, acquired from business combination is amortized over the mining permit life using straight line method.

s. Impairment of Non-financial Assets except Goodwill

At reporting dates, the Group reviews the carrying amount of non-financial assets to determine whether there is any indication that those assets have suffered an impairment loss. If any such indication exists, the recoverable amount of the asset is estimated in order to determine the extent of the impairment loss (if any). Where it is not possible to estimate the recoverable amount of an individual asset, the Group estimates the recoverable amount of the cash generating unit to which the asset belongs. When a reasonable and consistent basis of allocation can be identified, corporate assets are also allocated to individual cash-generating units, or otherwise they are allocated to the smallest group of cash-generating units for which a reasonable and consistent allocation basis can be identified.

Estimated recoverable amount is the higher of fair value less cost to sell and value in use. In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset for which the estimates of future cash flows have not been adjusted.

Accounting policy for impairment of financial assets is discussed in Note 3g, while impairment for goodwill is discussed in Note 3q.

t. Leases

As lessee

The Group assess whether a contract is or contains a lease, at inception of the contract. The Group recognize a right-of-use asset and a corresponding lease liability with respect to all lease arrangements, except for short-term leases (defined as leases with a lease term of 12 months or less) and leases of low value assets. For these leases, the Group recognize the lease payments as an operating expense on a straight-line basis over the term of the lease unless another systematic basis is more representative of the time pattern in which economic benefits from the leased assets are consumed.

Liabilitas sewa awalnya diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal awal sewa, didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa. Jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, maka Grup menggunakan suku bunga pinjaman inkremental khusus untuk penyewa.

Pembayaran sewa yang termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa meliputi:

- Pembayaran tetap (termasuk secara substansi pembayaran tetap), dikurangi insentif sewa;
- Pembayaran variabel yang bergantung pada indeks atau suku bunga, awalnya diukur menggunakan indeks atau suku bunga pada tanggal awal sewa;
- Jumlah yang diperkirakan akan dibayar dalam jaminan nilai residual;
- Harga eksekusi opsi beli, jika cukup pasti untuk mengeksekusi opsi tersebut; dan
- Pembayaran penalti karena penghentian sewa, jika ketentuan sewa merefleksikan eksekusi opsi untuk menghentikan sewa.

Liabilitas sewa disajikan secara terpisah dalam laporan posisi keuangan konsolidasian interim.

Liabilitas sewa selanjutnya diukur dengan meningkatkan jumlah tercatat untuk merefleksikan bunga atas liabilitas sewa (dengan menggunakan metode suku bunga efektif) dan mengurangi jumlah tercatat untuk merefleksikan sewa yang telah dibayar.

Grup mengukur kembali liabilitas sewa (dan melakukan penyesuaian terhadap aset hak-guna terkait) apabila:

- Masa sewa dirubah atau terdapat kejadian signifikan atau perubahan keadaan yang mengakibatkan perubahan penilaian atas opsi membeli aset pendasar, dalam hal ini liabilitas sewa diukur kembali dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian dengan tingkat diskonto revisian;

The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that are not paid at the commencement date, discounted by using the rate implicit in the lease. If this rate cannot be readily determined, the Group use the incremental borrowing rate specific to the lessee.

Lease payments included in the measurement of the lease liability comprise:

- Fixed lease payments (including in-substance fixed payments), less any lease incentives;
- Variable lease payments that depend on an index or rate, initially measured using the index or rate at the commencement date;
- The amount expected to be payable under residual value guarantees;
- The exercise price of purchase options, if it is reasonably certain to exercise the options; and
- Payments of penalties for terminating the lease, if the lease term reflects the exercise of an option to terminate the lease.

The lease liability is presented as a separate line in the interim consolidated statement of financial position.

The lease liability is subsequently measured by increasing the carrying amount to reflect interest on the lease liability (using the effective interest method) and by reducing the carrying amount to reflect the lease payments made.

Group remeasures the lease liability (and makes a corresponding adjustment to the related right-of-use asset) whenever:

- The lease term has changed or there is a significant event or change in circumstances resulting in a change in the assessment of exercise of a purchase option, in which case the lease liability is remeasured by discounting the revised lease payments using a revised discount rate;

- Pembayaran sewa berubah akibat perubahan indeks atau suku bunga atau perubahan jumlah pembayaran yang diharapkan dalam nilai residual terjamin, yang dalam hal ini, liabilitas sewa diukur kembali dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian dengan tingkat diskonto awal (kecuali perubahan pembayaran sewa berasal dari perubahan suku bunga mengambang, dalam hal ini digunakan tingkat diskonto revisian); atau
- Kontrak sewa dimodifikasi dan modifikasi sewa tersebut tidak dicatat sebagai sewa terpisah, yang dalam hal ini liabilitas sewa diukur kembali dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian dengan tingkat diskonto revisian pada tanggal efektif modifikasi.

Grup tidak melakukan penyesuaian seperti itu selama periode yang disajikan.

Aset hak-guna meliputi jumlah pengukuran awal liabilitas sewa, pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal awal sewa dikurangi dengan insentif sewa diterima, dan biaya langsung awal. Selanjutnya, aset hak-guna diukur pada biaya perolehan dikurangi akumulasi depresiasi dan kerugian penurunan nilai.

Apabila Grup mempunyai kewajiban untuk biaya membongkar dan memindahkan aset pendasar, merestorasi tempat aset berada atau merestorasi aset pendasar ke kondisi yang disyaratkan oleh syarat dan ketentuan sewa, sepanjang menyangkut aset hak-guna, maka biaya-biaya tersebut dimasukkan sebagai biaya perolehan, kecuali biaya-biaya tersebut dikeluarkan untuk menghasilkan persediaan.

Aset hak-guna didepresiasi selama jangka waktu yang lebih pendek antara masa sewa dan masa manfaat aset pendasar. Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar atau biaya perolehan aset hak-guna merefleksikan bahwa Grup akan mengeksekusi opsi beli, maka aset hak-guna didepresiasi selama masa manfaat aset pendasar. Depresiasi dimulai dari tanggal awal sewa.

Aset hak-guna disajikan terpisah dalam laporan posisi keuangan konsolidasian. Grup menerapkan PSAK 236 (sebelumnya PSAK 48) *Penurunan Nilai Aset* untuk menentukan apakah terdapat penurunan nilai aset hak-guna dan pencatatan atas penurunan nilai aset tetap seperti yang dijelaskan pada kebijakan akuntansi atas penurunan aset.

- The lease payments change due to changes in an index or rate or a change in expected payment under a guaranteed residual value, in which cases the lease liability is remeasured by discounting the revised lease payments using the initial discount rate (unless the lease payments change is due to a change in a floating interest rate, in which case a revised discount rate is used); or
- A lease contract is modified, and the lease modification is not accounted for as a separate lease, in which case the lease liability is remeasured by discounting the revised lease payments using a revised discount rate at the effective date of the modification.

The Group did not make any such adjustments during the periods presented.

The right-of-use assets comprise the initial measurement of the corresponding lease liability, lease payments made at or before the commencement date, less any lease incentives received and any initial direct costs. The right-of-use assets are subsequently measured at cost less accumulated depreciation and impairment losses.

Whenever the Group incur an obligation for costs to dismantle and remove a leased asset, restore the site on which it is located or restore the underlying asset to the condition required by the terms and conditions of the lease, to the extent the costs are related to a right-of-use asset, the costs are included in the related right-of-use asset, unless those costs are incurred to produce inventories.

Right-of-use assets are depreciated over the shorter period of lease term and useful life of the underlying asset. If a lease transfers ownership of the underlying asset or the cost of the right-of-use asset reflects that The Group expects to exercise a purchase option, the related right-of-use asset is depreciated over the useful life of the underlying asset. The depreciation starts at the commencement date of the lease.

The right-of-use assets are presented as a separate line in the consolidated statement of financial position. The Group applies PSAK 236 (previously PSAK 48) *Impairment of Assets* to determine whether a right-of-use asset is impaired and accounts for any identified impairment loss as described in the impairment of assets policy.

Sewa variabel yang tidak tergantung pada suatu indeks atau suku bunga, tidak dimasukkan dalam pengukuran liabilitas sewa dan aset hak-guna. Pembayaran tersebut dicatat sebagai beban pada periode kejadian atau kondisi yang memicu pembayaran tersebut terjadi dan dimasukkan dalam beban operasi lainnya dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Sebagai tindakan praktis, PSAK 116 (sebelumnya PSAK 73) *Sewa* memungkinkan penyewa untuk tidak memisahkan komponen nonsewa, dan sebagai gantinya memperhitungkan setiap sewa dan komponen nonsewa terkait sebagai pengaturan tunggal. Grup belum menggunakan cara praktis ini. Untuk kontrak yang mengandung komponen sewa dan satu atau lebih komponen sewa atau nonsewa tambahan, Grup mengalokasikan pertimbangan dalam kontrak untuk setiap komponen sewa berdasarkan harga relatif berdiri sendiri dari komponen sewa dan kedudukan agregat harga-sendiri komponen nonsewa.

Jual dan sewa-balik

Pada saat Grup mengalihkan aset ke entitas lain dan menyewa kembali aset tersebut, Grup mencatat kontrak pengalihan aset dan sewa, dengan terlebih dahulu menerapkan persyaratan PSAK 115 (sebelumnya PSAK 72) *Pendapatan dengan Kontrak dari Pelanggan* ketika kewajiban pelaksanaan terpenuhi untuk menentukan apakah pengalihan aset tersebut dapat diakui sebagai penjualan.

Jika pengalihan aset memenuhi persyaratan PSAK 115 (sebelumnya PSAK 72) *Pendapatan dengan Kontrak dari Pelanggan* untuk dicatat sebagai penjualan aset, maka transaksi tersebut dicatat sebagai berikut:

- Grup mengukur aset hak pakai yang timbul dari sewa-balik sebesar proporsi nilai tercatat sebelumnya dari aset yang terkait dengan hak-guna yang dimiliki oleh Grup. Oleh karena itu, Grup hanya mengakui keuntungan atau kerugian yang terkait dengan hak yang dialihkan.

Jika nilai wajar imbalan penjualan aset tidak sama dengan nilai wajar aset, atau jika pembayaran sewa tidak menggunakan harga pasar, Grup membuat penyesuaian berikut untuk mengukur hasil penjualan pada nilai wajar:

- Seluruh keadaan *below-market* diakui sebagai pembayaran di muka; dan
- Seluruh keadaan *above-market* diakui sebagai tambahan pembiayaan dari *lessor* kepada *lessee*.

Variable rents that do not depend on an index or rate are not included in the measurement of the lease liability and the right-of-use asset. The related payments are recognized as an expense in the period in which the event or condition that triggers those payments occurs and are included in the line 'Other operating expenses' in the interim consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

As a practical expedient, PSAK 116 (previously PSAK 73) *Leases* permits a lessee not to separate non-lease components, and instead account for any lease and associated non-lease components as a single arrangement. The Group has not used this practical expedient. For a contract that contain a lease component and one or more additional lease or non-lease components, the Group allocates the consideration in the contract to each lease component on the basis of the relative stand-alone price of the lease component and the aggregate stand-alone price of the non-lease components.

Sale and leaseback

When the Group transfers an asset to another entity and leases that asset back, the Group accounts for the transfer contract and the lease, by first applying the requirements of PSAK 115 (previously PSAK 72) *Revenue from Contracts with Customers* when a performance obligation is satisfied to determine whether the transfer of the asset is accounted for as a sale.

If the transfer of asset satisfies the requirements of PSAK 115 (previously PSAK 72) *Revenue from Contracts with Customers* to be accounted for as a sale, the transaction is accounted for as follows:

- The Group measures the right-of-use asset arising from the leaseback at the proportion of the previous carrying amount of the asset that relates to the right-of-use assets retained by the Group. Accordingly, the Group recognizes only the amount of any gain or loss that relates to the rights transferred.

If the fair value of the consideration for the sale of an asset does not equal the fair value of the asset, or if the payments for the lease are not at market rates, the Group makes the following adjustments to measure the sale proceeds at fair value:

- Any below-market terms accounted for as a prepayment of lease payments; and
- Any above-market terms accounted for as additional financing provided by the lessor to the lessee.

Jika pengalihan aset tidak memenuhi persyaratan PSAK 115 (sebelumnya PSAK 72 *Pendapatan dengan Kontrak dari Pelanggan*) untuk dicatat sebagai penjualan, Grup tetap mengakui aset yang dialihkan dan mengakui liabilitas keuangan yang setara dengan hasil transfer.

u. Provisi

Provisi diakui ketika Grup memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, kemungkinan besar Grup diharuskan menyelesaikan kewajiban dan estimasi andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Jumlah yang diakui sebagai provisi merupakan estimasi terbaik dari pertimbangan yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaporan, dengan mempertimbangkan risiko dan ketidakpastian yang meliputi kewajibannya. Apabila suatu provisi diukur menggunakan arus kas yang diperkirakan untuk menyelesaikan kewajiban kini, maka nilai tercatatnya adalah nilai kini dari arus kas.

Ketika beberapa atau seluruh manfaat ekonomi untuk penyelesaian provisi yang diharapkan dapat dipulihkan dari pihak ketiga, piutang diakui sebagai aset apabila terdapat kepastian bahwa penggantian akan diterima dan jumlah piutang dapat diukur secara andal.

v. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Grup mengakui pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah diselesaikan dengan mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan.

Pendapatan diukur berdasarkan jumlah imbalan yang ditentukan dalam kontrak dan tidak termasuk jumlah yang ditagih atas nama pihak ketiga.

Pendapatan jasa

Grup memperoleh pendapatan dari penyediaan jasa penambangan, termasuk penambangan kontrak, pemindahan lapisan penutup tanah, dan pengangkutan batubara ke sektor pertambangan. Grup juga memperoleh pendapatan dari penyediaan logistik dan layanan pendukung untuk sektor minyak dan gas.

If the transfer of asset does not satisfy the requirements of PSAK 115 (previously PSAK 72) *Revenue from Contracts with Customers* to be accounted for as a sale, the Group continues to recognize the transferred asset and recognizes a financial liability equal to the transfer proceeds.

u. Provisions

Provisions are recognized when the Group has a present obligation (legal or constructive) as a result of a past event, it is probable that the Group will be required to settle the obligation, and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

The amount recognized as a provision is the best estimate of the consideration required to settle the present obligation at the end of the reporting period, taking into account the risks and uncertainties surrounding the obligation. Where a provision is measured using the cash flows estimated to settle the present obligation, its carrying amount is the present value of those cash flows.

When some or all of the economic benefits required to settle a provision are expected to be recovered from a third party, a receivable is recognized as an asset if it is virtually certain that reimbursement will be received, and the amount of the receivable can be measured reliably.

v. Revenue and Expense Recognition

The Group recognize revenue when the performance obligation has been satisfied by transferring control of a promised goods or services to the customer.

Revenue is measured based on the consideration specified in the contract and excludes amounts collected on behalf of third parties.

Rendering of services

The Group generates revenue from the provision of mining services, including contract mining, overburden removal, and coal haulage to the mining sector. The Group also generates revenue from providing logistics and support services to the oil and gas sector.

Grup membuat kontrak layanan jangka pendek dan jangka panjang dengan pelanggan. Berdasarkan ketentuan kontrak, Grup menambah aset yang dikendalikan pelanggan atau pelanggan secara bersamaan menerima dan mengkonsumsi manfaat dari kinerja Grup. Oleh karena itu, pendapatan dari kontrak jasa diakui sepanjang waktu berdasarkan tahap penyelesaian kontrak pada akhir periode pelaporan.

Tingkat penyelesaian dapat ditentukan dengan metode yang dapat mengukur jasa secara andal jasa yang diberikan. Bergantung pada jenis jasa dan sifat transaksi, metode tersebut dapat mencakup:

- a. Survei atas pekerjaan yang telah dilakukan;
- b. Nilai pekerjaan yang diselesaikan ditentukan berdasarkan harga untuk setiap kegiatan yang dilakukan yang mengidentifikasi nilai pekerjaan yang dilakukan dan oleh karena itu nilai pendapatan harus diakui;
- c. Jasa yang dilakukan hingga saat ini sebagai persentase dari total jasa yang telah dilakukan; atau
- d. Proporsi biaya kontrak yang timbul untuk pekerjaan yang dilaksanakan sampai saat ini relatif terhadap estimasi total biaya kontrak.

Pendapatan dari kontrak konstruksi

Grup membuat kontrak konstruksi jangka panjang dengan pelanggan. Kewajiban pelaksanaan keseluruhan proyek, yang diatur dalam kontrak, mengingat bahwa jasa yang berbeda saling bergantung, terintegrasi, dan ditujukan untuk transfer proyek ke pelanggan secara keseluruhan, mewakili hasil gabungan yang terdapat di kontrak oleh pelanggan.

Berdasarkan persyaratan kontrak, Grup meningkatkan aset yang dikendalikan oleh pelanggan. Oleh karena itu, pendapatan dari kontrak konstruksi diakui sepanjang waktu dengan metode input biaya-ke-biaya, yaitu berdasarkan proporsi biaya kontrak yang terjadi untuk pekerjaan yang dilaksanakan hingga saat ini dibandingkan dengan estimasi total biaya kontrak. Manajemen menganggap bahwa metode ini adalah ukuran yang tepat untuk kemajuan dalam memenuhi kewajiban kinerja untuk kontrak konstruksi jangka panjang Grup.

The Group enters into short-term and long-term service contracts with customers. Under the terms of the contracts, the Group enhances assets which the customers control or the customers simultaneously receive and consume the benefit of the Group's performance. Revenue from service contracts is therefore recognized over time based on the stage of completion of the contract at the end of the reporting period.

The stage of completion may be determined based on methods that can reasonably measure the services performed. Depending on nature of the service contracts, the methods may include:

- a. Surveys of work performed;
- b. Value of work completed determined based on schedule of rates for each of the activities performed which identify value for the work performed and hence the value of the revenue to be recognized;
- c. Services performed to date as a percentage of total services to be performed; or
- d. The proportion of contract costs incurred for work performed to date relative to the estimated total contract costs.

Revenue from construction contracts

The Group enters into long-term construction contracts with customers. The performance obligation is usually the entire project, as provided for in the contract, given that the different services are highly interdependent, integrated, and are aimed at transferring the project to the customer as a whole, representing the combined output for which the customer has contracted.

Under the terms of the contracts, the Group enhances assets which the customers control. Revenue from construction contracts is therefore recognized over time on a cost-to-cost input method, i.e. based on the proportion of contract costs incurred for work performed to date relative to the estimated total contract costs. Management considers that this input method is an appropriate measure of the progress towards complete satisfaction of these performance obligations for long-term construction contracts of the Group.

Jika hasil dari kewajiban pelaksanaan tidak dapat diukur secara wajar, dan biaya yang terjadi dalam memenuhi kewajiban pelaksanaan diperkirakan dapat dipulihkan, maka pendapatan diakui hanya sejumlah biaya yang terjadi.

Jika kemungkinan besar biaya yang terjadi untuk memenuhi kewajiban pelaksanaan akan melebihi pendapatan kontrak, kerugian segera diakui.

Tidak terdapat komponen pembiayaan yang signifikan dalam kontrak konstruksi karena rata-rata jangka waktu kredit adalah dibawah 1 tahun.

Grup menyajikan saldo kontraknya, berdasarkan basis per kontrak, dalam posisi aset kontrak atau liabilitas bersih, secara terpisah dari piutang usaha. Aset kontrak dan piutang usaha keduanya merupakan hak atas imbalan sebagai imbalan atas barang atau jasa yang telah dialihkan Grup kepada pelanggan. Namun, klasifikasi tersebut bergantung pada apakah hak tersebut hanya tergantung pada kondisi waktu (piutang usaha) atau apakah juga tergantung pada hal lain (aset kontrak), seperti pemenuhan kewajiban pelaksanaan selanjutnya berdasarkan kontrak. Liabilitas kontrak adalah jumlah kumulatif yang diterima dan piutang kontraktual oleh Grup yang melebihi hak imbalan yang dihasilkan dari kinerja Grup berdasarkan kontrak tertentu.

Penjualan Batubara

Grup memperoleh pendapatan dengan menambang dan kemudian menjual batubara ke pelanggan dengan berbagai persyaratan komersial.

Grup menjual beberapa batubara dengan *incoterm* tertentu, yang berarti bahwa Grup bertanggung jawab atas barang dan jasa lainnya pada titik dimana kepemilikan berpindah.

Grup mengakui pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah diselesaikan dengan mengalihkan kontrol atas barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan.

Pendapatan diukur berdasarkan jumlah imbalan yang ditentukan dalam kontrak dan tidak termasuk jumlah yang ditagih atas nama pihak ketiga.

Beban

Beban diakui pada saat terjadinya.

Where the outcome of a performance obligation cannot be reasonably measured, and the costs incurred in satisfying the performance obligation are expected to be recoverable, the revenue is recognized only to the extent of the costs incurred.

When it is probable that the cost incurred in satisfying a performance obligation will exceed the contract revenue, the expected loss is recognized immediately.

There is no significant financing component in construction contracts as the average credit term is below 1 year.

The Group presents its contract balances, on a contract-by-contract basis, in a net contract asset or liability position, separately from its trade accounts receivables. Contract assets and trade accounts receivable are both rights to consideration in exchange for goods or services that the Group has transferred to a customer; however, the classification depends on whether such right is only conditional on the passage of time (trade accounts receivable) or if it is also conditional on something else (contract assets), such as the satisfaction of further performance obligations under the contract. A contract liability is the cumulative amount received and contractually receivable by the Group that exceeds the right to consideration resulting from the Group's performance under a given contract.

Sales of Coal

The Group earns revenue by mining and subsequently selling coal to customers under a range of commercial terms.

The Group sells certain of its coal on certain *incoterm*, which means that the Group is responsible for goods and other services at which title of the goods passes.

The Group recognize revenue when the performance obligation has been satisfied by transferring control of a promised goods or services to the customer.

Revenue is measured based on the consideration specified in the contract and excludes amounts collected on behalf of third parties.

Expenses

Expenses are recognized when incurred.

w. Imbalan Pasca Kerja

Program imbalan pasti

Grup memberikan imbalan pasca kerja imbalan pasti untuk karyawan sekurang kurangnya sama dengan imbalan pasca kerja yang diatur dalam Undang-Undang yang berlaku.

Biaya penyediaan imbalan pasca kerja ditentukan dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*, dengan penilaian aktuarial yang dilakukan pada setiap akhir periode pelaporan tahunan. Pengukuran kembali, terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial, yang tercermin langsung dalam laporan posisi keuangan konsolidasian interim yang dibebankan atau dikreditkan dalam penghasilan komprehensif lain periode terjadinya.

Pengukuran kembali diakui dalam penghasilan komprehensif lain tercermin sebagai pos terpisah pada penghasilan komprehensif lain di ekuitas dan tidak akan direklas ke laba rugi. Biaya jasa lalu diakui dalam laba rugi pada periode amendemen program. Bunga dihitung dengan mengalikan tingkat diskonto pada awal periode imbalan pasti dengan liabilitas imbalan pasti. Biaya imbalan pasti dikategorikan sebagai berikut:

- Biaya jasa (termasuk biaya jasa kini, biaya jasa lalu serta keuntungan dan kerugian kurtailmen dan penyelesaian);
- Beban bunga; dan
- Pengukuran kembali.

Grup menyajikan dua komponen pertama dari biaya imbalan pasti di laba rugi, Keuntungan dan kerugian kurtailmen dicatat sebagai biaya jasa lalu.

Liabilitas imbalan pensiun yang diakui pada laporan posisi keuangan konsolidasian interim merupakan defisit aktual dalam program imbalan pasti Grup.

Liabilitas untuk pesangon diakui mana yang terjadi lebih dulu ketika entitas tidak dapat lagi menarik penawaran imbalan tersebut dan ketika entitas mengakui biaya restrukturisasi terkait.

w. Employee Benefits

Defined benefit plans

The Group provides post-employment benefits for its employees at least equivalent with the post-employment benefits as stipulated in applicable Law.

The cost of providing post-employment benefits is determined using the Projected Unit Credit method, with actuarial valuations being carried out at the end of each annual reporting period. Remeasurement, comprising actuarial gains and losses, is reflected immediately in the interim consolidated statement of financial position with a charge or credit recognized in other comprehensive income in the period in which they occur.

Remeasurement recognized in other comprehensive income is reflected as a separate item under other comprehensive income in equity and will not be reclassified to profit or loss. Past service cost is recognized in profit or loss in the period of a plan amendment. Interest is calculated by applying the discount rate at the beginning of the period to the defined benefit liability. Defined benefit costs are categorised as follows:

- Service cost (including current service cost past service cost, as well as gains and losses on curtailments and settlements);
- Interest expense; and
- Remeasurement.

The Group presents the first two components of defined benefit costs in profit or loss. Curtailment gains and losses are accounted for as past service costs.

The retirement benefit obligation recognized in the interim consolidated statement of financial position represents the actual deficit in the Group's defined benefit plans.

A liability for a termination benefit is recognized at the earlier of when the entity can no longer withdraw the offer of the termination benefit and when the entity recognizes any related restructuring costs.

Imbalan kerja jangka panjang lainnya

Perhitungan imbalan kerja jangka panjang ditentukan dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*. Biaya jasa lalu dan keuntungan atau kerugian aktuarial diakui langsung pada tahun yang bersangkutan.

Jumlah yang diakui sebagai liabilitas imbalan kerja jangka panjang lainnya di laporan posisi keuangan konsolidasian interim merupakan nilai kini kewajiban imbalan kerja jangka panjang.

Pesangon

Liabilitas untuk pesangon diakui mana yang terjadi lebih dulu ketika entitas tidak dapat lagi menarik penawaran imbalan tersebut dan ketika entitas mengakui biaya restrukturisasi terkait.

x. Pajak Penghasilan

Beban pajak penghasilan merupakan jumlah pajak kini terutang dan pajak tangguhan.

Pajak kini

Pajak kini terutang berdasarkan laba kena pajak untuk suatu tahun. Laba kena pajak berbeda dari laba sebelum pajak seperti yang dilaporkan di laba rugi karena tidak memperhitungkan penghasilan atau beban yang dikenakan pajak atau dikurangkan pada tahun berbeda dan tidak memperhitungkan pos-pos yang tidak pernah dikenakan pajak atau tidak dapat dikurangkan. Liabilitas Grup untuk pajak kini dihitung berdasarkan tarif pajak yang telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Provisi diakui untuk penentuan pajak yang tidak pasti, tetapi kemungkinan besar akan mengakibatkan arus keluar dana kepada otoritas pajak. Provisi diukur sebesar estimasi terbaik atas jumlah ekspektasian yang terhutang. Penilaian berdasarkan pada pertimbangan profesional pajak dalam Grup yang didukung dengan pengalaman lalu atas aktivitas tersebut dan dalam kasus tertentu berdasarkan saran pakar pajak independen.

Other long-term benefits

The cost of providing long-term benefits is determined using the Projected Unit Credit method. Past service cost and actuarial gains or losses are recognized immediately in profit or loss.

The long-term employee benefits obligation recognized in the interim consolidated statements of financial position represents the present value of the long-term employee benefits obligation.

Termination

A liability for a termination benefit is recognized at the earlier of when the entity can no longer withdraw the offer of the termination benefit and when the entity recognizes any related restructuring costs.

x. Income Tax

Income tax expense represents the sum of the tax currently payable and deferred tax.

Current tax

The tax currently payable is based on taxable profit for the year. Taxable profit differs from net profit as reported in profit or loss because it excludes items of income or expense that are taxable or deductible in other years and it further excludes items that are never taxable or deductible. The Group's liability for current tax is calculated using tax rates that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period.

A provision is recognized for those matters for which the tax determination is uncertain, but it is considered probable that there will be a future outflow of funds to a tax authority. The provisions are measured at the best estimate of the amount expected to become payable. The assessment is based on the judgement of tax professionals within the Group supported by previous experience in respect of such activities and in certain cases based on specialist independent tax advice.

Pajak tangguhan

Pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam laporan keuangan konsolidasian interim dengan dasar pengenaan pajak yang digunakan dalam perhitungan laba kena pajak. Liabilitas pajak tangguhan umumnya diakui untuk seluruh perbedaan temporer kena pajak. Aset pajak tangguhan umumnya diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan. Aset dan liabilitas pajak tangguhan tidak diakui jika perbedaan temporer timbul dari pengakuan awal (selain dari kombinasi bisnis) dari aset dan liabilitas suatu transaksi yang tidak mempengaruhi laba kena pajak atau laba akuntansi. Selain itu, liabilitas pajak tangguhan tidak diakui jika perbedaan temporer timbul dari pengakuan awal *goodwill*.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan berlaku dalam periode ketika liabilitas diselesaikan atau aset dipulihkan berdasarkan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak yang sesuai dengan cara Grup memperkirakan, pada akhir periode pelaporan, untuk memulihkan atau menyelesaikan jumlah tercatat aset dan liabilitasnya.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah ulang pada akhir periode pelaporan dan dikurangi jumlah tercatatnya jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut.

Pajak kini dan pajak tangguhan diakui sebagai beban atau penghasilan dalam laba rugi periode berjalan, kecuali untuk pajak penghasilan yang timbul dari transaksi atau peristiwa yang diakui di luar laba rugi (baik dalam penghasilan komprehensif lain maupun secara langsung di ekuitas), dalam hal tersebut pajak juga diakui di luar laba rugi, atau yang timbul dari akuntansi awal kombinasi bisnis. Dalam hal kombinasi bisnis, pengaruh pajak termasuk dalam akuntansi kombinasi bisnis.

Deferred tax

Deferred tax is recognized on temporary differences between the carrying amounts of assets and liabilities in the interim consolidated financial statements and the corresponding tax bases used in the computation of taxable profit. Deferred tax liabilities are generally recognized for all taxable temporary differences. Deferred tax assets are generally recognized for all deductible temporary differences to the extent that is probable that taxable profit will be available against which those deductible temporary differences can be utilized. Such deferred tax assets and liabilities are not recognized if the temporary differences arise from the initial recognition (other than in a business combination) of assets and liabilities in a transaction that affects neither the taxable profit nor the accounting profit. In addition, deferred tax liabilities are not recognized if the temporary differences arise from the initial recognition of goodwill.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply in the period in which the liability is settled or the asset realized, based on the tax rates (and tax laws) that have been enacted, or substantively enacted, by the end of the reporting period.

The measurement of deferred tax assets and liabilities reflects the tax consequences that would follow from the manner in which the Group expects, at the end of the reporting period, to recover or settle the carrying amount of their assets and liabilities.

The carrying amount of deferred tax asset is reviewed at the end of each reporting period and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profits will be available to allow all or part of the asset to be recovered.

Current and deferred tax are recognized as an expense or income in profit or loss, except when they relate to items that are recognized outside of profit or loss (whether in other comprehensive income or directly in equity), in which case the tax is also recognized outside of profit or loss, or where they arise from the initial accounting for a business combination. In the case of a business combination, the tax effect is included in the accounting for the business combination.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan saling hapus ketika entitas memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini dan ketika aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama atas entitas kena pajak yang sama atau entitas kena pajak yang berbeda yang memiliki intensi untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap periode masa depan dimana jumlah signifikan atas aset atau liabilitas pajak tangguhan diharapkan untuk diselesaikan atau dipulihkan.

y. Pajak Final

Atas pendapatan dari jasa konstruksi dikenakan pajak penghasilan final, beban pajak diakui secara proporsional dengan jumlah pendapatan menurut akuntansi yang diakui pada periode berjalan. Akun pajak penghasilan final dibayar di muka disajikan terpisah dari utang pajak penghasilan final.

z. Laba per Saham

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba diatribusikan kepada pemilik Perusahaan dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan.

Laba per saham dilusian dihitung dengan membagi laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang telah disesuaikan dengan dampak dari semua efek berpotensi saham biasa yang dilutif.

aa. Informasi Segmen

Segmen operasi diidentifikasi berdasarkan laporan internal mengenai komponen dari Grup yang secara reguler ditelaah oleh pengambil keputusan operasional dalam rangka mengalokasikan sumber daya dan menilai kinerja segmen operasi.

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

- a) yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
- b) hasil operasinya ditelaah secara reguler oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
- c) tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

Deferred tax assets and liabilities are offset when there is legally enforceable right to set off current tax assets against current tax liabilities and when they relate to income taxes levied by the same taxation authority on either the same taxable entity or different taxable entities when there is an intention to settle its current tax assets and current tax liabilities on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously, in each future period in which significant amounts of deferred tax liabilities or assets are expected to be settled or recovered.

y. Final Tax

Tax expense on revenues from construction services are subject to final tax which is recognized proportionately based on the revenue recognized in the current year. Prepaid final tax is presented separately from final tax payable.

z. Earnings per Share

Basic earnings per share is computed by dividing profit attributable to the owners of the Company by the weighted average number of shares outstanding during the period.

Diluted earnings per share is computed by dividing net income attributable to the owners of the Company by the weighted average number of shares outstanding as adjusted for the effects of all dilutive potential ordinary shares.

aa. Segment Information

Operating segments are identified on the basis of internal reports about components of the Group that are regularly reviewed by the chief operating decision maker in order to allocate resources to the segments and to assess their performance.

An operating segment is a component of an entity:

- a) that engages in business activities which may earn revenue and incur expenses (including revenue and expenses relating to the transaction with other components of the same entity);
- b) whose operating results are reviewed regularly by the entity's chief operating decision maker to make decision about resources to be allocated to the segments and assess its performance; and
- c) for which discrete financial information is available.

Informasi yang digunakan oleh pengambil keputusan operasional dalam rangka menghasilkan sumber daya dan menilai kinerja segmen operasi terfokus pada kategori dari setiap produk.

Information reported to the chief operating decision maker for the purpose of resource allocation and assessment of its performance is more specifically focused on the category of each product.

4. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN SUMBER UTAMA KETIDAKPASTIAN ESTIMASI

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Grup, yang dijelaskan dalam Catatan 3, Direksi diwajibkan untuk membuat penilaian, estimasi dan asumsi tentang jumlah tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia dari sumber lain. Estimasi dan asumsi yang terkait didasarkan pada pengalaman historis dan faktor-faktor lain yang dianggap relevan. Hasil aktualnya mungkin berbeda dari estimasi tersebut.

Estimasi dan asumsi yang mendasari ditelaah secara berkelanjutan. Revisi estimasi akuntansi diakui dalam periode yang perkiraan tersebut direvisi jika revisi hanya mempengaruhi periode itu, atau pada periode revisi dan periode masa depan jika revisi mempengaruhi kedua periode saat ini dan masa depan.

Pertimbangan Kritis dalam Penerapan Kebijakan Akuntansi

Dalam penerapan kebijakan akuntansi, yang dijelaskan dalam Catatan 3, manajemen tidak membuat pertimbangan kritis atas pengaruh signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian interim, selain yang terkait dengan estimasi.

Sumber Utama Estimasi Ketidakpastian

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber estimasi ketidakpastian utama lainnya pada akhir periode pelaporan, yang memiliki risiko signifikan yang mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam keuangan tahun depan dijelaskan dibawah ini:

- Perhitungan cadangan kerugian piutang usaha

Ketika mengukur KKE, Grup menggunakan tingkat kerugian kredit historis atas pengelompokan berbagai segmen pelanggan yang memiliki risiko kredit yang sama, dan informasi perkiraan masa-depan yang wajar dan didukung, berdasarkan asumsi pergerakan masa depan atas penentu ekonomi dan bagaimana penentu tersebut akan saling memengaruhi satu dengan lainnya.

Kerugian saat gagal bayar adalah estimasi kerugian yang timbul pada saat gagal bayar. *Loss given default* dihitung dari selisih antara arus kas kontraktual dan arus kas yang diekspektasi diterima oleh pemberi pinjaman, dengan memperhitungkan arus kas dari penjualan angsuran dan peningkatan kredit.

4. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS AND KEY SOURCES OF ESTIMATES UNCERTAINTY

In the application of the Group's accounting policies, which are described in Note 3, the Directors are required to make judgments, estimates and assumptions about the carrying amounts of assets and liabilities that are not readily apparent from other sources. The estimates and associated assumptions are based on historical experience and other factors that are considered to be relevant. Actual results may differ from these estimates.

The estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates are recognized in the period which the estimate is revised if the revision affects only that period, or in the period of the revision and future periods if the revision affects both current and future periods.

Critical Judgments in Applying Accounting Policies

In the process of applying the accounting policies described in Note 3, management has not made any critical judgement that has a significant effect on the amounts recognized in the interim consolidated financial statements, apart from those involving estimate.

Key Sources of Uncertainty Estimation

The key assumptions concerning future and other key sources of uncertainty estimation at the end of the reporting period, that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are discussed below:

- Calculation of loss allowance for trade accounts receivable

When measuring ECL, the Group uses historical defaults rates for groupings of various customer segments that have similar credit risk characteristics, and reasonable and supportable forward-looking information, which is based on assumptions for the future movement of different economic drivers and how these drivers will affect each others.

Loss given default is an estimate of the loss arising on default. It is based on the difference between the contractual cash flows due and those that the lender would expect to receive, taking into account cash flows from collateral and integral credit enhancements.

Probabilitas gagal bayar merupakan input utama dalam mengukur KKE. Probabilitas gagal bayar adalah estimasi kemungkinan gagal bayar selama jangka waktu tertentu, yang perhitungannya mencakup data historis, asumsi dan ekspektasi dari kondisi masa depan. Cadangan kerugian piutang usaha diungkapkan pada Catatan 6a.

- Taksiran Masa Manfaat Ekonomis Aset Tetap

Masa manfaat setiap aset tetap Grup ditentukan berdasarkan kegunaan yang diharapkan dari aset tersebut. Estimasi ini ditentukan berdasarkan evaluasi teknis internal dan pengalaman atas aset sejenis. Masa manfaat setiap aset direviu secara periodik dan disesuaikan apabila prakiraan berbeda dengan estimasi sebelumnya karena keausan, keusangan teknis dan komersial, hukum atau keterbatasan lainnya atas pemakaian aset. Namun terdapat kemungkinan bahwa hasil operasi dimasa mendatang dapat dipengaruhi secara signifikan oleh perubahan atas jumlah serta periode pencatatan biaya yang diakibatkan karena perubahan faktor yang disebutkan di atas.

Perubahan masa manfaat aset tetap dapat mempengaruhi jumlah biaya penyusutan yang diakui dan merubah nilai tercatat aset tersebut.

Nilai tercatat aset tetap diungkapkan dalam Catatan 12.

- Penurunan nilai *goodwill*

Goodwill diisyaratkan untuk penilaian penurunan nilai setiap tahun dan ketika keadaan mengindikasikan bahwa nilai tercatat mungkin mengalami penurunan nilai. Nilai yang dapat terpulihkan dari suatu aset atau unit penghasil kas ditentukan berdasarkan nilai pakai. Model tersebut melibatkan pertimbangan dan estimasi yang signifikan sehubungan dengan tingkat diskonto dan proyeksi pendapatan.

Perubahan asumsi penting, termasuk asumsi tingkat diskonto atau proyeksi pendapatan dalam proyeksi arus kas, dapat memengaruhi estimasi nilai yang dapat diperoleh kembali secara material.

Probability of default constitutes a key input in measuring ECL. Probability of default is an estimate of the likelihood of default over a given time horizon, the calculation of which includes historical data, assumptions and expectations of future conditions. The loss allowance for trade accounts receivable is disclosed in Note 6a.

- Estimated Useful Lives of Property, Plant and Equipment

The useful life of each item of the Group's property, plant and equipment are estimated based on the period over which the asset is expected to be available for use. Such estimation is based on internal technical evaluation and experience with similar assets. The estimated useful life of each asset is reviewed periodically and updated if expectations differ from previous estimates due to physical wear and tear, technical or commercial obsolescence and legal or other limits on the use of the asset. However, it is possible that future results of operations could be materially affected by changes in the amounts and timing of recorded expenses brought about by changes in the factors mentioned above.

A change in the estimated useful life of any item of property, plant and equipment would affect the recorded depreciation expense and change the carrying amounts of these assets.

The carrying amounts of property, plant and equipment are disclosed in Note 12.

- Impairment of goodwill

Goodwill is required to be assessed for impairment annually and when circumstances indicate that the carrying value may be impaired. The recoverable amount of a cash generating unit is determined based on its value-in-use. The model involves significant judgment and estimates in respect of discount rate and revenue projection.

Changing the key assumptions, including the discount rates or the revenue projection assumptions in the cash flow projections, could materially affect the estimation of recoverable amount.

5. KAS DAN SETARA KAS

5. CASH AND CASH EQUIVALENTS

	30 Juni/ June 30, 2024 US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2023 US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2022 US\$ '000	
Kas	38	36	32	Cash on hand
Bank				Cash in banks
Rupiah				Rupiah
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	49.460	38.908	36.636	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Central Asia Tbk	10.572	-	-	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank HSBC Indonesia	499	430	417	PT Bank HSBC Indonesia
PT Bank CIMB Niaga Tbk	389	8.420	198	PT Bank CIMB Niaga Tbk
Citibank, N.A.	248	81	115	Citibank, N.A.
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	55	106	58	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
MUFG Bank Ltd.	1	1	-	MUFG Bank Ltd.
Dolar Amerika Serikat				U.S. Dollar
PT Bank CIMB Niaga Tbk	15.047	6.688	12	PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	12.555	11.343	16.873	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank HSBC Indonesia	87	16	20	PT Bank HSBC Indonesia
PT Bank Central Asia Tbk	11	-	-	PT Bank Central Asia Tbk
Citibank, N.A.	10	122	111	Citibank, N.A.
MUFG Bank Ltd.	8	8	-	MUFG Bank Ltd.
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	6	6	2	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1	1	1	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Dolar Australia				Australian Dollar
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	97	21	-	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Westpac	49	93	43	Westpac
PT Bank HSBC Indonesia	32	669	879	PT Bank HSBC Indonesia
Euro				Euro
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	50	-	-	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank HSBC Indonesia	7	7	7	PT Bank HSBC Indonesia
Dolar Singapura				Singapore Dollar
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1	-	-	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Sub jumlah	<u>89.185</u>	<u>66.920</u>	<u>55.372</u>	Sub total
Deposito berjangka				Time deposits
Rupiah				Rupiah
PT Bank Tabungan Negara Tbk	2.740	-	-	PT Bank Tabungan Negara Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk	308	1.470	-	PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	-	3.243	-	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	1.304	-	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank HSBC Indonesia	-	14	3.178	PT Bank HSBC Indonesia
PT Bank Permata Tbk	-	-	3.178	PT Bank Permata Tbk
Sub jumlah	<u>3.048</u>	<u>6.031</u>	<u>6.356</u>	Sub total
Jumlah	<u><u>92.271</u></u>	<u><u>72.987</u></u>	<u><u>61.760</u></u>	Total
Tingkat suku bunga per tahun				Interest rates per annum
Deposito berjangka				Time deposits
Rupiah	2,25% - 6,25%	2,25% - 5,50%	2,25% - 4,25%	Rupiah

Tidak terdapat saldo kas dan setara kas kepada pihak berelasi.

There are no balances of cash and cash equivalents held by related parties.

Tidak terdapat saldo kas dan setara kas yang dijadikan jaminan atas pinjaman Grup.

There are no balances of cash and cash equivalents used as the collateral for the Group's loans.

6. PIUTANG

a. Piutang Usaha

	30 Juni/ June 30, 2024 US\$ '000	31 Desember/ Desember 31, 2023 US\$ '000	31 Desember/ Desember 31, 2022 US\$ '000
a. Berdasarkan pelanggan			
Pihak berelasi (Catatan 35)			
Fluor Petrosea Joint Organization	29.297	20.842	14.998
PT Nusa Halmahera Minerals	-	-	8.873
Jumlah	<u>29.297</u>	<u>20.842</u>	<u>23.871</u>
Pihak ketiga			
PT Kideco Jaya Agung	22.645	26.304	18.858
PT Freeport Manyar Refinery (sebelumnya PT Manyar Maju Refinery)	22.626	9.333	-
PT Hardaya Mining Energy	16.809	18.742	32.353
PT Freeport Indonesia	15.318	14.020	16.988
BP Berau Ltd.	14.197	1.615	2.027
PT Kedap Sayaaq	14.099	7.140	-
PT Kartika Selabumi Mining	9.518	10.179	7.754
PT Masmino Dwi Area	8.987	23.787	1.396
PT Indo Bara Pratama	5.758	11.375	986
Flame Asia Resources Pte. Ltd.	3.647	1.274	-
PT Indonesia Ruipu Nickel and Chrome Alloy	1.682	2.232	-
PT Sumberdaya Arindo	-	1.601	-
Lain-lain (masing-masing dibawah US\$ 500 ribu)	1.440	1.393	2.261
Sub jumlah	<u>136.726</u>	<u>128.995</u>	<u>82.623</u>
Cadangan kerugian kredit	<u>(417)</u>	<u>(24)</u>	<u>(43)</u>
Bersih	<u>136.309</u>	<u>128.971</u>	<u>82.580</u>
Jumlah	<u><u>165.606</u></u>	<u><u>149.813</u></u>	<u><u>106.451</u></u>
b. Berdasarkan mata uang			
Mata uang fungsional			
Dolar Amerika Serikat	7.450	12.713	14.730
Mata uang lain			
Rupiah	158.573	137.124	91.764
Jumlah	<u>166.023</u>	<u>149.837</u>	<u>106.494</u>
Cadangan kerugian kredit	<u>(417)</u>	<u>(24)</u>	<u>(43)</u>
Bersih	<u>165.606</u>	<u>149.813</u>	<u>106.451</u>

Pada tanggal 1 Januari 2022, piutang usaha adalah sebesar US\$ 89,9 juta (setelah dikurangi cadangan kerugian kredit sebesar US\$ 1.548 ribu).

Pada tanggal 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, jangka waktu rata-rata kredit pendapatan adalah 10 – 60 hari serta pada tanggal 31 Desember 2022, jangka waktu rata-rata kredit pendapatan adalah 7 – 60 hari. Tidak ada bunga yang dibebankan pada piutang usaha.

6. ACCOUNTS RECEIVABLE

a. Trade Accounts Receivable

a. By debtor	
Related parties (Note 35)	
Fluor Petrosea Joint Organization	14.998
PT Nusa Halmahera Minerals	8.873
Total	<u>23.871</u>
Third parties	
PT Kideco Jaya Agung	18.858
PT Freeport Manyar Refinery (previously PT Manyar Maju Refinery)	-
PT Hardaya Mining Energy	32.353
PT Freeport Indonesia	16.988
BP Berau Ltd.	2.027
PT Kedap Sayaaq	-
PT Kartika Selabumi Mining	7.754
PT Masmino Dwi Area	1.396
PT Indo Bara Pratama	986
Flame Asia Resources Pte. Ltd.	-
PT Indonesia Ruipu Nickel and Chrome Alloy	-
PT Sumberdaya Arindo	-
Others (below US\$ 500 thousand)	2.261
Sub total	<u>82.623</u>
Allowance for credit losses	<u>(43)</u>
Net	<u>82.580</u>
Total	<u><u>106.451</u></u>
b. By currency	
Functional currency	
U.S. Dollar	14.730
Other currency	
Rupiah	91.764
Total	<u>106.494</u>
Allowance for credit losses	<u>(43)</u>
Net	<u>106.451</u>

As at January 1, 2022, trade accounts receivables amounted to US\$ 89.9 million (net of loss allowance for credit losses of US\$ 1,548 thousand).

On June 30, 2024 and December 31, 2023, the average credit period on revenues is 10 - 60 days as well as on December 31, 2022, the average credit period on revenues is 7 – 60 days. No interest is charged on trade accounts receivable.

Penyisihan kerugian kredit untuk piutang usaha telah diukur dengan nilai yang setara dengan jangka waktu KKE. KKE pada piutang usaha diestimasi berdasarkan matriks provisi dengan mengacu pada pengalaman gagal bayar debitur masa lalu dan analisis posisi keuangan debitur saat ini, disesuaikan dengan faktor-faktor yang spesifik dari debitur, kondisi ekonomi umum industri di mana debitur beroperasi dan informasi masa depan. Grup telah mengakui penyisihan kerugian seluruhnya atas piutang yang telah tertunggak lebih dari 1 tahun karena pengalaman historis mengindikasikan bahwa piutang tersebut umumnya tidak dapat dipulihkan.

Tidak ada perubahan dalam teknik estimasi atau asumsi signifikan yang dibuat selama periode pelaporan berjalan.

Ketika menerapkan matriks provisi pada piutang usaha milik Grup, populasi piutang usaha dikelompokkan dalam piutang yang memiliki karakteristik risiko kredit yang serupa, ditentukan dari jenis pendapatan yang dimiliki oleh Grup. Piutang usaha tersebut dikelompokkan menjadi penambangan, konstruksi dan rekayasa, jasa, dan jasa lainnya.

Tabel berikut merinci profil risiko piutang usaha dari kontrak dengan pelanggan berdasarkan matriks provisi dan KKE kolektif Grup.

30 Juni 2024/ June 30, 2024	Belum jatuh tempo/ Not past due US\$ '000	Jatuh tempo/Past due							Sub jumlah/ Sub total US\$ '000
		<=30 hari/ days US\$ '000	31 – 60 hari/ days US\$ '000	61 – 90 hari/ days US\$ '000	91 – 120 hari/ days US\$ '000	121-180 hari/ days US\$ '000	181-365 hari/ days US\$ '000	>365 hari/ days US\$ '000	
Tingkat kerugian ekspektasian/ Expected credit loss rate :	*)	*)	1%	1%	2%	8%	19%	100%	
Estimasi jumlah tercatat bruto pada saat gagal bayar/ Estimated total gross carrying amount at default									
- Penambangan/ Mining	50.440	15.634	4.047	880	-	1.610	2.102	-	74.713
- Konstruksi dan Rekayasa/ Construction and Engineering	79.258	17	3.313	2	3	4	-	-	82.597
- Jasa/ Service	1.327	6.289	21	6	22	14	-	-	7.679
- Lain-lain/ Others	867	-	-	-	-	130	37	-	1.034
Jumlah/ Total	131.892	21.940	7.381	888	25	1.758	2.139	-	166.023
ECL sepanjang umur/ Lifetime ECL	(3)	(1)	(1)	*)	(2)	(14)	(396)	-	(417)
Bersih/ Net									165.606

*) Mendekati nol/ Close to nil

Allowance for credit losses for trade accounts receivable has been measured at an amount equal to lifetime ECL. The ECL on trade accounts receivable are estimated using a provision matrix by reference to past default experience of the debtor and an analysis of the debtor's current financial position, adjusted for factors that are specific to the debtors, general economic conditions of the industry in which the debtors operate and forward looking information. The Group has provided a full allowance against all receivables over 1 year past due because historical experience has indicated that these receivables are generally not recoverable.

There has been no change in the estimation techniques or significant assumptions made during the current reporting period.

When applying a provision matrix to the Group's trade accounts receivable, the population of individual trade account receivables were aggregated into groups of receivables that share similar credit risk characteristics, determined based on the Group's revenue stream. The trade account receivables are grouped into mining, engineering and construction, service, and other services.

The following table details the risk profile of trade accounts receivable from contracts with customers based on the Group's provision matrix and collectively ECL.

PT PETROSEA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2024 DAN 2023 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023 DAN 2022 – Lanjutan

PT PETROSEA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED
JUNE 30, 2024 AND 2023 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2023 AND 2022 - Continued

31 Desember 2023/ December 31, 2023	Belum jatuh tempo/ Not past due US\$ '000	Jatuh tempo/Past due							Sub jumlah/ Sub total US\$ '000
		<=30 hari/ days US\$ '000	31 – 60 hari/ days US\$ '000	61 – 90 hari/ days US\$ '000	91 – 120 hari/ days US\$ '000	121-180 hari/ days US\$ '000	181-365 hari/ days US\$ '000	>365 hari/ days US\$ '000	
Tingkat kerugian ekspektasian/ Expected credit loss rate :	*)	*)	1%	1%	2%	8%	21%	100%	
Estimasi jumlah tercatat bruto pada saat gagal bayar/ Estimated total gross carrying amount at default									
- Penambangan/ Mining	51.601	19.084	735	1.540	3.204	3.071	-	-	79.235
- Konstruksi dan Rekayasa/ Construction and Engineering	45.723	17.417	31	-	-	-	-	-	63.171
- Jasa/ Service	6.467	72	54	25	25	15	-	-	6.658
- Lain-lain/ Others	716	57	-	-	-	-	-	-	773
Jumlah/ Total	104.507	36.630	820	1.565	3.229	3.086	-	-	149.837
ECL sepanjang umur/ Lifetime ECL	(5)	(1)	(2)	(2)	(4)	(10)	-	-	(24)
Bersih/ Net									149.813

*) Mendekati nol/ Close to nil

31 Desember 2022/ December 31, 2022	Belum jatuh tempo/ Not past due US\$ '000	Jatuh tempo/Past due							Sub jumlah/ Sub total US\$ '000
		<=30 hari/ days US\$ '000	31 – 60 hari/ days US\$ '000	61 – 90 hari/ days US\$ '000	91 – 120 hari/ days US\$ '000	121-180 hari/ days US\$ '000	181-365 hari/ days US\$ '000	>365 hari/ days US\$ '000	
Tingkat kerugian ekspektasian/ Expected credit loss rate :	*)	1%	2%	3%	5%	12%	26%	100%	
Estimasi jumlah tercatat bruto pada saat gagal bayar/ Estimated total gross carrying amount at default									
- Penambangan/ Mining	58.552	9.481	4.110	88	-	-	-	-	72.231
- Konstruksi dan Rekayasa/ Construction and Engineering	23.905	2.079	505	-	-	-	9	-	26.498
- Jasa/ Service	6.922	18	15	21	2	23	-	16	7.017
- Lain-lain/ Others	748	-	-	-	-	-	-	-	748
Jumlah/ Total	90.127	11.578	4.630	109	2	23	9	16	106.494
ECL sepanjang umur/ Lifetime ECL	(9)	(1)	(1)	(3)	*)	(13)	*)	(16)	(43)
Bersih/ Net									106.451

*) Mendekati nol/ Close to nil

Mutasi cadangan kerugian kredit adalah sebagai berikut:

The movements in allowance for credit losses are as follows:

	30 Juni 2024/ June 30, 2024			
	Penilaian kolektif/ Collectively assessed US\$ '000	Penilaian Individual/ Individually assessed US\$ '000	Jumlah/ Total US\$ '000	
Saldo awal periode	24	-	24	Balance at beginning of the period
Perubahan cadangan kerugian karena piutang usaha yang baru, setelah dikurangi piutang yang dihentikan pengakuannya karena penyelesaian (Catatan 30)	393	-	393	Change in loss allowance due to new trade receivables originated, net of those derecognized due to settlement (Note 30)
Saldo cadangan kerugian kredit akhir periode	417	-	417	Balance allowance for credit losses at end of period
	31 Desember 2023/ December 31, 2023			
	Penilaian kolektif/ Collectively assessed US\$ '000	Penilaian Individual/ Individually assessed US\$ '000	Jumlah/ Total US\$ '000	
Saldo awal tahun	43	-	43	Balance at beginning of the year
Perubahan cadangan kerugian karena piutang usaha yang baru, setelah dikurangi piutang yang dihentikan pengakuannya karena penyelesaian (Catatan 30)	(5)	-	(5)	Change in loss allowance due to new trade receivables originated, net of those derecognized due to settlement (Note 30)
Jumlah tak tertagih yang dihapuskan	(14)	-	(14)	Amounts written off as uncollectible
Saldo cadangan kerugian kredit akhir tahun	24	-	24	Balance allowance for credit losses at end of year

	31 Desember 2022/ December 31, 2022			
	Penilaian kolektif/ Collectively assessed	Penilaian Individual/ Individually assessed	Jumlah/ Total	
	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	
Saldo awal tahun	1.548	-	1.548	Balance at beginning of the year
Perubahan cadangan kerugian karena piutang usaha yang baru, setelah dikurangi piutang yang dihentikan pengakuannya karena penyelesaian (Catatan 30)	(1.505)	-	(1.505)	Change in loss allowance due to new trade receivables originated, net of those derecognized due to settlement (Note 30)
Saldo cadangan kerugian kredit akhir tahun	43	-	43	Balance allowance for credit losses at end of year

Manajemen berpendapat bahwa penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang usaha adalah cukup.

Management believes that the allowance for impairment losses on trade accounts receivable is adequate.

Piutang usaha senilai US\$ 82.569 ribu pada tanggal 30 Juni 2024 dan Nihil pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 telah dijaminan untuk utang bank jangka pendek (Catatan 17).

Trade account receivable amounted to US\$ 82,569 thousand as of June 30, 2024 and Nil as of December 30, 2023 and 2022 were used as collateral for short-term bank loan (Note 17).

b. Piutang Lain-lain

b. Other Accounts Receivable

	30 Juni/ June 30, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	
Lancar				Current
Pihak berelasi (Catatan 35)	7	-	-	Related party (Note 35)
Pihak ketiga	1.073	49.242	16.146	Third Parties
Jumlah	1.080	49.242	16.146	Total
Tidak lancar				Non-current
Piutang dari pihak ketiga	37.475	638	32.499	Receivable from third parties
Jumlah	37.475	638	32.499	Total

Pada tanggal 30 Juni 2024, piutang lain-lain pihak berelasi merupakan tagihan atas bagian biaya pengobatan karyawan yang menjadi beban pihak berelasi dan tidak dikenakan bunga.

On June 30, 2024, the other accounts receivable from a related party are bills for the employee's medical expenses which are considered as expense of a related party and are not subject to interest.

Pada tanggal 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, termasuk dalam piutang lain-lain dari pihak ketiga masing-masing sebesar US\$ 37.280 ribu (tidak lancar) dan US\$ 49.242 ribu (lancar), merupakan piutang dari pihak ketiga terkait dengan tagihan atas pengakhiran proyek (Catatan 37o dan 37p). Pada tanggal 31 Desember 2022, termasuk dalam piutang lain-lain dari pihak ketiga sebesar US\$ 15.856 ribu (lancar) dan US\$ 31.942 ribu (tidak lancar), merupakan piutang dari pihak ketiga terkait dengan pembelian material yang digunakan untuk proyek pembangunan (Catatan 35b, 37o dan 37p). Sisanya merupakan piutang kepada karyawan yang tidak dikenakan bunga.

On June 30, 2024 and December 31, 2023, included in other accounts receivable from third parties amounted to US\$ 37,280 thousand (non-current), and US\$ 49,242 thousand (current), respectively, relating to receivables from a third party for invoices associated with project termination (Notes 37o and 37p). On December 31, 2022, included in other accounts receivable from third parties amounted to US\$ 15,856 thousand (current) and US\$ 31,942 thousand (non-current) relating to the receivables from third parties for procurement of materials used in a construction project (Notes 35b, 37o and 37p). The remaining are receivables to employees who are not subject to interest.

Pada tanggal 28 Juni 2024, atas piutang lain-lain dari pihak ketiga sebesar US\$ 37.280 ribu, jangka waktu pembayaran diperpanjang sampai dengan 2027 dengan denda sebesar 9,5% per tahun.

On June 28, 2024, in regard to the other accounts receivable from third parties amounted to US\$ 37,280 thousand, the repayment period is extended up to 2027 with penalty fee of 9.5% per annum.

Untuk tujuan penilaian penurunan nilai, piutang dianggap memiliki risiko kredit yang rendah karena Grup mengatur arus kas dari piutang tersebut melalui perjanjian jangka panjang yang disetujui oleh kedua belah pihak dan tidak terdapat peningkatan signifikan dalam risiko gagal bayar sejak pengakuan awal. Oleh karena itu, untuk tujuan penilaian penurunan nilai pinjaman ini, cadangan kerugian diukur sebesar sejumlah kerugian kredit ekspektasian (KKE) 12 bulan.

Dalam menentukan KKE, manajemen telah memperhitungkan kondisi ekonomi umum industri terkait, dalam memperkirakan kemungkinan terjadinya gagal bayar pinjaman serta kerugian saat terjadinya gagal bayar. Manajemen menentukan bahwa piutang lain-lain memiliki kerugian kredit yang tidak material.

For purpose of impairment assessment, the receivable is considered to have low credit risk since the Group manages the cash flow from its receivable through the long-term agreement signed by both parties and there has been no significant increase in the risk of default on the loan since initial recognition. Accordingly, for the purpose of impairment assessment for this loan, the loss allowance is measured at an amount equal to 12-month ECL.

In determining the ECL, management has taken into account the general economic conditions of the related industry, in estimating the probability of default of the loan as well as the loss upon default. Management determines the other accounts receivable is subject to immaterial credit loss.

7. PERSEDIAAN

7. INVENTORIES

	30 Juni/ June 30, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	
Suku cadang dan bahan pembantu	13.416	15.713	19.213	Spare parts and supplies
Batubara termal	1.608	2.970	-	Thermal coal
Bahan bakar	466	454	280	Fuel
Minyak pelumas	253	380	316	Lubricants
Jumlah	15.743	19.517	19.809	Total
Penyisihan persediaan usang	(600)	(313)	(1.292)	Allowance for stock obsolescence
Bersih	15.143	19.204	18.517	Net
				Changes in the allowance for stock obsolescence
Mutasi penyisihan persediaan usang				Beginning balance
Saldo awal	313	1.292	529	Additions (Note 30)
Penambahan (Catatan 30)	287	-	763	Reversals (Note 30)
Pemulihan (Catatan 30)	-	(979)	-	Ending balance
Saldo akhir	600	313	1.292	

Manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan persediaan usang atas persediaan adalah cukup.

Pada tanggal 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, persediaan, selain batubara termal, telah diasuransikan kepada sebuah konsorsium yang dipimpin oleh PT Lippo General Insurance Tbk dengan nilai pertanggungan masing-masing sebesar US\$ 11.825 ribu dan US\$ 13.914 ribu, serta pada tanggal 31 Desember 2022, persediaan telah diasuransikan kepada sebuah konsorsium yang dipimpin oleh PT Cakrawala Proteksi Indonesia dengan nilai pertanggungan sebesar US\$ 16.878 ribu.

Pada tanggal 31 Agustus 2024, persediaan berupa batubara termal telah diasuransikan kepada sebuah konsorsium yang dipimpin oleh PT Lippo General Insurance Tbk dengan nilai pertanggungan sebesar US\$ 499 ribu.

Management believes that the allowance for stock obsolescence on inventories is adequate.

On June 30, 2024 and December 31, 2023, inventories, except thermal coal, were insured through a consortium led by PT Lippo General Insurance Tbk with insurance coverage amounted to US\$ 11,825 thousand and US\$ 13,914 thousand, respectively, as well as on December 31, 2022, inventories were insured through a consortium led by PT Cakrawala Proteksi Indonesia with insurance coverage amounted to US\$ 16,878 thousand.

On August 31, 2024, inventories of thermal coal has been insured through a consortium led by PT Lippo General Insurance Tbk with insurance coverage amounted to US\$ 499 thousand.

Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas persediaan yang diasuransikan.

Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses on the inventories insured.

Untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022, jumlah biaya persediaan yang diakui sebagai beban masing-masing sebesar US\$ 50.785 ribu dan US\$ 57.854 ribu serta US\$ 122.649 ribu dan US\$ 99.259 ribu.

For the six-month periods ended on June 30, 2024 and 2023 as well as for the years ended on December 31, 2023 and 2022, total cost of inventories recognized as expense amounted to US\$ 50,785 thousand and US\$ 57,854 thousand as well as US\$ 122,649 thousand and US\$ 99,259 thousand, respectively.

Tidak terdapat saldo persediaan yang dijadikan jaminan atas pinjaman Grup.

There are no balances of inventories used as collateral for the Group's loans.

8. ASET KONTRAK

8. CONTRACT ASSETS

	30 Juni/ June 30, 2024 US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2023 US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2022 US\$ '000	
Kontrak konstruksi - pihak ketiga	<u>281</u>	<u>5.755</u>	<u>12.295</u>	Construction contracts - third parties

Pada tanggal 1 Januari 2022, aset kontrak adalah sebesar US\$ 1,7 juta (setelah dikurangi cadangan kerugian kredit sebesar Nihil).

As at January 1, 2022, contract assets amounted to US\$ 1.7 million (net of loss allowance for credit losses of Nil).

Jumlah yang berkaitan dengan kontrak konstruksi adalah tagihan pelanggan berdasarkan kontrak konstruksi yang timbul pada saat Grup menerima pembayaran dari pelanggan sejalan dengan serangkaian tonggak pelaksanaan. Grup sebelumnya akan mengakui aset kontrak untuk setiap pekerjaan yang dilakukan. Jumlah yang sebelumnya diakui sebagai aset kontrak direklasifikasi ke piutang usaha pada saat ditagih kepada pelanggan.

Amounts relating to construction contracts are balances due from customers under construction contracts that arise when the Group receives payments from customers in line with a series of performance-related milestones. The Group will previously have recognized a contract asset for any work performed. Any amount previously recognized as a contract asset is reclassified to trade accounts receivable at the point at which it is invoiced to the customer.

Cadangan kerugian kredit untuk kontrak aset telah diukur dengan nilai yang setara dengan jangka waktu KKE. KKE pada kontrak aset diestimasi berdasarkan matriks provisi dengan mengacu pada pengalaman gagal bayar debitur masa lalu dan analisis posisi keuangan debitur saat ini, disesuaikan dengan faktor-faktor yang spesifik dari debitur, kondisi ekonomi umum industri di mana debitur beroperasi.

Allowance for credit losses for contract assets has been measured at an amount equal to lifetime ECL. The ECL on contract assets is estimated using a provision matrix by reference to past default experience of the debtor and an analysis of the debtor's current financial position, adjusted for factors that are specific to the debtors, general economic conditions of the industry in which the debtors operate.

Cadangan kerugian kredit aset kontrak tidak dibentuk karena manajemen berpendapat bahwa aset kontrak dianggap memiliki kerugian kredit yang tidak material.

Allowance for credit losses of contact assets was not provided since management believes that the contact assets is subject to immaterial credit loss.

Tidak ada perubahan dalam teknik estimasi atau asumsi signifikan yang dibuat selama periode pelaporan berjalan.

There has been no change in the estimation techniques or significant assumptions made during the current reporting period.

9. PAJAK DIBAYAR DI MUKA

9. PREPAID TAXES

	30 Juni/ June 30, 2024 US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2023 US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2022 US\$ '000	
Lancar				Current
Pajak penghasilan badan				Corporate income tax
Entitas anak				Subsidiary
2021	-	-	16	2021
Pajak pertambahan nilai				Value added tax
Perusahaan	836	-	10.930	The Company
Entitas anak	2.472	1.530	399	Subsidiaries
Jumlah	<u>3.308</u>	<u>1.530</u>	<u>11.345</u>	Total
Tidak lancar				Non-current
Pajak penghasilan badan				Corporate income tax
Perusahaan				The Company
2024	1.237	-	-	2024
2023	2.358	2.358	-	2023
Entitas anak				Subsidiaries
2024	1.267	-	-	2024
2023	940	1.041	-	2023
Jumlah	<u>5.802</u>	<u>3.399</u>	<u>-</u>	Total

Pajak dibayar di muka – Tidak lancar

Perusahaan

Pajak dibayar di muka bagian tidak lancar merupakan kelebihan bayar pajak penghasilan badan periode/tahun berjalan yang akan diajukan pengembalian.

PTKBL

Pajak dibayar di muka bagian tidak lancar termasuk kelebihan bayar pajak penghasilan badan tahun 2023 sebesar US\$ 940 ribu (setara dengan Rp 15.424 juta) dan kelebihan bayar pajak penghasilan badan tahun 2024 sebesar US\$ 915 ribu (setara dengan Rp 15.027 juta). Sampai pada tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian interim, belum terdapat pemberitahuan pemeriksaan pajak dari Kantor Pajak.

Penerimaan Klaim Pengembalian Pajak

Pada tanggal 16 dan 17 Juni 2021 Perusahaan mengajukan restitusi PPN untuk masa pajak April 2019 hingga April 2021 dengan nilai restitusi Rp 47,8 miliar (setara dengan US\$ 3,4 juta). Pada tanggal 7 dan 13 Juni 2022, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp 46,4 miliar (setara dengan US\$ 3,1 juta). Total nilai kas yang diterima Perusahaan adalah sebesar Rp 46,4 miliar (setara dengan US\$ 3,1 juta) yang diterima secara bertahap pada tanggal 24, 27, 28 Juni 2022 dan 4 Juli 2022.

Prepaid taxes – Non-current

The Company

Prepaid taxes non-current portion represent overpayment of current period/year corporate income taxes which will be submitted for tax refunds.

PTKBL

Prepaid taxes non-current portion including overpayment of corporate income taxes for 2023 amounted to US\$ 940 thousand (equivalent to Rp 15,424 million) and overpayment of corporate income taxes for 2024 amounted to US\$ 915 thousand (equivalent to Rp 15,027 million). As of the issuance date of this interim consolidated financial statements, the Company has not yet received tax audit notification from Tax Office.

Receipts of Claim for Tax Refunds

On June 16 and 17, 2021, the Company filed VAT restitution for the period April 2019 to April 2021 with restitution value amounting to Rp 47.8 billion (equivalent to US\$ 3.4 million). On June 7 and 13, 2022, the Company received overpayment tax assessment letter (SKPLB) on value added tax (VAT) on June 7 and 13, 2022 amounting to Rp 46.4 billion (equivalent to of US\$ 3.1 million). The total cash received by the Company was Rp 46.4 billion (equivalent to US\$ 3.1 million) which has been received gradually on June 24, 27, 28, 2022 and July 4, 2022.

Pada tanggal 15 Juni 2022 Perusahaan mengajukan restitusi PPN untuk masa pajak dari Mei 2021 hingga April 2022 dengan nilai restitusi Rp 109,2 miliar (setara dengan US\$ 6,9 juta). Pada tanggal 7 Maret 2023, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tersebut sebesar Rp 109,2 miliar (setara dengan US\$ 6.9 juta) dengan rincian SKPLB sebagai berikut:

On June 15, 2022, the Company filed VAT restitution for the period from May 2021 to April 2022 with restitution value amounting Rp 109.2 billion (equivalent to US\$ 6.9 million). On March 7, 2023, the Company received an overpayment tax assessment letter (SKPLB) on value added tax (VAT) amounting to Rp 109.2 billion (equivalent to US\$ 6.9 million) with SKPLB detail as follows:

Nomor SKPLB/ SKPLB Number	Tanggal/ Date	Masa Pajak/ Period	Jumlah (dalam Rp)/ Total (in Rp)
00005/407/21/091/23	7 Maret 2023/ March 7, 2023	Mei 2021/ May 2021	5.119.865.718
00006/407/21/091/23	7 Maret 2023/ March 7, 2023	Juni 2021/ June 2021	3.687.613.045
00007/407/21/091/23	7 Maret 2023/ March 7, 2023	Juli 2021/ July 2021	3.147.074.840
00008/407/21/091/23	7 Maret 2023/ March 7, 2023	Agustus 2021/ August 2021	4.529.420.854
00009/407/21/091/23	7 Maret 2023/ March 7, 2023	September 2021/ September 2021	10.067.288.861
00010/407/21/091/23	7 Maret 2023/ March 7, 2023	Oktober 2021/ October 2021	11.700.234.930
00011/407/21/091/23	7 Maret 2023/ March 7, 2023	November 2021/ November 2021	8.750.549.873
00012/407/21/091/23	7 Maret 2023/ March 7, 2023	Desember 2021/ December 2021	9.666.545.539
00007/407/22/091/23	7 Maret 2023/ March 7, 2023	Januari 2022/ January 2022	13.805.093.418
00008/407/22/091/23	7 Maret 2023/ March 7, 2023	Februari 2022/ February 2022	13.902.220.242
00009/407/22/091/23	7 Maret 2023/ March 7, 2023	Maret 2022/ March 2022	13.365.217.168
00010/407/22/091/23	7 Maret 2023/ March 7, 2023	April 2022/ April 2022	11.469.891.821

Pada tanggal 21 Maret 2023, Perusahaan telah menerima pengembalian kas tersebut sebesar Rp 108,2 miliar (setara dengan US\$ 7 juta) setelah diperhitungkan dengan Surat Tagihan Pajak (STP).

On March 21, 2023, the Company has received the cash refund amounted to Rp 108.2 billion (equivalent to US\$ 7 million) after considering Tax Collection Letter (STP).

10. BEBAN DIBAYAR DI MUKA

10. PREPAID EXPENSES

	30 Juni/ June 30, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	
Asuransi	1.921	1.854	1.982	Insurance
Letter of credit	1.307	268	6	Letter of credit
Lisensi Perangkat Lunak	890	26	2.319	Software licenses
Royalti	609	305	-	Royalty
Konsultan	474	1.540	678	Consultant
Sewa	281	311	343	Rent
Lain-lain	1.457	768	278	Others
Jumlah	6.939	5.072	5.606	Total

11. ASET LAINNYA

11. OTHER ASSETS

	30 Juni/ June 30, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	
Lancar				Current
Uang muka	10.112	6.364	12.687	Advances
Deposit	2.442	2.508	4.351	Deposits
Biaya pemenuhan kontrak	1.612	-	1.196	Costs to fulfill a contract
Jumlah	14.166	8.872	18.234	Total
Tidak lancar				Non-current
Investasi pada asosiasi	2.686	2.890	574	Investments in associates
<i>Letter of credit</i>	1.749	246	-	Letter of credit
Uang muka	-	-	10.380	Advances
Lain-lain	4.173	1.978	292	Others
Jumlah	8.608	5.114	11.246	Total

Aset lainnya lancar terdiri dari uang muka dari pemasok, deposit, dan biaya pemenuhan kontrak yang akan diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 bulan. Aset lainnya tidak lancar terdiri dari uang muka pembelian aset, investasi dan *letter of credit* yang realisasinya lebih dari 12 bulan.

Other current assets consist of advances from suppliers, deposits, and contract fulfillment fees that will be completed in less than 12 months. Other non-current assets consist of advances on asset purchases, investments, and letter of credit that are realized in more than 12 months.

12. ASET TETAP

12. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT

	1 Januari/ January 1, 2024	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	Selisih kurs penjabaran laporan keuangan/ Translation adjustment	30 Juni/ June 30, 2024	
	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	
Biaya perolehan:							At cost:
Pemilikan langsung							Direct acquisitions
Tanah	15.539	-	-	2.139	-	17.678	Land
Gedung dan perbaikan gedung	44.903	-	-	8.778	(18)	53.663	Buildings and improvements
Alat berat, peralatan dan kendaraan	564.997	-	16.500	35.987	(1.587)	582.897	Plant, equipment and vehicles
Perabotan dan perlengkapan	10.184	-	-	77	(18)	10.243	Furniture and fixtures
Aset dalam penyelesaian	47.931	15.291	-	(33.891)	46	29.377	Construction in progress
Jumlah	683.554	15.291	16.500	13.090	(1.577)	693.858	Total
Akumulasi penyusutan:							Accumulated depreciation:
Pemilikan langsung							Direct acquisitions
Gedung dan perbaikan gedung	17.486	1.583	-	-	(6)	19.063	Buildings and improvements
Alat berat, peralatan dan kendaraan	426.416	19.642	16.153	7.804	(745)	436.964	Plant, equipment and vehicles
Perabotan dan perlengkapan	8.906	319	-	-	(3)	9.222	Furniture and fixtures
Jumlah	452.808	21.544	16.153	7.804	(754)	465.249	Total
Jumlah Tercatat Bersih	230.746					228.609	Net Carrying Amount

PT PETROSEA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2024 DAN 2023 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023 DAN 2022 – Lanjutan

PT PETROSEA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED
JUNE 30, 2024 AND 2023 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2023 AND 2022 - Continued

	1 Januari/ January 1, 2023 US\$ '000	Penambahan/ Additions US\$ '000	Pengurangan/ Deductions US\$ '000	Reklasifikasi/ Reclassifications US\$ '000	Selisih kurs penjabaran laporan keuangan/ Translation adjustment US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2023 US\$ '000	
Biaya perolehan:							At cost:
Pemilikan langsung							Direct acquisitions
Tanah	15.539	-	-	-	-	15.539	Land
Gedung dan perbaikan gedung	43.786	-	-	1.113	4	44.903	Buildings and improvements
Alat berat, peralatan dan kendaraan	546.910	4.449	18.157	30.540	1.255	564.997	Plant, equipment and vehicles
Perabotan dan perlengkapan	9.507	-	-	675	2	10.184	Furniture and fixtures
Aset dalam penyelesaian	32.016	52.266	2.569	(33.801)	19	47.931	Construction in progress
Jumlah	647.758	56.715	20.726	(1.473)	1.280	683.554	Total
Akumulasi penyusutan:							Accumulated depreciation:
Pemilikan langsung							Direct acquisitions
Gedung dan perbaikan gedung	13.634	3.848	-	-	4	17.486	Buildings and improvements
Alat berat, peralatan dan kendaraan	392.994	50.769	18.094	-	747	426.416	Plant, equipment and vehicles
Perabotan dan perlengkapan	8.318	586	-	-	2	8.906	Furniture and fixtures
Jumlah	414.946	55.203	18.094	-	753	452.808	Total
Jumlah Tercatat Bersih	232.812					230.746	Net Carrying Amount
	1 Januari/ January 1, 2022 US\$ '000	Penambahan/ Additions US\$ '000	Pengurangan/ Deductions US\$ '000	Reklasifikasi/ Reclassifications US\$ '000	Selisih kurs penjabaran laporan keuangan/ Translation adjustment US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2022 US\$ '000	
Biaya perolehan:							At cost:
Pemilikan langsung							Direct acquisitions
Tanah	15.539	-	-	-	-	15.539	Land
Gedung dan perbaikan gedung	30.939	-	2.155	15.016	(14)	43.786	Buildings and improvements
Alat berat, peralatan dan kendaraan	546.210	-	55.626	58.532	(2.206)	546.910	Plant, equipment and vehicles
Perabotan dan perlengkapan	9.146	-	293	663	(9)	9.507	Furniture and fixtures
Aset dalam penyelesaian	28.631	57.243	-	(53.773)	(85)	32.016	Construction in progress
Jumlah	630.465	57.243	58.074	20.438	(2.314)	647.758	Total
Akumulasi penyusutan:							Accumulated depreciation:
Pemilikan langsung							Direct acquisitions
Gedung dan perbaikan gedung	11.867	3.927	2.155	-	(5)	13.634	Buildings and improvements
Alat berat, peralatan dan kendaraan	381.711	48.512	49.236	12.711	(704)	392.994	Plant, equipment and vehicles
Perabotan dan perlengkapan	7.732	882	293	-	(3)	8.318	Furniture and fixtures
Jumlah	401.310	53.321	51.684	12.711	(712)	414.946	Total
Jumlah Tercatat Bersih	229.155					232.812	Net Carrying Amount

Grup mereklasifikasi alat berat, peralatan, dan kendaraan masing-masing sebesar US\$ 13.090 ribu dan US\$ 20.438 ribu pada 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2022 dari akun aset hak-guna serta sebesar US\$ 1.473 ribu pada 31 Desember 2023 yang diakui ke akun aset hak-guna.

Group reclassified its plant, equipment and vehicles amounted to US\$ 13,090 thousand and US\$ 20,438 thousand as of June 30, 2024 and December 31, 2022, respectively from right-of-use assets as well as amounted to US\$ 1,473 thousand as of December 31, 2023 which is recognized to right-of-use of asset.

Pelepasan aset tetap adalah sebagai berikut:

Disposal of property, plant and equipment is as follows:

	2024 (Enam bulan/ (Six-month) US\$ '000	2023 (Enam bulan/ (Six-month) (Tidak diaudit/ (Unaudited) US\$ '000	2023 (Satu tahun/ (One year) US\$ '000	2022 (Satu tahun/ (One year) US\$ '000	
Nilai realisasi atas pelepasan aset tetap	89	-	1.943	632	Proceeds from disposal of property, plant and equipment
Nilai tercatat:					Net carrying amount:
Aset tetap	347	-	2.632	6.390	Property, plant and equipment
Kerugian pelepasan aset tetap (Catatan 30)	(258)	-	(689)	(5.758)	Loss on disposal of property, plant and equipment (Note 30)

Beban penyusutan dialokasikan sebagai berikut:

Depreciation expense was allocated to the following:

	2024 (Enam bulan/ (Six-month) (Six-month) US\$ '000	2023 (Enam bulan/ (Six-month) (Tidak diaudit/ (Unaudited) US\$ '000	2023 (Satu tahun/ (One year) US\$ '000	2022 (Satu tahun/ (One year) US\$ '000	
Pemilikan langsung:					Direct acquisitions:
Beban usaha langsung (Catatan 26)	21.501	25.589	55.156	53.284	Direct costs (Note 26)
Beban administrasi (Catatan 28)	43	48	47	37	Administration expenses (Note 28)
Jumlah	<u>21.544</u>	<u>25.637</u>	<u>55.203</u>	<u>53.321</u>	Total

Aset dalam penyelesaian merupakan bangunan, alat berat, peralatan dan kendaraan Grup yang masih belum selesai pada tanggal pelaporan, sebagai berikut:

Construction in progress mainly represents building, plant, equipment and vehicles of the Group which have not been completed at the reporting date as follows:

30 Juni 2024/ June 30, 2024				
	Persentase penyelesaian/ Percentage of completion	Akumulasi biaya/ Accumulated costs US\$ ' 000	Estimasi tahun penyelesaian/ Estimated year of completion	
Alat berat dan kendaraan				Heavy equipment and vehicles
Alat berat lainnya	98%	27.431	2025	Other heavy equipment
Bangunan				Building
Dermaga, gudang dan lain-lain	75%	1.946	2025	Jetty, warehouse and others
Jumlah		<u>29.377</u>		Total

31 Desember 2023/ December 31, 2023				
	Persentase penyelesaian/ Percentage of completion	Akumulasi biaya/ Accumulated costs US\$ ' 000	Estimasi tahun penyelesaian/ Estimated year of completion	
Alat berat dan kendaraan				Heavy equipment and vehicles
Alat berat lainnya	46%	43.303	2024	Other heavy equipment
Bangunan				Building
Dermaga, gudang dan lain-lain	90%	4.628	2024	Jetty, warehouse and others
Jumlah		<u>47.931</u>		Total

31 Desember 2022/ December 31, 2022				
	Persentase penyelesaian/ Percentage of completion	Akumulasi biaya/ Accumulated costs US\$ ' 000	Estimasi tahun penyelesaian/ Estimated year of completion	
Alat berat dan kendaraan				Heavy equipment and vehicles
Alat berat lainnya	82%	26.860	2023	Other heavy equipment
Bangunan				Building
Dermaga, gudang dan lain-lain	38%	5.156	2023	Jetty, warehouse and others
Jumlah		<u>32.016</u>		Total

Manajemen tidak melihat adanya peristiwa yang akan menghambat penyelesaian aset dalam penyelesaian tersebut.

Management does not foresee any events that may occur that would prevent completion of such construction in progress.

Perusahaan memiliki beberapa bidang tanah di Nusa Tenggara Barat, Balikpapan, Kabupaten Paser Kalimantan Timur dan Timika seluas 438.272 meter persegi yang diperoleh sejak tahun 1998 sampai dengan tahun 2024 dengan hak legal berupa Hak Guna Bangunan ("HGB") atas nama Perusahaan. Jangka waktu HGB selama 20 tahun dan 30 tahun, masing-masing sampai tahun 2028, 2029, 2030, 2037, 2038, 2043, 2044, 2048, 2051, 2052 dan 2053. Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat kesulitan untuk memperpanjang hak tersebut karena hak tersebut diperoleh secara sah dan didukung oleh bukti kepemilikan yang memadai.

Aset tetap termasuk aset yang telah habis disusutkan tetapi masih digunakan dengan harga perolehan sebesar US\$ 38.616 ribu pada tanggal 30 Juni 2024, US\$ 27.608 ribu pada tanggal 31 Desember 2023 dan US\$ 19.347 ribu pada tanggal 31 Desember 2022.

Alat berat, peralatan dan kendaraan dengan nilai tercatat US\$ 111.821 ribu pada tanggal 30 Juni 2024, US\$ 122.281 ribu pada tanggal 31 Desember 2023 dan US\$ 22.919 ribu pada tanggal 31 Desember 2022 dijamin untuk pinjaman jangka panjang dari pihak ketiga (Catatan 22a).

Pada tanggal 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, seluruh bangunan, alat berat, peralatan dan kendaraan, serta perlengkapan, selain alat berat, peralatan dan kendaraan, serta perlengkapan yang dimiliki oleh entitas anak, PTCEP, telah diasuransikan kepada sebuah konsorsium yang dipimpin oleh PT Lippo General Insurance Tbk terhadap semua risiko dengan jumlah pertanggungan masing-masing sebesar US\$ 654.397 ribu dan US\$ 653.290 ribu. Pada tanggal 31 Desember 2022, seluruh bangunan, alat berat, peralatan dan kendaraan, serta perlengkapan telah diasuransikan kepada PT Cakrawala Proteksi Indonesia terhadap semua risiko dengan jumlah pertanggungan sebesar US\$ 598.838 ribu.

Pada tanggal 31 Agustus 2024, alat berat, peralatan dan kendaraan serta perlengkapan milik entitas anak, PTCEP, diasuransikan kepada sebuah konsorsium yang dipimpin oleh PT Lippo General Insurance Tbk terhadap semua risiko dengan jumlah pertanggungan sebesar US\$ 3.105 ribu.

Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset yang diasuransikan.

13. ASET HAK-GUNA

Grup menyewa beberapa aset termasuk gedung atau gudang, alat berat, peralatan dan kendaraan dan tanah. Rata-rata masa sewa adalah 2 – 15 tahun.

The Company owns several parcels of land located in West Nusa Tenggara, Balikpapan, Kabupaten Paser East Kalimantan and Timika measuring 438,272 square meters which were obtained since 1998 until 2024 with legal rights of Building Use Rights ("HGB") under the Company's name. The periods of HGB are 20 and 30 years, until 2028, 2029, 2030, 2037, 2038, 2043, 2044, 2048, 2051, 2052 and 2053, respectively. Management believes that there will be no difficulty in the extension of the land rights since they were acquired legally and supported by sufficient evidence of ownership.

Property, plant and equipment includes fully depreciated assets but are still in use with acquisition cost of US\$ 38,616 thousand as of June 30, 2024, US\$ 27,608 thousand as of December 31, 2023 and US\$ 19,347 thousand as of December 31, 2022.

Plant, equipment and vehicles with carrying amount of US\$ 111,821 thousand as of June 30, 2024, US\$ 122,281 thousand as of December 31, 2023 and US\$ 22,919 thousand as of December 31, 2022 are pledged as collateral for long-term loans from third parties (Note 22a).

As of June 30, 2024 and December 31, 2023, all buildings, plant, equipment and vehicles, and fixtures, other than plant, equipment and vehicles, and fixtures owned by the subsidiary, PTCEP, were insured through a consortium led by PT Lippo General Insurance Tbk against all risks for US\$ 654,397 thousand and US\$ 653,290 thousand, respectively. As of December 31, 2022, all buildings, plant, equipment and vehicles, and fixtures were insured through a consortium led by PT Cakrawala Proteksi Indonesia against all risks for US\$ 598,838 thousand.

As of August 31, 2024, buildings, plant, equipment and vehicles, and fixtures owned by a subsidiary, PTCEP, were insured through a consortium led by PT Lippo General Insurance Tbk against all risks for US\$ 3,105 thousand.

Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses on the assets insured.

13. RIGHT-OF-USE ASSETS

The Group leases several assets including building or warehouses, plant, equipment and vehicles and land. The average lease term is 2 – 15 years.

PT PETROSEA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2024 DAN 2023 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023 DAN 2022 – Lanjutan

PT PETROSEA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED
JUNE 30, 2024 AND 2023 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2023 AND 2022 - Continued

Grup memiliki opsi untuk membeli peralatan berat tertentu sejumlah nominal pada akhir masa sewa. Kewajiban Grup dijamin dengan hak milik penyewa atas aset yang disewa untuk sewa tersebut.

The Group has options to purchase certain heavy equipment for a nominal amount at the end of the lease term. The Group's obligations are secured by the lessors' title to the leased assets for such leases.

	1 Januari/ January 1, 2024	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	Selisih kurs penjabaran laporan keuangan/ Translation adjustment	30 Juni/ June 30, 2024	
	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	
Biaya perolehan:							At cost:
Tanah	3.450	-	-	-	-	3.450	Land
Gedung atau/gudang	75	-	51	-	-	24	Building or/warehouse
Alat berat, peralatan dan kendaraan	62.864	2.417	3.329	(12.299)	(1.151)	48.502	Plant, equipment and vehicles
Aset dalam penyelesaian	811	202	-	(791)	(3)	219	Construction in progress
Jumlah	67.200	2.619	3.380	(13.090)	(1.154)	52.195	Total
Akumulasi penyusutan:							Accumulated depreciation:
Tanah	1.783	94	-	-	-	1.877	Land
Gedung atau/gudang	39	-	-	-	-	39	Building or/warehouse
Alat berat, peralatan dan kendaraan	27.826	5.061	2.750	(7.804)	(581)	21.752	Plant, equipment and vehicles
Jumlah	29.648	5.155	2.750	(7.804)	(581)	23.668	Total
Jumlah tercatat bersih	37.552					28.527	Net carrying amount
	1 Januari/ January 1, 2023	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	Selisih kurs penjabaran laporan keuangan/ Translation adjustment	31 Desember/ December 31, 2023	
	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	
Biaya perolehan:							At cost:
Tanah	3.450	-	-	-	-	3.450	Land
Gedung atau/gudang	17	74	16	-	-	75	Building or/warehouse
Alat berat, peralatan dan kendaraan	56.000	768	3.792	10.666	(778)	62.864	Plant, equipment and vehicles
Aset dalam penyelesaian	1.173	8.831	-	(9.193)	-	811	Construction in progress
Jumlah	60.640	9.673	3.808	1.473	(778)	67.200	Total
Akumulasi penyusutan:							Accumulated depreciation:
Tanah	1.553	230	-	-	-	1.783	Land
Gedung atau/gudang	17	40	18	-	-	39	Building or/warehouse
Alat berat, peralatan dan kendaraan	25.121	7.246	3.128	-	(1.413)	27.826	Plant, equipment and vehicles
Jumlah	26.691	7.516	3.146	-	(1.413)	29.648	Total
Jumlah tercatat bersih	33.949					37.552	Net carrying amount
	1 Januari/ January 1, 2022	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	Selisih kurs penjabaran laporan keuangan/ Translation adjustment	31 Desember/ December 31, 2022	
	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	
Biaya perolehan:							At cost:
Tanah	3.450	-	-	-	-	3.450	Land
Gedung atau/gudang	17	-	-	-	-	17	Building or/warehouse
Alat berat, peralatan dan kendaraan	75.330	6.316	8.882	(15.694)	(1.070)	56.000	Plant, equipment and vehicles
Aset dalam penyelesaian	36	5.881	-	(4.744)	-	1.173	Construction in progress
Jumlah	78.833	12.197	8.882	(20.438)	(1.070)	60.640	Total
Akumulasi penyusutan:							Accumulated depreciation:
Tanah	1.323	230	-	-	-	1.553	Land
Gedung atau/gudang	12	5	-	-	-	17	Building or/warehouse
Alat berat, peralatan dan kendaraan	38.973	6.432	6.984	(12.711)	(589)	25.121	Plant, equipment and vehicles
Jumlah	40.308	6.667	6.984	(12.711)	(589)	26.691	Total
Jumlah tercatat bersih	38.525					33.949	Net carrying amount

Pada tanggal 30 Juni 2024, 31 Desember 2023 dan 2022, Grup melakukan perjanjian jual dan sewa balik atas alat berat dengan Perusahaan pembiayaan selama 4 sampai 5 tahun (Catatan 23). Setelah mengevaluasi syarat dan substansi dari perjanjian jual dan sewa balik selama periode berjalan, manajemen Grup menetapkan bahwa secara substansial semua risiko dan manfaat dari kepemilikan alat berat tersebut berada pada penyewa dan mengklasifikasikan transaksi ini sebagai liabilitas sewa.

As of June 30, 2024, December 31, 2023 and 2022, the Group entered into sale and leaseback agreements for its heavy equipment with financing Company for a period of 4 to 5 years (Note 23). After an evaluation of the terms and substance of the sale and leaseback arrangement during the period, the Group's management has determined that all the risks and rewards incidental to ownership of the plant still rest with the lessee and classified the transactions as lease liabilities.

Untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 sewa aset tetap tertentu telah berakhir. Kontrak yang telah berakhir digantikan dengan sewa baru untuk aset pendasar yang identik. Hal ini mengakibatkan penambahan pada aset hak-guna sebesar US\$ 2.619 ribu pada periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2024, US\$ 9.673 ribu dan US\$ 12.197 ribu pada tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022.

For the six-month period ended on June 30, 2024 and the years ended on December 31, 2023 and 2022 certain leases for plant and equipment were expired. The expired contracts were replaced by new leases for identical underlying assets. This resulted in additions to right-of-use assets of US\$ 2,619 thousand for the six-month period ended on June 30, 2024, US\$ 9,673 thousand and US\$ 12,197 thousand for the years ended on December 31, 2023 and 2022.

Untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022, terdapat sewa aset tetap yang telah sepenuhnya dilunasi dan menjadi milik Grup, sehingga aset tetap tersebut direklasifikasikan menjadi aset tetap kepemilikan langsung.

For the six-month periods ended on June 30, 2024 and the years ended on December 31, 2023 and 2022, there are leases for equipment that has been fully repaid and therefore owned by the Group, hence, the equipment is reclassified as property – direct ownership.

Jumlah yang diakui ke laba rugi yang timbul dari sewa adalah sebagai berikut:

Amounts recognized in profit or loss arising from leases are as follows:

	2024 (Enam bulan)/ (Six-month) US\$ '000	2023 (Enam bulan)/ (Six-month) (Tidak diaudit)/ (Unaudited) US\$ '000	2023 (Satu tahun)/ (One year) US\$ '000	2022 (Satu tahun)/ (One year) US\$ '000	
Beban penyusutan aset hak-guna	5.155	4.264	7.516	6.667	Depreciation expense on right-of-use assets
Beban bunga atas liabilitas sewa (Catatan 29)	1.211	1.316	2.685	1.511	Interest expense on lease liabilities (Note 29)
Beban yang berkaitan dengan sewa jangka pendek	10.205	6.784	15.008	10.864	Expense relating to short-term leases
Beban yang berkaitan dengan sewa aset bernilai rendah	64	519	563	841	Expense relating to leases of low-value assets
Beban yang berkaitan dengan pembayaran sewa variabel tidak termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa	748	3.139	6.124	6.928	Expense relating to variable lease payments not included in the measurement of the lease liability

Beban penyusutan dialokasikan sebagai berikut:

Depreciation expense was allocated to the following:

	2024 (Enam bulan)/ (Six-month) US\$ '000	2023 (Enam bulan)/ (Six-month) (Tidak diaudit)/ (Unaudited) US\$ '000	2023 (Satu tahun)/ (One year) US\$ '000	2022 (Satu tahun)/ (One year) US\$ '000	
Beban usaha langsung (Catatan 26)	5.105	4.094	7.452	6.560	Direct costs (Note 26)
Beban administrasi (Catatan 28)	50	170	64	107	Administration expenses (Note 28)
Jumlah	5.155	4.264	7.516	6.667	Total

14. GOODWILL

Pada tanggal 30 Juni 2024, 31 Desember 2023 dan 2022, *goodwill* yang timbul dari akuisisi entitas anak adalah sebagai berikut:

	30 Juni/ June 30, 2024 US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2023 US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2022 US\$ '000	
PTKMS	18.987	18.987	-	PTKMS
PTPII	781	781	781	PTPII
Jumlah	<u>19.768</u>	<u>19.768</u>	<u>781</u>	Total
	30 Juni/ June 30, 2024 US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2023 US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2022 US\$ '000	
Saldo awal periode/tahun	19.768	781	781	Balance at beginning of period/year
Penambahan dari kombinasi bisnis (Catatan 34)	-	18.987	-	Additional amount recognized from business combination (Note 34)
Jumlah tercatat bersih	<u>19.768</u>	<u>19.768</u>	<u>781</u>	Net carrying value

Goodwill telah dialokasikan untuk tujuan pengujian penurunan nilai ke unit penghasil kas berupa pertambangan batubara.

Pengujian penurunan nilai atas *goodwill* dilakukan secara tahunan dan ketika terdapat suatu indikasi bahwa nilai tercatatnya mengalami penurunan nilai.

Jumlah terpulihkan dari unit penghasil kas ditentukan berdasarkan perhitungan nilai pakai ("VIU") yang menggunakan proyeksi arus kas berdasarkan anggaran keuangan untuk jangka waktu sampai dengan masa ijin pertambangan, dan tingkat diskonto sebesar 11,75% per tahun untuk tahun 2024 dan 13,05% per tahun untuk tahun 2023.

Tidak ada kelebihan ("*headroom*") jika tingkat diskonto ditetapkan sebesar 20,53%.

Setelah penilaian penurunan nilai selesai, manajemen telah menyimpulkan bahwa terdapat ruang yang cukup sehingga tidak terdapat kerugian penurunan nilai yang diakui pada periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 serta tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022.

15. KEPEMILIKAN DALAM OPERASI BERSAMA

Operasi Bersama Fluor-Petrosea

Pada tanggal 11 Maret 2020, Perusahaan melakukan kerja sama operasi dengan PT Fluor Daniel Indonesia (FLUOR) yang dikenal dengan nama Fluor-Petrosea Joint Organization (FPJO) dimana dilaksanakan pengendalian bersama.

14. GOODWILL

As of June 30, 2024, December 31, 2023 and 2022, goodwill arising from the acquisitions of subsidiaries is as follows:

	30 Juni/ June 30, 2024 US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2023 US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2022 US\$ '000	
PTKMS	18.987	18.987	-	PTKMS
PTPII	781	781	781	PTPII
Jumlah	<u>19.768</u>	<u>19.768</u>	<u>781</u>	Total
	30 Juni/ June 30, 2024 US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2023 US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2022 US\$ '000	
Saldo awal periode/tahun	19.768	781	781	Balance at beginning of period/year
Penambahan dari kombinasi bisnis (Catatan 34)	-	18.987	-	Additional amount recognized from business combination (Note 34)
Jumlah tercatat bersih	<u>19.768</u>	<u>19.768</u>	<u>781</u>	Net carrying value

Goodwill has been allocated for impairment testing purposes to the cash-generating unit of coal mining.

Goodwill is tested for impairment annually and when circumstances indicate that the carrying value may be impaired.

The recoverable amount of this cash-generating unit is determined based on a value-in-use ("VIU") calculation which uses cash flow projections based on financial budgets over the mining permit rights, and a discount rate of 11.75% per annum in 2024 and 13.05% per annum in 2023.

There will be no headroom if discount rate is set at 20.53%.

Upon completion of the impairment assessment, management has concluded that there is adequate headroom resulting no impairment losses to be recognized for the six-month periods ended on June 30, 2024 and 2023 as well as for the years ended on December 31, 2023 and 2022.

15. INTEREST IN JOINT OPERATION

Fluor-Petrosea Joint Operation

On March 11, 2020, the Company entered into an unincorporated joint operation agreement with PT Fluor Daniel Indonesia (FLUOR) known as the Fluor-Petrosea Joint Organization (FPJO) in which joint control is exercised.

Bagian Perusahaan dalam kerja sama ini secara keseluruhan adalah 40% sehubungan dengan *Mill Optimization for Underground Ores Project* untuk PT Freeport Indonesia. Grup berhak atas proporsional bagian dari penghasilan konstruksi dan rekayasa yang diterima dan menanggung bagian proporsional dari biaya operasi bersama.

The Company's portion in FPJO altogether is 40% related to Mill Optimization for Underground Ores Project for PT Freeport Indonesia. The Group is entitled to a proportionate share of the engineering and construction income received and bears a proportionate share of joint operation's expenses.

Ringkasan keuangan di bawah ini merupakan jumlah yang ditunjukkan dalam laporan keuangan operasi bersama sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia:

The summarized financial information below represents amounts shown in the joint operation's financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards:

	30 Juni/ June 30, 2024 US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2023 US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2022 US\$ '000	
Jumlah aset	37.271	31.658	44.735	Total assets
Jumlah liabilitas	36.307	30.240	41.737	Total liabilities

	2024 (Enam bulan/ Six-month) US\$ '000	2023 (Enam bulan/ Six-month) (Tidak diaudit/ Unaudited) US\$ '000	2023 (Satu tahun/ One year) US\$ '000	2022 (Satu tahun/ One year) US\$ '000	
Jumlah pendapatan	35.562	39.650	66.040	31.780	Total revenues
Jumlah beban	30.883	37.380	62.307	29.464	Total expenses

16. ASET TAK-BERWUJUD

16. INTANGIBLE ASSETS

	1 Januari/ January 1, 2024 US\$ '000	Penambahan/ Additions US\$ '000	Pengurangan/ Deductions US\$ '000	Reklasifikasi/ Reclassifications US\$ '000	Selisih kurs penjabaran laporan keuangan/ Translation adjustment US\$ '000	30 Juni/ June 30, 2024 US\$ '000	
Biaya perolehan:							At cost:
Perangkat lunak komputer	43.648	-	-	(1.214)	(8)	42.426	Computer software
Aset tak-berwujud berasal dari akuisisi entitas anak (Catatan 34)	89.086	-	-	-	-	89.086	Intangible assets from the acquisition of subsidiaries (Note 34)
Aset tak-berwujud dalam pengembangan	805	1.122	-	(571)	-	1.356	Intangible assets under development
Jumlah	133.539	1.122	-	(1.785)	(8)	132.868	Total
Akumulasi amortisasi:							Accumulated amortization:
Perangkat lunak komputer	19.365	3.306	-	(59)	-	22.612	Computer software
Aset tak-berwujud berasal dari akuisisi entitas anak	3.185	2.963	-	-	(2)	6.146	Intangible assets from the acquisition of subsidiaries
Jumlah	22.550	6.269	-	(59)	(2)	28.758	Total
Jumlah tercatat bersih	110.989					104.110	Net carrying amount

PT PETROSEA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2024 DAN 2023 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023 DAN 2022 – Lanjutan

PT PETROSEA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED
JUNE 30, 2024 AND 2023 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2023 AND 2022 - Continued

	1 Januari/ January 1, 2023 US\$ '000	Penambahan/ Additions US\$ '000	Pengurangan/ Deductions US\$ '000	Reklasifikasi/ Reclassifications US\$ '000	Selisih kurs penjabaran laporan keuangan/ Translation adjustment US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2023 US\$ '000	
Biaya perolehan:							At cost:
Perangkat lunak komputer	39.145	-	-	4.501	2	43.648	Computer software
Aset tak-berwujud berasal dari akuisisi entitas anak (Catatan 34)	222	88.864	-	-	-	89.086	Intangible assets from the acquisition of subsidiaries (Note 34)
Aset tak-berwujud dalam pengembangan	1.352	3.954	-	(4.501)	-	805	Intangible assets under development
Jumlah	40.719	92.818	-	-	2	133.539	Total
Akumulasi amortisasi:							Accumulated amortization:
Perangkat lunak komputer	13.017	6.348	-	-	-	19.365	Computer software
Aset tak-berwujud berasal dari akuisisi entitas anak	222	2.963	-	-	-	3.185	Intangible assets from the acquisition of subsidiaries
Jumlah	13.239	9.311	-	-	-	22.550	Total
Jumlah tercatat bersih	27.480					110.989	Net carrying amount

	1 Januari/ January 1, 2022 US\$ '000	Penambahan/ Additions US\$ '000	Pengurangan/ Deductions US\$ '000	Reklasifikasi/ Reclassifications US\$ '000	Selisih kurs penjabaran laporan keuangan/ Translation adjustment US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2022 US\$ '000	
Biaya perolehan:							At cost:
Perangkat lunak komputer	24.769	-	137	14.522	(9)	39.145	Computer software
Aset tak-berwujud berasal dari akuisisi entitas anak	222	-	-	-	-	222	Intangible assets from the acquisition of subsidiaries
Aset tak-berwujud dalam pengembangan	12.085	3.789	-	(14.522)	-	1.352	Intangible assets under development
Jumlah	37.076	3.789	137	-	(9)	40.719	Total
Akumulasi amortisasi:							Accumulated amortization:
Perangkat lunak komputer	8.684	4.470	137	-	-	13.017	Computer software
Aset tak-berwujud berasal dari akuisisi entitas anak	222	-	-	-	-	222	Intangible assets from the acquisition of subsidiaries
Jumlah	8.906	4.470	137	-	-	13.239	Total
Jumlah tercatat bersih	28.170					27.480	Net carrying amount

Reklasifikasi pada tahun 2024 termasuk aset-tak-berwujud yang merupakan bagian dari beban dibayar di muka.

Reclassification in 2024 includes reclassification of intangible assets that are part of prepaid expenses.

Beban amortisasi dialokasikan sebagai berikut:

Amortization expense was allocated to the following:

	2024 (Enam bulan)/ (Six-month) US\$ '000	2023 (Enam bulan)/ (Six-month) (Tidak diaudit)/ (Unaudited) US\$ '000	2023 (Satu tahun)/ (One year) US\$ '000	2022 (Satu tahun)/ (One year) US\$ '000	
Pemilikan langsung:					Direct acquisitions:
Beban usaha langsung (Catatan 26)	5.085	1.695	7.070	3.110	Direct costs (Note 26)
Beban administrasi (Catatan 28)	1.184	1.036	2.241	1.360	Administration expenses (Note 28)
Jumlah	6.269	2.731	9.311	4.470	Total

17. UTANG BANK JANGKA PENDEK

17. SHORT-TERM BANK LOANS

Kreditur/ Creditor	Fasilitas maksimum/ Maximum facility US\$ '000	Tanggal perjanjian/ Agreement date	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Tingkat bunga per tahun/ Interest rate per annum	30 Juni June 30, 2024 US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2023 US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2022 US\$ '000
PT Bank Cental Asia Tbk	70.000	29 Mei 2024/ May 29, 2024	9 dan 19 September 2024/ September 9 and 19, 2024	Term SOFR 3M + 2%	44.353	-	-
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	30.000	13 Desember 2023/ December 13, 2023	13 Maret 2024/ March 13, 2024	Term SOFR 3M + CAS + 3%	-	30.057	30.052
PT Bank HSBC Indonesia	15.000	25 Oktober 2023/ October 25, 2023	23 Januari 2024/ January 23, 2024	Term SOFR 3M + 2,00%	-	4.055	10.043
		7 Desember 2023/ December 7, 2023	6 Maret 2024/ March 6, 2024	Term SOFR 3M + 2,00%	-	3.015	5.051
Jumlah/ Total					44.353	37.127	45.146

Rekonsiliasi arus kas aktivitas pendanaan yang timbul dari utang bank jangka pendek adalah:

Reconciliation of cashflows from financing activities arising from short-term bank loans are as follows:

	1 Januari/ January 1, 2024 US\$ '000	Arus kas masuk/ Cash inflow US\$ '000	Arus kas keluar/ Cash outflow US\$ '000	Perubahan nonkas/ Non-cash changes US\$ '000	30 Juni/ June 30, 2024 US\$ '000	
Utang bank	37.127	59.226	(52.000)	-	44.353	Bank loans
	1 Januari/ January 1, 2023 US\$ '000	Arus kas masuk/ Cash inflow US\$ '000	Arus kas keluar/ Cash outflow US\$ '000	Perubahan nonkas/ Non-cash changes US\$ '000	30 Juni/ June 30, 2023 (Tidak diaudit)/ (Unaudited) US\$ '000	
Utang bank	45.146	44.673	(45.000)	64	44.883	Bank loans
	1 Januari/ January 1, 2023 US\$ '000	Arus kas masuk/ Cash inflow US\$ '000	Arus kas keluar/ Cash outflow US\$ '000	Perubahan nonkas/ Non-cash changes US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2023 US\$ '000	
Utang bank	45.146	81.509	(89.509)	(19)	37.127	Bank loans
	1 Januari/ January 1, 2022 US\$ '000	Arus kas masuk/ Cash inflow US\$ '000	Arus kas keluar/ Cash outflow US\$ '000	Perubahan nonkas/ Non-cash changes US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2022 US\$ '000	
Utang bank	-	107.000	(62.000)	146	45.146	Bank loans

PT Bank Central Asia Tbk (BCA)

Pada tanggal 29 Mei 2024, Grup dan BCA menandatangani perjanjian untuk memberikan fasilitas *time loan revolving* sebesar US\$ 70 juta, dengan jatuh tempo 2 tahun dan tingkat suku bunga *term Secured Overnight Financing Rate* ("SOFR") tiga bulan ditambah margin sebesar 2% per tahun untuk USD dan JIBOR tiga bulan ditambah margin sebesar 1,75% per tahun untuk IDR. Tujuan penggunaan fasilitas ini untuk membiayai modal kerja Grup. Fasilitas ini hanya dapat digunakan oleh Perusahaan, PTKBL dan PTCEP.

PT Bank Central Asia Tbk (BCA)

On May 29, 2024, the Group and BCA signed an agreement related to time loan revolving facility amounted to US\$ 70 million, with a tenure of 2 years and an interest rate of three-months Secured Overnight Financing Rate ("SOFR") term plus margin of 2% per annum for USD and three-months JIBOR plus margin of 1.75% per annum for IDR. The purpose of this facility is to finance the Group's working capital. This facility can only be used by the Company, PTKBL and PTCEP.

Pada tanggal 30 Juni 2024, fasilitas ini telah digunakan sebesar US\$ 44.186 ribu oleh Perusahaan dan masing-masing sebesar Nihil pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022. Utang bank ini jatuh tempo pada tanggal 9 dan 19 September 2024. Pada tanggal 9 dan 19 September 2024, Perusahaan mengajukan Surat Permohonan Perpanjangan Pembayaran ("SPPFK") kepada BCA terkait perpanjangan waktu pembayaran atas pinjaman ini. Perusahaan telah mendapatkan persetujuan dari BCA dan waktu pembayaran diperpanjang sampai dengan tanggal 11 dan 21 Desember 2024.

Pada tanggal 30 Juni 2024, pinjaman dari fasilitas ini dijamin dengan piutang usaha senilai US\$ 82.569 ribu dan masing-masing sebesar Nihil pada 31 Desember 2023 dan 2022. (Catatan 6a).

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri)

Pada tanggal 9 Oktober 2018, Mandiri dan Perusahaan menyetujui pemberian fasilitas Kredit Modal Kerja ("KMK") senilai US\$ 30 juta. Fasilitas ini diperpanjang beberapa kali dengan perpanjangan yang terakhir akan jatuh tempo pada 9 Oktober 2024 dengan tingkat suku bunga sebesar *term* SOFR tiga bulan ditambah *Credit Adjustment Spread* ("CAS") tiga bulan dan margin sebesar 3% per tahun.

Fasilitas di atas mensyaratkan Perusahaan untuk mempertahankan persyaratan tertentu. Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Perusahaan telah memenuhi persyaratan tersebut.

Pada tanggal 22 Maret 2024, Perusahaan melunasi fasilitas pinjaman jangka pendek dari Mandiri sebesar US\$ 10.000 ribu dengan tingkat suku bunga sebesar *term* SOFR tiga bulan ditambah CAS tiga bulan dan margin sebesar 3% per tahun.

Pada tanggal 4 April 2024, Perusahaan melakukan penarikan fasilitas pinjaman senilai US\$ 10.000 ribu.

Pada tanggal 12 dan 21 Juni 2024, Perusahaan melunasi seluruhnya fasilitas pinjaman jangka pendek dari Mandiri sebesar US\$ 20.000 ribu dan US\$ 10.000 ribu dengan tingkat suku bunga sebesar *term* SOFR tiga bulan ditambah CAS tiga bulan dan margin sebesar 3% per tahun.

Pada tanggal 21 Juni 2024, perjanjian fasilitas KMK ini telah diakhiri.

On June 30, 2024, this facility had been utilized by the Company amounted to US\$ 44,186 thousand and amounted to Nil on December 31, 2023 and 2022, respectively. This loan matured on September 9 and 19, 2024. On September 9 and 19, 2024, the Company submitted *Surat Permohonan Perpanjangan Pembayaran* ("SPPFK") to BCA in relation to extension on payment term of this loan. The Company had obtained approval from BCA and the payment term had been extended until December 11 and 21, 2024.

On June 30, 2024, borrowings from this facility are collateralized by trade accounts receivable amounted to US\$ 82,569 thousand and Nil on December 31, 2023 and 2022, respectively (Note 6a).

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri)

On October 9, 2018, Mandiri and the Company agreed to have a new Working Capital Credit facility ("WCC") amounted to US\$ 30 million. The facility extended several times with the latest extension will be matured on October 9, 2024 with interest rate of three months SOFR term plus three-months Credit Adjustment Spread ("CAS") and margin of 3% per annum.

The facility above requires the Company to maintain certain covenants. As of December 31, 2023 and 2022, the Company has complied with these covenants.

On March 22, 2024, the Company repaid the short-term loan facility from Mandiri amounted to US\$ 10,000 thousand with an interest rate of the term three-month SOFR term plus three-months CAS and margin of 3% per annum.

On April 4, 2024, the company withdrew the facility amounted to US\$ 10,000 thousand.

On June 12 and 21, 2024, the Company fully repaid the short-term loan facility from Mandiri amounted to US\$ 20,000 thousand and US\$ 10,000 thousand term with an interest rate of the three-months SOFR term plus three-months CAS and margin of 3% per annum.

On June 21, 2024, the WCC facility agreement has been terminated.

PT Bank HSBC Indonesia (HSBC)

Pada tanggal 13 April 2022, Perusahaan dan HSBC menandatangani perjanjian untuk memberikan fasilitas pinjaman modal kerja sebesar US\$ 15 juta.

Fasilitas ini diperpanjang sampai dengan 23 Januari 2024 dengan tingkat suku bunga sebesar term SOFR tiga bulan ditambah margin sebesar 2% per tahun atau dengan tingkat suku bunga sebesar *term Jakarta Interbank Offered Rate* ("JIBOR") ditambah margin sebesar 1,38% per tahun.

Pada tanggal 6 dan 23 Maret 2024, Perusahaan melunasi seluruhnya fasilitas pinjaman jangka pendek dari HSBC masing-masing sebesar US\$ 3.000 ribu dan US\$ 4.000 ribu dengan tingkat suku bunga sebesar *term* SOFR ditambah margin sebesar 2% per tahun.

Fasilitas di atas mensyaratkan Perusahaan untuk mempertahankan persyaratan tertentu. Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Perusahaan telah memenuhi persyaratan tersebut.

Pada tanggal 22 Maret 2024, fasilitas kredit ini telah diakhiri.

Beban bunga atas utang bank jangka pendek untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar US\$ 1.394 ribu dan US\$ 1.743 ribu serta US\$ 3.508 ribu dan US\$ 1.687 ribu (Catatan 29).

PT Bank HSBC Indonesia (HSBC)

On April 13, 2022, the Company and HSBC signed working capital facility amounted to US\$ 15 million.

This facility has been extended until January 23, 2024 with interest rate of three-months SOFR term plus margin of 2% per annum or with an interest rate of the Jakarta Interbank Offered Rate ("JIBOR") term plus a margin of 1.38% per annum.

On March 6 and 23, 2024, the Company fully repaid the short-term loan facility from HSBC amounted to US\$ 3,000 thousand and US\$ 4,000 thousand, respectively with interest rate of the SOFR term plus margin of 2% per annum.

The facility above requires the Company to maintain certain covenants. As of December 31, 2023 and 2022, the Company has complied with these covenants.

On March 22, 2024, this credit facility has been terminated.

The interest incurred from short-term bank loans for the six-month periods ended June 30, 2024 and 2023 as well as for the years ended December 31, 2023 and 2022 amounted to US\$ 1,394 thousand and US\$ 1,743 thousand as well as US\$ 3,508 thousand and US\$ 1,687 thousand, respectively (Note 29).

18. UTANG USAHA

	30 Juni/ <i>June 30,</i> 2024	31 Desember/ <i>December 31,</i> 2023	31 Desember/ <i>December 31,</i> 2022
	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000
a. <u>Berdasarkan pemasok</u>			
Pihak berelasi (Catatan 35):			
Fluor Petrosea Joint Organization	-	-	674
Jumlah	-	-	674
Pihak ketiga:			
Pemasok dalam negeri	136.913	133.540	113.220
Pemasok luar negeri	5.516	6.453	4.641
Jumlah	142.429	139.993	117.861
Jumlah	142.429	139.993	118.535

18. TRADE ACCOUNTS PAYABLE

a. <u>By creditor</u>
Related parties (Note 35):
Fluor Petrosea Joint Organization
Total
Third parties:
Local suppliers
Foreign suppliers
Total
Total

PT PETROSEA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2024 DAN 2023 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023 DAN 2022 – Lanjutan

PT PETROSEA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED
JUNE 30, 2024 AND 2023 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2023 AND 2022 - Continued

	30 Juni/ June 30, 2024 US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2023 US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2022 US\$ '000	
b. Berdasarkan umur				b. By age category
Belum jatuh tempo	79.833	73.968	76.748	Not yet due
Sudah jatuh tempo				Past due
Dibawah 30 hari	17.150	11.700	16.196	Under 30 days
31 - 60 hari	7.759	18.095	13.898	31 - 60 days
61 - 90 hari	5.414	7.899	5.824	61 - 90 days
91 - 120 hari	7.990	6.980	2.796	91 - 120 days
> 120 hari	24.283	21.351	3.073	> 120 days
Jumlah	142.429	139.993	118.535	Total
c. Berdasarkan mata uang				c. By currency
Mata uang fungsional				Functional currency
Dolar Amerika Serikat	35.343	15.709	19.778	U.S. Dollar
Mata uang lain				Other currencies
Rupiah	100.778	118.579	96.513	Rupiah
Dolar Australia	4.343	3.882	1.476	Australian Dollar
Euro	1.955	1.799	683	Euro
Dolar Singapura	10	24	85	Singapore Dollar
Jumlah	142.429	139.993	118.535	Total

19. UTANG PAJAK

19. TAXES PAYABLE

	30 Juni/ June 30, 2024 US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2023 US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2022 US\$ '000	
Pajak kini				Current tax
Perusahaan	-	-	1.116	The Company
Entitas anak	87	156	1.851	Subsidiaries
Pajak penghasilan				Income tax
Pasal 4(2)	374	67	88	Article 4(2)
Pasal 15	8	9	2	Article 15
Pasal 21	1.260	1.731	1.534	Article 21
Pasal 23	502	167	136	Article 23
Pasal 25	2	-	71	Article 25
Pasal 26	22	33	-	Article 26
Pajak Pertambahan Nilai - bersih				Value Added Tax - net
Perusahaan	-	1.062	-	The Company
Entitas anak	-	-	697	Subsidiaries
Jumlah	2.255	3.225	5.495	Total

20. BEBAN MASIH HARUS DIBAYAR

20. ACCRUED EXPENSES

	30 Juni/ <i>June 30,</i> 2024	31 Desember/ <i>December 31,</i> 2023	31 Desember/ <i>December 31,</i> 2022	
	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	
Gaji dan bonus	6.336	9.596	13.129	Salaries and bonuses
Keamanan	2.673	2.515	2.365	Securities
Tanggung jawab sosial perusahaan	1.397	1.417	1.452	Corporate social responsibility
Bagian lancar cuti berimbalan jangka panjang (Catatan 33)	556	748	750	Current-maturities of long service leave (Note 33)
Cuti tahunan	527	794	767	Annual leave
Pajak kendaraan	249	643	453	Vehicle tax
Lain-lain	486	2.329	36	Others
	<u>12.224</u>	<u>18.042</u>	<u>18.952</u>	Total

21. LIABILITAS KONTRAK

21. CONTRACT LIABILITIES

	30 Juni/ <i>June 30,</i> 2024	31 Desember/ <i>December 31,</i> 2023	31 Desember/ <i>December 31,</i> 2022	
	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	
Pihak ketiga	<u>30.812</u>	<u>22.277</u>	<u>5.694</u>	Third parties

Liabilitas kontrak adalah saldo terutang yang berkaitan dengan kontrak konstruksi dan jasa kontraktor pertambangan kepada pelanggan selama kontrak. Hal ini muncul jika tonggak pembayaran tertentu melebihi pendapatan yang diakui hingga saat ini berdasarkan metode biaya-ke-biaya.

Contract liabilities are balances due to customers relating to construction contracts and mining under contracts. These arise if a particular milestone payment exceeds the revenue recognized to date under the cost-to-cost method.

Jumlah pendapatan yang diakui terkait kontrak dengan pelanggan dengan liabilitas kontrak bawaan masing-masing sebesar US\$ 30.516 ribu dan US\$ 16.891 ribu untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 serta masing-masing sebesar US\$ 101.991 ribu dan US\$ 94.843 ribu untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022. Tidak ada pendapatan yang diakui pada tahun berjalan yang terkait dengan kewajiban pelaksanaan yang telah dipenuhi di tahun lalu.

Total of the revenue recognized relates to contract with customers with brought forward contract liabilities amounted to US\$ 30,516 thousand and US\$ 16,891 thousand, respectively, for the six-month periods ended on June 30, 2024 and 2023 as well as amounted to US\$ 101,991 thousand and US\$ 94,843 thousand, respectively, for the years ended on December 31, 2023 and 2022. There was no revenue recognized in the current year that related to performance obligations that were satisfied in a prior year.

22. LIABILITAS JANGKA PANJANG

22. LONG-TERM LIABILITIES

a. Pinjaman Jangka Panjang dari Pihak Ketiga

a. Long-term Loans from Third Parties

	30 Juni/ June 30, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	
Pihak ketiga				Third parties
Dolar Amerika Serikat				U.S. Dollar
PT Bank Central Asia Tbk	107.512	-	-	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	111.506	35.063	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Rupiah				Rupiah
PT Bank Central Asia Tbk	79.877	-	-	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	77.515	9.379	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Jumlah	187.389	189.021	44.442	Total
Biaya pinjaman jangka panjang yang belum diamortisasi	(2.302)	(2.195)	(389)	Unamortized long-term loan fees
Bunga yang masih harus dibayar	389	369	69	Accrued interest
Jumlah	185.476	187.195	44.122	Total
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	(9.758)	(38.539)	(15.807)	Less current maturities
Pinjaman jangka panjang - bersih	175.718	148.656	28.315	Long-term loans - net
Jadwal pembayaran pokok pinjaman				Schedule of principal repayment
Kurang dari satu tahun	9.369	38.178	15.752	Less than one year
Lebih dari satu tahun dan kurang dari lima tahun	61.422	150.843	28.690	Due beyond one year but within five years
Lebih dari lima tahun	116.598	-	-	More than five years
Jumlah	187.389	189.021	44.442	Total
Tingkat suku bunga per tahun				Interest rates per annum
Dolar Amerika Serikat	3M Term SOFR + 2,25% p.a	3M Term SOFR + 2,85% - 3% p.a + CAS	3M Term SOFR + 2,85% - 3% p.a + CAS	U.S. Dollar
Rupiah	3M JIBOR + 1,95% p.a	3M JIBOR + 2,45% - 4,75% p.a	3M JIBOR + 4,75% p.a	Rupiah

Rekonsiliasi arus kas aktivitas pendanaan yang timbul dari pinjaman jangka panjang pihak ketiga adalah:

Reconciliation of cashflows from financing activities arising from long term loans third parties are as follows:

	1 Januari/ January 1, 2024	Arus kas masuk/ Cash inflow	Arus kas keluar/ Cash outflow	Perubahan nonkas/ Noncash changes	30 Juni/ June 30, 2024	
	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	
Pinjaman jangka panjang pihak ketiga	187.195	184.034	(183.472)	(2.281)	185.476	Long-term loan third parties
	1 Januari/ January 1, 2023	Arus kas masuk/ Cash inflow	Arus kas keluar/ Cash outflow	Perubahan nonkas/ Noncash changes	30 Juni/ June 30, 2023 (Tidak diaudit/ Unaudited)	
	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	
Pinjaman jangka panjang pihak ketiga	44.122	170.505	(9.612)	463	205.478	Long-term loan third party
	1 Januari/ January 1, 2023	Arus kas masuk/ Cash inflow	Arus kas keluar/ Cash outflow	Perubahan nonkas/ Noncash changes	31 Desember/ December 31, 2023	
	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	
Pinjaman jangka panjang pihak ketiga	44.122	174.324	(28.714)	(2.537)	187.195	Long-term loan third party

	1 Januari/ January 1, 2022 US\$ '000	Arus kas masuk/ Cash inflow US\$ '000	Arus kas keluar/ Cash outflow US\$ '000	Perubahan nonkas/ Noncash changes US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2022 US\$ '000	
Pinjaman jangka panjang pihak ketiga	103.031	-	(58.879)	(30)	44.122	Long-term loan third party

PT Bank Central Asia Tbk (BCA)

Pada tanggal 29 Mei 2024, BCA bersama-sama Perusahaan, PTKBL, dan PTCEP telah menyetujui beberapa pemberian fasilitas bank sebagai berikut:

a. Fasilitas pinjaman tunai

i. Kredit Investasi 1 (KI 1)

Fasilitas ini senilai setara dengan US\$ 107 juta, dengan tenor 8 tahun, dan tingkat suku bunga *term* SOFR tiga bulan ditambah margin sebesar 2,25% per tahun untuk USD dan JIBOR tiga bulan ditambah margin sebesar 1,95% per tahun untuk IDR. Tujuan penggunaan fasilitas ini untuk takeover fasilitas Term Loan I, II, III dan *Senior Secured Term Loan* di Mandiri. Fasilitas ini hanya dapat digunakan oleh Perusahaan dan PTKBL.

Pada tanggal 30 Juni 2024, fasilitas KI 1 ini telah digunakan oleh Perusahaan dan PTKBL sebesar US\$ 97.180 ribu dan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Grup belum memiliki fasilitas ini. Fasilitas KI 1 ini akan jatuh tempo pada 29 Mei 2032.

ii. Kredit Investasi 2 (KI 2)

Fasilitas ini senilai setara US\$ 83 juta, dengan tenor 10 tahun, dan tingkat suku bunga sebesar *term* SOFR tiga bulan ditambah margin sebesar 2,25% per tahun untuk USD dan JIBOR tiga bulan ditambah margin sebesar 1,95% per tahun untuk IDR. Tujuan penggunaan fasilitas ini untuk takeover fasilitas *Senior Secured Term Loan* di Mandiri. Fasilitas ini hanya dapat digunakan oleh Perusahaan dan PTKBL.

Pada tanggal 30 Juni 2024, fasilitas KI 2 ini telah digunakan oleh Perusahaan sebesar US\$ 81.698 ribu dan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Grup belum memiliki fasilitas ini. Fasilitas KI 2 ini akan jatuh tempo pada 29 Mei 2034.

PT Bank Central Asia Tbk (BCA)

On May 29, 2024, BCA together with the Company, PTKBL, and PTCEP, approved several bank facility provisions as follows:

a. Cash loan facility

i. Investment credit 1 (KI 1)

This facility amounted to the equivalent of US\$ 107 million, with a tenure of 8 years, and an interest rate of three-months SOFR term plus margin of 2.25% per annum for USD and three-months JIBOR plus margin of 1.95% per annum for IDR. The purpose of using these facilities is to take over Term Loan I, II, III, and the Senior Secured Term Loan at Mandiri. This facility can only be used by the Company and PTKBL.

On June 30, 2024, this KI 1 facility had been utilized by the Company and PTKBL amounted to US\$ 97,180 thousand and on December 31, 2023 and 2022, the Group does not have this facility yet. This KI 1 facility will mature on May 29, 2032.

ii. Investment credit 2 (KI 2)

This facility amounted to the equivalent of US\$ 83 million, with a tenure of 10 years, and an interest rate of three-months SOFR term plus margin of 2.25% per annum for USD and three-months JIBOR plus 1.95% per annum for IDR. The purpose of using these facilities is to take over the Senior Secured Term Loan at Mandiri. This facility can only be used by the Company and PTKBL.

On June 30, 2024, this KI 2 facility had been utilized by the Company amounted to US\$ 81,698 thousand and on December 31, 2023 and 2022, the Group does not have this facility yet. This KI 2 facility will mature on May 29, 2034.

iii. Kredit Investasi 3 (KI 3)

Fasilitas ini senilai Rp 500 miliar (setara dengan US\$ 30,4 juta), dengan tenor 10 tahun, dan tingkat suku bunga JIBOR tiga bulan ditambah margin sebesar 1,95% per tahun untuk IDR. Tujuan penggunaan fasilitas ini untuk membiayai Pembangunan infrastruktur PTCEP yang terletak di dekat tambang PTCEP. Fasilitas ini hanya dapat digunakan oleh PTCEP.

Pada tanggal 30 Juni 2024, fasilitas KI 3 ini telah digunakan oleh PTCEP sebesar Rp 138 miliar (setara dengan US\$ 8.512 ribu) dan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Grup belum memiliki fasilitas ini. Fasilitas KI 3 ini akan jatuh tempo pada 29 Mei 2034.

iv. Kredit Investasi 4 (KI 4)

Fasilitas ini senilai US\$ 50 juta, dengan tenor 8 tahun, dan tingkat suku bunga *term SOFR* tiga bulan ditambah margin sebesar 2,25% per tahun. Tujuan penggunaan fasilitas ini untuk membiayai pembelian alat berat dan/atau mesin baru termasuk dengan komponen atas alat berat. Fasilitas ini hanya dapat digunakan oleh Perusahaan, PTKBL dan PTCEP.

Pada tanggal 30 Juni 2024, belum ada penggunaan atas fasilitas KI 4 dan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Grup belum memiliki fasilitas ini.

v. Kredit Investasi 5 (KI 5)

Fasilitas ini senilai Rp 800 miliar (setara dengan US\$ 48,7 juta), dengan tenor 8 tahun, dan tingkat suku bunga JIBOR tiga bulan ditambah margin sebesar 1,95% per tahun. Tujuan penggunaan fasilitas ini untuk membiayai pembelian alat berat dan/atau mesin baru termasuk dengan komponen atas alat berat. Fasilitas ini hanya dapat digunakan oleh Perusahaan, PTKBL dan PTCEP.

Pada tanggal 30 Juni 2024, belum ada penggunaan atas fasilitas KI 5 dan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Grup belum memiliki fasilitas ini.

iii. Investment credit 3 (KI 3)

This facility amounted to Rp 500 billion (equivalent to US\$ 30.4 million), with a tenure of 10 years, and an interest rate of three-months JIBOR plus margin of 1.95% per annum for IDR. The purpose of using this facility is to finance the construction of PTCEP's infrastructure located near PTCEP's site. This facility can only be used by PTCEP.

On June 30, 2024, this KI 3 facility has been utilized by PTCEP for an amount of Rp 138 billion (equivalent to US\$ 8,512 thousand) and on December 31, 2023 and 2022, the Group does not have this facility yet. This KI 3 facility will mature on May 29, 2034.

iv. Investment credit 4 (KI 4)

This facility amounted to US\$ 50 million, with a tenure of 8 years, and an interest rate of three-months SOFR term plus margin of 2.25% per annum. The purpose of using this facility is to finance the purchase of plant and/or new machinery, including components for the plant. This facility can only be used by the Company, PTKBL and PTCEP.

As of June 30, 2024, there has been no utilization of the KI 4 facility and on December 31, 2023 and 2022, the Group does not have this facility yet.

v. Investment credit 5 (KI 5)

This facility amounted to Rp 800 billion (equivalent to US\$ 48.7 million), with a tenure of 8 years, and an interest rate of three-months JIBOR plus 1.95% per annum. The purpose of using this facility is to finance the purchase of plant and/or new machinery, including components for the plant. This facility can only be used by the Company, PTKBL, and PTCEP.

As of June 30, 2024, there has been no utilization of the KI 5 facility and on December 31, 2023 and 2022, the Group does not have this facility yet.

b. Fasilitas pinjaman non-tunai

i. Kredit Multi Fasilitas (KMF)

Fasilitas ini senilai setara US\$ 100 juta, dengan tenor fasilitas 1 tahun. Fasilitas ini dapat digunakan untuk LC/SKBDN, *Forex Forward Line*, dan BG/SBLC. Fasilitas ini dapat digunakan oleh Perusahaan, PTKBL dan PTCEP.

Pada tanggal 30 Juni 2024, fasilitas ini telah digunakan oleh Perusahaan sebesar US\$ 88.506 ribu untuk penerbitan SBLC atas BG/SBLC dan LC/SKBDN. Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Grup belum memiliki fasilitas ini.

Fasilitas pinjaman dengan BCA mencakup persyaratan keuangan seperti mempertahankan rasio lancar tidak kurang dari 100%, rasio EBITDA terhadap utang dan kewajiban bunga tidak kurang dari 115%, rasio utang terhadap ekuitas tidak melebihi 250%, yang dihitung berdasarkan laporan keuangan konsolidasian setiap tahunan.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri)

Mandiri dan Perusahaan telah menyetujui pemberian fasilitas bank sebagai berikut:

a. Fasilitas pinjaman non tunai

Mandiri dan Perusahaan menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman non tunai *non-revolving* untuk Bank Garansi (BG) dan/atau SBLC dan/atau LC dan/atau Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) pada tanggal 29 Desember 2014 sebesar US\$ 30 juta. Pada tanggal 27 Desember 2017, fasilitas *non-revolving* ditambah menjadi US\$ 50 juta. Tingkat suku bunga fasilitas *non-revolving* ini adalah 1% per tahun dari nilai BG/SBLC yang diterbitkan. Pada tanggal 10 Juli 2020, Perusahaan dan Mandiri mengubah fasilitas *non-cash non-revolving loan letter of credit*/SKBDN menjadi 360 hari. Pada tanggal 8 Desember 2021, Perusahaan merubah fasilitas *non-revolving* LC/SKBDN menjadi *global line* dengan PTKBL. Pada tanggal 22 Juni 2023, Perusahaan mengubah fasilitas *non-revolving* menjadi *revolving* LC/SKBDN. Mandiri dan Perusahaan telah beberapa kali menyetujui amendemen fasilitas yang tersedia, yang terakhir pada tanggal 9 Oktober 2023 untuk LC/SKBDN dengan tenor 180 hari dan 9 Juli 2023 dengan tenor 360 hari.

b. Non-cash loan facility

i. Multi facility credit (MFC)

This facility amounted to equivalent of US\$ 100 million, with a tenure of 1 year. The facilities can be used for LC/SKBDN, *Forex Forward Line*, and BG/SBLC. These facilities can be used by the Company, PTKBL, and PTCEP.

On June 30, 2024, this facility had been utilized by the Company amounted to US\$ 88,506 thousand for issuing SBLC against the BG/SBLC and LC/SKBDN. On December 31, 2023 and 2022, the Group does not have this facility yet.

The loan facilities with BCA include financial requirements such as maintaining a current ratio of not less than 100%, an EBITDA to interest-bearing debt ratio of not less than 115%, and a debt-to-equity ratio not exceeding 250%, calculated based on the annually consolidated financial statements.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri)

Mandiri and the Company agreed to have bank facilities, as follows:

a. Non-cash loan facility

Mandiri and Company entered into non-cash loan non-revolving facility agreement for Bank Guarantee (BG) and/or SBLC and/or LC and/or *Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri* (SKBDN) on December 29, 2014 amounted to US\$ 30 million. On December 27, 2017, the non-revolving facility was increased to US\$ 50 million. The interest rate of this non-revolving facility is 1% per annum from the published BG/SBLC value. On July 10, 2020, the Company and Mandiri converted non-cash non-revolving loan facility letter of credit to 360 days. On December 8, 2021, the Company converted LC/SKBDN non-revolving facility to global line with PTKBL. On June 22, 2023, the Company changes the non-revolving to revolving LC/SKBDN. Mandiri and Company has agreed to amend several available facilities, with the last amendment on October 9, 2023 for LC/SKBDN with 180 days tenor and on July 9, 2023 with 360 days tenor.

Pada tanggal 20 Maret 2024, Perusahaan menerima surat dari Mandiri mengenai persetujuan perubahan ketentuan perjanjian kredit dan dokumen jaminan. Dalam surat ini, Mandiri juga telah menyetujui permohonan peningkatan limit fasilitas menjadi US\$ 100 juta untuk BG/SBLC dan US\$ 50 juta untuk LC/SKBDN.

Porsi yang telah digunakan atas bank garansi ini sebesar Nihil pada tanggal 30 Juni 2024 serta masing-masing sebesar US\$ 62.829 ribu dan US\$ 16.339 ribu pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

b. Fasilitas *treasury line* 1 – lindung nilai mata uang asing

Mandiri dan Perusahaan menandatangani perjanjian fasilitas *treasury line* pada tanggal 29 Desember 2014 dengan limit fasilitas sebesar US\$ 5 juta. Pada 27 Desember 2017, limit fasilitas dinaikkan menjadi US\$ 15 juta dan pada tanggal 5 Februari 2020, limit fasilitas juga meningkat menjadi US\$ 50 juta. Mandiri dan Perusahaan telah beberapa kali menyetujui amendemen dan limit fasilitas yang tersedia, yang terakhir pada tanggal 10 Oktober 2022 terkait dengan perpanjangan dan perubahan limit fasilitas menjadi US\$ 5 juta untuk melakukan transaksi *forward buy and sale*, dan *option* guna mengurangi resiko kurs (lindung nilai), berlaku sampai dengan 9 Oktober 2024.

c. Fasilitas *treasury line* 2- *Interest Rate Swap*

Pada tanggal 9 Oktober 2018, Mandiri dan Perusahaan menyetujui pemberian fasilitas *treasury line* 2 – *interest rate swap* dengan limit fasilitas sebesar US\$ 60 juta. Fasilitas ini bertujuan untuk melakukan lindung nilai arus kas terkait *interest rate swap*. Pada tanggal 10 Juni 2020, limit atas fasilitas tersebut dinaikkan menjadi US\$ 267 juta. Perpanjangan fasilitas ini sampai dengan tanggal 9 Juni 2025.

d. Fasilitas pinjaman tunai

i. *Term loan* I

Pada tanggal 10 Juni 2020, Perusahaan dan Mandiri telah menandatangani perjanjian fasilitas *non-revolving Term Loan* I senilai US\$ 50 juta dengan tingkat suku bunga 1,85% ditambah LIBOR tiga bulan untuk USD atau 3,75% ditambah JIBOR tiga bulan untuk IDR. Fasilitas *non-revolving* ini bertujuan untuk pembiayaan modal alat berat dan mesin Perusahaan.

On March 20, 2024, the Company received a letter from Mandiri related to the approval of the credit agreement term changes and guarantee documents. Within this letter, Mandiri also has approved the request to increase the limit facility to US\$ 100 million for BG/SBLC and US\$ 50 million for LC/SKBDN.

The utilized portion of this bank guarantee is amounted to Nil on June 30, 2024 as well as amounted to US\$ 62,829 thousand and US\$ 16,339 thousand, respectively, on December 31, 2023 and 2022.

b. Treasury line facility 1 – *foreign exchange hedging*

Mandiri and the Company entered into treasury line facility agreement on December 29, 2014 with the limit amounted to US\$ 5 million. On December 27, 2017, the facility limit was increased to US\$ 15 million and on February 5, 2020, the facility limit also updated to US\$ 50 million. Mandiri and Company has agreed to amend the available facility several times, with the last amendment on October 10, 2022 related to the extension and changes of facility limit to US\$ 5 million to conduct forward buy and sale, and option transactions to reduce foreign exchange risk (hedging), valid until October 9, 2024.

c. Treasury line facility 2- *Interest Rate Swap*

On October 9, 2018, Mandiri and the Company agreed to have a treasury line facility 2 – *interest rate swap* with the limit of US\$ 60 million. This facility is for the interest rate swap cashflow hedging. On June 10, 2020, the limit of such facility was increased to US\$ 267 million. The facility has been extended until June 9, 2025.

d. Cash loan facilities

i. *Term loan* I

On June 10, 2020, the Company and Mandiri have signed *Term Loan* I non-revolving facility amounted to US\$ 50 million with interest rate 1.85% plus three-months LIBOR for USD or 3.75% plus three-months JIBOR for IDR. This non-revolving facility aims to finance the Company's plant and machinery capital expenditure.

Pada tanggal 22 Desember 2020, Perusahaan bersama-sama dengan PTKBL dan Mandiri menandatangani perubahan ketentuan fasilitas *Term Loan I*. Perubahan ini terkait penambahan debitur PTKBL.

On December 22, 2020, the Company together with PTKBL and Mandiri signed an amendment of the Term Loan I facility. This change is related to the addition of a debtor, PTKBL.

Pada tanggal 23 Agustus 2022, Mandiri menaikkan tingkat suku bunga sehubungan dengan transaksi perubahan pemegang saham Perusahaan menjadi sebesar *term* SOFR tiga bulan ditambah CAS dan margin sebesar 2,85% per tahun.

On August 23, 2022, Mandiri increased the interest rate in relation to the change in the Company's shareholder to three-months SOFR term plus CAS and margin of 2.85% per annum.

Fasilitas *non-revolving* yang telah dicairkan oleh Grup masing-masing sebesar Nihil, US\$ 21,57 juta dan Nihil pada tanggal 30 Juni 2024, 31 Desember 2023 dan 2022. Fasilitas *non-revolving* ini akan jatuh tempo pada 23 Juli 2025.

The Group utilized the non-revolving facility amounted to Nil, US\$ 21.57 million and Nil on June 30, 2024, December 31, 2023 and 2022, respectively. The non-revolving facilities will mature on July 23, 2025.

Pada tanggal 21 Juni 2024 Perusahaan melunasi seluruhnya fasilitas *Term Loan I* dari Mandiri sebesar setara US\$ 4.976 ribu dengan tingkat suku bunga sebesar *term* SOFR tiga bulan ditambah CAS tiga bulan dan margin sebesar 2,85% per tahun untuk USD dan JIBOR tiga bulan ditambah margin sebesar 4,75% per tahun untuk IDR.

On June 21, 2024, the Company fully repaid the Term Loan I facility from Mandiri amounted equivalent to US\$ 4,976 thousand with an interest rate of three-months term SOFR plus three-months CAS and a margin of 2.85% per annum for USD and three-months JIBOR plus margin of 4.75% per annum for IDR.

ii. *Term loan II*

ii. Term loan II

Pada tanggal 22 Desember 2020, Perusahaan dan Mandiri menandatangani fasilitas *non-revolving Term Loan II*, senilai US\$ 41,5 juta, dengan suku 2% ditambah LIBOR tiga bulan. Fasilitas *non-revolving* ini bertujuan untuk pembiayaan *cashflow gap* sehubungan dengan pelunasan pinjaman pihak berelasi. Pada tanggal 23 Agustus 2022, Mandiri meresolusi tingkat suku bunga menjadi sebesar *term* SOFR tiga bulan ditambah CAS dan margin sebesar 3,00% per tahun. Pada tanggal 31 Desember 2023, fasilitas *non-revolving* telah sepenuhnya dipakai oleh Perusahaan. Fasilitas *non-revolving* ini akan jatuh tempo pada 23 Desember 2025.

On December 22, 2020, the Company and Mandiri signed a Term Loan II non-revolving facility amounted to US\$ 41.5 million, with an interest rate of 2% plus three-months LIBOR. This non-revolving facility aims to finance the cashflow gap in connection with the repayment of related party loans. On August 23, 2022, Mandiri resolve the interest rate to three-months SOFR term plus CAS and margin of 3.00% per annum. As of December 31, 2023, the non-revolving facility had been fully utilized by the Company. The non-revolving facility will mature on December 23, 2025.

Pada tanggal 21 Juni 2024 Perusahaan melunasi seluruhnya fasilitas *Term Loan II* dari Mandiri sebesar US\$ 20.666 ribu dengan tingkat suku bunga sebesar *term* SOFR tiga bulan ditambah CAS tiga bulan dan margin sebesar 3,00% per tahun.

On June 21, 2024, the Company fully repaid the Term Loan II facility from Mandiri amounted to US\$ 20,666 thousand with an interest rate of three-months SOFR term plus three-months CAS and a margin of 3.00% per annum.

iii. *Senior Secured Term Loan*

Pada tanggal 21 Maret 2023, Perusahaan dan Mandiri menandatangani perjanjian fasilitas kredit (*Senior Secured Term Loan Facility*) senilai US\$ 91,5 juta dengan suku bunga sebesar *term* SOFR tiga bulan ditambah margin sebesar 2,85% per tahun dan Rp 1,4 triliun dengan suku bunga sebesar JIBOR tiga bulan ditambah margin sebesar 2,45% per tahun dengan tenor 60 bulan. Fasilitas tersebut akan digunakan untuk mendanai pengembangan usaha melalui akuisisi dan investasi aset tambang serta memperkuat modal kerja Perusahaan.

Pada tanggal 30 Maret 2023, Perusahaan mencairkan fasilitas untuk membiayai kebutuhan modal kerja Perusahaan sebesar Rp 1,2 triliun (setara dengan US\$ 78 juta) dengan tingkat suku bunga sebesar JIBOR tiga bulan ditambah margin sebesar 2,45% per tahun.

Pada tanggal 26 Juni 2023, Perusahaan mencairkan fasilitas untuk membiayai akuisisi dan investasi Perusahaan sebesar US\$ 91,5 juta dengan tingkat suku bunga sebesar *term* SOFR tiga bulan ditambah margin sebesar 2,85% per tahun.

Fasilitas pinjaman dengan Mandiri mencakup persyaratan keuangan seperti mempertahankan rasio utang terhadap EBITDA tidak melebihi 350%, *debt service coverage ratio* tidak kurang dari 115%, rasio jaminan tidak kurang dari 110% dan rasio utang terhadap ekuitas tidak melebihi 350%, yang dihitung berdasarkan laporan keuangan konsolidasian setiap kuartal. Selain persyaratan keuangan, sebagai bagian dari persyaratan umum, fasilitas ini mengharuskan Grup untuk menjaga saldo dana minimum sebesar US\$ 60 juta, yang mana persyaratan saldo dana minimum ini telah dihapuskan oleh Mandiri pada tanggal 20 Maret 2024.

Pada tanggal 21 Juni 2024, Perusahaan melunasi seluruhnya fasilitas *Senior Secured Term Loan* dari Mandiri sebesar setara US\$ 149.384 ribu dengan tingkat suku bunga sebesar *term* SOFR tiga bulan ditambah CAS tiga bulan dan margin sebesar 2,85% per tahun untuk USD dan JIBOR tiga bulan ditambah margin sebesar 2,45% per tahun untuk IDR.

iii. Senior Secured Term Loan

On March 21, 2023, the Company and Mandiri signed a credit facility agreement (Senior Secured Term Loan Facility) amounted to US\$ 91.5 million with an interest rate of three-months SOFR term plus margin of 2.85% per annum and Rp 1.4 trillion with an interest rate of three-months JIBOR plus margin of 2.45% per annum with 60 months tenor. The facility was used for funding business development through acquisition and investment of mining properties as well as strengthening the Company's working capital.

On March 30, 2023, the Company disbursed the facility to finance the Company's working capital needs of Rp 1.2 trillion (equivalent to US\$ 78 million) with an interest rate of the three-months JIBOR plus a margin of 2.45% per annum.

On June 26, 2023, the Company disbursed the facility to finance the Company's acquisition and investment of US\$ 91.5 million with an interest rate of the three-months SOFR term plus a margin of 2.85% per annum.

The loan facilities with Mandiri include financial covenants, such as maintaining debt to EBITDA ratio not exceeding 350%, debt service coverage ratio not less than 115%, service coverage not less than 110% and ratio debt to equity not exceeding 350%, computed based on the consolidated financial statements in each quarter. In addition to financial covenants, as part of general covenants, this facility requires the Group to maintain minimum cash balance amounting to US\$ 60 million, whereas this minimum cash balance covenant has been removed by Mandiri on March 20, 2024.

On June 21, 2024, the Company fully repaid the Senior Secured Term Loan facility from Mandiri amounted to the equivalent of US\$ 149,384 thousand with an interest rate of three-months SOFR term plus three-months CAS plus margin of 2.85% per annum for USD and three-months JIBOR plus margin of 2.45% per annum for IDR.

iv. *Term Loan III*

Pada tanggal 28 Juli 2023, Perusahaan, PTKBL, dan Mandiri menandatangani perjanjian fasilitas kredit *Term Loan III* senilai US\$ 48,2 juta dengan tingkat suku bunga sebesar *term* SOFR tiga bulan ditambah margin sebesar 2,85% per tahun untuk USD dan sebesar JIBOR tiga bulan ditambah margin sebesar 2,45% per tahun dengan tenor 60 bulan. Tujuan penggunaan fasilitas ini untuk mendanai pembelian alat berat/mesin yang digunakan untuk ijin bisnis perusahaan.

Pada tanggal 7 Agustus 2023, Perusahaan melakukan pencairan fasilitas sebesar US\$ 0,69 juta, dengan tenor 60 bulan dengan tingkat suku bunga *term* SOFR tiga bulan ditambah margin sebesar 2,85% per tahun. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada 23 Juni 2028.

Pada tanggal 8 Agustus 2023, PTKBL melakukan pencairan fasilitas sebesar Rp 13,2 miliar (setara dengan US\$ 804 ribu), dengan tenor 60 bulan dengan tingkat suku bunga JIBOR tiga bulan ditambah margin sebesar 2,45% per tahun.

Pada tanggal 30 Oktober 2023, Perusahaan melakukan pencairan fasilitas sebesar US\$ 2,28 juta, dengan tenor 60 bulan dengan tingkat suku bunga *term* SOFR tiga bulan ditambah margin sebesar 2,85% per tahun. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada 23 Juni 2028.

Pada tanggal 21 Juni 2024, Perusahaan melunasi seluruhnya fasilitas *Term Loan III* dari Mandiri sebesar US\$ 3.029 ribu dengan tingkat suku bunga sebesar *term* SOFR tiga bulan ditambah CAS tiga bulan dan margin sebesar 2,85% per tahun.

Fasilitas di atas mensyaratkan Grup untuk mempertahankan persyaratan tertentu. Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Grup telah memenuhi persyaratan tersebut.

Pada tanggal 21 Juni 2024, seluruh perjanjian fasilitas kredit antara Grup dan Mandiri telah diakhiri.

Beban bunga pinjaman jangka panjang dari pihak ketiga untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023, serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar US\$ 8.018 ribu dan US\$ 3.836 ribu, serta US\$ 12.746 ribu dan US\$ 3.034 ribu (Catatan 29).

iv. *Term Loan III*

On July 28, 2023, the Company, PTKBL and Mandiri signed a credit facility agreement *Term Loan III* amounted to US\$ 48.2 million with an interest rate of three-months SOFR term plus margin of 2.85% per annum for USD and three-months JIBOR plus margin of 2.45% per annum with 60 months tenor. The purpose of the facility will be used for funding business development through acquisition and plant/machine for the permitted company business.

On August 7, 2023, the Company disbursed the facility amounted to US\$ 0.69 million, with 60 months tenor with an interest rate of of three-months SOFR term plus margin of 2.85% per annum. This facility will mature on June 23, 2028.

On August 8, 2023, the PTKBL disbursed the facility amounted to Rp 13.2 billion (equivalent to US\$ 804 thousand) with 60 months tenor with three-months JIBOR plus margin of 2.45% per annum.

On October 30, 2023, the Company disbursed the facility amounted to US\$ 2.28 million, with 60 months tenor with three-months SOFR plus margin of 2.85% per annum. This facility will mature on June 23, 2028.

On June 21, 2024, the Company fully repaid the *Term Loan III* facility from Mandiri amounted to the equivalent of US\$ 3,029 thousand with an interest rate of three-months SOFR term plus three-months CAS and a margin of 2.85% per annum.

The facility above requires the Group to maintain certain covenants. As of December 31, 2023 and 2022, the Group has complied with these covenants.

On June 21, 2024, all facility agreements between the Group and Mandiri has been terminated.

The interest expenses incurred from long-term loan from third parties for the six-month periods ended on June 30, 2024 and 2023, as well as for the years ended on December 31, 2023 and 2022 amounted to US\$ 8,018 thousand and US\$ 3,836 thousand, as well as US\$ 12,746 thousand and US\$ 3,034 thousand, respectively (Note 29).

Fasilitas pinjaman jangka panjang dijaminan dengan alat berat, peralatan dan kendaraan kepada BCA dengan nilai tercatat sebesar US\$ 111.821 ribu pada tanggal 30 Juni 2024 dan kepada Mandiri dengan nilai tercatat masing-masing sebesar US\$ 122.281 ribu dan US\$ 22.919 ribu pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (Catatan 12).

Long-term loan facilities are collateralized by plant, equipment and vehicles to BCA with carrying value amounted to US\$ 111,821 thousand on June 30, 2024 and to Mandiri with carrying value amounted to US\$ 122,281 thousand and US\$ 22,919 thousand, respectively, on December 31, 2023 and 2022 (Note 12).

b. Liabilitas Jangka Panjang Lainnya

Liabilitas jangka panjang lainnya merupakan provisi biaya reklamasi, penutupan tambang dari CEP, dan biaya-biaya lainnya.

b. Other Long-Term Liabilities

Other long-term liabilities consist of provision for reclamation costs, mine closure from CEP, and other expenses.

23. LIABILITAS SEWA

23. LEASE LIABILITIES

	30 Juni/ June 30, 2024 US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2023 US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2022 US\$ '000	
Analisis jatuh tempo				Maturity analysis
Tahun 1	9.110	12.891	12.652	Year 1
Tahun 2	6.765	7.200	8.374	Year 2
Tahun 3	4.120	5.662	4.007	Year 3
Tahun 4	1.562	3.119	3.183	Year 4
Tahun 5	623	759	1.894	Year 5
Lebih dari 5 tahun	596	1.201	902	Later than 5 years
Jumlah	22.776	30.832	31.012	Total
Beban keuangan ditangguhkan	(3.239)	(4.413)	(4.554)	Deferred interest expense
Jumlah	19.537	26.419	26.458	Total
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	(7.944)	(11.281)	(10.345)	Less current maturities
Liabilitas sewa - bersih - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	11.593	15.138	16.113	Lease liabilities - net of current maturities
Rincian liabilitas sewa berdasarkan pesewa:				By lessor:
Pihak ketiga:				Third parties:
PT Mitsubishi HC Capital and Finance Indonesia (MHCI)	7.214	10.095	11.889	PT Mitsubishi HC Capital and Finance Indonesia (MHCI)
PT Putra Otomona Jaya	2.365	2.693	4.270	PT Putra Otomona Jaya
PT Dokindo Aimas Papua	1.592	1.921	1.985	PT Dokindo Aimas Papua
PT Hexa Finance Indonesia	1.352	1.625	-	PT Hexa Finance Indonesia
PT Chandra Sakti Utama Leasing	1.091	1.308	-	PT Chandra Sakti Utama Leasing
PT Caterpillar Finance Indonesia	818	954	-	PT Caterpillar Finance Indonesia
PT SMFL Leasing Indonesia	751	908	1.080	PT SMFL Leasing Indonesia
PT Buana Jaya Rentama	688	-	-	PT Buana Jaya Rentama
PT Radios Apirja Sorong	613	740	764	PT Radios Apirja Sorong
PT Berca Mandiri Perkasa	556	1.160	-	PT Berca Mandiri Perkasa
PT KDB Tifa Finance Tbk	303	360	-	PT KDB Tifa Finance Tbk
PT Bagong Dekaka Makmur	302	-	-	PT Bagong Dekaka Makmur
PT Gaya Makmur Mobil	299	625	-	PT Gaya Makmur Mobil
PT Gelora Lintas Maharitas	279	-	-	PT Gelora Lintas Maharitas
PT Orix Indonesia Finance	197	1.355	3.675	PT Orix Indonesia Finance
PT Transkon Jaya	177	399	-	PT Transkon Jaya
PT Gatra Kaltim Jaya	163	197	631	PT Gatra Kaltim Jaya
PT Komatsu Astra Finance	160	667	1.681	PT Komatsu Astra Finance
PT Bintang Jasa Tirta	-	797	-	PT Bintang Jasa Tirta
PT Bina Pertiwi	-	169	335	PT Bina Pertiwi
Lainnya (dibawah US\$ 100 ribu)	617	446	148	Others (less than US\$ 100 thousand)
Jumlah	19.537	26.419	26.458	Total

Grup membeli sebagian alat berat operasinya melalui transaksi jual dan sewa balik. Liabilitas sewa ini dijamin dengan aset sewa yang bersangkutan (Catatan 13). Jangka waktu sewa adalah 2 sampai 5 tahun.

The Group purchased some of its heavy equipment through sale and lease back transactions. The lease liabilities are secured by the related leased assets (Note 13). The lease terms are between 2 to 5 years.

Perusahaan

The Company

PT Mitsubishi HC Capital and Finance Indonesia (MHCI)

PT Mitsubishi HC Capital and Finance Indonesia (MHCI)

Pada tanggal 31 Agustus 2017, Perusahaan dan MHCI menandatangani perjanjian Fasilitas Kredit untuk sewa, dimana Perusahaan diberikan fasilitas kredit sewa dengan opsi pembiayaan maksimal dan uang jaminan masing-masing sebesar US\$ 7,5 juta dan US\$ 1.044 ribu. Jangka waktu sewa selama 5 tahun. Tingkat bunga atas fasilitas ini adalah 3% ditambah *term* SOFR tiga bulan. Fasilitas ini telah dibayarkan seluruhnya.

On August 31, 2017, the Company and MHCI entered into a Finance Lease Facility Agreement, whereby the Company was granted a lease facility with maximum financing option and security deposit amounted to US\$ 7.5 million and US\$ 1,044 thousand, respectively. The lease has a term of 5 years. The interest rate on this facility is 3% plus three-months SOFR term. This facility has been fully settled.

Pada tanggal 28 Mei 2018, Perusahaan dan MHCI menandatangani fasilitas kredit untuk sewa dimana Perusahaan diberikan fasilitas kredit sewa sebesar US\$ 3.545 ribu. Perusahaan mencairkan fasilitas sewa pada tanggal 29 Juni 2018. Dengan masa sewa yang berakhir pada tanggal 8 Mei 2023. Tingkat bunga fasilitas adalah 3% ditambah *term* SOFR tiga bulan. Fasilitas telah dilunasi pada tanggal 8 Mei 2023.

On May 28, 2018, the Company and MHCI entered into credit facility for lease which the Company was granted lease facility amounted to US\$ 3,545 thousand. The Company has utilized lease facility on June 29, 2018. This lease facility has been ended on May 8, 2023. The interest rate of credit facility is 3% plus three-months SOFR term. The facility has been fully settled on May 8, 2023.

Pada tanggal 3 Agustus 2018, Perusahaan dan MHCI menandatangani fasilitas kredit untuk sewa di mana Perusahaan diberikan fasilitas kredit sewa sebesar US\$ 2.022 ribu. Perusahaan mencairkan fasilitas sewa pada tanggal 3 Agustus 2018 dengan masa sewa yang berakhir pada tanggal 3 Juli 2023. Tingkat bunga fasilitas adalah 3% ditambah *term* SOFR tiga bulan. Fasilitas telah dilunasi pada tanggal 3 Juli 2023.

On August 3, 2018, the Company and MHCI entered into credit facility for lease which the Company was granted lease facility amounted to US\$ 2,022 thousand. The Company has utilized lease facility on August 3, 2018 where the lease facility has been ended on July 3, 2023. The interest rate of credit facility is 3% plus three-months SOFR term. The facility has been fully settled on July 3, 2023.

Pada tanggal 8 Mei 2019, Perusahaan dan MHCI menandatangani fasilitas kredit untuk sewa dimana Perusahaan diberikan fasilitas kredit sewa sebesar US\$ 5.272 ribu. Perusahaan mencairkan fasilitas sewa pada tanggal 24 Mei 2019. Fasilitas sewa berakhir pada tanggal 25 Mei 2024. Tingkat bunga fasilitas adalah 2,30% ditambah *term* SOFR tiga bulan. Fasilitas pinjaman telah dilunasi pada tanggal 24 Mei 2024. Fasilitas ini tidak diperpanjang.

On May 8, 2019, the Company and MHCI entered into credit facility for lease which the Company was granted lease facility amounted to US\$ 5,272 thousand. The Company has withdrawn lease facility on May 24, 2019. This lease facility is effective until May 25, 2024. The interest rate of credit facility is 2.30% plus three-months SOFR term. The loan facility was fully settled on May 24, 2024. This facility is not being extended.

Pada tanggal 28 Mei 2019, Perusahaan dan MHCI menandatangani fasilitas kredit untuk sewa dimana Perusahaan diberikan fasilitas kredit sewa sebesar US\$ 648 ribu. Perusahaan mencairkan fasilitas sewa pada tanggal 28 Mei 2019 dengan masa sewa yang akan berakhir pada tanggal 28 Mei 2024. Tingkat bunga fasilitas adalah 2,30% ditambah *term* SOFR tiga bulan. Fasilitas pinjaman telah dilunasi pada tanggal 28 Mei 2024. Fasilitas ini tidak diperpanjang.

On May 28, 2019, the Company and MHCI entered into credit facility for lease which the Company was granted lease facility amounted to US\$ 648 thousand. The Company has lease facility on May 28, 2019 where the lease facility will end on May 28, 2024. The interest rate of credit facility is 2.30% plus three-months SOFR term. The loan facility was fully settled on May 28, 2024. This facility is not being extended.

Pada tanggal 19 September 2022, Perusahaan dan MHCI menandatangani fasilitas kredit untuk sewa dimana Perusahaan diberikan fasilitas kredit sewa. Perusahaan mencairkan fasilitas sewa pada tanggal 28 Oktober 2022 sebesar Rp 32,1 miliar (setara dengan US\$ 2 juta) dengan masa sewa yang akan berakhir pada tanggal 28 Oktober 2027. Tingkat bunga fasilitas adalah 9,9% per tahun.

Perusahaan mencairkan fasilitas sewa pada tanggal 3 November 2022 sebesar Rp 18 miliar (setara dengan US\$ 1 juta) dengan masa sewa yang akan berakhir pada tanggal 3 November 2027. Tingkat bunga fasilitas adalah 9,9% per tahun.

Perusahaan mencairkan fasilitas sewa pada tanggal 23 Desember 2022 sebesar Rp 26,7 miliar (setara dengan US\$ 1,7 juta) dengan masa sewa yang akan berakhir pada tanggal 23 Desember 2027. Tingkat bunga fasilitas adalah 9,9% per tahun.

Perusahaan mencairkan fasilitas sewa pada tanggal 30 Januari 2023 sebesar Rp 13,8 miliar (setara dengan US\$ 890 ribu) dengan masa sewa yang akan berakhir pada tanggal 30 Januari 2028. Tingkat bunga fasilitas adalah 9,9% per tahun.

Perusahaan mencairkan fasilitas sewa pada tanggal 16 Februari 2023 sebesar Rp 30 miliar (setara dengan US\$ 1,9 juta) dengan masa sewa yang akan berakhir pada tanggal 16 Februari 2028. Tingkat bunga fasilitas adalah 9,9% per tahun.

Perusahaan mencairkan fasilitas sewa pada tanggal 26 April 2023 sebesar Rp 41,8 miliar (setara dengan US\$ 2,7 juta) dengan masa sewa yang akan berakhir pada tanggal 27 April 2027. Tingkat bunga fasilitas adalah 9,9% per tahun.

PT Orix Indonesia Finance (Orix)

Pada tanggal 12 Juli 2019, Orix memberikan fasilitas sewa kepada Perusahaan sebesar US\$ 10.569 ribu. Pada tanggal 18 Juli 2019, Perusahaan mencairkan fasilitas sewa. Fasilitas berakhir pada tanggal 18 Juli 2024. Tingkat bunga fasilitas adalah 2,30% ditambah LIBOR tiga bulan. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian interim, tidak terdapat perpanjangan atas fasilitas ini.

PT Komatsu Astra Finance (Komatsu)

Pada tanggal 21 Maret 2019, Perusahaan dan Komatsu menandatangani perjanjian fasilitas pembiayaan jangka panjang dengan fasilitas kredit sewa sebesar US\$ 30 juta. Tingkat suku bunga fasilitas ini adalah sebesar 2,10% ditambah LIBOR tiga bulan. Fasilitas ini tidak diperpanjang.

On September 19, 2022, the Company and MHCI entered into credit facility for lease which the Company was granted lease facility. The Company has utilized the lease facility on October 28, 2022 amounted to Rp 32.1 billion (equivalent to US\$ 2 million) where the lease term will end on October 28, 2027. The interest rate of credit facility is 9.9% per annum.

The Company utilized the lease facility on November 3, 2022 amounted to Rp 18 billion (equivalent to US\$ 1 million) with the lease term will end on November 3, 2027. The facility's interest rate is 9.9% per annum.

The Company utilized the lease facility on December 23, 2022 amounted to Rp 26.7 billion (equivalent to US\$ 1.7 million) with the lease term will end on December 23, 2027. The facility's interest rate is 9.9% per annum.

The Company utilized the lease facility on January 30, 2023 amounted to Rp 13.8 billion (equivalent to US\$ 890 thousand) with the lease term will end on January 30, 2028. The facility's interest rate is 9.9% per annum.

The Company utilized the lease facility on February 16, 2023 amounted to Rp 30 billion (equivalent to US\$ 1.9 million) with the lease term will end on February 16, 2028. The facility's interest rate is 9.9% per annum.

The Company utilized the lease facility on April 26, 2023 amounted to Rp 41.8 billion (equivalent to US\$ 2.7 million) with the lease term will end on April 27, 2027. The facility's interest rate is 9.9% per annum.

PT Orix Indonesia Finance (Orix)

On July 12, 2019, Orix provided lease facilities to the Company amounted to US\$ 10,569 thousand. On July 18, 2019, the Company has withdrawn this facility. The facility is available until July 18, 2024. The interest rate on this facility is 2.30% plus three-months LIBOR. As of the issuance date of the interim consolidated financial statements, there is no extension to this facility.

PT Komatsu Astra Finance (Komatsu)

On March 21, 2019, the Company and Komatsu entered into a long-term financing facility agreement with a lease facility of US\$ 30 million. The interest rate for this facility is 2.10% plus three-months LIBOR. This facility is not being extended.

Pada Desember 2019, Komatsu dan Perusahaan menandatangani beberapa perjanjian fasilitas sewa jangka panjang dengan total fasilitas kredit sewa sebesar US\$ 5.068 ribu. Tingkat suku bunga fasilitas ini adalah sebesar 2,10% ditambah LIBOR tiga bulan dengan jangka waktu sewa selama 5 tahun.

Pada Juni 2023, Komatsu mengubah semua bunga acuan pinjaman USD dari LIBOR ditambah margin menjadi *term* SOFR ditambah margin dan CAS. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian interim, tidak terdapat perpanjangan atas fasilitas ini.

PT KDB TIFA Finance Tbk (KDB TIFA)

Pada tanggal 7 November 2023, KDB TIFA dan Perusahaan menandatangani perjanjian fasilitas pembiayaan jangka panjang dengan fasilitas kredit sewa sebesar Rp 5,65 miliar (setara dengan US\$ 366 ribu). Tingkat suku bunga fasilitas ini adalah sebesar 11% per tahun. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada 7 November 2027.

PT Mandiri Tunas Finance (MTF)

Pada tanggal 30 September 2024, Perusahaan dan PT Mandiri Tunas Finance (MTF) menandatangani perjanjian fasilitas kredit untuk sewa sebesar Rp 13,23 miliar (setara dengan US\$ 874 ribu). Tingkat bunga dari fasilitas ini adalah 7,99% per tahun. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 23 September 2027.

Pada tanggal 31 Oktober 2024, Perusahaan dan MTF menandatangani perjanjian fasilitas kredit untuk sewa sebesar Rp 28,92 miliar (setara dengan US\$ 1.830 ribu). Tingkat bunga dari fasilitas ini adalah 7,99% per tahun. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 23 Oktober 2028.

PTKBL

PT Mitsubishi HC Capital and Finance Indonesia (MHCI)

Pada tanggal 13 Mei 2019, PTKBL, anak Perusahaan, dan MHCI menandatangani fasilitas kredit untuk sewa dimana Perusahaan mendapatkan fasilitas kredit sewa sebesar US\$ 3.768 ribu. PTKBL mencairkan fasilitas sewa tersebut pada tanggal 24 Mei 2019. Fasilitas sewa berlaku sampai dengan tanggal 25 Mei 2024. Tingkat bunga fasilitas adalah 2,30% ditambah *term* SOFR tiga bulan. Fasilitas ini tidak diperpanjang.

In December 2019, Komatsu and the Company signed several long-term lease facility agreements totaling to US\$ 5,068 thousand. The interest rate on this facility is 2.10% plus three months LIBOR with the long-term lease term of 5 years.

In June 2023, Komatsu changes all USD loan benchmark interest from LIBOR plus margin to term SOFR plus margin and CAS. As of the issuance date of the interim consolidated financial statements, there is no extension to this facility.

PT KDB TIFA Finance Tbk (KDB TIFA)

On November 7, 2023, KDB TIFA and the Company entered into a long-term financing facility agreement with a lease facility of Rp 5.65 billion (equivalent to US\$ 366 thousand). The interest rate for this facility is 11% per annum. This facility will mature on November 7, 2027.

PT Mandiri Tunas Finance (MTF)

On September 30, 2024, the Company and PT Mandiri Tunas Finance (MTF) signed a credit facility agreement for leasing amounted to Rp 13.23 billion (equivalent to US\$ 874 thousand). The interest rate for this facility is 7.99% per annum. This facility will mature on September 23, 2027.

On October 31, 2024, the Company and MTF signed a credit facility agreement for leasing amounted to Rp 28.92 billion (equivalent to US\$ 1,830 thousand). The interest rate for this facility is 7.99% per annum. This facility will mature on October 23, 2028.

PTKBL

PT Mitsubishi HC Capital and Finance Indonesia (MHCI)

On May 13, 2019, PTKBL, a subsidiary, and MHCI entered into credit facility for lease which the Company was granted lease facility amounted to US\$ 3,768 thousand. PTKBL has withdrawn lease facility on May 24, 2019. This lease facility is effective until May 25, 2024. The interest rate of credit facility is 2.30% plus three months SOFR term. This facility is not being extended.

Pada tanggal 12 Juli 2019, PTKBL dan MHCI menandatangani fasilitas kredit untuk sewa di mana PTKBL diberikan fasilitas kredit sewa sebesar US\$ 177 ribu. PTKBL mencairkan fasilitas sewa pada 12 Juli 2024. Tingkat bunga fasilitas adalah 2,30% ditambah *term* SOFR tiga bulan. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian interim, tidak terdapat perpanjangan atas fasilitas ini.

On July 12, 2019, PTKBL and MHCI entered credit facility for lease which PTKBL was granted lease facility amounted to US\$ 177 thousand. PTKBL has utilized lease facility on July 12, 2024. The interest rate of credit facility is 2.30% plus three-months SOFR term. As of the issuance date of the interim consolidated financial statements, there is no extension to this facility.

Pada tanggal 7 November 2019, PTKBL dan MHCI menandatangani fasilitas kredit untuk sewa di mana PTKBL diberikan fasilitas kredit sewa sebesar US\$ 3.389 ribu. PTKBL mencairkan fasilitas sewa pada tanggal 7 November 2019. Fasilitas sewa berakhir pada tanggal 7 November 2024. Tingkat bunga fasilitas adalah 2,30% ditambah *term* SOFR tiga bulan.

On November 7, 2019, PTKBL and MHCI entered into credit facility for lease which PTKBL was granted lease facility amounted to US\$ 3,389 thousand. PTKBL has withdrawn lease facility on November 7, 2019. This lease facility is effective until November 7, 2024. The facility's interest rate is 2.30% plus three months SOFR term.

Pada tanggal 9 Desember 2019, PTKBL dan MHCI menandatangani fasilitas kredit untuk sewa di mana PTKBL diberikan fasilitas kredit sewa sebesar US\$ 1.653 ribu. PTKBL mencairkan fasilitas sewa pada tanggal 9 Desember 2019 dengan masa sewa yang akan berakhir pada tanggal 9 Desember 2024. Tingkat bunga fasilitas adalah 2,30% ditambah *term* SOFR tiga bulan.

On December 9, 2019, PTKBL and MHCI entered into credit facility for lease which PTKBL was granted lease facility amounted to US\$ 1,653 thousand. PTKBL has utilized the lease facility on December 9, 2019 where the lease facility will end on December 9, 2024. The facility's interest rate is 2.30% plus three-months SOFR term.

Pada tanggal 3 Juli 2023, PTKBL dan MHCI menandatangani amendemen fasilitas kredit tersebut atas tingkat bunga yang berlaku adalah tarif per tahun berdasarkan 3 bulan *term* SOFR ditambah tarif *Spread Adjustment* ditambah 2,30%.

On July 3, 2023, PTKBL and MHCI entered into amendment of the credit facility for the interest rate is rate per annum based on 3 months term SOFR plus spread adjustment rate plus 2.30%.

PT SMFL Leasing Indonesia (SMFL)

PT SMFL Leasing Indonesia (SMFL)

Pada tanggal 24 Juni 2022, PTKBL dan SMFL menandatangani fasilitas kredit untuk sewa di mana PTKBL mendapatkan fasilitas kredit sewa sebesar Rp 18 miliar (setara dengan US\$ 1,1 juta). PTKBL mencairkan fasilitas sewa tersebut sebesar Rp 6,5 miliar (setara dengan US\$ 418 ribu) pada tanggal 26 Juli 2022 dengan masa sewa yang akan berakhir pada 26 Juli 2027. Tingkat bunga fasilitas adalah 7,75% per tahun.

On June 24, 2022, PTKBL and SMFL entered credit facility for lease which PTKBL was granted lease facility amounted to Rp 18 billion (equivalent to US\$ 1.1 million). PTKBL has utilized the lease facility amounted to Rp 6.5 billion (equivalent to US\$ 418 thousand) on July 26, 2022 where the lease facility will end on July 26, 2027. The facility's interest rate is 7.75% per annum.

PTKBL mencairkan fasilitas sewa sebesar Rp 6,8 miliar (setara dengan US\$ 437 ribu) pada tanggal 30 September 2022 dengan masa sewa yang akan berakhir pada tanggal 30 September 2027. Tingkat suku bunga fasilitas adalah 8,75% per tahun.

PTKBL has utilized the lease facility amounted to Rp 6.8 billion (equivalent to US\$ 437 thousand) on September 30, 2022 where the lease facility will end on September 30, 2027. The facility's interest rate is 8.75% per annum.

PTKBL mencairkan fasilitas sewa sebesar Rp 4,5 miliar (setara dengan US\$ 290 ribu) pada tanggal 28 Oktober 2022 dengan masa sewa yang akan berakhir pada tanggal 28 Oktober 2027. Tingkat suku bunga fasilitas adalah 8,75% per tahun.

PTKBL has utilized the lease facility amounted to Rp 4.5 billion (equivalent to US\$ 290 thousand) on October 28, 2022 where the lease facility will end on October 28, 2027. The facility's interest rate is 8.75% per annum.

PT Chanda Sakti Utama Leasing (CSUL)

Pada tanggal 21 Oktober 2022, PTKBL dan CSUL menandatangani fasilitas kredit untuk sewa dimana PTKBL mendapatkan fasilitas kredit sewa sebesar US\$ 2 juta. Fasilitas sewa berlaku berakhir pada tanggal 21 September 2026. Tingkat bunga fasilitas adalah 7,19% per tahun.

Pada tanggal 26 Oktober 2022, PTKBL mencairkan fasilitas kredit *sales* dan *leaseback* sebesar US\$ 1,06 juta dengan masa sewa yang akan berakhir pada tanggal 26 September 2026. Tingkat bunga fasilitas adalah *term* SOFR tiga bulan ditambah margin sebesar 3,20% per tahun.

PTKBL mencairkan fasilitas sewa sebesar US\$ 0,75 juta pada tanggal 4 November 2022 dengan masa sewa yang akan berakhir pada 4 Oktober 2026. Tingkat bunga fasilitas adalah *term* SOFR tiga bulan ditambah margin sebesar 3,20% per tahun.

PT Caterpillar Finance Indonesia (CFI)

Pada tanggal 5 September 2023, PTKBL dan CFI menandatangani fasilitas kredit untuk sewa dimana PTKBL mendapatkan fasilitas kredit sewa sebesar Rp 59 miliar (setara dengan US\$ 3,8 juta). Fasilitas sewa berakhir pada tanggal 31 Mei 2024. Tingkat bunga fasilitas adalah 11,5% per tahun. Fasilitas ini tidak diperpanjang.

Pada tanggal 14 September 2023, PTKBL mencairkan fasilitas kredit *sales* dan *leaseback* sebesar Rp 15,3 miliar (setara dengan US\$ 985 ribu) dengan masa sewa yang akan berakhir pada tanggal 14 September 2028. Tingkat suku bunga fasilitas adalah 11,5% per tahun.

PT Hexa Finance Indonesia (HFI)

Pada tanggal 21 Agustus 2023, PTKBL dan HFI menandatangani fasilitas kredit untuk sewa dimana PTKBL mendapatkan fasilitas kredit sewa sebesar Rp 34,8 miliar (setara dengan US\$ 2,2 juta). Fasilitas sewa berakhir pada tanggal 3 Januari 2024. Tingkat bunga fasilitas adalah 10% per tahun. Fasilitas ini tidak diperpanjang.

Pada tanggal 3 Oktober 2023, PTKBL mencairkan fasilitas kredit *direct lease* sebesar Rp 5,7 miliar (setara dengan US\$ 367 ribu) dengan masa sewa yang akan berakhir pada 3 Oktober 2027. Tingkat suku bunga fasilitas adalah 10% per tahun.

Pada tanggal 20 Oktober 2023, PTKBL mencairkan fasilitas kredit *direct lease* sebesar Rp 5,7 miliar (setara dengan US\$ 367 ribu) dengan masa sewa yang akan berakhir pada 20 Oktober 2027. Tingkat suku bunga fasilitas adalah 10% per tahun.

PT Chandra Sakti Utama Leasing (CSUL)

On October 21, 2022, PTKBL and CSUL entered into credit facility for lease which PTKBL was granted lease facility amounted to US\$ 2 million. This lease facility is effective until September 21, 2026. The interest rate of credit facility is 7.19% per annum.

On October 26, 2022, PTKBL has utilized the lease facility of sales and leaseback credit facility amounted to US\$ 1.06 million where the lease facility will end on September 26, 2026. The facility's interest rate is three-months SOFR term plus margin of 3.20% per annum.

PTKBL has utilized the lease facility amounted to US\$ 0.75 million on November 4, 2022 where the lease facility will end on October 4, 2026. The facility's interest rate is three-months SOFR term plus margin of 3.20% per annum.

PT Caterpillar Finance Indonesia (CFI)

On September 5, 2023, PTKBL and CFI entered into credit facility for lease which PTKBL was granted lease facility amounted to Rp 59 billion (equivalent to US\$ 3.8 million). This lease facility has been ended on May 31, 2024. The facility's interest rate is 11.5% per annum. This facility is not being extended.

On September 14, 2023, PTKBL has withdrawn lease facility sales and leaseback amounted to Rp 15.3 billion (equivalent to US\$ 985 thousand) where the lease facility will end on September 14, 2028. The facility's interest rate is 11.5% per annum.

PT Hexa Finance Indonesia (HFI)

On August 21, 2023, PTKBL and HFI entered into credit facility for lease which PTKBL was granted lease facility amounted to Rp 34.8 billion (equivalent to US\$ 2.2 million). This lease facility ended on January 3, 2024. The facility's interest rate is 10% per annum. This facility is not being extended.

On October 3, 2023, PTKBL has utilized the direct lease amounted to Rp 5.7 billion (equivalent to US\$ 367 thousand) where the lease facility will end on October 3, 2027. The facility's interest rate is 10% per annum.

On October 20, 2023, PTKBL has utilized the direct lease amounted to Rp 5.7 billion (equivalent to US\$ 367 thousand) where the lease facility will end on October 20, 2027. The facility's interest rate is 10% per annum.

Pada tanggal 23 Oktober 2023, PTKBL mencairkan fasilitas kredit *direct lease* sebesar Rp 2,9 miliar (setara dengan US\$ 187 ribu) dengan masa sewa yang akan berakhir pada 23 Oktober 2027. Tingkat suku bunga fasilitas adalah 10% per tahun.

On October 23, 2023, PTKBL has utilized the direct lease amounted to Rp 2.9 billion (equivalent to US\$ 187 thousand) where the lease facility will end on October 23, 2027. The facility's interest rate is 10% per annum.

Pada tanggal 1 November 2023, PTKBL mencairkan fasilitas kredit *direct lease* sebesar Rp 2,9 miliar (setara dengan US\$ 187 ribu) dengan masa sewa yang akan berakhir pada 1 November 2027. Tingkat suku bunga fasilitas adalah 10% per tahun.

On November 1, 2023, PTKBL has utilized the direct lease amounted to Rp 2.9 billion (equivalent to US\$ 187 thousand) where the lease facility will end on November 1, 2027. The facility's interest rate is 10% per annum.

Pada tanggal 30 November 2023, PTKBL mencairkan fasilitas kredit *direct lease* sebesar Rp 8,6 miliar (setara dengan US\$ 553 ribu) dengan masa sewa yang akan berakhir pada 30 November 2027. Tingkat suku bunga fasilitas adalah 10% per tahun.

On November 30, 2023, PTKBL has utilized the direct lease amounted to Rp 8.6 billion (equivalent to US\$ 553 thousand) where the lease facility will end on November 30, 2027. The facility's interest rate is 10% per annum.

Syarat dan ketentuan atas perjanjian sewa adalah sebagai berikut:

Significant general terms and conditions of the leases are as follows:

- i. Perusahaan dan PTKBL tidak diperbolehkan untuk menjual, meminjamkan, melakukan sewa kembali, atau melepaskan atau, menghentikan pengendalian langsung atas, aset hak-guna; dan
- ii. Perusahaan dan PTKBL tidak diperbolehkan menggunakan aset hak-guna sebagai jaminan, termasuk jaminan deposito, atau garansi kepada *lessor* lainnya.

- i. The Company and PTKBL is prohibited to sell, lend, sublease, or otherwise dispose of or, cease to exercise direct control over, right-of-use assets; and
- ii. The Company and PTKBL is prohibited to provide securities/collateral, including security deposit, or guarantee to other lessors over right-of-use assets.

Rekonsiliasi arus kas aktivitas pendanaan yang timbul dari liabilitas sewa adalah:

Reconciliation of cashflows from financing activities arising from lease liabilities are as follows:

	1 Januari/ January 1, 2024 US\$ '000	Arus kas masuk/ Cash inflow US\$ '000	Arus kas keluar/ Cash outflow US\$ '000	Perubahan nonkas/ Noncash changes US\$ '000	30 Juni/ June 30, 2024 US\$ '000	
Liabilitas sewa	26.419	-	(6.930)	48	19.537	Lease liabilities
	1 Januari/ January 1, 2023 US\$ '000	Arus kas masuk/ Cash inflow US\$ '000	Arus kas keluar/ Cash outflow US\$ '000	Perubahan nonkas/ Noncash changes US\$ '000	30 Juni/ June 30, 2023 (Tidak diaudit)/ (Unaudited) US\$ '000	
Liabilitas sewa	26.458	7.516	(4.375)	(75)	29.524	Lease liabilities
	1 Januari/ January 1, 2023 US\$ '000	Arus kas masuk/ Cash inflow US\$ '000	Arus kas keluar/ Cash outflow US\$ '000	Perubahan nonkas/ Noncash changes US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2023 US\$ '000	
Liabilitas sewa	26.458	8.693	(8.853)	121	26.419	Lease liabilities
	1 Januari/ January 1, 2022 US\$ '000	Arus kas masuk/ Cash inflow US\$ '000	Arus kas keluar/ Cash outflow US\$ '000	Perubahan nonkas/ Noncash changes US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2022 US\$ '000	
Liabilitas sewa	32.787	7.839	(18.839)	4.671	26.458	Lease liabilities

24. MODAL SAHAM DAN CADANGAN UMUM

Modal Saham

Komposisi pemegang saham Perusahaan pada tanggal 30 Juni 2024, 31 Desember 2023 dan 2022 berdasarkan daftar pemegang saham dari PT Datindo Entrycom, Biro Administrasi Efek Perusahaan, adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	30 Juni/ June 30, 2024			Name of Stockholders
	Jumlah saham/ <i>Number of shares</i>	Persentase kepemilikan/ <i>Percentage of ownership</i> %	Jumlah modal disetor/ <i>Total paid-up capital</i> US\$ '000	
PT Kreasi Jasa Persada	418.762.400	41,52	13.883	PT Kreasi Jasa Persada
PT Sentosa Bersama Mitra	190.149.759	18,85	6.304	PT Sentosa Bersama Mitra
PT Caraka Reksa Optima	184.500.598	18,29	6.116	PT Caraka Reksa Optima
Kartika Hendrawan (Direktur)	88.800	0,01	3	Kartika Hendrawan (Director)
Michael (Presiden Direktur)	60.000	0,01	2	Michael (President Director)
Masyarakat (masing-masing dibawah 5%)	215.043.443	21,32	7.130	Public (each below 5%)
Jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh	<u>1.008.605.000</u>	<u>100,00</u>	<u>33.438</u>	Number of shares issued and fully paid
Nama Pemegang Saham	31 Desember/ December 31, 2023			Name of Stockholders
	Jumlah saham/ <i>Number of shares</i>	Persentase kepemilikan/ <i>Percentage of ownership</i> %	Jumlah modal disetor/ <i>Total paid-up capital</i> US\$ '000	
PT Caraka Reksa Optima	694.964.098	68,90	23.040	PT Caraka Reksa Optima
PT Sentosa Bersama Mitra	190.149.759	18,85	6.304	PT Sentosa Bersama Mitra
Masyarakat (masing-masing dibawah 5%)	106.550.643	12,25	2.061	Public (each below 5%)
Jumlah saham beredar	991.664.500	100,00	31.405	Total shares outstanding
Saham treasuri	16.940.500	-	2.033	Treasury shares
Jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh	<u>1.008.605.000</u>	<u>100,00</u>	<u>33.438</u>	Number of shares issued and fully paid
Nama Pemegang Saham	31 Desember/ December 31, 2022			Name of Stockholders
	Jumlah saham/ <i>Number of shares</i>	Persentase kepemilikan/ <i>Percentage of ownership</i> %	Jumlah modal disetor/ <i>Total paid-up capital</i> US\$ '000	
Bank Mandiri QQ PT Caraka Reksa Optima	905.705.657	89,80	30.027	Bank Mandiri QQ PT Caraka Reksa Optima
Masyarakat (masing-masing dibawah 5%)	85.958.843	10,20	1.378	Public (each below 5%)
Jumlah saham beredar	991.664.500	100,00	31.405	Total shares outstanding
Saham treasuri	16.940.500	-	2.033	Treasury shares
Jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh	<u>1.008.605.000</u>	<u>100,00</u>	<u>33.438</u>	Number of shares issued and fully paid

24. CAPITAL STOCK AND GENERAL RESERVE

Capital Stock

The composition of the Company's stockholders as of June 30, 2024, December 31, 2023 and 2022 based on the list of stockholders provided by PT Datindo Entrycom, the Company's Bureau of Securities Administration is as follows:

Pada tanggal 18 Februari 2022, PT Indika Energy Tbk (IE) dan PT Caraka Reksa Optima (CARA) telah menandatangani suatu perjanjian jual beli saham bersyarat ("PPJB") sehubungan dengan penjualan seluruh saham milik IE di Perusahaan dengan jumlah keseluruhan sebesar 704.014.200 lembar saham dan efektif pada tanggal 25 Februari 2022. Pada tanggal 28 Juli 2022, PPJB tersebut telah diselesaikan.

Pada tanggal 7 November 2023, CARA, pemegang saham Perusahaan, dan PT Kreasi Jasa Persada (KJP), entitas anak langsung yang dikendalikan dan dimiliki sebesar 99,98% oleh PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN) menandatangani PPJB. Nilai saham milik CARA yang telah dibeli oleh KJP berdasarkan PPJB sebanyak 342.925.700 lembar saham (mewakili 34% dari keseluruhan modal disetor dan ditempatkan Grup). Transaksi ini telah diselesaikan pada tanggal 16 Februari 2024.

Tambahan Modal Disetor

Perusahaan memiliki tambahan modal disetor dari selisih antara jumlah pembayaran dengan jumlah tercatat asset bersih PTKPI, PTPRI dan PTPSB dalam ekuitas dan disajikan dalam tambahan modal disetor.

Perusahaan memiliki tambahan modal disetor dari selisih antara pengalihan saham hasil *buyback* (saham treasury) dengan jumlah yang tercatat.

Saham Treasury

Pada tanggal 10 Juni 2020, melalui Surat Keterbukaan Informasi kepada Pemegang Saham, Perusahaan mengumumkan akan melakukan pembelian kembali saham Perusahaan (*buyback*).

Dana pembelian kembali saham sebesar US\$ 2.033 ribu (setara dengan Rp 30.000.000 ribu) (tiga puluh miliar Rupiah), dengan asumsi nilai tukar Dolar Amerika Serikat ke Rupiah adalah Rp 15.000 (lima belas ribu Rupiah), yang berasal dari kas internal Perseroan, tidak termasuk biaya transaksi pembelian kembali saham, dan komisi broker, serta biaya lain berkaitan dengan pembelian kembali saham.

Selama periode dari tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan 4 Juni 2024, Perusahaan melakukan pengalihan saham hasil *buyback* (saham treasury) sebanyak 16.940.500 saham kepada masyarakat untuk mendukung likuiditas Perusahaan. Keuntungan dari jumlah pengalihan saham hasil *buyback* disajikan dalam ekuitas sebagai tambahan modal di setor.

On February 18, 2022, PT Indika Energy Tbk (IE) and PT Caraka Reksa Optima (CARA) have signed a conditional share purchase agreement ("CSPA") in connection with the sale of all shares owned by IE in the Company with total of 704,014,200 shares and the effective date is February 25, 2022. On July 28, 2022, the CSPA has been completed.

On November 7, 2023, CARA, the shareholder of the Company, and PT Kreasi Jasa Persada (KJP), direct subsidiary controlled and owned 99.98% by PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN) signed a CSPA. The number of shares owned by CARA which has been purchased by KJP based on CSPA amounted to 342,925,700 shares (representing 34% from the total paid up and issued capital of the Group). This transaction has been completed on February 16, 2024.

Additional Paid-in Capital

The Company has additional paid-in capital from the difference between the amount of consideration paid and the carrying amount of net assets of PTKPI, PTPRI and PTPSB in equity and disclosed in additional paid-in capital.

The Company has additional paid-in-capital from the difference between transfer of shares resulting from a buyback (treasury shares) and the carrying amount.

Treasury Shares

On June 10, 2020, through a Letter of Information Disclosure to Shareholders, the Company announced that it would repurchase the Company's shares (buyback).

Planned buyback funds amounted US\$ 2,033 thousand (equivalent to Rp 30,000,000 thousand) (thirty billion Rupiah), assuming the exchange rate of the United States Dollar to Rupiah is Rp 15,000 (fifteen thousand Rupiah), are from the Company's internal cash, excluding transaction costs for share repurchases, and broker commissions, as well as other costs related to share buybacks.

During the period from May 15, 2024 to June 4, 2024, the Company transferred 16,940,500 shares resulting from the buyback (treasury shares), to the public to support the Company's liquidity. The gains from the transfer of shares resulting from a buyback are presented in equity as additional paid-in capital.

Jumlah saham treasury pada tanggal 30 Juni 2024 adalah Nihil dan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar 16.940.500 lembar saham (setara dengan US\$ 2.033 ribu).

The total amount of treasury shares as of June 30, 2024 is Nil and as of December 31, 2023 and 2022 were 16,940,500 thousand shares (equivalent to US\$ 2,033 thousand).

Dividen

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 15 Mei 2023, pemegang saham menyetujui pembagian dividen tunai final untuk tahun buku 2022 sebesar US\$ 76 juta atau US\$ 0,07664 per lembar saham. Dividen kas dibayar pada tanggal 30 Mei 2023.

Dividends

Based on the General Meeting of Shareholders dated May 15, 2023, the Company's stockholders approved the distribution of final cash dividends for financial year 2022 amounted to US\$ 76 million or US\$ 0.07664 per share. The cash dividends were paid on May 30, 2023.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 29 April 2024, pemegang saham menyetujui pembagian dividen tunai final untuk tahun buku 2023 sebesar US\$ 3 juta atau US\$ 0,00308 per lembar saham. Dividen kas dibayar pada tanggal 30 Mei 2024.

Based on the General Meeting of Shareholders dated April 29, 2024, the Company's stockholders approved the distribution of final cash dividends for financial year 2023 amounted to US\$ 3 million or US\$ 0.00308 per share. The cash dividends were paid on May 30, 2024.

Pada tanggal 30 Juni 2024, 31 Desember 2023 dan 2022, utang dividen kas masing-masing sebesar US\$ 957 ribu, US\$ 928 ribu and US\$ 287 ribu.

As of June 30, 2024, December 31, 2023 and 2022, cash dividends payable amounted to US\$ 957 thousand, US\$ 928 thousand and US\$ 287 thousand, respectively.

Cadangan Umum

Perusahaan membentuk cadangan umum sejumlah Rp 10,26 miliar (setara dengan US\$ 1.475 ribu).

General Reserve

The Company established a general reserve amounted to Rp 10.26 billion (equivalent to US\$ 1,475 thousand).

25. PENDAPATAN

Pendapatan Grup berdasarkan waktu pengakuan pendapatan adalah sebagai berikut:

25. REVENUES

The Group's revenue by timing of revenue recognition is as follows:

	2024 (Enam bulan)/ (Six-month)	2023 (Enam bulan)/ (Six-month) (Tidak diaudit/ (Unaudited)	2023 (Satu tahun)/ (One year)	2022 (Satu tahun)/ (One year)	
	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	
<u>Pada waktu tertentu</u>					<u>At point in time</u>
Penjualan batu bara	25.956	-	7.678	-	Sale of coal
<u>Sepanjang waktu</u>					<u>Overtime</u>
Konstruksi dan rekayasa	141.241	71.908	162.862	86.707	Construction and engineering
Penambangan	130.572	179.239	364.147	340.036	Mining
Jasa	19.021	21.664	40.357	46.841	Services
Lain-lain	1.234	1.214	2.573	2.733	Others
Jumlah	<u>318.024</u>	<u>274.025</u>	<u>577.617</u>	<u>476.317</u>	Total

Rincian atas pendapatan dari pihak berelasi diungkapkan pada Catatan 35.

The details of the revenue from related parties are disclosed in Note 35.

PT PETROSEA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2024 DAN 2023 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023 DAN 2022 – Lanjutan

PT PETROSEA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED
JUNE 30, 2024 AND 2023 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2023 AND 2022 - Continued

Rincian pelanggan dengan transaksi melebihi 10% dari jumlah nilai pendapatan konsolidasian:

Details of customers having transactions of more than 10% of total consolidated revenues:

	2024	2023	2023	2022	
	(Enam bulan)/ (Six-month) US\$ '000	(Enam bulan)/ (Six-month) (Tidak diaudit)/ (Unaudited) US\$ '000	(Satu tahun)/ (One year) US\$ '000	(Satu tahun)/ (One year) US\$ '000	
PT Freeport Indonesia	76.223	73.815	77.156	84.272	PT Freeport Indonesia
PT Kideco Jaya Agung	55.790	76.201	158.147	178.720**)	PT Kideco Jaya Agung
Fluor Petrosea Joint Operation *)	36.028	27.687	64.524	29.687	Fluor Petrosea Joint Operation *)
BP Berau Ltd	34.211	3.069	5.229	8.154	BP Berau Ltd
PT Hardaya Mining Energy	30.519	52.195	101.991	74.966	PT Hardaya Mining Energy
PT Kartika Selabumi Mining	24.727	27.798	57.431	42.587	PT Kartika Selabumi Mining
Jumlah	257.498	260.765	464.478	418.386	Total

*) Merupakan pihak berelasi./ *Included as a related party.*

***) Pendapatan PT Kideco Jaya Agung untuk periode dari tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 28 Juli 2022 sebesar US\$ 98.052 ribu merupakan transaksi pihak berelasi dan untuk periode 29 Juli 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar US\$ 80.668 ribu merupakan transaksi kepada pihak ketiga sehubungan dengan perubahan pengendali Perusahaan seperti yang diungkapkan pada Catatan 35./ *Revenue from PT Kideco Jaya Agung for the period from January 1, 2022 up to July 28, 2022 amounted to US\$ 98,052 thousand were related party transactions and for the period July 29, 2022 up to December 31, 2022 amounted to US\$ 80,668 thousand were third party transactions in accordance with the change change of controlling of the Company as disclosed in Note 35.*

Jumlah keseluruhan harga transaksi yang dialokasikan untuk kewajiban pelaksanaan yang tidak dipenuhi (atau tidak dipenuhi sebagian) pada akhir tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 serta 31 Desember 2023 dan 2022 dijelaskan dibawah ini:

The aggregate amounts of the transaction price allocated to performance obligations that are unsatisfied (or partially unsatisfied) as at June 30, 2024 and 2023 as well as December 31, 2023 and 2022 are set out below:

	2024	2023	2023	2022	
	(Enam bulan)/ (Six-month) US\$ '000	(Enam bulan)/ (Six-month) (Tidak diaudit)/ (Unaudited) US\$ '000	(Satu tahun)/ (One year) US\$ '000	(Satu tahun)/ (One year) US\$ '000	
Penambangan	2.176.676	1.414.422	2.289.452	1.296.697	Mining
Konstruksi dan rekayasa	504.631	291.922	296.521	421.540	Construction and engineering
Jasa	10.288	11.248	12.729	14.319	Services
Jumlah	2.691.595	1.717.592	2.598.702	1.732.556	Total

Manajemen mengekspektasi bahwa US\$ 519.079 ribu akan diakui sebagai pendapatan untuk tahun 2024.

Management expects that US\$ 519,079 thousand will be recognized as revenue for the year 2024.

26. BEBAN USAHA LANGSUNG

	2024 (Enam bulan)/ (Six-month) US\$ '000	2023 (Enam bulan)/ (Six-month) (Tidak diaudit)/ (Unaudited) US\$ '000	2023 (Satu tahun)/ (One year) US\$ '000	2022 (Satu tahun)/ (One year) US\$ '000	
Subkontraktor	83.054	55.305	114.188	70.725	Subcontractors
Gaji, upah dan biaya pegawai	59.576	57.188	116.055	101.456	Salaries, wages and related costs
Operasi alat berat dan peralatan	58.154	56.176	125.400	98.406	Operations of plant and equipment
Penyusutan (Catatan 12 dan 13)	26.606	29.683	62.608	59.844	Depreciation (Notes 12 and 13)
Material	26.352	21.722	45.431	26.337	Materials
Sewa alat berat, kendaraan dan lain-lain	11.623	7.355	19.836	16.616	Rental of heavy equipment, vehicle and others
Sistem informasi manajemen	5.424	1.911	4.593	3.941	Management information system
Amortisasi (Catatan 16)	5.085	1.695	7.070	3.110	Amortization (Note 16)
Beban usaha langsung lain	1.478	1.382	329	388	Other direct costs
Jumlah	<u>277.352</u>	<u>232.417</u>	<u>495.510</u>	<u>380.823</u>	Total

Tidak terdapat rincian pemasok yang pembeliannya melebihi 10% dari jumlah pendapatan.

There is no detail of vendors which purchases represents more than 10% of the total revenue.

27. BEBAN PENJUALAN

Beban penjualan merupakan beban atas penjualan batubara yang diperoleh oleh entitas anak, PTCEP. Beban penjualan untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 sebesar US\$ 10.046 ribu dan Nihil serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar US\$ 3.313 ribu dan Nihil.

27. SELLING EXPENSES

Selling expenses is selling expense related to coal produced by subsidiary, PTCEP. The selling expense for the six-month periods ended on June 30, 2024 and 2023 amounted to US\$ 10,046 thousand and Nil as well as for the years ended on December 31, 2023 and 2022 amounted to US\$ 3,313 thousand and Nil.

28. BEBAN ADMINISTRASI

	2024 (Enam bulan)/ (Six-month) US\$ '000	2023 (Enam bulan)/ (Six-month) (Tidak diaudit)/ (Unaudited) US\$ '000	2023 (Satu tahun)/ (One year) US\$ '000	2022 (Satu tahun)/ (One year) US\$ '000	
Gaji dan upah	10.976	13.580	28.037	20.571	Salaries and wages
Sistem informasi manajemen	1.535	2.515	2.902	2.631	Management information system
Amortisasi (Catatan 16)	1.184	1.036	2.241	1.360	Amortization (Note 16)
Sewa gedung, kendaraan dan peralatan	582	1.431	2.471	2.266	Office, vehicle and equipment rental
Asuransi	449	267	640	385	Insurance
Perjalanan	252	248	783	398	Travel
Jasa profesional dan hukum	132	1.025	4.068	3.342	Legal and professional fees
Penyusutan (Catatan 12 dan 13)	93	218	111	144	Depreciation (Notes 12 and 13)
Tanggung jawab sosial perusahaan	29	-	107	391	Corporate social responsibility
Komunikasi, iklan dan pemasaran and marketing	2	-	192	163	Communication, advertising and marketing
Perlengkapan kantor	-	-	341	480	Office supplies
Beban lain-lain (masing-masing kurang dari US\$ 100 ribu)	1.291	1.086	1.573	2.430	Other expenses (each less than US\$ 100 thousand)
Jumlah	<u>16.525</u>	<u>21.406</u>	<u>43.466</u>	<u>34.561</u>	Total

28. ADMINISTRATION EXPENSES

29. BEBAN BUNGA DAN KEUANGAN

29. INTEREST EXPENSES AND FINANCE CHARGES

	2024	2023	2023	2022	
	(Enam bulan)/ (Six-month) US\$ '000	(Enam bulan)/ (Six-month) (Tidak diaudit)/ (Unaudited) US\$ '000	(Satu tahun)/ (One year) US\$ '000	(Satu tahun)/ (One year) US\$ '000	
Beban bunga pada pinjaman jangka pendek dan pinjaman jangka panjang dari pihak ketiga (Catatan 17 dan 22)	9.412	5.579	16.254	4.721	Interest expense on short-term bank loan and long-term loans from third parties (Notes 17 and 22)
Beban bunga atas liabilitas sewa (Catatan 13)	1.211	1.316	2.685	1.511	Interest expense on lease liabilities (Note 13)
Lain-lain	2.725	271	866	1.189	Others
Jumlah	13.348	7.166	19.805	7.421	Total

30. KEUNTUNGAN DAN KERUGIAN LAIN-LAIN – BERSIH

30. OTHER GAINS AND LOSSES – NET

	2024	2023	2023	2022	
	(Enam bulan)/ (Six-month) US\$ '000	(Enam bulan)/ (Six-month) (Tidak diaudit)/ (Unaudited) US\$ '000	(Satu tahun)/ (One year) US\$ '000	(Satu tahun)/ (One year) US\$ '000	
Keuntungan (kerugian) kurs mata uang asing - bersih	5.803	(1.416)	1.479	2.741	Gain (loss) on foreign exchange - net
Cadangan kerugian penurunan nilai piutang tak tertagih setelah dikurangi pemulihan (Catatan 6) (Provisi) pemulihan persediaan usang (Catatan 7)	(393)	(95)	5	1.505	Allowance for credit losses - net of recovery (Note 6) (Provision) recovery for stock obsolescence (Note 7)
Kerugian pelepasan aset tetap (Catatan 12)	(287)	(58)	979	(763)	Loss on disposal of property, plant and equipment (Note 12)
Lain-lain - bersih	(258)	-	(689)	(5.758)	Others - net
Jumlah	1.166	2.180	2.101	600	Total
Jumlah	6.031	611	3.875	(1.675)	Total

31. PAJAK PENGHASILAN

31. INCOME TAX

	2024	2023	2023	2022	
	(Enam bulan)/ (Six-month) US\$ '000	(Enam bulan)/ (Six-month) (Tidak diaudit)/ (Unaudited) US\$ '000	(Satu tahun)/ (One year) US\$ '000	(Satu tahun)/ (One year) US\$ '000	
Pajak kini					Current tax
Perusahaan	-	204	-	3.550	The Company
Entitas anak	1.034	2.396	4.593	6.031	Subsidiaries
Pajak tangguhan					Deferred tax
Perusahaan	275	(857)	(843)	(695)	The Company
Entitas anak	304	(173)	(141)	(278)	Subsidiaries
Penyesuaian					Adjustment
Perusahaan	-	-	-	250	The Company
Entitas anak	-	-	-	131	Subsidiaries
Beban pajak penghasilan - bersih	1.613	1.570	3.609	8.989	Income tax expense - net

Pajak Kini

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian interim dengan rugi fiskal adalah sebagai berikut:

Current Tax

Reconciliation between profit before tax per interim consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income and fiscal loss is as follows:

	2024 (Enam bulan)/ (Six-month) US\$ '000	2023 (Enam bulan)/ (Six-month) (Tidak diaudit)/ (Unaudited) US\$ '000	2023 (Satu tahun)/ (One year) US\$ '000	2022 (Satu tahun)/ (One year) US\$ '000	
Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	3.136	13.281	16.047	50.155	Profit before tax per consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income
Dikurangi: (Rugi) laba sebelum pajak entitas anak	(561)	6.699	9.488	22.621	Less: (Loss) profit before tax of subsidiaries
Laba sebelum pajak Perusahaan	3.697	6.582	6.559	27.534	Profit before tax of the Company
Penghasilan kena pajak final	(29.556)	(18.655)	(39.608)	(27.812)	Income subject to final tax
Perbedaan temporer:					Temporary differences:
Liabilitas sewa	3.121	(2.428)	(4.986)	6.359	Lease liabilities
Perbedaan amortisasi komersial dan fiskal	1.272	(1.278)	(2.541)	(2.614)	Difference between commercial and fiscal amortization
Penyisihan imbalan pasca kerja - bersih	461	3.225	4.954	(848)	Provision for post-employment benefits - net
Penyisihan kerugian penurunan nilai piutang tak tertagih	402	95	(28)	(1.505)	Provision for impairment losses on trade accounts receivable
Provisi dan pemulihan persediaan usang	287	58	(979)	763	Provision and recovery for stock obsolescence
Penyisihan pajak kendaraan - bersih	(406)	60	176	139	Provision of vehicle tax - net
Perbedaan penyusutan komersial dan fiskal	(2.736)	7.562	11.114	1.781	Difference between commercial and fiscal depreciation
Pembayaran cuti dan bonus	(3.658)	(3.400)	(3.876)	(913)	Payment for leaves and bonus
Jumlah	(1.257)	3.894	3.834	3.162	Total
Perbedaan yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal:					Non-deductible expenses (non-taxable income):
Kesejahteraan karyawan	4.896	4.694	12.585	6.376	Employee welfare
Beban pajak final	4.043	970	4.421	2.699	Final tax expenses
Pajak penghasilan pasal 21	2.780	3.386	6.329	398	Income tax article 21
Beban yang tidak dikurangkan lainnya	(233)	54	188	3.780	Other non-deductible expenses
Jumlah	11.486	9.104	23.523	13.252	Total
(Rugi fiskal) laba penghasilan kena pajak	(15.630)	925	(5.692)	16.136	(Fiscal loss) taxable income
Beban pajak kini 22%	-	204	-	3.550	Current tax expense 22%
Dikurangi pembayaran pajak dimuka Tahun berjalan:					Less prepaid income taxes Current year:
Pasal 22	197	28	309	95	Article 22
Pasal 23	1.040	1.967	1.966	2.019	Article 23
Pasal 25	-	83	83	320	Article 25
Jumlah	1.237	2.078	2.358	2.434	Total
Lebih (kurang) bayar pajak penghasilan badan	1.237	1.875	2.358	(1.116)	Over (under) payment of corporate income tax

Rugi fiskal pajak tahun 2023 dan laba penghasilan kena pajak tahun 2022 menjadi dasar dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan Badan.

The fiscal loss for 2023 and the taxable income for 2022 become the basis for filing the Annual Corporate Income Tax Returns (SPT).

Pajak final merupakan pajak final atas jasa konstruksi yang diberikan oleh Perusahaan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 153/PMK.03/2009 tanggal 29 September 2009, penghasilan dari usaha jasa konstruksi dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final.

The final tax represents the final tax for the construction services rendered by the Company. In accordance with the Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 153/PMK.03/2009 dated September 29, 2009, the revenue arising from construction service is subject to final tax.

Pajak Tangguhan

Rincian dari asset dan liabilitas pajak tangguhan Grup adalah sebagai berikut:

Deferred Tax

The details of the Group's deferred tax assets and liabilities are as follows:

	1 Januari/ January 1, 2024	Dikreditkan (dibebankan) ke laporan laba rugi periode berjalan/ Credited (charged) to profit or loss for the period	Dibebankan ke penghasilan komprehensif lain/ Charged to other comprehensive income	30 Juni/ June 30, 2024		
	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000		
Perusahaan					The Company	
Liabilitas pajak tangguhan - bersih					Deferred tax liabilities - net	
Liabilitas imbalan pasca kerja	6.124	101	(727)	5.498	Employee benefits obligation	
Liabilitas sewa	2.412	687	-	3.099	Lease liabilities	
Beban masih harus dibayar	1.200	(893)	-	307	Accrued expenses	
Persediaan	69	63	-	132	Inventories	
Piutang usaha	3	88	-	91	Trade accounts receivable	
Aset tak-berwujud	(22.578)	280	-	(22.298)	Intangible assets	
Aset tetap	(13.721)	279	-	(13.442)	Property, plant and equipment	
Aset hak guna	(2.135)	(880)	-	(3.015)	Right-of-use asset	
Jumlah	(28.626)	(275)	(727)	(29.628)	Total	
Entitas anak					Subsidiaries	
Aset pajak tangguhan	805	(288)	(5)	512	Deferred tax assets	
Liabilitas pajak tangguhan	-	(16)	(3)	(19)	Deferred tax liabilities	
Jumlah aset pajak tangguhan	805	(288)	(5)	512	Total deferred tax assets	
Jumlah liabilitas pajak tangguhan	(28.626)	(291)	(730)	(29.647)	Total deferred tax liabilities	
	1 Januari/ January 1, 2023	Dikreditkan (dibebankan) ke laporan laba rugi tahun berjalan/ Credited (charged) to profit or loss for the year	Dibebankan ke penghasilan komprehensif lain/ Charged to other comprehensive income	Penyesuaian nilai wajar aset takberwujud dari akuisisi/ Fair value adjustment intangible assets from acquisition	31 Desember/ December 31, 2023	
	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	
Perusahaan					The Company	
Liabilitas pajak tangguhan - bersih					Deferred tax liabilities - net	
Liabilitas imbalan pasca kerja	5.144	1.092	(112)	-	6.124	Employee benefits obligation
Liabilitas sewa	3.510	(1.098)	-	-	2.412	Lease liabilities
Beban masih harus dibayar	2.014	(814)	-	-	1.200	Accrued expenses
Persediaan	285	(216)	-	-	69	Inventories
Piutang usaha	10	(7)	-	-	3	Trade accounts receivable
Aset tak-berwujud	(2.469)	(559)	-	(19.550)	(22.578)	Intangible assets
Aset tetap	(14.898)	1.177	-	-	(13.721)	Property, plant and equipment
Aset hak guna	(3.403)	1.268	-	-	(2.135)	Right-of-use asset
Jumlah	(9.807)	843	(112)	(19.550)	(28.626)	Total
Entitas anak					Subsidiaries	
Aset pajak tangguhan	664	141	-	-	805	Deferred tax assets
Jumlah aset pajak tangguhan	664	141	-	-	805	Total deferred tax assets
Jumlah liabilitas pajak tangguhan	(9.807)	843	(112)	(19.550)	(28.626)	Total deferred tax liabilities

PT PETROSEA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2024 DAN 2023 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023 DAN 2022 – Lanjutan

PT PETROSEA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED
JUNE 30, 2024 AND 2023 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2023 AND 2022 - Continued

	1 Januari/ January 1, 2022 US\$ '000	Dikreditkan (dibebankan) ke laporan laba rugi periode berjalan/ Credited (charged) to profit or loss for the year US\$ '000	Dikreditkan (dibebankan) ke penghasilan komprehensif lain/ Credited (charged) to other comprehensive income US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2022 US\$ '000	
Liabilitas imbalan pasca kerja	5.289	(187)	42	5.144	Employee benefits obligation
Liabilitas sewa	2.112	1.398	-	3.510	Lease liabilities
Beban masih harus dibayar	2.185	(171)	-	2.014	Accrued expenses
Persediaan	117	168	-	285	Inventories
Piutang usaha	341	(331)	-	10	Trade accounts receivable
Laba rugi belum terealisasi instrumen derivatif	59	-	(59)	-	Unrealized gain or loss derivative instruments
Aset tak-berwujud	(1.894)	(575)	-	(2.469)	Intangible assets
Aset hak guna	(1.758)	(1.645)	-	(3.403)	Right-of-use asset
Aset tetap	(16.936)	2.038	-	(14.898)	Property, plant and equipment
Entitas anak	443	278	(57)	664	Subsidiaries
Bersih	<u>(10.042)</u>	<u>973</u>	<u>(74)</u>	<u>(9.143)</u>	Net

Rekonsiliasi antara beban pajak bersih dan hasil perkalian laba akuntansi sebelum pajak dengan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

A reconciliation between the net tax expense and the amounts computed by applying the effective tax rates to profit before tax is as follows:

	2024 (Enam bulan)/ (Six-month) US\$ '000	2023 (Enam bulan)/ (Six-month) (Tidak diaudit)/ (Unaudited) US\$ '000	2023 (Satu tahun)/ (One year) US\$ '000	2022 (Satu tahun)/ (One year) US\$ '000	
Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi konsolidasian	3.136	13.281	16.047	50.155	Profit before tax per consolidated statements of profit or loss
Dikurangi: (Rugi)/laba sebelum pajak entitas anak	<u>(561)</u>	<u>6.699</u>	<u>9.488</u>	<u>22.621</u>	Less: (Loss)/profit before tax of the Company
Laba sebelum pajak Perusahaan	2.575	6.582	6.559	27.534	Profit before tax of the Company
Pajak penghasilan dengan tarif pajak efektif 22%	813	1.448	1.443	6.057	Income tax at effective tax rate 22%
Pengaruh pajak atas manfaat (beban) yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal:					Tax effect of non-taxable income (non-deductible expenses):
Rugi fiskal yang tidak diakui	3.439	-	1.252	-	Unrecognized fiscal loss
Beban pajak entitas anak	1.337	2.223	4.452	5.755	Tax expense of subsidiary
Kesejahteraan karyawan	1.076	1.033	2.769	1.403	Employee welfare
Beban pajak final	889	213	974	594	Final tax expenses
Pajak penghasilan pasal 21	612	745	1.392	87	Income tax article 21
Penghasilan kena pajak final - bersih	<u>(6.502)</u>	<u>(4.104)</u>	<u>(8.714)</u>	<u>(6.119)</u>	Income subject to final tax - net
Beban yang tidak dapat dikurangkan lainnya	(51)	12	41	831	Other non-deductible expenses
Penyesuaian yang diakui di tahun berjalan atas pajak penghasilan tahun sebelumnya	-	-	-	381	Adjustment recognized in the current year relating to the prior year's income tax expense
Beban pajak penghasilan	<u>1.613</u>	<u>1.570</u>	<u>3.609</u>	<u>8.989</u>	Income tax expense

32. LABA PER SAHAM

Perhitungan laba per saham adalah berdasarkan data sebagai berikut:

	2024 (Enam bulan)/ (Six-month)	2023 (Enam bulan)/ (Six-month) (Tidak diaudit)/ (Unaudited)	2023 (Satu tahun)/ (One year)	2022 (Satu tahun)/ (One year)
	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000
<u>Laba</u>				
Laba untuk perhitungan laba per saham dasar	1.322	11.591	12.200	40.924
<u>Jumlah saham</u>				
Jumlah rata-rata tertimbang saham biasa beredar	996.507.617	991.664.500	991.664.500	991.664.500
Laba per saham dasar/dilusi (dalam US\$ penuh)	0,0013	0,0117	0,0123	0,0413

Perusahaan tidak memiliki efek berpotensi saham biasa dilusi pada periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2024 and 2023 serta tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022.

32. EARNINGS PER SHARE

The computation of basic earnings per share are based on the following data:

<u>Earnings</u>
Profit for computation of basic earnings per share
<u>Number of shares</u>
Weighted average number of outstanding ordinary shares
<u>Basic/diluted earnings per share (in full US\$)</u>

The Company has no potential dilutive ordinary shares in the six-month periods ended on June 30, 2024 and 2023 and for the years ended on December 31, 2023 and 2022.

33. LIABILITAS IMBALAN KERJA

	30 Juni/ June 30, 2024 US\$ '000	31 Desember/ Desember 31, 2023 US\$ '000	31 Desember/ Desember 31, 2022 US\$ '000
Imbalan pasca kerja	20.780	22.959	19.386
Cuti berimbalan jangka panjang	4.940	5.644	4.305
Liabilitas bersih	25.720	28.603	23.691
Bagian lancar cuti berimbalan jangka panjang (Catatan 20)	(556)	(748)	(750)
Bagian jangka panjang	25.164	27.855	22.941

Bagian lancar cuti berimbalan jangka panjang dicatat sebagai perusahaan dari beban akrual.

Imbalan Pasca Kerja sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan

Grup menghitung dan membukukan kewajiban imbalan pasca kerja kepada karyawan yang berhak sekurang-kurangnya sama dengan imbalan pasca kerja yang diatur dalam Undang-Undang yang berlaku, yang memberikan imbalan pasca kerja berdasarkan penghasilan dasar pensiun dan masa kerja karyawan. Jumlah karyawan yang berhak atas imbalan pasca kerja tersebut pada 30 Juni 2024, 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah 4.071 karyawan, 4.422 karyawan dan 3.797 karyawan.

Program imbalan pasti mengakibatkan eksposur Grup terhadap risiko asumsi aktuarial yang signifikan seperti: risiko tingkat bunga dan risiko gaji.

33. EMPLOYEE BENEFITS OBLIGATION

Current maturities of long service leave recorded as part of accrued expenses.

Post-Employment Benefits under Labor Law

The Group provides post-employment benefits obligation for its qualifying employees at least equivalent with the post-employment benefits as stipulated in applicable Law, that provides benefits based on years of service and salaries of the employees. The numbers of employees entitled to the benefits on June 30, 2024, December 31, 2023 and 2022 are 4,071 employees, 4,422 employees and 3,797 employees, respectively.

The defined benefit plans typically expose the Group to significant actuarial assumption risks such as: interest rate risk salary risk.

Risiko Tingkat Bunga

Penurunan suku bunga obligasi akan meningkatkan liabilitas program.

Risiko Gaji

Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada gaji masa depan peserta program. Dengan demikian, kenaikan gaji peserta program akan meningkatkan liabilitas program itu.

Beban imbalan pasca kerja yang diakui dalam laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian interim adalah:

Interest Risk

A decrease in the bond interest rate will increase the plan liability.

Salary Risk

The present value of the defined benefit plan liability is calculated by reference to the future salaries of plan participants. As such, an increase in the salary of the plan participants will increase the plan's liability.

Amounts recognized in the interim consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income with respect to these post-employment benefits are as follows:

	2024 (Enam bulan)/ (Six-month) US\$ '000	2023 (Enam bulan)/ (Six-month) (Tidak diaudit)/ (Unaudited) US\$ '000	2023 (Satu tahun)/ (One year) US\$ '000	2022 (Satu tahun)/ (One year) US\$ '000	
Biaya jasa:					Service cost:
Biaya jasa kini	2.416	1.571	3.436	3.093	Current service cost
Biaya jasa lalu atas perubahan imbalan	(76)	-	-	-	Past service cost due to plan amendment
Biaya bunga	746	726	1.447	1.242	Interest costs
Penyesuaian atas perubahan metode atribusi manfaat	-	-	-	(1.353)	Adjustment due to change in
Biaya jasa lalu	11	-	45	20	Past service costs
Komponen beban imbalan pasca kerja yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain	(3.343)	-	(508)	166	Component of post-employment benefit costs recognized in other comprehensive income
Jumlah	(246)	2.297	4.420	3.168	Total

Mutasi nilai kini kewajiban imbalan pasca kerja adalah sebagai berikut:

Movement in the present value of the post-employment benefit obligation were as follows:

	30 Juni/ June 30, 2024 US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2023 US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2022 US\$ '000	
Kewajiban imbalan pasca kerja - awal	22.959	19.386	19.714	Opening post-employment benefits obligation
Biaya jasa kini	2.416	3.436	3.093	Current service costs
Biaya jasa lalu atas perubahan imbalan	(76)	-	-	Past service cost due to plan amendment
Biaya jasa lalu	11	45	20	Past service costs
Biaya bunga	746	1.447	1.242	Interest costs
Selisih kurs atas program dalam valuta asing	(1.383)	351	(1.922)	Exchange differences on foreign plans
Pembayaran manfaat	(550)	(1.198)	(1.574)	Benefits paid
Penyesuaian atas perubahan metode atribusi manfaat	-	-	(1.353)	Adjustment due to change in benefit attribution method
Pengukuran kembali keuntungan:				Remeasurement gain:
(Keuntungan) kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian atas pengalaman	(2.640)	(1.163)	788	Actuarial (gains) losses arising from experience adjustments
(Keuntungan) kerugian aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi keuangan	(703)	655	(622)	Actuarial (gains) losses arising from changes in financial assumptions
Kewajiban imbalan pasca kerja - akhir	20.780	22.959	19.386	Closing post-employment benefits obligation

Biaya sehubungan dengan imbalan pasca kerja dihitung oleh KKA Steven & Mourits, Aktuaris Independen. Asumsi utama yang digunakan dalam menentukan penilaian aktuarial adalah sebagai berikut:

The cost of providing post-employment benefits is calculated by KKA Steven & Mourits, an Independent Actuary. The actuarial valuation was carried out using the following key assumptions:

	30 Juni 2024/ June 30, 2024	
Tingkat diskonto	7,15% per tahun/ <i>per annum</i>	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji	8,00% per tahun/ <i>per annum</i>	Future salary increment rate
Tingkat pengunduran diri	7,00%	Resignation rate
Tingkat cacat dari tabel mortalitas	5,00%	Disability rate from mortality table
Usia pensiun normal	55	Normal retirement age
Tingkat mortalitas	TMI IV	Mortality rate
<hr/>		
	31 Desember 2023/ December 31, 2023	
Tingkat diskonto	6,70% - 6,80% per tahun/ <i>per annum</i>	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji	8,00% per tahun/ <i>per annum</i>	Future salary increment rate
Tingkat pengunduran diri	7,00%	Resignation rate
Tingkat cacat dari tabel mortalitas	5,00%	Disability rate from mortality table
Usia pensiun normal	55	Normal retirement age
Tingkat mortalitas	TMI IV	Mortality rate
<hr/>		
	31 Desember 2022/ December 31, 2022	
Tingkat diskonto	7,30% per tahun/ <i>per annum</i>	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji	8,00% per tahun/ <i>per annum</i>	Future salary increment rate
Tingkat pengunduran diri	7,00%	Resignation rate
Tingkat cacat dari tabel mortalitas	5,00%	Disability rate from mortality table
Usia pensiun normal	55	Normal retirement age
Tingkat mortalitas	TMI IV	Mortality rate

Asumsi aktuarial yang signifikan untuk penentuan imbalan pasca kerja adalah tingkat diskonto dan tingkat kenaikan gaji. Analisis sensitivitas dibawah ini ditentukan berdasarkan perubahan asumsi yang mungkin terjadi pada akhir periode pelaporan, dengan semua asumsi lain konstan.

Significant actuarial assumptions for the determination of the post-employment benefits are discount rate and salary increment rate. The sensitivity analysis below have been determined based on reasonably possible changes of the respective assumptions occurring at the end of the reporting period, while holding all other assumptions constant.

- Jika tingkat diskonto lebih tinggi (lebih rendah) 1%, kewajiban imbalan masing-masing pasti akan berkurang sebesar US\$ 1.475 ribu (meningkat sebesar US\$ 1.662 ribu), berkurang sebesar US\$ 1.631 ribu (meningkat sebesar US\$ 1.839 ribu) dan berkurang sebesar US\$ 1.406 ribu (meningkat sebesar US\$ 1.584 ribu) pada 30 Juni 2024, 31 Desember 2023 dan 2022.
- If the discount rate is 1% higher (lower), the defined benefits obligation would decrease by US\$ 1,475 thousand (increase by US\$ 1,662 thousand), decrease by US\$ 1,631 thousand (increase by US\$ 1,839 thousand) and decrease by US\$ 1,406 thousand (increase by US\$ 1,584 thousand) on June 30, 2024, December 31, 2023 and 2022, respectively.

- Jika tingkat upah lebih tinggi (lebih rendah) 1%, kewajiban imbalan masing-masing pasti akan meningkat sebesar US\$ 1.608 ribu (berkurang sebesar US\$ 1.455 ribu), meningkat sebesar US\$ 1.916 ribu (berkurang sebesar US\$ 1.728 ribu) dan meningkat sebesar US\$ 1.657 ribu (berkurang sebesar US\$ 1.496 ribu) pada 30 Juni 2024, 31 Desember 2023 dan 2022.

Analisis sensitivitas yang disajikan di atas mungkin tidak mewakili perubahan yang sebenarnya dalam kewajiban imbalan pasti mengingat bahwa perubahan asumsi terjadinya tidak terisolasi satu sama lain karena beberapa asumsi tersebut mungkin berkorelasi.

Selanjutnya, dalam menyajikan analisis sensitivitas di atas, nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan menggunakan metode *projected unit credit* pada akhir periode pelaporan, yang sama dengan yang diterapkan dalam menghitung liabilitas manfaat pasti yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian interim.

Tidak ada perubahan dalam metode dan asumsi yang digunakan dalam penyusunan analisis sensitivitas dari tahun sebelumnya.

Durasi rata-rata dari kewajiban imbalan pada tanggal 30 Juni 2024, 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah 12-16 tahun, 12-16 tahun dan 12-13 tahun.

Cuti Berimbalan Jangka Panjang

Perusahaan juga memberikan cuti berimbalan jangka panjang untuk karyawan. Jumlah karyawan yang berhak atas imbalan pasca kerja tersebut pada 30 Juni 2024, 30 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah 4.071 karyawan, 4.422 karyawan dan 3.797 karyawan.

Beban cuti berimbalan jangka panjang yang diakui dalam laba rugi adalah sebagai berikut:

	2024 (Enam bulan/ (Six-month) US\$ '000	2023 (Enam bulan)/ (Six-month) (Tidak diaudit)/ (Unaudited) US\$ '000	2023 (Satu tahun)/ (One year) US\$ '000	2022 (Satu tahun)/ (One year) US\$ '000	
Biaya jasa kini	532	427	1.088	898	Current service costs
Biaya bunga	183	157	367	290	Interest costs
Biaya jasa lalu	4	-	687	52	Past service costs
Keuntungan aktuarial bersih	(755)	-	(228)	(343)	Net actuarial gains
Jumlah	(36)	584	1.914	897	Total

- If the salary rate is 1% higher (lower), the defined benefits obligation would increase by US\$ 1,608 thousand (decrease by US\$ 1,455 thousand), increase by US\$ 1,916 thousand (decrease by US\$ 1,728 thousand) and increase by US\$ 1,657 thousand (decrease by US\$ 1,496 thousand) on June 30, 2024, December 31, 2023 and 2022, respectively.

The sensitivity analysis presented above may not be representative of the actual change in the defined benefits obligation as it is unlikely that the change in assumptions would occur in isolation of one another as some of the assumptions may be correlated.

Furthermore, in presenting the above sensitivity analysis, the present value of the defined benefits obligation has been calculated using the projected unit credit method at the end of the reporting period, which is the same as that applied in calculating the defined benefits obligation recognized in the interim consolidated statement of financial position.

There was no change in the methods and assumptions used in preparing the sensitivity analysis from prior years.

The average duration of the benefit obligations at June 30, 2024, December 31, 2023 and 2022 is 12-16 years, 12-16 years and 12-13 years, respectively.

Long Service Leave

The Company also provides long service leave benefits for its qualifying employees. The numbers of employees entitled to the benefits on June 30, 2024, December 31, 2023 and 2022 are 4,071 employees, 4,422 employees and 3,797 employees, respectively.

Amounts recognized in the profit or loss with respect to these long service leave benefits are as follows:

Mutasi atas nilai kini kewajiban cuti berimbangan jangka panjang adalah sebagai berikut:

Movement in the present value of long service leave benefits obligation are as follow:

	30 Juni/ June 30, 2024 US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2023 US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2022 US\$ '000	
Saldo awal nilai kini kewajiban cuti berimbangan jangka panjang	5.644	4.305	4.387	Beginning balance of present value of long-service leave benefits
Biaya jasa kini	532	1.088	898	Current service costs
Biaya bunga	183	367	290	Interest costs
Biaya jasa lalu	4	687	52	Past service costs
Selisih kurs atas program dalam valuta asing	(315)	81	(434)	Exchange differences on foreign plans
Pembayaran manfaat	(353)	(656)	(545)	Benefits paid
Keuntungan aktuarial bersih	(755)	(228)	(343)	Net actuarial gains
Saldo akhir nilai kini kewajiban cuti berimbangan jangka panjang	4.940	5.644	4.305	Ending balance of present value of long-service leave benefits

Biaya sehubungan dengan cuti berimbangan jangka panjang dihitung oleh KKA Steven & Mourits, Aktuaris Independen. Asumsi utama yang digunakan dalam menentukan penilaian aktuarial adalah sebagai berikut:

The cost of providing long service leave benefits is calculated KKA Steven & Mourits, an Independent Actuary. The actuarial valuation was carried out using the following key assumptions:

30 Juni 2024/ June 30, 2024		
Tingkat diskonto	7,15% per tahun/ <i>per annum</i>	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji	8,00% per tahun/ <i>per annum</i>	Future salary increment rate
Tingkat pengunduran diri	7,00% per tahun sampai dengan usia 40 tahun dan menurun linier hingga 0% pada usia 55 tahun/ <i>7.00% per annum up to age 40 and decreasing linearly to 0% at age 55</i>	Resignation rate
Tingkat cacat dari tabel mortalitas	5,00% dari tingkat mortalitas/ <i>5.00% from mortality rate</i>	Disability rate from mortality table
Usia pensiun normal	55	Normal retirement age
Tingkat mortalitas	TMI IV	Mortality rate
31 Desember 2023/ December 31, 2023		
Tingkat diskonto	6,70% per tahun/ <i>per annum</i>	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji	8,00% per tahun/ <i>per annum</i>	Future salary increment rate
Tingkat pengunduran diri	7,00% per tahun sampai dengan usia 40 tahun dan menurun linier hingga 0% pada usia 55 tahun/ <i>7.00% per annum up to age 40 and decreasing linearly to 0% at age 55</i>	Resignation rate
Tingkat cacat dari tabel mortalitas	5,00% dari tingkat mortalitas/ <i>5.00% from mortality rate</i>	Disability rate from mortality table
Usia pensiun normal	55	Normal retirement age
Tingkat mortalitas	TMI IV	Mortality rate
31 Desember 2022/ December 31, 2022		
Tingkat diskonto	7,30% per tahun/ <i>per annum</i>	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji	8,00% per tahun/ <i>per annum</i>	Future salary increment rate
Tingkat pengunduran diri	7,00% per tahun sampai dengan usia 40 tahun dan menurun linier hingga 0% pada usia 55 tahun/ <i>7.00% per annum up to age 40 and decreasing linearly to 0% at age 55</i>	Resignation rate
Tingkat cacat dari tabel mortalitas	5,00% dari tingkat mortalitas/ <i>5.00% from mortality rate</i>	Disability rate from mortality table
Usia pensiun normal	55	Normal retirement age
Tingkat mortalitas	TMI IV	Mortality rate

Asumsi aktuarial yang signifikan untuk penentuan cuti berimbang jangka panjang adalah tingkat diskonto. Analisis sensitivitas di bawah ini ditentukan berdasarkan perubahan asumsi yang mungkin terjadi pada akhir periode pelaporan, dengan semua asumsi lain konstan.

- Jika tingkat diskonto lebih tinggi (lebih rendah) 1%, kewajiban cuti berimbang jangka panjang masing-masing akan berkurang sebesar US\$ 274 ribu (meningkat sebesar US\$ 305 ribu), berkurang sebesar US\$ 306 ribu (meningkat sebesar US\$ 341 ribu) dan berkurang sebesar US\$ 219 ribu (meningkat sebesar US\$ 243 ribu) pada 30 Juni 2024, 31 Desember 2023 dan 2022.
- Jika tingkat upah lebih tinggi (lebih rendah) 1%, kewajiban cuti berimbang jangka panjang masing-masing akan meningkat sebesar US\$ 275 ribu (berkurang sebesar US\$ 253 ribu), meningkat sebesar US\$ 360 ribu (berkurang sebesar US\$ 329 ribu) dan meningkat sebesar US\$ 259 ribu (berkurang sebesar US\$ 238 ribu) pada 30 Juni 2024, 31 Desember 2023 dan 2022.

Analisis sensitivitas yang disajikan di atas mungkin tidak mewakili perubahan yang sebenarnya dalam cuti berimbang jangka perusahaan mengingat bahwa perubahan asumsi terjadinya tidak terisolasi satu sama lain karena beberapa asumsi tersebut mungkin berkorelasi.

Selanjutnya, dalam menyajikan analisis sensitivitas di atas, nilai kini cuti berimbang jangka panjang dihitung dengan menggunakan metode *projected unit credit* pada akhir periode pelaporan, yang sama dengan yang diterapkan dalam menghitung cuti berimbang jangka perusahaan yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian interim.

34. AKUISISI ENTITAS ANAK

Sebagaimana dijelaskan dalam Catatan 1c, pada bulan Juni 2023, Perusahaan membeli 99,93% atau sebanyak 35.589.375 saham PTKMS dan entitas anak (PTCEP) dengan biaya perolehan US\$ 90,5 juta. Untuk sisa 0,07% atau sebanyak 25.000 saham PTKMS dibeli oleh PTKBL dengan nilai perolehan US\$ 64 ribu, sehingga secara grup kepemilikan atas PTKMS adalah 100%.

PTKMS dan entitas anak diakuisisi sebagai pengembangan lini bisnis pada industri pertambangan batubara.

Significant actuarial assumptions for the determination of the long-service leave are discount rate. The sensitivity analysis below have been determined based on reasonably possible changes of the respective assumptions occurring at the end of the reporting period, while holding all other assumptions constant.

- If the discount rate is 1% higher (lower), the long-service leave obligation would decrease by US\$ 274 thousand (increase by US\$ 305 thousand), decrease by US\$ 306 thousand (increase by US\$ 341 thousand) and decrease by US\$ 219 thousand (increase by US\$ 243 thousand) on June 30, 2024, December 31, 2023 and 2022, respectively.
- If the salary rate is 1% higher (lower), the long-service leave obligation would increase by US\$ 275 thousand (decrease by US\$ 253 thousand), increase by US\$ 360 thousand (decrease by US\$ 329 thousand), increase by US\$ 259 thousand (decrease by US\$ 238 thousand) on June 30, 2024, December 31, 2023 and 2022, respectively.

The sensitivity analysis presented above may not be representative of the actual change in the long-service leave obligation as it is unlikely that the change in assumptions would occur in isolation of one another as some of the assumptions may be correlated.

Furthermore, in presenting the above sensitivity analysis, the present value of the long-service leave obligation has been calculated using the projected unit credit method at the end of the reporting period, which is the same as that applied in calculating the long-service leave obligation recognized in the interim consolidated statement of financial position.

34. ACQUISITION OF A SUBSIDIARY

As described in Note 1c, in June 2023, the Company purchased 99.93% equity ownership or 35,589,375 shares of PTKMS and its subsidiary (PTCEP) at acquisition cost of US\$ 90.5 million. The remaining 0.07% equity ownership or 25,000 shares of PTKMS were purchased by PTKBL at acquisition cost of US\$ 64 thousand, so that the Group's ownership of PTKMS is 100%.

PTKMS and its subsidiary were acquired as a business line development in the coal mining industry.

Pada saat tanggal akuisisi PTKMS dan entitas anak, nilai wajar aset yang diperoleh dan liabilitas adalah sebagai berikut:

As of date of the acquisition of PTKMS and its subsidiary, the fair value of assets acquired and liabilities are as follows:

	US\$ '000	
Jumlah aset *)	91.387	Total assets *)
Jumlah liabilitas	260	Total liabilities
Nilai wajar aset bersih yang diperoleh	<u>91.127</u>	Fair value of net assets acquired
Nilai aset bersih yang diambil diperoleh - setelah dikurangi liabilitas pajak tangguhan sebesar US\$ 19.550 ribu	<u>71.577</u>	Net assets value acquired - net of deferred tax liabilities amounting to US\$ 19,550 thousand

*) Termasuk aset tak-berwujud atas beban eksplorasi ditangguhkan sebesar US\$ 88.864 ribu (Catatan 16).

*) Included intangible assets for deferred exploration cost amounted to US\$ 88,864 thousand (Note 16).

Goodwill dan arus kas keluar bersih yang timbul dari akuisisi adalah sebagai berikut:

Goodwill and net cash outflow arising from such acquisition are as follows:

	US\$ '000	
Imbalan yang dialihkan	90.564	Consideration transferred
Dikurangi: Nilai wajar aset bersih yang diperoleh setelah dikurangi liabilitas pajak tangguhan	<u>71.577</u>	Less: Fair value of the net assets acquired net of deferred tax liabilities
<i>Goodwill</i> yang timbul dari akuisisi (Catatan 14)	<u>18.987</u>	Goodwill arising from acquisition (Note 14)
Imbalan yang dibayarkan tunai	90.564	Consideration paid in cash
Kas dan setara kas yang diperoleh	<u>(22)</u>	Cash and cash equivalents acquired
Arus kas keluar bersih pada saat akuisisi	<u>90.542</u>	Net cash outflow on acquisition

Estimasi nilai wajar atas aset berwujud bersih dan liabilitas diterapkan dengan menggunakan metode penyesuaian aset bersih, sedangkan estimasi nilai wajar atas aset tak-berwujud diterapkan dengan menggunakan metode kelebihan pendapatan yang dihitung oleh penilai independen, KJPP Kusnanto & Rekan sesuai dengan laporan No. 00069/2.0162-00/BS/02/0153/1/VI/2023 tanggal 23 Juni 2023.

The fair value estimation of net tangible assets and liabilities were determined by applying the adjusted net asset method, meanwhile, the fair value estimation of intangible assets determined by applying the multi period excess earnings method by an independent appraiser, KJPP Kusnanto & Rekan based on the report No. 00069/2.0162-00/BS/02/0153/1/VI/2023 dated Juni 23, 2023.

Goodwill yang timbul dalam kombinasi bisnis karena biaya perolehan kombinasi termasuk suatu premi pengendalian utama. Selanjutnya, imbalan yang dibayar untuk kombinasi secara efektif tidak termasuk jumlah yang terkait dengan sinergi yang diharapkan, pertumbuhan pendapatan, pengembangan pasar yang akan datang, kumpulan tenaga kerja dan aset tak-berwujud tertentu. Manfaat ini diakui terpisah dari goodwill karena manfaat tersebut memenuhi kriteria pengakuan untuk aset tak-berwujud yang dapat diidentifikasi.

Goodwill arose in the business combination because the cost of the combination included a control premium. In addition, the consideration paid for the combination effectively not included amounts in relation to the benefit of expected synergies, revenue growth, future market development, assembled workforce and certain intangible assets. These benefits are recognized separately from goodwill because they meet the recognition criteria for identifiable intangible assets.

Entitas anak ini memberikan kontribusi penjualan bersih sebesar US\$ 7.678 ribu dan rugi bersih sebesar US\$ 1.746 ribu terhadap hasil konsolidasian tahun 2023.

This subsidiary contributed US\$ 7,678 thousand of net sales and US\$ 1,746 thousand of net loss to the consolidated results in 2023.

Bila PTKMS dikonsolidasi sejak 1 Januari 2023, maka laba rugi konsolidasian akan menunjukkan pendapatan sebesar US\$ 577.617 ribu dan laba proforma sebesar US\$ 7.900 ribu pada tahun 2023.

Had PTKMS been consolidated from January 1, 2023, the consolidated profit or loss would show revenue of US\$ 577,617 thousand and a proforma profit of US\$ 7,900 thousand for the year 2023.

35. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK BERELASI

Sifat Pihak Berelasi

Sampai dengan tanggal 28 Juli 2022, sifat hubungan dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

- a. PT Indika Energy Tbk adalah pemegang saham utama Perusahaan.
- b. PT Tripatra Engineers and Constructors (TPEC), PT Indy Property Indonesia, PT Kideco Jaya Agung, PT Interport Mandiri Utama, PT Indika Multi Niaga, PT Pusat Sarana Baruna dan PT Masmindo Dwi Area mempunyai pemegang saham utama yang sama dengan Perusahaan.
- c. Chiyoda-Saipem-Tripatra-SAE (CSTS) Joint Operation merupakan proyek kerjasama antara TPEC dengan pihak ketiga.

Pada tanggal 28 Juli 2022, telah terjadi perubahan pengendalian Perusahaan yang semula PT Indika Energy Tbk menjadi PT Caraka Reksa Optima. Setelah tanggal 28 Juli 2022, sifat hubungan dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

- a. PT Caraka Reksa Optima (CARA) adalah pemegang saham utama Perusahaan.
- b. PT Nusa Halmahera Minerals dan PT Indotan Halmahera Bangkit mempunyai pengendali utama yang sama dengan Perusahaan.
- c. PT Rukun Raharja Tbk mempunyai manajemen kunci yang sama dengan Perusahaan.
- d. Flour-Petrosea Joint Organization (FPJO) merupakan proyek kerjasama antara Perusahaan dengan pihak ketiga (Catatan 6, 15 dan 25).

Pada tanggal 16 Februari 2024, telah terjadi perubahan pengendalian Perusahaan yang semula PT Caraka Reksa Optima menjadi PT Kreasi Jaya Persada. Setelah tanggal 16 Februari 2024, sifat hubungan dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

- a. PT Kreasi Jaya Persada (KJP) adalah pemegang saham utama Perusahaan.
- b. PT Sentosa Bersama Mitra dan PT Caraka Reksa Optima adalah pemegang saham Perusahaan.
- c. PT Sentosa Bersama Mitra, PT Sarana Adiwilaga Persada, PT Dua Usaha Karya Negeri dan PT Khazanah Kinarya Bersama adalah pemegang saham dari CARA.
- d. PT Rukun Raharja Tbk (RAJA), PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN), PT Prima Mineral Investindo (PMI) dan PT Daya Bumindo Karunia (DBK) mempunyai beberapa manajemen kunci yang sama dengan Perusahaan.

35. NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

Nature of Relationship

Up to July 28, 2022, the nature of relationships with the related parties is as follows:

- a. PT Indika Energy Tbk is the Company's majority stockholder.
- b. PT Tripatra Engineers and Constructors (TPEC), PT Indy Property Indonesia, PT Kideco Jaya Agung, PT Interport Mandiri Utama, PT Indika Multi Niaga, PT Pusat Sarana Baruna and PT Masmindo Dwi Area have the same majority stockholder as the Company.
- c. Chiyoda-Saipem-Tripatra-SAE (CSTS) Joint Operation is a joint operation between TPEC and third parties.

On July 28, 2022, there was change of controlling of the Company from PT Indika Energy Tbk to PT Caraka Reksa Optima. Subsequent to July 28, 2022, the nature of relationships with the related parties is as follows:

- a. PT Caraka Reksa Optima (CARA) is the Company's majority stockholder.
- b. PT Nusa Halmahera Minerals and PT Indotan Halmahera Bangkit have the same ultimate controlling party as the Company.
- c. PT Rukun Raharja Tbk has the same key management with the Company.
- d. Flour-Petrosea Joint Organization (FPJO) is a joint operation between the Company and third parties (Notes 6, 15 and 25).

On February 16, 2024, there was change of controlling of the Company from PT Caraka Reksa Optima to PT Kreasi Jaya Persada. Subsequent to February 16, 2024, the nature of relationships with the related parties is as follows:

- a. PT Kreasi Jaya Persada (KJP) is the Company's majority shareholder.
- b. PT Sentosa Bersama Mitra and PT Caraka Reksa Optima are the Company's shareholders.
- c. PT Sentosa Bersama Mitra, PT Sarana Adiwilaga Persada, PT Dua Usaha Karya Negeri and PT Khazanah Kinarya Bersama are CARA's shareholder.
- d. PT Rukun Raharja Tbk (RAJA), PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN), PT Prima Mineral Investindo (PMI) and PT Daya Bumindo Karunia (DBK) have several same key managements with the Company.

- e. PT Tamtama Perkasa, PT Prima Mineral Investindo (PMI), PT Daya Bumindo Karunia (DBK) dan PT Griya Idola yang mempunyai pemegang saham yang sama secara langsung maupun tidak langsung.
- f. PT Triguna Internusa Pratama (TIP) merupakan anak perusahaan dari PT Rukun Raharja Tbk (RAJA), di mana RAJA merupakan pemegang saham SBM.
- g. Fluor-Petrosea Joint Organization (FPJO) merupakan proyek kerjasama antara Perusahaan dengan pihak ketiga (Catatan 6, 15 dan 25).

Sejak tanggal 16 Februari 2024, PT Caraka Reksa Optima (CARA) tidak lagi menjadi pemegang saham utama Perusahaan.

Transaksi-transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

- a. Fluor-Petrosea Joint Organization (FPJO)

Pada tanggal 11 Maret 2020, Perusahaan bersama dengan PT Fluor Daniel Indonesia telah membentuk suatu kerjasama organisasi (FPJO) untuk melaksanakan Proyek Optimalisasi Pabrik Biji Bawah Tanah (*Mill Optimization for Underground Ores Project*) untuk PT Freeport Indonesia (Catatan 15).

Selanjutnya, FPJO bersama dengan PT Freeport Indonesia menandatangani *Engineering, Procurement, Construction and Construction Management Master Agreement*.

Pada tanggal 3 November 2020, FPJO dan PT Freeport Indonesia menandatangani *Supplement Agreement* dengan nilai estimasi total US\$ 100.122 ribu.

Pada periode 12 November 2021 sampai dengan 10 Oktober 2023, FPJO dan PT Freeport Indonesia menandatangani *Change Order* 001-010 untuk Proyek SAG3 (*Change Order* untuk *Supplement Agreement* No. TP1900216-002). Melalui *Change Order* ini, durasi proyek diperpanjang hingga tanggal 30 Mei 2024, dengan tambahan nilai kontrak sebesar US\$ 92.733 ribu. Tidak terdapat perpanjangan atas kontrak ini.

Pada periode 30 November 2021 sampai dengan 1 Agustus 2023, FPJO dan PT Freeport Indonesia menandatangani beberapa *Limited Notice to Proceed* (LNTP) dan *Supplement Agreement* untuk Proyek *Copper Cleaner Circuit Construction Services* (CUCL). Proyek ini telah diselesaikan pada tanggal 31 Desember 2023 dengan jumlah nilai kontrak sebesar Rp 802.087 juta (setara dengan US\$ 52.029 ribu).

- e. PT Tamtama Perkasa, PT Prima Mineral Investindo (PMI), PT Daya Bumindo Karunia (DBK) and PT Griya Idola which have the same shareholder either directly or indirectly.

- f. PT Triguna Internusa Pratama (TIP) is a subsidiary of PT Rukun Raharja Tbk (RAJA) where RAJA is a shareholder of SBM.

- g. Fluor-Petrosea Joint Organization (FPJO) is a joint operation between the Company and third parties (Notes 6, 15 and 25).

Up to February 16, 2024, PT Caraka Reksa Optima (CARA) is no longer the main Company's shareholder.

Transactions with Related Parties

- a. Fluor-Petrosea Joint Organization (FPJO)

On March 11, 2020, the Company together with PT Fluor Daniel Indonesia have formed a collaborative organization (FPJO) to implement Mill Optimization for Underground Ores Project for PT Freeport Indonesia (Note 15).

Furthermore, FPJO together with PT Freeport Indonesia executed the *Engineering, Procurement, Construction and Construction Management Master Agreement*.

On November 3, 2020, FPJO and PT Freeport Indonesia signed the *Supplement Agreement* with total estimated value US\$ 100,122 thousand.

In Period November 21, 2021 until October 10, 2023, FPJO and PT Freeport Indonesia executed the *Change order* 001 – 010 for SAG3 Project (*Change Order* for *Supplement Agreement* No. TP1900216-002). Through this *Change Order*, the duration of the project is extended up to May 30, 2024, with the additional *Contract Value* of US\$ 92,733 thousand. There is no extension for this contract.

In period November 30, 2021 until August 1, 2023, FPJO and PT Freeport Indonesia executed several *Limited Notice to Proceed* (LNTP) and *Supplement Agreement* for *Copper Cleaner Circuit Construction Services* (CUCL) Project have been completed on December 31, 2023 with the total *Contract Value* of Rp 802,087 million (equivalent to US\$ 52,029 thousand).

Pada tanggal 10 Maret 2024, FPJO dan PT Freeport Indonesia menandatangani *Supplement Agreement* No. TP1900216-005 untuk Proyek *Copper Cleaner Circuit Construction Services* (CUCL). Melalui *Supplement Agreement* ini, proyek CUCL diperpanjang hingga tanggal 31 Agustus 2024 dan mendapatkan tambahan nilai kontrak sebesar Rp 1.614 miliar (setara dengan US\$ 105 juta). Perjanjian ini telah mengalami beberapa kali perubahan, dengan perubahan terakhir pada *Change Order* No. 002 tanggal 31 Januari 2024, sehingga nilai kontrak menjadi Rp 2.350 miliar (setara dengan US\$ 145 juta). Perjanjian ini berakhir sampai dengan 26 Maret 2025.

Pada tanggal 15 Januari 2024, PT Freeport Indonesia telah menunjuk FPJO untuk mengerjakan Proyek *Redundant Conveyor (RECON) Construction Services* dengan nilai pekerjaan sebesar Rp 66.122 juta melalui *Limited Notice to Proceed* (LNTP) No. TP1900216-007. LNTP ini berlaku efektif dari tanggal 15 Januari 2024 hingga 30 April 2024. Tidak terdapat perpanjangan atas perjanjian ini.

Pada tanggal 18 Juni 2024, PT Freeport Indonesia telah menerbitkan LNTP kepada FPJO untuk menyediakan tenaga kerja dan peralatan untuk mendukung pekerjaan konstruksi di SAG2. Nilai LNTP ini adalah Rp 25,9 miliar (setara dengan US\$ 1,6 juta) dan berlaku hingga ditandatanganinya *Supplement Agreement* untuk pekerjaan ini.

Pendapatan yang berasal dari jasa konstruksi dan rekayasa untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2024 dan 2023 sebesar US\$ 36.028 ribu dan US\$ 27.687 ribu serta untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah US\$ 64.524 ribu dan US\$ 29.687 ribu (Catatan 25).

Biaya atas jasa konstruksi dan rekayasa untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2024 dan 2023 sebesar US\$ 30.882 ribu dan US\$ 21.781 serta untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar US\$ 53.949 ribu dan US\$ 16.059 ribu.

Saldo piutang usaha atas FPJO pada 30 Juni 2024, 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar US\$ 29.297 ribu, US\$ 20.842 ribu and US\$ 14.998 ribu.

Saldo piutang lain-lain atas FPJO pada 30 Juni 2024, 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar US\$ 7 ribu, Nihil dan Nihil.

On March 10, 2024, FPJO and PT Freeport Indonesia executed *Supplement Agreement* No. TP1900216-005 for *Copper Cleaner Circuit Construction Services* (CUCL). Under this *Supplement Agreement*, CUCL project is extended up to August 31, 2024 and obtained an additional Contract Value of Rp 1,614 billion (equivalent to US\$ 105 million). This agreement has been changed several times, with the latest *Change Order* No. 002 dated on January 31, 2024, therefore the contract value amounted to Rp 2,350 trillion (equivalent to US\$ 145 million). This agreement will be ended on March 26, 2025.

On January 15, 2024, PT Freeport Indonesia has nominated FPJO to execute *Redundant Conveyor (RECON) Construction Services* with the work value in the amount of Rp 66,122 million through *Limited Notice To Proceed* ("LNTP") No. TP1900216-007. This LNTP shall be effective from January 15, 2024 up to April 30, 2024. There is no extension for this contract.

On June 18, 2024, PT Freeport Indonesia has issued LNTP to FPJO for the provision of labour and equipment to support the construction works at SAG2. The Value of this LNTP is Rp 25.9 billion (equivalent to US\$ 1.6 million) and shall be valid up to the *Supplement Agreement* for this work is executed.

Revenue from construction and engineering services for the six-month periods ended June 30, 2024 and 2023 amounted to US\$ 36,028 thousand and US\$ 27,687 thousand as well as for the years ended December 31, 2023 and 2022 amounted to US\$ 64,524 thousand and US\$ 29,687 thousand (Note 25).

Cost from construction and engineering services for the six-month periods ended June 30, 2024 and 2023 amounted to US\$ 30,882 thousand and US\$ 21,781 thousand as well as for the years ended December 31, 2023 and 2022 amounted to US\$ 53,949 thousand and US\$ 16,059 thousand.

The trade accounts receivable balance to FPJO as of June 30, 2024, December 31, 2023 and 2022 amounted to US\$ 29,297 thousand, US\$ 20,842 thousand and US\$ 14,998 thousand, respectively.

The other accounts receivable balance to FPJO as of June 30, 2024, December 31, 2023 and 2022 amounted to US\$ 7 thousand, Nil and Nil, respectively.

Saldo utang usaha pada FPJO pada 30 Juni 2024, 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Nihil, Nihil dan US\$ 674 ribu.

The trade accounts payable balance to FPJO as of June 30, 2024, December 31, 2023 and 2022 amounted to Nil, Nil and US\$ 674 thousand, respectively.

b. PT Nusa Halmahera Minerals (NHM)

b. PT Nusa Halmahera Minerals (NHM)

Pada tanggal 23 September 2022, Perusahaan dan NHM menandatangani perjanjian operasi bersama pertambangan untuk periode satu tahun dengan nilai kontrak sebesar Rp 133.890 juta (setara dengan US\$ 8.906 ribu).

On September 23, 2022, the Company and NHM signed mining joint operation agreement for one year with a contract value of Rp 133,890 million (equivalent to US\$ 8,906 thousand).

Pendapatan yang berasal dari jasa pertambangan tersebut untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2024 dan 2023 sebesar Nihil dan US\$ 3.464 ribu serta untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar US\$ 8.124 ribu dan US\$ 8.367 ribu.

Revenue from mining services for the six-month periods ended June 30, 2024 and 2023 amounted to Nil and US\$ 3,464 as well as for the years ended December 31, 2023 and 2022 amounted to US\$ 8,124 thousand and US\$ 8,367 thousand.

Biaya atas jasa operasi pertambangan untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebesar Nihil dan US\$ 3.204 ribu serta untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar US\$ 9.619 ribu dan US\$ 3.652 ribu.

Cost from mining operation for the six-month periods ended June 30, 2024 and 2023 amounted to Nil and US\$ 3,204 thousand as well as for the years ended December 31, 2023 and 2022 amounted to US\$ 9,619 thousand and US\$ 3,652 thousand.

c. PT Kideco Jaya Agung (KJA)

c. PT Kideco Jaya Agung (KJA)

Pada tanggal 14 Desember 2022, Perusahaan dan PT Kideco Jaya Agung menandatangani amendemen ke-10 atas Kontrak Pemindahan Tanah Penutup dan Produksi Batubara perihal target volume produksi 2023 sebesar 62.143 juta bcm untuk tanah penutup, 12.807 juta ton untuk batubara, serta perubahan ketentuan harga.

On December 14, 2022, the Company and PT Kideco Jaya Agung signed the 10th amendment to the Overburden Removal and Coal Production Contract regarding the 2023 production volume target of 62,143 million bcm for overburden, 12,807 million tonnes for coal, as well as changes in price.

Pada 29 November 2021, Perusahaan dan PT Kideco Jaya Agung telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama Pekerjaan Pembangunan Settling Pond di Tanah Merah *Coal Terminal* dengan durasi pekerjaan dari 28 September 2021 sampai dengan 28 Maret 2022 senilai Rp 26,5 miliar (setara dengan US\$ 1,85 juta). Berdasarkan kesepakatan para pihak, perjanjian tersebut diperpanjang dan diselesaikan pada tanggal 30 Juni 2022. Tidak terdapat perpanjangan atas kontrak ini.

On November 29, 2021, the Company and PT Kideco Jaya Agung have signed a Cooperation Agreement for the Construction of Settling Pond at Tanah Merah Coal Terminal with a duration of work from September 28, 2021 to March 28, 2022, worth Rp 26.5 billion (equivalent to US\$ 1.85 million). Based on mutually agreed of the parties, the agreement is extended and completed on June 30, 2022. There is no extension of related contract.

Perusahaan dan PT Kideco Jaya Agung telah menandatangani amendemen ke-10 atas Kontrak Pemindahan Tanah Penutup dan Produksi Batubara, perihal target volume produksi 2023 sebesar 62.143 juta bcm untuk tanah penutup, 12.807 juta ton untuk batubara, serta perubahan ketentuan harga.

The Company and PT Kideco Jaya Agung are have signed the 10th amendment to the Overburden Removal and Coal Production Contract, regarding the 2023 production volume target of 62,143 million bcm for overburden, 12,807 million tonnes for coal, as well as changes in price.

Pendapatan yang berasal dari jasa pertambangan tersebut untuk periode dari tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 28 Juli 2022 adalah sebesar US\$ 98.052 ribu (Catatan 25).

Revenue from mining services for the period from January 1, 2022 up to July 28, 2022 amounted to US\$ 98,052 thousand (Note 25).

d. PT Indika Energy Tbk (IE)

Pada tanggal 16 Februari 2015, Perusahaan menandatangani kerjasama sewa bangunan yang berlokasi di Tangerang Selatan dengan IPI dan IE dengan jangka waktu sewa selama 6 tahun. Perusahaan menyewa ruang perkantoran seluas 5.931 m2 dengan biaya rental per bulan sebesar US\$ 15/m2. Perjanjian sewa menyewa yang disetujui dengan IPI dan IE telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir tanggal 1 Juli 2022 berkaitan dengan perpanjangan jangka waktu sewa sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 dengan opsi perpanjangan untuk 2 (dua) tahun berikutnya dan penambahan luas ruang perkantoran yang disewa menjadi 6.503 m2.

Beban yang berasal dari transaksi ini, disajikan sebagai bagian dari beban depresiasi dan sewa. Beban depresiasi dan sewa untuk periode dari tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 28 Juli 2022 masing-masing adalah sebesar Nihil dan US\$ 611 ribu.

e. PT Indy Property Indonesia (IPI)

Perjanjian sewa menyewa yang disetujui dengan IPI dan IE telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir tanggal 1 Juli 2022 berkaitan dengan perpanjangan jangka waktu sewa sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 dengan opsi perpanjangan untuk 2 (dua) tahun berikutnya, penambahan luas ruang perkantoran yang disewa menjadi 6.503 m2, dan perubahan pada service charges sebesar Rp 110.000/m2 semi gross per bulan.

Beban yang berasal dari transaksi ini, disajikan sebagai bagian dari beban administrasi. Beban administrasi untuk periode dari tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 28 Juli 2022 adalah sebesar US\$ 384 ribu.

f. Chiyoda-Saipem-Tripatra-SAE (CSTS) Joint Operation

Pada 4 Agustus 2022, Perusahaan menandatangani Amendemen No. 10 untuk kontrak *Loading Unloading & Storage Services* at POSB Sorong dengan CSTS Joint Operation untuk periode 1 bulan senilai Rp 8 miliar (setara dengan US\$ 0,54 juta) sehingga total nilai kontrak sebesar Rp 329 miliar (setara dengan US\$ 22,06 juta). Kontrak tersebut berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Pada 28 Desember 2022, Perusahaan menandatangani Amendemen No. 11 untuk kontrak *Loading Unloading & Storage Services* at POSB Sorong dengan CSTS Joint Operation untuk periode 7 bulan senilai Rp 786 juta (setara dengan US\$ 50,19 ribu) sehingga total nilai kontrak sebesar Rp 330 miliar (setara dengan US\$ 21,07 juta). Kontrak tersebut berakhir pada tanggal 31 Juli 2023.

d. PT Indika Energy Tbk (IE)

On February 16, 2015, the Company signed lease agreement for building located at South Tangerang with IPI and IE with a lease term of 6 years. The Company leased an office space of 5,931 sqm with a monthly rental fee of US\$ 15/sqm. The lease agreement with IPI and IE has been amended several times with the last change dated July 1, 2022 relating extension of the lease term until December 31, 2023 with an option to extend for the next 2 (two) years and increase the area of office space for rent to 6,503 sqm.

Expenses from such transactions were presented as part of depreciation and rent expenses. Depreciation and rent expenses for the period from January 1, 2022 up to July 28, 2022 amounted to Nil and US\$ 611 thousand, respectively.

e. PT Indy Property Indonesia (IPI)

The lease agreement with IPI and IE has been amended several times with the last change dated July 1, 2022 relating to extension of the lease term until December 31, 2023 with an option to extend for the next 2 (two) years, increase the area of office space for rent to 6,503 m2 changes in service charges to Rp 110,000/m2 semi gross monthly.

Expenses from such transactions were presented as part of administration expenses. Administration expenses for the period from January 1, 2022 up to July 28, 2022 amounted to US\$ 384 thousand.

f. Chiyoda-Saipem-Tripatra-SAE (CSTS) Joint Operation

On August 4, 2022, the Company executed an Amendment No. 10 to Loading Unloading & Storage Services Contract at POSB Sorong with CSTS Joint Operation for a 1-month period amounted to Rp 8 billion (equivalent to US\$ 0.54 million) therefore the total contract value is Rp 329 billion (equivalent to US\$ 22.06 million). The contract ended on December 31, 2022.

On December 28, 2022, the Company executed an Amendment No. 11 to Loading Unloading & Storage Services Contract at POSB Sorong with CSTS Joint Operation for a 7-month period amounted to Rp 786 million (equivalent to US\$ 50.19 thousand) therefore the total contract value is Rp 330 billion (equivalent to US\$ 21.07 million). The contract ended on July 31, 2023.

Pendapatan dari jasa ini untuk periode dari tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 28 Juli 2022 adalah sebesar US\$ 650 ribu.

g. Interport Mandiri Utama (IMU)

Pada 27 Januari 2023, Perusahaan menandatangani Amendemen No. 5 untuk perjanjian konsultasi manajemen dan perjanjian sistem manajemen dengan Interport Mandiri Utama untuk periode 12 bulan dengan *Service Rate* sebesar Rp 600 juta per bulan. Kontrak berakhir pada 31 Desember 2023.

Beban atas transaksi ini dicatat sebagai bagian dari beban administrasi. Beban administrasi untuk periode dari tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 28 Juli 2022 adalah sebesar US\$ 636 ribu.

h. Indika Multi Niaga (IMN)

Pada 26 Januari 2022, Perusahaan menandatangani Amendemen No. 2 perjanjian tingkat layanan untuk *Integrated Freight Forwarding* Sorong-Surabaya dengan IMN untuk periode 8 bulan. Kontrak berakhir pada 30 Juni 2022.

Pada 6 September 2022, Perusahaan menandatangani Amendemen No. 3 perjanjian tingkat layanan untuk *Integrated Freight Forwarding* Sorong-Surabaya dengan IMN untuk periode 3 bulan. Kontrak berakhir pada 30 September 2022.

Biaya atas jasa tersebut untuk periode dari tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 28 Juli 2022 adalah sebesar US\$ 51 ribu. Tidak terdapat perpanjangan atas kontrak ini.

i. PT Masmindo Dwi Area (MDA)

Pada tanggal 26 Juli 2022, Perusahaan dan PT Masmindo Dwi Area telah menandatangani Perjanjian untuk Pekerjaan: (i) *Engineering, Procurement and Construction* ('EPC') dengan Nilai Kontrak sebesar Rp 1.238 miliar (setara dengan US\$ 78.671 ribu) dan (ii) *Construction and Project Management Works* ('CPM') dengan nilai kontrak sebesar Rp 1.658 miliar (setara dengan US\$ 105.418 ribu). Pekerjaan dimulai pada tanggal 3 Januari 2023 dengan durasi pekerjaan selama 27 bulan.

Pendapatan yang berasal dari jasa ini untuk periode dari tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 28 Juli 2022 adalah sebesar US\$ 636 ribu.

Revenue from such services for the period from January 1, 2022 up to July 28, 2022 amounted to US\$ 650 thousand.

g. Interport Mandiri Utama (IMU)

On January 27, 2023, the Company executed an Amendment No. 5 to management consulting agreement and management system agreement with Interport Mandiri Utama for a 12-month period with the Service Rate in amount of Rp 600 million. The Contract ended on December 31, 2023.

Expenses from such transactions were presented as part of administration expenses. Administration expenses for the period from January 1, 2022 up to July 28, 2022 amounted to US\$ 636 thousand.

h. Indika Multi Niaga (IMN)

On January 26, 2022, the Company executed an Amendment No. 2 to service level agreement for *Integrated Freight Forwarding* Sorong-Surabaya with IMN for an 8-month period. The Contract ended on June 30, 2022.

On September 6, 2022, the Company executed an Amendment No. 3 to service level agreement for *Integrated Freight Forwarding* Sorong-Surabaya with IMN for an 8-month period. The Contract ended on September 30, 2022.

Cost for these services for the period from January 1, 2022 up to July 28, 2022 amounted to US\$ 51 thousand. There is no extension of related contract.

i. PT Masmindo Dwi Area (MDA)

On July 26, 2022, the Company and PT Masmindo Dwi Area have executed an Agreement for the Works: (i) *Engineering, Procurement and Construction* ('EPC') with the Contract Value of Rp 1,238 billion (equivalent to US\$ 78,671 thousand) and (ii) *Construction and Project Management Works* ('CPM') with the Contract Value of Rp 1,658 billion (equivalent to US\$ 105,418 thousand). The work was commenced on January 3, 2023 with 27 months duration of the works.

Revenue from such services for the periods from January 1, 2022 up to July 28, 2022 amounted to US\$ 636 thousand.

j. PT Pusat Sarana Baruna (PTPSB)

Pada 11 Februari 2022, Perusahaan menandatangani Amendemen No. 1 perjanjian penyediaan layanan jasa logistik dengan PTPSB untuk periode 60 bulan dengan nilai kontrak sebesar Rp 4,5 miliar (setara dengan US\$ 313 ribu). Kontrak akan berakhir pada 30 September 2026.

Biaya atas jasa tersebut untuk periode dari tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 28 Juli 2022 adalah sebesar US\$ 81 ribu.

k. Remunerasi Komisaris dan Direksi

Remunerasi Komisaris dan Direksi (semuanya imbalan jangka pendek) untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2024 dan 2023 serta tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	2024 (Enam bulan)/ (Six-month) US\$ '000	2023 (Enam bulan)/ (Six-month) (Tidak diaudit)/ (Unaudited) US\$ '000	2023 (Satu tahun)/ (One year) US\$ '000	2022 (Satu tahun)/ (One year) US\$ '000	
Direksi	575	1.642	2.926	1.985	Directors
Komisaris	256	890	1.716	743	Commissioners
Jumlah	831	2.532	4.642	2.728	Total

Beberapa Komisaris dan Direksi mendapatkan tambahan tunjangan lainnya, seperti penggunaan kendaraan dinas yang tidak termasuk dalam remunerasi di atas.

Rangkuman dari saldo dan transaksi-transaksi dengan pihak-pihak berelasi dari Grup adalah sebagai berikut:

	30 Juni/ June 30, 2024 US\$ '000	31 Desember/ Desember 31, 2023 US\$ '000	31 Desember/ Desember 31, 2022 US\$ '000	
Piutang Usaha (Catatan 6a)				Trade Accounts Receivable (Note 6a)
FPJO	29.297	20.842	14.998	FPJO
NHM	-	-	8.873	NHM
Jumlah	29.297	20.842	23.871	Total
Persentase terhadap jumlah aset konsolidasian	3,98%	2,86%	4,00%	As a percentage of total consolidated assets
Piutang Lain-lain (Catatan 6b)				Other Accounts Receivable (Note 6b)
FPJO	7	-	-	FPJO
Persentase terhadap jumlah aset konsolidasian	0,00%	-	-	As a percentage of total consolidated assets
Utang Usaha (Catatan 18)				Trade Accounts Payable (Note 18)
FPJO	-	-	674	FPJO
Persentase terhadap jumlah liabilitas konsolidasian	-	-	0,23%	As a percentage of total consolidated liabilities

j. PT Pusat Sarana Baruna (PTPSB)

On February 11, 2022, the Company executed an Amendment No. 1 to Logistic Support Service Agreement with PTPSB for a 60-month period with contract value in amount of Rp 4.5 billion (equivalent to US\$ 313 thousand). The contract will end on September 30, 2026.

Cost for these services for the period from January 1, 2022 up to July 28, 2022 amounted to US\$ 81 thousand.

k. Commissioners and Directors' remuneration

Commissioners and Directors' remuneration (all short-term benefits) for the six-month periods ended June 30, 2024 and 2023, as well as for the years ended December 31, 2023 and 2022 are as follows:

Certain Commissioners and Directors are entitled to other benefits, such as the use of the Company's vehicles which are not included in the above remuneration.

Summary of balances and transactions with the Group's related parties are as follows:

	2024 (Enam bulan/ (Six-month) (Six-month) US\$ '000	2023 (Enam bulan/ (Tidak diaudit/ (Unaudited) US\$ '000	2023 (Satu tahun/ (One year) US\$ '000	2022 (Satu tahun/ (One year) US\$ '000	
Pendapatan (Catatan 25)					Revenue (Note 25)
FPJO	36.028	27.687	64.524	29.687	FPJO
KJA	-	-	-	98.052	KJA
NHM	-	3.464	8.124	8.367	NHM
CSTS	-	-	-	650	CSTS
MDA	-	-	-	636	MDA
Jumlah	36.028	31.151	72.648	137.392	Total
Persentase terhadap jumlah pendapatan konsolidasian	11,33%	11,37%	12,58%	28,84%	As a percentage of total consolidated revenue
Beban Usaha Langsung dan Beban					Direct Cost and Expenses
FPJO	30.882	21.781	53.949	16.059	FPJO
NHM	-	3.464	8.124	8.367	NHM
IPI	-	-	-	384	IPI
IMN	-	-	-	51	IMN
PTPSB	-	-	-	81	PTPSB
Jumlah	30.882	25.245	62.073	24.942	Total
Persentase terhadap jumlah beban usaha langsung dan beban konsolidasian	10,16%	9,95%	11,45%	6,00%	As a percentage of total consolidated direct cost and expenses

Kebijakan harga Grup untuk transaksi dengan pihak berelasi ditetapkan berdasarkan pada harga di dalam kontrak.

The Group's pricing policy for transactions with related parties is set based on contracted prices.

36. PELAPORAN SEGMENT

Grup menggolongkan segmen usaha dalam tiga segmen utama yaitu pertambangan, penyediaan jasa, rekayasa dan konstruksi.

Segmen pertambangan meliputi kontrak pertambangan secara menyeluruh mulai dari pengupasan lapisan penutup tanah, pengeboran, peledakan, pengangkutan, penggalian, jasa penambangan, kerja sama pertambangan dan penjualan batubara.

Segmen jasa meliputi penyediaan fasilitas pangkalan logistik dan jasa pelabuhan.

Segmen rekayasa dan konstruksi menyediakan layanan multidisiplin yang menyeluruh di bidang jasa rekayasa, pengadaan dan konstruksi untuk minyak dan gas bumi (daratan dan lepas pantai), infrastruktur, industri dan manufaktur serta utilitas. Segmen ini juga termasuk penyediaan jasa tenaga kerja terlatih serta penyewaan alat berat dan peralatan.

36. SEGMENT REPORTING

The Group is organized into three principal business segments of mining, services, engineering and construction.

The mining segment covers comprehensive mining contract including overburden stripping, drilling, blasting, lifting, hauling, mine services, mine partnering and sales of coal.

The services segment covers supply base facilities and port services.

The engineering and construction segment provides a comprehensive range of multi-disciplinary engineering, procurement and construction services to oil and gas (onshore and offshore), infrastructure, industrial and manufacturing and utilities sectors. The segment also includes supply of skilled trade personnel and equipment hire services.

PT PETROSEA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2024 DAN 2023 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023 DAN 2022 – Lanjutan

PT PETROSEA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED
JUNE 30, 2024 AND 2023 (UNAUDITED)
AND THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2023 AND 2022 - Continued

	Pertambangan/ Mining			Rekayasa dan Konstruksi/ Engineering and Construction			Jasa/ Services			Tidak Dialokasikan/ Unallocated			Jumlah Konsolidasi/ Consolidated Amount								
	30 Juni/ June 30, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	30 Juni/ June 30, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	30 Juni/ June 30, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	30 Juni/ June 30, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	30 Juni/ June 30, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022						
Pendapatan dan Beban																Revenue and expenditures					
Pendapatan usaha	156.528	179.239	371.825	340.036	141.241	71.908	162.862	86.707	19.021	21.664	40.357	46.841	1.234	1.214	2.573	2.733	318.024	274.025	577.617	476.317	Segment revenues
Hasil segmen	(4.282)	11.478	20.242	49.175	21.691	10.248	22.971	15.119	1.011	1.128	2.766	1.990	(4.319)	(2.652)	(10.651)	(5.351)	14.101	20.202	35.328	60.933	Segment results
Penghasilan bunga	65	140	264	186	2	-	5	325	42	50	113	79	286	414	688	427	395	604	1.070	1.017	Interest income
Beban bunga dan keuangan	(9.409)	(5.780)	(17.088)	(5.139)	(3.395)	(998)	(2.308)	(923)	(467)	(174)	(406)	(299)	(77)	(214)	(3)	(1.060)	(13.348)	(7.166)	(19.805)	(7.421)	Interest expenses and finance charges
Beban pajak final	-	-	-	-	(3.965)	(882)	(4.323)	(855)	(78)	(88)	(98)	(88)	-	-	-	(1.756)	(4.043)	(970)	(4.421)	(2.699)	Final tax expense
Keuntungan dan kerugian lain-lain - bersih	3.051	2.252	4.040	(930)	2.803	-	20	-	255	(87)	(185)	1.174	(78)	(1.554)	-	(1.919)	6.031	611	3.875	(1.675)	Other gains and losses - net
Beban pajak penghasilan	(1.237)	(1.397)	(3.236)	(7.881)	-	-	-	-	(541)	(184)	(351)	(1.047)	165	(9)	(22)	(61)	(1.613)	(1.570)	(3.609)	(8.989)	Income tax expense
Laba bersih periode berjalan	(11.812)	6.693	4.222	35.411	17.136	8.368	16.365	13.666	222	665	1.839	1.809	(4.023)	(4.015)	(9.988)	(9.720)	1.523	11.711	12.438	41.166	Profit for the period
Beban non kas:																Noncash expenses:					
Penyusutan	(23.457)	(27.275)	(56.014)	(53.910)	(1.949)	(2.123)	(4.034)	(3.621)	(1.216)	(1.254)	(2.592)	(2.352)	(77)	(49)	(79)	(105)	(26.699)	(30.701)	(62.719)	(59.988)	Depreciation
Amortisasi	(4.929)	(2.139)	(7.226)	(2.932)	(774)	(762)	(1.538)	(1.258)	-	-	-	-	(565)	(186)	(547)	(280)	(6.268)	(3.087)	(9.311)	(4.470)	Amortization
Beban non-kas lainnya	(2.493)	(2.697)	(4.105)	(4.522)	(1.365)	(780)	(1.834)	(1.165)	(235)	(205)	(425)	(490)	-	(1.019)	-	(1.486)	(4.093)	(4.701)	(6.364)	(7.663)	Other non-cash expenses
	Pertambangan/ Mining			Rekayasa dan Konstruksi/ Engineering and Construction			Jasa/ Services			Tidak Dialokasikan/ Unallocated			Jumlah Konsolidasi/ Consolidated Amount								
	30 Juni/ June 30, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	30 Juni/ June 30, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	30 Juni/ June 30, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	30 Juni/ June 30, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	30 Juni/ June 30, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	30 Juni/ June 30, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022			
Informasi lainnya:																Other information:					
Aset tambang	2.325	2.497	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.325	2.497	-	-	-	Mining properties
Aset tetap - bersih	190.841	182.774	189.143	25.301	24.858	22.602	11.022	11.866	20.573	1.445	11.248	494	228.609	230.746	232.812	228.609	230.746	232.812	232.812	232.812	Property, plant and equipment - net
Aset hak guna	26.917	35.615	31.537	18	21	281	1.553	1.668	2.131	39	248	-	28.527	37.552	33.949	28.527	37.552	33.949	33.949	33.949	Right of use assets
Aset lainnya	234.348	294.278	235.340	211.461	128.896	60.009	28.478	31.940	32.418	1.847	2.036	1.892	476.134	457.150	329.659	476.134	457.150	329.659	329.659	329.659	Other assets
Jumlah aset	454.431	515.164	456.020	236.780	153.775	82.892	41.053	45.474	55.122	3.331	13.532	2.386	735.595	727.945	596.420	735.595	727.945	596.420	596.420	596.420	Total assets
Jumlah liabilitas	243.147	316.914	213.044	219.402	138.811	54.325	29.547	34.397	29.347	1.919	2.193	1.713	494.015	492.315	298.429	494.015	492.315	298.429	298.429	298.429	Total liabilities
Pengeluaran barang modal (termasuk aset tak- berwujud)	8.178	41.874	47.768	7.379	18.342	12.181	994	4.545	6.580	64	290	384	16.615	65.051	66.913	16.615	65.051	66.913	66.913	66.913	Capital expenditure (include intangible assets)

37. KOMITMEN DAN KONTRAK YANG SIGNIFIKAN

- a. Mulai 1 Januari 2011, Perusahaan memberikan jasa pemindahan tanah penutup dan penambangan batubara dan jasa konstruksi kepada Kideco Jaya Agung (KJA).

Pada tanggal 22 Oktober 2010, Perusahaan dan KJA, menandatangani Kontrak Perjanjian Pemindahan Tanah Penutup dan Produksi Batubara senilai US\$ 216 juta di SM Popor, Area Suara, Tambang Pasir, Kalimantan Timur. Perjanjian ini efektif mulai 1 Januari 2011 untuk jangka waktu lima tahun.

Pada tanggal 10 Mei 2013, Perusahaan dan KJA menandatangani Kontrak Sewa Peralatan (*Wet Rental*) di wilayah SM Popor, Area Suara, Tambang Pasir, Kalimantan Timur.

Baik perjanjian terkait Perjanjian Pemindahan Tanah Penutup dan Produksi Batubara maupun Kontrak Sewa Peralatan (*Wet Rental*) telah beberapa kali di amendemen. Perusahaan dan KJA menandatangani amendemen terakhir atas Perjanjian Pemindahan Tanah Penutup tersebut melalui amendemen ke-13 pada tanggal 20 Mei 2024 perihal perubahan volume kontrak, harga kontrak terbaru dan kompensasi lumpur, dimana target volume produksi untuk tahun 2024 sebesar 43.471 juta bcm untuk tanah penutup dan 11.238 juta ton untuk tonase batubara.

- b. Pada tanggal 15 Juni 2015, PTKPI mengadakan perubahan perjanjian untuk pemberian jasa kepada PT Freeport Indonesia yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2021. Berdasarkan perjanjian ini, PTKPI akan mengoperasikan dan memanfaatkan fasilitas yang dijelaskan dalam perjanjian hanya untuk pemberian jasa tersebut dan akan memberikan jasa secara eksklusif untuk kepentingan PT Freeport Indonesia. Sebagai kompensasi, PTKPI akan menerima sebagai berikut:

- Beban PTKPI yang akan diganti terdiri dari semua *cash costs, expenses, charges, fees*, dan jumlah lain, baik *capital, ordinary or extraordinary in nature*, kecuali *extraordinary expenses* seperti yang didefinisikan dalam perjanjian, yang dikeluarkan oleh PTKPI dalam menjalankan kegiatannya di bawah dan sehubungan dengan perjanjian tersebut.
- Biaya bulanan tetap atas pelabuhan dan jasa operasi sejumlah US\$ 142 ribu ditambah 7,5% dari biaya tenaga kerja langsung dari karyawan PTKPI yang dibayarkan secara langsung kepada karyawan atau sebagai biaya gaji terkait untuk bulan tersebut, dan insentif keamanan dengan jumlah sampai dengan 2,5% dari biaya yang disepakati. Insentif akan dihitung dan diakui bulanan dan dibayarkan setiap enam bulan.

37. COMMITMENTS AND SIGNIFICANT CONTRACTS

- a. Starting on January 1, 2011, the Company provided waste removal and coal production services and construction services to Kideco Jaya Agung (KJA).

On October 22, 2010, the Company and KJA, entered into a Contract Agreement for Waste Removal & Coal Production amounted to US\$ 216 million at SM Popor, Suara Area, Pasir Mine, East Kalimantan. This agreement is effective for five years commencing on January 1, 2011.

On May 10, 2013, the Company and KJA entered into Contract of Equipment Wet Rental at SM Popor Area, Suara Area, Pasir Mine, East Kalimantan.

Both agreements pertaining to Waste Removal & Coal Production and Contract of Equipment Wet Rental have been amended several times. The Company and KJA have signed the latest amendment of Waste Removal through the 13th amendment on May 20, 2024, regarding changes in contract volume, latest contract price rate and mud compensation, where the production volume target for 2024 is 43,471 million bcm for overburden and 11,238 million tonnes of coal tonnage.

- b. On June 15, 2015, PTKPI entered into an amendment to the service agreement with PT Freeport Indonesia, which valid until December 31, 2021. Under this agreement, PTKPI shall operate and utilize the facilities described in the agreement solely in connection with the performance of the service and shall perform the service exclusively for the benefit of PT Freeport Indonesia. As a compensation, PTKPI will receive the following:

- PTKPI's reimbursable expenses consist of all cash costs, expenses, charges, fees and other amounts, whether capital, ordinary or extraordinary in nature, excluding extraordinary expenses as defined in the agreement, incurred by PTKPI in carrying out its activities under and in connection with the agreement.
- Port and operating services fee shall be fixed monthly amount of US\$ 142 thousand plus an amount equal to 7.5% of direct labor costs of the PTKPI's employees that are paid either directly to employees or as payroll related costs for the month (agreed costs), and safety incentive of an amount up to 2.5% of the agreed costs. The safety incentive will be calculated and accrued monthly and paid semiannually.

Pada tanggal 1 Januari 2020, berdasarkan surat pemberitahuan dari PT Freeport Indonesia tanggal 22 Oktober 2019, dilakukan pengurangan biaya bulanan tetap atas pelabuhan dan jasa operasi dari sebesar US\$ 142 ribu menjadi US\$ 42 ribu. Pada tahun 2021, biaya bulanan tetap atas pelabuhan dan jasa operasi disesuaikan kembali menjadi sebesar US\$ 142 ribu. Tidak terdapat perubahan atas manfaat lainnya yang diperoleh PTKPI dari PT Freeport Indonesia.

Pada 27 Desember 2023, PTKPI dan PT Freeport Indonesia telah menandatangani perpanjangan perjanjian jasa sampai dengan 31 Agustus 2025.

- c. Pada tanggal 23 Juni 2017, Perusahaan dan BP Berau Ltd. telah menandatangani Kontrak untuk Jasa *Supply Base services* di Sorong. Nilai kontrak adalah sebesar Rp 734 miliar (setara dengan US\$ 52 juta) dengan masa kontrak selama 5 tahun sampai dengan 22 Juni 2022, dengan opsi perpanjangan tiap tahun selama 3 tahun setelah durasi kontrak.

Pada tanggal 22 Juni 2023, kedua belah pihak telah menandatangani Perubahan No. 5 atas perjanjian ini dengan tambahan nilai kontrak sebesar Rp 73,4 miliar (setara dengan US\$ 4,7 juta) sehingga total nilai kontrak sebesar Rp 807,6 miliar (setara dengan US\$ 52 juta).

Pada tanggal 1 Juni 2024, kedua belah pihak telah menandatangani Perubahan No. 6 atas perjanjian ini. Perjanjian ini akan berakhir sampai dengan 22 Juni 2025.

- d. Pada tanggal 24 Mei 2017, Perusahaan dan PT Freeport Indonesia menandatangani *Master Services Agreement* untuk jasa pertambangan *Grasberg Wanagon* di Papua. Nilai kontrak adalah sebesar US\$ 44 juta dengan masa kontrak selama 25 bulan yang terdiri dari 5 *Work Assignment*.

Pada tanggal 22 September 2023, kedua belah pihak setuju untuk memperpanjang masa kontrak hingga tanggal 31 Maret 2025.

Pada tanggal 5 Oktober 2023, kedua belah pihak setuju untuk memperpanjang masa kontrak hingga tanggal 31 Desember 2025.

- e. Pada tanggal 15 Juni 2022, Perusahaan dan PT Freeport Indonesia telah menandatangani dokumen Perjanjian untuk Proyek *Levee Stockpile Project Extension* dengan nilai kontrak sebesar US\$ 125,16 juta. Proyek ini memiliki durasi penyelesaian hingga tanggal 30 Juni 2026.

On January 1, 2020, based on the notification letter from PT Freeport Indonesia dated October 22, 2019, there was a cost reduction of port and operating services fee from US\$ 142 thousand to US\$ 42 thousand. In 2021, the cost of port and operating services fee was adjusted back to US\$ 142 thousand. There is no change in other benefit that the PTKPI obtain from PT Freeport Indonesia.

On December 27, 2023, PTKPI and PT Freeport Indonesia have executed the extension of service agreement until August 31, 2025.

- c. On June 23, 2017, the Company and BP Berau Ltd. entered into Contract for Sorong Supply Base Services. The contract value is Rp 734 billion (equivalent to US\$ 52 million) with contract duration for 5 years valid until June 22, 2022, with option to extend annually up to 3 years after the contract duration.

On June 22, 2023, both parties executed an Amendment No. 5 to this contract with additional value amounted to Rp 73.4 billion (equivalent to US\$ 4.7 million) therefore the total contract value is Rp 807.6 billion (equivalent to US\$ 52 million).

On June 1, 2024, both parties executed a Amendment No. 6 to this contract. The contract will be ended on June 22, 2025.

- d. On May 24, 2017, the Company and PT Freeport Indonesia entered into Master Services Agreement for Grasberg Wanagon Mining Services in Papua. The contract value is US\$ 44 million with contract duration for 25 months which consist of 5 Work Assignments.

On September 22, 2023, both parties have agreed to extend the contract until March 31, 2025.

On October 5, 2023, both parties have agreed to extend the contract up to December 31, 2025.

- e. On June 15, 2022, the Company and PT Freeport Indonesia have executed the document of Agreement for Levee Stockpile Project Extension with contract value is US\$ 125.16 million. This Project has a duration for completion up to June 30, 2026.

Perjanjian telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir diamendemen dengan kontrak No. 015 yang memberikan tambahan nilai kontrak sebesar US\$ 846,65 ribu.

The agreement has been amended several times, most recently with amendment No. 015, which provides an additional contract value amounted to US\$ 846.65 thousand.

Pada tanggal 31 Agustus 2023, Perusahaan dan PT Freeport Indonesia telah menandatangani amendemen kontrak No. 016. Amendemen ini memberikan tambahan nilai kontrak sebesar US\$ 523,37 ribu.

On August 31, 2023, the Company and PT Freeport Indonesia has executed the contract amendment No. 016. This amendment provides an additional contract value in the amount of US\$ 523.37 thousand.

Pada tanggal 28 November 2023, Perusahaan dan PT Freeport Indonesia telah menandatangani amendemen kontrak No. 017. Amendemen ini memberikan tambahan nilai kontrak sebesar US\$ 1.483,75 ribu.

On November 28, 2023, the Company and PT Freeport Indonesia has executed the contract amendment No. 017. This amendment provides an additional contract value in the amount of US\$ 1,483.75 thousand.

Pada tanggal 27 Maret 2024, Perusahaan dan PT Freeport Indonesia telah menandatangani amendemen kontrak No. 018. Amendemen ini memberikan tambahan nilai kontrak sebesar US\$ 856,77 ribu.

On March 27, 2024, the Company and PT Freeport Indonesia has executed the contract amendment No. 018. This amendment provides an additional contract value in the amount of US\$ 856.77 thousand.

- f. Pada tanggal 10 April 2018, Perusahaan dan CSTS Joint Operation menandatangani Perjanjian Penyediaan Jasa Pemuatan & Pembongkaran dan Penyimpanan di POSB Sorong dengan nilai kontrak sebesar Rp 14,3 miliar (setara dengan US\$ 872 ribu). Pada tanggal 17 Februari 2020, Perusahaan dan CSTS Joint Operation telah menandatangani Amendemen No. 5 atas perjanjian tersebut dengan nilai kontrak menjadi Rp 236 miliar (setara dengan US\$ 16,7 juta).

- f. On April 10, 2018, the Company and CSTS Joint Operation entered into Agreement for Provision of Loading Unloading and Storage at POSB Sorong with a contract value of Rp 14.3 billion (equivalent to US\$ 872 thousand). On February 17, 2020, the Company and CSTS Joint Operation agreed an Amendment No. 5 to the agreement, which amend the contract value to Rp 236 billion (equivalent to US\$ 16.7 million).

Pada 30 Maret 2023, Perusahaan menandatangani Amendemen No. 12 untuk kontrak *Loading Unloading & Storage Services* di POSB Sorong dengan CSTS Joint Operation senilai Rp 2,3 miliar (setara dengan US\$ 148 ribu). Perjanjian ini berakhir pada tanggal 31 Juli 2023.

On March 30, 2023, the Company executed an Amendment No. 12 to Loading Unloading & Storage Services Contract at POSB Sorong with CSTS Joint Operation valued Rp 2.3 billion (equivalent to US\$ 148 thousand). The contract ended on July 31, 2023.

Pada tanggal 12 Juli 2023, kedua belah pihak menandatangani Perubahan No. 13 atas perjanjian kontrak *Loading Unloading & Storage Services* di POSB Sorong dengan tambahan nilai kontrak sebesar Rp 1,6 miliar (setara dengan US\$ 103 ribu). Perjanjian ini berakhir pada tanggal 31 Oktober 2023.

On July 12, 2023, both parties executed an Amendment No. 13 to Loading Unloading & Storage Services Contract at POSB Sorong with additional valued Rp 1.6 billion (equivalent to US\$ 103 thousand). The contract ended on October 31, 2023.

Pada tanggal 17 November 2023, kedua belah pihak telah menandatangani Perubahan No. 14 atas perjanjian *Loading Unloading & Storage Services Contract* di POSB Sorong dengan tambahan nilai kontrak sebesar Rp 808 juta (setara dengan US\$ 52 ribu). Perjanjian ini berakhir pada 31 Desember 2023.

On November 17, 2023, both parties executed an Amendment No. 14 to Loading Unloading & Storage Services Contract at POSB Sorong with additional valued Rp 808 million (equivalent to US\$ 52 thousand). The contract ended on December 31, 2023.

Pada tanggal 9 Januari 2024, kedua belah pihak telah menandatangani Perubahan No. 15 atas perjanjian *Loading Unloading & Storage Services Contract* di POSB Sorong dengan tambahan nilai kontrak sebesar Rp 1,04 miliar (setara dengan US\$ 67 ribu). Perjanjian ini berakhir pada 31 Maret 2024.

On January 9, 2024, both parties executed an Amendment No. 15 to Loading Unloading & Storage Services Contract at POSB Sorong with additional valued Rp 1.04 billion (equivalent to US\$ 67 thousand). The contract ended on March 31, 2024.

Pada tanggal 2 April 2024, kedua belah pihak telah menandatangani Perubahan No. 16 atas perjanjian *Loading Unloading & Storage Services Contract* di POSB Sorong dengan tambahan nilai kontrak sebesar Rp 0,97 miliar (setara dengan US\$ 59 ribu). Perjanjian ini berakhir pada 30 Juni 2024.

On April 2, 2024, both parties executed an Amendment No. 16 to Loading Unloading & Storage Services Contract at POSB Sorong with additional valued Rp 0.97 billion (equivalent to US\$ 59 thousand). The contract ended on June 30, 2024.

Pada tanggal 1 Juli 2024, kedua belah pihak telah menandatangani Perubahan No. 17 atas perjanjian *Loading Unloading & Storage Services Contract* di POSB Sorong dengan tambahan nilai kontrak sebesar Rp 0,22 miliar (setara dengan US\$ 13,5 ribu). Perjanjian ini berakhir pada 31 Juli 2024.

On July 1, 2024, both parties executed an Amendment No. 17 to Loading Unloading & Storage Services Contract at POSB Sorong with additional valued Rp 0.22 billion (equivalent to US\$ 13.5 thousand). The contract ended on July 31, 2024.

Pada tanggal 8 Agustus 2024, kedua belah pihak telah menandatangani Perubahan No. 18 atas perjanjian *Loading Unloading & Storage Services Contract* di POSB Sorong dengan tambahan nilai kontrak sebesar Rp 0,2 miliar (setara dengan US\$ 12,1 ribu) sehingga jumlah nilai kontrak sebesar Rp 337,5 miliar (setara dengan US\$ 20,56 juta). Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian interim, kedua belah pihak masih dalam proses komunikasi perpanjangan kontrak ini.

On August 8, 2024, both parties executed an Amendment No. 18 to Loading Unloading & Storage Services Contract at POSB Sorong with additional valued Rp 0.2 billion (equivalent to US\$ 12.1 thousand) therefore the total contract value is Rp 337.5 billion (equivalent to US\$ 20.56 million). As of the issuance date of the interim consolidated financial statement, both parties are still in the process of communication the extension of this contract.

- g. Pada tanggal 27 September 2019, Perusahaan menandatangani perjanjian konsultasi manajemen dengan IMU untuk menyediakan jasa tenaga kerja dalam melaksanakan bisnis jasa logistik dan jasa pendukung lainnya. Di bulan yang sama, Perusahaan juga memasuki perjanjian sistem manajemen di mana IMU akan menyediakan *platform* sistem manajemen yang terpadu mencakup Standar Kualitas & SHE, Sistem Audit, Program Peningkatan Berkesinambungan, Pemantauan Sistem Kinerja Karyawan, Daftar Izin dan Sistem Kepatuhan. Perjanjian ini akan diperpanjang setiap tahunnya.

- g. On September 27, 2019, the Company entered into a management consulting agreement with IMU to provide labor services in conducting logistics and support services business. In the same month, the Company also entered into management system agreement whereby IMU will provide integrated management system platform that includes but not limited to Quality & SHE Standards, Audit Systems, Continuous Improvement Programs, Employee Performance Monitoring Systems, Permit Lists and Compliance Systems. The agreement will be renewed every year.

Pada tanggal 27 Januari 2023, Perusahaan menandatangani Amendemen No. 5 untuk perjanjian konsultasi manajemen dan perjanjian sistem manajemen dengan Interport Mandiri Utama untuk periode 12 bulan dengan *Service Rate* sebesar Rp 600 juta (setara dengan US\$ 39 ribu) per bulan. Kontrak berakhir pada 31 Desember 2023 dan tidak terdapat perpanjangan atas kontrak ini.

On January 27, 2023, the Company executed an Amendment No. 5 to management consulting agreement and management system agreement with Interport Mandiri Utama for a 12-month period with the Service Rate amounted Rp 600 million (equivalent to US\$ 39 thousand) per month. The Contract ended on December 31, 2023 and there is no extension related to this contract.

- h. Pada tanggal 27 Juni 2021, Perusahaan, PT Masmindo Dwi Area dan PT Indika Energy Tbk sebagai penjamin pembayaran telah menandatangani *Umbrella Service Agreement* dengan durasi sampai dengan 31 Oktober 2021 di mana Perusahaan bertindak sebagai kontraktor untuk mengerjakan pekerjaan yang akan disepakati kemudian untuk memastikan progres implementasi Proyek Awak Mas.

Perjanjian telah mengalami beberapa kali amendemen. Amendemen terakhir pada tanggal 7 Oktober 2022, Perusahaan dan PT Masmindo Dwi Area juga telah menandatangani *Early Works Contract for The Construction and Project Management Works Contract* dengan nilai Rp 95.009 juta (setara dengan US\$ 6.040 ribu). Periode pekerjaan berdasarkan perjanjian adalah sampai dengan tanggal 31 Agustus 2025.

- i. Pada Desember 2020, Perusahaan menandatangani perjanjian jasa dengan MBN untuk menyediakan jasa *Marine Agency* di POSB Sorong. Kontrak tersebut telah diperpanjang dan telah berakhir pada 30 September 2023.

Pada 23 Oktober 2023, kedua belah pihak telah menandatangani Perubahan No. 3 atas perjanjian *Marine Agency* di POSB Sorong. Perjanjian ini berakhir pada 31 Maret 2024.

Pada 5 Desember 2023, kedua belah pihak telah menandatangani Perubahan No. 4 atas perjanjian *Marine Agency* di POSB Sorong. Perjanjian ini berakhir pada 30 Juni 2024. Perusahaan dan MBN telah mengakhiri kerja sama ini.

- j. Pada tanggal 29 Desember 2020, Perusahaan dan PT Kartika Selabumi Mining (KSM) dan PT Palm Mas Asri (sebagai pihak penjamin KSM) menandatangani Lembar Kesepakatan Jasa Pertambangan dengan volume produksi lapisan penutup tanah sebesar 80,1 juta bcm dan batubara sebesar 3,95 juta ton yang kemudian dialihkan kepada anak Perusahaan, PTKBL.

Pada tanggal 6 April 2021, PTKBL menandatangani *Mining Service Agreement* dengan KSM dan PT Palm Mas Asri sebagai pihak penjamin dari KSM. Perjanjian ini berlaku hingga tahun 2027.

Pada tanggal 6 April 2021, PTKBL menandatangani *Plant Hire Agreement* dengan KSM dan PT Palm Mas Asri sebagai pihak penjamin dari KSM untuk penyewaan peralatan bergerak dan penyediaan tenaga kerja di lokasi tambang KSM. Perjanjian ini berlaku hingga tahun 2027.

- h. On June 27, 2021, the Company, PT Masmindo Dwi Area and PT Indika Energy Tbk as payment guarantors have signed an *Umbrella Service Agreement* with a duration of up to October 31, 2021 in which the Company acts as a contractor to carry out work which will be agreed later in order to ensure the progress of the implementation of the Awak Mas Project.

The agreement has been amended several times. The latest amendment on October 7, 2022, the Company and PT Masmindo Dwi Area have signed the *Early Works Contract for The Construction and Project Management Works Contract* with the value of Rp 95,009 million (equivalent to US\$ 6,040 thousand). The period of the works based on the agreement is up to August 31, 2025.

- i. In December 2020, the Company entered into a service agreement with MBN to provide service for *Marine Agency* at POSB Sorong. The contract has been extended and ended on September 30, 2023.

On October 23, 2023, both parties executed an Amendment No. 3 to *Marine Agency Contract* at POSB Sorong. The contract ended on March 31, 2024.

On December 5, 2023, both parties executed Amendment No. 4 to *Marine Agency Contract* at POSB Sorong. The contract ended on June 30, 2024. The Company and IMU have terminated the cooperation.

- j. On December 29, 2020, the Company and PT Kartika Selabumi Mining (KSM) and PT Palm Mas Asri (as guarantor of KSM) has signed term-sheet of the mining services with production volume 80.1 million bcm of overburden and 3.95 million tonnes of coal which awarded to a subsidiary, PTKBL.

On April 6, 2021, PTKBL signed a *Mining Service Agreement* with KSM and PT Palm Mas Asri as guarantor of KSM. This agreement is valid until 2027.

On April 6, 2021, PTKBL signed a *Plant Hire Agreement* with KSM and PT Palm Mas Asri as guarantor of KSM for mobile plant and labor supply at KSM mine site. This agreement is valid until 2027.

Pada tanggal 2 Februari 2024, Perusahaan dan KSM menandatangani Perjanjian Penyediaan Jasa Pemetaan Topografi No. PTP/AGR/2024/II-0002. Tidak terdapat perpanjangan atas kontrak ini.

On February 2, 2024, the Company and KSM signed a Topography Provision Services Agreement No. PTP/AGR/2024/II-0002. There is no extension for this contract.

- k. Pada tanggal 3 Mei 2021, Perusahaan, PT Mekko Metal Mining (Mekko) dan PT Perkasa Investama Mineral (PIM) telah menandatangani Perjanjian Kerjasama untuk pengembangan proyek penambangan bauksit di mana PIM bertindak sebagai penjamin pembayaran Mekko. Selanjutnya pada tanggal 22 Juni 2021, Perusahaan dan PIM telah menandatangani Perjanjian Gadai Saham di mana PIM telah menjaminkan 51% kepemilikannya di Mekko kepada Perusahaan sebagai jaminan atas kewajibannya kepada Perusahaan.

- k. On May 3, 2021, the Company, PT Mekko Metal Mining (Mekko) and PT Perkasa Investama Mineral (PIM) have signed a Cooperation Agreement for the development of a bauxite mining project in which PIM acts as Mekko's payment guarantor. Furthermore, on June 22, 2021, the Company and PIM have signed a Share Pledge Agreement in which PIM has pledged 51% of its ownership in Mekko to the Company as collateral for its obligations to the Company.

Pada tanggal 15 Agustus 2022, Perusahaan, Mekko dan PIM menandatangani perubahan dan pernyataan kembali perjanjian awal, untuk Proyek Bauksit dengan nilai kontrak sebesar US\$ 94 juta. Perjanjian ini berlaku sampai dengan 5 tahun.

On August 15, 2022, the Company, Mekko and PIM signed an amendment and restatement of the original agreement, for the Bauxite Project with a contract value of US\$ 94 million. This agreement is valid for up to 5 years.

Pada tanggal 31 Agustus 2023, Perusahaan, Mekko dan PIM telah menandatangani Surat Pernyataan Pengakhiran Kerja Sama untuk Proyek Bauksit.

On August 31, 2023, the Company, Mekko and PIM have signed a Statement of Termination of Cooperation for the Bauxite Project.

Pada tanggal Oktober 30, 2023, 28 Juni dan 11 Juli 2024, Mekko telah membayar masing-masing sebesar Rp 31,9 miliar (setara dengan US\$ 2.000 ribu), Rp 1 miliar (setara dengan US\$ 60.898) dan Rp 32 miliar (setara dengan US\$ 1.944 ribu) sesuai dengan Surat Pernyataan Pengakhiran Kerja Sama untuk Proyek Bauksit.

On October 30, 2023, June 28 and July 11, 2024, Mekko has paid Rp 31.9 billion (equivalent to US\$ 2,000 thousand), Rp 1 billion (equivalent to US\$ 60,898) and Rp 32 billion (equivalent to US\$ 1,944 thousand), respectively, in accordance with the Statement of Termination of Cooperation for the Bauxite Project.

Perusahaan mendukung pengembangan pembangunan *smelter* sebesar US\$ 1 juta pada PT Perkasa Investama Mineral (PIM) di mana Perusahaan dapat menagihkan kembali biaya pengembangan tersebut atau dapat dikonversikan menjadi saham di anak perusahaan PIM, PT Perkasa Alumina Indonesia (PAI).

The Company supported the development of a smelter construction of US\$ 1 million at PT Perkasa Investama Mineral (PIM) where the Company could bill the development costs or converted into shares in PIM's subsidiary, PT Perkasa Alumina Indonesia (PAI).

- l. Pada tanggal 10 Oktober 2021, PTKBL menandatangani *Mining Service Agreement* dengan PT Hardaya Mining Energy (HME) dan PT Central Cipta Murdaya (CCM) sebagai pihak penjamin dari HME. Perjanjian ini berlaku hingga tanggal 31 Desember 2025.

- l. On October 10, 2021, PTKBL signed a Mining Service Agreement with PT Hardaya Mining Energy (HME) and PT Central Cipta Murdaya (CCM) as guarantor of HME. This agreement is valid until December 31, 2025.

- m. Pada tanggal 23 Maret 2022, Perusahaan dan PT Indo Bara Pratama (IBP) menandatangani *Term Sheet* untuk penyediaan Jasa Pertambangan.

- m. On March 23, 2022, the Company and PT Indo Bara Pratama (IBP) have signed Term Sheet for Mining Service.

Pada tanggal 15 September 2022, Perusahaan dan IBP menandatangani Kontrak Pekerjaan Jasa Pertambangan dengan durasi pekerjaan selama 5 tahun di Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur. Perusahaan akan menyediakan jasa pertambangan dan *project management*.

- n. Pada tanggal tanggal 31 Mei 2022, Perusahaan, PT Cipta Djaya Selaras Mining (CDSM) dan PT Agung Pratama Mineral (APM) telah menandatangani Perjanjian Jasa Pengembangan Infrastruktur tambang, Perusahaan sebagai kontraktor akan memberikan jasa pengembangan infrastruktur tambang dengan durasi pekerjaan selama 12 bulan dan nilai kontrak sebesar Rp 55 miliar (setara dengan US\$ 3,8 juta).

Pada tanggal 3 Juni 2022, Perusahaan, CDSM dan APM telah menandatangani Perjanjian Jasa Operasi Penambangan, di mana Perusahaan akan bertindak sebagai kontraktor untuk kegiatan operasi penambangan di lokasi proyek CDSM dengan ketentuan tanggal operasi penambangan akan dimulai setelah seluruh kondisi-kondisi dalam perjanjian telah terjadi. Perjanjian ini berlaku hingga Juli 2026. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian interim, kontrak ini masih dalam tahap reviu lebih lanjut.

- o. Pada tanggal 18 Juli 2022, Perusahaan dan PT Santana Rekso Nidhana (SRN) telah menandatangani Perjanjian Manajemen dan Pemeliharaan Pabrik Pengolahan *Tailing*, di mana Perusahaan akan bertindak sebagai kontraktor untuk membangun dan menyediakan pabrik pengolahan *tailing* yang beroperasi untuk menghasilkan emas. Jumlah nilai kontrak adalah sebesar US\$ 55 juta yang didasarkan pada Biaya Pembangunan Pabrik.

Ruang lingkup pekerjaan meliputi perizinan, tahapan sebelum konstruksi pabrik pengolahan, tahapan konstruksi dan tahapan operasi. Perjanjian berlaku untuk jangka waktu 52 bulan sejak tanggal efektif Pabrik Pengolahan beroperasi atau dapat memproduksi 263.000 oz *dore* emas dan perak, yang mana yang lebih dulu terjadi di mana para pihak bersepakat untuk membicarakan kembali kesepakatan jika produksi melebihi 263.000 oz *dore* emas.

Pada tanggal 28 September 2022, Perusahaan dan SRN menandatangani Amendemen dan Pernyataan Kembali Perjanjian Manajemen dan Pemeliharaan Pabrik Pengolahan *Tailing* sehubungan dengan kewajiban utama dan juga termin pembayaran antara Perusahaan dan SRN dengan nilai kontrak sebesar US\$ 130.892 ribu. Perjanjian ini berlaku selama 48 bulan sejak tanggal efektif Pabrik Pengolahan beroperasi.

On September 15, 2022, the Company and IBP have signed Mining Services Agreement with a duration of work for 5 years in Kutai Kertanegara Regency, East Kalimantan. The company will provide mining and project management services.

- n. On May 31, 2022, the Company, PT Cipta Djaya Selaras Mining (CDSM) and PT Agung Pratama Mineral (APM) have signed a Mining Infrastructure Development Services Agreement, the Company as a contractor will provide mining infrastructure development services with a work duration of 12 months and a contract value of Rp 55 billion (equivalent to US\$ 3.8 million).

On June 3, 2022, the Company, CDSM and APM have signed a Mining Operation Services Agreement, whereby the Company will act as a contractor for mining operations at the CDSM project site provided that the mining operation date will commence after all conditions in the agreement have occurred. This agreement is valid until July 2026. As of the issuance date of the interim consolidated financial statements, this contract is still on further review.

- o. On July 18, 2022, the Company and PT Santana Rekso Nidhana (SRN) signed a Tailings Treatment Plant Management and Maintenance Agreement, whereby the Company will act as contractor to build and provide a tailing processing plant that operates to produce gold. The total contract value is US\$ 55 million which is based on Factory Construction Costs.

The scope of work includes licensing, stages prior to construction of a processing plant, stages of construction and stages of operation. The agreement is valid for a period of 52 months from the effective date the Processing Plant operates or can produce 263,000 oz of gold and silver *dore*, whichever occurs first where the parties agreed to renegotiate the agreement if production exceeds 263,000 oz gold *dore*.

On September 28, 2022, the Company and SRN signed the Amendment and Restatement of the Tailings Treatment Plant Management and Maintenance Agreement in relation to the main obligations also payment terms between the Company and SRN with contract value of US\$ 130,892 thousand. This agreement is valid for 48 months from the effective date the Processing Plant operates.

Pada tanggal 4 Agustus 2023, Perusahaan dan SRN telah mendandatangani Perjanjian Penyelesaian atas Perjanjian Manajemen dan Pemeliharaan Pabrik Pengelolaan *Tailings*.

On August 4, 2023, the Company and SRN have signed a Settlement Agreement related to Tailings Treatment Plant Management and Maintenance Agreement.

- p. Pada tanggal 23 September 2022, Perusahaan dan PT Nusa Halmahera Mineral (NHM) menandatangani perjanjian operasi bersama pertambangan untuk periode satu tahun dengan nilai kontrak sebesar Rp 133.890 juta (setara dengan US\$ 8.906 ribu).

- p. On September 23, 2022, the Company and PT Nusa Halmahera Mineral (NHM) signed mining joint operation agreement for one year with a contract value of Rp 133,890 million (equivalent to US\$ 8,906 thousand).

Pada tanggal 4 Agustus 2023, Perusahaan dan NHM telah mendandatangani perjanjian penyelesaian operasi bersama pelaksanaan pertambangan *ore emas*.

On August 4, 2023, the Company and NHM have signed a settlement agreement of ore gold mining joint operation.

- q. Pada tanggal 20 September 2022, Perusahaan telah mendapatkan Proyek untuk Pekerjaan Tanah, Beton dan Utilitas yang Ditanam dari PT Freeport Manyar Refinery (FMR). Nilai total kontrak awal untuk Proyek ini adalah Rp 218,9 miliar (setara dengan US\$ 14,6 juta) dan telah mengalami beberapa penambahan kontrak menjadi sebesar Rp 365,9 miliar (setara dengan US\$ 23,3 juta) melalui beberapa Perintah Perubahan ("CO") dari FMR. Kontrak tersebut berlaku dari tanggal efektif hingga tanggal 19 Oktober 2023. Proyek ini diperpanjang hingga tanggal 7 Februari 2024, dan diperpanjang kembali hingga tanggal 9 Maret 2024 melalui Perubahan No. 001. Tidak ada perpanjangan atas kontrak ini.

- q. On September 20, 2022, the Company has awarded the Project for Earthworks, Concrete and Buried Utilities from PT Freeport Manyar Refinery (FMR). The initial total Value of the Contract for this Project is Rp 218.9 billion (equivalent to US\$ 14.6 million) and had several additional contracts reaching Rp 365.9 billion (equivalent to US\$ 23.3 million) through several Change Orders ("CO") from FMR. The contract shall be valid from the effective date up to October 19, 2023. This Project is extended up to February 7, 2024, and then re-extended up to March 9, 2024 through Amendment No. 001. There is no contract renewals related to this contract.

- r. Pada tanggal 6 Juni 2023 telah diterbitkan LNTP dari FMR kepada Perusahaan untuk tambahan paket pekerjaan CM002 - Struktural, Mekanikal, Perpipaan, Elektrikal dan Instrumen untuk *Main Process Building, Balance of Plant, dan High Security Building*. Nilai total LNTP ini adalah sebesar Rp 356.760 juta (setara dengan US\$ 23,1 juta). Nilai dari LNTP ini adalah sebagai bagian dari keseluruhan nilai kontrak dari paket pekerjaan tersebut, sebesar Rp 870,64 miliar (setara dengan US\$ 56,5 juta) dengan durasi penyelesaian pekerjaan hingga tanggal 30 Juni 2024.

- r. On June 6, 2023, LNTP has been released by FMR to Company for the additional work package of CM002 - Structural, Mechanical, Piping, Electrical and Instrument for Main Process Building, Balance of Plant, and High Security Building. The total amount of this LNTP is Rp 356,760 million (equivalent to US\$ 23.1 million). This LNTP value is as part of the whole of contract value of aforementioned work package, in the amount of Rp 870.64 billion (equivalent to US\$ 56.5 million) with the duration for completion of the work up to June 30, 2024.

Pada tanggal 28 November 2023, Dokumen Perjanjian untuk CM002 - Struktural, Mekanikal, Perpipaan, Elektrikal dan Instrumen untuk *Main Process Building, Balance of Plant, dan High Security Building* dengan nilai kontrak sebesar Rp 870,64 miliar (setara dengan US\$ 5.231 ribu) telah ditandatangani oleh Perusahaan dan FMR. Dokumen Perjanjian ini secara otomatis akan berlaku menggantikan dokumen LNTP sebagaimana disebutkan di atas.

On November 28, 2023, the Document of Agreement for CM002 - Structural, Mechanical, Piping, Electrical and Instrument for Main Process Building, Balance of Plant, and High Security Building with the contract value in the amount of Rp 870.64 billion (equivalent to US\$ 5,231 thousand) has been executed by the Company and FMR. This Document of Agreement shall automatically be valid to supersede the LNTP document as aforementioned above.

Pada tanggal 14 Desember 2023, Perusahaan dan FMR telah menandatangani dokumen *Change Order* No. 001 dengan jumlah nilai sebesar Rp 15,70 miliar (setara US\$ 1.018 ribu).

Pada tanggal 8 Januari 2024, Perusahaan dan FMR telah menandatangani dokumen *Change Order* No. 002 dengan jumlah nilai sebesar Rp 10,01 miliar (setara US\$ 649,5 ribu).

Pada tanggal 11 Maret 2024, Perusahaan dan FMR telah menandatangani dokumen *Change Order* No. 003 dengan jumlah nilai sebesar Rp 990,3 juta (setara US\$ 62,5 ribu).

Pada tanggal 17 April 2024, FMR telah menerbitkan dokumen *Change Order* No. 004 kepada Perusahaan dengan jumlah nilai sebesar Rp 308 miliar (setara dengan US\$ 18,8 juta).

Pada tanggal 7 Juli 2024, FMR telah menerbitkan dokumen *Change Order* No. 005 kepada Perusahaan dengan jumlah nilai sebesar Rp 411,37 miliar (setara dengan US\$ 25.051 ribu). Perjanjian ini berlaku sampai dengan tanggal 30 November 2024.

- s. Pada tanggal 21 Desember 2022, Perusahaan dan PTCEP telah menandatangani Perjanjian Operasi Bersama Pelaksanaan Pertambangan Batubara No. PTP/AGR/2022/XII-0105. Perusahaan akan memberikan jasa manajemen tambang dari *pit* ke *port* selama jangka waktu IUP PTCEP.

Pada tanggal 28 Juni 2023, Perusahaan dan PTCEP menandatangani Perjanjian Jasa Pertambangan No. PTP/AGR/2023/VIII-0005, dengan rencana produksi 456 juta bcm untuk tanah penutup dan 71,9 mt batubara.

- t. Pada tanggal 17 April 2023, Perusahaan dan PT Kedap Sayaq (KS) menandatangani surat perikatan untuk jasa konsultasi.

Pada tanggal 18 April 2023, Perusahaan dan KS telah menandatangani Perjanjian Jasa Pertambangan dengan volume penutup tanah 88.000 Kbcm dan tonase batubara 16.000 Kton. Perjanjian ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2028.

Pada tanggal 18 September 2023, Perusahaan dan KS telah menandatangani kontrak amendemen No. PTP/AGR/2023/IV-0003 dengan perubahan volume dan tarif 2023 yang berlaku dari Oktober – Desember 2023.

Pada tanggal 22 Maret 2024, Perusahaan dan KS telah menandatangani amendemen kedua atas perjanjian No. PTP/AGR/2023/IV-0003 dengan perubahan tarif, perubahan biaya infrastruktur dan mobilisasi/demobilisasi, dan penambahan pasal mengenai jaminan pembayaran.

On December 14, 2023, the Company and FMR has signed the document of *Change Order* No. 001 with the total value of Rp 15.70 billion (equivalent to US\$ 1,018 thousand).

On January 8, 2024, the Company and FMR has signed the document of *Change Order* No. 002 with the total value of Rp 10.01 billion (equivalent to US\$ 649.5 thousand).

On March 11, 2024, the Company and FMR has signed the document of *Change Order* No. 003 with the total value of Rp 990.3 million (equivalent to US\$ 62.5 thousand).

On April 17, 2024, FMR has release the document of *Change Order* No. 004 to the Company with the total value of Rp 308 billion (equivalent to US\$ 18.8 million).

On July 7, 2024, FMR has release the document of *Change Order* No. 005 to the Company with the total value of Rp 411.37 billion (equivalent to US\$ 25,051 million). This agreement is valid until November 30, 2024.

- s. On December 21, 2022, the Company and PTCEP have signed the Coal Mining Joint Operation Agreement No. PTP/AGR/2022/XII-0105. The Company will provide end to end mining management service from pit to port during the lifetime of PTCEP's IUP.

On June 28, 2023, the Company and PTCEP signed the Mining Service Agreement No. PTP/AGR/2023/VIII-0005, with production plan 456 million bcm for overburden dan 71.9 mt coal.

- t. On April 17, 2023, the Company and PT Kedap Sayaq (KS) signed the engagement letter for advisory services.

On April 18, 2023, the Company and KS have signed the Mining Service Agreement with 88,000 Kbcm of overburden volume and 16,000 Kton of coal tonnage. This agreement is valid until December 31, 2028.

On September 18, 2023, the Company and KS have signed contract amendment No. PTP/AGR/2023/IV-0003 with revised volume and rate 2023 valid October - December 2023.

On March 22, 2024, the Company and KS have signed the second amendment of the contract No. PTP/AGR/2023/IV-0003 with rates revision, infrastructure and mobilization/demobilization cost revision, and additional article related to payment guarantee.

- u. Pada tanggal 19 Juni 2023, PTCEP dan Flame Asia Resources Pte. Ltd. telah menandatangani Perjanjian Penjualan dan Pembelian Batubara Uap yang mana Perusahaan bertindak sebagai Pemohon. Kontrak tersebut mengisyaratkan bahwa dalam jangka waktu pengiriman pertama, PTCEP untuk menjual 750.000 mt batubara +/- 10% atas opsi pembeli dalam 12 angsuran bulanan dan dengan pengiriman individu (+/- 10% atas opsi pembeli per pengiriman), yang dijadwalkan secara tentatif sesuai kontrak.

Perjanjian diatas telah diakhiri dan digantikan dengan Perjanjian No. FAR2024079 yang ditandatangani pada tanggal 5 Juni 2024 antara PTCEP dan Flame Asia Resources Pte. Ltd terkait dengan Perjanjian Penjualan dan Pembelian Batubara Uap yang mana PTCEP bertindak sebagai pembeli. Jangka waktu Perjanjian ini sampai dengan 30 September 2024 dan pembeli menerima 4 pengiriman dengan maksimum kuantitas 264.707 mt.

- v. Pada tanggal 19 September 2023, Perusahaan dan PT Sumberdaya Arindo (SDA) telah menandatangani Perjanjian Jasa Operasi Penambangan, di mana Perusahaan akan bertindak sebagai kontraktor untuk kegiatan operasi penambangan di lokasi proyek SDA dengan nilai kontrak Rp 1.090 miliar (setara dengan US\$ 70.347 ribu). Perjanjian ini berlaku hingga 22 September 2026.
- w. Pada tanggal 16 November 2023, PTCEP dan PT Indonesia RuiPu Nickel Chrome Alloy (IRNC) telah menandatangani Perjanjian Penjualan dan Pembelian Batubara. Kontrak tersebut mengisyaratkan bahwa PTCEP menjual 47.000 mt batubara, dengan ketentuan di mana ada selisih +/- 10% dari kuantitas sebagaimana ditentukan dalam kontrak, maka hal tersebut masih dapat diterima oleh pembeli. Periode pengiriman yang disepakati mulai dari tanggal 20 sampai dengan 26 November 2023.

Pada tanggal 4 Maret 2024, PTCEP dan IRNC telah menandatangani Perjanjian Penjualan dan Pembelian Batubara. Kontrak tersebut mengisyaratkan bahwa PTCEP menjual 52.000 mt batubara, dengan ketentuan di mana ada selisih +/- 10% dari kuantitas sebagaimana ditentukan dalam kontrak, maka hal tersebut masih dapat diterima oleh pembeli. Periode pengiriman yang disepakati mulai dari tanggal 10 sampai dengan 19 Maret 2024.

Pada tanggal 30 April 2024, PTCEP dan IRNC telah menandatangani Perjanjian Penjualan dan Pembelian Batubara. Kontrak tersebut mengisyaratkan bahwa PTCEP menjual 52.000 mt batubara, dengan ketentuan di mana ada selisih +/- 10% dari kuantitas sebagaimana ditentukan dalam kontrak, maka hal tersebut masih dapat diterima oleh pembeli. Periode pengiriman yang disepakati mulai dari tanggal 6 sampai dengan 11 Mei 2024. Tidak terdapat perpanjangan atas kontrak ini.

- u. On June 19, 2023, PTCEP and Flame Asia Resources Pte. Ltd. signed a Contract for the Sale and Purchase of Steaming Coal, where the Company acted as Applicant. The contract stated that with in the first delivery period, PTCEP shall deliver 750,000 mt coal +/- 10% at buyer's option in 12 monthly instalments and with individual shipments (+/- 10% at the buyer's option per shipment), as tentatively scheduled in the agreement.

The above agreement has been terminated and replaced by an agreement No. FAR2024079 signed on June 5, 2024 between PTCEP and Flame Asia Resources Pte. Ltd which related to the Steam Coal Sales and Purchase Agreement for which PTCEP acts as the buyer. The contract states that the term of this Agreement is until September 30, 2024 and the buyer receives 4 shipments with a maximum quantity of 264,707 mt.

- v. On September 19, 2023, the Company and PT Sumberdaya Arindo (SDA) have signed a Mining Operation Services Agreement, whereby the Company will act as a contractor for mining operations at the SDA project site with contract value Rp 1,090 billion (equivalent to US\$ 70,347 thousand). This agreement is valid until September 22, 2026.
- w. On November 16, 2023, PTCEP and PT Indonesia RuiPu Nickel Chrome Alloy (IRNC) signed a Contract for the Sale and Purchase of Coal. The contract stated that PTCEP shall deliver 47,000 mt coal with condition of variance +/- 10% from quantity agreed in the contract will be considered acceptable by the buyer. The period of delivery agreed from November 20 until 26, 2023.

On March 4, 2024, PTCEP and IRNC signed a Contract for the Sale and Purchase of Coal. The contract stated that PTCEP shall deliver 52,000 mt coal with condition of variance +/- 10% from quantity agreed in the contract will be considered acceptable by the buyer. The period of delivery agreed from March 10 until 19, 2024.

On April 30, 2024, PTCEP and IRNC signed a Contract for the Sale and Purchase of Coal. The contract stated that PTCEP shall deliver 52,000 mt coal with condition of variance +/- 10% from quantity agreed in the contract will be considered acceptable by the buyer. The period of delivery agreed from May 6 until 11, 2024. There is no extension for this contract.

- x. Pada tanggal 25 Mei 2022, Perusahaan dan PT Freeport Indonesia telah menandatangani Perjanjian Rental Alat Berat (Proyek VPA3) dengan Perjanjian No. 2200036-001. Perjanjian ini telah berakhir pada tanggal 30 Juni 2023, dengan nilai kontrak sebesar Rp 24.876 juta (setara dengan US\$ 1.710 ribu).

Pada tanggal 5 Juni 2023, Perusahaan dan PT Freeport Indonesia telah menandatangani dokumen *Change Order* No. 001 untuk memperpanjang periode Perjanjian hingga tanggal 30 September 2023, dengan penambahan nilai sebesar Rp 3.056 juta (setara dengan US\$ 203.381 ribu).

Pada tanggal 30 Agustus 2023, Perusahaan dan PT Freeport Indonesia telah menandatangani dokumen *Change Order* No. 002 untuk memperpanjang periode Perjanjian hingga tanggal 31 Desember 2023, dengan penambahan nilai sebesar Rp 3.806 juta (setara dengan US\$ 249.786 ribu).

Pada tanggal 8 Desember 2023, Perusahaan dan PT Freeport Indonesia telah menandatangani dokumen *Change Order* No. 003 untuk memperpanjang periode Perjanjian hingga tanggal 30 Juni 2024 dengan penambahan nilai sebesar Rp 8.169 juta (setara dengan US\$ 529.904 ribu).

Pada tanggal 5 Februari 2024, Perusahaan dan PT Freeport Indonesia telah menandatangani dokumen *Change Order* No. 004 untuk penyesuaian lingkup pekerjaan di dalam Perjanjian. Tidak ada penambahan nilai di dalam *Change Order* ini.

Pada tanggal 15 Juli 2024, Perusahaan dan PT Freeport Indonesia telah menandatangani dokumen *Change Order* No. 005 untuk menyelesaikan nilai kontrak atas *Change Order* No. 001-005. Tidak terdapat perpanjangan atas kontrak ini.

- y. Pada tanggal 1 Februari 2024, Perusahaan dan BP Berau Ltd. telah menandatangani kontrak untuk Proyek *Onshore Early Works Engineering, Procurement and Construction (EPC)* untuk Ubadari, *Tanggung EGR/CCUS*, dan *Tanggung Onshore Compression (UCC)*. Nilai kontrak adalah sebesar Rp 4.660 miliar (setara dengan US\$ 302 juta) dengan masa kontrak berlaku mulai 1 Februari 2024 sampai dengan 25 November 2025.

- x. On May 25, 2022, the Company and PT Freeport Indonesia have signed the Rental Agreement of Heavy Equipment (VPA3 Project) with the Agreement No. 2200036-001. This Agreement has been completed on June 30, 2023, with the contract value of Rp 24,876 million (equivalent to US\$ 1,710 thousand).

On June 5, 2023, the Company and PT Freeport Indonesia have signed Change Order No. 001 to extend the period of Agreement up to September 30, 2023, with an additional value of Rp 3,056 million (equivalent to US\$ 203,381 thousand).

On August 30, 2023, the Company and PT Freeport Indonesia have signed Change Order No. 002 to extend the period of Agreement up to December 31, 2023, with an additional value of Rp 3,806 million (equivalent to US\$ 249,786 thousand).

On December 8, 2023, the Company and PT Freeport Indonesia have signed Change Order No. 003 to extend the period of Agreement up to June 30, 2024, with an additional value of Rp 8,169 million (equivalent to US\$ 529,904 thousand).

On February 5, 2024, the Company and PT Freeport Indonesia have signed Change Order No. 004 for the adjustment of the scope of work under the Agreement. No additional value allowed under this Change Order.

On July 15, 2024, the Company and PT Freeport Indonesia have signed Change Order No. 005 to complete the contract value of Change Order No. 001-005. There is no extension for this contract.

- y. On February 1, 2024, the Company and BP Berau Ltd. entered into contract for Onshore Early Works Engineering, Procurement and Construction (EPC) for Ubadari, *Tanggung EGR/CCUS*, and *Tanggung Onshore Compression (UCC)* Project. The contract value is Rp 4,660 billion (equivalent to US\$ 302 million) with contract duration valid from February 1, 2024, until November 25, 2025.

- z. Pada tanggal 16 November 2023, PTCEP dan PT Adipati Makmur Sejahtera telah menandatangani Perjanjian Penjualan dan Pembelian Batubara. Kontrak tersebut mengisyaratkan bahwa PTCEP menjual 3 x 55.000 mt batubara, dengan ketentuan di mana ada selisih +/- 10% dari kuantitas sebagaimana ditentukan dalam kontrak, maka hal tersebut masih dapat diterima oleh pembeli. Periode pengiriman yang disepakati mulai dari 1 Juli 2024 sampai dengan 30 November 2024.
- aa. Pada tanggal 3 Juli 2024, Perusahaan dan PT Vale Indonesia Tbk menandatangani perjanjian atas Pengadaan dan Konstruksi Pembangunan Tambang Blok Pomalaa sebesar Rp 2,8 triliun (setara dengan US\$ 175 juta) dengan estimasi durasi proyek selama 24 bulan.
- bb. Pada tanggal 23 April 2024, Perusahaan dan PT Triasih Nawasena Bumi Sejahtera (TNBS) telah menandatangani Surat Penunjukan Pemenang untuk Infrastruktur Tambang di Kapuas Bara Utama, Kalimantan Tengah dengan kontrak utama Pekerjaan Jalan Angkut dari Tambang Pit ke STA 14.400 dengan nilai kontrak indikatif Rp 54,6 miliar (setara dengan US\$ 3,3 juta) dengan jangka waktu sampai dengan Desember 2024.
- cc. Pada Tanggal 5 Juni 2024, Perusahaan dan PT Global Bara Mandiri (GBM) menandatangani Lembar Kesepakatan Jasa Pertambangan dengan estimasi nilai kontrak US\$ 230 juta untuk periode 8 tahun.
- dd. Pada tanggal 26 Juni 2024, Perusahaan dan PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN) telah menandatangani Perjanjian Layanan Manajemen, di mana Perusahaan berkewajiban menjalankan layanan jasa konsultan manajemen dengan nilai layanan *budget* yang dikeluarkan sebesar Rp 4,5 miliar (setara dengan US\$ 272 ribu) per bulan atau Rp 107 miliar (setara US\$ 6.531 ribu) untuk dua tahun sampai dengan 25 Juni 2026.
- ee. Pada tanggal 26 Juni 2024, Perusahaan dan PT Prima Mineral Investindo (PMI) telah menandatangani Perjanjian Jasa Konsultan Geologis, di mana Perusahaan menunjuk PMI untuk memberikan jasa konsultasi dan saran profesional di bidang geologi, dengan nilai kontrak yang akan ditagihkan ke Perusahaan sebesar Rp 1,1 miliar (setara dengan US\$ 69 ribu) per bulan atau Rp 27,2 miliar (setara US\$ 1.656 ribu) untuk dua tahun sampai dengan 25 Juni 2026.
- z. On November 16, 2023, PTCEP and PT Adipati Makmur Sejahtera signed a Contract for the Sale and Purchase of Coal. The contract stated that PTCEP shall deliver 3 x 55,000 mt coal with condition of variance +/- 10% from quantity agreed in the contract will be considered acceptable by the buyer. The period of delivery agreed from July 1, 2024 until November 30, 2024.
- aa. On July 3, 2024, the Company and PT Vale Indonesia Tbk have signed agreement on Procurement and Construction on Pomalaa Block Mine amounted to Rp 2.8 trillion (equivalent to US\$ 175 million) for estimated project duration of 24 months.
- bb. On April 23, 2024, the Company and PT Triasih Nawasena Bumi Sejahtera (TNBS) has signed Letter of Award for Mining Infrastructure on Kapuas Bara Utama, Central Kalimantan with main contract of Hauling Road Works from Mine Pit to STA 14,400 with indicative contract value Rp 54.6 billion (equivalent to US\$ 3.3 million) with period until December 2024.
- cc. On June 5, 2024, the Company and PT. Global Bara Mandiri (GBM) signed Termsheet for Mining Services Agreement with estimated contract value US\$ 230 million for period of 8 years.
- dd. On June 26, 2024, the Company and PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN) signed a Management Services Agreement, in which the Company is obligated to provide management consulting services with a budgeted service value of Rp 4.5 billion (equivalent to US\$ 272 thousand) per month or Rp 107 billion (equivalent to US\$ 6,531 thousand) for two years until June 25, 2026.
- ee. On June 26, 2024, the Company and PT Prima Mineral Investindo (PMI) signed a Geological Consulting Services Agreement, in which the Company appoints PMI to provide consulting services and professional advice in the field of geology, with a contract value to be billed to the Company of Rp 1.1 billion (equivalent to US\$ 69 thousand) per month or Rp 27.2 billion (equivalent to US\$ 1,656 thousand) for two years until June 25, 2026.

- ff. Pada tanggal 26 Juni 2024, Perusahaan dan PT Daya Bumindo Karunia (DBK) telah menandatangani Perjanjian Jasa Pengembangan Infrastruktur Tambang, di mana perusahaan ditunjuk untuk melaksanakan konstruksi jalan tambang, dengan nilai kontrak sebesar Rp 1 triliun (setara dengan US\$ 62,8 juta) selama 12 bulan sejak tanggal dimulainya pekerjaan.
- gg. Pada tanggal 21 Juni 2024, Perusahaan dan PT Griya Idola (PTGI) telah menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa Wisma Barito Pacific Jakarta dengan jangka waktu sewa selama 2 tahun.
- hh. Pada tanggal 1 April 2024, PTCEP dan PT Bumi Nusantara Jaya (BNJ) menandatangani Perjanjian Penjualan dan Pembelian Batubara, mengisyaratkan bahwa PTCEP menjual 6 x 7.500 mt batubara, dengan ketentuan di mana ada selisih +/- 10% dari kuantitas sebagaimana ditentukan dalam kontrak, maka hal tersebut masih dapat diterima oleh pembeli. Periode pengiriman yang disepakati mulai dari bulan April sampai dengan bulan Mei 2024. Tidak ada perpanjangan atas kontrak ini.
- ii. Pada tanggal 1 April 2024, PTCEP dan PT Angel Nickel Industry (ANI) telah menandatangani Perjanjian Penjualan dan Pembelian Batubara, mengisyaratkan bahwa PTCEP menjual 53.000 mt batubara, dengan ketentuan di mana ada selisih +/- 10% dari kuantitas sebagaimana ditentukan dalam kontrak, maka hal tersebut masih dapat diterima oleh pembeli. Periode pengiriman yang disepakati mulai dari 3 sampai dengan 9 April 2024. Tidak ada perpanjangan atas kontrak ini.
- jj. Pada tanggal 9 Agustus 2024, Perusahaan dan PT Pasir Bara Prima (PBP) telah menandatangani Perjanjian Jasa Pertambangan yang berlaku hingga cadangan batubara dalam Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) dan yang dapat ditambang habis sepanjang umur tambang (*life of mine*) dengan total sekitar 52 juta ton, dengan estimasi nilai kontrak sebesar US\$ 1,08 miliar. Perjanjian ini berlaku sampai dengan cadangan batubara yang ditambang habis (*life of mine*).
- kk. Pada tanggal 2 September 2024, Perusahaan dan PT Global Bara Mandiri (GBM) telah menandatangani Perjanjian Jasa Pertambangan untuk Kontraktor Jasa Pertambangan dengan jumlah volume sebesar 65 juta bcm dan jangka waktu sampai 31 Desember 2032.
- ll. Pada tanggal 18 Oktober 2024, Perusahaan dan PT Tamtama Perkasa (TP) telah menandatangani Perjanjian Jasa Pertambangan untuk Kontraktor Jasa Pertambangan dengan jumlah volume sebesar 9,4 juta bcm dan jangka waktu sampai 31 Desember 2028.
- ff. On June 26, 2024, the Company and PT Daya Bumindo Karunia (DBK) signed a Mining Infrastructure Development Service Agreement, in which the Company is appointed to carry out the construction of mining roads, with a contract value of Rp 1 trillion (equivalent to US\$ 62.8 million) for a period of 12 months from the start date of the work.
- gg. On June 21, 2024, the Company and PT Griya Idola have signed a Lease Agreement for Wisma Barito Pacific Jakarta with 2 years of lease period.
- hh. On April 1, 2024, PTCEP and PT Bumi Nusantara Jaya (BNJ) signed a Contract for the Sale and Purchase of Coal. The contract stated that PTCEP shall deliver 6 x 7,500 mt coal with condition of variance +/- 10% from quantity agreed in the contract will be considered acceptable by the buyer. The period of delivery agreed for the month of April up to May 2024. There is no extension for this contract.
- ii. On April 1, 2024, PTCEP and Nickel Industry (ANI) signed a Contract for the Sale and Purchase of Coal, stated that PTCEP shall deliver 53,000 mt coal in a condition of variance +/- 10% from quantity agreed in the contract will be considered acceptable by the buyer. The period of delivery agreed from April 3 until 9, 2024. There is no extension for this contract.
- jj. On August 9, 2024, the Company and PT Pasir Bara Prima (PBP) signed Mining Services Agreement which valid until the coal reserves in *Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP)* and that can be fully extracted along life of mine with the total about 52 million tonnes, with estimated contract value of US\$ 1.08 billion. This agreement is valid until the coal reserves are fully extracted (*life of mine*).
- kk. On September 2, 2024, the Company and PT Global Bara Mandiri (GBM) signed a Mining Services Agreement for Mining Service Contractors with a total volume of 65 million bcm and a term until December 31, 2032.
- ll. On October 18, 2024, the Company and PT Tamtama Perkasa (TP) signed a Mining Services Agreement for Mining Service Contractors with a total volume of 9.4 million bcm and a term until December 31, 2028.

mm. Pada tanggal 18 Oktober 2024, Perusahaan dan PT Borneo Bangun Banua (BBB) telah menandatangani Perjanjian Jasa Pertambangan untuk Kontraktor Jasa Pertambangan dengan jumlah volume sebesar 50 juta bcm dan jangka waktu sampai 31 Desember 2028.

mm. On October 18, 2024, the Company and PT Borneo Bangun Banua (BBB) signed a Mining Services Agreement for Mining Service Contractors with a total volume of 50 million bcm and a term until December 31, 2028.

38. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA UANG SELAIN MATA UANG NON-FUNGSIONAL

38. MONETARY ASSETS AND LIABILITIES DENOMINATED IN NONFUNCTIONAL CURRENCIES

Pada tanggal 30 Juni 2024, 31 Desember 2023 dan 2022, Grup mempunyai aset dan liabilitas moneter dalam mata uang selain mata uang Dolar Amerika Serikat sebagai berikut:

At June 30, 2024, December 31, 2023 and 2022, the Group had monetary assets and liabilities in currencies other than U.S. Dollar as follows:

	30 Juni/ June 30, 2024		31 Desember/December 31, 2023		31 Desember/December 31, 2022		
	Mata uang lain (dalam ribuan)/ Other currencies (in thousand)	Setara dengan US\$ (dalam ribuan)/ Equivalent in US\$ (in thousand)	Mata uang lain (dalam ribuan)/ Other currencies (in thousand)	Setara dengan US\$ (dalam ribuan)/ Equivalent in US\$ (in thousand)	Mata uang lain (dalam ribuan)/ Other currencies (in thousand)	Setara dengan US\$ (dalam ribuan)/ Equivalent in US\$ (in thousand)	
Aset Moneter							Monetary Assets
Kas dan setara kas							Cash and cash equivalents
Rupiah	1.055.410.512	64.272	831.694.915	53.977	688.703.180	43.780	Rupiah
Dolar Australia	271.217	178	1.142	783	1.307	922	Dollar Australia
Dolar Singapura	1.358	1	-	-	-	-	Dollar Singapura
Euro	53.321	57	7	7	7	7	Euro
Rekening bank dibatasi penggunaannya							Restricted cash in banks
Rupiah	-	-	43.574.730	2.828	-	-	Rupiah
Piutang usaha - bersih							Trade accounts receivable - net
Rupiah	2.603.927.233	158.573	2.112.850.539	137.124	1.443.539.484	91.764	Rupiah
Piutang lain-lain							Other accounts receivable
Rupiah	17.734.680	1.080	758.736.518	49.242	256.682.727	16.317	Rupiah
Pajak dibayar dimuka							Prepaid taxes
Rupiah	54.320.668	3.308	75.947.612	4.929	178.468.195	11.345	Rupiah
Klaim pengembalian pajak							Claims for tax refund
Rupiah	-	-	-	-	109.220.333	6.943	Rupiah
Aset lancar lainnya							Other assets
Rupiah	40.100.082	2.442	2.295.840	149	2.076.492	132	Rupiah
Piutang lain-lain - pihak ketiga - jangka panjang							Other accounts receivable - third parties - long-term
Rupiah	6.026.507	367	9.830.508	638	6.575.558	418	Rupiah
Rekening bank dibatasi penggunaannya							Restricted cash in bank
Rupiah	11.199.122	682	11.093.991	720	-	-	Rupiah
Jumlah Aset Moneter		230.960		250.397		171.628	Total Monetary Assets
Liabilitas Moneter							Monetary Liabilities
Utang usaha							Trade accounts payable
Rupiah	1.654.875.538	100.778	1.827.103.236	118.579	1.518.246.003	96.513	Rupiah
Dolar Australia	6.620	4.343	5.664	3.882	2.823	1.476	Australian Dollar
Euro	1.829	1.955	1.618	1.799	643	683	Euro
Dolar Singapura	14	10	32	24	115	85	Singapore Dollar
Beban yang masih harus dibayar							Accrued expenses
Rupiah	200.730.304	12.224	256.332.849	16.636	91.601.613	5.823	Rupiah
Utang pajak							Taxes payable
Rupiah	37.029.355	2.255	49.691.834	3.225	86.441.845	5.495	Rupiah
Utang dividen							Dividends payable
Rupiah	15.714.897	957	14.298.921	928	4.514.797	287	Rupiah
Utang lain-lain							Other payables
Rupiah	17.077.840	1.040	8.952.234	581	16.092.813	1.023	Rupiah
Pinjaman jangka panjang pihak ketiga							Long-term loan third parties
Rupiah	1.311.660.217	79.877	1.194.375.963	77.515	147.541.049	9.379	Rupiah
Liabilitas imbalan pasca kerja							Employee benefits obligation
Rupiah	413.218.044	25.164	429.198.767	27.855	360.884.871	22.941	Rupiah
Liabilitas jangka panjang lainnya							Other long-term liabilities
Rupiah	1.986.941	121	724.191	47	-	-	Rupiah
Jumlah Liabilitas Moneter		228.724		251.071		143.705	Total Monetary Liabilities
Aset Moneter Bersih		2.236		(674)		27.923	Net Monetary Assets

Pada tanggal 30 Juni 2024, 31 Desember 2023 dan 2022, kurs konversi yang digunakan Perusahaan serta kurs yang berlaku pada tanggal 11 September 2024 adalah sebagai berikut:

On June 30, 2024, December 31, 2023 and 2022, the conversion rates used by the Group and the prevailing rates at September 11, 2024 are as follows:

Mata Uang	11 September/ September 11,	30 Juni/ June 30,	31 Desember/ December 31,	31 Desember/ December 31,	Currency
	2024	2024	2023	2022	
	US\$	US\$	US\$	US\$	
Rupiah (Rp) 1.000	0,0647	0,0609	0,0649	0,0636	Rupiah (Rp) 1,000
Dolar Australia (AU\$) 1	0,6659	0,6662	0,6854	0,6726	Australian Dollar (AU\$) 1
Dolar Singapura (SG\$) 1	0,7655	0,7366	0,7597	0,7412	Singapore Dollar (SG\$) 1
Euro (EUR) 1	1,1037	1,0690	1,1118	1,0624	Euro (EUR) 1
Great Britain Pound (GBP) 1	1,3092	1,2634	1,2818	1,2190	Great Britain Pound (GBP) 1

39. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN MODAL MANAJEMEN

39. FINANCIAL INSTRUMENTS, FINANCIAL RISK AND CAPITAL MANAGERMENTS

a. Kategori dan kelas instrumen keuangan

a. Categories and classes of financial instruments

	Aset keuangan pada biaya perolehan yang diamortisasi/ <i>Financial asset at amortized cost</i>	Aset keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi/ <i>Financial assets at fair value through profit or loss (FVTPL)</i>	Liabilitas pada biaya perolehan yang diamortisasi/ <i>Liabilities at amortized cost</i>	Liabilitas sewa/ <i>Lease liabilities</i>	
	US\$'000	US\$'000	US\$'000	US\$'000	
30 Juni 2024					June 30, 2024
Aset Keuangan Lancar					Current Financial Assets
Bank dan setara kas	92.233	-	-	-	Cash in banks and cash equivalent
Aset keuangan lainnya	-	383	-	-	Other financial assets
Piutang usaha					Trade accounts receivable
Pihak berelasi	29.297	-	-	-	Related parties
Pihak ketiga	136.309	-	-	-	Third parties
Piutang lain-lain					Other accounts receivable - third parties
Pihak berelasi	7	-	-	-	Related parties
Pihak ketiga	1.073	-	-	-	Third parties
Aset lancar lainnya	2.442	-	-	-	Other current assets
Aset Keuangan Tidak Lancar					Non Current Assets
Piutang lain-lain - pihak ketiga	37.475	-	-	-	Other accounts receivable - third parties
Rekening bank dibatasi penggunaannya	682	-	-	-	Restricted cash in banks
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek					Current Financial Liabilities
Utang bank	-	-	44.353	-	Bank loans
Utang usaha - pihak ketiga	-	-	142.429	-	Trade accounts payable - third parties
Utang lain-lain - pihak ketiga	-	-	1.040	-	Other accounts payable - third parties
Utang dividen	-	-	957	-	Dividends payable
Beban yang masih harus dibayar	-	-	12.224	-	Accrued expenses
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:					Current maturities of long-term liabilities:
Pinjaman jangka panjang pihak ketiga	-	-	9.758	-	Long-term loan third parties
Liabilitas sewa	-	-	-	7.944	Lease liabilities
Liabilitas Keuangan Jangka Panjang					Non-current Financial Liabilities
Liabilitas jangka panjang lainnya	-	-	121	-	Other long-term liabilities
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:					Long-term liabilities - net of current maturities:
Pinjaman jangka panjang - pihak ketiga	-	-	175.718	-	Long-term loans - third parties
Liabilitas sewa	-	-	-	11.593	Lease liabilities
Jumlah	299.518	383	386.600	19.537	Total

PT PETROSEA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2024 DAN 2023 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023 DAN 2022 – Lanjutan

PT PETROSEA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED
JUNE 30, 2024 AND 2023 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2023 AND 2022 - Continued

	Aset keuangan pada biaya perolehan perolehan yang diamortisasi/ Financial asset at amortized cost	Aset keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi/ Financial assets at fair value through profit or loss (FVTPL)	Liabilitas pada biaya perolehan yang diamortisasi/ Liabilities at amortized cost	Liabilitas sewa/ Lease liabilities	
	US\$'000	US\$'000	US\$'000	US\$'000	
31 Desember 2023					December 31, 2023
Aset Keuangan Lancar					Current Financial Assets
Bank dan setara kas	72.951	-	-	-	Cash in banks and cash equivalent
Rekening bank dibatasi penggunaannya	2.828	-	-	-	Restricted cash in banks
Aset keuangan lainnya	-	414	-	-	Other financial assets
Piutang usaha	-	-	-	-	Trade accounts receivable
Pihak berelasi	20.842	-	-	-	Related parties
Pihak ketiga	128.971	-	-	-	Third parties
Piutang lain-lain	-	-	-	-	Other accounts receivable
Pihak ketiga	49.242	-	-	-	Third parties
Aset lancar lainnya	4.851	-	-	-	Other current assets
Aset Keuangan Tidak Lancar					Non Current Assets
Piutang lain-lain - pihak ketiga	638	-	-	-	Other accounts receivable - third parties
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek					Current Financial Liabilities
Utang bank	-	-	37.127	-	Bank loans
Utang usaha	-	-	-	-	Trade accounts payable
Pihak ketiga	-	-	139.993	-	Third parties
Utang lain-lain - pihak ketiga	-	-	581	-	Other accounts payable - third parties
Utang dividen	-	-	928	-	Dividends payable
Beban yang masih harus dibayar	-	-	18.042	-	Accrued expenses
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:					Current maturities of long-term liabilities:
Pinjaman jangka panjang pihak ketiga	-	-	38.539	-	Long-term loan third parties
Liabilitas sewa	-	-	-	11.281	Lease liabilities
Liabilitas Keuangan Jangka Panjang					Non-current Financial Liabilities
Liabilitas jangka panjang lainnya	-	-	47	-	Other long-term liabilities
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:					Long-term liabilities - net of current maturities:
Pinjaman jangka panjang - pihak ketiga	-	-	148.656	-	Long-term loans - third parties
Liabilitas sewa	-	-	-	15.138	Lease liabilities
Jumlah	280.323	414	383.913	26.419	Total
31 Desember 2022					December 31, 2022
Aset Keuangan Lancar					Current Financial Assets
Bank dan setara kas	61.728	-	-	-	Cash in banks and cash equivalent
Aset keuangan lainnya	-	356	-	-	Other financial assets
Piutang usaha	-	-	-	-	Trade accounts receivable
Pihak berelasi	23.871	-	-	-	Related parties
Pihak ketiga	82.580	-	-	-	Third parties
Piutang lain-lain - pihak ketiga	16.146	-	-	-	Other accounts receivable - third parties
Aset lancar lainnya	10.450	-	-	-	Other current assets
Aset Keuangan Tidak Lancar					Non Current Assets
Piutang lain-lain - pihak ketiga	32.499	-	-	-	Other accounts receivable - third parties
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek					Current Financial Liabilities
Utang bank	-	-	45.146	-	Bank loans
Utang usaha	-	-	-	-	Trade accounts payable
Pihak berelasi	-	-	674	-	Related parties
Pihak ketiga	-	-	117.861	-	Third parties
Utang lain-lain - pihak ketiga	-	-	1.656	-	Other accounts payable - third parties
Utang dividen	-	-	287	-	Dividends payable
Beban yang masih harus dibayar	-	-	18.952	-	Accrued expenses
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:					Current maturities of long-term liabilities:
Pinjaman jangka panjang pihak ketiga	-	-	15.807	-	Long-term loan third parties
Liabilitas sewa	-	-	-	10.345	Lease liabilities
Liabilitas Keuangan Jangka Panjang					Non-current Financial Liabilities
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:					Long-term liabilities - net of current maturities:
Pinjaman jangka panjang - pihak ketiga	-	-	28.315	-	Long-term loans - third parties
Liabilitas sewa	-	-	-	16.113	Lease liabilities
Jumlah	227.274	356	228.698	26.458	Total

Aset keuangan biaya perolehan yang diamortisasi seluruhnya merupakan aset yang dimiliki untuk diperdagangkan.

Financial assets at fair value through profit or loss are held-for-trading assets.

b. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan

Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan Grup adalah untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan yang memadai tersedia untuk operasi dan pengembangan bisnis, serta untuk mengelola risiko mata uang asing, tingkat bunga, kredit dan risiko likuiditas. Grup beroperasi dengan pedoman yang telah ditentukan oleh Dewan Direksi.

b. Financial risk management objectives and policies

The Group's overall financial risk management and policies seek to ensure that adequate financial resources are available for the operation and development of its business, while managing the exposure to foreign exchange risk, interest rate risk, credit and liquidity risks. The Group operates within defined guidelines that are approved by the Board of Directors.

Dewan Komisaris Grup telah membentuk Komite Manajemen Risiko yang bertugas membantu Dewan Komisaris Grup menetapkan kebijakan dan prosedur pengelolaan risiko Grup, serta memastikan bahwa telah dilakukan penilaian yang mendalam terhadap semua transaksi dan tindakan yang dilakukan oleh Grup yang berpotensi mengandung risiko serta memberikan rekomendasi mengenai tindakan yang perlu diambil untuk mengurangi risiko tersebut.

The Board of Commissioners of the Group has appointed a Risk Management Committee to assist the Board of Commissioners in determining the policies and procedures of the Group's risk management and to ensure that all transactions and acts taken by the Group with risk, have been reviewed profoundly and also to give recommendation on the action taken to reduce the risk.

i. Manajemen risiko mata uang asing

Grup menghadapi risiko fluktuasi nilai tukar mata uang asing. Meskipun mata uang fungsional Grup adalah Dolar Amerika Serikat, ada beberapa transaksi yang menggunakan mata uang selain Dolar Amerika Serikat, terutama Rupiah khususnya biaya operasional. Risiko fluktuasi terhadap Dolar Australia, Great Britain Pound, Dolar Singapura dan Euro adalah tidak material.

i. Foreign currency risk management

The Group is exposed to the effect of foreign currency exchange rate fluctuations. Although the functional currencies of the Group is the U.S. Dollar, there are transactions denominated in currencies other than U.S. Dollar, mainly in Rupiah particularly the operating expenses. The Group's exposure to exchange rate fluctuations on Australian Dollar, Great Britain Pound, Singapore Dollar and Euro is immaterial.

Grup memegang kas dan setara kas dalam mata uang selain Dolar Amerika Serikat untuk modal kerja.

The Group also holds cash and cash equivalents denominated in currencies other than the U.S. Dollar for working capital.

Grup mengelola eksposur terhadap mata uang asing, terutama Rupiah dengan mencocokkan, sebisa mungkin, penerimaan dan pembayaran dalam masing-masing individu mata uang. Jumlah eksposur mata uang bersih Grup pada tanggal pelaporan diungkapkan dalam Catatan 38.

The Group manages exposure to foreign currency risk, especially Rupiah by matching, as far as possible, receipts and payments in each individual currency. The Group's net opens foreign currency exposure as of reporting date is disclosed in Note 38.

Sensitivitas Grup pada periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2024 dan 2023 sebesar 1,92% dan 4,78% serta untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar 1,94% dan 2,50%, meningkat atau menurun dalam Dolar Amerika Serikat terhadap mata uang Rupiah menghasilkan penurunan atau peningkatan sebesar US\$ 481 ribu dan US\$ 6.005 ribu serta US\$ 169 ribu dan US\$ 1.033 ribu pada laba atau rugi sebelum pajak.

The Group's sensitivity for six-month periods ended on June 30, 2024 and 2023 is 1.92% and 4.78% as well as for the year ended on December 31, 2023 and 2022 is 1.94% and 2.50%, increase or decrease in the US Dollar against Rupiah would result in decrease or increase amounted to US\$ 481 thousand and US\$ 6,005 thousand as well as US\$ 169 thousand and US\$ 1,033 thousand, respectively, in profit or loss before tax.

1,92%, 4,78%, 1,94% dan 2,50% adalah tingkat sensitivitas yang digunakan ketika melaporkan secara internal risiko mata uang asing kepada para karyawan kunci, dan merupakan penilaian manajemen terhadap perubahan yang mungkin terjadi pada nilai tukar valuta asing. Analisis sensitivitas hanya mencakup perihal mata uang asing moneter yang ada.

ii. Manajemen risiko tingkat bunga

Eksposur risiko tingkat bunga berhubungan dengan jumlah aset atau liabilitas dimana pergerakan pada tingkat suku bunga dapat mempengaruhi laba setelah pajak. Risiko pada pendapatan bunga bersifat terbatas karena Grup hanya bermaksud untuk menjaga saldo kas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan operasional. Dalam beban bunga, keseimbangan optimal antara utang dengan tingkat bunga tetap dan mengambang ditetapkan di muka. Grup memiliki kebijakan dalam memperoleh pembiayaan yang akan memberikan kombinasi yang sesuai tingkat suku bunga mengambang dan tingkat bunga tetap. Persetujuan dari Dewan Direksi dan Komisaris harus diperoleh sebelum Grup menggunakan instrumen keuangan tersebut untuk mengelola eksposur risiko suku bunga.

Analisis sensitivitas suku bunga

Analisis sensitivitas di bawah ini telah ditentukan berdasarkan paparan suku bunga untuk instrumen non-derivatif pada akhir periode pelaporan. Untuk liabilitas tingkat bunga mengambang, analisis tersebut disusun dengan asumsi jumlah liabilitas terutang pada akhir periode pelaporan itu terutang sepanjang tahun. Kenaikan atau penurunan pada periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebesar 0,42% (JIBOR) serta 0,05% (SOFR) dan 6,76% (JIBOR) serta 5,28% (SOFR). Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022, kenaikan dan penurunan adalah sebesar 0,58% (JIBOR) serta 0,45% (SOFR) dan 0,51%, digunakan ketika melaporkan risiko suku bunga secara internal kepada karyawan kunci dan merupakan penilaian manajemen terhadap perubahan yang mungkin terjadi pada suku bunga.

1.92%, 4.78%, 1.94% and 2.50% is the sensitivity rates used when reporting foreign currency risk internally to key management personnel and represent management's assessment of the reasonably possible change in foreign exchange rates. The sensitivity analysis includes only outstanding foreign currency denominated monetary items.

ii. Interest rate risk management

The interest rate risk exposure relates to the amount of assets or liabilities which are subject to a risk that a movement in interest rates will adversely affect the income after tax. The risk on interest income is limited as the Group only intends to keep sufficient cash balances to meet operational needs. On interest expenses, the optimum balance between fixed and floating interest debt is considered upfront. The Group has a policy of obtaining financing that would provide an appropriate mix of floating and fix interest rate. Approvals from the Board of Directors and Commissioners must be obtained before committing the Group to any of the instruments to manage the interest rate risk exposure.

Interest rate sensitivity analysis

The sensitivity analysis below has been determined based on the exposure to interest rates for non-derivative instruments at the end of the reporting period. For floating rate liabilities, the analysis is prepared assuming the amount of the liability outstanding at the end of the reporting period was outstanding for the whole year. Increase or decrease are used for the period ended on June 30, 2024 and 2023 is 0.42% (JIBOR) as well as 0.05% (SOFR) and 6.76% (JIBOR) and 5.28% (SOFR). For the years ended on December 31, 2023 and 2022, the increase or decrease is 0.58% (JIBOR) as well as 0.45% (SOFR) and 0.51%, when reporting interest rate risk internally to key management personnel and represent management's assessment of the reasonably possible change in interest rates.

Jika suku bunga untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 telah lebih tinggi/rendah 0,42% (JIBOR) serta 0,5% (SOFR) dan 6,76% (JIBOR) serta 5,28% (SOFR), serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 telah lebih tinggi/rendah 0,58% (JIBOR) serta 0,45% (SOFR) dan 0,51%, dan semua variabel lainnya tetap konstan, maka laba sebelum pajak Grup untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 serta tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 akan turun/naik masing-masing sebesar US\$ 5.828 ribu dan US\$ 678 ribu serta US\$ 1.110 ribu dan US\$ 151 ribu. Hal ini terutama disebabkan oleh eksposur Grup terhadap suku bunga atas pinjamannya dengan suku bunga variabel.

Eksposur risiko tingkat bunga Grup pada aset keuangan dan liabilitas keuangan dijelaskan dalam tabel risiko likuiditas.

iii. Manajemen risiko kredit

Nilai tercatat aset keuangan pada laporan keuangan konsolidasian interim setelah dikurangi dengan cadangan kerugian, mencerminkan eksposur Grup terhadap risiko kredit.

Kerangka peringkat risiko kredit kini Grup terdiri dari kategori berikut:

Kategori/ Category	Deskripsi/Description	Dasar pengakuan KKE/ Basis for recognizing ECL
Lancar/ Performing	Pihak lawan memiliki risiko gagal bayar yang rendah dan tidak memiliki tunggakan. <i>The counterparty has a low risk of default and does not have any past-due amounts.</i>	KKE 12 bulan/ 12 months ECL
Dicadangkan/ Doubtful	Jumlah yang tertunggak > 30 hari atau telah ada peningkatan risiko kredit yang signifikan sejak pengakuan awal. <i>Amount is >30 days past due or there has been a significant increase in credit risk since initial recognition.</i>	KKE sepanjang umur – kredit tidak memburuk/ Lifetime ECL – not credit-impaired
Gagal bayar/ In default	Jumlah yang tertunggak > 90 hari atau ada bukti yang mengindikasikan aset mengalami penurunan nilai kredit. <i>Amount is >90 days past due or there is evidence indicating the asset is credit-impaired.</i>	KKE sepanjang umur – kredit memburuk/ Lifetime ECL – credit-impaired
Penghapusan/ Write-off	Ada bukti yang mengindikasikan bahwa debitur dalam kesulitan keuangan yang buruk dan Perusahaan tidak memiliki prospek pemulihan yang realistis. <i>There is evidence indicating that the debtor is in severe financial difficulty and the Company has no realistic prospect of recovery.</i>	Saldo dihapuskan/ Amount is written off

If interest rates for the period ended on June 30, 2024 and 2023 had been 0.42% (JIBOR) as well as 0.5% (SOFR) higher/lower and 6.76% (JIBOR) as well as 5.28% (SOFR), as well as for the years ended on December 31, 2023 and 2022 has been 0.58% (JIBOR) as well as 0.45% (SOFR) and 0.51% higher/lower, and all other variables were held constant, profit or loss before tax of the Group for the period ended on June 30, 2024 and for the year ended on December 31, 2023 and 2022 would decrease/increase by US\$ 5,828 thousand and US\$ 678 thousand as well as US\$ 1,110 thousand and US\$ 151 thousand, respectively. This is mainly attributable to the Group exposures to interest rates on its variable rate borrowings.

The Group exposures to interest rates on financial assets and financial liabilities are detailed in the liquidity risk table.

iii. Credit risk management

The carrying amount of financial assets recorded in the interim consolidated financial statements, net of any allowance for losses, represents the Group's exposure to credit risk.

The Group's current credit risk grading framework comprises the following categories:

Tabel di bawah merinci kualitas kredit aset keuangan Perusahaan serta eksposur maksimum risiko kredit menurut peringkat risiko kredit:

The table below details the credit quality of the Group financial assets as well as maximum exposure to credit risk by credit risk rating grades:

	Peringkat Kredit Internal/ Credit Rating	KKE 12 bulan atau sepanjang umur/ 12-month or lifetime ECL	Jumlah tercatat	Cadangan kerugian/ Loss allowance	Jumlah tercatat bersih/ Net carrying amount								
			bruto/ Gross carrying amount US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000								
30 Juni 2024							June 30, 2024						
Bank dan setara kas (Catatan 5)	Lancar/ Performing	KKE 12 bulan/ 12 month ECL	92.233	-	92.233	Cash in banks and cash equivalents (Note 5)							
Aset keuangan lainnya	Lancar/ Performing	KKE 12 bulan/ 12 month ECL	383	-	383	Other financial assets							
Piutang usaha (Catatan 6)						Trade accounts receivable (Note 6)							
Pihak berelasi	(i)	KKE sepanjang umur (pendekatan sederhana)/ Lifetime ECL (simplified approach)	29.297	-	29.297	Related parties							
Pihak ketiga	(i)	KKE sepanjang umur (pendekatan sederhana)/ Lifetime ECL (simplified approach)	136.726	(417)	136.309	Third parties							
Piutang lain-lain						Other accounts receivable							
Pihak berelasi	(i)	KKE 12 bulan/ 12 month ECL	7	-	7	Related party							
Pihak ketiga	(i)	KKE 12 bulan/ 12 month ECL	1.073	-	1.073	Third parties							
Kontrak aset (Catatan 8)	(ii)	KKE sepanjang umur (pendekatan sederhana)/ Lifetime ECL (simplified approach)	281	-	281	Contract assets (Note 8)							
Deposit (Catatan 11)	Lancar/ Performing	KKE 12 bulan/ 12 month ECL	2.442	-	2.442	Deposits (Note 11)							
Piutang lain-lain - pihak ketiga - tidak lancar	(i)	KKE 12 bulan/ 12 month ECL	37.475	-	37.475	Other accounts receivable - third parties - non-current							
				(417)									
31 Desember 2023							December 31, 2023						
Bank dan setara kas (Catatan 5)	Lancar/ Performing	KKE 12 bulan/ 12 month ECL	72.951	-	72.951	Cash in banks and cash equivalents (Note 5)							
Rekening bank dibatasi penggunaannya	Lancar/ Performing	KKE 12 bulan/ 12 month ECL	2.828	-	2.828	Restricted cash in banks							
Aset keuangan lainnya	Lancar/ Performing	KKE 12 bulan/ 12 month ECL	414	-	414	Other financial assets							
Piutang usaha (Catatan 6)						Trade accounts receivable (Note 6)							
Pihak berelasi	(i)	KKE sepanjang umur (pendekatan sederhana)/ Lifetime ECL (simplified approach)	20.842	-	20.842	Related parties							
Pihak ketiga	(i)	KKE sepanjang umur (pendekatan sederhana)/ Lifetime ECL (simplified approach)	128.995	(24)	128.971	Third parties							
Piutang lain-lain						Other account receivable							
Pihak ketiga	(i)	KKE 12 bulan/ 12 month ECL	49.242	-	49.242	Third parties							
Kontrak aset (Catatan 8)	(ii)	KKE sepanjang umur (pendekatan sederhana)/ Lifetime ECL (simplified approach)	5.755	-	5.755	Contract assets (Note 8)							
Deposit (Catatan 11)	Lancar/ Performing	KKE 12 bulan/ 12 month ECL	2.508	-	2.508	Deposits (Note 11)							
Piutang lain-lain - pihak ketiga - tidak lancar	(i)	KKE 12 bulan/ 12 month ECL	638	-	638	Other accounts receivable - third parties - non-current							
				(24)									

(i) Grup menentukan KKE pada pos-pos tersebut menggunakan matriks provisi, yang diestimasi berdasarkan pengalaman kerugian kredit historis berdasarkan status utang debitur masa lalu, yang disesuaikan dengan kondisi saat ini dan perkiraan kondisi ekonomi di masa depan.

(i) The Group determines the ECL on these items by using a provision matrix, estimated based on historical credit loss experience based on the past due status of the debtors, adjusted as appropriate to reflect current conditions and estimates of future economic conditions.

PT PETROSEA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2024 DAN 2023 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023 DAN 2022 – Lanjutan

PT PETROSEA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED
JUNE 30, 2024 AND 2023 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2023 AND 2022 - Continued

	Peringkat Kredit Internal/ Internal/ Credit Rating	KKE 12 bulan atau sepanjang umur/ 12-month or lifetime ECL	Jumlah tercatat bruto/ Gross carrying amount US\$ '000	Cadangan kerugian/ Loss allowance US\$ '000	Jumlah tercatat bersih/ Net carrying amount US\$ '000	
31 Desember 2022						December 31, 2022
Bank dan setara kas (Catatan 5)	Lancar/ Performing	KKE 12 bulan/ 12 month ECL	61.728	-	61.728	Cash in banks and cash equivalents (Note 5)
Aset keuangan lainnya	Lancar/ Performing	KKE 12 bulan/ 12 month ECL	356	-	356	Other financial assets
Piutang usaha (Catatan 6)						Trade accounts receivable (Note 6)
Pihak berelasi	(i)	KKE sepanjang umur (pendekatan sederhana)/ Lifetime ECL (simplified approach)	23.871	-	23.871	Related parties
Pihak ketiga	(i)	KKE sepanjang umur (pendekatan sederhana)/ Lifetime ECL (simplified approach)	82.623	(43)	82.580	Third parties
Piutang lain-lain						Other account receivable
Pihak ketiga	(i)	KKE 12 bulan/ 12 month ECL	16.416	-	16.416	Third parties
Kontrak aset (Catatan 8)	(ii)	KKE sepanjang umur (pendekatan sederhana)/ Lifetime ECL (simplified approach)	12.295	-	12.295	Contract assets (Note 8)
Deposit (Catatan 11)	Lancar/ Performing	KKE 12 bulan/ 12 month ECL	4.351	-	4.351	Deposits (Note 11)
Piutang lain-lain - pihak ketiga - tidak lancar	(i)	KKE 12 bulan/ 12 month ECL	32.499	-	32.499	Other accounts receivable - third parties - non current
				(43)		

(i) Grup menentukan KKE pada pos-pos tersebut menggunakan matriks provisi, yang diestimasi berdasarkan pengalaman kerugian kredit historis berdasarkan status utang debitur masa lalu, yang disesuaikan dengan kondisi saat ini dan perkiraan kondisi ekonomi di masa depan.

Grup telah mengadopsi prosedur dalam memperluas persyaratan kredit kepada pelanggan dan dalam memantau risiko kreditnya. Grup hanya memberikan kredit kepada pihak lawan yang layak kredit. Kas ditempatkan pada lembaga yang layak kredit dan memiliki kerugian kredit yang tidak material.

Meskipun eksposur kredit Grup terkonsentrasi terutama di Indonesia, tidak terdapat konsentrasi risiko kredit signifikan pada pelanggan atau kelompok pelanggan tertentu.

Rincian lebih lanjut dari risiko kredit pada piutang usaha, piutang lain-lain, dan aset kontrak diungkapkan masing-masing pada Catatan 6 dan 8.

(i) The Group determines the ECL on these items by using a provision matrix, estimated based on historical credit loss experience based on the past due status of the debtors, adjusted as appropriate to reflect current conditions and estimates of future economic conditions.

The Group has adopted procedures in extending credit terms to customers and in monitoring its credit risk. The Group only grants credit to creditworthy counterparties. Cash is held with creditworthy institutions and is subject to immaterial credit loss.

Although the Group credit exposure is concentrated mainly in Indonesia, it has no significant concentration of credit risk with any single customer or group of customers.

Further details of credit risks on trade and other accounts receivable and contract assets are disclosed in Notes 6 and 8, respectively.

iv. Manajemen risiko likuiditas

Tanggung jawab utama untuk manajemen risiko likuiditas bertumpu pada Dewan Direksi yang telah membangun kerangka manajemen risiko likuiditas yang sesuai untuk manajemen likuiditas dan pendanaan jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Grup mengelola risiko likuiditas dengan menjaga kecukupan simpanan, fasilitas bank dan fasilitas simpan pinjam dengan terus menerus memonitor perkiraan dan arus kas aktual dan menyesuaikan profil jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan.

Grup menjaga kecukupan dana untuk membiayai kebutuhan modal kerja, dimana dana tersebut ditempatkan dalam bentuk kas dan setara kas.

Tabel berikut merinci sisa jangka kontrak Grup untuk liabilitas keuangan non-derivatif dengan periode pembayaran yang disepakati. Tabel telah disusun berdasarkan arus kas tak terdiskonto dari liabilitas keuangan berdasarkan tanggal terawal dimana Grup dapat diminta untuk membayar. Tabel mencakup arus kas pembayaran bunga dan pokok. Sepanjang arus bunga tingkat mengambang, jumlah tidak didiskontokan berasal dari kurva suku bunga pada akhir periode pelaporan. Jatuh tempo kontrak didasarkan pada tanggal yang paling awal di mana Grup dapat diminta untuk membayar.

iv. Liquidity risk management

The ultimate responsibility for liquidity risk management rests with the Board of Directors, which has built an appropriate liquidity risk management framework for the management of the Group's short, medium and long-term funding and liquidity management requirements. The Group manages liquidity risk by maintaining adequate reserves, banking facilities and reserve borrowing facilities by continuously monitoring forecast and actual cashflows and matching the maturity profiles of financial assets and liabilities.

The Group maintains sufficient funds to finance its ongoing working capital requirements, whereas the funds are placed in cash and cash equivalents.

The following tables detail the Group's remaining contractual maturity for its non-derivative financial liabilities with agreed repayment periods. The tables have been drawn up based on the undiscounted cashflows of financial liabilities based on the earliest date on which the Group can be required to pay. The tables include both interest and principal cashflows. To the extent that interest flows are floating rate, the undiscounted amount is derived from interest rate curves at the end of the reporting period. The contractual maturity is based on the earliest date on which the Group may be required to pay.

	Tingkat bunga rata-rata tertimbang efektif/ Weighted average effective interest rate	Kurang dari 1 bulan/ Less than 1 month	1-3 bulan/ 1-3 months	3 bulan sampai 1 tahun/ 3 months to 1 year	1-5 tahun/ 1-5 years	Lebih dari 5 tahun/ More than 5 years	Jumlah/ Total	
	%	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	
30 Juni 2024								June 30, 2024
Tanpa bunga								Non-interest bearing
Utang usaha		96.983	13.173	32.273	-	-	142.429	Trade accounts payable
Utang lain-lain		1.040	-	-	-	-	1.040	Other payables
Utang dividen		957	-	-	-	-	957	Dividends payable
Beban yang masih harus dibayar		-	12.224	-	-	-	12.224	Accrued expenses
Instrumen suku bunga variabel								Variable interest rate instruments
Utang bank - jangka pendek	7,33 - 8,33	-	-	47.351	-	-	47.351	Bank loan - short term
Pinjaman jangka panjang - pihak ketiga	8,44 - 11,94 *)	-	-	10.272	67.486	125.938	203.696	Long-term loans - third parties
Liabilitas sewa	4,5 - 11,3	-	-	9.110	13.070	596	22.776	Lease liabilities
Jumlah		<u>98.980</u>	<u>25.397</u>	<u>99.006</u>	<u>80.556</u>	<u>126.534</u>	<u>430.473</u>	Total

*) Tingkat bunga rata-rata tertimbang efektif untuk pinjaman jangka panjang pihak ketiga dalam mata uang rupiah masing-masing sebesar 8,44% - 11,94% pada tanggal 30 Juni 2024/
Weighted average effective interest rate of long-term loan to third parties in currency Rupiah are 8.44% - 11.94% of June 30, 2024

PT PETROSEA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2024 DAN 2023 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023 DAN 2022 – Lanjutan

PT PETROSEA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED
JUNE 30, 2024 AND 2023 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2023 AND 2022 - Continued

	Tingkat bunga rata-rata tertimbang efektif/ Weighted average effective interest rate	Kurang dari 1 bulan/ Less than 1 month	1-3 bulan/ 1-3 months	3 bulan sampai 1 tahun/ 3 months to 1 year	1-5 tahun/ 1-5 years	Lebih dari 5 tahun/ More than 5 years	Jumlah/ Total	
	%	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	
31 December 2023								December 31, 2023
Tanpa bunga								Non-interest bearing
Utang usaha		89.668	25.994	24.331	-	-	139.993	Trade accounts payable
Utang lain-lain		581	-	-	-	-	581	Other payables
Utang dividen		928	-	-	-	-	928	Dividends payable
Beban yang masih harus dibayar		-	18.042	-	-	-	18.042	Accrued expenses
Instrumen suku bunga variabel								Variable interest rate instruments
Utang bank - jangka pendek	5,38 - 8,14	-	-	39.852	-	-	39.852	Bank loan - short term
Pinjaman jangka panjang - pihak ketiga	8,23 - 11,50*)	-	-	41.996	163.076	-	205.072	Long-term loans - third parties
Liabilitas sewa	5,99 - 11,00	-	-	12.891	16.740	1.201	30.832	Lease liabilities
Jumlah		91.177	44.036	119.070	179.816	1.201	435.300	Total
31 December 2022								December 31, 2022
Tanpa bunga								Non-interest bearing
Utang usaha		76.748	16.196	13.898	11.693	-	118.535	Trade accounts payable
Utang lain-lain		1.656	-	-	-	-	1.656	Other payables
Utang dividen		287	-	-	-	-	287	Dividends payable
Beban yang masih harus dibayar		-	18.311	641	-	-	18.952	Accrued expenses
Instrumen suku bunga variabel								Variable interest rate instruments
Utang bank - jangka pendek	4,07 - 6,48	-	-	45.348	-	-	45.348	Bank loan - short term
Pinjaman jangka panjang - pihak ketiga	2,06 - 7,50 *)	-	-	16.505	30.061	-	46.566	Long-term loans - third parties
Liabilitas sewa	4,28 - 5,94	-	-	12.628	17.458	902	30.988	Lease liabilities
Jumlah		78.691	34.507	89.020	59.212	902	262.332	Total

*) Tingkat bunga rata-rata tertimbang efektif untuk pinjaman jangka panjang pihak ketiga dalam mata uang rupiah masing-masing sebesar 8,23% - 11,50% dan 2,06% - 7,50% pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022/

Weighted average effective interest rate of long-term loan to third parties in currency Rupiah are 8.23% - 11.50% and 2.06% - 7.50% of December 31, 2023 and 2022

Tabel berikut merinci estimasi jatuh tempo instrumen keuangan non-derivatif Grup. Tabel tersebut telah disusun berdasarkan jatuh tempo kontrak terdiskonto dari aset keuangan termasuk bunga yang akan diperoleh dari aset tersebut. Dimasukkannya aset keuangan non-derivatif diperlukan dalam rangka untuk memahami manajemen risiko likuiditas Grup dimana likuiditas dikelola atas dasar aset dan liabilitas bersih.

The following table details the Group's expected maturity for its non-derivative financial assets. The table has been drawn up based on the undiscounted contractual maturities of the financial assets including interest that will be earned on those assets. The inclusion of information on non-derivative financial assets is necessary in order to understand the Group's liquidity risk management as the liquidity is managed on a net asset and liability basis.

	Tingkat bunga rata-rata tertimbang efektif/ Weighted average effective interest rate	Kurang dari 1 bulan/ Less than 1 month	1-3 bulan/ 1-3 months	3 bulan sampai 1 tahun/ 3 months to 1 year	1-5 tahun/ 1-5 years	Lebih dari 5 tahun/ More than 5 years	Jumlah/ Total	
	%	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	
30 Juni 2024								June 30, 2024
Tanpa bunga								Non-interest bearing
Piutang usaha		131.889	21.939	11.778	-	-	165.606	Trade accounts receivable
Piutang lain-lain		1.080	-	-	37.475	-	38.555	Other accounts receivable
Instrumen suku bunga variabel								Variable interest rate instruments
Bank	0,00 - 3,00	89.408	-	-	-	-	89.408	Cash in banks
Rekening bank dibatasi penggunaannya	2,25	-	-	-	-	682	682	Restricted cash in banks
Instrumen tingkat bunga tetap								Fixed interest rate instruments
Deposito berjangka	2,25 - 6,25 *)	-	-	3.048	-	-	3.048	Time deposits
Jumlah		222.377	21.939	14.826	37.475	682	297.299	Total
31 Desember 2023								December 31, 2023
Tanpa bunga								Non-interest bearing
Rekening bank dibatasi penggunaannya		-	2.828	-	-	-	2.828	Restricted cash in banks
Piutang usaha		104.502	39.010	6.301	-	-	149.813	Trade accounts receivable
Piutang lain-lain		49.242	-	-	638	-	49.880	Other accounts receivable
Instrumen suku bunga variabel								Variable interest rate instruments
Bank	0,00 - 3,00	67.104	-	-	-	-	67.104	Cash in banks
Rekening bank dibatasi penggunaannya	2,25	-	-	-	-	720	720	Restricted cash in banks
Instrumen tingkat bunga tetap								Fixed interest rate instruments
Deposito berjangka	2,25 - 5,50 *)	-	-	6.235	-	-	6.235	Time deposits
Jumlah		220.848	41.838	12.536	638	720	276.580	Total

*) Tingkat bunga rata-rata tertimbang efektif untuk deposito berjangka dalam mata uang Rupiah masing-masing sebesar 2,25% - 6,25% pada tanggal 30 Juni 2024 dan sebesar 2,25% - 5,50% pada tanggal 31 Desember 2023/

Weighted average effective interest rate of time deposit in Rupiah currency are 2.25% - 6.25% as of June 30, 2024 and 2.25% - 5.5% as of December 31, 2023

	Tingkat bunga rata-rata tertimbang efektif/ Weighted average effective interest rate	Kurang dari 1 bulan/ Less than 1 month	1-3 bulan/ 1-3 months	3 bulan sampai 1 tahun/ 3 months to 1 year	1-5 tahun/ 1-5 years	Lebih dari 5 tahun/ More than 5 years	Jumlah/ Total	
	%	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	
31 Desember 2022								December 31, 2022
Tanpa bunga								Non-interest bearing
Piutang usaha	-	96.946	2.730	6.775	-	-	106.451	Trade accounts receivable
Piutang lain-lain		313	-	557	-	-	870	Other accounts receivable
Instrumen suku bunga variabel								Variable interest rate instruments
Bank	0,00 - 3,00	55.480	-	-	-	-	55.480	Cash in banks
Instrumen tingkat bunga tetap								Fixed interest rate instruments
Deposito berjangka	2,2 - 4,7 *)	-	-	6.374	-	-	6.374	Time deposits
Piutang lain-lain	7,80	1.053	3.161	14.827	35.930	-	54.970	Other accounts receivable
Jumlah		153.792	5.891	28.533	35.930	-	224.145	Total

*) Tingkat bunga rata-rata tertimbang efektif untuk deposito berjangka dalam mata uang Rupiah masing-masing sebesar 2,20% - 4,70% pada tanggal 31 Desember 2022/
Weighted average effective interest rate of time deposit in Rupiah currency are 2.20% - 4.70% as of December 31, 2022

Jumlah yang termasuk di atas untuk instrumen suku bunga baik untuk variabel non-derivatif aset keuangan maupun kewajiban dapat berubah jika perubahan tingkat suku bunga variabel berbeda dengan estimasi suku bunga yang ditentukan pada akhir periode pelaporan.

The amounts included above for variable interest rate instruments for both non-derivative financial assets and liabilities is subject to change if changes in variable interest rates differ to those estimates of interest rates determined at the end of the reporting period.

c. Manajemen modal

Grup mengelola modalnya untuk memastikan mereka dapat mempertahankan kelangsungan usaha disamping memaksimalkan pengembalian kepada pemegang saham melalui optimalisasi saldo liabilitas dan ekuitas. Strategi Grup tetap tidak berubah dari 2023. Struktur modal Grup terdiri dari utang termasuk utang bank jangka pendek, utang jangka panjang dari pihak berelasi, utang jangka panjang dari pihak ketiga dan liabilitas sewa yang diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian interim, kas dan setara kas dan modal tersedia bagi para pemegang saham dari Perusahaan, terdiri dari modal saham dan laba ditahan sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 24 atas laporan keuangan konsolidasian interim.

Grup tidak tunduk pada persyaratan modal yang ditetapkan secara eksternal, kecuali terkait dengan perjanjian pinjaman.

Dewan Direksi Grup secara berkala melakukan reviu struktur permodalan Grup. Sebagai bagian dari reviu ini, Dewan Direksi mempertimbangkan biaya permodalan dan risiko yang berhubungan.

Gearing ratio pada tanggal 30 Juni 2024 serta 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	30 Juni/ June 30, 2024 US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2023 US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2022 US\$ '000	
Pinjaman:				Debt:
Pinjaman jangka panjang dari pihak ketiga	185.476	187.195	44.122	Long-term loans from third parties
Utang bank	44.353	37.127	45.146	Bank loan
Liabilitas sewa	19.537	26.419	26.458	Lease liabilities
Jumlah pinjaman	249.366	250.741	115.726	Total debt
Kas dan setara kas	(92.271)	(72.987)	(61.760)	Cash and cash equivalents
Pinjaman - bersih	157.095	177.754	53.966	Net debt
Ekuitas	241.580	235.630	297.991	Equity
Rasio pinjaman bersih terhadap modal	65%	75%	18%	Net debt to equity ratio

c. Capital management

The Group manages its capital to ensure that it will be able to continue as a going concern while maximizing the return to stakeholders through the optimization of debt and equity balance. The Group's strategy remains unchanged from 2023. The capital structure of the Group consists of debt, which includes short-term bank loans, long-term related party loan and lease liabilities disclosed in the notes to interim consolidated financial statements, cash and cash equivalents and equity attributable to the owner of the Company, comprising issued capital and retained earnings as disclosed in Note 24 to the interim consolidated financial statements.

The Group is not subject to any externally imposed capital requirements, except those related with loan covenants.

The Board of Directors of the Group periodically reviews the Group's capital structure. As part of this review, the Board of Directors considers the cost of capital and related risk.

The gearing ratio as of June 30, 2024, as well as December 31, 2023 and 2022 are as follows:

d. Nilai wajar instrumen keuangan

Kecuali disebutkan pada tabel berikut ini, manajemen berpendapat bahwa nilai tercatat aset dan liabilitas keuangan yang dicatat sebesar biaya perolehan diamortisasi dalam laporan keuangan konsolidasian interim mendekati nilai wajarnya karena bersifat jangka pendek atau memakai suku bunga pasar.

Hirarki pengukuran nilai wajar atas aset dan liabilitas Grup

Tabel berikut ini merangkum nilai tercatat dan nilai wajar aset dan liabilitas, yang dianalisis antara keduanya serta nilai wajar didasarkan pada:

- Level 1 pengukuran nilai wajar adalah yang berasal dari harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;
- Level 2 pengukuran nilai wajar adalah yang berasal dari input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Level 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya deviasi dari harga); dan
- Level 3 pengukuran nilai wajar adalah yang berasal dari teknik penilaian yang mencakup input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi).

d. Fair value of financial instruments

Except as detailed in the following table, management considers that the carrying amounts of financial assets and financial liabilities recorded at amortized cost in the interim consolidated financial statements approximate their fair values because of their short-term maturities or they carry market interest rate.

Fair value measurement hierarchy of the Group's assets and liabilities

The following tables summarize the carrying amounts and fair values of the assets and liabilities, analyzed among those whose fair value is based on:

- Level 1 fair value measurements are those derived from quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities;
- Level 2 fair value measurements are those derived from inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the asset or liability, either directly (i.e. as prices) or indirectly (i.e. derived from prices); and
- Level 3 fair value measurements are those derived from valuation techniques that include inputs for the asset or liability that are not based on observable market data (unobservable inputs).

2024	Level 1 US\$ '000	Level 2 US\$ '000	Level 3 US\$ '000	Jumlah/ Total US\$ '000	2024
Aset yang diukur pada nilai wajar					Assets measured at fair value
Aset keuangan pada FVTPL					Financial assets at FVTPL
Aset keuangan lainnya	383	-	-	383	Other financial assets
2023	Level 1 US\$ '000	Level 2 US\$ '000	Level 3 US\$ '000	Jumlah/ Total US\$ '000	2023
Aset yang diukur pada nilai wajar					Assets measured at fair value
Aset keuangan pada FVTPL					Financial assets at FVTPL
Aset keuangan lainnya	414	-	-	414	Other financial assets
2022	Level 1 US\$ '000	Level 2 US\$ '000	Level 3 US\$ '000	Jumlah/ Total US\$ '000	2022
Aset yang diukur pada nilai wajar					Assets measured at fair value
Aset keuangan pada FVTPL					Financial assets at FVTPL
Aset keuangan lainnya	356	-	-	356	Other financial assets

40. PENGUNGKAPAN TAMBAHAN ATAS AKTIVITAS INVESTASI NONKAS

Grup melakukan aktivitas investasi yang tidak mempengaruhi kas dan setara kas dan tidak termasuk dalam laporan arus kas konsolidasian dengan rincian sebagai berikut:

	2024 (Enam bulan/ (Six-month) US\$ '000	2023 (Enam bulan/ (Six-month) (Tidak diaudit/ (Unaudited) US\$ '000	2023 (Satu tahun/ (One year) US\$ '000	2022 (Satu tahun/ (One year) US\$ '000	
Penambahan utang untuk pembelian aset tetap	2.010	6.151	6.151	16.351	Increase in liabilities for purchase of property, plant and equipment
Uang muka pembelian aset tetap	-	325	-	4.805	Advance for purchase of property, plant and equipment
Jumlah	<u>2.010</u>	<u>6.476</u>	<u>6.151</u>	<u>21.156</u>	Total

40. SUPPLEMENTAL DISCLOSURES ON NONCASH INVESTING ACTIVITY

Group has investing activity that did not affect cash and cash equivalents and hence not included in the interim consolidated statements of cashflows with the details as follows:

41. PERISTIWA-PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

Perubahan Susunan Pemegang Saham

Sejak tanggal 30 Agustus 2024, susunan pemegang saham Perusahaan berdasarkan informasi dari PT Datindo Entrycom sebagai Biro Administrasi Efek Perusahaan adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah saham/ Number of shares	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership %	Jumlah modal disetor/ Total paid-up capital US\$ '000	Name of Stockholders
PT Kreasi Jasa Persada	418.762.400	41,52	13.883	PT Kreasi Jasa Persada
PT Caraka Reksa Optima	364.650.357	36,15	12.089	PT Caraka Reksa Optima
Erwin Ciputra (Komisaris)	451.400	0,04	15	Erwin Ciputra (Commissioner)
Kartika Hendrawan (Direktur)	88.800	0,01	3	Kartika Hendrawan (Director)
Michael (Presiden Direktur)	60.000	0,01	2	Michael (President Director)
Masyarakat (masing-masing dibawah 5%)	<u>224.592.043</u>	<u>22,27</u>	<u>7.446</u>	Public (each below 5%)
Jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh	<u>1.008.605.000</u>	<u>100,00</u>	<u>33.438</u>	Number of shares issued and fully paid

Sejak tanggal 30 September 2024, susunan pemegang saham Perusahaan berdasarkan informasi dari PT Datindo Entrycom sebagai Biro Administrasi Efek Perusahaan adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah saham/ Number of shares	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership %	Jumlah modal disetor/ Total paid-up capital US\$ '000	Name of Stockholders
PT Kreasi Jasa Persada	418.762.400	41,52	13.883	PT Kreasi Jasa Persada
PT Caraka Reksa Optima	344.650.357	34,17	11.426	PT Caraka Reksa Optima
Erwin Ciputra (Komisaris)	451.400	0,04	15	Erwin Ciputra (Commissioner)
Kartika Hendrawan (Direktur)	88.800	0,01	3	Kartika Hendrawan (Director)
Michael (Presiden Direktur)	60.000	0,01	2	Michael (President Director)
Masyarakat (masing-masing dibawah 5%)	<u>244.592.043</u>	<u>24,25</u>	<u>8.109</u>	Public (each below 5%)
Jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh	<u>1.008.605.000</u>	<u>100,00</u>	<u>33.438</u>	Number of shares issued and fully paid

41. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD

Changes in the Composition of Shareholders

As of August 30, 2024, the composition of the Company's shareholders based on information from PT Datindo Entrycom as Company's Bureau of Securities Administration is as follows:

As of September 30, 2024, the composition of the Company's shareholders based on information from PT Datindo Entrycom as Company's Bureau of Securities Administration is as follows:

Penambahan Fasilitas Utang Jangka Panjang dari Pihak Ketiga

Pada tanggal 23 Juli 2024, berdasarkan Surat No. 10526/GBK/2024, BCA telah memberikan persetujuan terkait dengan adanya rencana Perusahaan untuk penambahan fasilitas di Mandiri dan/atau PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) sebesar ekuivalen US\$ 200 juta.

Berdasarkan Surat Persetujuan Pemberian Kredit ("SPPK") Sindikasi pada tanggal 30 Agustus 2024, BNI menyetujui pengajuan fasilitas kredit Perusahaan sebesar Rp 2.325 miliar (setara dengan US\$ 151 juta) yang akan digunakan untuk membiayai *capital expenditure* dari bisnis Perusahaan. Jangka waktu fasilitas ini adalah 96 bulan dengan bunga sebesar JIBOR 3 bulan ditambah margin sebesar 1,90% per tahun.

Pernyataan Pendaftaran I dan II untuk Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi dan Sukuk Ijarah

Pada tanggal 18 September 2024, Perusahaan telah melakukan penyampaian pernyataan pendaftaran ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi dan Sukuk Ijarah terkait dengan (i) Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Petrosea dengan target dana yang dihimpun sebesar Rp 2 triliun (setara dengan US\$ 130 juta) ("Obligasi Berkelanjutan") di mana dalam rangka penawaran umum berkelanjutan tersebut, Perusahaan akan menerbitkan dan menawarkan Obligasi berkelanjutan I Petrosea Tahap I Tahun 2024 dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp 1 triliun (setara dengan US\$ 65 juta) ("Obligasi"); dan (ii) Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Petrosea dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp 1 triliun (setara dengan US\$ 65 juta) ("Sukuk Ijarah Berkelanjutan") di mana dalam rangka penawaran umum berkelanjutan tersebut, Perusahaan akan menerbitkan dan menawarkan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Petrosea Tahap I Tahun 2024 dengan sisa imbalan ijarah sebanyak-banyaknya sebesar Rp 500 miliar (setara dengan US\$ 32,5 juta) ("Sukuk Ijarah"). Pada tanggal 14 Oktober 2024, Perusahaan telah melakukan pernyataan pendaftaran kedua ke OJK untuk Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi dan Sukuk Ijarah terkait.

Pendirian Entitas Anak Baru

Perusahaan bersama-sama dengan PTRKN, entitas anak Perusahaan, mendirikan entitas anak baru yaitu PT Petrosea Infrastruktur Nusantara (PTPIN) berdasarkan Akta No. 83 tertanggal 30 September 2024 yang dibuat dihadapan Ungke Mulawanti, S.H., M.Kn., Notaris di Bekasi, dan telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui keputusan No. AHU-0079017.AH.01.01 tanggal 8 Oktober 2024.

Additional Facility from Long-term Loan from Third Party

On July 23, 2024, based on Letter No. 10526/GBK/2024, BCA has granted approval for the Company's plan to add facilities at Mandiri and/or PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) amounted equivalent to US\$ 200 million.

Based on Syndicated *Surat Persetujuan Pemberian Kredit* ("SPPK") on August 30, 2024, BNI approved credit facility application from the Company amounted to Rp 2,325 billion (equivalent to US\$ 151 million) which will be used to finance the Company's business capital expenditure. Term of this facility is 96 months with interest amounted to three-months JIBOR plus margin of 1.90% per annum.

Registration Statement I and II for Public Offering of Continuous Bonds and Sukuk Ijarah

On September 18 2024, the Company has submitted the registration statement to Financial Services Authority (OJK) for Public Offering of Continuous Bonds and Sukuk Ijarah related to (i) Public Offering Continuous Bonds I Petrosea with a target of funds to be raised of Rp 2 trillion (equivalent to US\$ 130 million) ("Continuous Bonds") in which the framework of the continuous public offering, the Company will issue and offer Continuous Bonds I Petrosea Phase I Year 2024 with maximum principal amounting to Rp 1 trillion (equivalent to US\$ 65 million) ("Bonds"); and (ii) Public Offering Continuous Sukuk Ijarah I Petrosea with a target of funds to be raised of Rp 1 trillion (equivalent to US\$ 65 million) ("Continuous Sukuk Ijarah") in which the framework of the continuous public offering, the Company will issue and offer Continuous Sukuk Ijarah I Petrosea Phase I Year 2024 with maximum remaining Ijarah amounting to Rp 500 billion (equivalent to US\$ 32.5 million) ("Sukuk Ijarah"). On October 14, 2024, the Company has submitted the second registration statement to OJK for the related Public Offering of Continuous Bonds and Sukuk Ijarah.

Establishment of a New Subsidiary

The Company together with PTRKN, a subsidiary of the Company, established a new subsidiary namely PT Petrosea Infrastruktur Nusantara (PTPIN) under Deed No. 83 dated September 30, 2024 made before Ungke Mulawanti, S.H., M.Kn., Notary in Bekasi, and have obtained approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through its Decree No. AHU-0079017.AH.01.01 dated October 8, 2024.

Berdasarkan akta, dari modal dasar sejumlah Rp 20.000.000 ribu (setara dengan US\$ 1,32 juta), yang terbagi menjadi 20.000 lembar saham, telah ditempatkan oleh para pemegang saham dan disetor dengan penuh sebanyak 5.000 lembar saham atau sejumlah Rp 5.000.000 ribu (setara dengan US\$ 330,29 ribu), di mana sebanyak 4.995 lembar saham atau sejumlah Rp 4.995.000 ribu (setara dengan US\$ 329,96 ribu) dimiliki oleh Perusahaan, serta sebanyak 5 lembar saham atau sejumlah Rp 5.000 ribu (setara dengan US\$ 330) dimiliki oleh PTRKN.

Ruang lingkup kegiatan PTPIN meliputi aktivitas keuangan dan asuransi, serta aktivitas profesional, ilmiah dan teknis.

42. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM

Sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi dan Sukuk Ijarah PT Petrosea Tbk, Perusahaan menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian interim untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2024 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 untuk menyesuaikan pengungkapan dengan peraturan pasar modal yang berlaku. Perubahan dan penambahan pengungkapan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Laporan posisi keuangan konsolidasian interim tentang penambahan referensi atas liabilitas jangka panjang lainnya.
- b. Catatan 6b tentang penambahan pengungkapan atas substansi piutang lain-lain.
- c. Catatan 9 tentang penambahan pengungkapan atas rincian SKPLB.
- d. Catatan 11 tentang penambahan pengungkapan atas substansi klasifikasi aset lainnya.
- e. Catatan 22b tentang penambahan pengungkapan atas substansi liabilitas jangka panjang lainnya..
- f. Catatan 25 tentang perubahan pengungkapan rincian pelanggan dengan transaksi lebih dari 10% dari jumlah nilai pendapatan konsolidasian.
- g. Catatan 34 tentang penambahan pengungkapan atas nomor dan tanggal laporan KJPP.
- h. Catatan 41 tentang penambahan dan penyesuaian pengungkapan peristiwa-peristiwa setelah tanggal pelaporan.

According to the deed, from the authorized capital of Rp 20,000,000 thousand (equivalent to US\$ 1.32 million), which divided into 20,000 shares, have been issued and fully paid for 5,000 shares or amounting to Rp 5,000,000 thousand (equivalent to US\$ 330.29 thousand), of which 4,995 shares or amounting to Rp 4,995,000 thousand (equivalent to US\$ 329.96 thousand) is owned by the Company, as well as 5 shares or amounting to Rp 5,000 thousand (equivalent to US\$ 330) is owned by PTRKN.

Scope of PTPIN's activities includes financial and insurance activities, as well as professional, scientific and technical activities.

42. REISSUANCE OF INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

In connection with the Public Offering of Continuous Bonds and Sukuk Ijarah of PT Petrosea Tbk, the Company reissued the interim consolidated financial statements for the six-month periods ended June 30, 2024 and for the years ended December 31, 2023 and 2022 to conform with the disclosures with prevailing capital market regulations. The changes and additional disclosures are as follows:

- a. Interim consolidated statements of financial position concerning additional reference of other long-term liabilities.
- b. Note 6b concerning additional disclosure of the substance of other accounts receivable.
- c. Note 9 concerning additional disclosure of SKPLB's details.
- d. Note 11 concerning additional disclosure of substance of other assets' classification.
- e. Note 22b concerning additional disclosure of the substance of other long-term liabilities.
- f. Note 25 concerning change disclosure of customers having transactions of more than 10% of total consolidated revenues.
- g. Note 34 concerning additional disclosure of the number dan date of the KJPP's report.
- h. Note 41 concerning additional and changes of events after the reporting period.

**43. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN DAN
PERSETUJUAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM**

Penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian interim dari halaman 1 sampai 140 merupakan tanggung jawab manajemen, dan telah disetujui oleh Direksi untuk diterbitkan pada tanggal 1 November 2024.

**43. MANAGEMENT'S RESPONSIBILITY AND
APPROVAL OF INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

The preparation and fair presentation of the interim consolidated financial statements on pages 1 to 140 were the responsibilities of the management and were approved by the Directors and authorized for issue at November 1, 2024.



PT PETROSEA TBK

Indy Bintaro Office Park, Building B
Jl. Boulevard Bintaro Jaya Blok B7/A6
Sektor VII, CBD Bintaro Jaya
Tangerang Selatan 15224
Telp.: 021-29770999
Fax: 29770988

Email: corporate.secretary@petrosea.com

www.petrosea.com